



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2020**

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

**“MENUMBUHKAN INDUSTRI HILIR YANG MENDUKUNG
EKONOMI KERAKYATAN DAN EKONOMI KAWASAN
DALAM RANGKA MENDUKUNG PERCEPATAN
PEMULIHAN EKONOMI DAN
REFORMASI SOSIAL“**

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur**



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat mempunyai tugas dan wewenang menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah Kabupaten / Kota dan antara Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten / Kota di wilayahnya;
- b. bahwa untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyusun rencana kerja pemerintahan daerah tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari arah tematik pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 periode ke II dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan dan Program Strategis Nasional serta pedoman penyusunan RKPD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang memuat :

- a. rancangan kerangka ekonomi Daerah.
- b. prioritas pembangunan Daerah.
- c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- BAB I. Pendahuluan;
- BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Dearah;
- BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten / Kota;
- BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- BAB VIII. Penutup.

Pasal 3

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 selanjutnya dilakukan pemetaan sesuai nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Pasal 4

Hasil pemetaan program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Rincian lebih lanjut RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi :

- (1) pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;
- (2) pedoman penyelarasan prioritas pembangunan tahun 2021 Kabupaten / Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dan;
- (3) pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;

Pasal 7

Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 kepada Menteri Dalam Negeri bersamaan dengan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juli 2020
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juli 2020

ttd


Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ISRAN NOOR

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. ROZANI ERAWADI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197101241997031007

LAMPIRAN I

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2020**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

**“MENUMBUHKAN INDUSTRI HILIR YANG MENDUKUNG
EKONOMI KERAKYATAN DAN EKONOMI KAWASAN
DALAM RANGKA MENDUKUNG PERCEPATAN
PEMULIHAN EKONOMI DAN
REFORMASI SOSIAL“**

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dapat dirampungkan. Dokumen RKPD Provinsi Tahun 2021 disusun dengan mempedomani Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional tahun 2021. Dokumen RKPD ini memuat pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kalimantan Timur tahun 2021.

Dalam proses penyusunannya, beberapa tahapan telah dilalui sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Untuk melaksanakan sesuai tahapan tersebut, berbagai kendala dan tantangan dihadapi Bappeda dalam proses penyusunan dokumen ini. Seperti kita ketahui bahwa Perencanaan pembangunan Daerah harus berorientasi pada substansi, dan menggunakan pendekatan holistik-tematik; integratif dan spasial. Untuk melaksanakan pendekatan tersebut tim penyusun memerlukan banyak forum atau pertemuan untuk berkoordinasi dan berdiskusi, dengan semua pihak yang terkait. Seperti kita ketahui, pada pertengahan Maret 2020 terjadinya *Pandemic Covid-19*, yang memaksa semua individu untuk menjaga jarak fisik untuk pencegahan penularan penyakit tersebut. Karena adanya keterbatasan tersebut, maka forum atau pertemuan untuk berkoordinasi dan berdiskusi tidak dapat dilakukan dan di ganti dengan metode Virtual Meeting. Sebagai dampak hal tersebut, penetapan RKPD ini sedikit mengalami keterlambatan yang seharusnya di akhir Bulan Juni 2020, menjadi pertengahan Bulan Juli 2020.

Dokumen RKPD ini merupakan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Dengan Tema Pembangunan "**Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**", maka prioritas dan fokus pembangunan diarahkan kepada penguatan program/kegiatan yang mengarah langsung kepada peningkatan hilirisasi industri dan ekonomi kerakyatan. Selain itu upaya untuk pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak Covid-19 menjadi perhatian penting di setiap urusan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya dokumen RKPD ini akan menjadi dasar dan pedoman untuk penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021.

Kami menyadari bahwa dokumen RKPD belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Demikian dokumen RKPD ini kami susun, selanjutnya kami sangat mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan RKPD dimasa yang akan datang untuk mewujudkan Kalimantan Timur Berdaulat.

Samarinda, Juli 2020
Kepala Bappeda,

Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, MM

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	5
1.4. Maksud dan Tujuan	6
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	7
BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Kondisi Umum Daerah	1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	7
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	33
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	50
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	71
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	81
2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	81
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	85
2.3.3 Isu Strategis Daerah	87
BAB 3. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	1
3.1.1 Kinerja Ekonomi Daerah, Peluang, Tantangan, dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional pada RKP 2021	1
3.1.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Kalimantan Timur	7
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	12
3.2.1 Penerimaan Daerah	12
3.2.2 Belanja Wajib dan Mengikat Daerah	16
3.2.3 Kapasitas Riil Keuangan Daerah	16
3.2.4 Belanja Daerah	17
3.2.5 Pembiayaan Daerah	18
BAB 4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	1
4.1.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021	4
4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional	4
4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2021	6
4.3 Inovasi Pembangunan Daerah	24

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
BAB 5. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota	1
5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota	3
5.2.1 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kota Samarinda	4
5.2.2 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kota Balikpapan	5
5.2.3 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kota Bontang	6
5.2.4 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Kutai Kartanegara	8
5.2.5 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Kutai Timur	9
5.2.6 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Kutai Barat	10
5.2.7 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Paser	11
5.2.8 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Penajam Paser Utara	13
5.2.9 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Berau	14
5.2.10 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Mahakam Ulu	15
BAB 6. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	1
BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	1
BAB 8. P E N U T U P	1

DAFTAR TABEL

		<u>Halaman</u>
Tabel 2.1	Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur	3
Tabel 2.2	Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	4
Tabel 2.3	Luas Wilayah, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	5
Tabel 2.4	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)	8
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Persen)	10
Tabel 2.6	Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2019	12
Tabel 2.7	Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	12
Tabel 2.8	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	13
Tabel 2.9	Nilai PDR (Atas Dasarh Harga Konstan) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2019 (%)	14
Tabel 2.10	Tiga kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019	15
Tabel 2.11	Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Pengeluaran Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019	16
Tabel 2.12	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Rp Ribu)	18
Tabel 2.13	Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	20
Tabel 2.14	Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan Makanan Menurut Daerah Tahun 2019	20
Tabel 2.15	Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (%)	21
Tabel 2.16	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Jiwa)	22
Tabel 2.17	Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	24
Tabel 2.18	Karya Budaya di Provinsi Kalimantan Timur yang Telah Dipatenkan Tahun 2019	31
Tabel 2.19	Kekayaan Budaya yang Dimiliki Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	31
Tabel 2.20	Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	32
Tabel 2.21	Kondisi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	33
Tabel 2.22	Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	34
Tabel 2.23	Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	35

Tabel 2.24	Indikator Perguruan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	37
Tabel 2.25	Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	38
Tabel 2.26	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (%)	40
Tabel 2.27	Angka Penurunan Emisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2019	43
Tabel 2.28	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2109	44
Tabel 2.29	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	45
Tabel 2.30	Data Lahan Kritis Menurut Tingkat Kekritisan Lahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	45
Tabel 2.31	Produksi Pertambangan Unggulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	47
Tabel 2.32	Jumlah Proyek PMDN/PMA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	47
Tabel 2.33	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	48
Tabel 2.34	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	49
Tabel 2.35	Konsumsi Rumah Tangga Non Makanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	51
Tabel 2.36	Rata-rata Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (2012=100)	52
Tabel 2.37	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur Menurut Subsektor Tahun 2018-2019 (2012=100)	52
Tabel 2.38	Nilai Tukar Petani (NTP) Regional Kalimantan dan Nasional Menurut Subsektor Tahun 2019 (2012=100)	53
Tabel 2.39	Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan, dan Permukiman) terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013	53
Tabel 2.40	Panjang Jalan Menurut Status dan Jenis Permukaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	55
Tabel 2.41	Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	55
Tabel 2.42	Rencana Induk Pelabuhan Nasional di Kalimantan Timur Berdasarkan KP 432 Tahun 2017	56
Tabel 2.43	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	57
Tabel 2.44	Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Kalimantan Timur	58
Tabel 2.45	Pelanggan Listrik Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	59
Tabel 2.46	Luas Lahan Pertanian Yang Beririgasi Teknis di Kalimantan Timur Tahun 2018	59
Tabel 2.47	Daerah Rawan Banjir Kalimantan Timur	60

Tabel 2.48	Indikator Kinerja Perusahaan Air Minum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	62
Tabel 2.49	Penduduk Terlayani Air Bersih Tahun 2017-2019	63
Tabel 2.50	Status Peninjauan Kembali Perda RTRW Kabupaten/Kota	65
Tabel 2.51	Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	66
Tabel 2.52	Jumlah Demonstrasi Menurut Jenisnya Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	67
Tabel 2.53	Investasi Berdasarkan Sektor Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	68
Tabel 2.54	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	72
Tabel 2.55	Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2019	79
Tabel 2.56	Permasalahan Pembangunan Per Urusan	85
Tabel 3.1	Sasaran Ekonomi Makro Daerah	8
Tabel 3.2	Realisasi dan Target Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2021	15
Tabel 3.3	Pengeluaran Wajib dan Mengikat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	16
Tabel 3.4	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	17
Tabel 3.5	APBD Tahun 2019 dan Target Belanja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	18
Tabel 3.6	APBD Tahun 2020 dan Proyeksi Pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	18
Tabel 4.1	Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	2
Tabel 4.2	Indikator Sasaran Pembangunan RKP 2021	5
Tabel 4.3	Target RKP Tahun 2021 di Kalimantan Timur	5
Tabel 4.4	Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	8
Tabel 4.5	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan, Program Prioritas, Pagu Program Prioritas, dan Prioritas Nasional dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	11
Tabel 5.1	Target Makro dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2021	2
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan Belanja Langsung Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	3
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Timur	2
Tabel 7.2	Penetapan Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	3

DAFTAR GAMBAR

	<u>Halaman</u>
Gambar 1.1 Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	2
Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	6
Gambar 2.1 Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2035	2
Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	4
Gambar 2.3 Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	5
Gambar 2.4 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	7
Gambar 2.5 Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Persen)	8
Gambar 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Persen)	10
Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional Kalimantan Timur (%)	11
Gambar 2.8 Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	15
Gambar 2.9 Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (%)	17
Gambar 2.10 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)	18
Gambar 2.11 PDRB per Kapita Nasional dan Regional Kalimantan Tahun 2018-2019 (Juta Rupiah)	19
Gambar 2.12 Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional	22
Gambar 2.13 Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2018-2019	23
Gambar 2.14 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	24
Gambar 2.15 Indeks Pembangunan Manusia Regional Kalimantan dan Indonesia	25
Gambar 2.16 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Tahun)	26
Gambar 2.17 Rata-rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia	27
Gambar 2.18 Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Tahun)	27
Gambar 2.19 Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia	28
Gambar 2.20 Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Tahun)	28
Gambar 2.21 Umur Harapan Hdup Regional Kalimantan dan Indonesia (Tahun)	29
Gambar 2.22 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Ribu Rp)	30
Gambar 2.23 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Regional Kalimantan dan Indonesia (Ribu Rupiah)	30

DAFTAR GAMBAR

	<u>Halaman</u>
Gambar 2.24 Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (persen)	36
Gambar 2.25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	39
Gambar 2.26 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 (%)	39
Gambar 2.27 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	40
Gambar 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Kalimantan dan Indonesia	41
Gambar 2.29 Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	42
Gambar 2.30 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	43
Gambar 2.31 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (%)	46
Gambar 2.32 Produksi Pertambangan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Ton)	46
Gambar 2.33 Nilai Investasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	48
Gambar 2.34 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Rupiah)	50
Gambar 2.35 Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita Sebulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	51
Gambar 2.36 Produksi Tenaga Listrik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (MWh)	59
Gambar 2.37 Persentase Perbandingan Total Kapasitas PDAM Terpasang Terhadap Kebutuhan Air Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	62
Gambar 2.38 Persentase Demonstrasi Menurut Jenisnya Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 (%)	67
Gambar 2.39 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018	68
Gambar 2.40 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	70
Gambar 2.41 Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	71
Gambar 3.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	1
Gambar 3.2 Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2019 (%)	2
Gambar 3.3 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dan 2019 (%)	3
Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (%)	4
Gambar 3.5 Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (%)	5
Gambar 3.6 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Kalimantan Timur Tahun 2021	10

DAFTAR GAMBAR

	<u>Halaman</u>
Gambar 4.1 Pola Hubungan Antara Fokus Utama Pembangunan RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2018-2023	2
Gambar 4.2 Kerangka Pikir Perumusan Prioritas RKPD Kalimantan Timur Tahun 2021	7
Gambar 5.1 Jalan Akses APT Pranoto	5
Gambar 5.2 Pengembangan Kawasan Industri Karianganu di Balikpapan	6
Gambar 5.3 Kawasan Peruntukkan Perikanan di Kota Bontang	8
Gambar 5.4 Kawasan 3 Danau	9
Gambar 5.5 Lokus Pengembangan KEK Maloy Batuta Trans	10
Gambar 5.6 Areal Pengembangan Kawasan Perkebunan Karet di Kutai Barat	11
Gambar 5.7 Areal Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Paser	12
Gambar 5.8 Areal Pengembangan Kawasan Industri Buluminung di Kabupaten Penajam Paser Utara	13
Gambar 5.9 Pengembangan Kawasan Pariwisata di Maratua, Derawan dan Sekitarnya di Kabupaten Berau	15
Gambar 5.10 Peningkatan Aksesibilitas Jalan di Kawasan Perbatasan Mahakam Ulu	16

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2019-2023, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD 2021 ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Penyusunan RKPD 2021 juga mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

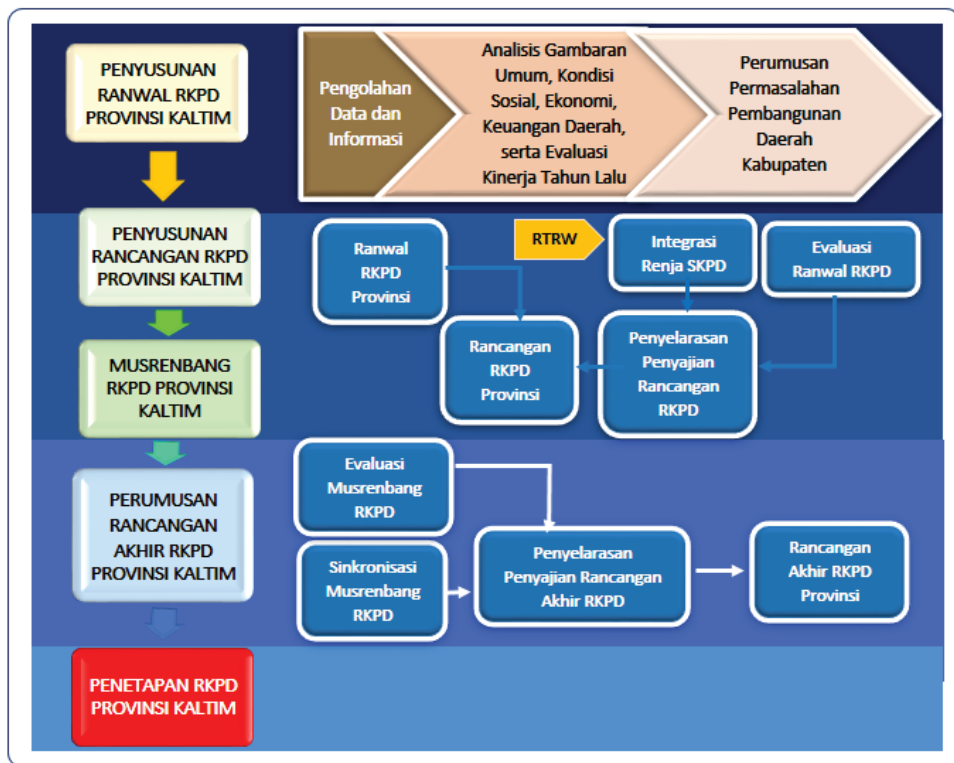
Dalam dokumen RKPD 2021, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan orientasi baru dalam perumusan Kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan tahun 2021, dengan mempertimbangkan perubahan kondisi kehidupan sosial ekonomi di daerah dampak dari Pandemi Covid-19. Dampak yang dirasakan Kalimantan Timur cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan melambatnya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industry, pariwisata, perdagangan dan jasa yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada gilirannya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

RKPD 2021 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat melalui upaya peningkatan sistem kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, ketahanan bencana, dan pemulihan ekonomi terkait dengan pengembangan industri dan peningkatan infrastruktur. Oleh karena itu, tema RKPD 2021 adalah ***“Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”***

Penyusunan RKPD 2021 dilakukan dengan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) melalui 6 (enam) tahapan, sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
3. Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur; dan
6. Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

Tahapan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 tersebut secara runut tergambar pada bagan alir sebagai berikut:



Gambar 1.1
Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

A. Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); serta
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

B. Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

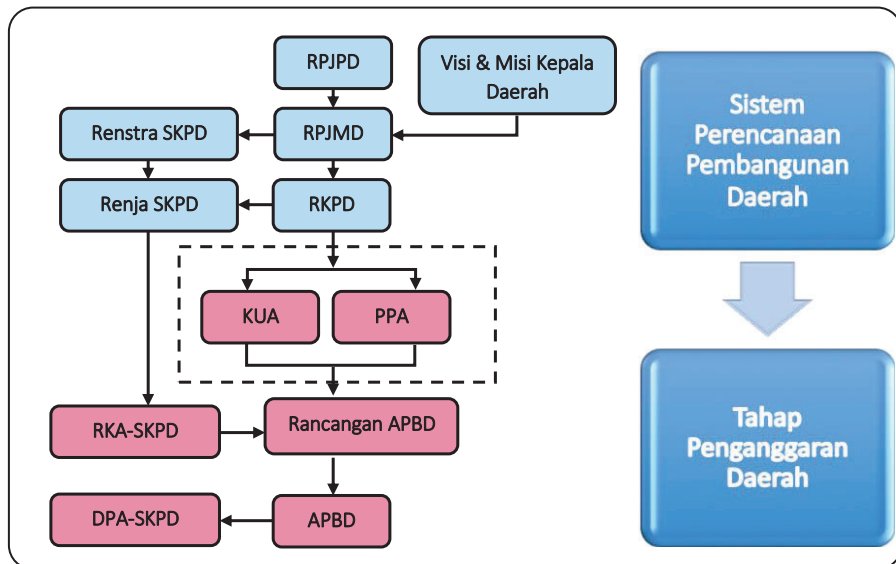
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1); dan
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem perencanaan pembangunan merupakan rangkaian dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang sinergis antara nasional dan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RKPD 2021 berpedoman pada :

- a. Kebijakan tahapan pelaksanaan RPJMD 2019-2023 tahun ketiga, yaitu penyalarsan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, serta penyalarsan prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota
- b. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, yaitu penyalarsan prioritas pembangunan, program dan kegiatan tahunan daerah dengan Tema, agenda pembangunan, sasaran pengembangan wilayah dan program strategis nasional dalam RKP.

Selanjutnya RKPD 2021 dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat daerah (Renja -PD), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

Dari gambar 1.2. tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan; serta
2. Merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggaran.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPKD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2021. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RPKD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, yaitu:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah selama ini.

BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi yang nantinya akan menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota.

BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan rencana kerja yang berisi tentang program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun perencanaan pembangunan (RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Mengemukakan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, bertujuan untuk memberi

panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII. Penutup

Mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD dan mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Proses pembangunan hilirisasi industri di Provinsi Kalimantan Timur perlu menjadi perhatian besar mengingat sektor industri pengolahan dapat menjadi penopang ekonomi yang *sustainable* untuk menggeser dominasi aktivitas pertambangan dan penggalian. Hal ini didasari dengan besarnya potensi keanekaragaman sumber daya alam, baik terbarukan maupun tak terbarukan. Sumber daya alam yang terkenal diantaranya sumber daya mineral berupa tambang batubara dan minyak bumi (SDA tak terbarukan). Sedangkan SDA terbarukan yang dapat memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi hijau seperti kelapa sawit, karet, padi, perikanan, peternakan dan pariwisata. Maka, untuk meningkatkan nilai tambah produk, diperlukan hilirisasi industri yang dapat menyentuh ekonomi kerakyatan hingga berdampak pada ekonomi kawasan.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Proses perumusan kebijakan pembangunan daerah harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan analisa terhadap potensi, kelemahan dan tantangan pembangunan daerah. Disamping itu juga perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, sebagai langkah awal dalam menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, terlebih dahulu pada bagian ini akan dijabarkan kinerja pembangunan daerah yang mencakup gambaran umum kondisi daerah; evaluasi kinerja tahun lalu; dan permasalahan serta isu strategis pembangunan daerah.

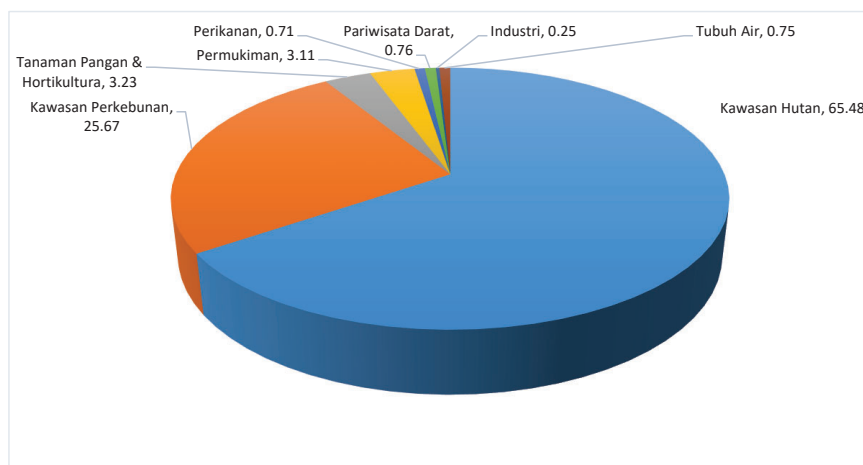
2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2° 33' Lintang Utara (LU) dan 2° 25' Lintang Selatan (LS), 113° 44' Bujur Timur (BT) dan 119° 00' Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 16.732.065,18 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.734.692 ha. Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.



Sumber: Perda No. 1 tahun 2016 Tentang Rencana RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2035

Gambar 2.1
Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2035

Jika dilihat dari peruntukan kawasannya, sebagian besar luas sumber daya lahan (wilayah daratan) Kalimantan Timur berstatus sebagai Kawasan Hutan dengan luasan mencapai 8.339.155 Ha (65,48%), yang terdiri dari Kawasan Lindung seluas 2.283.360 Ha dan Kawasan Budidaya Hutan seluas 6.055.793 Ha. Sedangkan sisanya seluas 4.395.537 Ha (34,52%), berstatus sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) yang terbagi untuk kawasan perkebunan seluas 3.269.560 Ha (25,67%), kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebesar 412.095 Ha (3,23%), kawasan permukiman seluas 396.266 Ha (3,11%), kawasan perikanan seluas 91.547 Ha (0,71%), kawasan pariwisata darat seluas 97.423 Ha (0,76%), kawasan industri seluas 32.887 Ha (0,25%), dan tubuh air seluas 95,758 Ha (0,75%).

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, terluas adalah wilayah pada ketinggian 100-500 M sebesar 4,23 juta Ha (terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian 25-100 M

sebesar 4,12 Ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 M sebesar 2,08 Ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu yang termasuk daerah dataran tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (pada ketinggian 1000-15000 M) sebesar 2,02 juta Ha terutama pada Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur, wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25% seluas 7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya luas wilayah pada kemiringan diatas 40% (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15% sebesar 1,82 juta Ha (datar dan landai).

Kemudian, dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Ha)*	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1. Paser	1.109.696	10	144
2. Kutai Barat	1.370.992	16	194
3. Mahakam Ulu	1.944.941	5	50
4. Kutai Kartanegara	2.598.808	18	237
5. Kutai Timur	3.105.171	18	141
6. Berau	2.173.519	13	110
7. Penajam Paser Utara	292.373	4	54
8. Balikpapan	51.225	6	34
9. Samarinda	71.653	10	59
10. Bontang	16.314	3	15
Kalimantan Timur	12.734.692	103	1.038

Sumber: Luas Wilayah berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur, Jumlah kecamatan, desa dan kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2017.

Keterangan: *) Luas wilayah dihitung berdasarkan batas wilayah administratif yang sebagian masih bersifat indikatif

Pada tahun 2019, dari 1.038 desa/kelurahan, 841 desa yang tersebar di tujuh kabupaten di Kalimantan Timur masih terdapat 24 Desa sangat tertinggal dan 277 desa tertinggal. Oleh karena itu pembangunan diarahkan untuk meningkatkan

kemandirian masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar pada desa tertinggal dan sangat tertinggal.

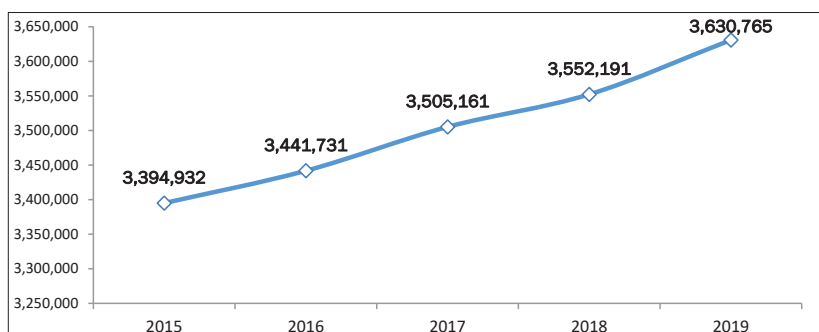
Dari sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui tiga stasiun bandara, yaitu: di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Diketahui bahwa kondisi curah hujan Provinsi Kalimantan Timur yang dilihat dari tiga stasiun ini berada dalam kategori sedang. Tabel 2.2 berikut ini menunjukkan statistik klimatologi Provinsi Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

Tabel 2.2
Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No	Uraian	Stasiun		
		Samarinda	Balikpapan	Tanjung Redeb
1	Suhu Udara (°C)			
	- Minimum	23,70	24,10	22,70
	- Maksimum	34,30	31,90	35
2	Kelembaban (%)	72	81	87
3	Tekanan Udara (Mbs)	1.012,90	1.011,6	1.012,9
4	Kecepatan Angin (Knot)	4,00	3,00	4,00
5	Curah Hujan (mm)	1.358,1	2.270,60	1.742,2
6	Penyinaran Matahari (%)	52	56	55

Sumber: BMKG Wilayah Kaltim

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 3.552.191 jiwa dan terus meningkat menjadi 3.630.765 jiwa pada tahun 2019.

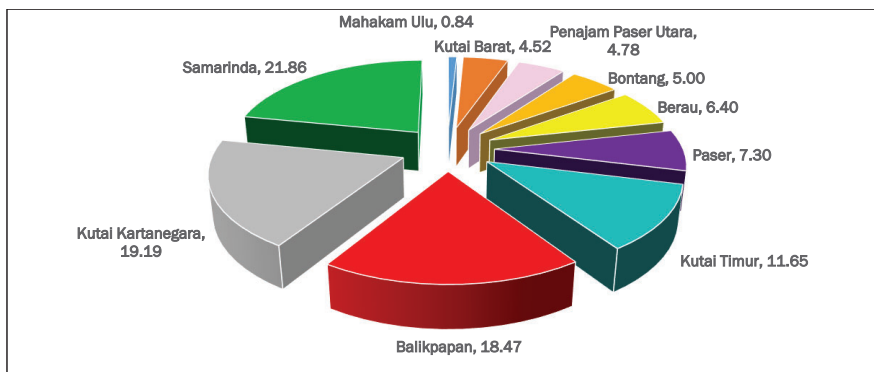


Sumber : Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim

Gambar 2.2
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,86 persen. Tidak dipungkiri bahwa Kota Samarinda

menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, jumlah sebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang distribusinya kurang dari lima persen terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara (4,78%), Kabupaten Kutai Barat (4,52%), dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak mencapai satu persen (0,84%).



Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.3
Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 mencapai 28,51 jiwa per Km² artinya dalam setiap satu Km² terdapat 28-29 penduduk, Kota Balikpapan merupakan kota yang berpenduduk paling padat, yaitu 1.308,94 jiwa per Km². Penduduk Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh laki-laki dimana *sex ratio* mencapai 108,27. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 108 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki. Fenomena ini terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

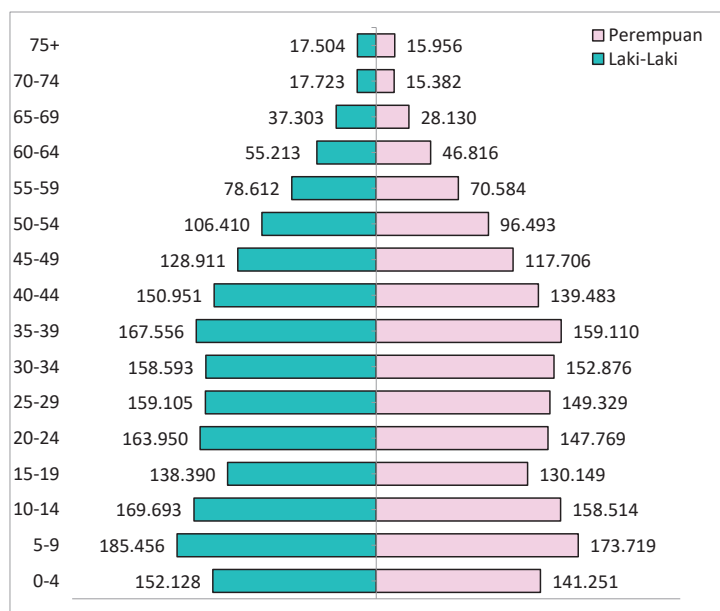
Tabel 2.3
Luas Wilayah, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No	Kab/Kota	Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (per Km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk (2015-2019) (%)
		Laki-laki	Perempuan	Total			
1	Paser	137.945	127.203	265.148	108,44	23,89	1,50
2	Kutai Barat	86.001	78.047	164.048	110,19	11,97	0,89
3	Kutai Kartanegara	363.796	332.988	696.784	109,25	26,81	1,24
4	Kutai Timur	227.538	195.367	422.905	116,47	13,62	0,45
5	Berau	123.795	108.394	232.189	114,21	10,68	2,20

No	Kab/Kota	Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (per Km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk (2015-2019) (%)
		Laki-laki	Perempuan	Total			
6	Penajam Paser Utara	90.043	83.628	173.671	107,67	59,40	1,72
7	Mahakam Ulu	16.147	14.174	30.321	113,92	1,56	4,53
8	Balikpapan	343.248	327.257	670.505	104,89	1.308,94	1,87
9	Samarinda	404.402	389.174	793.576	103,91	1.107,53	0,99
10	Bontang	94.583	87.035	181.618	108,67	1.113,26	2,03
Kalimantan Timur		1.887.498	1.743.267	3.630.765	108,27	28,51	1,35

Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur. Data sex ratio, kepadatan penduduk, dan laju pertumbuhan penduduk data diolah

Dilihat dari struktur usia penduduk, sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun), sebagaimana tampak pada gambar 2.4. Piramida penduduk Provinsi Kalimantan Timur ini mengindikasikan tingkat ketergantungan penduduk non produktif (penduduk usia 0-14 tahun dan 65+) dibawah 50 persen. Berdasarkan komposisi penduduknya maka piramida penduduk Kalimantan Timur terdefinisi sebagai bentuk piramida penduduk muda atau ekspansif. Pada Piramida Penduduk Ekspansif, suatu wilayah digambarkan memiliki angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah sehingga mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Namun, pada tahun 2019 jumlah penduduk usia non produktif di Kalimantan Timur mengalami peningkatan lebih tinggi daripada penduduk usia produktif. Jumlah penduduk non produktif bertambah sebesar 53.715 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk produktifnya hanya mengalami kenaikan sebesar 24.859 jiwa. Bila dilihat dari jenis kelamin, jumlah penduduk usia produktif di Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh laki-laki sebesar 1,31 juta sedangkan jenis kelamin perempuan usia produktif sebesar 1,21 juta jiwa. Dimana keduanya mengalami kenaikan jumlah di tahun 2019.



Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim

Gambar 2.4
Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, dan angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan pembangunan, terutama untuk monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukkseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

A. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

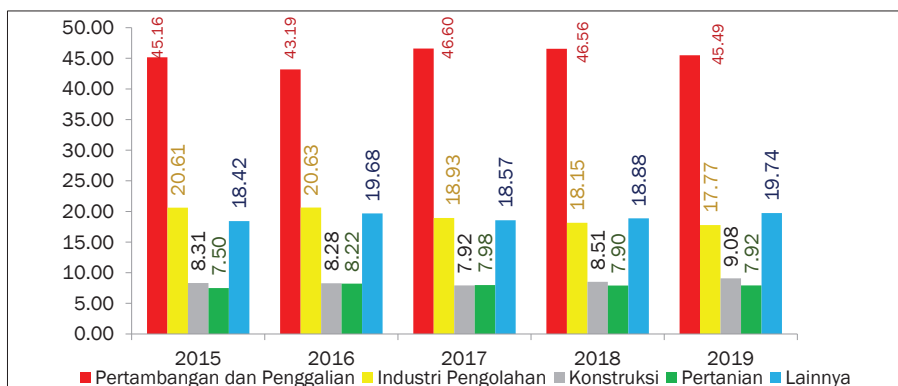
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan tren yang meningkat baik dari komposisi dengan migas, non migas, serta non migas dan batubara. Adapun nilai PDRB dengan migas Tahun 2019 tercatat sebesar Rp 653,68 triliun, sedangkan nilai PDRB non migas sebesar Rp 542,15 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 313,17 triliun.

Tabel 2.4
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

Tahun	Migas	Non Migas	Non Migas dan Batubara
2015	503.691.107	389.773.657	226.700.171
2016	508.880.236	400.847.613	243.496.746
2017	591.903.487	476.190.332	267.249.474
2018	636.454.483	518.074.570	291.567.584
2019	653.677.103	542.147.098	313.167.530

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2019

Jika dilihat menurut kontribusinya, struktur perekonomian Kalimantan Timur masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian secara konsisten menyumbang di atas 40 persen dari total PDRB Kaltim. Namun dalam beberapa tahun terakhir kontribusi Lapangan Usaha ini cenderung menurun tipis meski masih fluktuatif. Pada tahun 2019, kontribusi Lapangan Usaha utama yakni Pertambangan dan Penggalian serta industri pengolahan mengalami penurunan, demikian pula kontribusi Lapangan Usaha pertanian yang turun tipis. Sementara itu Lapangan Usaha konstruksi mengalami peningkatan kontribusi.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.5
Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (persen)

Menyadari bahwa Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian bergantung pada sumber daya alam yang tak terbarukan, maka transformasi ekonomi baik secara horizontal yaitu menumbuhkan dan mendorong lahan usaha ekonomi baru maupun transformasi vertikal melalui upaya hilirisasi/industrialisasi sangat tepat untuk dilakukan. Lapangan Usaha yang dapat didorong diantaranya Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas). Jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kaltim

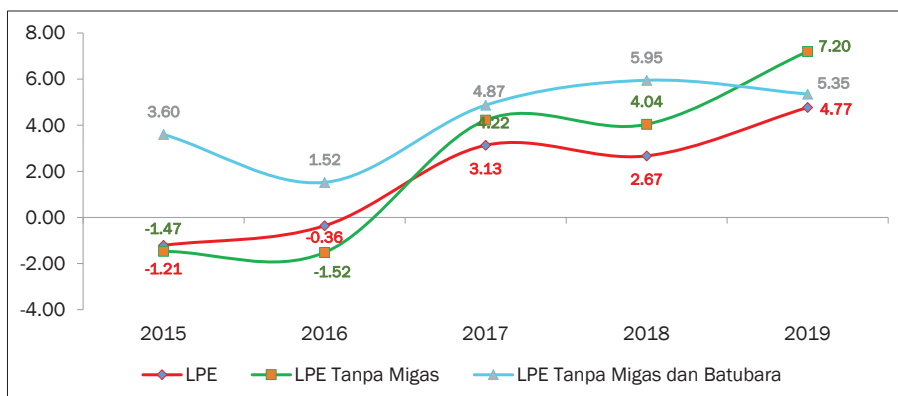
secara rata-rata dari tahun 2015-2019 sebesar 7,90 persen. Capaian ini tentunya masih sangat kecil. Maka diperlukan dorongan besar untuk melakukan perubahan yang besar pula, terutama diarahkan pada inovasi pengembangan komoditas. Dimana sektor yang dominan menggerakkan lapangan usaha ini adalah sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terutama pada sub tanaman perkebunan.

Sub sektor perkebunan tahunan menunjukkan nilai PDRB yang meningkat dari tahun ke tahun. Komoditas perkebunan tahunan yang dimiliki Provinsi Kaltim diantaranya kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan lada. Potensi ini perlu mendapatkan perhatian besar untuk memperkuat struktur ekonomi Kaltim di luar migas dan batubara.

Komoditas dalam sektor perikanan dan sektor kehutanan dan penebangan kayu juga berpotensi dalam mendongkrak geliat ekonomi di lapangan usaha pertanian, namun untuk melihat komoditas apa yang perlu dikembangkan, dibutuhkan supporting data yang lengkap, akurat dan valid.

Perlu diketahui bahwa *share* Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif, serta cenderung dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor dimana di dalamnya tercatat omzet dari UMKM. Nilai PDRB pada sub sektor ini terus meningkat ditengah-tengah menurunnya aktivitas pertambangan dan penggalian, namun kontribusinya masih relatif kecil, pada tahun 2019 kontribusinya hanya sebesar 5,92 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang pernah mengalami kontraksi hingga negatif 1,20 persen pada tahun 2015, perlahan mulai menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 2,67 persen dimana laju pertumbuhan ekonomi non migas tercatat sebesar 4,22 persen serta laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara sebesar 6 persen. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur meningkat sebesar 4,77 persen, dimana laju pertumbuhan ekonomi non migas melesat cukup tajam hingga 7,20 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara sebesar 5,35 persen.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2019

Gambar 2.6

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (%)

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur jika dilihat menurut Lapangan Usaha cukup berfluktuatif. Pada tahun 2019 terjadi pertumbuhan positif di seluruh lapangan usaha. Laju pertumbuhan tertinggi diciptakan oleh Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,65 persen. Kemudian disusul Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 8,16 persen, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,99 persen, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 6,89 persen, Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,86 persen, dan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebesar 6,12 persen. Sedangkan Lapangan Usaha lainnya tumbuh di bawah 6 persen.

Tabel 2.5

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (persen)

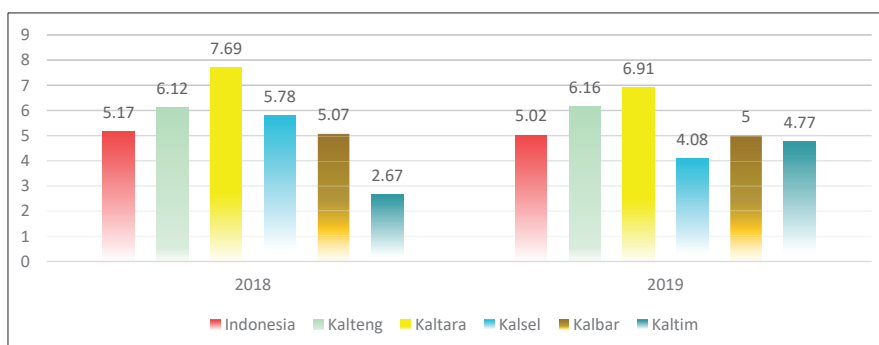
Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,55	0,46	5,66	6,14	3,88
B	Pertambangan dan Penggalan	(4,89)	(3,52)	1,79	1,07	6,89
C	Industri Pengolahan	2,66	5,46	2,80	0,69	0,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	30,43	8,32	6,78	9,76	8,65
E	Pengadaan Air	2,56	6,57	8,37	3,22	5,56
F	Konstruksi	(0,94)	(3,86)	5,76	7,91	5,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,42	3,20	8,22	7,16	5,20
H	Transportasi dan Pergudangan	2,76	3,05	6,46	5,80	2,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,33	6,79	8,37	8,70	6,12
J	Informasi dan Komunikasi	7,66	7,45	7,79	4,38	6,86
K	Jasa Keuangan	2,05	1,84	(0,72)	4,05	3,03

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
L	Real Estate	3,59	(0,83)	3,35	4,83	2,12
M,N	Jasa Perusahaan	(3,75)	(4,25)	3,54	4,96	1,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,20	(3,27)	(3,47)	3,11	4,25
P	Jasa Pendidikan	9,88	7,06	6,73	7,73	4,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,53	9,31	7,16	8,05	6,99
R,S,T, U	Jasa Lainnya	8,81	7,81	6,44	9,02	8,16
Laju Pertumbuhan Ekonomi		(1,21)	(0,38)	3,13	2,67	4,77

Sumber : Badan Pusat Statistik

Beberapa hal yang menjadi catatan pada tahun 2019 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi hampir pada seluruh sektor. Hanya empat lapangan usaha yang mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, Lapangan Usaha Pengadaan Air, Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi, dan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Wajib Sosial.

Jika dibandingkan secara regional laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur adalah yang terendah kedua di Regional Kalimantan. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi tertinggi di Regional Kalimantan dicapai oleh Kalimantan Utara sebesar 6,91 persen, disusul Kalimantan Tengah sebesar 6,16 persen dan Kalimantan Barat sebesar 5 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur hanya berada di atas Kalimantan Selatan sebesar 4,08 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sebesar 5,02 persen, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur juga masih tertinggal.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional Kalimantan (%)

Tabel 2.6
Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2019

No	Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	86.786.224	91.536.846	96.807.320	103.474.158	109.769.675
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.460.192	2.439.025	2.629.574	2.973.197	3.246.860
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	25.949.715	23.578.344	21.596.789	23.723.231	26.338.928
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	145.766.484	144.654.384	154.503.230	173.413.127	187.709.065
5	Perubahan Inventori	5.771.866	1.922.887	1.757.926	1.610.952	725.912
6	Ekspor Luar Negeri	256.979.357	197.483.435	246.069.397	264.745.228	252.772.199
7	Impor Luar Negeri	88.717.186	65.089.941	69.188.554	80.826.683	59.635.608
8	Net Ekspor Antar Daerah	70.108.410	112.355.257	137.727.806	147.341.273	132.750.072
PDRB		505.105.062	508.880.236	591.903.487	636.454.483	653.677.103

Sumber : Badan Pusat Statistik

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku dari sisi pengeluaran pada tahun 2015-2019 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku menurut kelompok pengeluaran mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 653,68 triliun, dimana Komponen Ekspor baik luar negeri maupun antar daerah mengalami penurunan nilai.

Tabel 2.7
Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

No	Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	17,18	17,99	16,36	16,26	16,79
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,49	0,48	0,44	0,47	0,50
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,14	4,63	3,65	3,73	4,03
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,86	28,43	26,10	27,25	28,72
5	Perubahan Inventori	1,14	0,38	0,30	0,25	0,11

No	Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
6	Ekspor Luar Negeri	50,88	38,81	41,57	41,60	38,67
7	Impor Luar Negeri	17,56	12,79	11,69	12,70	9,12
8	Net Ekspor Antar Daerah	13,88	22,08	23,27	23,15	20,31

Sumber : Badan Pusat Statistik

Distribusi komponen pengeluaran PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015-2019 masih didominasi oleh Komponen Net Ekspor Luar Negeri (Ekspor luar negeri dikurang impor luar negeri), disusul Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Komponen Net Ekspor Antar Daerah, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

PDRB Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan luar negeri yang tercermin dari besarnya kontribusi Komponen Net Ekspor Luar Negeri, dimana komoditas ekspor Kalimantan Timur sebagian besar didominasi komoditas bahan bakar mineral (seperti batubara, minyak bumi dan gas alam). Namun apabila melihat pergerakan komoditas ekspor non migas pada tahun 2019, terjadi pergerakan hilirisasi industri non migas yang tercermin melalui peran hasil industri non migas pada ekspor luar negeri Kalimantan Timur yang mencapai 10,49 persen.

Peningkatan kontribusi pada tahun 2019 terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Komponen PMTB, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT.

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

No	Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,46	1,56	2,58	3,14	3,15
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,30	(4,04)	4,89	9,41	5,95
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(4,93)	(13,03)	(9,79)	7,91	9,97
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	(1,47)	(6,04)	2,75	7,54	4,79
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Ekspor Luar Negeri	(16,07)	(9,88)	2,55	(3,71)	9,02
7	Impor Luar Negeri	3,49	(12,70)	2,51	9,39	(25,46)

No	Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
8	Net Ekspor Antar Daerah	222,87	32,54	7,07	16,02	(23,67)
	PDRB	(1,20)	(0,38)	3,13	2,67	4,77

Sumber : Badan Pusat Statistik

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kelompok pengeluaran pada tahun 2018 sebesar 2,67 persen. Dimana pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Komponen Net Ekspor Antar Daerah sebesar 16,15 persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 9,41 persen. Komponen Net Ekspor Antar Daerah selalu mencetak nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi dari sisi pengeluaran. Pertumbuhannya juga terjaga di angka positif meskipun ekonomi Kaltim secara keseluruhan sempat terkoreksi negatif di tahun 2015 dan 2016. Adapun kondisi tahun 2019, melalui perhitungan sementara tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,77 persen. Dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT. Komponen lain seperti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan PMTB tumbuh positif, sedangkan komponen lainnya mengalami kontraksi.

Tabel 2.9
Nilai PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2019 (%)

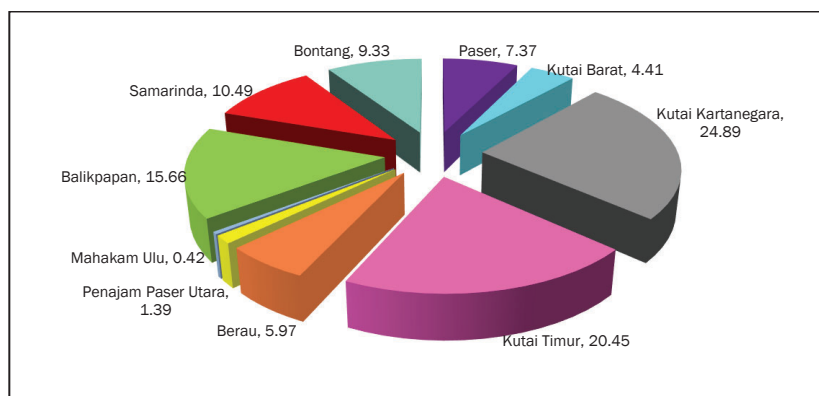
No	KABUPATEN/KOTA	Nilai PDRB ADHK (Miliar Rp)			LPE		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Paser	33.137,65	34.356,41	35.690,12	1,17	3,68	3,88
2	Kutai Barat	19.139,86	20.103,63	21.224,82	3,64	5,04	5,58
3	Kutai Kartanegara	118.943,99	121.461,42	126.042,29	1,63	2,12	3,77
4	Kutai Timur	86.520,25	88.545,27	95.604,48	3,28	2,34	7,97
5	Berau	26.227,29	26.763,91	28.249,55	3,01	2,05	5,55
6	Penajam Paser Utara	6.506,88	6.587,33	6.753,52	2,44	1,24	2,52
7	Mahakam Ulu	1.589,56	1.675,44	1.766,54	4,29	5,40	5,44
8	Balikpapan	76.032,08	79.793,80	83.604,89	3,84	4,95	4,78
9	Samarinda	41.274,97	43.315,91	45.469,88	3,85	4,94	4,97
10	Bontang	43.073,06	41.306,73	40.406,23	0,55	-4,10	-2,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur dari tahun 2017-2019 cenderung mengalami kenaikan kecuali Kota Bontang. Kemudian, jika dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Kutai Timur sebesar 7,97 persen, disusul Kabupaten Kutai Barat dengan laju pertumbuhan 5,58 persen, Kabupaten Berau sebesar 5,55 persen, dan

Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 5,44 persen. Disamping itu daerah yang mengalami perlambatan pertumbuhan adalah Kota Balikpapan, sedangkan daerah yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Berau. Sementara itu, Kota Bontang satu-satunya yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar negatif 2,18 persen.

Berdasarkan distribusi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019, maka terlihat bahwa kontribusi Kabupaten Kutai Kartanegara paling besar diantara kabupaten/kota lainnya yang mencapai 24,89 persen, selanjutnya disusul Kabupaten Kutai Timur 20,45 persen yang sektor dominannya disumbang oleh kinerja pertambangan batubara, dan Kota Balikpapan sebesar 15,66 persen sebagai pusat jasa dan niaga serta industri kilang minyak. Selebihnya Kabupaten/Kota lainnya berkontribusi pada PDRB Kalimantan Timur dibawah 15 persen.



Sumber : Kaltim Dalam Angka 2020

Gambar 2.8

Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 (%)

Pada tahun 2019, terdapat 6 (enam) kabupaten yang menjadikan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebagai sektor ekonomi utama. Jika dilihat dari besaran kontribusi yang diberikan, maka terlihat bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian sangat mendominasi terutama pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Besaran yang diberikan sangat signifikan, hingga mencapai 81,52 persen, dan kegiatan tersebut ditopang oleh aktivitas pertambangan batubara.

Tabel 2.10
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektor Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)
Paser	Pertambangan	73,41	Pertanian	10,11	Industri	4,60
Kubar	Pertambangan	49,37	Pertanian	13,46	Konstruksi	12,01
Kukar	Pertambangan	62,82	Pertanian	13,33	Konstruksi	8,68

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)
Kutim	Pertambangan	81,52	Pertanian	7,65	Industri	2,89
Berau	Pertambangan	60,93	Pertanian	10,70	Transportasi	5,82
PPU	Pertambangan	29,38	Pertanian	19,80	Industri	15,75
Mahulu	Pertanian	74,40	Pertambangan	7,40	Konstruksi	6,31
Balikpapan	Industri	45,92	Konstruksi	16,04	Transportasi	11,95
Samarinda	Konstruksi	21,53	Perdagangan	16,31	Pertambangan	13,02
Bontang	Industri	80,72	Konstruksi	6,33	Perdagangan	3,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Peranan aktivitas Pertambangan dan Penggalian juga cukup dominan di wilayah Kabupaten Paser, mencapai 73,41 persen. Sama halnya dengan wilayah Kutai Timur, wilayah Kabupaten Paser juga didominasi oleh kegiatan pertambangan batubara. Wilayah lainnya yang juga memiliki kemiripan karakteristik dengan Kutai Timur dan Paser adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memberikan peranan yang cukup besar mencapai 64,91 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun aktivitas pertambangan yang dimaksud adalah pertambangan migas, pertambangan batubara dan pertambangan lainnya. Kabupaten lain dengan sektor utama pertambangan juga tercatat di Berau dan Penajam Paser Utara.

Adapun daerah yang menggantungkan sektor utamanya pada sektor industri adalah Kota Bontang, sedangkan daerah yang sektor utamanya Pertanian adalah Kabupaten dengan laju pertumbuhan tertinggi di Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel 2.11

Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Pengeluaran Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)
Paser	Net Ekspor	63,76	PMTB	19,49	K. Ruta	13,01
Kubar	Net Ekspor	38,61	PMTB	36,94	K. Ruta	16,04
Kukar	Net Ekspor	50,05	PMTB	35,22	K. Ruta	11,65
Kutim	Net Ekspor	75,29	PMTB	16,51	K. Ruta	6,07
Berau	Net Ekspor	61,70	PMTB	21,32	K. Ruta	12,38
Penajam PU	K. Ruta	42,68	PMTB	37,06	Net Ekspor	12,40
Mahulu	Net Ekspor	32,59	PMTB	29,06	K. Ruta	24,24
Balikpapan	PMTB	40,23	Net Ekspor	30,77	K. Ruta	25,19
Samarinda	K. Ruta	45,12	PMTB	41,34	K. Pemerintah	12,80
Bontang	Net Ekspor	74,79	PMTB	12,70	K. Ruta	10,05

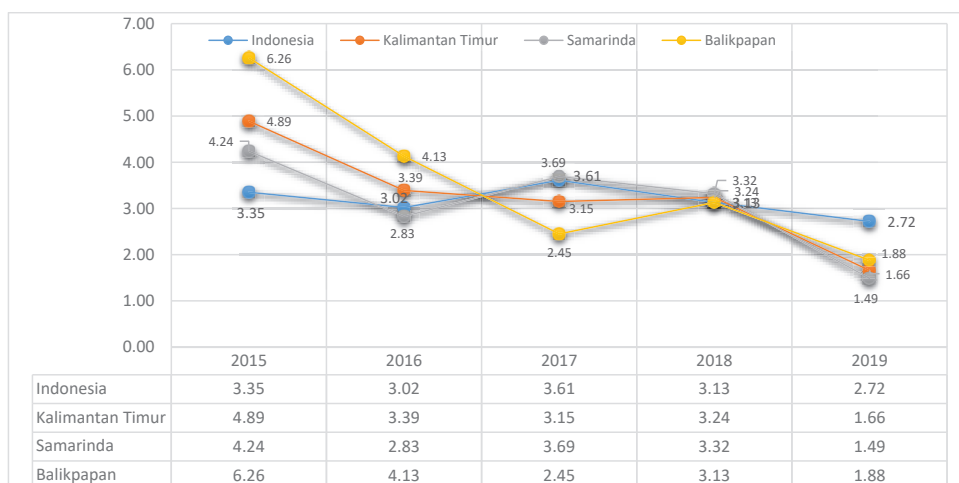
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Berdasarkan kelompok pengeluaran pada PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, tujuh kabupaten/kota didominasi oleh Komponen Net Ekspor antara lain Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Bontang. Dua kabupaten/kota lainnya didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga

adalah Kota Samarinda dan Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Kota Balikpapan didominasi oleh komponen pengeluaran PMTB.

B. Laju Inflasi

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2019 hanya sebesar 1,66 persen. Rendahnya tekanan inflasi bersumber dari Kelompok Transportasi dan Komunikasi yang mengalami deflasi. Hal ini merupakan dampak dari upaya pemerintah dalam pengendalian tarif angkutan udara melalui penyesuaian Tarif Batas Atas (TBA) Pesawat Terbang dengan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 mengenai Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

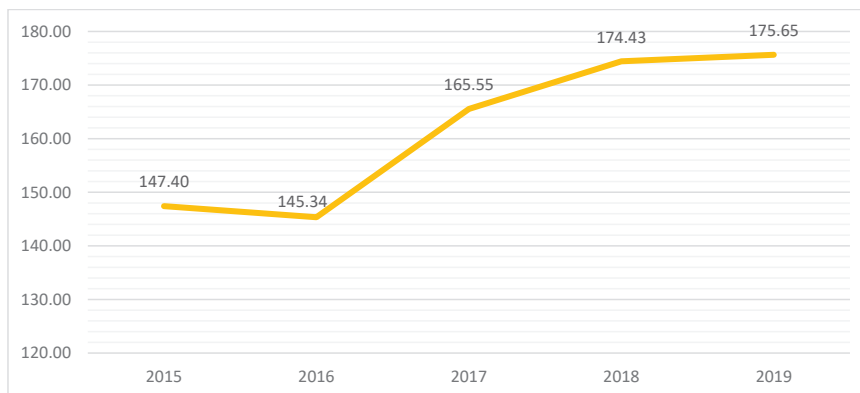
Gambar 2.9
Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (%)

Namun demikian penurunan inflasi tertahan oleh kenaikan harga dari kelompok sandang, kelompok bahan makanan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, kelompok makanan jadi, kelompok kesehatan dan kelompok perumahan.

Kota Samarinda pada tahun 2019 mengalami inflasi lebih rendah dari tahun sebelumnya menjadi 1,49 persen, dan lebih rendah dibandingkan inflasi Kota Balikpapan sebesar 1,88 persen. Sehingga secara keseluruhan tingkat inflasi Kalimantan Timur berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 2,72 persen.

C. PDRB Per Kapita

Nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2015-2019 cenderung meningkat. Namun nilai PDRB per Kapita tersebut sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 dari sebesar Rp 147,40 juta menjadi Rp 145,34 juta. Setelah itu, hingga tahun 2019 nilai PDRB per Kapita Kalimantan Timur meningkat menjadi Rp 175,65 juta.



Sumber; Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2020

Gambar 2.10
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

Dilihat dari nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku kabupaten/kota di Kalimantan Timur, jika diurutkan maka nilai PDRB per kapita tertinggi tahun 2019 yakni di Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp 355,55 juta, Kota Bontang sebesar Rp 329,05 juta, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 207,02 juta. Sedangkan kabupaten/kota dengan PDRB per Kapita paling rendah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 56,47 juta dan Kota Samarinda sebesar Rp 78,57 juta.

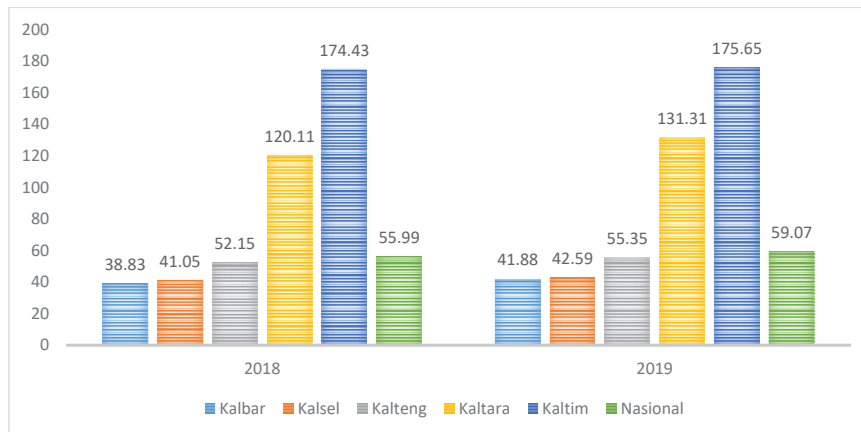
Tabel 2.12
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Rp Ribu)

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
1	Paser	146.050,83	139.005,28	160.296,47	172.444,45	168.508,96
2	Kutai Barat	146.040,74	150.513,19	175.425,47	191.344,95	195.009,08
3	Kutai Kartanegara	177.143,27	173.968,11	198.406,84	210.484,44	207.015,42
4	Kutai Timur	292.204,68	285.338,32	346.117,42	353.304,35	355.546,83
5	Berau	143.987,03	143.437,25	161.633,70	166.166,98	168.113,83
6	Penajam Paser Utara	48.317,88	49.241,18	53.774,37	55.531,98	56.474,76
7	Mahakam Ulu	76.265,79	82.108,10	88.868,89	95.323,49	103.061,64
8	Balikpapan	120.775,79	128.124,63	137.916,47	148.758,73	156.276,67

9	Samarinda	62.515,11	63.560,52	69.291,63	74.489,27	78.566,95
10	Bontang	358.796,85	331.035,96	345.145,85	338.383,90	329.049,66

Sumber; Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2020

Jika dilihat secara nasional, nilai PDRB per Kapita Kalimantan Timur pada tahun 2019 berada di atas PDRB per Kapita Nasional sebesar Rp 59,07 juta dan PDRB per Kapita Regional Kalimantan sebesar Rp Rp 78,49 juta. Dengan demikian, PDRB per Kapita Kalimantan Timur tahun 2019 merupakan yang tertinggi di tingkat nasional. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh nilai PDRB yang tinggi dan jumlah penduduk Kalimantan Timur yang besarnya tidak sebanyak jumlah penduduk di luar Pulau Kalimantan.



Sumber : Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2020

Gambar 2.11
PDRB per Kapita Nasional dan Regional Kalimantan
Tahun 2018-2019 (Juta Rupiah)

D. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 5,94 persen. Namun secara absolut, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi sebanyak 219,92 ribu jiwa dibandingkan tahun 2018 yaitu sebanyak 218,90 ribu jiwa. Dimana garis kemiskinan di Kalimantan Timur juga meningkat menjadi sebesar Rp 609.155 yang didominasi untuk memenuhi kecukupan pangan/makanan.

Tabel 2.13
Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

Periode	Garis Kemiskinan			Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
Maret 2015	336.356	137.353	473.710	212,89	6,23
Maret 2016	363.918	147.287	511.205	212,92	6,11
Maret 2017	389.152	158.943	548.094	220,17	6,19
Maret 2018	405.108	169.596	574.704	218,90	6,03
Maret 2019	429.165	179.991	609.155	219,92	5,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Komoditi makanan yang mempunyai andil terbesar dalam pembentuk garis kemiskinan makanan di Kalimantan Timur pada bulan Maret 2019 antara daerah perkotaan dan perdesaan terdapat kemiripan pola. Dari enam komoditi penyumbang garis kemiskinan makanan terbesar di pedesaan dan di perkotaan, tiga komoditi terbesarnya terdapat persamaan. Tiga jenis komoditi terbesar yang sama yaitu beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras. Berikut adalah jenis komoditi penyusun garis kemiskinan makanan untuk daerah perkotaan secara berturut-turut adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan dan tongkol/tuna/cakalang. Sedangkan di daerah pedesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, daging ayam ras. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel Persentase komoditi makanan terhadap garis kemiskinan makanan menurut daerah.

Tabel 2.14
Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan Makanan Menurut Daerah Tahun 2019

No	Perkotaan		Perdesaan	
	Komoditi	%	Komoditi	%
1	Beras	16,54	Beras	20,28
2	Rokok Kretek Filter	12,65	Rokok Kretek Filter	13,88
3	Telur ayam ras	4,96	Telur ayam ras	4,46
4	Daging ayam ras	3,69	Mie Instan	3,35
5	Mie Instan	3,02	Gula Pasir	2,97
6	Tongkol/Tuna/Cakalang	2,54	Daging Ayam Ras	2,63
7	Kue basah	2,35	Tongkol/Tuna/Cakalang	2,08
8	Gula Pasir	2,20	Bawang merah	1,76
9	Tempe	1,71	Roti	1,68
10	Tahu	1,57	Tempe	1,62
11	Bawang Merah	1,52	Kue Basah	1,38
12	Kopi Bubuk & Kopi Instan (Sachet)	1,37	Kopi Bubuk & Kopi Instan (Sachet)	1,31
13	Susu Bubuk	1,31	Cabe Rawit	1,29
14	Bandeng	1,31	Tahu	1,26
15	Roti	1,22	Susu Kental Manis	1,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan kabupaten/kota tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2019 masih di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu mencapai 11,25 persen, sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Balikpapan hanya sebesar 2,42 persen

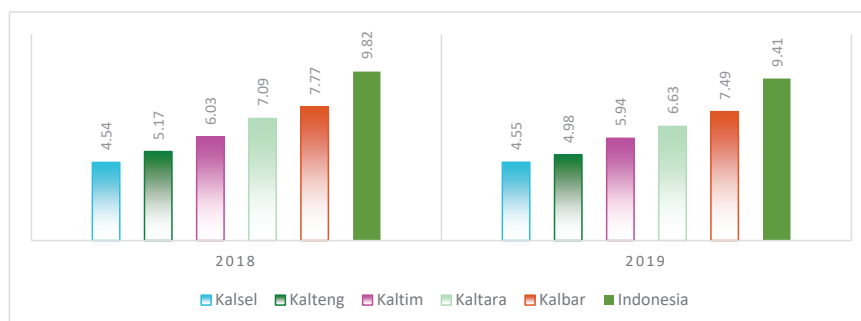
Pada tahun 2019 kenaikan tingkat kemiskinan hanya terjadi di Kabupaten Kutai Timur yang disebabkan oleh tingginya jumlah pendatang yang masuk ke wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk mencari pekerjaan. Sedangkan kabupaten/kota lainnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan, dimana penurunan tertinggi terjadi di Kota Bontang dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel 2.15
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (persen)

No	Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
1	Paser	8,76	8,68	9,28	9,03	8,95
2	Kutai Barat	8,33	8,65	8,72	9,15	9,09
3	Kutai Kartanegara	7,99	7,63	7,57	7,41	7,20
4	Kutai Timur	9,31	9,16	9,29	9,22	9,48
5	Berau	5,33	5,37	5,41	5,04	5,04
6	Penajam Paser Utara	7,92	7,49	7,63	7,40	7,18
7	Balikpapan	2,91	2,81	2,82	2,64	2,42
8	Samarinda	4,82	4,72	4,77	4,59	4,59
9	Bontang	5,06	5,18	5,16	4,67	4,22
10	Mahakam Ulu	10,50	10,65	11,29	11,62	11,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur adalah yang tertinggi ketiga di Regional Kalimantan, setelah Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Tingkat kemiskinan terendah dicatat oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu, pada tahun 2019 terjadi penurunan tingkat kemiskinan di tiga provinsi Regional Kalimantan, kecuali Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun penurunan tingkat kemiskinan terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 0,46 poin dan Kalimantan Barat turun sebanyak 0,28 poin, sementara Kalimantan Timur menurunkan tingkat kemiskinannya sebanyak 0,09 poin. Meski demikian, tingkat kemiskinan Kalimantan Timur masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 9,41 persen.



Sumber : BPS

Gambar 2.12
Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional

Secara absolut, jumlah penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 56.340 jiwa, Kota Samarinda sebanyak 39.800 jiwa, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 35.310 jiwa. Disisi lain, yang perlu menjadi perhatian adalah share PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur merupakan dua terbesar terhadap total PDRB Kalimantan Timur namun ternyata memiliki jumlah penduduk miskin yang terbesar di daerah tersebut. Besarnya nilai PDRB daerahnya belum mampu memberikan dampak maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh belahan dunia, termasuk Kalimantan Timur diprediksi akan memberikan dampak bagi peningkatan kemiskinan di Kalimantan Timur. Secara global diprediksi bahwa 420 – 580 juta orang akan menjadi miskin, sedangkan secara Nasional diperkirakan angka kemiskinan akan meningkat menjadi 9,39%. Angka kemiskinan di Kalimantan Timur juga diperkirakan akan mengalami peningkatan akibat pelemahan ekonomi disektor pariwisata, transportasi, perdagangan dan beberapa sektor terdampak Covid 19 lainnya. Berkenaan dengan ini maka upaya untuk menumbuhkan perekonomian pasca Covid 19 di tahun 2021 perlu untuk mendapatkan perhatian serius.

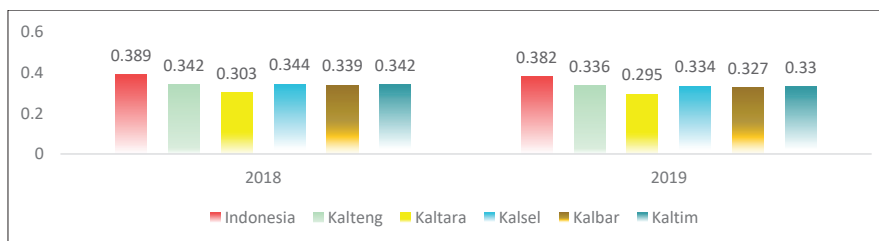
Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (jiwa)

No	Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
1	Paser	22.820	23.170	25.300	25.140	25.450
2	Kutai Barat	11.120	12.650	12.800	13.490	13.450
3	Kutai Kartanegara	56.990	55.820	56.570	56.560	56.340
4	Kutai Timur	29.570	30.170	31.950	33.020	35.310
5	Berau	11.210	11.470	11.860	11.330	11.620

No	Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
6	Penajam Paser Utara	12.170	11.660	12.000	11.760	11.520
7	Balikpapan	17.890	17.550	17.860	17.010	15.780
8	Samarinda	32.250	38.950	40.010	39.230	39.800
9	Bontang	8.020	8.600	8.750	8.100	7.470
10	Mahakam Ulu	2.830	2.880	3.070	3.250	3.190

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Indeks Gini Kalimantan Timur yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat pada tahun 2019 menunjukkan penurunan angka ketimpangan menjadi 0,330. Sebelumnya indeks gini Kalimantan Timur sebesar 0,342. Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2019 ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,295. Sedangkan sisanya menunjukkan level ketimpangan yang serupa pada posisi 0,32-0,34. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut, masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai 0,382 pada tahun 2019.



Sumber : BPS

Gambar 2.13
Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2018-2019

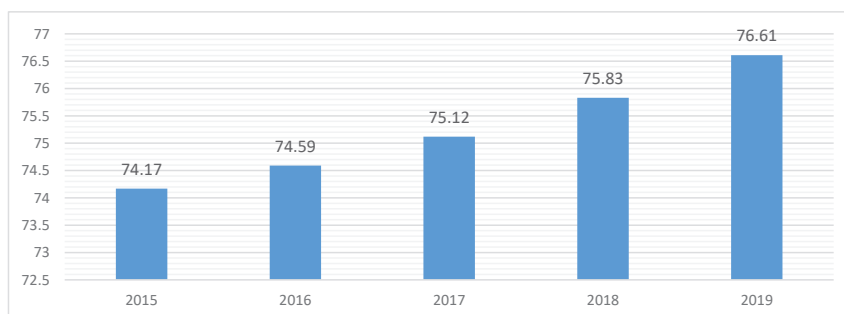
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial masyarakat dalam analisis hasil pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga seni budaya dan olahraga. Namun, dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

A. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami kemajuan selama periode 2015 hingga 2019. IPM Provinsi Kalimantan Timur meningkat dari 74,17 pada tahun 2015 menjadi 76,61 pada tahun 2019. Selama periode waktu tersebut, IPM Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pertumbuhan positif, namun status pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur masih belum mengalami lompatan status.

Hingga saat ini, pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur masih berstatus “tinggi” menduduki peringkat ke 3 (tiga) nasional. Hasil capaian ini tentunya di dukung oleh peningkatan pada empat komponen pembentuk IPM di Kalimantan Timur.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.14

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

Pada tahun 2019 tiga kota di Kalimantan Timur mengalami lompatan status dari tinggi menjadi sangat tinggi. Kota Samarinda dengan nilai IPM sebesar 80,20, Kota Balikpapan sebesar 80,11, dan Kota Bontang sebesar 80,09. Sehingga wilayah dengan IPM tinggi di Kalimantan Timur masih ditempati wilayah perkotaan. Dibandingkan dengan wilayah kota, wilayah kabupaten memiliki kesenjangan IPM yang cukup jauh dengan wilayah kota dimana IPM tertinggi adalah Kabupaten Berau dengan IPM sebesar 74,88 dan terendah adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan IPM sebesar 67,58.

Tabel 2.17

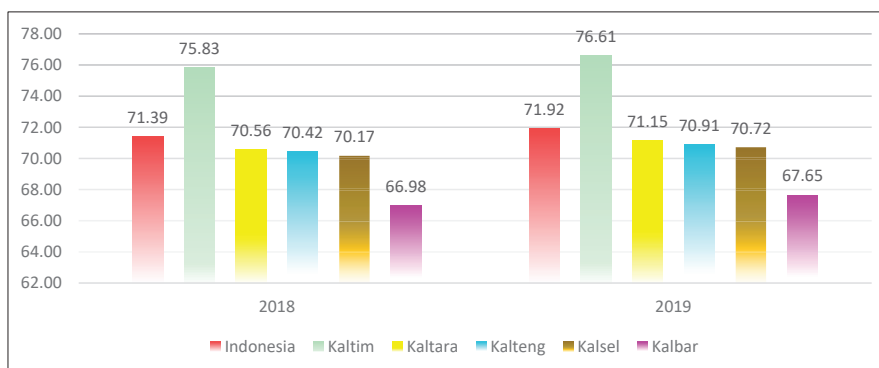
Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No	Kab/Kota	UHH	EYS	MYS	Pengeluaran per kapita (Rp ribu)	IPM
1	Paser	72,52	13,00	8,54	10.767	72,29
2	Kutai Barat	72,79	12,89	8,34	10.338	71,63
3	Kutai Kartanegara	72,21	13,58	9,10	11.152	73,78

No	Kab/Kota	UHH	EYS	MYS	Pengeluaran per kapita (Rp ribu)	IPM
4	Kutai Timur	73,03	12,78	9,18	11.196	73,49
5	Berau	71,94	13,31	9,25	12.726	74,88
6	Penajam Paser Utara	71,30	12,55	8,16	11.750	71,64
7	Mahakam Ulu	71,90	12,50	7,89	8.008	67,58
8	Balikpapan	74,41	14,13	10,67	14.791	80,11
9	Samarinda	74,17	14,70	10,47	14.613	80,20
10	Bontang	74,18	12,90	10,73	16.843	80,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 merupakan IPM tertinggi di Regional Kalimantan dengan interval yang cukup jauh, dimana berkisar antara 67,65 – 71,15. Demikian pula laju pertumbuhan IPM tertinggi di Regional Kalimantan dicatat oleh Kalimantan Timur sebesar 1,03 persen dan Kalimantan Barat sebesar 1,00 persen. Capaian ini juga lebih cepat dibandingkan pertumbuhan IPM nasional sebesar 0,74 persen.



Sumber : BPS

Gambar 2.15
Indeks Pembangunan Manusia Regional Kalimantan dan Indonesia

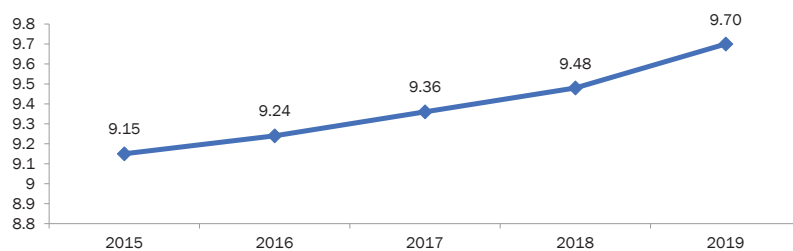
Hal yang penting untuk dimaknai dalam pencapaian IPM Kalimantan Timur yang tinggi bukanlah ranking secara nasional atau regional. Laju pertumbuhan IPM menjadi hal yang paling utama untuk diulas karena hal ini terkait perkembangan dimensi pembangunan manusia yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun di sisi lain, jika tidak didorong, maka capaian pembangunan manusia di Kalimantan Timur dapat tertinggal. Oleh karena itu, pembangunan yang terus menerus pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus terus dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan manusia di Kalimantan Timur.

B. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupannya dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Berikut beberapa indikator kinerja pembangunan daerah pada bidang pendidikan:

1) Rata-rata Lama Sekolah

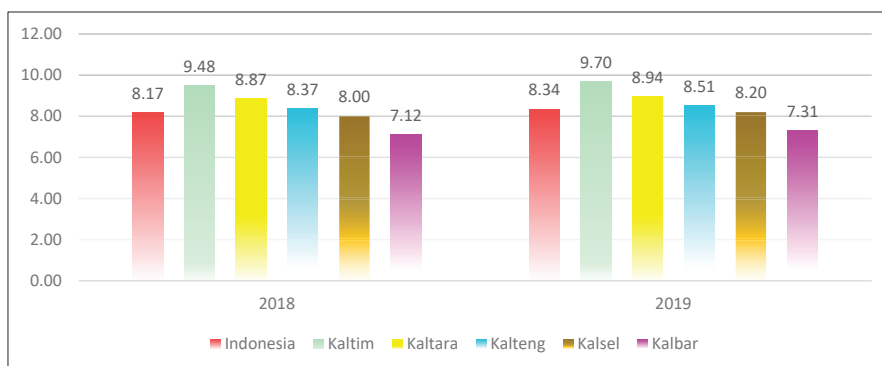
Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun terakhir 2019 mencapai 9,70 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I). Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur di tahun 2019 berada di atas target yang ditetapkan sebesar 9,40 tahun.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.16
Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Tahun)

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur sebesar 9,70 tahun adalah yang tertinggi di Regional Kalimantan serta lebih tinggi dari Nasional sebesar 8,34 tahun. Disusul Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 8,94 tahun dan 8,20 tahun.



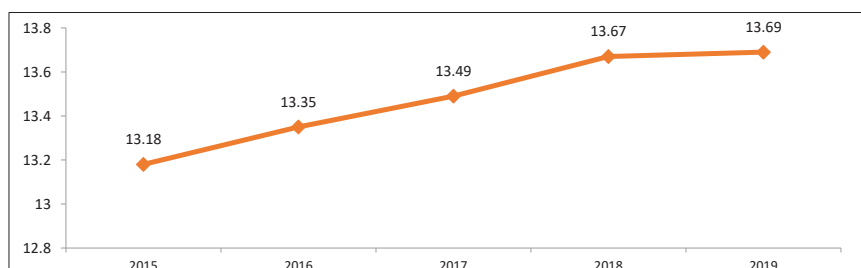
Sumber : BPS

Gambar 2.17
Rata-rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia

2) Harapan Lama Sekolah

Di tahun 2019, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 13,69 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga SMA atau D1. Hal ini sangat baik karena menjadikan potensi sumber daya manusia pada generasi mendatang menjadi lebih baik. Angka ini menggambarkan makin tingginya perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga harapan lama sekolah setiap penduduk dapat mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

Capaian Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 13,89 tahun. Terdapat selisih sebanyak 0,20 tahun. Dimana laju pertumbuhan rata-rata komponen ini selama lima tahun terakhir sebesar 0,78 persen.

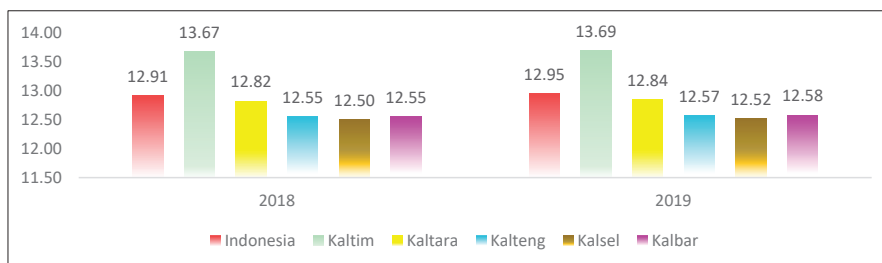


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.18
Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Tahun)

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur selalu menjadi yang tertinggi di Regional Kalimantan. Namun trend laju pertumbuhan komponen ini (2015-2019)

cenderung mengalami perlambatan. Berbeda dengan Provinsi lainnya di Regional Kalimantan yang meski berfluktuasi, namun cenderung meningkat. Laju pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.



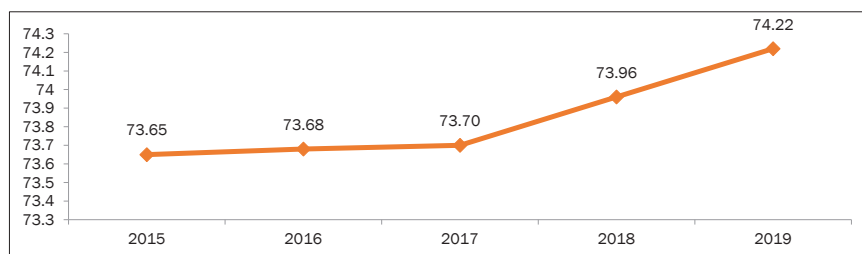
Sumber : BPS

Gambar 2.19
Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur juga lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Indonesia. Namun sayangnya, rata-rata laju pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Indonesia selama lima tahun terakhir lebih tinggi dari laju pertumbuhan Kalimantan Timur. Hal ini berarti pertumbuhan HLS wilayah lain di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama 5 tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan HLS di Provinsi Kalimantan Timur cenderung melambat.

C. Kesehatan

Kesehatan merupakan modal dasar bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan perekonomian maupun pembangunan daerah sangat tergantung pada derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator kinerja pembangunan di bidang kesehatan diwakili oleh Umur Harapan Hidup yang merupakan salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Umur Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup sekian tahun.

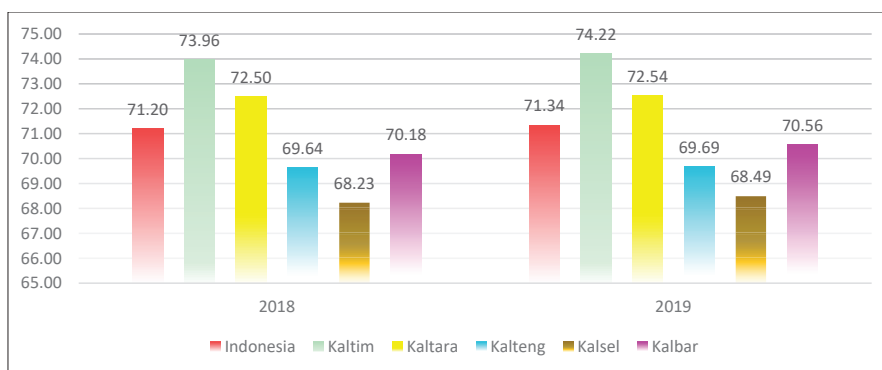


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.20
Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Tahun)

Di Provinsi Kalimantan Timur, Umur Harapan Hidup mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2018 mencapai 73,96 tahun dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 74,22 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2019 akan memiliki harapan hidup hingga usia 74 tahun. Sehingga, angka ini bisa dikatakan memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 73,72 tahun.

Jika dibandingkan dengan provinsi di Regional Kalimantan, Umur Harapan Hidup Kalimantan Timur masih menjadi yang tertinggi. Namun laju pertumbuhan tertinggi lima tahun terakhir terjadi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Sedangkan capaian Kalimantan Timur masih berada di atas capaian nasional sebesar 71,34 tahun.

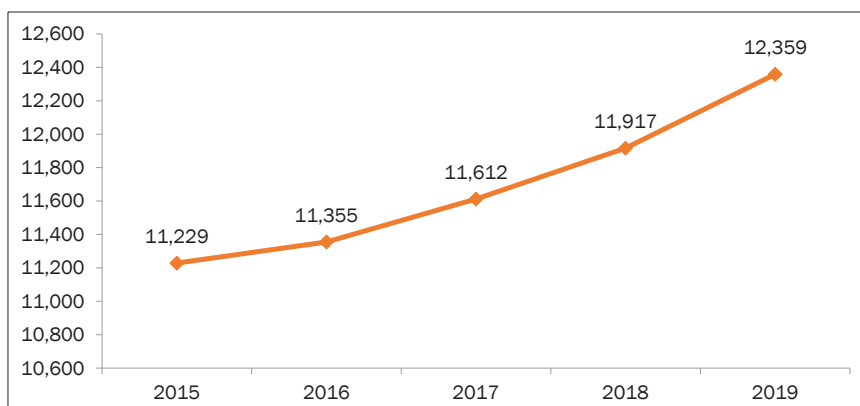


Sumber : BPS

Gambar 2.21
Umur Harapan Hidup Regional Kalimantan dan Indonesia (Tahun)

D. Standar Hidup Layak

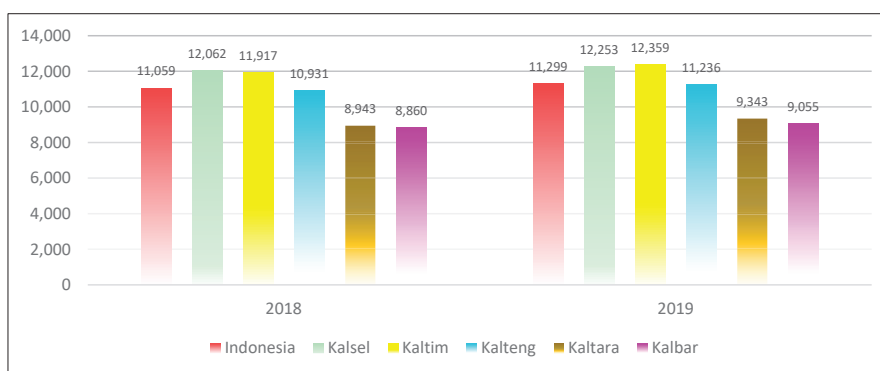
Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pada tahun 2019, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan masyarakat Kalimantan Timur mencapai 12,36 juta rupiah per tahun, atau bertambah 442 ribu rupiah dibandingkan tahun 2018. Maka, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan tersebut selama periode lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 2,33 persen per tahun.



Sumber : BPS

Gambar 2.22
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2015-2019 (Ribu Rp)

Pada komponen standar hidup layak di Regional Kalimantan tahun 2019, Kalimantan Timur kembali menjadi yang tertinggi dimana pada tahun sebelumnya posisi ini disalip oleh Kalimantan Selatan. Serta perolehan komponen pengeluaran per kapita Kalimantan Timur masih berada di atas nasional.



Sumber : BPS

Gambar 2.23
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
Regional Kalimantan dan Indonesia (Ribu Rupiah)

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Seni Budaya

Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Pembangunan sektor kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada program pengembangan nilai – nilai budaya

yaitu pembinaan, pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) oleh Kemenkumham Republik Indonesia. Apresiasi ini diberikan dalam rangka untuk menjaga agar karya budaya di Kalimantan Timur tidak diklaim oleh negara lain.

Tabel 2.18
Karya Budaya di Provinsi Kalimantan Timur
yang Telah Dipatenkan Tahun 2019

No.	Kabupaten/Kota	Karya Budaya
1.	Kutai Barat	Kelentangan Tari Ngerangkau Tari Gong Alat Musik Sapeq Tari Perang Dayak Genikng
2.	Kutai Kertanegara	Tari Dewa Memanah Tari Ganjur Suliikng Dewa
3.	Paser	Tari Ngarang

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim

Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat berbagai cagar budaya yang tersebar di beberapa kabuapaten/kota. Secara keseluruhan pada Tahun 2019 tercatat sebanyak 1.030 Cagar Budaya, 7 (tujuh) Museum, dan 6 (enam) Komunitas Budaya.

Tabel 2.19
Kekayaan Budaya yang Dimiliki Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Kekayaan Budaya		
		Cagar Budaya	Museum	Komunitas Budaya
1.	Kabupaten Paser	29	1	0
2.	Kabupaten Kutai Barat	7	1	0
3.	Kabupaten Kertanegara	371	2	3
4.	Kabupaten Kutai Timur	85	0	0
5.	Kabupaten Berau	58	2	0
6.	Kabupaten Paser Utara	12	0	0
7.	Kabupaten Mahakam Ulu	0	0	0

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Kekayaan Budaya		
		Cagar Budaya	Museum	Komunitas Budaya
8.	Kota Balikpapan	101	1	1
9.	Kota Samarinda	297	0	2
10	Kota Bontang	70	0	0
Provinsi Kalimantan Timur		1.030	7	5

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2019, Kemendikbud

Dalam hal pengembangan budaya dan seni di Provinsi Kalimantan Timur ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 yang mencapai 52,78. Namun capaian IPK ini masih dibawah capaian IPK Nasional yaitu sebesar 53,74.

Dari dimensi penilaian yang tercakup dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan, Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan nilai di atas angka nasional, yaitu pada dimensi Pendidikan dengan nilai 73,85, dimensi Ketahanan Sosial Budaya dengan nilai (76,82) dan dimensi budaya literasi dengan nilai 66,13.

Tabel 2.20
Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Dimensi IPK	Provinsi	Nasional
Ekonomi Budaya	26,60	30,55
Pendidikan	73,85	69,67
Ketahanan Sosial Budaya	76,82	72,84
Warisan Budaya	29,96	41,11
Ekspresi Budaya	33,86	36,57
Budaya Literasi	66,13	55,03
Gender	49,99	54,97
IPK	52,78	53,74

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2019, Kemendikbud

Terhadap capaian IPK Provinsi Kalimantan Timur tersebut, maka diperlukan sinergitas antar lembaga terkait di pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya, masyarakat sebagai pemilik ataupun sebagai pengapresiasi seni budaya.

B. Olahraga

Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sumberdaya manusia baik kepemudaan dan keolahragaan. Dalam pembangunan kepemudaan di Kalimantan Timur terus dilakukan terutama

yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, mengingat pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan di berbagai bidang.

Untuk mengukur kapasitas pemuda dalam pembangunan ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang menggambarkan kapasitas pemuda berdasarkan domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Pada Tahun 2016 IPP Propinsi Kalimantan Timur sebesar 56,33 meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 50,83. Dengan capaian ini IPP Kalimantan Timur menduduki Peringkat 3 secara nasional naik 3 peringkat dari tahun sebelumnya yang menduduki peringkat 6.

Sedangkan dalam pembangunan keolahragaan, setelah sukses meraih peringkat lima besar pada PON XIX Tahun 2016, Pemerintah Kalimantan Timur terus meningkatkan pembinaan bagi para atlet dengan tujuan menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lumbung atlet berprestasi untuk wilayah Indonesia Timur. Selain itu Provinsi Kalimantan Timur siap menjadi tuan rumah dalam event berskala nasional maupun internasional dengan mengoptimalkan seluruh sarana dan prasarana olahraga yang ada.

Tabel 2.21
Kondisi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 -2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Organisasi Pemuda	107	107	107	107	107
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	42	42	42	42	45
Jumlah Klub Olahraga	1.050	1.050	1.050	1.087	1.109
Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	97	97	101	102	105
Jumlah Kegiatan Olahraga	152	152	152	152	161
Jumlah Organisasi Olahraga	57	57	57	63	63

Sumber : Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2020, BPS Kaltim

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan investasi masa depan dalam rangka menumbuhkan insan yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tangguh, oleh karenanya masyarakat harus mengakses pelayanan pendidikan lebih baik. Dengan demikian

Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni menggambarkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan.

Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Semakin tingginya persentase penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan merupakan target mutlak yang harus dicapai oleh pemerintah. APS Provinsi Kalimantan Timur pada jenjang usia 7-12 tahun dan usia 16-18 tahun terus mengalami kenaikan yang mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan semakin meningkat. Sedangkan APS pada jenjang usia 13-15 tahun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2019.

Tabel 2.22
Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

Angka Partisipasi Sekolah						
Usia Sekolah	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7-12	97,60	99,63	99,54	99,67	99,76	99,68
13-15	89,00	97,92	98,18	98,79	98,89	98,83
16-18	74,24	80,68	80,81	81,32	81,55	81,81
Angka Partisipasi Kasar						
Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SD	111,04	112,61	110,04	108,07	108,02	106,84
SLTP	91,49	97,90	95,28	91,46	92,57	91,031
SLTA	85,54	90,31	95,38	99,51	96,08	94,96
Angka Partisipasi Murni						
Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SD	96,45	97,00	97,13	97,43	98,40	98,41
SLTP	77,53	79,06	79,20	79,58	79,68	80,42
SLTA	59,35	67,78	67,92	68,23	68,43	68,55

Sumber: BPS Kalimantan Timur

Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 paling tinggi berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar, yakni sebesar 106,84, hal ini menunjukkan bahwa terdapat 6,84 persen penduduk yang bukan dari golongan umur 7-12 tahun bersekolah di tingkat SD.

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu, serta dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas Pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang Pendidikan. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK

karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Dari tabel 2.17 di atas terlihat bahwa, APM di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 - 2019 mengalami peningkatan pada setiap jenjang Pendidikan. Peningkatan APM ini menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang Pendidikan yang harus diikuti terus bertambah dan menjadi penanda dari meningkatnya akses penduduk kelompok usia tersebut terhadap layanan Pendidikan di Kalimantan Timur.

Namun, meskipun APM terus mengalami kenaikan, pemerintah tetap mendorong peningkatan yang lebih baik lagi melalui beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berupa pemberian bantuan operasional Pendidikan, bantuan bagi siswa miskin, pembangunan unit sekolah baru, pemerataan guru, dan sebagainya.

Rasio Murid-Guru yang menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Sedangkan Rasio Murid-Sekolah menggambarkan tingkat perbandingan fasilitas pendidikan yakni jumlah sekolah yang aktif terhadap jumlah murid di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, angka ini masih umum mengingat belum dilihat persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

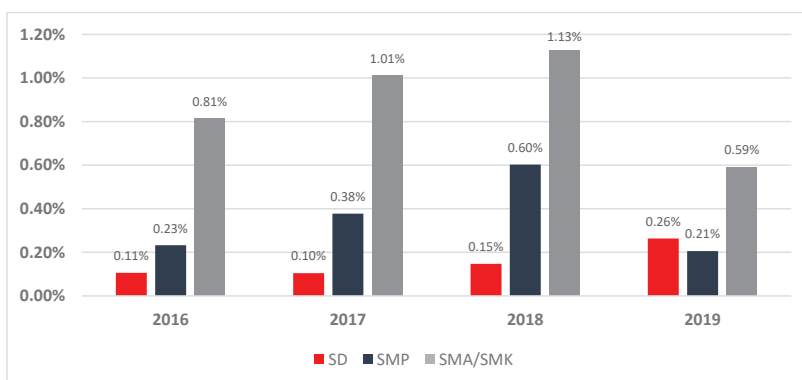
Tabel 2.23
Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Sekolah Dasar (SD)					
Negeri	1.656	354.825	20.678	17,16	214,27
Swasta	230	56.077	3.098	18,10	243,81
MI	122	23.122	1.419	16,29	189,52
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
Negeri	434	125.347	7.637	16,41	288,82
Swasta	212	31.328	2.115	14,81	147,77
MTs	151	26.888	1.941	13,85	178,07
Sekolah Menengah Atas (SMA)					
Negeri	137	62.628	3.610	17,35	457,14
Swasta	83	11.556	868	14,58	139,23
MA	61	9.111	787	11,58	149,36
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
Negeri	87	47.186	2.944	16,03	542,37
Swasta	135	28.097	1.806	15,56	208,13

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dan Kanwil Kemenag Wilayah Kaltim

Pada tahun 2019, rasio murid-guru paling tinggi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Sedangkan rasio guru terendah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Sementara rasio murid-sekolah tertinggi adalah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Angka Putus Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur pada semua jenjang Pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK), sudah cukup rendah, walaupun untuk jenjang Pendidikan menengah atas/kejuruan di tahun 2017 dan 2018 sempat berada di atas 1 persen, namun pada tahun 2019 angka putus sekolah di jenjang ini kembali turun menjadi 0,59%. Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah sebesar 0,59 persen pada tahun 2019 antarlain disebabkan karena pada wilayah tertentu (wilayah terpencil) di beberapa Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur tidak memenuhi standar untuk dibangun unit sekolah baru. Selain itu, ada sebagian kecil masyarakat usia sekolah yang lebih memilih bekerja membantu orang tua daripada melanjutkan sekolah.



Sumber : Statistik Kemendikbud

Gambar 2.24
Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (persen)

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam peningkatan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari pendidikan formal. Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 56 perguruan tinggi/akademi/lembaga pendidikan tinggi. Pada tahun 2018, jumlah lulusan pendidikan tinggi mencapai 12.853 dengan jumlah dosen sebanyak 3.970 orang.

Tabel 2.24
Indikator Perguruan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Kategori	Jumlah Perguruan Tinggi / Akademi/ Lembaga Pendidikan Tinggi	Jumlah Program Studi	Jumlah Dosen	Jumlah Lulusan
Perguruan Tinggi				
Negeri	5	159	1.664	6.783
Swasta	51	171	2.306	6.070
Jumlah	56	330	3.970	12.853

Sumber: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

B. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal utama dari sumber daya manusia dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesehatan juga menjadi pra syarat mutlak bagi penduduk untuk melaksanakan segala program perencanaan pembangunan terkait pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, bahkan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan bidang kesehatan akan memiliki *multiplier effect* pada program-program pembangunan kedepannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah melihat bagaimana perkembangan kesehatan masyarakat, baik dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, maupun tingkat kesehatan penduduk. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya melakukan peningkatan berbagai pelayanan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan berkualitas. Berbagai upaya peningkatan tersebut antara lain dilakukannya penyempurnaan pada beberapa program pembangunan kesehatan masyarakat, seperti peningkatan kesadaran akan kesehatan ibu dan bayi, kesadaran untuk menggunakan fasilitas kesehatan resmi, hingga terkait pola hidup sehat di masyarakat. Berikut fasilitas dan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur.

Saat ini bidang Kesehatan merupakan salah satu bidang yang mempunyai tugas dan beban paling berat dalam menangani dampak akibat pandemi Covid-19, dimana perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat. Untuk menanggulangi dampak Covid-19, perlu adanya reformasi di bidang kesehatan yang ditekankan pada pengendalian penyebaran penyakit menular, pelayanan kesehatan dan surveilans. Sehingga pasca Covid-19 akan difokuskan kepada Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup Sehat, penanganan penyakit menular, ketersediaan alat kesehatan, kesiapan

sarana dan prasarana kesehatan serta masyarakat keluarga miskin yang terdampak penyakit menular.

Tabel 2.25
Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

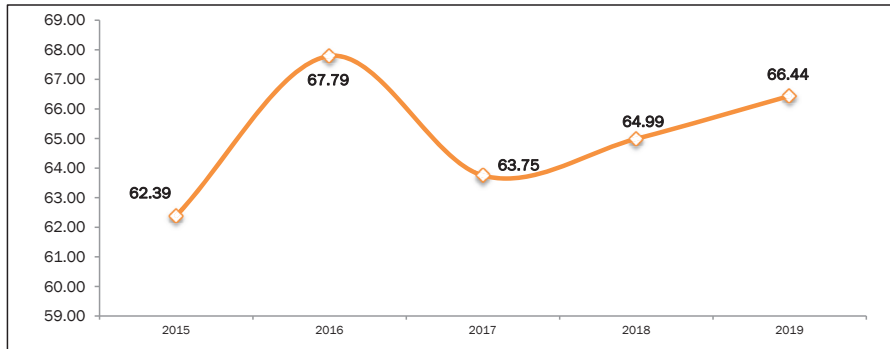
No.	Fasilitas Kesehatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rumah Sakit	46	47	47	44	45
2	Tempat Tidur RS	4.873	6.154	6.219	6.080	6.080
3	Rumah Sakit Swasta	16	16	16	16	16
4	Dokter Umum	1.113	1.035	1.114	1.010	1.024
5	Dokter Gigi	335	323	320	309	314
6	Dokter Spesialis	347	583	678	503	647
7	Tenaga Medis RS	1.189	1.358	1.472	1.513	1.671
8	Perawat RS	6.893	7.178	6.662	7.823	7.538
9	RS Bersalin	10	10	10	9	8
10	Puskesmas	180	180	181	190	187
11	Pustu	689	669	714	716	716
12	Dokter Puskesmas	607	714		672	589
13	Pedagang Besar Farmasi	44	45	47	18	18
14	Apotek	561	524	524	637	637
15	Persentase Persalinan dengan Tenaga Medis	91,26	90,12	88,2	96,34	96,39

Sumber: Dinas Kesehatan

C. Ketenagakerjaan

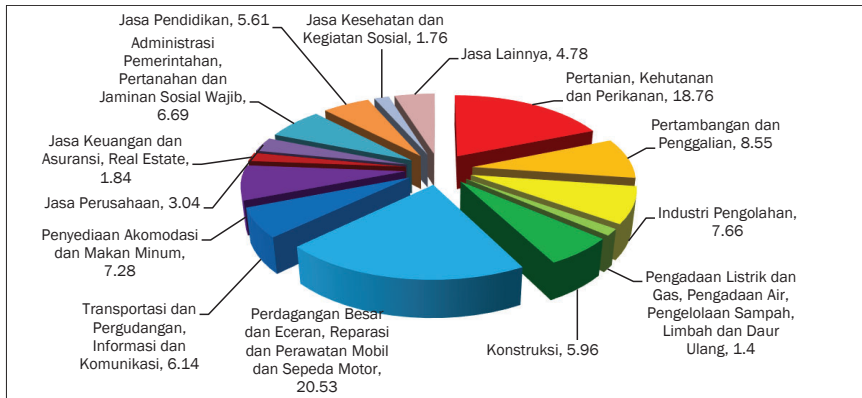
Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kemampuan kehidupan masyarakat sekaligus mengindikasikan daya saing sumber daya manusia suatu wilayah. Di Provinsi Kalimantan Timur, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 67,79 persen pada tahun 2016 menjadi 64,99 persen pada tahun 2018. Hal ini dimungkinkan karena terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan yang lainnya. Selain itu, penurunan ini juga bisa disebabkan oleh penimbangnya, yaitu jumlah penduduk yang tumbuh melebihi pertumbuhan angkatan kerja.

Namun secara perlahan tingkat partisipasi angkatan kerja mulai meningkat di tahun 2019, sebelumnya pada tahun 2018 TPAK Kalimantan Timur sebesar 64,99 persen, mengalami peningkatan sebesar 1,45 persen di tahun 2019 menjadi 66,44 persen.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

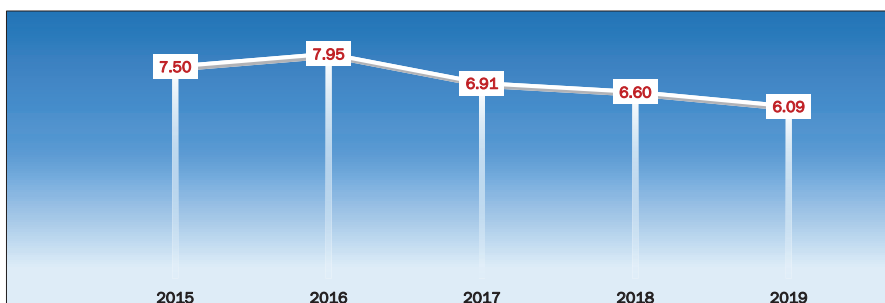
Gambar 2.25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.26
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 (%)

Pada tahun 2019, penduduk bekerja di Kalimantan Timur memiliki pekerjaan yang terbagi dalam 14 (empat belas) sektor lapangan usaha seperti yang terlihat pada di atas. Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur bekerja pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor mencapai 20,53 persen, diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 18,76 persen dan yang paling sedikit bekerja di sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang mencapai 1,40 persen.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.27
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2015-2019 (persen)

Penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) di Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun di setiap tahunnya. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,09 persen dimana angka ini menurun jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 6,60 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja (menganggur) terhadap jumlah angkatan kerja. Secara umum, kebijakan pemerintah terkait angkatan kerja memberi dampak positif pada penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur sehingga keberlanjutan program prioritas yang memberdayakan masyarakat harus terus dioptimalkan.

Tabel 2.26
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (persen)

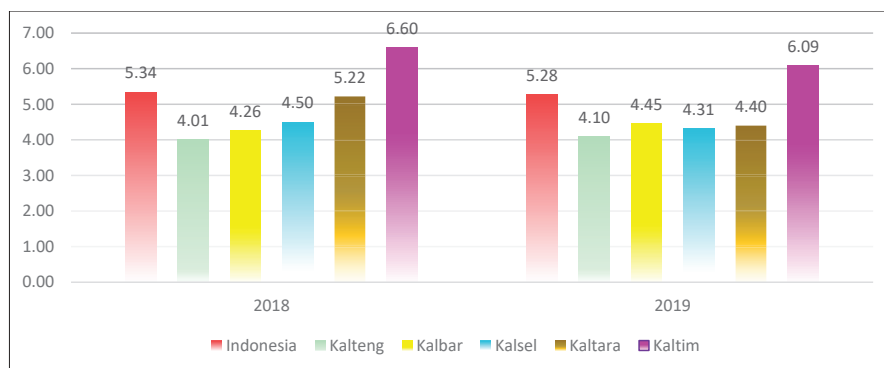
No	Kab/Kota	2015	2017	2018	2019
1	Paser	9,06	5,54	5,00	4,55
2	Kutai Barat	11,7	5,87	4,86	5,08
3	Kutai Kartanegara	10,22	5,72	5,96	5,98
4	Kutai Timur	5,14	4,61	5,93	5,53
5	Berau	5,72	6,45	5,62	5,08
6	Penajam Paser Utara	7,28	4,75	4,76	6,26
7	Balikpapan	5,95	10,39	9,52	7,29
8	Samarinda	5,61	6,19	6,16	5,87
9	Bontang	12,07	12,44	9,61	9,19
10	Mahakam Ulu	4,75	9,05	4,17	3,69

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2019 terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Kalimantan Timur paling tinggi terdapat di Kota Bontang sebesar 9,19 persen, Kota Balikpapan sebesar 7,29 persen, dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 6,26 persen. Sedangkan tingkat

pengangguran terendah kembali ditorehkan oleh Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 3,69 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Timur tahun 2019 masih menjadi yang tertinggi diantara provinsi lainnya di regional Kalimantan dan berada di atas tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 5,28 persen. Hal ini memerlukan perhatian lebih lanjut, jika mengingat Kalimantan Timur sebagai penghasil nilai tambah ekonomi terbesar di Regional Kalimantan.



Sumber : BPS

Gambar 2.28
Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Kalimantan dan Indonesia

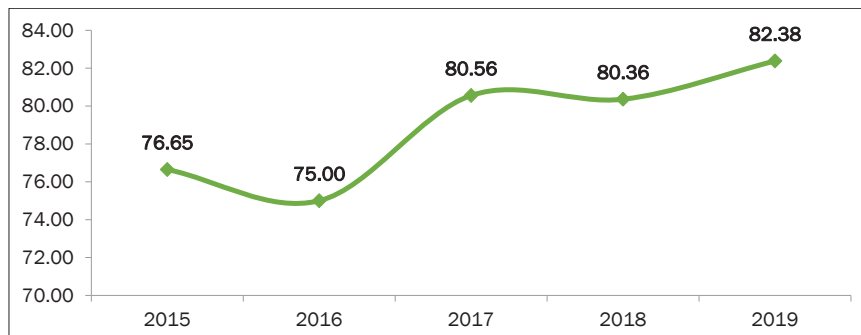
Ketenagakerjaan juga merupakan salah satu aspek yang paling terdampak akibat Pandemi Covid 19. Pada tingkat global diperkirakan sekitar 195 juta orang akan kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini. Tingkat pengangguran Terbuka di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 5,28% diperkirakan akan meningkat menjadi 8,3% di tahun 2020. Peningkatan jumlah pengangguran di tahun 2020 juga diperkirakan akan dialami oleh Kalimantan Timur. Upaya mengatasi pengangguran melalui peningkatan kapasitas masyarakat, terutama pada sektor-sektor yang dapat bertahan dan bahkan berkembang ditengah Pandemi Covid 19 perlu untuk menjadi perhatian Pemerintah Provinsi di Tahun 2021.

D. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

1) Pelayanan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan

masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun.



Keterangan : *) Data Sementara
Sumber: SIDATA Kalimantan Timur

Gambar 2.29
Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

Survei Kepuasan Masyarakat di Kalimantan Timur pada tahun 2019 meningkat tipis menjadi 82,38 dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 80,36. Hal ini diikuti dengan berhasilnya Inovasi Pelayanan Publik Kalimantan Timur yang berhasil masuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional.

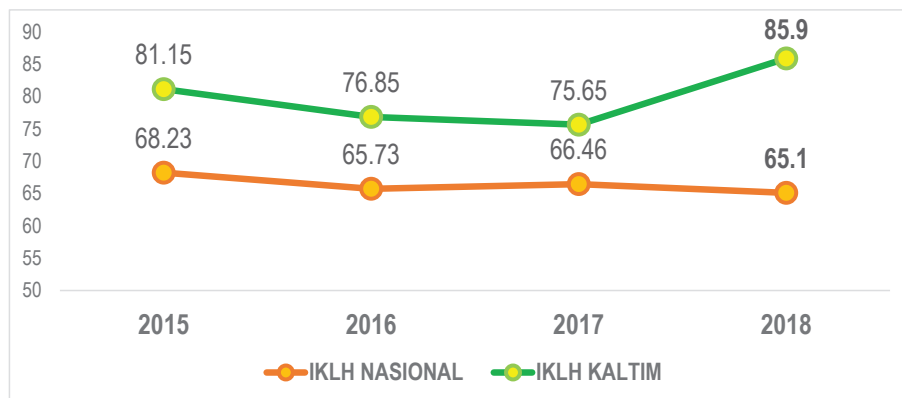
2) Pengelolaan Keuangan Daerah dan Integritas Kinerja Daerah

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2014 dan pada Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Timur berhasil mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya, setelah sebelumnya opini WTP diraih pada tahun 2012, 2014, 2015, 2016 dan 2017. Sempat terjadinya penurunan status opini BPK pada tahun 2013, hal ini menjadi “pekerjaan rumah” bagi pengelolaan keuangan daerah agar meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap setiap penggunaan keuangan daerah. Dalam hal integritas kinerja, Provinsi Kalimantan Timur memperoleh peringkat keempat dari lima provinsi yang memiliki Skor Integritas Tertinggi secara nasional.

E. Lingkungan

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sumber daya tak terbarukan dengan pengelolaan yang bersifat eksploitatif dan banyak menyebabkan permasalahan kerusakan lingkungan hidup. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kinerja

program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Secara umum, dari tahun 2015 hingga tahun 2018 IKLH Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan dengan IKLH Nasional.



Gambar 2.30
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

IKLH Kaltim mengalami peningkatan cukup signifikan dari predikat baik ($70 < \text{IKLH} \leq 80$) 75,65 pada tahun 2017 menjadi predikat sangat baik ($\text{IKLH} > 80$) 85,9 di tahun 2018. Peningkatan IKLH Kaltim dipengaruhi oleh capaian indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan yang meningkat pada tahun 2018. Pada tahun 2019, IKLH Kaltim mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 78,81.

Selanjutnya, Kaltim telah dipilih sebagai lokasi Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan melalui *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF) pada Oktober 2015. Program FCPF Carbon Fund dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di seluruh Kaltim (12,7 juta hektar) untuk mempertahankan 6,5 juta hektar kawasan berhutan. Apabila dilihat dari pengurangan emisi gas rumah kaca, Provinsi Kaltim terus berusaha untuk melakukan upaya-upaya penurunan emisi.

Tabel 2.27
Angka Penurunan Emisi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2019

Keterangan	2017	2018	2019
Angka Penurunan Emisi	54,12 juta ton co2eq	42,14 juta ton co2eq	34,65 juta ton co2eq

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pertanian

1) Pertanian Tanaman Pangan

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi belum dapat dicapai hingga saat ini. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada lahan kering (ladang) dan lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi, agro-ekosistem sawah hingga saat ini mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan.

Secara umum Produksi Padi Tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018. Namun disisi lain terjadi peningkatan Luas Panen pada Tahun 2019 sebesar 869 Ha dari Tahun 2018 yang disebabkan oleh kemarau panjang yang terjadi pada tahun 2019. Penurunan produksi padi salah satunya disebabkan oleh faktor kemarau panjang yang terjadi pada tahun 2019. Dari sisi produktivitas, Kalimantan Timur masih berada di bawah rata-rata produktivitas nasional yakni 5,11 ton/ha.

Tabel 2.28
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2015	99.209	408.782	4,12
2016	80.343	305.337	3,80
2017	94.394	400.102	4,24
2018*	100.383	374.040	3,73
2019*	99.514	378.676	3,81

**) Angka Ramalan II, Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim*

2) Perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Komoditas perkebunan yang cukup mendominasi dan menarik banyak investasi luar daerah adalah perkebunan kelapa sawit yang hingga saat ini luas tanamnya mencapai 1,39 juta ha dan memiliki produksi mencapai 18,42 juta ton. Selain itu, komoditas karet juga cukup memberikan sumbangsih dalam perekonomian daerah dengan produksi karet yang cukup tinggi mencapai 52,82 ribu ton pada tahun 2019. Berikut produktivitas komoditas perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.29
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No.	Tahun	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Karet	118.638	52.817	1,08
2.	Kelapa	21.152	11.013	0,67
3.	Kopi	2.529	223	0,21
4.	Lada	8.921	5.799	0,91
5.	Kakao	7.328	2.513	0,57
6.	Kelapa Sawit	1.227.665	18.343.852	20,78

Sumber: Dinas Perkebunan. 2020

3) Kehutanan

Potensi hutan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sangat besar. Luas hutan di Kalimantan Timur mencapai 8,3 juta hektar yang terdiri dari hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan lindung dan KSA/KPA. Pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan berasal dari hutan alam dan tanaman. Produksi hasil hutan kayu terus mengalami peningkatan dari 4,3 juta m³ pada tahun 2017 menjadi 5,2 juta m³ di tahun 2019. Tidak hanya hasil hutan kayu, produksi hasil hutan bukan kayu juga mengalami peningkatan yang signifikan yakni pada tahun 2017 sebesar 6,9 ton menjadi 1.430 ton.

Walaupun demikian, masih banyak ditemui lahan kritis di Kalimantan Timur. Sampai dengan tahun 2019 lahan kritis di Kalimantan Timur adalah sebesar 113.015 hektar dan lahan sangat kritis seluas 79.900 hektar. Oleh karena itu, upaya penurunan lahan kritis masih terus ditingkatkan melalui rehabilitasi hutan dan lahan.

Tabel 2.30
Data Lahan Kritis Menurut Tingkat Kekritisan Lahan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

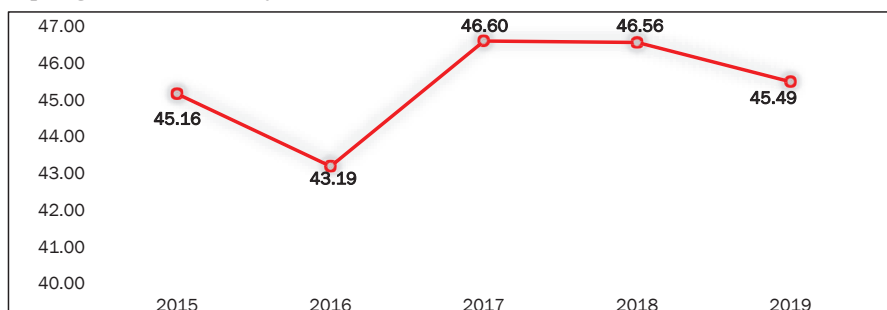
Fungsi Kawasan	Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	Tidak Kritis	Total
HPK	536,18	2.242,30	50.847,26	37.748,15	29.333,72	120.707,61
HPT	2.536,14	7.338,38	2.076.115,67	540.395,72	197.048,22	2.823.434,13
HP	72.494,93	60.437,52	1.668.892,82	800.749,59	416.283,11	3.018.857,98
HL	2.566,30	11.785,67	1.266.122,80	382.467,60	109.383,93	1.772.326,30
KSA	1.767,01	31.211,76	137.432,09	200.894,32	65.687,88	436.993,06
TOTAL	79.900,55	113.015,64	5.199.410,65	1.962.255,39	817.736,85	8.172.319,08

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim

Selain itu, dari sektor kehutanan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dapat dikelola oleh masyarakat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan. Perhutanan sosial di Kalimantan Timur pada tahun 2019 mencapai 57 unit dengan luas 154.759 hektar.

B. Energi Dan Sumber Daya Mineral

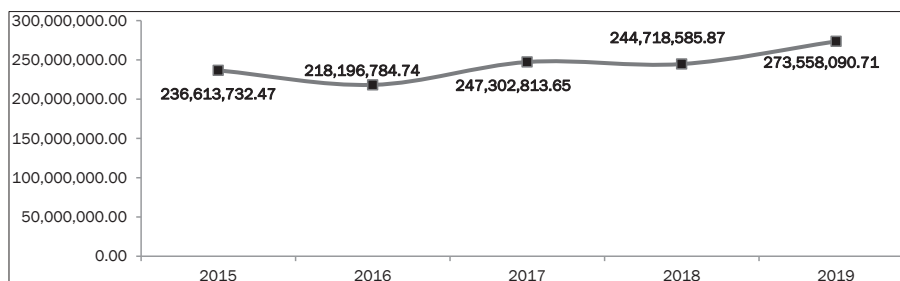
Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur cenderung fluktuatif. Namun pada tahun 2019, kontribusinya turun tipis menjadi sebesar 45,49 persen dari tahun sebelumnya sebesar 46,56 persen. Meski demikian, kontribusi tersebut masih belum bisa disusul oleh lapangan usaha lainnya.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.31
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (persen)

Produksi pertambangan batubara di Kalimantan timur sangat berfluktuatif. Sempat mengalami penurunan produksi di tahun 2016 sebesar 218,19 juta ton, produksi batubara Kalimantan Timur kembali meningkat di tahun 2019 menjadi sebesar 273,56 juta ton.



Sumber: Sidata Kaltim; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Gambar 2.32
Produksi Pertambangan Batubara Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2015-2019 (Ton)

Jika dilihat produksi pertambangan unggulan lainnya di Kalimantan Timur, terdapat peningkatan produksi pada tahun 2019 seperti minyak bumi dan gas bumi.

Tabel 2.31
Produksi Pertambangan Unggulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

Tahun	Batubara (Ton)	Minyak Bumi (Ribu Barrel)	Gas Bumi (Ribu MMBTU)
2015	236.613.732,47	36.605,80	609.744,52
2016	218.196.784,74	34.323,80	568.588,80
2017	247.302.813,65	29.754,18	449.579,20
2018	244.718.585,87	23.717,95	296.832,49
2019	273.558.090,71	26.250,00	379.590,00

Sumber : Dinas ESDM Prov. Kaltim

C. Jumlah Proyek Investasi Dalam Negeri dan Asing (PMDN/PMA)

Kenaikan jumlah proyek investasi merupakan “angin segar” bagi perekonomian Kalimantan Timur karena selain meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, juga meningkatkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian.

Tabel 2.32
Jumlah Proyek PMDN/PMA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

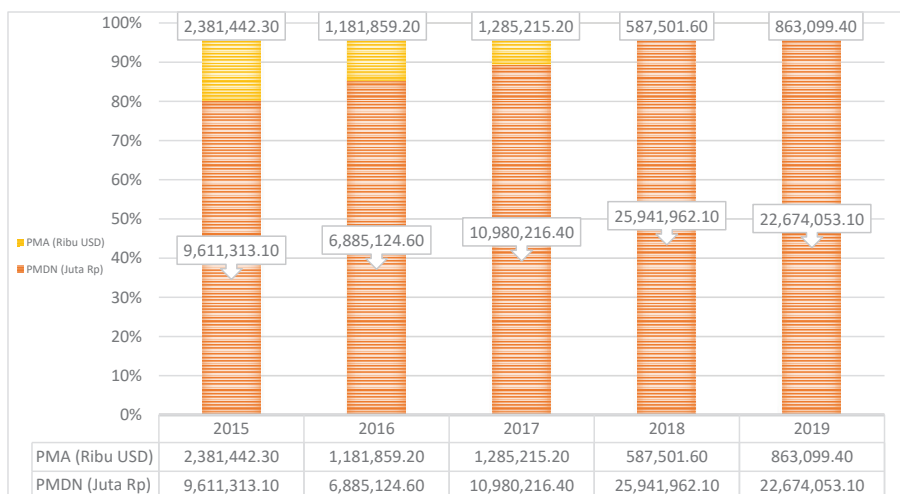
Tahun	PMDN	PMA	Total
2015	143	420	563
2016	243	471	714
2017	357	566	923
2018	520	513	1.033
2019	2.227	903	3.130

Sumber: DPMPSTSP Kalimantan Timur

Dilihat dari jumlah proyek, secara total terdapat peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah proyek di Kalimantan Timur sebanyak 3.130, meningkat hingga tiga kali lipat jika dibandingkan jumlah proyek pada tahun 2018 yang hanya sebanyak 1.033 proyek. Kenaikan jumlah proyek pada investasi Dalam Negeri sebesar 1.707 proyek dan kenaikan proyek pada investasi Asing sebesar 390 proyek.

D. Nilai Investasi (PMDN/PMA)

Nilai realisasi investasi dalam negeri tahun 2019 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp 25,94 triliun menjadi sebesar Rp 22,67 triliun. Sedangkan nilai realisasi investasi asing mengalami peningkatan menjadi 863,09 juta USD. Jika dilihat menurut trennya, nilai investasi Kalimantan Timur sangat berfluktuasi.



Sumber: DPMPSTP Kalimantan Timur

Gambar 2.33

Nilai Investasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

Berdasarkan rilis resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, total investasi di Kalimantan Timur pada tahun 2019 senilai Rp 35,62 triliun. Capaian ini masih berada di bawah target yang ditetapkan untuk tahun 2019 yang seharusnya sebesar Rp 36,35 triliun.

E. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap memperlihatkan bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur mampu menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Rasio daya serap tenaga kerja dari nilai investasi, baik PMDN maupun PMA, di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

		PMDN				
No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMDN	24.825	29.023	9.236	12.935	20.837
2	Jumlah proyek seluruh PMDN	143	243	357	520	2.227

PMDN						
No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
3	Rasio daya serap tenaga kerja	173,60	119,44	25,87	24,88	9,36
PMA						
No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMA	66.230	22.204	15.508	12.500	15.166
2	Jumlah proyek seluruh PMA	420	471	566	513	903
3	Rasio daya serap tenaga kerja	157,69	47,14	27,40	24,37	16,80

Sumber: DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan sektor usahanya, tenaga kerja di Kalimantan Timur pada tahun 2019 paling banyak diserap oleh sektor perdagangan sebesar 20,53 persen dan sektor pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 18,76 persen. Adapun lapangan usaha yang menciptakan nilai tambah terbesar untuk PDRB Kalimantan Timur yaitu Pertambangan dan Penggalian hanya mampu menyerap 8,55 persen tenaga kerja, sedangkan sektor industri pengolahan hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 7,66 persen.

Tabel 2.34
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yan Bekerja Menurut Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Kategori	Jumlah	Persentase
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	319.764	18,76
Pertambangan dan Penggalian	145.794	8,55
Industri Pengolahan	130.507	7,66
Pengadaan Listrik, dan Gas; Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	23.871	1,40
Konstruksi	101.671	5,96
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	349.958	20,53
Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi	104.710	6,14
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	124.157	7,28
Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate	31.403	1,84
Jasa Perusahaan	51.807	3,04

Kategori	Jumlah	Persentase
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	114.065	6,69
Jasa Pendidikan	95.613	5,61
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	29.939	1,76
Jasa Lainnya	81.549	4,78
Total	1.704.808	100

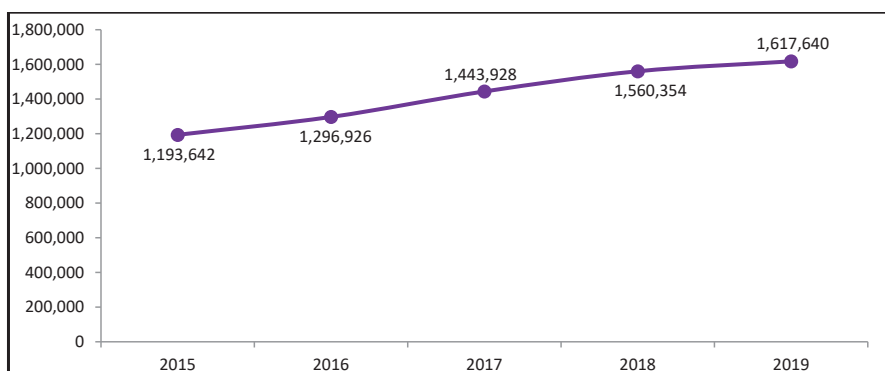
Sumber : BPS Prov. Kaltim

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita setiap bulannya. Selama kurun waktu beberapa tahun, pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang cukup baik dimana pada tahun 2019 mencapai Rp. 1.617.640,- per bulan.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.34
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Rupiah)

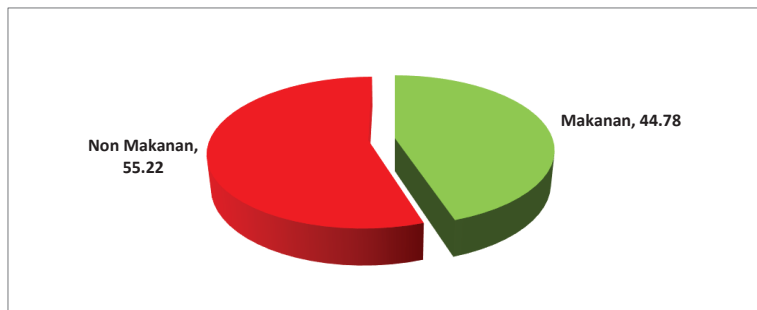
B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)

Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan).

Tabel 2.35
Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	644.291	709.006	780.443	857.449	893.217
2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)	1.193.642	1.296.926	1.443.928	1.560.354	1.617.640
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%)	53,98	54,67	54,05	54,95	55,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.35
Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita sebulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

C. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan/daya beli petani di wilayah pedesaan. Selain itu, NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi pertaniannya. Semakin tinggi NTP-nya maka semakin kuat kemampuan/daya beli petani.

Pada periode tahun 2015-2019, Rata-rata NTP Provinsi Kalimantan Timur selalu berada di bawah nilai 100 yang berarti bahwa petani mengalami

defisit/penurunan daya beli karena kenaikan penerimaan hasil produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga input biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumahtangganya.

Tabel 2.36
Rata-rata Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2015-2019 (2012=100)

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	117,00	120,03	121,96	123,77	124,84
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	118,66	122,31	125,54	128,75	131,92
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	98,62	98,14	97,15	96,14	94,63

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Penurunan rata-rata NTP tahun 2019 disebabkan penurunan rata-rata NTP pada subsektor tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat. Rata-rata NTP pada subsektor tanaman pangan sedikit menurun 0,39 persen terhadap tahun 2018, sedangkan rata-rata NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami penurunan drastis sebesar 7,96 persen terhadap rata-rata NTP pada tahun 2018. Selanjutnya, ada tiga subsektor yang mengalami peningkatan rata-rata NTP, yaitu subsektor hortikultura, peternakan, dan perikanan. Peningkatan tertinggi terjadi pada subsektor peternakan sebesar 1,64 persen, dilanjutkan oleh subsektor perikanan sebesar 1,25 persen dan subsektor hortikultura sebesar 0,01 persen. Peningkatan tersebut menjadikan NTP pada subsektor peternakan menjadi yang paling tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sedangkan rata-rata NTP terendah berada pada subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, dimana komoditas subsektor ini diwakili oleh coklat biji, karet, cengkeh, lada, dan lain-lain.

Tabel 2.37
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Subsektor Tahun 2018-2019 (2012=100)

No	Uraian	NTP		%
		2018	2019	Perubahan
	NTP Gabungan	96,14	94,63	-1,57
1.	Tanaman Pangan	94,57	94,20	-0,39
2.	Hortikultura	93,11	93,13	0,01
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	88,42	81,38	-7,96
4.	Peternakan	109,16	110,95	1,64
5.	Perikanan	103,32	104,62	1,25

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Rata-rata Nilai Tukar Petani di regional Kalimantan memiliki fenomena yang sama. Seluruh provinsi pada regional Kalimantan memiliki rata-rata Nilai Tukar

Petani berada di bawah 100 dan berada di bawah nasional sebesar 103,21. Namun jika diurutkan, rata-rata NTP tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 96,74, disusul Kalimantan Selatan sebesar 95,31.

Tabel 2.38
Nilai Tukar Petani (NTP) Regional Kalimantan dan Nasional
Menurut Subsektor Tahun 2019 (2012=100)

No	Uraian	Kaltim	Kalbar	Kalteng	Kalsel	Nasional
NTP Gabungan		94,63	93,76	96,74	95,31	103,21
1.	Tanaman Pangan	94,20	94,58	94,55	93,68	105,78
2.	Hortikultura	93,13	100,39	105,99	105,30	102,44
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	81,38	89,39	88,76	79,81	94,95
4.	Peternakan	110,95	94,91	103,09	108,93	108,05
5.	Perikanan	104,62	109,12	110,56	110,43	106,94

Sumber : BPS

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Luas Wilayah Produktif

Pengembangan luas wilayah produktif harus terus mendapat kawalan dari instansi terkait mengingat produktifitas pertanian, perkebunan, maupun pemukiman merupakan lahan yang bersentuhan langsung ke masyarakat Kalimantan Timur. Gambaran tentang luas wilayah produktif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.39
Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan, dan Permukiman)
terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif (Ha)	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan (Ha)	Rasio (%)
1.	Berau	370.716	536.320	62,12
2.	Kutai Barat + Mahakam Ulu	515.012	862.681	59,70
3.	Kutai Kertanegara	420.324	936.710	44,87
4.	Kutai Timur	472.421	942.679	50,11
5.	Penajam Paser Utara	113.402	145.011	78,20
6.	Paser	301.226	445.964	67,54
7.	Balikpapan	22.538	34.069	66,15
8.	Bontang	5.643	10.002	56,42
9.	Samarinda	13.320	68.888	19,34
J u m l a h		2.234.602	3.982.325	56,11

Sumber: BPS Kalimantan Timur Tahun 2013

B. Infrastruktur Pembangunan

Kemajuan pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana wilayah diukur dari kemajuan pembangunan yang meliputi: pembangunan jalan, jembatan, transportasi darat dan SDP, transportasi laut, transportasi udara, air baku dan air bersih, jaringan irigasi, serta perumahan dan permukiman.

Gambaran umum penyediaan infrastruktur Kalimantan Timur belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Prasarana Jaringan Jalan provinsi sepanjang 895,09 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2019 mencapai 61,45 %. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 93,74 km, kondisi sedang mencapai 456,26 Km, kondisi rusak ringan mencapai 195,12 Km, dan kondisi rusak berat mencapai 149,97 Km. Sedangkan jaringan jalan nasional sepanjang 1.710,90 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2019 mencapai 81,59 %. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 251,16 Km, kondisi sedang 1.144,83 Km, kondisi rusak ringan mencapai 249,72 Km, dan kondisi rusak berat mencapai 65,19 Km.

Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada salah satu permasalahan yaitu rasio panjang jalan terhadap luas wilayah mencapai 149,19 km per 1.000 km² (terdapat jalan sepanjang 149,19 km di dalam wilayah seluas 1000 km²) masih di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km². Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Penyebaran penduduk yang tidak merata masih dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berbukit dan bergunung;
- 2) Permasalahan penyediaan lahan pembangunan yang belum sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Keterbatasan alokasi pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan;
- 4) Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung;
- 5) Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal.
- 6) Pengendalian batas maksimal muatan barang yang sesuai kelas jalan belum optimal;
- 7) Pembangunan jalan belum sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai jalan arteri dan kolektor

Tabel 2.40
Panjang Jalan Menurut Status dan Jenis Permukaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

NO	STATUS	PANJANG (KM)	ASPAL	KERIKIL	TANAH	LAINNYA
1	Nasional	1.710,90	1.541,28	0,00	0,00	169,61
2	Provinsi	895,09	577,57	6,25	124,55	186,73

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur

Tabel 2.41
Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

NO	STATUS	BAIK	SEDANG	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT
1	Nasional	251,16	1.144,83	249,72	65,19
2	Provinsi	93,74	456,26	195,12	149,97
3	Kabupaten/Kota	6.859,70	2.265,13	2.035,89	2.355,49
TOTAL		7.204,60	3.866,22	2.480,73	2.570,65

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur

Terkait penyelenggaraan layanan transportasi dalam konteks pembagian kewenangan pemerintahan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah di level provinsi berkaitan dengan urusan perhubungan lebih ditekankan pada pelayanan perhubungan darat, laut, sungai, danau dan angkutan penyeberangan. Di Kalimantan Timur terdapat 6 bandar udara yang terdiri dari 1 bandara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura I dan 5 bandara dikelola oleh Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan RI. Secara khusus perkembangan bandara APT. Pranoto, saat ini telah beroperasi dengan jumlah 7 (tujuh) maskapai dengan rute penerbangan yaitu Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Berau, Melak, Tanjung Selor, dan Datarah Dawai.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 432 Tahun 2017 bahwa pendekatan multi-dimensi dalam perumusan kebijakan pelabuhan nasional sebagaimana amanat undang-undang diharapkan mampu mendukung dan menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa, membantu menciptakan konektifitas dan pola distribusi nasional yang handal (reliable) dan dinamis serta berkontribusi dan menurunkan biaya logistik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan hirarki pelabuhan, di Kalimantan Timur telah ditetapkan 13 pelabuhan laut yang terdiri 1 (satu) Pelabuhan Utama, 9 (Sembilan) Pelabuhan Pengumpul dan 3 (Tiga) Pelabuhan Regional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.42
Rencana Induk Pelabuhan Nasional
Di Kalimantan Timur Berdasarkan KP 432 Tahun 2017

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							Keterangan
	Kabupaten/Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2017	2022	2027	2037	
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur								
304	Balikpapan	1	Balikpapan	PU	PU	PU	PU	*
305	Berau	2	Mataritip	PR	PR	PR	PR	
306	Berau	3	Tanjung Redeb	PR	PP	PP	PP	*
307	Bontang	4	Lhok Tuan	PP	PP	PP	PP	*/TK
308	Bontang	5	Tanjung Laut	PP	PP	PP	PP	*/TK
309	Kutai Kertanegara	6	Kuala Samboja / Sebulu	PP	PP	PP	PP	*/TK
310	Kutai Kertanegara	7	Tanjung Santan	PP	PP	PP	PP	*/TK
311	Kutai Timur	8	Maloy	PP	PP	PP	PP	
312	Kutai Timur	9	Sangatta	PP	PP	PP	PP	*/TL/TK
313	Kutai Timur	10	Sangkulirang	PR	PR	PR	PR	*
314	Paser	11	Tana Paser / Pondong	PP	PP	PP	PP	*/TK
315	Penajam Pasir Utara	12	Penajam Paser	PP	PP	PP	PP	
316	Samarinda	13	Samarinda	PP	PP	PP	PP	*

Sumber : Lampiran KP 432 Tahun 2017

*Keterangan : PU (Pelabuhan Utama); PP (Pelabuhan Pengumpul); PR (Pelabuhan Regional)

Untuk pelayanan angkutan penyeberangan telah ditetapkan 7 (tujuh) pelabuhan penyeberangan yang terdapat di Kalimantan Timur yaitu 2 (dua) Pelabuhan Kelas I yang terdiri dari Pelabuhan Kariangau dan Pelabuhan Penajam, 1 (satu) Pelabuhan Kelas II yaitu Pelabuhan Tenggarong, dan 4 (empat) Pelabuhan Kelas IV yang terdiri dari Pelabuhan Desa Sakka, Sungai Meriam, Handil I dan Gunung Tabur.

Sedangkan untuk transportasi darat, di Kalimantan Timur terdapat 2 terminal tipe A yang telah beroperasi untuk melayani rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu Terminal Tipe A Batu Ampar di Balikpapan, dan Terminal Tipe A Samarinda di Samarinda Seberang. Namun kondisi kedua terminal tersebut memerlukan peningkatan pelayanan fasilitas.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat adalah masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur. Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang belum memenuhi standar minimal dilihat dari kualitas jenis atap, lantai dan dinding rumah. Hingga tahun 2019 tercatat bahwa rumah tidak layak huni mencapai 62.686 unit, mengalami kenaikan sebanyak 10.964 unit selama 2 tahun terakhir. Ketidaklayakan rumah tersebut baik dari segi kualitas fisik rumah maupun kualitas fasilitas rumah.

Selain itu, penambahan jumlah RTLH disebabkan karena di updating data RTLH serta penambahan nilai susut bangunan di tahun yang bersangkutan.

Tabel 2.43
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH (Unit)	Sumber Data (Verifikasi Pemda)
1	Balikpapan	359	Dinas Perumahan dan Permukiman, Kota Balikpapan
2	Samarinda	24.105	Dinas Perumahan dan Permukiman, Kota Samarinda
3	Kutai Timur	10.430	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Kutai Timur
4	Bontang	1.196	Data Kelurahan, Kota Bontang
5	Kutai Kartanegara	18.483	Data e-RTLH Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019
6	Berau	523	Database Kab. Berau
7	Penajam Paser Utara	2.579	Pemda Kab. PPU
8	Paser	4.476	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kab. Paser
9	Kutai Barat	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kab. Kutai Barat
10	Mahakam Ulu	535	Survey RLH/RTLH Tahun 2016
Kalimantan Timur		62.686	

Sumber: Laporan Akhir Tenaga Ahli Pendataan Perumahan Kementerian PUPR Satker SNVT Prov. Kaltim, 2019

Tingginya jumlah hunian tidak layak di suatu kawasan berpengaruh kepada kualitas lingkungan permukiman. Kawasan permukiman yang didalamnya terdapat hunian tidak layak huni dapat dikategorikan sebagai kawasan kumuh. Adapun 7 (tujuh) aspek dan kriteria dalam penentuan kawasan kumuh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.2/PRT/M/2016, meliputi: kualitas bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, sistem penyediaan air minum dan proteksi kebakaran. Berdasarkan kriteria tersebut, sejumlah kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Timur teridentifikasi sebagai kawasan kumuh yang memerlukan peningkatan kualitas dan penataan kawasan.

Luasan dan sebaran kawasan kumuh di kabupaten/kota dimuat dalam SK Bupati/Walikota, agar menjadi prioritas penanganan sesuai kewenangan yang

tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan SK Bupati/Walikota, kawasan kumuh di Provinsi Kalimantan Timur adalah seluas 1.187,81 ha yang tersebar di 9 kabupaten/kota dimana kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi adalah seluas 67,67 ha di Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau.

Tabel 2.44
Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Kalimantan Timur

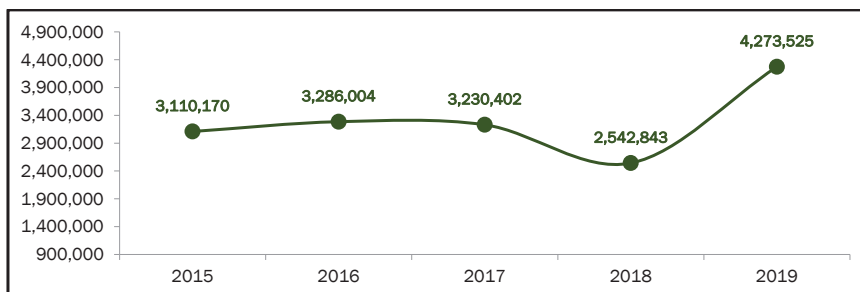
No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	SK Bupati/Walikota
1	Balikpapan	58,58	No. 188.45-285/2019
2	Samarinda	133,33	No. 413.2/222/HK-KS/VI/2018
3	Kutai Timur	75,93	No. 050/K.661/2015
4	Bontang	73,56	No. 32 Tahun 2018
5	Kutai Kartanegara	172,67	No. 376/SK-BUP/HK/2016
6	Berau	125,40	No. 628 Tahun 2018
7	Penajam Paser Utara	49,07	No. 593.33/270/2017
8	Paser	10,68	No. 653/KEP-392/2015
9	Kutai Barat	488,59	No. 413.2/K.719/2018
Kalimantan Timur		1.187,81	

Sumber: SK Kumuh Bupati/Walikota Tahun 2015-2019

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur. Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang belum memenuhi standar minimal dilihat dari kualitas jenis atap, lantai dan dinding rumah. Hingga tahun 2019 tercatat bahwa rumah tidak layak huni mencapai 62.686 unit (berdasarkan verifikasi pemda yang dimuat dalam Laporan Akhir Tenaga Ahli Pendataan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Satker SNVT Provinsi Kalimantan Timur). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang menghuni rumah dalam kondisi tidak layak. Ketidaklayakan rumah tersebut baik dari segi kualitas fisik rumah maupun kualitas fasilitas rumah.

Dari segi kelistrikan, infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik mencapai 4.273.525 MWh pada tahun 2019. Jumlah Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sebanyak 1.038 Desa, sebanyak 1.029 Desa telah memiliki listrik (Desa Berlistrik) yang bersumber dari PLN maupun Non PLN (Genset, PLTS dan lain-lain). Desa berlistrik yang bersumber dari PLN sebanyak 787 Desa dan yang bersumber dari non PLN sebanyak 242 Desa. Sehingga rasio desa berlistrik mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 98,94% menjadi 99,13% di tahun 2019. Sejalan dengan peningkatan rasio desa berlistrik, rasio elektrifikasi Kalimantan Timur juga

mengalami peningkatan yakni sebesar 85,75% pada tahun 2018 menjadi 88,93% pada tahun 2019.



Sumber: PT. PLN Wilayah Kaltimra

Gambar 2.36
Produksi Tenaga Listrik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (MWh)

Tabel 2.45
Pelanggan Listrik Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

N O	INDIKATOR	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	727.328	774.995	832.528	1.018.222	1.032.475
2.	Banyaknya tenaga listrik rumah tangga yang terjual (MWh)	1.707.503 .633	1.801.719 .937	1.748.943 .749	2.213.445 .295	2.213.445 .295

Sumber: PT. PLN Wilayah Kaltimra

Kinerja pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu mendapat perhatian, terutama masih rendahnya luas lahan pertanian yang beririgasi teknis. Hingga tahun 2018, sawah yang mendapat layanan irigasi diperkirakan baru mencapai 14,8% atau sekitar 13.771 Ha. Lahan tersebut tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Kaltim yang mencakup kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Secara khusus pada Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi layanan jaringan irigasi telah mencapai 6.820 Ha.

Tabel 2.46
Luas Lahan Pertanian Yang Beririgasi Teknis di Kalimantan Timur Tahun 2018

No	KABUPATEN/KOTA	Sawah Irigasi (Ha)	Sawah Tadah Hujan (Ha)	Sawah Rawa Pasang Surut (Ha)	Sawah Rawa Lebak (Ha)	Total Luas Sawah (Ha)
1	Paser	0	9.850	1.934	918	12.702
2	Kutai Barat	608	4.425	1.742	3.034	9.809

No	KABUPATEN/KOTA	Sawah Irigasi (Ha)	Sawah Tadah Hujan (Ha)	Sawah Rawa Pasang Surut (Ha)	Sawah Rawa Lebak (Ha)	Total Luas Sawah (Ha)
3	Kutai Kartanegara	7.174	26.622	1.177	650	35.623
4	Kutai Timur	1.850	5.415	0	0	7.265
5	Berau	2.939	5.833	2.136	25	10.933
6	Penajam Paser Utara	933	10.578	694	0	12.205
7	Mahakam Ulu	0	480	0	0	480
8	Balikpapan	0	250	0	0	250
9	Samarinda	267	2.810	70	622	3.769
10	Bontang	0	37	0	0	37
TOTAL		13.771 (14,80%)	66.300 (71,23%)	7.753 (8,33%)	5.249 (5,64%)	93.073 (100,00%)

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, & Holtikultura Kaltim

Bendungan-bendungan yang sudah terbangun belum sepenuhnya terhubung jaringan irigasi ke lahan pertanian, karena jaraknya yang sangat jauh dari lahan pertanian, dan bahkan banyak bendungan yang tidak berfungsi karena adanya alih fungsi lahan pertanian sekitarnya menjadi perkebunan sawit dan pertambangan. Persoalan lain yang menyebabkan belum optimalnya cakupan irigasi adalah rendahnya kualitas air baku untuk irigasi karena tingkat keasaman air yang tinggi dan adanya pencemaran limbah tambang batu bara. Peningkatan jaringan irigasi disertai dengan peningkatan ketersediaan air baku yang berkualitas pada bendungan atau waduk sangat dibutuhkan untuk peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan. Selain sebagai sumber air irigasi, bendungan juga dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan, sumber air minum dan pengendali banjir.

Permasalahan banjir di Kalimantan Timur terjadi secara simultan, karena kondisi geografis DAS yang luas, daerah paparan banjir, pembukaan lahan dan penebangan hutan di daerah hulu sungai, permasalahan drainase kota dan pengaruh pasang surut laut. Hampir semua kota di Kalimantan Timur mengalami permasalahan banjir. Tingginya kejadian banjir mayoritas terjadi pada wilayah perkotaan, yaitu Samarinda, Balikpapan dan Bontang.

Tabel 2.47
Daerah Rawan Banjir Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	DAS	Perkiraan Luas Genangan (Ha)
1	Kota Balikpapan	Sungai Ampal	150
		Klandasan	50
		Sepinggian	50
2	Kota Samarinda	Karangmumus	150

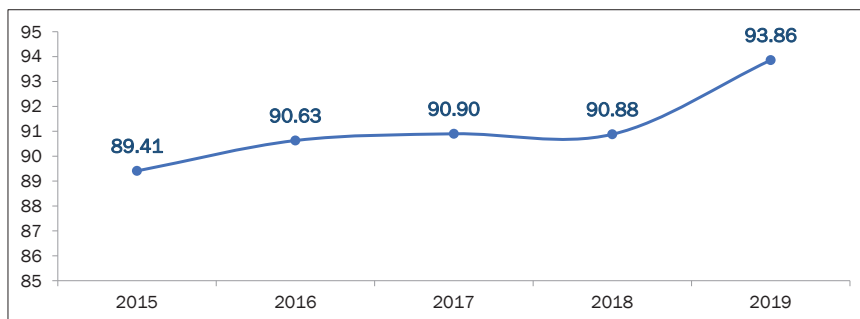
No.	Kabupaten/Kota	DAS	Perkiraan Luas Genangan (Ha)
		Karangasam Besar	100
		Karangasam Kecil	30
		Loa Bakung	20
		Loa Lah	15
		Rapak Dalam	30
		Keledang	5
		Sempaja	20
		Bengkuring	15
		Palaran	30
3	Kota Bontang	Bontang	120
		Guntung	35
4	Kabupaten Paser	Longkali/Telakai	1000
		Kandilo	200
5	Kabupaten Berau	Segah	200
		Bayur	5
6	Kabupaten Kutai Karta Negara	Sungai Mahakam	100
		Medeka	200
7	Kabupaten Kutai Timur	Sungai Sanggata	500
		Sungai Bengalon	100
8	Kabupaten Kutai Barat	Sungai Mahakam	500
9	Kabupaten Mahulu	Sungai Mahakam	500
10	Kabupaten Penajam Paser Utara	Sungai Tunan	20
		Sungai Sepaku	20
		Sungai Sesulu	5

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

Infrastruktur pengendali banjir yang telah terbangun masih belum mampu mengatasi banjir, dan masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam membantu mengurangi risiko banjir. Berbagai macam persoalan dalam menyediakan infrastruktur pengendali banjir disebabkan oleh rumitnya pembebasan lahan untuk pengembangan sistem pengendali luapan air sungai. Selain persoalan tersebut, banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai juga menjadi penyebab infrastruktur pengendali banjir belum maksimal.

Terkait dengan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, salah satu upaya yang terus dilakukan adalah ditingkatkannya pengetahuan masyarakat mengenai hubungan antara upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dengan penurunan risiko banjir. Kegiatan ini lebih kepada ditingkatkannya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Selain irigasi pertanian, permasalahan sumber daya air lainnya di Provinsi Kalimantan Timur adalah belum optimalnya sistem penyediaan air minum kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses penyediaan layanan air minum perpipaan yang memadai. Pelayanan air bersih perpipaan belum sepenuhnya menjangkau wilayah Kalimantan Timur khususnya daerah perbatasan seperti di Kabupaten Mahakam Ulu.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.37
Persentase Perbandingan Total Kapasitas PDAM Terpasang Terhadap Kebutuhan Air Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

Perusahaan air minum di Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Saat ini, terdapat 9 perusahaan air minum tersebar di 9 kabupaten/kota dengan kapasitas produksi total terpasang sebesar 7.844 l/dt yang secara kapasitas sumber air yang diolah mampu melayani 93,86% rumah tangga masyarakat Kalimantan Timur untuk pemenuhan kebutuhan air bersih.

Tabel 2.48
Indikator Kinerja Perusahaan Air Minum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

NO.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Perusahaan Air Minum	9	9	9	9	9
2.	Kapasitas Produksi Potensial (ltr/detik)	6.985	7.185	7.354	7.583	7.844
3.	Kapasitas Produksi Efektif (ltr/dtk)	6.420	6.445	6.743	6.919	7.091
4.	Efektivitas Produksi (%)	91,91	89,70	91,69	91,24	90,41

Sumber: Dinas PUPR Prov.Kaltim, 2019

Tabel 2.49
Penduduk Terlayani Air Bersih Tahun 2017-2019

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Yang Terlayani Air Bersih (%)		
		2017	2018	2019
1	Paser	38,29	51,18	76,01
2	Penajam Paser Utara	15,87	50,14	52,08
3	Samarinda	95,46	91,06	71,16
4	Balikpapan	76,98	77,92	79,05
5	Kutai Kartanegara	63,39	66,10	80,86
6	Kutai Barat	34,35	43,34	77,49
7	Kutai Timur	33,13	68,27	36,26
8	Berau	44,70	49,73	71,08
9	Bontang	87,05	73,98	72,18
10	Mahakam Ulu	-	-	-
Rata-Rata		54,3	70,4	68,46

Sumber: Dinas PUPR Prov.Kaltim 2019 (Dokumen RISPAM Prov. Kaltim 2019)

Berdasarkan data di atas, peningkatan cakupan pelayanan air minum mengalami peningkatan dari yang sebelumnya di tahun 2017 sebesar 54,3% menjadi 70,4% di tahun 2018, hal ini dikarenakan adanya pembangunan beberapa SPAM baru di beberapa lokasi Kabupaten/Kota. Meskipun pada tahun selanjutnya, yakni tahun 2019 terjadi penurunan kembali menjadi 68,46. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk di beberapa lokasi Kabupaten/Kota mengalami peningkatan, sementara tidak didukung dengan peningkatan kapasitas SPAM maupun pembangunan unit baru SPAM, ditambah lagi karena persentase kehilangan air pada SPAM yang juga semakin meningkat, yakni 39,9 %. Masih minimnya cakupan layanan air bersih perpipaan disebabkan oleh infrastruktur penyediaan air minum yang kurang memadai dan terbatasnya akses layanan air bersih yang menjangkau beberapa kawasan di Kalimantan Timur. Salah satu cara mengatasi permasalahan ini adalah dengan pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional. SPAM Regional dibangun untuk meningkatkan penyediaan air bersih pada PDAM lintas batas administrasi kabupaten/kota yang kemudian dikelola dan disalurkan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036 pada tanggal 15 Februari 2016. Adapun 8 Kabupaten/Kota yang lebih dulu menetapkan Perda RTRW Kabupaten/Kota-nya sebelum ditetapkannya Perda RTRW Provinsi, yaitu Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur. Sementara untuk Kab. Berau menetapkan Perda RTRW-nya pada November 2017 lalu. Sedangkan

untuk Kab. Mahakam Ulu saat ini masih dalam proses penyesuaian terhadap pedoman baru, penyusunan KLHS, serta proses persetujuan peta dasar oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

Terhadap perbedaan waktu dalam penetapan Perda RTRW Provinsi dan Perda RTRW Kabupaten/Kota menyebabkan masih adanya perbedaan peruntukan pola ruang. Sehingga, perlu dilakukan kajian Peninjauan Kembali guna mensinkronkan dan menyelaraskan kebijakan nasional, peraturan perundang-undangan baru, serta Perda RTRW Provinsi dan Perda RTRW Kabupaten/Kota yang mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali (PK). Hingga tahun 2019, hanya Kota Bontang yang sudah menetapkan Revisi Perda RTRW Kota melalui Perda Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Bontang Tahun 2019 – 2039. Berikut disampaikan status Peninjauan Kembali Perda RTRW Kabupaten/Kota :

Tabel 2.50
Status Peninjauan Kembali Perda RTRW Kabupaten/Kota

No.	RTRW Kab/Kota	Tahun PK	Status Pelaksanaan Perda RTRW Kabupaten/Kota							Keterangan			
			Persiapan	SK Penetapan PK	SK Tim PK	PK	Rekom PK	Revisi	Rekom Gubernur		Persub ATR/BPW	DPRD	Evaluasi Provinsi
1	Balikpapan	2016		√	√	2016	Revisi	2017	-	-	-	-	Dalam proses permohonan rekomendasi BIG untuk peta dasar (terutama tata guna lahan) karena diminta memperbaiki peta dasar skala 1:25.000
2	Kutai Kartanegara	2017		√	√	2018	Revisi	2018	-	-	-	-	Sudah dilakukan revisi, konsultasi publik, membuat BA Kesepakatan dengan Kab/Kota yang berbatasan, dan membuat KLHS Revisi, namun masih perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan peraturan/NSPK terbaru serta sedang dalam proses konsultasi peta dasar dengan BIG
3	Kutai Barat	2017		√	√	2018	Revisi	2019	-	-	-	-	Dalam proses persetujuan peta dasar ke BIG
4	Samarinda	2018		√	√	2018	Revisi	2019	-	-	-	-	Dalam proses persetujuan peta dasar ke BIG dengan target rekomgub dan persub ATR tahun 2020
5	Penajam Paser Utara	2018		proses	proses	2019	Revisi	2020	-	-	-	-	Proses penyusunan SK Penetapan dan SK Tim Pelaksanaan PK
6	Paser	2019		√	√	2019	Revisi	2020	-	-	-	-	Dalam Proses Revisi RTRW
7	Kutai Timur	2020		proses	proses	2020	-	2021	-	-	-	-	Proses penyusunan SK Penetapan dan SK Tim Pelaksanaan PK
8	Berau	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Bontang	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Revisi Perda RTRW Kota Bontang telah ditetapkan melalui Perda Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Bontang tahun 2019 – 2039 pada tanggal 6 Desember 2019

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor dalam menanamkan modal usahanya di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah, baik itu segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya. Hal ini dikarenakan adanya jaminan keamanan berinvestasi akan menentukan keberlangsungan dan kekonsistenan gerak perekonomian suatu wilayah sehingga para investor berani menanamkan modal dan pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian wilayah. Salah satu analisis kinerja yang mempengaruhi iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas yang menunjukkan kondisi keamanan dan jumlah demonstrasi yang menunjukkan situasi demokrasi suatu wilayah.

A. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menunjukkan bagaimana situasi keamanan di suatu wilayah sehingga aktivitas masyarakat bisa dilakukan dengan nyaman tanpa rasa takut. Selama tiga tahun terakhir terjadi penurunan angka kriminalitas per 10.000 penduduk dimana pada tahun 2019 terjadi 7 kasus kriminalitas diantara 10.000 penduduk. Menurun jika dibandingkan tahun 2018, terjadi 15-16 kasus kriminalitas diantara 10.000 penduduk.

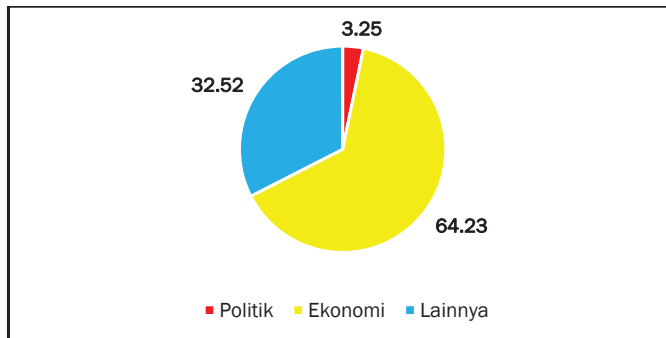
Tabel 2.51
Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

Tahun	Dilaporkan	Tertunggak	Diselesaikan	% Tindak Kejahatan Diselesaikan	Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk
2015	12.632	4.447	8.186	64,80	24,11
2016	12.620	3.482	9.138	72,41	26,55
2017	11.705	1.591	8.622	73,66	24,60
2018	6.715	1.228	5.487	81,71	15,45
2019	3.194	596	2.599	81,37	7,16

Sumber: Polda Kaltim

B. Demonstrasi

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Jumlah demonstrasi meningkat pada beberapa tahun ini mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya. Pada tahun 2019, jumlah demonstrasi secara keseluruhan berjumlah 123 demonstrasi dimana sebanyak 64,23 persen (79 demonstrasi) merupakan demonstrasi terkait ekonomi; 32,52 persen (40 demonstrasi) terkait hal lainnya, dan 3,25 persen (4 demonstrasi) terkait politik.



Sumber: Polda Provinsi Kaltim

Gambar 2.38
Persentase Demonstrasi Menurut Jenisnya
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 (%)

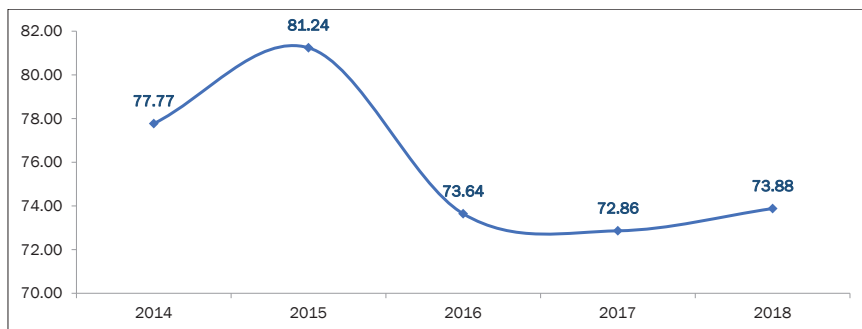
Tabel 2.52
Jumlah Demonstrasi Menurut Jenisnya
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

Tahun	Jenis Demo			Jumlah
	Politik	Ekonomi	Lainnya	
2015	14	141	95	352
2016	9	109	130	755
2017	0	132	283	415
2018	0	179	80	259
2019	4	79	40	123

Sumber: Polda Kaltim

C. Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksinya mencapai 73,88 pada tahun 2018. Dengan capaian tersebut kinerja demokrasi Kalimantan Timur saat ini masih berada pada kategori “sedang”. Meskipun begitu, angka indeks ini masih cukup fluktuatif di setiap tahunnya sehingga pemerintah daerah harus mempertahankan prestasi demokrasi seperti masa sekarang ini.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.39
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018

D. Iklim Investasi Daerah

Pada tahun 2019, terdapat 2.227 proyek investasi dari PMDN sebesar Rp 22,67 triliun dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 20.837 orang. Sedangkan pada penanaman modal asing terdapat 903 proyek sebesar 863,09 juta USD dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 15.166 orang.

Lebih dari 50 persen investasi di Kalimantan Timur diciptakan oleh sektor primer. Dimana sektor pertambangan masih menjadi daya tarik investasi terbesar di Kalimantan Timur baik dari dalam negeri maupun asing. Sektor usaha lainnya yang memiliki daya tarik besar adalah sektor tanaman pangan dan perkebunan serta sektor usaha listrik, gas, dan air.

Tabel 2.53
Investasi Berdasarkan Sektor Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No	Sektor Usaha	Nilai PMDN (juta Rp)	Proyek	Tenaga Kerja Indonesia	Nilai PMA (Ribu USD)	Proyek	Tenaga Kerja Indonesia
Sektor Primer		13.274.031,00	604	13.296	495.005,80	368	14.037
1	Tanaman Pangan & Perkebunan	4.278.114,90	269	7.621	185.796,30	183	5.637
2	Peternakan	33,40	3	-	-	3	-
3	Kehutanan	283.625,00	38	650	2.751,70	24	2.438
4	Perikanan	-	5	-	-	-	-
5	Pertambangan	8.712.257,70	289	5.025	306.457,80	158	5.962
Sektor Sekunder							
1	Industri Makanan	569.890,60	129	1.288	14.264,60	140	251
2	Industri Tekstil	-	2	-	-	-	-
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-	-	-
4	Industri Kayu	350.224,00	35	26	33,30	8	53
5	Industri Kertas, Barang Kertas dan Percetakan	-	2	4	-	-	-
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia, dan Farmasi	444.145,60	48	15	60,00	29	94

No	Sektor Usaha	Nilai PMDN (juta Rp)	Proyek	Tenaga Kerja Indonesia	Nilai PMA (Ribu USD)	Proyek	Tenaga Kerja Indonesia
7	Industri Karet, Barang dari Karet & Plastik	9.000,00	6	10	561,10	13	156
8	Industri Mineral Non Logam	292.133,100	20	-	15.809,60	7	20
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin & Elektronik	-	3	-	1.879,40	10	16
10	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik, dan jam	-	5	30	1.533,40	4	-
11	Industri Alat Angkutan & Transportasi Lainnya	151.706,50	26	98	43,80	10	68
12	Industri Lainnya	509,50	18	2	134,60	5	4
Sektor Tersier							
1	Listrik, Gas, dan Air	2.021.363,600	57	1.366	280.607,90	33	62
2	Konstruksi	1.223.384,700	180	1.153	-	13	-
3	Perdagangan & Reparasi	341.327,600	511	549	4.258,10	109	75
4	Hotel & Restoran	1.086.261,80	62	882	1.297,00	32	63
5	Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	940.606,300	163	1.121	14.847,70	35	185
6	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	345.944,10	45	107	146,90	14	-
7	Jasa Lainnya	1.623.524,70	311	890	32.616,20	73	82
TOTAL		22.674.053,10	2.227	20.837	863.099,40	903	15.166

Sumber : DPMPSTP Kalimantan Timur

Adapun sektor usaha yang dapat menyerap banyak tenaga kerja adalah sektor kehutanan dengan total penyerapan tenaga kerja 49-50 orang per proyek. Disusul sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 29 orang per proyek, sektor pertambangan sebesar 24-25 orang per proyek.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

Indikator paling mudah dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok umur produktif dan non produktif

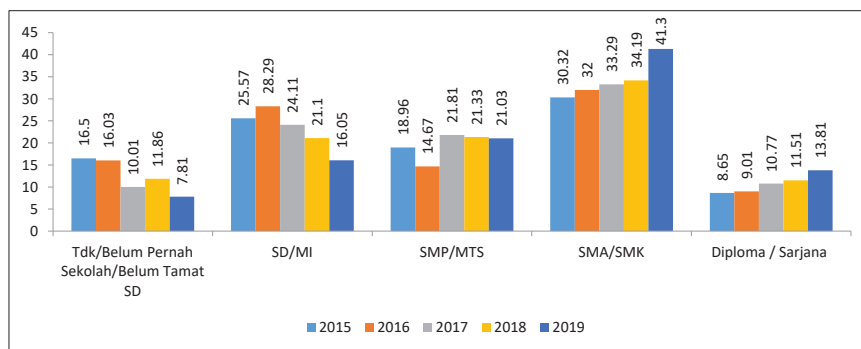
juga dapat dijadikan acuan dalam menunjang analisis beban kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap indikator pendidikan penduduk yang telah ditamatkan sehingga akan terlihat kualitas sumber daya manusia serta rasio ketergantungan yang menggambarkan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif.

A. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah.

Terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku diploma/sarjana pada tahun 2019 hanya sebesar 13,81 persen, sementara yang lain hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA/MA/SMK (41,30 persen), SLTP/MTs (21,03 persen) dan SD/MI (16,05 persen). Diluar hal tersebut yang penting untuk ditekankan adalah masih cukup tingginya masyarakat yang tidak/belum sekolah/belum tamat SD yang mencapai 7,81 persen, walaupun persentase ini menurun dibandingkan presentase pada tahun-tahun sebelumnya, namun hal ini mengindikasikan masih belum optimalnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

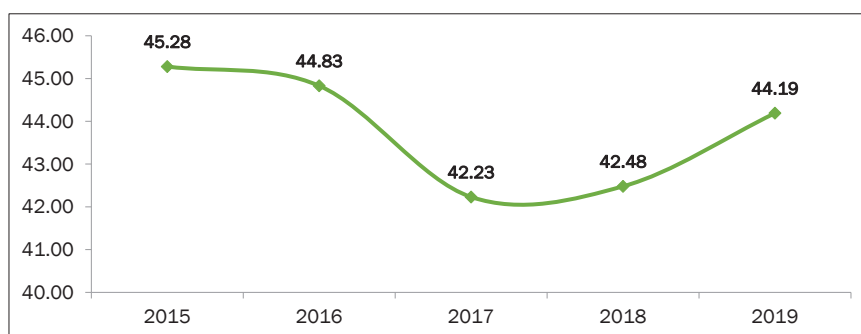


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2019

Gambar 2.40
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

B. Rasio Ketergantungan

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif pada tahun 2019 sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 44,19, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 44 orang penduduk usia non produktif.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.41

Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan lanjutan pembangunan daerah. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan perumusan program kegiatan pembangunan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2019 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kalimantan Timur Tahun 2021. Berikut hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan Provinsi Kalimantan Timur :

Tabel 2.54
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah P
rovinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPDP Tahun 2019	Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2019	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4	2	3	4=3/2*100	5	6
	1			Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
	1	1		Pendidikan						
1	1	1	19	Program Pendidikan Luar Biasa	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	65	65	100,00		Disdikbud
2	1	1	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)	96	96	100,00		Disdikbud
3	1	1	23	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS yang berprestasi (orang)	6.500	2.178	33,51		Disdikbud
4	1	1	38	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang tidak putus sekolah (Siswa)	2.500	6.952	278,08		Disdikbud
5	1	1	39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA	69	69	100,00		Disdikbud
6	1	1	40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK	69	69	100,00		Disdikbud
7	1	1	41	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Jumlah sekolah yang mengembangkan ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB)	85			Tidak Dilaksanakan pada TA. 2019	Disdikbud
8	1	1	42	Program Pengembangan Sekolah Kejuruan	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	40			Tidak Dilaksanakan pada TA. 2019	Disdikbud
9	1	1	107	Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%)	0			Tidak Dilaksanakan pada TA. 2019	Disdikbud
	1	2		Kesehatan						
10	1	2	17	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan	Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%)	87,5	10,38	11,86		Dinkes
11	1	2	23	Program Standarisasi	Persentase Puskesmas	15	16	106,67		Dinkes

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019	Realisasi i Kinerja RKPD Tahun 2019	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4	2	3	4=3/2*100	5	6
				Pelayanan Kesehatan	Minimal Terakreditasi Utama (%)					
12	1	2	56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya	60	88,5	147,50		Dinkes
	1	3		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
13	1	3	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tingkat kemandapan jalan provinsi (%)	54,3	61,45	113,12		DPUPR&PERA
14	1	3	16	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kapasitas Air Baku (L/detik)	7922	7922	100,00		DPUPR&PERA
15	1	3	17	Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakarya	Cakupan layanan Air Minum Perpipaan (%)	62,23	68,46	110,01		DPUPR&PERA
16	1	3	70	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota (%)	64,87	66,46	102,45		DPUPR&PERA
	1	4		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
17	1	4	15	Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	46.722	46.768	99,90		DPUPR&PERA
	1	5		Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
18	1	5	21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)	68	61,38	90,26		Bakesbangpol
19	1	5	49	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana (%)	60% atau 12 desa	12	100,00		BPBD
20	1	5	51	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Jumlah Desa/Kelurahan	87	15,56	17,89		BPBD
	1	6		Sosial						
21	1	6	18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Trauma yang mendapatkan Pembinaan	32	17	53,13		Dinsos
22	1	6	23	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang tertangani	1000	720	72,00		Dinsos
	2			Urusan Wajib Baku Pelayanan Dasar						

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019	Realisasi i Kinerja RKPD Tahun 2019	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2	1								
1	2	1		3	4	2	3	4=3/2*100	5	6
	2	1		Tenaga Kerja						
23	2	1	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%)	80	96,4	120,50		Disnakertrans
	2	2		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
24	2	2	20	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif (UEP) (%)	37	37	100,00		DKP3A
25	2	2	21	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	76	76	100,00		DKP3A
26	2	2	35	Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak	0,06			Tidak Dilaksanakan pada TA. 2019	DKP3A
	2	3		Pangan						
	2	4		Pertanahan						
	2	5		Lingkungan Hidup						
27	2	5	26	Program Tata Lingkungan	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi)	500	417	83,4		DLH
28	2	5	59	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Lingkungan	Tercemar Sedang (8)	Tercemar Ringan (4,6)	173		DLH
	2	6		Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil						
	2	7		Pemberdayaan Masyarakat Desa						
29	2	7	16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes)	15	15	100,00		DPMPD
30	2	7	28	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	73	14	19,18		DPMPD
31	2	7	29	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Jjumlah desa berkembang (Desa)	15	15	100,00		DPMPD
32	2	7	30	Program Kampung Iklim	Jumlah Kampung/Desa Iklim(Desa)	15			Tidak Dilaksanakan pada TA. 2019	DPMPD
	2	8		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
	2	9		Perhubungan						

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019	Realisasi i Kinerja RKPD Tahun 2019	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4	2	3	4=3/2*100	5	6
33	2	9	15	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kasus)	683	570	83,45		Dishub
34	2	9	19	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP (Unit/%)	83	83	100,00		Dishub
	2	10		Komunikasi dan Informatika						
35	2	10	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6	2,6	100,00		Diskominfo
	2	11		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
36	2	11	20	Program Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM	Jumlah Koperasi yang berkualitas	0			Tidak Direncanakan dan dilaksanakan pada TA. 2019	Disperindagkop
					Jumlah UKM Naik Kelas	0			Tidak Direncanakan dan dilaksanakan pada TA. 2019	
	2	12		Penanaman Modal						
37	2	12	18	Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari)	14	30	214,29		DPMPTSP
38	2	12	27	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri (perusahaan industri baru)	7	36	514,29		DPMPTSP
	2	13		Kepemudaan dan Olah Raga						
39	2	13	33	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%)	10	10	100,00		Dispora
40	2	13	35	Program Peningkatan Upaya Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Pemuda yang Berwirausaha (%)	0,09			Tidak Dilaksanakan pada TA. 2019	Dispora
	2	14		Statistik						
	2	15		Persandian						
	2	16		Kebudayaan						
41	2	16	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sekolah mengembangkan budaya lokal	90	77	85,56		Disdikbud
	2	17		Perpustakaan						

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019	Realisasi i Kinerja RKPD Tahun 2019	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2			3	4	2	3	4=3/2*100	5	6	
42	2	1	7	23	Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (on line dan on site) (orang)	366200	133472	36,45		DPKD
	2	1	8		Kearsipan						
	3				Urusan Pilihan						
	3	1			Kelautan dan Perikanan						
43	3	1		25	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	154956	155000	100,03		DKP
						Angka Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun)	50	52,28	104,56		DKP
44	3	1		21	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	152027	152233	100,14		DKP
45	3	1		29	Program Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)	1	1	100,00		DKP
46	3	1		26	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih (ekor)	2,6	2,5	96,15		DKP (UPTD. Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar)
	3	2			Pariwisata						
47	3	2		16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)	3	3	100,00		Dispar
	3	3			Pertanian						
48	3	3		41	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Jumlah produksi tanaman hortikultura (Ton)	233020	240.574	103,24		DPTPH
49	3	3		51	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah produksi padi (Ton)	403000	378.676	93,96		DPTPH
50	3	3		58	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (Juta Ton)	14,97	13,59	90,72		Disbun
51	3	3		76	Program Peningkatan Mutu Dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah Penurunan Emisi Sektor Perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,79	4,08	84,13		Disbun
52	3	3		80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan)	35	30	85,71		Disbun

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019	Realisasi i Kinerja RKPD Tahun 2019	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4	2	3	4=3/2*100	5	6
53	3	3	93	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	0			Tidak Dilaksanakan pada TA. 2019	Disbun
54	3	3	34	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Jumlah Miniranch yang Teregister (unit)	5	5	100		Disnakkeswan
					Nilai Tukar Usaha Peternakan	118,5	124,33	104,91		
55	3	3	90	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Angka Kelahiran Sapi (%)	20	17,49	87,45		Disnakkeswan
					Calving Interval (Bulan)	18	19	94,7		
	3	4		Kehutanan						
56	3	4	16	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Realisasi penerimaan PNPB sektor kehutanan (Rp. Miliar)	160	154	96,25		Dishut
57	3	4	39	Program Perlindungan dan KSDAE	(%)Persentase kerusakan hutan di dalam kawasan hutan (%)	≤ 2	0,16	100		Dishut
58	3	4	41	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Persentase meningkatnya tutupan lahan	13,98	24,08	100		Dishut
59	3	4	42	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	32000	32481	100		Dishut
	3	5		Energi dan Sumber Daya Mineral						
60	3	5	37	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik (KK)	965.607	977.202	101,20		DESDM
61	3	5	47	Program Diversifikasi Energi	Persentase pemanfaatan EBT (%)	3,38	3,38	100,00		DESDM
	3	6		Perdagangan						
	3	7		Perindustrian						
62	3	7	33	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Presentase Pertumbuhan Industri Olahan (%)	1	0,63	63		Disperindagkop
	3	8		Transmigrasi						
	4			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang						
	4	1		Kesekretariatan Daerah						
63	4	1	42	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%)	50	13,16	26,32		Biro Organisasi

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2019	Realisasi i Kinerja RKPD Tahun 2019	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4	2	3	4=3/2*100	5	6
64	4	1	60	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah yang memperoleh predikat minimal B (Baik) (%)	73	73,68	100,93		Biro Organisasi
65	4	1	80	Program Penguatan Kelembagaan	Persentase PD yang dibentuk sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (%)	87	84	96,55		Biro Organisasi
66	4	1	81	Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)	60,53	15	24,78		Biro Organisasi
	4	2		Pengawasan						
67	4	2	21	Program pencegahan dan pemberantasan KKN	Level kapasitas APIP	65	65	100,00		Inspektorat
68	4	2	99	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Hasil Penilaian Integritas	3	3	100,00		Inspektorat
	4	3		Perencanaan						
69	4	3	48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran	80	89,42	111,78		Bappeda
	4	4		Keuangan						
70	4	4	30	Program Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah objek/sumber pendapatan baru	0			Tidak Direncanakan dan dilaksanakan pada TA. 2019	Bapenda

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, dari 70 program prioritas di Kalimantan Timur, terdapat 10 (sepuluh) program prioritas yang pencapaian targetnya berada di bawah 80 persen. Program tersebut antarlain Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat, Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan, Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana, Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan, Program Peningkatan dan Pengembangan Industri, Program Peningkatan Pelayanan Publik, Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma, dan Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial.

Terdapat pula 9 (sembilan) program prioritas yang tidak direncanakan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. Hal ini karena program tersebut tidak menjadi fokus utama dalam RKPD Kalimantan Timur tahun 2019. Disamping itu, terdapat 51 (lima puluh satu) program prioritas yang indikatornya tercapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Sehingga apabila dipersentasakan, terdapat 83,61 persen program prioritas telah mencapai target. Sisanya 16,39 persen tidak mencapai target.

Tabel 2.55
Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2019

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2019	
		Target	Realisasi
Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,3	76,61
Sasaran 1: Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	73,5	73,88
Sasaran 2: Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,4	9,48
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,89	13,67
Sasaran 3: Meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,72	73,96
Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	6	5,94
Sasaran 4: Meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	56,7	57,53
Sasaran 5: Meningkatkan kewirausahaan dan prestasi pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	56,74	56,33
Sasaran 6: Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	51	38,25
Tujuan 3: Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5±1	4,77
Sasaran 7: Meningkatkan usaha ekonomi koperasi dan UKM	Persentase Sumbangan Koperasi Terhadap PDRB (%)	4,4	4,5
Sasaran 8: Meningkatkan keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)	503	301
Sasaran 9: Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,95	1,02

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2019	
		Target	Realisasi
Tujuan 4: Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara (%)	6±1	5,35
Sasaran 10: Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	20	17,77
Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)	31,5	35,62
Sasaran 12: Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,53	0,56
	Rasio Pemenuhan Beras (%)	62,46	71,1
Sasaran 13: Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,33	0,33
Sasaran 14: Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	5,1	4,34
Sasaran 15: Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,52	1,54
Sasaran 16: Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1	1,12
Sasaran 17: Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)	3,84	-
Tujuan 5 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,33	0,33
Sasaran 18: Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	10.705.000	10.721.656
	Jumlah barang (ton)	334.805.000	341.529.897
Sasaran 19: Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan)	2	2
Sasaran 20: Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Cakupan layanan air minum (%)	73,33	67,23
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14.008,50	13874,11
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	664	641

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2019	
		Target	Realisasi
Sasaran 21: Menurunnya kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	620,06	645,47
Sasaran 22: Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	Rasio elektrifikasi (%)	85,5	88,93
Tujuan 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,75	81,68
Sasaran 23: Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	26,3	25,18
Sasaran 24: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	145	-
Sasaran 25: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	66,68	64,87
Tujuan 7: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B (69,50)	B (68,93)
Sasaran 26: Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,5	76,55
Sasaran 27: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)	81	82,38
Sasaran 28: Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 3

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Terdapat enam permasalahan utama pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2021, yaitu: lambannya transformasi ekonomi menuju sumber daya alam berkelanjutan, masih belum merata dan kuatnya daya saing sumber daya manusia, belum meratanya aksesibilitas dan konektivitas, semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta belum tercapainya pelayanan publik yang optimal. Selain itu, terdapat permasalahan baru yang muncul dan berpengaruh besar terhadap pencapaian target prioritas dan sasaran pembangunan daerah di tahun 2020, yaitu adanya situasi bencana akibat pandemi Covid-19.

1. Belum Merata dan Kuatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia

Belum optimalnya daya saing SDM Kalimantan Timur disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat, belum optimalnya serapan tenaga kerja, derajat kesehatan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, serta belum optimalnya peran pemuda, perempuan dan disabilitas dalam proses pembangunan, serta perlindungan sosial terutama untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum komprehensif. Faktor utama yang sangat mempengaruhi daya saing SDM adalah pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Sedangkan sektor-sektor lain yang juga menopang capaian daya saing antara lain berkaitan dengan keagamaan, sosial dan budaya.

Disamping itu, Provinsi Kalimantan Timur masih dihadapkan pada disparitas daya saing SDM antar kabupaten/kota. Maka dari itu, permasalahan daerah yang berkaitan dengan daya saing SDM di Kalimantan Timur lebih dititikberatkan pada disparitas daya saing antar daerah yang sangat tinggi. Terbatasnya lapangan usaha masyarakat yang berimplikasi pada fluktuasi pengangguran terbuka menjadi salah satu penyebab kesenjangan pendapatan masyarakat. Pengembangan usaha perkebunan sawit dan pertambangan yang menjadi unggulan daerah belum mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya. Pembangunan yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat masih belum berhasil mengentaskan kemiskinan atau hidup pra-sejahtera.

Belum optimalnya integrasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja industri dan sektor ekonomi lainnya, menjadikan rendahnya penyerapan tenaga kerja produktif oleh dunia kerja. Rendahnya penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap pemerataan pendapatan. Tidak meratanya pendapatan mengakibatkan gap kesejahteraan antar masyarakat, khususnya apabila dilihat dari tingginya angka kemiskinan di perdesaan dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan. Pembangunan yang tidak dilakukan secara merata dan menyeluruh menimbulkan permasalahan baru di kantong-kantong wilayah miskin dan tertinggal. Kecepatan laju pembangunan di wilayah tertinggal akan semakin sulit dikejar karena pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan peningkatan usaha ekonomi relatif terbatas.

Terkait dengan ketenagakerjaan bahwa perkembangan perluasan kesempatan kerja semakin kompleks dan dinamis, yang membutuhkan tenaga kerja bukan saja terlatih tetapi mampu bersaing di tingkat daerah, nasional dan internasional. maka diperlukan sertifikasi kompetensi bertaraf internasional yang mampu berkreasi untuk melakukan inovasi menghadapi tantangan dan mampu menyesuaikan dengan tantangan yang dihadapi.

2. Lambannya Transformasi Ekonomi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Perekonomian Kalimantan Timur masing-masing bergantung pada sektor ekstraktif yaitu pertambangan dan penggalian, dengan peran batubara yang masih dominan dalam pergerakan aktivitas perekonomian di Kalimantan Timur. Sementara itu, kontribusi dan pertumbuhan sektor lainnya seperti industri pengolahan dan pertanian mengalami perlambatan.

Disamping itu, dukungan investasi yang diberikan ke Kalimantan Timur lebih dari 50 persen juga masih tertuju pada sektor usaha pertambangan. Namun demikian, sektor tanaman pangan dan perkebunan sebagai salah satu faktor modal percepatan transformasi ekonomi memiliki nilai investasi cukup baik, meskipun masih berada di bawah sektor pertambangan.

3. Belum Meratanya Aksesibilitas dan Konektivitas dari dan ke Sentra Produksi

Rendahnya ketersediaan serta kualitas infrastruktur dasar antara lain prasarana jalan, air bersih, sanitasi layak, perumahan dan permukiman yang layak huni dan ketenaga listrik.

Persoalan lain yang terjadi berkaitan dengan pemenuhan infrastruktur dasar adalah belum optimalnya akses air bersih masyarakat. Sementara itu, akses ketenagalistrikan juga belum memadai.

Persoalan mendasar pada perencanaan penataan ruang dikarenakan masih terdapatnya perbedaan pola ruang dan kurang harmonisnya dokumen perencanaan ruang antara RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota dan belum tersedianya rencana rinci tata ruang provinsi maupun kabupaten/kota.

4. Semakin Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur, terutama yang berasal dari alih fungsi lahan dan hutan tidak sepenuhnya diantisipasi kerusakannya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan tingginya emisi GRK dari pembukaan lahan. Berbagai program rencana pengelolaan kawasan melalui pembinaan perhutanan sosial, kemandirian KPH, program rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi kawasan bernilai tinggi masih perlu diperkuat. Perlindungan kawasan hutan mangrove dan lahan gambut untuk tidak dialihfungsikan sesuai dengan fungsinya juga perlu mendapatkan ketegasan guna mengurangi tingkat kerusakannya yang dalam jangka panjang akan berujung pada bencana lingkungan termasuk peningkatan emisi karbon yang berasal dari lahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dihimpun belum mampu menjadi acuan maupun rambu-rambu dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan hidup jauh lebih mudah dilihat pada dampak yang diakibatkan, khususnya pada kesehatan masyarakat dan bencana hidrometeorologi yang terjadi. Selain itu, tutupan hutan dan lahan sebagai salah satu komponen dalam IKLH mengindikasikan bahwa apabila tutupan hutan semakin berkurang, maka wilayah tangkapan air akan menurun persoalan ini diikuti oleh tingginya kerentanan lahan. Tingginya erosi dan sedimentasi akibat perubahan tutupan hutan, berdampak pada pendangkalan pada alur perairan.

Tutupan lahan bervegetasi semakin berkurang disebabkan oleh semakin meluasnya

kawasan galian tambang batu bara yang sebagian menimbulkan lubang-lubang bekas galian tambang, perluasan areal perkebunan dan perluasan kawasan permukiman.

5. Belum Tercapainya Pelayanan Publik yang Optimal

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari dua masalah pokok, yaitu belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik; dan belum optimalnya kualitas demokratis daerah. Hal ini dapat dilihat pada beberapa prinsip pokok *open government* yang belum berjalan optimal, seperti prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan integritas.

6. Belum Tercapainya Target Prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 di Tahun 2020 Akibat Situasi Pandemi Covid-19

Situasi pandemi Covid-19 di tahun 2020 berdampak buruk terhadap perekonomian nasional dan daerah. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan. Kondisi ini direspon oleh pemerintah dengan menempuh kebijakan penyesuaian/rasionalisasi pada sebagian anggaran belanja daerah hingga 50%. Selain itu, juga dilakukan percepatan pengutamaan alokasi (*refocusing*) program/kegiatan yang diperuntukan bagi penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial. Sebagai dampak dari pandemi dan usaha penanganannya, maka sebagian besar program/kegiatan prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 di tahun 2020 diperkirakan tidak mencapai target yang ditentukan.

Peristiwa Pandemi Covid 19 juga memberikan dampak terhadap tatanan sosial dan ekonomi di Kalimantan Timur. Pelemahan perekonomian, perubahan perilaku masyarakat, peningkatan jumlah penduduk miskin dan peningkatan angka pengangguran menjadi permasalahan yang harus diantisipasi dalam program

pembangunan daerah di tahun 2021. Terdapat sektor-sektor yang mampu bertahan dan bahkan mendapatkan peluang untuk berkembang pada masa pandemi ini seperti industri tekstil dan produk dari tekstil; kimia, farmasi dan alat kesehatan; makanan dan minuman; elektronik; jasa telekomunikasi; dan jasa logistik. Sebaliknya terdapat pula sektor-sektor yang mengalami dampak buruk dari pandemi ini seperti pariwisata; konstruksi; transportasi darat, laut dan udara; pertambangan; keuangan dan otomotif.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan per-urusan disusun berdasarkan sebab indikatif dari analisis data gambaran umum kondisi daerah dan berbagai data lain, seperti kesepakatan mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan kebijakan-kebijakan di level nasional yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema RKPD Kalimantan Timur tahun 2021.

Tabel 2.56
Permasalahan Pembangunan Per Urusan

NO	URUSAN	SASARAN	MASALAH
1.	Pendidikan	Meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya tenaga kerja secara memadai untuk sektor-sektor tertentu; 2. Tingginya disparitas kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan; 3. Tingginya disparitas sarana dan prasarana pelayanan pendidikan.
2.	Kesehatan	Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal di pusat-pusat pelayanan kesehatan
3.	Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Belum optimalnya penanganan kepemudaan dan olahraga
4.	Tenaga Kerja	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja lokal
5.	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa 2. Belum optimalnya fasilitasi penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
6.	Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sarana dan prasarana jaringan komunikasi dan informasi 2. Belum optimalnya layanan informasi publik
7.	Kesekretariatan	Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan public berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya produktivitas DPRD dalam merumuskan raperda 2. Belum optimalnya integrase pelaksanaan tugas perangkat daerah

NO	URUSAN	SASARAN	MASALAH
8.	Koperasi dan UKM	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daya saing produk yang masih rendah; 2. Rendahnya akses pemasaran; 3. Rendahnya akses keuangan; 4. Rendahnya penguasaan teknologi informasi
9.	Pariwisata	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan destinasi pariwisata belum memadai 2. SDM, sarana dan prasarana di bidang Pariwisata Kalimantan Timur yang masih sedikit, belum terampil dan tersertifikasi
10.	Perindustrian	Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lambatnya pertumbuhan investasi Industri Kecil Menengah 2. Aksesibilitas kawasan produksi yang belum terkoneksi secara merata dengan kawasan industri di Kaltim
11.	Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minat investasi pada sektor sekunder dan tersier masih rendah 2. Promosi investasi kawasan strategis ekonomi belum optimal
12	Pertanian	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya produksi padi 2. Diversifikasi pangan belum optimal
13	Peternakan	Meningkatnya kontribusi sektor peternakan	Masih rendahnya populasi ternak sapi
14	Perkebunan	Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan	Produktifitas perkebunan rakyat masih rendah
15	Perikanan	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan	Rendahnya produksi perikanan
16	Kehutanan	Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekspor masih dalam bentuk mentah Kayu Alam 2. Pengolahan hasil hutan belum dilakukan dengan rangkaian yang lebih panjang dan nilai ekonomisnya yang masih rendah
17	Keuangan	Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah	Masih rendahnya pendapatan asli daerah (PAD)
18	Energi dan Sumber Daya Mineral	Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	Rendahnya akses ketenagalistrikan pada wilayah 3T
19	Lingkungan Hidup	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Masih tingginya angka emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya keterhubungan jaringan jalan yang menghubungkan jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah 2. Belum optimalnya kualitas pelayanan perhubungan darat, laut, sungai, danau, dan udara
		Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasa	Belum optimalnya kualitas jaringan jalan

NO	URUSAN	SASARAN	MASALAH
		Meningkatnya Fungsi Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk irigasi 2. Kurangnya akses penyediaan layanan air minum perpipaan 3. Belum terpenuhinya air baku untuk air bersih 4. Infrastruktur pengendali banjir belum memadai
		Meningkatnya kinerja penataan ruang	Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
21	Perumahan dan Permukiman	Menurunnya Kawasan Kumuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya akses masyarakat miskin terhadap rumah layak huni 2. Rendahnya kualitas lingkungan Kawasan Permukiman

2.3.3. Isu Strategis Daerah

Isu strategis pembangunan daerah Kalimantan Timur merupakan isu yang telah diangkat dalam RPJMD tahun 2019-2023 dan Hasil evaluasi RKPD 2019, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia erat kaitannya dengan tingkat pendidikan. Penduduk Kalimantan Timur dengan latar belakang tingkat pendidikan diploma/sarjana pada tahun 2019 hanya sebesar 13,81 persen, tingkat pendidikan SMA/MA/SMK sebesar 41,30 persen, tingkat pendidikan SLTP/MTs sebesar 21,03 persen dan tingkat pendidikan SD/MI sebesar 16,05 persen. Tingginya persentase pendidikan dari tingkat pendidikan dari SLTP dan SD mencerminkan bahwa daya saing sumber daya manusia di Kalimantan Timur perlu ditingkatkan.

Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur. Hal utama yang dilakukan adalah memastikan ketersediaan sarana pendidikan secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Selain itu, juga perlu dilakukan penurunan kesenjangan kualitas Lembaga pendidikan dan tenaga pendidik, baik melalui peningkatan jumlah maupun pemenuhan kualitas dan standar kompetensi tenaga pendidik.

Peningkatan daya saing sumber daya manusia diutamakan untuk penyediaan tenaga-tenaga terampil. Untuk itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus utama di Kalimantan Timur. Hal tersebut dilakukan melalui pengembangan lembaga pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan tenaga sektor pertanian dalam arti luas dan dan industri hilir pengolahan. Tentunya hal ini tidak lepas dari besarnya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian sebesar 18,76 persen. Sedangkan untuk sektor industri pengolahan diharapkan menjadi salah satu sektor utama yang akan menjadi jalan bagi transformasi

ekonomi di Kalimantan Timur melalui hilirisasi industri. Sampai saat ini kualifikasi sumber daya manusia untuk sektor ini masih terbatas.

Selain melalui pendidikan formal, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dilakukan melalui pendidikan non formal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja dengan orientasi industri pertanian dan hasil pertanian dalam arti luas, serta menumbuhkan kewirausahaan baru, menjadi bagian penting dalam menjawab lemahnya daya saing melalui pendidikan non formal.

Keadilan pendidikan ini juga disertai dengan keadilan kesehatan dan jaminan sosial, agar setiap warga Kalimantan Timur dapat memperoleh kesejahteraan yang berkeadilan. Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur, maka upaya pemenuhan SPM pada bidang kesehatan menjadi perhatian khusus pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, pengintegrasian nilai keagamaan dan nilai budaya dalam Lembaga pendidikan juga menjadi agenda utama dalam memenuhi sumber daya manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia. Kelompok-kelompok khusus, seperti perempuan, disabilitas, warga miskin, serta pemuda, menjadi fokus perhatian dalam pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Timur.

2. Percepatan Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan secara vertikal maupun horizontal

Produksi batubara, minyak bumi dan gas bumi Kalimantan Timur pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2015. Produksi batubara yang semula sebesar 236,61 juta ton di tahun 2015, menjadi sebesar 167,54 juta ton di tahun 2019. Produksi minyak bumi yang semula 36,60 juta barrel di tahun 2015 menjadi sebesar 26,25 juta barrel di tahun 2019. Produksi gas bumi yang semula 609,74 juta MMBTU di tahun 2015, menjadi sebesar 379,59 juta MMBTU di tahun 2019. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa Kalimantan Timur harus

secara sungguh-sungguh melakukan transformasi dari sumber daya alam tak terbarukan menjadi sumber daya alam terbarukan.

Pengembangan ekonomi sumber daya alam terbaharukan dilakukan melalui optimasi produktivitas Kawasan dengan meningkatkan kemampuan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan, yang diiringi dengan pengembangan industri pengolahan hasil-hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Pengembangan industrialisasi sektor sumber daya alam terbarukan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan asli daerah, dan menciptakan ekspor non migas yang memberikan nilai tambah perekonomian daerah.

Pengembangan sentra perikanan modern dan pariwisata pada Kawasan danau Jempang, Semayang dan Melintang di Daerah Aliran Sungai Mahakam, dan kawasan sepanjang pesisir timur, dapat menjadi potensi yang besar dalam memberikan kontribusi perekonomian makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkerakyatan menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Berkaitan dengan pengembangan ekonomi kerakyatan maka peran UMKM harus terus ditingkatkan dalam perekonomian daerah. Hingga saat ini jumlah UMKM di Kalimantan Timur 307.343 unit usaha, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.080.072 orang Permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian daerah antaralain daya saing produk yang masih rendah, rendahnya akses pemasaran, rendahnya akses keuangan, serta masih rendahnya penguasaan teknologi informasi. Berkaitan dengan itu, maka upaya-upaya untuk menyelesaikan hal di atas perlu untuk menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan dukungan yang baik terhadap tumbuhnya pusat-pusat produksi pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan di Kalimantan Timur. Pada tahun 2019 prasarana jaringan jalan provinsi sepanjang 895,09 Km dengan kondisi mantap hanya mencapai 61,45 %. Berdasarkan kondisi permukaan jalan, kondisi baik mencapai 93,74 km, kondisi sedang mencapai 456,26 Km, kondisi rusak ringan mencapai 195,12 Km, dan kondisi rusak berat mencapai 149,97 Km. Tingginya kondisi jalan rusak di atas mempengaruhi kuantitas angkutan barang dan manusia terutama aktifitas barang dan manusia dari pusat-pusat produksi ke outlet.

Berkaitan dengan infrastruktur ketenagalistrikan, Kalimantan Timur saat ini sudah mengalami surplus daya sebesar 400 MW. Meskipun demikian, rasio elektrifikasi di Kalimantan Timur masih sebesar 88,93 persen. Masyarakat yang belum terlayani jaringan ketenagalistrikan ini terutama pada wilayah-wilayah pedalaman. Untuk mengatasi hal ini maka penyediaan tenaga listrik dengan mengutamakan penyediaan sumber listrik berbasis tenaga surya menjadi fokus utama pemerintah.

4. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup**

Pengelolaan aktifitas perekonomian yang bersifat eksploitatif pada sumber daya alam tak terbarukan menyebabkan permasalahan kerusakan lingkungan hidup. Meskipun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur mengalami peningkatan cukup signifikan dari predikat baik ($70 < \text{IKLH} \leq 80$) 75,65 pada tahun 2017 menjadi predikat

sangat baik ($\text{IKLH} > 80$) 85,9 di tahun 2018. Namun pada tahun 2019, IKLH Kaltim mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 78,81.

Potensi hutan alam yang cukup luas di Kalimantan Timur merupakan benteng pertahanan terakhir bagi ekologi dan sosial-budaya Kalimantan Timur. Kawasan-kawasan berhutan, baik di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan, harus terus dikelola keberadaannya. Saat ini Kalimantan Timur telah dipilih sebagai lokasi Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan melalui *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF) pada Oktober 2015. Program FCPF Carbon Fund dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di seluruh Kaltim (12,7 juta hektar) untuk mempertahankan 6,5 juta hektar kawasan berhutan.

Pengembangan ekonomi produktif dari pertanian dalam arti luas difokuskan pada lahan-lahan bercadangan karbon rendah, serta pada wilayah yang potensial dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri, termasuk pengembangan energi baru terbarukan dari limbah-limbah pertanian, menjadi alternatif dalam pemenuhan energi dan menurunkan emisi GRK.

Dalam hal menurunkan ancaman risiko bencana di Kalimantan Timur, dilakukan peningkatan kapasitas daerah dalam mengantisipasi bencana, diantaranya melalui pembatasan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan bencana, Desa Tangguh bencana, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, penguatan sarana-prasarana, serta pengembangan sistem tanggap darurat, dan penguatan kapasitas peringatan dini.

5. **Pemerintahan yang profesional dan akuntabel**

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur telah berada pada kondisi yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat B dan Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan predikat BB. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan, terkait optimalisasi akuntabilitas kinerja baik secara administratif maupun sosial.

Sebagai Provinsi yang dikenal memiliki kekayaan alam melimpah, penyelenggaraan pemerintahan banyak disorot karena memiliki peluang terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah dan kebocoran pendapatan daerah. Pemerintahan Daerah harus mengantisipasi adanya penyimpangan dengan memperkuat sikap politik dalam penegakan hukum yang baik, dan memperkuat profesionalitas pemerintahan.

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur juga hendaknya meningkatkan integritas diri dan integritas lembaga menuju pada wilayah/zona bebas korupsi. Pemerintahan yang professional dan akuntabel memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dengan melihat berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi, pemerintahan yang profesional dan akuntabel menjadi isu penting untuk diprioritaskan.

6. **Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**

Pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif pada perekonomian Kalimantan Timur. Hal ini ditandai dengan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1,27 persen (yoy) pada triwulan I 2020. Perlambatan disebabkan kontraksi pada sektor pertambangan dan perlambatan kinerja pada sektor konstruksi. Hal ini tentunya akan berdampak pada penurunan pendapatan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, hal ini perlu menjadi fokus utama pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi Kalimantan Timur pasca Pandemi COVID-19.

Dampak lainnya dari pandemi COVID-19 adalah peningkatan terhadap kemiskinan dan pengangguran di Kalimantan Timur. Dimana terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang mendukung industri pariwisata. Selain itu, pemutusan hubungan kerja juga dilakukan akibat menurunnya aktivitas perekonomian baik di Kalimantan Timur maupun wilayah atau negara tujuan utama ekspor Kalimantan Timur.

Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi pola hubungan sosial masyarakat. Kebijakan pembatasan interaksi antara masyarakat diperkirakan akan terus berlangsung sampai tahun 2021. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu untuk terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat, menyediakan jaring pengaman sosial dan memfasilitasi aktivitas perekonomian yang tetap bisa produktif ditengah pandemi. Berkaitan dengan fasilitasi aktivitas perekonomian, maka upaya untuk menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, terutama untuk UMKM perlu untuk menjadi perhatian khusus.

BAB 3
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

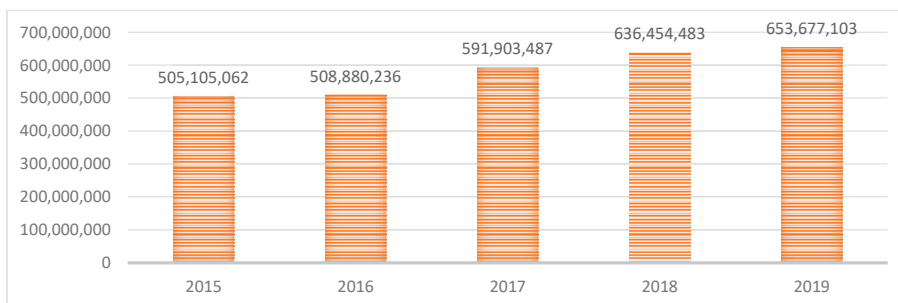
Pada bagian ini akan diuraikan kerangka ekonomi daerah yang berisi perkembangan ekonomi domestik dan global dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global pada tahun 2021. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro Kalimantan Timur tahun 2021 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan keuangan daerah tahun 2021. Secara garis besar, kerangka ekonomi makro daerah menjelaskan tiga hal pokok yaitu perkembangan ekonomi global, perkembangan ekonomi daerah termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan keuangan daerah, serta tantangan dan arah kebijakan dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2021.

3.1.1 Kinerja Ekonomi Daerah, Peluang, Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional pada RKP 2021

A. Kinerja Ekonomi Daerah

1. Produk Domestik Regional Bruto

Kondisi ekonomi Kalimantan Timur digambarkan melalui penciptaan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika dilihat kondisi lima tahun terakhir, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan. Tahun 2015 nilai PDRB Kalimantan Timur tercatat sebesar Rp 505,11 triliun, nilai ini terus mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 653,68 triliun di tahun 2019.

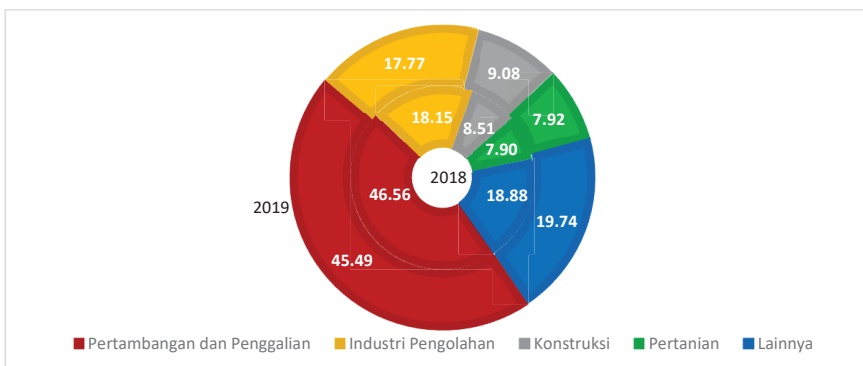


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

2. Struktur PDRB

Struktur perekonomian Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha tahun 2019 masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 45,49 persen dan industri pengolahan sebesar 17,77 persen. Kemudian disusul kontribusi sektor konstruksi yang meningkat menjadi sebesar 9,08 persen. Adapun kontribusi sektor pertanian yang diharapkan mampu menjadi salah satu sektor utama di Kalimantan Timur di masa depan hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 7,92 persen, naik tipis dibandingkan kontribusinya tahun lalu.



Sumber : BPS PProvinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.2
Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2019 (%)

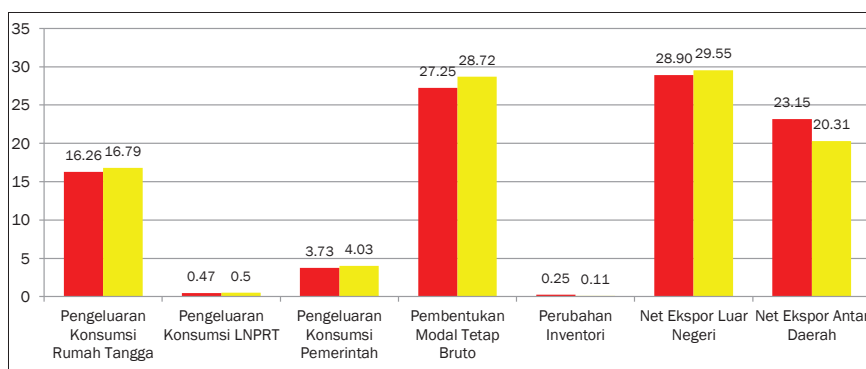
Masih besarnya dominasi pertambangan dan penggalian dilatarbelakangi oleh peningkatan produksi batubara. Upaya perusahaan batu bara untuk meningkatkan produksi sebagai kompensasi penurunan harga menjadi faktor utama kenaikan produksi batu bara di Kaltim. Upaya tersebut juga didukung oleh permintaan baik di domestik maupun luar negeri yang masih tinggi dan faktor cuaca yang lebih kondusif di sepanjang tahun 2019.

Lapangan usaha industri pengolahan juga memiliki peran yang cukup besar terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Timur. Kontribusinya pada tahun 2019 mencapai 19,74 persen. Namun dari sisi pertumbuhan mengalami perlambatan yang dipengaruhi oleh produksi LNG yang terus mengalami penurunan sepanjang tahun 2019. Selain itu, perlambatan juga terjadi pada industri CPO, pupuk, kayu lapis, dan jenis industri olahan lainnya.

Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas) masih memiliki kontribusi di bawah 10 persen dari PDRB Kaltim. Disamping itu, pertumbuhannya mengalami perlambatan. Hal ini terutama disebabkan oleh tren penurunan kinerja kelapa sawit yang terjadi pada paruh awal tahun 2019 yang tercermin dari kontraksi harga yang relatif dalam. Selain itu, musim kemarau yang lebih panjang juga

membuat musim tanam menjadi terlambat di mana hal tersebut juga terjadi di skala nasional. Terakhir, cuaca yang kurang kondusif pada paruh akhir tahun 2019 menyebabkan banjir di beberapa sentra produksi pangan serta terganggunya kegiatan nelayan dikarenakan gelombang yang relatif tinggi.

Distribusi PDRB menurut komponen pengeluaran pada tahun 2019 di Kalimantan Timur didominasi Komponen Net Ekspor Luar Negeri sebesar 29,55 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 28,72 persen. Adapun kaitannya dengan perdagangan dalam negeri yang dicerminkan melalui komponen Net Ekspor Antar Daerah mempunyai kontribusi sebesar 20,31 persen lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan menurunnya nilai komoditas ekspor batubara Kalimantan Timur. Sedangkan konsumsi rumah tangga menyumbang sebesar 16,79 persen dari total PDRB Kalimantan Timur.



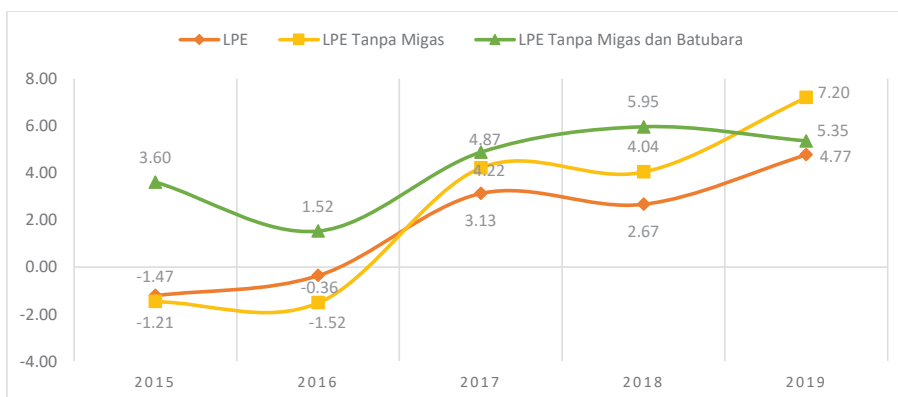
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.3
Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018 dan 2019 (%)

Aktivitas perdagangan Luar Negeri Kalimantan Timur seringkali menyumbangkan porsi yang besar terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Timur dari sisi pengeluaran. Berdasarkan golongan barang dalam ekspor luar negeri Kalimantan Timur pada tahun 2019 telah terlihat bahwa hasil industri non migas dan batubara memiliki kontribusi sebesar 10,49 persen dari total ekspor Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam percepatan proses hilirisasi industri sampai dengan pemasarannya mulai menunjukkan hasil. Namun disamping itu, perlu juga dilakukan hilirisasi pada komoditas Batubara untuk optimasi perolehan nilai tambah ekonomi karena selama ini ekspor batubara dari Kalimantan Timur masih dalam bentuk bahan mentah, belum melalui proses pengolahan atau peningkatan nilai tambah.

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam selama lima tahun terakhir. Tentunya penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2015, saat perekonomian global dihantam oleh terpukulnya harga mineral dan batubara ke level terendahnya yang berimbas pada perekonomian Kaltim yang sangat bergantung pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Kaltim terkoreksi hingga negatif 1,20 persen. Demikian pula pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang turun hingga negatif 1,46 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara tetap tumbuh positif sebesar 3,62 persen, namun melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,87 persen.



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur

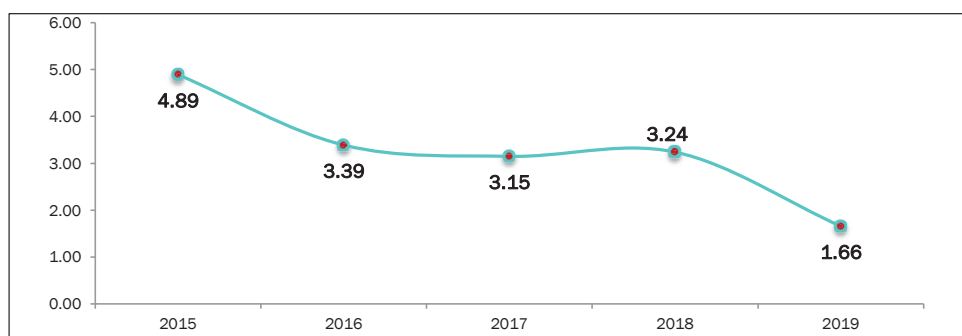
Gambar 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (%)

Meskipun harga migas dan batubara pada tahun 2016 mulai membaik, kinerja perekonomian Kalimantan Timur masih belum pulih, meski demikian kontraksi mengecil menjadi sebesar negatif 0,36 persen pada tahun 2016, Namun pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara melambat hanya sebesar 1,57 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi non migas semakin turun menjadi sebesar negatif 1,49 persen. Selanjutnya pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2019 terakselerasi sebesar 4,77 persen, jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,67 persen.

4. Inflasi

Tekanan inflasi Kalimantan Timur tahun 2019 tercatat stabil dan rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tekanan inflasi Kalimantan Timur yang lebih rendah pada tahun 2019 ini dipengaruhi terutama oleh deflasi yang terjadi pada kelompok transportasi dan komunikasi yang bersumber dari

penyesuaian tarif angkutan udara. Hal ini berkaitan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 mengenai Tarif Batas Atas (TBA) Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri menjadi faktor utama penurunan tekanan inflasi tarif angkutan udara. Penyesuaian TBA cukup memberikan dampak efektif dalam pengendalian tarif angkutan udara. Operasional Bandara APT Pranoto di Kota Samarinda yang baru beroperasi pada akhir tahun 2018 juga berperan dalam mengendalikan permintaan tiket penerbangan yang sebelumnya dimonopoli oleh Bandara SAMS Sepinggian di Kota Balikpapan. Dengan terkendalinya permintaan tiket penerbangan, harga tiket penerbangan dari maskapai penerbangan menjadi semakin kompetitif.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.5
Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (%)

Terkendalinya inflasi Kaltim pada 2019 juga disebabkan oleh rendahnya inflasi pada kelompok lainnya. Kelompok Makanan & Minuman, Rokok, dan Tembakau pada tahun 2019 mengalami inflasi sebesar 2,75% (yoy), lebih rendah dibandingkan 2,92% (yoy) pada tahun sebelumnya. Bea cukai tembakau dan Harga Jual Eceran (HJE) rokok yang batal naik pada tahun 2019 mendorong inflasi pada kelompok tersebut menjadi relatif stabil. Namun pada akhir 2019, inflasi pada kelompok tersebut mulai menunjukkan peningkatan didorong oleh keputusan pemerintah yang menaikkan cukai tembakau dan HJE rokok.

5. Investasi

Nilai investasi Kalimantan Timur pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari Rp 33,81 triliun menjadi Rp 35,62 triliun yang terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp 22,67 triliun dan Penanaman Modal Asing sebesar 12,95 triliun. Adapun sektor usaha yang mampu menarik investasi tertinggi adalah pertambangan, tanaman pangan & perkebunan, serta listrik, gas dan air.

B. Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan 2021

1. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kalimantan Timur masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara cermat dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup :

1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Kalimantan Timur;
2. Perang dagang yang masih berlangsung antara Amerika Serikat-Republik Rakyat Tiongkok;
3. Tren harga batubara dan CPO diperkirakan akan terus mengalami perlambatan;
4. Tren penurunan harga minyak dunia masih berlanjut;
5. Mulai digalakkannya implementasi energi baru terbarukan di Kawasan Asia Timur menyebabkan permintaan ekspor berpotensi menurun;
6. Berakhirnya kontrak LNG dengan Jepang di akhir 2020;
7. Target kuota produksi pertambangan yang kemungkinan diatur lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya;
8. Berakhirnya kontrak PKP2B di tahun 2021 (Kendilo Coal dan Kaltim Prima Coal);
9. Penurunan lifting migas karena Natural declining mendorong kenaikan impor migas baik crude untuk keperluan bahan baku maupun produk;
10. Berakhirnya beberapa proyek *Multi Years Contract*
11. Kondisi pandemi/pasca pandemi virus COVID -19 (*Coronavirus Disease 19*)

2. Peluang

Ekonomi Kaltim Tahun 2020 dan 2021 diperkirakan tetap tumbuh positif namun masih terbatas. Beberapa peluang yang diperkirakan mampu mempertahankan kinerja positif ekonomi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Momentum dipilihnya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara mampu mendorong peningkatan investasi dan sentimen bisnis di Kaltim serta inisiasi pembangunan sarana dan prasarana IKN baru;
2. Berlanjutnya proyek peningkatan kapasitas kilang minyak Balikpapan (RDMP RU V Pertamina) dan beberapa proyek swasta lain;
3. Beberapa pabrik industri pengolahan CPO baru akan mulai beroperasi pada tahun 2020;
4. Beroperasinya sumur migas baru akan mendorong kinerja industri pengolahan LNG dengan adanya peningkatan supply bahan baku;

5. Berlanjutnya pengerjaan proyek strategis (RDMP RU V, Jembatan Pulau Balang);
6. Pemberian insentif kepada perusahaan yang memberlakukan hilirisasi batubara;
7. Optimalisasi Kebijakan B20 dan B30 dan rencana B40 memberi peluang bagi peningkatan daya serap produk CPO di pasar domestik;
8. Optimalisasi sumur-sumur migas baru dan optimalisasi Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus;

C. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional pada RKP 2021

Tema pembangunan tahunan nasional pada RKP tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan kondisi pandemi COVID-19. Semula tema RKP tahun 2021 adalah **“Meningkatkan industri dan pariwisata di berbagai wilayah didukung oleh investasi”**, mengalami penyesuaian menjadi **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**. Dimana fokus ekonomi pada RKP tahun 2021 adalah pemulihan industri, pariwisata, dan investasi.

Selanjutnya dalam RKP tahun 2021 dijabarkan arah kebijakan Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Mendorong transformasi ekonomi ke arah hilirisasi industri yang mengolah hasil-hasil perikanan, pertanian dan pertambangan untuk membuka lapangan kerja berkualitas;
2. Mempercepat pembangunan sumber daya manusia dengan fokus peningkatan akses pendidikan menengah atas dan vokasional;
3. Memperkuat ketahanan dan kesiapan sistem kesehatan daerah;
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal untuk dapat berpartisipasi dalam sektor-sektor yang berkembang;
5. Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengelolaan dana desa.

Pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, Kalimantan Timur ditargetkan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,9-5,5 persen, dengan tingkat kemiskinan sebesar 5,7 persen dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,3 persen.

3.1.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Kalimantan Timur

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2020 diperkirakan akan melambat akibat pandemi COVID-19. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2019 yang sempat berada pada level pertumbuhan 4,77 persen, pada triwulan I 2020 harus mengalami perlambatan sebesar 1,27 persen (*yoy*). Perlambatan disebabkan kontraksi pada sektor pertambangan dan perlambatan kinerja pada sektor konstruksi. Pada sektor pertambangan, disebabkan adanya

kebijakan *lockdown* akibat pandemi COVID-19 di negara tujuan ekspor batubara (seperti Tiongkok dan India) memberikan dampak terhadap berkurangnya permintaan. Perlambatan lebih dalam tertahan oleh kinerja industri pengolahan yang meningkat (pupuk dan minyak).

Dampak COVID-19 terhadap kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Timur dilihat dari PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan pegawai yang dirumahkan, yang pada gilirannya akan menurunkan konsumsi masyarakat lebih lanjut ke depan. Sehingga jika dilihat dari tingkat pengangguran terbuka hingga Februari 2020 sebesar 6,88 persen, meningkat jika dibandingkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 sebesar 6,09 persen.

Pengendalian investasi di Kalimantan Timur tahun 2020 terancam mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Pada triwulan I 2020 tercatat beberapa rencana investasi tertunda. Hal ini berpengaruh pada peringkat realisasi investasi Kalimantan Timur pada triwulan I 2020 yang mengalami penurunan peringkat secara nasional baik dari PMA dan PMDN. Nilai realisasi investasi yang digambarkan melalui PMA dan PMDN hingga bulan Maret 2020 mencapai angka Rp 4,64 Triliun, terdiri atas PMDN sebesar Rp 3,71 Triliun dan PMA sebesar Rp 0,93 Triliun.

A. Sasaran

Pada tahun 2020, ekonomi makro Kalimantan Timur diharapkan dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif. Sasaran ekonomi makro pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Sasaran Ekonomi Makro Daerah

Sasaran Ekonomi Makro Daerah		2019	2020		Target 2021
			Sebelum Covid-19	Covid-19	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,77	3.5±1	-1,38-0,76	2±1
3	Inflasi	1,66	1,66	2,19	2,2±1
2	Investasi (trilyun Rp)	35,62	33,08	33,08	34,73
3	Indeks Pembangunan Manusia	76,61	>76,61	76,66	76,8
4	Indeks Gini	0,330	0,329	0,329	0,328-0,327
5	Tingkat Kemiskinan (%)	5,94	5,94	7,09	6,88
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,09	6-5	9,04	8,34

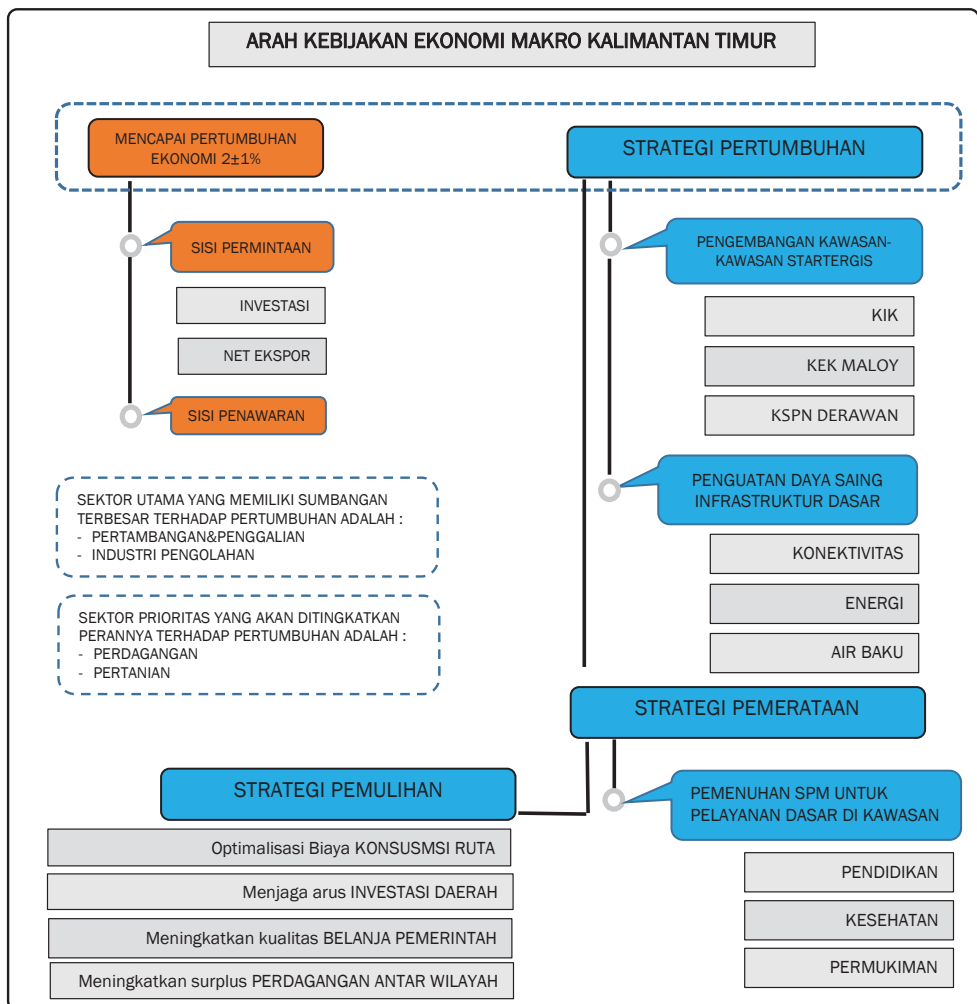
Pergeseran target indikator sasaran ekonomi makro daerah dikarenakan penyebaran pandemi COVID-19 yang dirasakan secara regional, nasional dan global. Untuk itu, beberapa asumsi makro Kalimantan Timur mengalami penurunan target di tahun 2020, sehingga pada tahun 2021 target tersebut juga perlu untuk menyesuaikan kondisi tersebut. Beberapa indikator yang mengalami penyesuaian target antarlain Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2020 diperkirakan berada pada rentang pertumbuhan sampai kontraksi tipis, lebih rendah dibanding tahun 2019. Pada tahun 2021, masa pemulihan dari situasi pandemi, berbagai aktivitas ekonomi beberapa lapangan usaha seperti penyediaan akomodasi makan minum, transportasi, perdagangan, dan pertambangan penggalian mulai menggeliat sehingga perekonomian Kalimantan Timur diharapkan dapat tumbuh pada rentang 2±1 persen.

Lonjakan pengangguran sebagai dampak Covid-19 juga tidak dapat terhindarkan, terutama akibat pemutusan hubungan kerja beberapa perusahaan swasta yang bergerak di sektor pariwisata. Hal ini mengakibatkan tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur tahun 2020 diperkirakan berada pada level 9,04 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Namun pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi sebesar 8,34 persen, dengan asumsi sektor pariwisata, transportasi, dan perdagangan kembali beroperasi secara normal.

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur tahun 2020 juga diperkirakan mengalami lonjakan akibat berkurangnya pendapatan masyarakat, sehingga daya beli masyarakat turun. Tingkat kemiskinan tahun 2021 Kalimantan Timur diharapkan menurun dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 6,88 persen. Penurunan ini diharapkan terjadi dengan asumsi inflasi Kalimantan Timur berada pada level 2 persen, karena hal ini mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur pada tahun 2020 diperkirakan tetap meningkat tipis menjadi 76,66. Sehingga pada tahun 2021 IPM Kalimantan Timur ditargetkan meningkat menjadi sebesar 76,8.



Gambar 3.6
Arah Kebijakan Ekonomi Makro Kalimantan Timur Tahun 2021

1. Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 2±1 Persen

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur diharapkan mampu menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dimana, pertumbuhan positif memberikan banyak dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

- 1) **Pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis** guna mempercepat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan berbasis pada sektor-sektor unggulan masing-masing. Dimana didalam mendukung proses pengembangan sekaligus akan dilakukan peningkatan kapasitas SDM (pendidikan vokasi dan menengah) dan

kemudahan berusaha dan insentif investasi. Hal ini dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai dan berkualifikasi serta untuk mendorong investasi dalam negeri. Sehingga penciptaan nilai tambah dari kawasan strategis untuk menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dapat terealisasi.

- 2) **Penguatan Daya Saing Infrastruktur Dasar** di Kalimantan Timur mencakup konektivitas, energi, dan air baku. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas sentra produksi Kawasan Industri dan Outlet serta penyediaan sarana dan prasarana dasar pendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan energi dan air baku sebagai bagian dari mendukung pengembangan kawasan strategis dalam beroperasi terutama untuk meningkatkan produktivitasnya.

2. Strategi Pemerataan

Mempercepat pengurangan kesenjangan (antar individu dan antar wilayah) melalui peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar dengan mendorong sektor-sektor berbasis ekonomi kerakyatan terutama di daerah 3T.

3. Strategi Pemulihan Ekonomi

Pemulihan kondisi perekonomian daerah pasca adanya pandemi COVID-19 juga menjadi fokus utama pembangunan daerah di tahun 2021. Percepatan pemulihan ekonomi dimaksud diyakini dapat dilakukan apabila didukung dengan strategi pembangunan ekonomi daerah yang tepat. Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan dari berbagai komponen permintaan adalah sebagai berikut :

a. Optimalisasi belanja konsumsi rumah tangga.

Upaya untuk pemulihan ekonomi dapat dilakukan melalui pengendalian konsumsi rumah tangga agar tetap terjaga. Pola pembelanjaan konsumsi rumah tangga diarahkan lebih kepada produk-produk yang telah ada atau disediakan oleh penyedia barang/jasa yang berada di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini tentunya harus didukung oleh kemampuan penyedia barang/jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pemerintah dapat mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya sektor UKM dan UMKM, serta koperasi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dimaksud. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong pelaksanaan kegiatan-kegiatan promosi daerah yang mampu menarik minat wisatawan untuk dapat berkunjung ke Kalimantan Timur.

b. Menjaga arus investasi ke daerah.

Pemberian insentif khusus bagi rencana investasi pada sektor-sektor usaha yang bersifat padat karyamampu menyerap banyak tenaga kerja (labour intensive). Hal ini juga harus dibarengi dengan komitmen investor untuk memberikan peluang/kesempatan kerja yang lebih besar kepada masyarakat lokal. Pemerintah perlu mendorong realisasi investasi pada sektor-sektor usaha dimaksud melalui perbaikan iklim investasi di daerah, khususnya dari sisi tata kelola perizinan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan kesiapan kompetensi dari tenaga kerja lokal untuk dapat memenuhi kualifikasi kerja yang dibutuhkan.

c. Meningkatkan kualitas belanja pemerintah.

Belanja pemerintah dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah diarahkan untuk lebih banyak menggunakan produk yang berasal dari wilayah Kalimantan Timur. Sebagian besar pekerjaan konstruksi dalam rangka pembangunan dan peningkatan infrastruktur harus lebih mengutamakan pemanfaatan bahan baku yang telah disediakan oleh pasar lokal. Pemerintah perlu menjamin tersedianya bahan baku yang dibutuhkan melalui pengelolaan rantai suplai/pasok yang informatif dan berkualitas. Selain itu, dalam rangka mendorong aktifitas ekonomi masyarakat lokal di daerah, maka penyelenggaraan kegiatan-kegiatan koordinasi dan ceremonial berskala menengah dan besar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, akan lebih banyak dilaksanakan di wilayah Kalimantan Timur.

d. Meningkatkan surplus perdagangan antar wilayah.

Aktifitas perdagangan antar wilayah perlu ditingkatkan dengan mengutamakan pemasaran pada produk-produk lokal hasil olahan yang telah menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Beberapa komoditas unggulan, baik yang berasal dari sektor perkebunan, pertanian tanaman pangan, kehutanan dan pertambangan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi di daerah, diupayakan untuk tidak diekspor dalam bentuk mentah. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan batasan impor terhadap produk-produk dari luar daerah yang menjadi kompetitor bagi produk-produk lokal, dengan tetap memperhatikan kebutuhan ketersediaan suplai barang di daerah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah pada Tahun 2021 dihitung dengan asumsi sebagai berikut

:

1. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
2. Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Sedangkan DAU dan DAK mengalami peningkatan;
3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah di Kalimantan Timur, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem informasi data mengenai objek wajib pajak, manajemen tata- kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui peningkatan dan *perluasan* obyek, intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
3. Pendayagunaan asset daerah;
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan
5. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian target penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2021, beberapa kegiatan Intensifikasi yang dilakukan, antara lain:

1. Bidang Pajak Daerah

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan kebijakan:
 - a. Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui *system online* se-Kalimantan Timur, khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
 - b. Menyediakan sarana mobilitas Samsat Jelajah.
 - c. Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif Progresif sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
 - d. Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
 - e. Melakukan Kegiatan operasional/razia lapangan pendataan di seluruh Kab/Kota se-Kalimantan Timur.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan kebijakan:
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi tentang perekonomian khususnya fiskal terkait kendaraan bermotor dan suku cadang serta pembiayaan, sehingga dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membeli kendaraan baru.

- b. Hasil evaluasi perkembangan potensi obyek pajak dan hasil evaluasi realisasi penerimaan tahun sebelumnya dan tahun berjalan mengalami perbaikan.
 - c. Kecenderungan masyarakat Kaltim membeli kendaraan Low Cost Green Car (LCGC) baru yang harganya lebih terjangkau.
 - d. Semakin banyaknya layanan transportasi berbasis Online juga berkontribusi besar dengan semakin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kendaraan Roda 4 dan 2 di tahun 2021.
 - e. Perusahaan leasing lebih selektif memilih calon pembeli yang lebih produktif.
 - f. Pertumbuhan ekonomi Kaltim yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro pada Tahun 2021 diperkirakan akan stagnan sehingga berpengaruh terhadap penerimaan di sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - g. Mengintensifikasikan penelitian persyaratan untuk menjaring BBN II terhadap kendaraan yang sudah dipindahtangankan.
 - h. Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah kepada para dealer dan agen tunggal pemegang merk termasuk badan leasing.
 - i. Melakukan kegiatan penagihan dan pendataan terhadap perusahaan pengguna alat berat/besar yang beroperasi di Kalimantan Timur.
 - j. Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui sistem online se-Kalimantan Timur, khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
 - k. Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
 - l. Melakukan kegiatan operasional/razia lapangan pendataan diseluruh Kab/Kota se-Kalimantan Timur.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan kebijakan:
- a. Memberlakukan tarif tunggal sebesar 7,5 persen secara penuh sesuai Perda Nomor 01 Tahun 2011.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (BPH-Migas, Kemendagri & Kemenkeu) terhadap penyaluran BBM di Kalimantan Timur.
 - c. Menginstruksikan kepada seluruh penyedia BBM yang beroperasi di Kalimantan Timur wajib untuk memiliki izin wajib pungut (WAPU) yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.
 - d. Melakukan audit terhadap seluruh penyedia BBM atas penjualan BBM yang membayar PBBKB.
 - e. Melakukan kegiatan pendataan dan pemberian nomor NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) bagi setiap agen penjualan BBM.
 - f. Melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang berlaku kepada seluruh penyedia BBM secara berkala, termasuk melakukan rekonsiliasi penilaian dan penjualan BBM di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dengan kebijakan:
 - a. Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertambangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b. Melakukan kegiatan operasional terpadu secara berkala setiap triwulan.
 - c. Mengaktifkan tim intensifikasi pada tingkat Kabupaten/Kota.

2. Bidang Retribusi Daerah, dengan kebijakan:

- 1) Merumuskan seluruh kebijakan yang menjadi dasar pungutan.
- 2) Mengadakan monitoring dan bimbingan teknis pungutan dalam setiap penyeteroran.
- 3) Memberikan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dalam rangka penertiban pungutan.
- 4) Melaksanakan koordinasi dan evaluasi atas pungutan bidang Retribusi Daerah dengan instansi.
- 5) Melakukan sosialisasi pungutan Retribusi Daerah secara terpadu dengan instansi terkait.
- 6) Memotivasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana senantiasa meningkatkan pelayanan yang memberikan kontribusi peningkatan Penerimaan Asli Daerah.

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2019 s/d proyeksi Tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut dimana perkembangan pendapatan daerah secara umum dapat dilihat. Dari tahun 2015 hingga 2017 rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mengalami penurunan -5,31%. Ini menunjukkan turunnya pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain PAD Yang Sah.

Tabel 3.2.
Realisasi dan Target Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019 s/d Tahun 2021

No.	Uraian	2019	2020	2021
1.1	Pendapatan Asli Daerah	6.555.425.798.016	6.779.772.585.320	5.896.815.268.766
1.1.1	Pajak Daerah	4.984.520.517.158	5.236.700.000.000	4.660.000.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	26.492.587.129	33.239.185.000	18.093.408.600
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	392.373.491.610	532.749.374.398	243.364.189.505
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	1.152.039.202.119	977.084.025.922	975.357.670.661
1.2	Dana Perimbangan	5.176.264.298.792	4.980.762.542.993	4.691.857.731.234
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak	3.207.168.795.642	2.656.532.832.993	2.632.133.670.234
1.2.2	DAU	815.693.641.000	943.411.298.000	834.938.558.000
1.2.3	DAK	1.153.401.862.150	1.380.818.412.000	1.224.785.503.000
1.3	Lain-Lain PD yang sah	42.948.342.000	81.929.920.000	12.727.000.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	42.948.342.000	12.420.000.000	12.727.000.000
1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-
1.3.3	Dana Insentif Daerah	9.883.392.000	69.509.920.000	-
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	18.163.860.000	-	-

No.	Uraian	2019	2020	2021
	Jumlah Pendapatan Daerah	11.774.638.438.808	11.842.465.048.320	10.601.400.000.000

3.2.2. Belanja Wajib dan Mengikat Daerah

Tabel 3.3.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

NO	URAIAN BELANJA WAJIB MENGIKAT	PROYEKSI TAHUN 2021
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.807.383.390.000
1	Belanja Pegawai (Gaji & Tunjangan)	2.062.608.840.000
2	Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2021	2.480.000.000.000
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota dan Partai Politik	1.000.000.000.000
4	Belanja Hibah :	230.000.000.000
5	Belanja Bansos	9.774.550.000
6	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000
II	BELANJA LANGSUNG	162.829.008.000
1	BOSDA	162.829.008.000
III	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-
1	Pembayaran Pokok Utang	-
2	Pembentukan Dana Cadangan	-
	TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT	5.970.212.398.000

3.2.3. Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Rencana pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2021 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan, baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perencanaan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada anggaran pendapatan tahun 2020 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Nasional, daerah, regional maupun lokal, serta ekonomi global yang saat ini sedang terjadi keguncangan perekonomian dan cukup berefek pada skala internasional.

Dalam jangka panjang, pembangunan Kalimantan Timur berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang diperoleh dari bagi hasil minyak dan gas alam dan royalti dari sektor pertambangan umum, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan dan perluasan obyek pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku. dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Kalimantan Timur.

Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat. dapat disusun kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2021 seperti tabel berikut:

Tabel 3.4.
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2021
1	Pendapatan	10.601.400.000.000
2	Pencairan Dana Cadangan	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-
	Total Penerimaan	10.601.400.000.000
	Dikurangi	
4	Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat	5.970.212.398.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	4.631.187.000.000

3.2.4. Belanja Daerah

Dengan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas diperlukan penajaman peranan kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. Pada RKPD 2021 komponen konsumsi pemerintah terhadap PDRB Kalimantan Timur diharapkan dapat berkontribusi sebesar 4,99%. Berdasarkan tema pembangunan RKPD tahun 2021, arah kebijakan belanja difokuskan untuk mendukung kegiatan produktif guna pengembangan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi & infrastruktur wilayah yang mendukung nilai tambah ekonomi. Untuk dapat mencapai target tersebut maka arah kebijakan belanja daerah diarahkan pada :

- (1) Meningkatkan belanja produktif seperti belanja Pendidikan, kesehatan, pertanian dan pembangunan infrastruktur mendukung konektivitas antar daerah. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih;
- (2) Meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja non-operasional utamanya pada belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal;
- (3) Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial terutama meningkatkan akses pendidikan dan mutu layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin;
- (4) Terkait aparatur negara kebijakan belanja negara diarahkan untuk menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik;
- (5) Transfer ke kabupaten/kota dan Dana Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota. diarahkan meningkatkan kualitas layanan publik (SPM) di

daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Proyeksi belanja daerah digunakan untuk memperkirakan segala kebutuhan belanja daerah terkait pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Berikut penetapan APBD 2020 dan proyeksi 2021 Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 3.5.

APBD Tahun 2019 dan Target Belanja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

NO	Uraian	2019	2020	2021
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.526.656.978.075	6.426.656.978.076	5.807.383.390.000
2.1.1	Belanja Pegawai	1.774.799.167.283	2.187.901.347.513	2.062.608.840.000
2.1.2	Belanja Hibah	765.270.838.400	820.534.954.662	230.000.000.000
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	9.774.550.000	9.774.550.000	9.774.550.000
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.579.253.034.454	2.977.391.300.000	2.480.000.000.000
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.372.559.387.938	406.054.825.900	1.000.000.000.000
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	4.143.013.021.925	5.007.817.248.925	4.631.187.602.000
2.2.1	Belanja Pegawai	292.637.422.329	449.172.979.451	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.419.924.279.524	2.794.712.174.887	
2.2.3	Belanja Modal	1.430.451.320.072	1.763.932.094.587	
Total Jumlah Belanja		8.239.667.069.093	10.696.670.000.000	10.601.400.000.000

3.2.5. Pembiayaan Daerah

Tabel 3.6.

APBD Tahun 2020 dan Proyeksi Pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

NO	Uraian	2019	2020	2021
3	PEMBIAYAAN	120.045.986.750	(100.000.000.000)	0
3.1	Penerimaan Pembiayaan	220.045.986.750	0	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000	100.000.000.000	0

Dalam rangka mempercepat peran pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah. Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya dalam menggali sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi daerah yang ada demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dilakukan dengan cara mengoptimalkan dan mengintegrasikan sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari BUMD, Swasta, maupun masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah. arah kebijakan pembiayaan tahun 2021 diarahkan pada:

- (1) Membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi bagi masyarakat secara lebih luas.
- (2) Pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU;
- (3) Optimalisasi dan integrasi sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) untuk mendukung pencapaian target-target program prioritas Kalimantan Timur. Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan lingkungan kehidupan masyarakat.

BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka RKPD tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun ketiga RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan, maka penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Adapun Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah **“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**. Visi pembangunan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam misi pembangunan dalam lima tahun mendatang sebagai berikut:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Secara grafis, kerangka kebijakan pembangunan Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dapat di lihat seperti pada gambar berikut :



Gambar 4.1
Pola Hubungan Antara Fokus Utama Pembangunan
RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Berdasarkan misi di atas, maka disusunlah tujuan dan sasaran pembangunan yang menjadi pedoman penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada rencana tahunan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran
MISI 1 : BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS	
Tujuan 1 : Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat
Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan Meningkatkan kewirausahaan dan prestasi pemuda

Tujuan	Sasaran
	Meningkatnya daya saing tenaga kerja
MISI 2 : BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN	
Tujuan 3 : Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah
Tujuan 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah Meningkatnya realisasi investasi Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah
MISI 3 : BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	
Tujuan 5 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya aksesibilitas wilayah Meningkatnya konektivitas antar kawasan Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air Menurunnya kawasan kumuh Terpenuhinya kebutuhan energi daerah
MISI 4 : BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN	
Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana

Tujuan	Sasaran
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang
MISI 5 : BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK	
Tujuan 7 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Dalam menyusun RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, disamping harus mempedomani dokumen perencanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 juga memperhatikan dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2021 yang mengusung tema “*Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial*”, dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana. Tema/fokus pembangunan Nasional pada tahun 2021, dijabarkan dengan Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2021 sebagai berikut:

- Prioritas 1: Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.**
- Prioritas 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.**
- Prioritas 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.**
- Prioritas 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.**
- Prioritas 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.**
- Prioritas 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**
- Prioritas 7: Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.**

Berkenaan dengan Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia maka Pemerintah Nasional memberikan perhatian khusus pada PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dan PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Dimana target sasaran nasional pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Indikator Sasaran Pembangunan RKP 2021

No	Sasaran	Target 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5-5,5
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,2-9,7
3	Tingkat Pengangguran (%)	7,5-8,2
4	Rasio Gini (Indeks)	0,377-0,379
5	IPM	72,78-72,90
6	Penurunan Emisi GRK (%)	23,55-24,14
7	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)	3,41-4,26
8	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	3,35-4,21
9	Kontribusi PDB Pariwisata	4,20

Sumber : Ranwal RKP 2021

Adapun prioritas pembangunan wilayah Kalimantan dalam RKP tahun 2021 antarlain :

1. Hilirisasi perkebunan sawit, serta pertambangan nikel dan batubara
2. Pembangunan jalan rel kereta api Kalimantan
3. Pengembangan kawasan industri terpadu pelabuhan Kijing
4. Penyiapan pemindahan IKN
5. Pembangunan Kawasan Perdesaan, Perbatasan, dan Kawasan Pariwisata.

Selanjutnya besaran target pembangunan Kalimantan Timur pada RKP 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Target RKP Tahun 2021 di Kalimantan Timur

No	Sasaran	Target	
		2020	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,80	2,9-5,5
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,58	5,7
3	Tingkat Pengangguran (%)	6,20	8,3

Penetapan target makro Kalimantan Timur dalam RKP 2021 sangatlah optimis, terutama didorong oleh adanya pengembangan komoditas unggulan seperti sawit, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa, perikanan tangkap, perikanan budidaya minyak dan gas bumi serta batubara. Serta dorongan untuk melakukan hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan dan pertambangan. Ditambah lagi kaitannya dengan proses pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

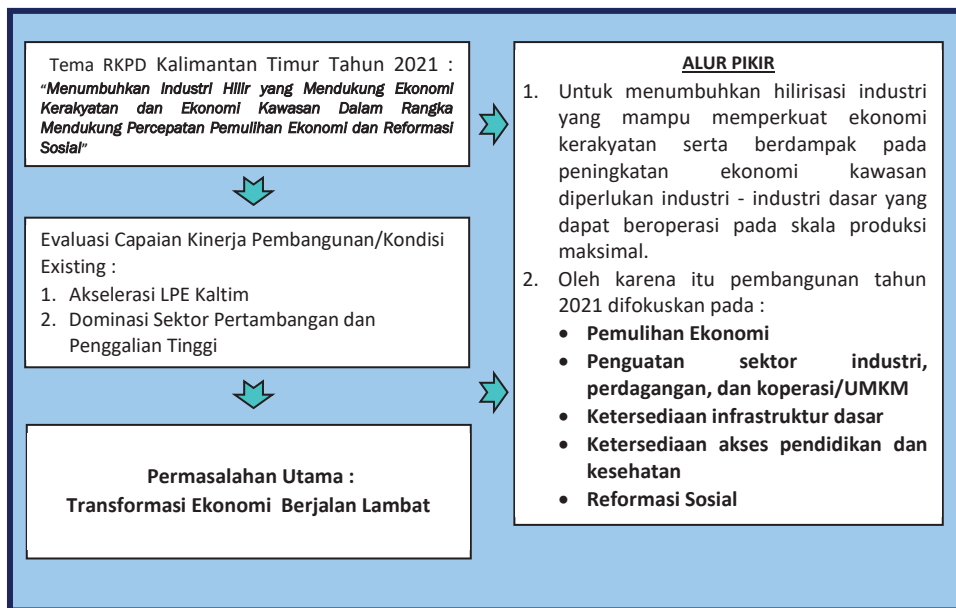
4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2021

Dengan memperhatikan hasil analisa terhadap arah kebijakan RPJMD Kalimantan Timur tahun 2019-2023, arah kebijakan RKP tahun 2021 serta permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan tahun 2021, maka tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah:

“Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”

Tema tersebut merupakan arah kebijakan pembangunan tahunan yang dirumuskan pada RPJMD dan merupakan strategi tahun kedua untuk mewujudkan Visi RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu **“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**. Tema RKPD tahun 2021 merupakan arah kebijakan pembangunan yang merupakan tindak lanjut dari tema tahun sebelumnya, dimana berdasarkan evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya menunjukkan bahwa setelah Aspek Daya Saing Investasi dibenahi, maka pembangunan di fokuskan pada penumbuhan hilirisasi industri. Semua kata kunci dalam tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur merupakan fokus pembangunan yang diarahkan pada hilirisasi industri yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan dan berdampak pada ekonomi kawasan. Namun dalam perumusan prioritas pembangunan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat selalu menjadi pertimbangan utama. Selain itu upaya untuk pemulihan sosial ekonomi akibat Covid 19 menjadi perhatian penting di setiap urusan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Alur Pikir dalam perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.2
Kerangka Pikir Perumusan Prioritas RKPD Kalimantan Timur Tahun 2021

Prioritas pembangunan Kalimantan Timur tahun 2021 disusun berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tujuan pembangunan pada interpretasi/arahan tujuan pembangunan jangka menengah tahun 2019-2023. Prioritas Pembangunan pada RKPD merupakan Prioritas Pembangunan yang bersifat Tematik yang ditunjukkan pada pencapaian menjadi sasaran utama pada tema RKPD 2021. Sesuai dengan Tema RKPD 2021 yang tertuang dalam RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, *"Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan"*. Seiring dengan perubahan tema pada RKP tahun 2021 akibat Pandemi Covid-19, maka tema RKPD Kalimantan Timur Tahun 2021 disesuaikan menjadi *"Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"*, maka kata kunci pada tema tersebut adalah **Industri Hilir, Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Kawasan, Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**. Dengan memahami permasalahan pada lambannya transformasi ekonomi di Kaltim dan situasi bencana akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020, maka Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah :

1. **Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja;**
2. **Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah;**
3. **Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi;**
4. **Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar;**
5. **Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang;**
6. **Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik;**
7. **Pemulihan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial masyarakat akibat situasi pandemi Covid-19.**

Tabel 4.4

**Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021
 “Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan
 Ekonomi Kawasan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan
 Ekonomi dan Reformasi Sosial”**

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
Tujuan 1 : Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,8
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	75,5
Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,60
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,34
Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,76
Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	6,88
Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	56,72
Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	57,82
Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	53
Tujuan 3 : Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2±1

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	4,70
Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)	448
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,99
Tujuan 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara (%)	6±1
Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	20
Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)	34,73
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,55
	Rasio Pemenuhan Beras (%)	79,94
Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,35
Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	5,7
Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,64
Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,1
Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)	3,84
Tujuan 5 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,328
Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	11.536.200
	Jumlah barang (ton)	355.200. 000
Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan)	3
Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Cakupan layanan air minum (%)	77,00
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	15.558,5

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	505
Menurunnya kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	459,56
Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	Rasio elektrifikasi (%)	89,50
Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,95
Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	27,75
Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	135
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	75,09
Tujuan 7 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B (71,50)
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,50
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)	82
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3

Selanjutnya, sasaran pembangunan dan arah kebijakan sektoral akan disajikan dalam masing-masing prioritas pembangunan yang terkait. Strategi dan arah kebijakan pada tabel berikut merupakan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan pada RKPd tahun 2021 disertai dengan jumlah pagu program yang tersusun sebagai berikut :

Tabel 4.5
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan, Program Prioritas, Pagu Program Prioritas, dan Prioritas Nasional
RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang Didukung
1. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Memperkokoh ketahanan budaya dan peningkatan kondusivitas masyarakat	1) Pengembangan Demokrasi di Daerah	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase penggunaan hak politik masyarakat (%)	70	2.270.847.500	Bakesbangpol	PN 4
		2) Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan nilai budaya dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sekolah mengembang-kan budaya lokal	233	500.000.000	Disdikbud	PN 3
2. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	1) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi dengan penguatan kemitraan swasta/industri (kurikulum, tenaga pendidik dan sarana prasarana)	Program Pengembangan Sekolah Kejuruan	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	70	317.539.731.000	Disdikbud	PN 3
		2) Pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK/MA/SLEB, dan Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA	76%	393.717.861.931	Disdikbud	PN 3
		3) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui penumbuhan kualifikasi pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)	99%	250.000.000	Disdikbud	PN 3
		4) Mempercepat wajib belajar 12 tahun dengan	Program Peningkatan	Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS	19.500	50.000.000.000	Disdikbud	PN 3

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang Didukung
3. Meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	keberpihakan terhadap anak keluarga miskin, disabilitas, pekerja anak dan anak tidak sekolah melalui BOSDA dan beasiswa KALTIM TUNTAS	Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	yang berprestasi (orang)				
		5) Penyediaan Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat Miskin	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan	Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang tidak putus sekolah (Siswa)	2.500	42.000.000.000	Disdikbud	PN 3
		6) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jarak Jauh	Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)	Persentase sekolah yang telah menggunakan system pendidikan jarak jauh (%)	95%	8.500.000.000	Disdikbud	PN 3
		7) Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Luar Biasa	Program Pendidikan Luar Biasa	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	75	722.773.609.069	Disdikbud	PN 3
		8) Penguatan kapasitas kelembagaan tentang anak	Program Peningkatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	88%	250.000.000	DKP3A	PN 3
		9) Pengembangan perpustakaan digital	Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (on line dan on site) (orang)	5.771	1.475.000.000	DPKD	PN 3
		10) Pemenuhan Bahan Bacaan Perpustakaan	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, dan pengawasaan dan pengendalian tenaga kesehatannya	80	1.570.581.793	Dinas Kesehatan	PN 3
		2) Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	64	5.642.233.794	Dinas Kesehatan	PN 3

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang Didukung
4. Meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Optimalisasi pengarusutamaan gender	3) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 4) Peningkatan Akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	14	Program Penanggulangan kemiskinan Bidang Kesehatan	Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%)	56.306.351.052	Dinas Kesehatan	PN 3
			15	Program Penanggulangan kemiskinan Bidang Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif (UEP) (%)	43	249.325.201	DKP3A
5. Meningkatkan kewirausahaan dan prestasi pemuda dan penyandang disabilitas	Optimalisasi fasilitas keolahragaan dan pengembangan insentif atlet berprestasi	1) Peningkatan kesadaran keadilan gender di kalangan masyarakat 2) Optimalisasi lembaga layanan terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3) Peningkatan akses dan keterampilan perempuan dalam berwirausaha	16	Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Persentase pemenuhan hak anak	251.024.625	DKP3A	PN 3
			17	Program Penanggulangan kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan Dasar(Orang)	0,048	1.537.284.166	Dinas Sosial
5. Meningkatkan kewirausahaan dan prestasi pemuda dan penyandang disabilitas	Optimalisasi fasilitas keolahragaan dan pengembangan insentif atlet berprestasi	1) Peningkatan kesadaran keadilan gender di kalangan masyarakat 2) Optimalisasi lembaga layanan terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3) Peningkatan akses dan keterampilan perempuan dalam berwirausaha	18	Program Peningkatan Prestasi Olahrag	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%)	1.486.020.200,	Dispora	PN 3
			19	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Trauma yang mendapatkan Pembinaan	15,67%	541.000.000	Dinas Sosial
5. Meningkatkan kewirausahaan dan prestasi pemuda dan penyandang disabilitas	Optimalisasi fasilitas keolahragaan dan pengembangan insentif atlet berprestasi	1) Peningkatan kesadaran keadilan gender di kalangan masyarakat 2) Optimalisasi lembaga layanan terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3) Peningkatan akses dan keterampilan perempuan dalam berwirausaha	20	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Pemuda yang Berwirausaha (%)	800.000.000	Dispora	PN 3
			20	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Trauma yang mendapatkan Pembinaan	1	800.000.000	Dispora

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang Didukung
6. Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	1) Peningkatan pengembangan, kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Tercerap di pasar kerja (%)	80%	1.885.000.000	Disnakertrans	PN 3
7. Meningkatkan usaha ekonomi koperasi dan UKM	Optimalisasi pengelolaan UKM melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan	1) Peningkatan kapasitas kelembagaan UKM dengan menumbuhkan penggunaan teknologi informasi bagi UKM serta membangun kemitraan bisnis dengan Usaha Besar melalui inkubasi bisnis 2) Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha tanpa jaminan bagi UKM dengan pola kemitraan dan pendampingan 3) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan keunggulakan kompetitif UKM 4) Fasilitasi Kewirausahaan Pemuda dengan Pemumbuhan Usaha Rintis (Startup) Industri Kreatif 5) Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi untuk perempuan dan keluarga 6) Pengembangan Industri Kreatif berbasis potensi dan keunggulan daerah	21 22	Jumlah Koperasi yang berkualitas / Jumlah UKM Naik Kelas	100 Koperasi / 200 UKM	4.800.000.000	Disperindagkop dan UKM	PN1
8. Meningkatkan keberdayaan	Peningkatan kualitas pembangunan	1) Peningkatan kapasitas BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa	Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatkan jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes)	390	500.000.000	DPMPD	PN 1

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang Didukung	
Masyarakat Perdesaan	wilayah perdesaan secara merata	2) Optimalisasi penggunaan dana desa untuk pembangunan desa 3) Pembinaan kapasitas aparat pemerintah desa dalam membangun desa berkualitas 4) Penguatan ketangguhan desa dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	24	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Jumlah desa berkembang (Desa)	900.000.000	DPMPD	PN 1	
			25	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	393	950.000.000	DPMPD	PN 7
			26	Program Kampung Iklim +	Jumlah kampung/ desa (Desa)	70	1.000.000.000	DPMPD	PN 6
			27	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang difasilitasi pengembangannya (kawasan)	2 Kawasan	4.100.000.000	Dinas Pariwisata	PN 1
9. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Penguatan aksesibilitas dan daya saing destinasi pariwisata	1) Pengembangan kualitas destinasi wisata berbasis masyarakat 2) Pemanfaatan Anjungan Kaltim di TMII sebagai pusat pelatihan ekonomi kreatif, etalase budaya dan promosi pariwisata Kaltim							
			28	Program Integrasi proses hulu-hilir industri pengolahan khususnya sektor pertanian, migas dan pertambangan					
				Program Pengembangan industri hilir pertanian dalam arti luas	Presentase Pertumbuhan Industri Olahan (%)	1	5.600.000.000	Disperindagkop dan UKM	PN 1
10. Meningkatkan kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah	3) Pengembangan skala ekonomi untuk meningkatkan ekspor 1) Pengembangan sistem perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi							
			29	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari)	12	1.760.000.000	DPMPPTSP	PN 1
11. Meningkatkan realisasi investasi	Percepatan proses perizinan dan pengendalian rencana investasi								

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang Didukung
12. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	2) Peningkatan efektivitas pengendalian rencana investasi	30	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri (perusahaan industri baru)	2.030.000.000	DPMP/SP	PN 1
		1) Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan pada lahan kering 2) Penerapan Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) 3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani 4) Peningkatan pemanfaatan teknologi pengolahan produksi pertanian	31	Program Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan	Jumlah produksi padi (ton)	444.000	11.850.000.000	DPTPH
13. Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Peningkatan populasi dan produktivitas ternak melalui pola kemitraan	5) Perbaikan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura	32	Program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura	Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton)	4.030.000.000	DPTPH	PN 1
		1) Pembangunan Miniranch sapi 2) Penyediaan Informasi Peternakan 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan peternak 4) Fasilitasi Penyediaan Permodalan bagi Peternak 5) Peningkatan produksi bibit dan benih ternak berkualitas melalui UPSUS SIWAB	33	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Jumlah Miniranch yang Teregister (unit)	40	8.170.000.000	Disnakkeswan
			34	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Angka Kelahiran Sapi (%)	6.500.000.000	Disnakkeswan	PN 1

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang Didukung		
14. Meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	1) Peningkatan produktivitas komoditi perkebunan unggulan	35	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	17.136.849	Disbun	PN 2		
			36	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan)	35	1.026.000.000	Disbun	PN 1	
		3) Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan industri hilir	37	4) Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah Produk perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	2	2.250.000.000	Disbun	PN 1
				5) Pengelolaan areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah Penurunan Emisi Sektor Perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,07	977.000.000	Disbun	PN 6
				6) Peningkatan pemanfaatan limbah biomassa perkebunan						
		7) Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan	38							
15. Meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	1) Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan	39	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	161.216	DKP	PN 1		
			40	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan tangkap (Ton)	158.938 Ton	8.600.000.000	DKP	PN 1	
		3) Perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan	41	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Unggulan	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih (ekor)	2,8 Miliar Ekor	3.637.000.000	DKP (UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar)	PN 1	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang Didukung	
16. Meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	Pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan	1) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor kehutanan 2) Mengurangi laju deforestasi melalui perlindungan dan pengamanan kawasan hutan 3) Pemulihan kawasan hutan yang terdeforestasi dan degradasi	42	Program Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (kawasan)	1 Kawasan	3.450.000.000	DKP	PN 1
			43	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Realisasi penerimaan PNPB sektor kehutanan (Rp. Miliar)	170	3.008.900.000	Dishut	PN 1
17. Meningkatkan pendanaan pembangunan daerah	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	4) Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan	44	Program Perlindungan dan KSDAE	Persentase kerusakan hutan di dalam kawasan hutan (%)	≤1,5	782.100.000	Dishut	PN 6
			45	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Persentase meningkatnya tutupan lahan (%)	1.398	1.194.000.000	Dishut	PN 1
18. Meningkatkan aksesibilitas wilayah	Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	1) Peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam 2) Optimalisasi pengadaan infrastruktur perhubungan, khususnya infrastruktur pelayanan 3) Peningkatan keterampilan daerah terpicil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar kehidupan masyarakat	46	Program Penyuluhan, pemberayaan masyarakat hutan dan perhutanan sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	32.000	1.820.000.000	Dishut	PN 1
			47	Program Perencanaan dan pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah objek/sumber pendapatan baru	6	4.200.000.000	Bapenda	PN 1
18. Meningkatkan aksesibilitas wilayah	Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	3) Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	48	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP (Unit/%)	11 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (85%)	6.582.000.000	Dishub	PN 5
			49	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kasus)	512	13.846.000.000	Dishub	PN 5

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang Didukung
19. Meningkatkan konektivitas antar kawasan	Penguatan konektivitas antar daerah dan kawasan	1) Peningkatan keterhubungan daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan signifikan	Lintas Angkutan Jalan					
		2) Peningkatan keterhubungan sentra-produksi (hinterland) dan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan daerah	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tingkat kemandapan jalan provinsi (%)	63,46	350.000.000.000	DPUPR&PERA	PN 5
		3) Peningkatan aksesibilitas ke kawasan strategis pariwisata nasional dan provinsi						
20. Meningkatkan fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Peningkatan sarana dan prasarana dan distribusi air bersih	1) Peningkatan infrastruktur pengolahan dan distribusi air baku	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kapasitas Air Baku (L/detik)	8,622	100.000.000.000	DPUPR&PERA	PN 5
		2) Peningkatan infrastruktur layanan air minum	Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakarya	Cakupan layanan Air Minum Perpipaan (%)	67,23	110.000.000.000	DPUPR&PERA	PN 5
21. Menurunkan kualitas rumah tidak layak huni kawasan kumuh	Peningkatan ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	1) Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi keluarga pra sejahtera pada kawasan kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	36,722	43.000.000.000	DPUPR&PERA	PN 5
		2) Pembinaan dan pendampingan dalam penerapan sanitasi sehat						
22. Terpuhunya kebutuhan energi daerah	Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	1) Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)	Program Diversifikasi & Konservasi Energi	Persentase pemanfaatan EBT (%)	4,13	47.030.000.000	DESDM	PN 1
			Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik (KK)	1.018.607	2.200.000.000	DESDM	PN 6
23. Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Peningkatan Kualitas Perindungan dan Perindungan dan	1) Peningkatan Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta daya dukung	Program Tata Lingkungan	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang	6.000	3.506.000.000	DLH	PN 6

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang Didukung
	Pengelolaan Lingkungan Hidup	dan sdaya tampung lingkungan		diinventarisasi dan di PEP kan (aksi)				
		2) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Lingkungan	Tercemar sedang (8)	3.250.000.000	DLH	PN 6
24. Meningkatkan kapasitas daerah ketanggahan Menghadapi Bencana	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	1) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana	15	1.319.540.000	BPPD	PN 6
			Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana (%)	85	1.649.009.438	BPPD	PN 6
25. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1) Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota (%)	77,19	7.960.000.000	DPUPR&PERA	PN 2
		1) Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah yang memperoleh predikat minimal B (Baik) (%)	77	797.315.881	Biro Organisasi	PN 7
26. Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah	2) Penataan pola hubungan kerjasama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota	Program Penguatan Kelembagaan	Persentase PD yang dibentuk sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (%)	92	946.684.167	Biro Organisasi	PN 7
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan	90	3.563.000.000	Bappeda	PN 7

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang Didukung
27. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel		1) Peningkatan Integritas Pemerintah Daerah		melalui dokumen anggaran				
			64	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%)	71	1.100.000.000	Biro Organisasi
28. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas		2) Meningkatkan kapabilitas APIP	Program Tata Laksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)	78,95	300.000.000	Biro Organisasi	PN 7
		1) Peningkatan tatakelola pemerintah yang baik	Program Pencegahan KKN	Hasil Penilaian Integritas	75	2.373.200.000	Inspektorat	PN 7
		2) Peningkatan kualitas komunikasi dan teknologi informasi	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	4.878.037.500	Diskominfo	PN 7
		TOTAL PAGU				2.418.759.657.317		

Program prioritas Kalimantan Timur tahun 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran pada Prioritas Nasional RKP 2021 antarlain sebagai berikut:

1. Untuk mendukung Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Program Diversifikasi dan Konservasi Energi
 - b. Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan
 - c. Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan
 - d. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial
 - e. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan
 - f. Program Pengelolaan DAS dan RHL
 - g. Program Pengelolaan Ruang Laut
 - h. Program pengembangan destinasi pariwisata
 - i. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
 - j. Program pengembangan perikanan tangkap
 - k. Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan
 - l. Program Pengembangan Usaha Peternakan
 - m. Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi
 - n. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM
 - o. Program Peningkatan dan Pengembangan Industri
 - p. Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan
 - q. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
 - r. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan
 - s. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
 - t. Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial
 - u. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - v. Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah
 - w. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan
 - x. Program Pembangunan Desa dan Kawasan
2. Untuk mendukung Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Program Peningkatan Produksi Perkebunan
 - b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Untuk mendukung Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Program Kesetaraan Gender
 - b. Program Pelatihan Pencari Kerja
 - c. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
 - d. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan
 - e. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial
 - f. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan
 - g. Program Pendidikan Luar Biasa
 - h. Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas

- i. Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
 - j. Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
 - k. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - l. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja
 - m. Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan
 - n. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - o. Program Peningkatan Prestasi Olahraga
 - p. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
 - q. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - r. Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan
 - s. Program Pengembangan Sekolah Kejuruan
 - t. Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)
 - u. Program Peningkatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak
 - v. Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak
4. Untuk mendukung Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Program Pengembangan Nilai Budaya;
 - b. Program Pendidikan Politik Masyarakat
5. Untuk mendukung Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakarya
 - b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - c. Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP
 - d. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
 - e. Program Pengembangan Ketenagalistrikan
 - f. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - g. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Untuk mendukung Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan
 - b. Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - c. Program Perlindungan dan KSDAE
 - d. Program Tata Lingkungan
 - e. Program Kampung Iklim +
 - f. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - g. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
7. Untuk mendukung Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan
 - b. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - c. Program Penguatan Kelembagaan
 - d. Program Peningkatan Pelayanan Publik

- e. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
- f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- g. Program Pencegahan KKN

4.3. Inovasi Pembangunan Daerah

Selain program/kegiatan yang diuraikan pada subbab sebelumnya, dalam rangka percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah dan prioritas yang telah diuraikan, dikembangkan pula program-program inovasi. Beberapa program inovasi yang dikembangkan di Kalimantan Timur antara lain sebagai berikut :

1. Beasiswa Kaltim Tuntas

Program beasiswa Kaltim Tuntas, yang diluncurkan pertama kali tanggal 16 September 2019 oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan berdaya saing masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini sejalan dengan misi pertama RPJMD Kalimantan Timur tahun 2019-2023 yaitu Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Melalui pelaksanaan beasiswa ini diharapkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Timur. Pada tahun 2021 disediakan anggaran untuk Beasiswa Kaltim Tuntas sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah).

Beasiswa merupakan hal yang lumrah dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Namun, ada hal berbeda yang terlihat dari pelaksanaan beasiswa Kaltim Tuntas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menariknya, beasiswa Kaltim Tuntas sebagaimana namanya memberikan bantuan pembiayaan pendidikan kepada mahasiswa asli Kalimantan Timur yang sedang menempuh studi di perguruan tinggi hingga pendidikannya selesai sesuai dengan rentang waktu studi normal.

Mekanisme penyerahan beasiswa dilakukan sekaligus atau bertahap dengan alokasi bantuan pendidikan yang bervariasi dan diberikan berdasarkan jenjang pendidikan, jenis pendidikan, tempat perguruan tinggi atau menurut perjanjian kerjasama serta ketersediaan anggaran. Jangka waktu pemberian beasiswa secara rinci adalah sebagai berikut :

- Diploma I maksimal 1 (satu) tahun
- Diploma II maksimal 2 (dua) tahun
- Diploma III maksimal 3 (tiga) tahun

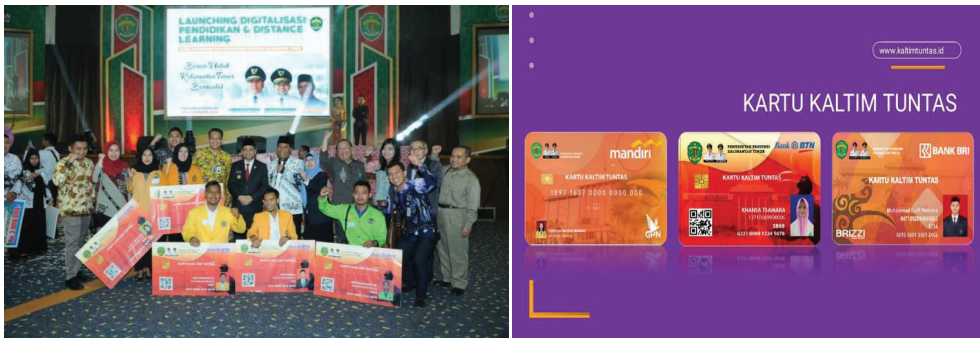
- Diploma IV maksimal 4(empat) tahun
- Strata 1 maksimal 4 (empat) tahun
- Strata 2 maksimal 2 (dua) tahun
- Strata 3 maksimal 4 (empat) tahun
- Mahasiswa perkeretapian Rusia S1 dan S2 maksimal 6 (enam) tahun

Beasiswa Kaltim Tuntas dibagi menjadi 3 (tiga) kategori. Pertama, beasiswa umum yang diberikan pada mahasiswa Kaltim berdasarkan prestasi akademik dan prestasi non akademik. Kedua, beasiswa khusus yang diberikan kepada mahasiswa Kaltim berkategori miskin, penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus, berasal dari pedalaman daerah terluar, terpencil, terisolir (3T), anak/cucu veteran, anak korban KDRT, penghafal kitab suci/Al-Qur'an (hafidz/hafidzoh 30 Juz), dan beasiswa luar negeri. Ketiga, beasiswa kerjasama yang diberikan pada mahasiswa pada program studi yang memiliki kerjasama antara pemerintah provinsi dengan perguruan tinggi.

Mekanisme pendaftaran dan penerimaan calon penerima beasiswa tergolong mudah karena dilakukan secara *online* melalui *website* www.kaltimtuntas.id, selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi faktual oleh instansi terkait di Kabupaten/Kota. Nama calon penerima beasiswa yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi, selanjutnya akan diusulkan dan ditetapkan menjadi calon penerima beasiswa oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kemudian diusulkan kepada Gubernur agar ditetapkan sebagai penerima beasiswa melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.

Diharapkan dengan adanya program beasiswa kaltim ini mampu menjadi daya ungkit bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Kaltim Berdaulat.





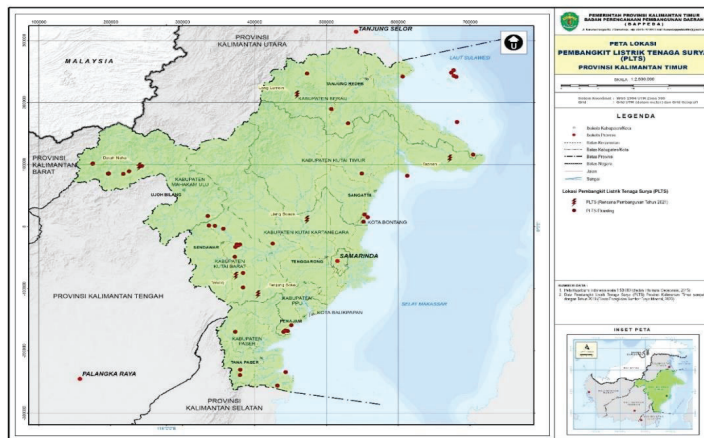
2. Kaltim Bersinar

Jumlah Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sebanyak 1.038 Desa, sebanyak 1.029 Desa telah memiliki listrik (Desa Berlistrik) yang bersumber dari PLN maupun Non PLN. Masih terdapat daerah yang belum terjangkau listrik yang bersumber dari PLN. Hal ini terutama pada wilayah-wilayah terpencil yang memerlukan biaya besar untuk pembangunan jaringan distribusi PLN. Untuk mengatasi hal ini maka pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong pembangunan energi berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan. Potensi lokal yang dimanfaatkan adalah energi sinar matahari dengan pola PLTS terpusat. Sampai tahun 2019 pembangunan PLTS Terpusat *Off Grid* sudah terbangun sebanyak 45 unit dengan total kapasitas pembangkit sebesar 1.963 KWp. Jumlah masyarakat yang terlayani sejumlah 5.421 rumah.

Dengan adanya listrik masuk desa, rasio desa berlistrik di Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 98,94% menjadi 99,13% di tahun 2019. Begitu pula dengan rasio elektrifikasi Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan yakni sebesar 85,75% pada tahun 2018 menjadi 88,93% pada tahun 2019.

Program Pembangunan Listrik Tenaga Surya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat, baik yang sama sekali belum memiliki akses kepada listrik maupun bagi masyarakat yang menggunakan genset sebagai pembangkit tenaga listriknya. Bagi masyarakat yang sebelumnya menggunakan genset, biaya yang dikeluarkan dengan PLTS menjadi lebih murah. Dengan menggunakan PLTS rata-rata biaya per bulan yang dibayarkan oleh masyarakat maksimal sebesar Rp 100.000 untuk 24 jam. Sementara dengan menggunakan genset komunal biaya per bulan yang dibayarkan masyarakat rata-rata sebesar Rp 100.000 untuk 6 jam.

Untuk tahun 2021 direncanakan pembangunan enam PLTS Terpusat *Off Grid* di di lima kabupaten yakni Kabupaten Berau di Desa Long Lancim, Kabupaten Kutai Kartanegara di Desa Liang Buaya, Kabupaten Kutai Timur di Desa Tadoan, Kabupaten Mahakam Ulu di Desa Datah Naha, Kabupaten Kutai Barat di Desa Tanjung Soke dan Desa Tendiq.



3. Masyarakat Sejahtera Hutan Lestari

Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Hutan Negara atau Hutan Adat oleh masyarakat setempat atau masyarakat adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan lingkungan sosial budaya. Dalam hal ini perhutanan sosial di Kalimantan Timur dibentuk melalui lima skema yakni Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Sampai dengan tahun 2019, perhutanan sosial di Kalimantan Timur mencapai 57 unit dengan luasan sebesar 154.759,75 hektar. Namun sayangnya berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan desa yang memperoleh izin perhutanan sosial belum terlihat. Pada tahun 2019 jumlah

masyarakat miskin pada wilayah perhutanan sosial sejumlah 13.508 jiwa, sedangkan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal pada wilayah yang telah mendapatkan izin perhutanan sosial sejumlah 14 desa.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya untuk melakukan inovasi agar wilayah/desa/kelompok masyarakat yang mendapatkan izin perhutanan sosial mengalami peningkatan kesejahteraan. Melalui pendataan potensi yang lebih baik, kerjasama dengan mitra pembangunan dan kolaborasi pendanaan, maka diharapkan mulai tahun 2021 akan terjadi perbaikan yang signifikan. Untuk tahun 2021, perhutanan sosial di Kalimantan Timur yang terkelola dengan baik dan unit Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang sudah beroperasi ditargetkan sebanyak 10 unit dengan luas areal usaha 24.691 hektar. Melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, maka diharapkan hutan pada wilayah tersebut akan tetap lestari.



4. Insentif Positif untuk Penurunan Emisi

Indonesia telah berkomitmen pada UN Post-2015 *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan Komitmen Pemerintah Nasional (NDC), guna mengurangi Emisi Karbon sebesar 29% atau, 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Untuk memenuhi komitmen ini, maka pemerintah Indonesia telah mewajibkan setiap provinsi untuk memiliki dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Selain itu, pemerintah Indonesia juga terus mendorong upaya untuk menurunkan emisi melalui Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon.

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang terdepan di Indonesia dalam upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Hal ini ditandai dengan banyaknya dokumen pembangunan di Kalimantan Timur yang mendorong pembangunan rendah karbon. Upaya Kalimantan Timur tersebut diapresiasi oleh pemerintah Indonesia dengan menjadikan Kalimantan Timur sebagai *pilot project Forest Carbon Partnership Facilities (FCPF)*. Melalui proyek ini maka upaya penurunan

emisi yang dilakukan di Kalimantan Timur berpotensi untuk mendapatkan insentif positif baik berupa moneter maupun non moneter.

Program ini akan dilaksanakan selama periode 2020-2024 di seluruh yurisdiksi Kalimantan Timur. Pembayaran insentif berupa pembagian manfaat penurunan emisi karbon program *Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund* di Kaltim sebanyak tiga tahap, yakni tahap pertama tahun 2021, tahap kedua tahun 2023 dan tahap ketiga tahun 2025. Berdasarkan *Letter of Intent (LoI)* yang disepakati Pemerintah Indonesia dan World Bank bahwa emisi yang masuk terhitung didalam skema sekitar 22 juta ton yang uangnya sudah tersedia di rekening bank dunia.

Pembagian manfaat dari penurunan emisi diutamakan untuk masyarakat yang berada di sekitar areal hutan. Mekanisme maupun besaran dana yang akan diperoleh oleh setiap pihak yang berkontribusi diatur dalam dokumen rencana pembagian manfaat (*Benefit Sharing Plan*). Adapun program kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana penurunan emisi antara lain peningkatan kapasitas aparatur maupun masyarakat dalam pengelolaan hutan, pendanaan bagi usaha mikro maupun kelompok tertentu yang memerlukan perhatian khusus, pembelian peralatan untuk menangani kebakaran hutan, proyek pembangunan pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur desa, pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak mengganggu eksistensi hutan.



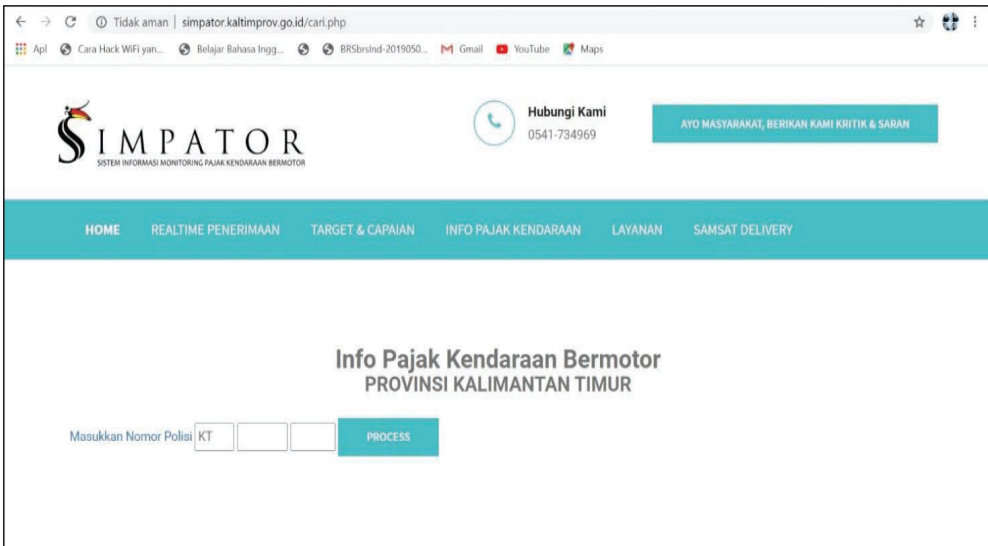
5. SIMPATOR

Sistem Informasi Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor atau biasa disingkat SIMPATOR merupakan sebuah layanan informasi bagi masyarakat terkait perhitungan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara mudah, cepat, tepat, dan akurat yang dapat diakses dimana saja secara *online* dan gratis melalui *website simpator.kaltimprov.go.id* dengan media *handphone*, laptop, atau *personal computer* (PC). Sebelum SIMPATOR *launching*, info pajak kendaraan hanya bisa diakses melalui layanan SMS dengan mengirim format SMS “INFO KT-1234-ABC” lalu dikirim ke nomor 0811-585-7070. Namun layanan tersebut cukup sering mengalami gangguan, ditambah lagi seiring perkembangan teknologi frekuensi penggunaan SMS mulai berkurang. Sehingga kehadiran SIMPATOR mampu meningkatkan transparansi dan

informasi detail biaya pajak kendaraan, identifikasi kendaraan, serta informasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara *realtime* yang masuk ke kas daerah dari wilayah kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur. Sehingga kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak ikut meningkat. Karena keberadaan SIMPATOR secara tidak langsung juga mengurangi celah bagi praktik pungutan liar yang selama ini bisa terjadi diluar kendali atau pengawasan pemerintah.

Cara mengoperasionalkan SIMPATOR juga terbilang mudah, untuk mengetahui hal yang berkaitan dengan info pajak kendaraan bermotor cukup mengakses *website simpator.kaltimprov.go.id* dengan media *handphone*, laptop, atau *personal computer* (PC) kemudian memasukan pelat nomor kendaraan pada kolom yang telah disediakan.

SIMPATOR dinilai sangat tepat untuk mempublikasikan sumber daya dan potensi daerah yang dikelola pemerintah daerah karena berisi informasi umum daerah yang dapat berfungsi sebagai acuan dan alat bantu dalam membuat kebijakan baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Melalui SIMPATOR, para pemangku kepentingan dapat melihat realisasi penerimaan PKB dan BBNKB secara *realtime*. Maka disamping bermanfaat bagi masyarakat, SIMPATOR juga membawa manfaat bagi *stakeholder*.



The screenshot shows a web browser window with the URL `simpator.kaltimprov.go.id/cari.php`. The page features the SIMPATOR logo (SISTEM INFORMASI MONITORING PAJAK KENDARAAN BERMOTOR) and a contact number (0541-734969). A navigation menu includes HOME, REALTIME PENERIMAAN, TARGET & CAPAIAN, INFO PAJAK KENDARAAN, LAYANAN, and SAMSAT DELIVERY. The main content area is titled "Info Pajak Kendaraan Bermotor PROVINSI KALIMANTAN TIMUR" and contains a search form with the label "Masukkan Nomor Polisi" and a "PROCESS" button.

BAB 5

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Dampak penyebaran pandemi Covid-19 semenjak Maret 2020 yang hampir menyeluruh di wilayah Kalimantan Timur mengakibatkan terjadinya permasalahan sosial dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Permasalahan sosial seperti bertambahnya jumlah masyarakat miskin dan angka pengangguran tidak akan mampu terelakkan, dikarenakan banyaknya masyarakat yang kehilangan lapangan pekerjaan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Penurunan pendapatan diberbagai sektor lapangan usaha juga berimbas terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Timur.

Dengan mempertimbangkan sinkronisasi dan sinergi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) 2016-2036 , RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025, strategi dan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota bertujuan untuk mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi dampak Pandemi Covid-19 dan penurunan kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dilakukan dengan strategi : (1) Penguatan konektivitas antar kawasan ekonomi dan pemerataan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu di seluruh wilayah; (2) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah; (3) Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (4) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, yaitu ***“Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”***, Kebijakan pembangunan kabupaten/kota difokuskan pada:

- a. peningkatan daya tarik investasi industri pengolahan sumber daya alam dan turunannya melalui peningkatan pelayanan kemudahan berusaha dan peningkatan konektivitas antar wilayah dengan mengintegrasikan pengembangan infrastruktur multimoda (meliputi transportasi darat, laut, sungai dan udara), akses sumberdaya air, energi dan telekomunikasi.

- b. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan masing-masing kabupaten/kota melalui pengembangan pusat pemasaran komoditi unggulan dan pemberdayaan masyarakat terutama di daerah pedesaan, pedalaman, kawasan transmigrasi dan kawasan perbatasan.
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu masuk kedalam pasar kerja industri melalui pendidikan vokasi dan pelatihan ketenagakerjaan.
- d. Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar meliputi transportasi, sanitasi, air minum dan permukiman.
- e. Peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta banjir melalui rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Lahan Kritis, penanganan bencana dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Fokus pembangunan kabupaten/kota tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi provinsi dan kabupaten/kota yang inklusif dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana alam dan bencana non alam.

Berikut adalah arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan permasalahan utama pembangunan, target-target sasaran pembangunan daerah, serta sektor/lapangan usaha potensial di masing-masing kabupaten/kota..

**Tabel 5.1.
Target Makro dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2021**

NO	KAB/KOTA	TARGET MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2021	ARAH KEBLIJAKAN TAHUN 2021
1	Samarinda	LPE : 5 ± 1% TK. KEMISKINAN : 4,45% TPT : 5,00%	1. Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan pusat kegiatan ekonomi 2. Pengendalian Banjir
2	Balikpapan	LPE : 5,20% TK. KEMISKINAN : 2,32% TPT : 7,00%	1. Pengembangan kawasan industri 2. Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan pusat kegiatan ekonomi 3. Pengendalian Banjir
3	Bontang	LPE : 1,5 ± 1% TK. KEMISKINAN : 4,19% TPT : 8,50%	1. Peningkatan produktifitas budidaya perikanan 2. Pengendalian Banjir
4	Kutai Kartanegara	LPE : 2 ± 1% TK. KEMISKINAN : 7,35% TPT : 5,20%	1. Peningkatan Produktifitas pertanian pangan 2. Peningkatan produktifitas budidaya perikanan 3. Pengembangan industri pariwisata, industri pengolahan hasil pertanian, perikanan dan perkebunan
5	Kutai Timur	LPE : 3 ± 1% TK. KEMISKINAN : 8,45% TPT : 5,00%	1. Peningkatan pelayanan infrastuktur di kawasan industri maloy/MBTK 2. Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan
6	Kutai Barat	LPE : 5,12% TK. KEMISKINAN : 9,00% TPT : 4,38%	1. Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar komoditi unggulan 2. Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan 3. Pengembangan kawasan peternakan/Mini Ranch

NO	KAB/KOTA	TARGET MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2021	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
7	Paser	LPE : 3,80% TK. KEMISKINAN : 8,89% TPT : 4,50%	1. Peningkatan Produktifitas Pertanian Pangan 2. Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar komoditi unggulan 3. Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan sentra produksi 4. Pengembangan kawasan peternakan/Mini Ranch
8	Penajam Paser Utara	LPE : 2,5 ± 1% TK. KEMISKINAN : 7% TPT : 4,60%	1. Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar komoditi unggulan 2. Peningkatan produktifitas budidaya perikanan 3. Pengembangan Agroindustri
9	Berau	LPE : 4,50% TK. KEMISKINAN : 4,55% TPT : 4,50%	1. Pengembangan industri pariwisata 2. Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan sentra produksi
10	Mahakam Ulu	LPE : 5 ± 1% TK. KEMISKINAN : 9,5% TPT : 3,00%	Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan sentra produksi dan akses ke ibukota kabupaten

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota

Pengembangan wilayah kabupaten/kota diarahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan pemerataan pembangunan antar wilayah. Kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan baru merupakan peluang daerah untuk dapat mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah, menambah bangkitan ekonomi di Kalimantan Timur dan sekitarnya, serta memacu transformasi ekonomi Kalimantan Timur.

Pengembangan wilayah kabupaten/kota secara spasial dilakukan dengan strategi ; (1) Pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan strategis sekitar kawasan IKN; (2) Penguatan peran kabupaten/kota sebagai hinterland/sub pusat pelayanan bagi kawasan IKN; (3) Percepatan realisasi investasi pada kawasan strategis; (4) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan peningkatan penanganan bencana untuk menjamin daya dukung lingkungan.

Berikut adalah arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota, mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) 2016-2036 dan RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan mempertimbangkan posisi strategis wilayah, permasalahan utama pembangunan, target-target sasaran pembangunan daerah, serta sektor/lapangan usaha potensial di masing-masing kabupaten/kota.

5.2.1. Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kota Samarinda

Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur dalam pengembangan wilayah kotanya menghadapi permasalahan terganggunya kegiatan sosial ekonomi oleh bencana alam banjir yang sering melanda. Arus keluar/masuknya barang dan jasa sering terhambat oleh banjir sehingga berdampak negatif terhadap aktifitas sosial ekonomi masyarakat. Sebagai daerah pengembangan Kawasan Industri, Perdagangan dan Jasa, Fokus pengembangan wilayah Kota Samarinda di tahun 2021 adalah:

- a. Penguatan peran Kota Samarinda sebagai hinterland/sub pusat pelayanan bagi kawasan IKN, melalui :
 - peningkatan konektifitas transportasi jalan antar wilayah dari IKN, Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan sekitarnya menuju Bandara APT Pranoto berupa pembangunan jalan akses baru sepanjang 11,4 km pada ruas jalan kawasan Sempaja menuju Batu Cermin dan Batu Besaung, hingga tembus Bandara APT Pranoto dan jalan akses jalur *ringroad* selatan dan utara.
 - Peningkatan cakupan layanan air minum melalui peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), baik dari sisi unit air baku, unit produksi, serta unit distribusinya.
- b. Pengamanan Kota Samarinda sebagai Kawasan Industri, Perdagangan dan Jasa dari bencana banjir, melalui peningkatan kerjasama pengendalian bencana alam banjir antara lain ; kerjasama dengan Provinsi dan BWS Wilayah III Kalimantan Kementerian PUPR dalam hal pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan perbaikan sistem drainase kota; kerjasama dengan perusahaan Pertambangan dan kabupaten/kota sekitarnya dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang di hulu DAS serta Rehabilitasi DAS dan Lahan Kritis.



Bappeda Prov. Kalimantan Timur, 2020

Gambar 5.1.
Jalan Akses APT Pranoto

Fokus pengembangan wilayah Kota Samarinda tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM, serta membangun perekonomian berkelanjutan di Kota Samarinda, khususnya di sektor perdagangan dan jasa.

5.2.2. Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kota Balikpapan

Kota Balikpapan merupakan pintu gerbang wilayah Kalimantan Timur, dan merupakan pusat kegiatan ekonomi Kalimantan Timur, yang didalamnya terdapat Kawasan Industri Kariangau sebagai Kawasan Strategis Nasional. Kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang berbatasan dengan Kota Balikpapan, menempatkan posisi strategis Balikpapan sebagai pintu gerbang bagi IKN juga. Kawasan Industri Kariangau merupakan salah satu Kawasan yang kegiatan industrinya telah berjalan cukup baik, dan diprioritaskan pengembangannya dalam 5 (lima) tahun kedepan.

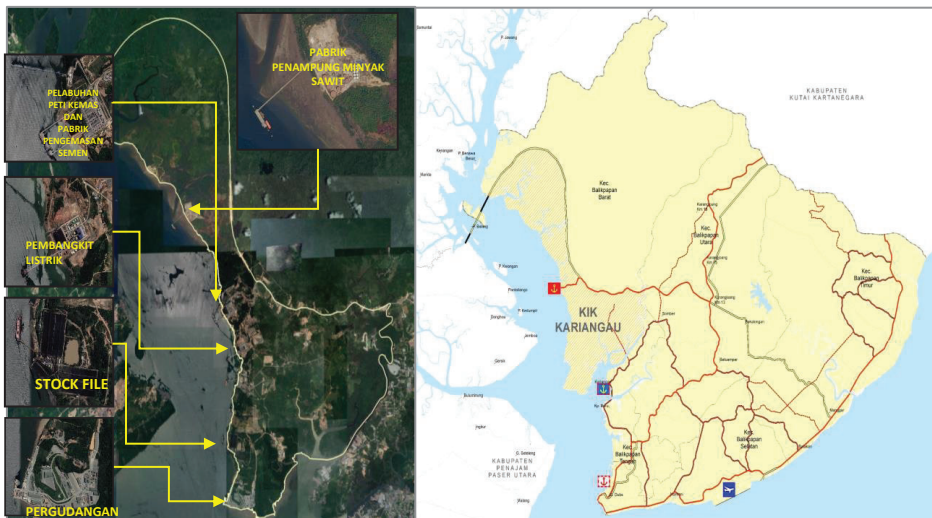
Sebagai salah satu kawasan strategis Nasional, Fokus pengembangan wilayah Kota Balikpapan di tahun 2021 adalah:

- a. Penguatan peran Kota Balikpapan sebagai hinterland/sub pusat pelayanan bagi kawasan IKN, melalui :
 - Peningkatan dan pengembangan kapasitas Pelabuhan Internasional Peti Kemas Kariangau, yang difokuskan pada optimalisasi Pelabuhan Kariangau sebagai

outlet maupun inlet pemasaran produk-produk perdagangan dari dan menuju Kalimantan Timur maupun IKN.

- Percepatan pembangunan jalan akses Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kawasan Industri Kariangau dan Kawasan Industri Buluminung di Penajam.
 - Peningkatan cakupan layanan air minum melalui peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan air limbah.
- b. Pengamanan Kota Balikpapan dari bencana banjir, melalui kerjasama dengan Provinsi dalam hal pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan perbaikan sistem drainase kota.
- c. Peningkatan kapasitas SDM melalui penguatan pendidikan-pendidikan vokasi dan balai latihan kerja.

Fokus pengembangan wilayah Kota Balikpapan tersebut diharapkan kedepannya dapat memicu transformasi ekonomi Kalimantan Timur, dan meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM dengan ketersediaan tenaga kerja memiliki kompetensi sesuai standar pasar kerja.



Sumber : Bappeda Kaltim

Gambar 5.2.
Pengembangan Kawasan Industri Kariangau di Balikpapan

5.2.3 . Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kota Bontang

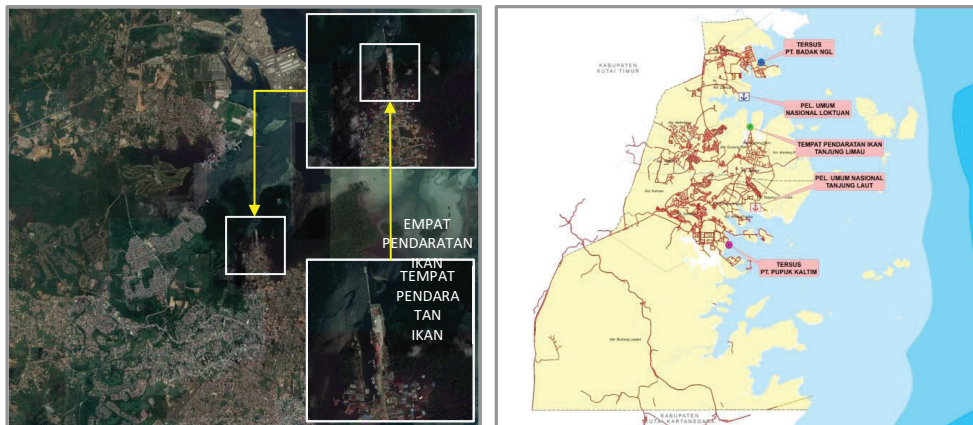
Di Kota Bontang terdapat Kawasan Industri Nasional yaitu PT. Pupuk Kaltim dan PT. Badak NGL, dan akan dikembangkan kawasan industri lainnya berbasis migas dan kondensat. Pemerintah provinsi telah mendukung kebijakan dimaksud

melalui fasilitasi proses peninjauan kembali RTRW Kota Bontang untuk mengakomodir pengembangan kawasan industri dimaksud. Selain itu, pemerintah provinsi juga telah mendorong pembangunan kilang minyak Bontang untuk menjadi *major project* dalam RKP Tahun 2021. Disamping itu, Kota Bontang juga memiliki potensi perikanan yang cukup besar yang perlu dikembangkan sebagai salah satu pemicu transformasi ekonomi di Kalimantan Timur.

Sebagai salah satu kawasan industri potensial Nasional, Fokus pengembangan wilayah Kota Bontang di tahun 2021 adalah:

- a. Peningkatan produktifitas budidaya perikanan di Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan, melalui pengembangan kawasan budidaya perikanan dengan komoditi ikan yang bernilai ekonomi tinggi.
- b. Peningkatan nilai tambah perikanan, melalui pengembangan industri pengolahan hasil perikanan.
- c. Peningkatan kapasitas SDM untuk industri melalui penguatan pendidikan dan pelatihan di balai latihan kerja (BLKI Bontang).
- d. Pengamanan Kota Bontang dari bencana banjir, melalui peningkatan kerjasama pengendalian bencana alam banjir antara lain ; kerjasama dengan Provinsi dan Kabupaten sekitarnya dalam hal pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan perbaikan sistem drainase kota; kerjasama dengan perusahaan Pertambangan dan kabupaten sekitarnya dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang di hulu DAS serta Rehabilitasi DAS dan Lahan Kritis.

Fokus pengembangan wilayah Kota Bontang tersebut diharapkan kedepannya dapat mendorong peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah, dan meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM yang memenuhi standar kebutuhan industri.



Sumber : Bappeda Prov. Kalimantan Timur, 2020

Gambar 5.3.
Kawasan Peruntukkan Perikanan di Kota Bontang

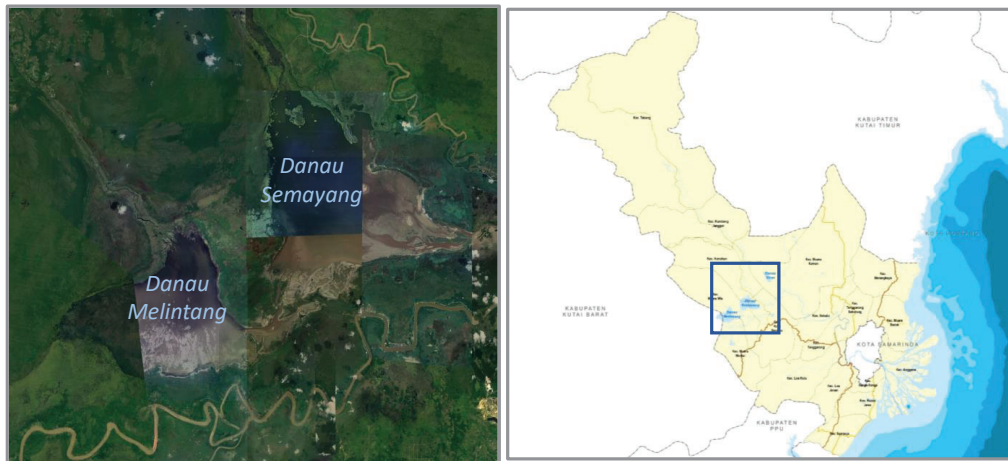
5.2.4. Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Kutai Kartanegara

Sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara telah dicanangkan menjadi kawasan Ibu Kota Negara yang baru. Hal tersebut menempatkan posisi strategis Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah yang langsung berbatasan dengan IKN. Posisi ini memberikan peluang besar bagi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengembangan ekonomi daerahnya. Disamping itu, sesuai dengan Kebijakan RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan sebagai daerah pengembangan kawasan industri pertanian dan pariwisata, yaitu pengembangan produktifitas perikanan, pertanian tanaman pangan, dan industri pariwisata.

Untuk mendukung kebijakan Nasional dan Provinsi tersebut, fokus utama pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 adalah :

- a. Penguatan peran Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai sub pusat pelayanan bagi kawasan IKN, melalui :
 - Pengembangan 2 (dua) danau, yaitu Danau Melintang dan Danau Semayang melalui pengembangan budidaya ikan lokal yang bernilai ekonomi tinggi dan penguatan daya saing produk perikanan.
 - Pengendalian pemanfaatan ruang disekitar kawasan 3 (tiga) danau baik pemanfaatan sektor pertambangan, perkebunan, maupun kehutanan.

- b. Peningkatan layanan listrik ke desa melalui program diversifikasi dan konservasi energi.
- c. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan untuk pengembangan pemanfaatan hasil hutan non kayu.
- d. Pengembangan Kawasan perkebunan karet pada lahan yang terdegradasi



Sumber : Bappeda Prov. Kalimantan Timur, 2020

Gambar 5.4.
Kawasan 3 Danau

Fokus pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah, dan meningkatkan peran Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah penyangga (*Hinterland*) IKN.

5.2.5. Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi yang sangat besar di sector pertanian, kehutanan dan pertambangan. Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) yang merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang berada di kabupaten ini, diarahkan untuk pengembangan industri oleo chemical. RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 memprioritaskan peningkatan pelayanan infrastruktur di Kawasan Industri Maloy.

Untuk mendukung kebijakan Nasional dan Provinsi tersebut, fokus utama pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 adalah :

- a. Mendorong percepatan beroperasinya KEK MBTK sebagai pusat Outlet produksi CPO yang bersumber dari PKS di sekitar KEK MBTK, melalui pembangunan jaringan transportasi dari lokasi PKS menuju KEK MBTK serta membangun sarana dan prasarana pendukung pada lokasi KEK. Diharapkan di tahun 2021 terdapat (minimal) 2 (dua) perusahaan dapat beroperasi di KEK MBTK.
- b. Peningkatan nilai tambah dan pengembangan pasar komoditi unggulan
- c. Pengembangan kawasan hutan yang dikelola masyarakat dengan target terbentuknya kelompok usaha perhutanan sosial yang berlokasi di Kecamatan Karangan Desa Batu Lepoq dan Kecamatan Batu Ampar Desa Batu Timbau.
- d. Peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan kawasan sentra pisang kepok grecek yang berlokasi di Kecamatan Kaliorang, Kaubun, Bengalon, dan Sangkulirang seluas 100 hektar.



Sumber : Bappeda Prov. Kalimantan Timur, 2020

Gambar 5.5.
Lokus Pengembangan KEK Maloy Batuta Trans

Fokus pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta menumbuhkan industri pengolahan hasil pertanian di daerah.

5.2.6. Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Kutai Barat

Kabupaten Kutai Barat memiliki potensi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan air tawar, dan kehutanan yang belum dikembangkan secara optimal. Pembangunan pertanian di Kutai Barat menghadapi kendala keterbatasan infrastruktur jalan guna menjamin konektivitas antara sentra-sentra produksi pertanian dengan pusat pemasaran hasil pertanian.

Untuk mendukung Prioritas Provinsi, fokus utama pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 adalah :

- a. Peningkatan produktivitas perkebunan terutama produksi karet
- b. Pengembangan perikanan air tawar melalui pengembangan budidaya ikan lokal yang bernilai ekonomi tinggi dan penguatan daya saing produk perikanan di Danau Jempang, Kecamatan Long Iram, Mok Manoor Bulant dan Penyinggahan.
- c. Pengembangan 1 (satu) unit miniranch percontohan seluas 500 hektar di Kecamatan Siluq Ngurai.
- d. Pengembangan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat melalui mekanisme perhutanan sosial di Kecamatan Barong Tongkok.
- e. Peningkatan konektivitas antara sentra-sentra produksi pertanian dengan pusat pemasaran hasil pertanian, melalui pembangunan jalan baru menghubungkan Kutai Barat dengan Penajam dan IKN, serta peningkatan sistem transportasi sungai.



Sumber : Bappeda Prov. Kalimantan Timur, 2019

Gambar 5.6.

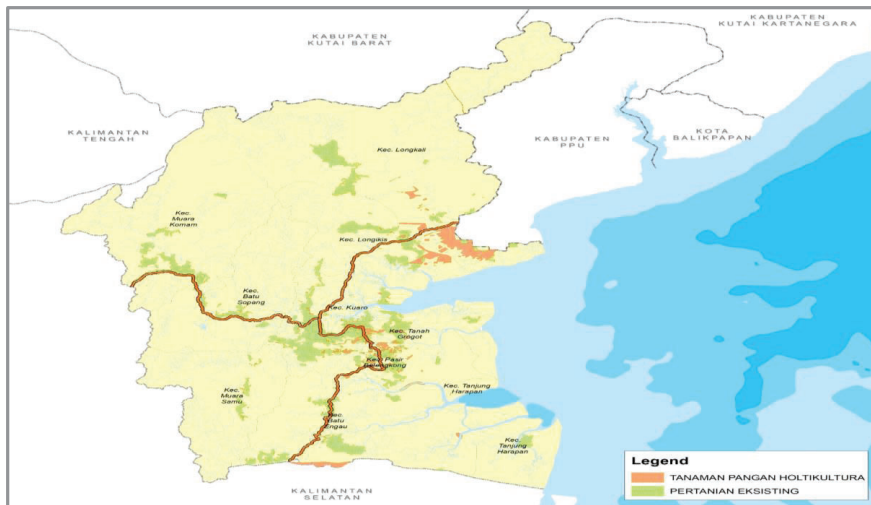
Areal Pengembangan Kawasan Perkebunan Karet di Kutai Barat

Fokus pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian bagi perekonomian daerah dan mampu memenuhi kebutuhan pangan daerah.

5.2.7. Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Paser

Kabupaten Paser memiliki lahan potensial pertanian yang cukup luas dan merupakan salah satu lumbung pangan di provinsi Kalimantan Timur, baik perkebunan, pertanian pangan, perikanan, peternakan, maupun hasil hutan non kayu. Sesuai RTRWP Kaltim 2016-2036 dan RPJMD Kaltim 2029-2023, pengembangan wilayah Kabupaten Paser diarahkan sebagai kawasan industri

pertanian melalui strategi peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan, peningkatan nilai tambah dan pengembangan pasar komoditi unggulan, peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan sentra produksi, serta pengembangan kawasan peternakan.



Sumber : Bappeda Prov. Kaltim

Gambar 5.7.
Areal Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Paser

Untuk mendukung Prioritas Provinsi, fokus utama pengembangan wilayah Kabupaten Paser tahun 2021 adalah :

- a. Pengembangan sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura, melalui Peningkatan produktivitas komoditas jeruk di Tanah Grogot, komoditas bawang merah di Muara Komam, komoditas buah lai di Long Kali, dan komoditas kelengkeng di Kuaro, serta komoditas padi dan cabai yang tersebar di seluruh kecamatan.
- b. Pengembangan komoditas buah kurma
- c. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian pangan berbasis korporasi petani dengan memperhatikan kesinambungan aktivitas di sektor hulu (produksi) hingga sektor hilir (pemasaran).
- d. Lanjutan pembangunan Bendungan Lambakan dan Bendung Regulator Telake. Bendungan Lambakan memiliki fungsi utama sebagai penyedia air baku untuk irigasi dengan potensi layanan hingga mencapai 20.000 Ha, penyedia listrik, dan pengendali banjir. Untuk mendukung efektivitas pemanfaatan prasarana ini, akan dibangun bendung regulator di bagian hilir. Bendung regulator ini akan mengatur suplai air dari Lambakan menuju ke lokasi layanan potensial.
- e. Peningkatkan produktivitas kelapa sawit melalui peremajaan tanaman (intensifikasi).

- f. Pengembangan kawasan peternakan yang terintegrasi dengan lahan-lahan potensial yang tersedia, yaitu pemanfaatan lahan bekas tambang maupun lahan perkebunan. Khusus peternakan sapi diupayakan melalui pengembangan *miniranch* dengan sistem pertanaman hijauan pakan ternak yang sesuai dengan kondisi daerah, dan peningkatan fasilitas *miniranch* yang memenuhi kebutuhan nutrisi dan sumber air ternak, serta tata laksana penggembalaan yang terorganisir.

Fokus pengembangan wilayah Kabupaten Paser diharapkan dapat mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian bagi perekonomian daerah dan mampu memenuhi kebutuhan pangan daerah.

5.2.8. Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Penajam Paser Utara

Kabupaten Penajam Paser Utara juga merupakan salah satu daerah potensial pertanian di Provinsi Kalimantan Timur, baik perkebunan, pertanian pangan, perikanan, peternakan, maupun hasil hutan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah dicanangkan menjadi kawasan Ibu Kota Negara yang baru. Hal tersebut menempatkan posisi strategis Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah yang langsung berbatasan dengan IKN. Posisi ini memberikan peluang besar bagi Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengembangan ekonomi daerahnya, terutama sebagai penyedia kebutuhan pangan IKN.



Sumber : Bappeda Prov. Kaltim

Gambar 5.8.
Areal Pengembangan Kawasan Industri Buluminung di Kabupaten Penajam Paser Utara

Sesuai RTRWP Kaltim 2016-2036 dan RPJMD Kaltim 2029-2023, kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara diarahkan sebagai kawasan industri pertanian melalui strategi peningkatan nilai tambah, pengembangan pasar komoditi unggulan dan pengembangan agroindustri.

Untuk mendukung Prioritas Provinsi, fokus utama pengembangan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021 adalah :

- a. Pengembangan sentra tanaman padi, cabai, dan bawang merah.
- b. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian potensial
- c. Pengembangan Kawasan Industri Buluminung sebagai kawasan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.
- d. Penyiapan tenaga kerja industri melalui peningkatan kualitas pendidikan sekolah menengah kejuruan mencapai akreditasi A.
- e. Percepatan penyelesaian jalan akses Jembatan Pulau Balang, dan pengembangan jaringan jalan akses menuju Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.

Fokus pengembangan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan dapat mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian bagi perekonomian daerah, dan meningkatkan peran Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah penyangga (*Hinterland*) IKN.

5.2.9. Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Berau

Kabupaten Berau disamping sebagai daerah lumbung pangan Kalimantan Timur, juga merupakan daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Wisata Nasional. Kabupaten Berau juga merupakan salah satu daerah potensial pertanian di Provinsi Kalimantan Timur, baik perkebunan, pertanian pangan, perikanan, peternakan, maupun hasil hutan.

Sesuai RTRWP Kaltim 2016-2036 dan RPJMD Kaltim 2029-2023, kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Berau diarahkan sebagai kawasan pengembangan industri pariwisata dan kawasan sentra produksi pangan. Untuk mendukung Prioritas Provinsi, fokus utama pengembangan wilayah Kabupaten Berau tahun 2021 adalah :

- a. Pengembangan pariwisata Kepulauan Derawan dan sekitarnya sebagai kawasan wisata dunia.
- b. Peningkatan layanan infrastruktur di kawasan sentra produksi, yaitu Penanganan jalan Tanjung Redeb menuju Talisayan sepanjang 154 km, untuk memperlancar pergerakan arus barang/jasa sentra produksi pertanian, perkebunan, dan

perikanan di wilayah timur Kabupaten Berau menuju ke pusat pemasaran. Selain itu, jalan ini juga menjadi jalur utama penunjang aksesibilitas destinasi wisata unggulan yang ada di Kabupaten Berau, seperti Labuan Cermin, Teluk Sulaiman, dan Teluk Sumbang.



Sumber : Bappeda Prov. Kalimantan Timur, 2020

Gambar 5.9.

Pengembangan Kawasan Pariwisata di Maratua, Derawan dan Sekitarnya di Kabupaten Berau

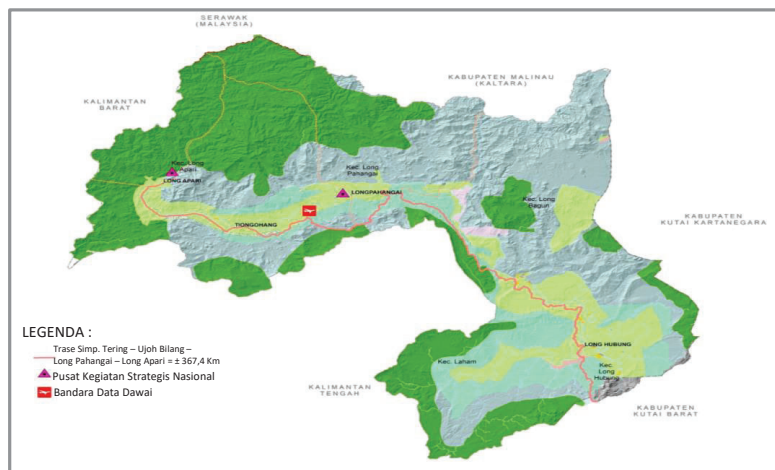
5.2.10. Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Mahakam Ulu

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan kabupaten yang berada di perbatasan negara dan memiliki potensi lahan yang belum dikelola secara optimal. Pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu masih menghadapi kendala keterbatasan infrastruktur jalan, energi dan telekomunikasi. Pengembangan berbagai sektor potensial di Kabupaten Mahakam Ulu belum dapat optimal jika aksesibilitas transportasi belum tersedia dengan memadai. Akses darat menuju Ujoh Bilang (ibukota kabupaten) hanya dapat ditempuh dari Kutai Barat melalui akses darat dengan medan yang sangat sulit. Oleh karena itu, fokus utama pengembangan wilayah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021 adalah Peningkatan pelayanan infrastruktur antara lain:

- a. Pembangunan Infrastruktur transportasi pada :
 - Daerah 3T dan kawasan sentra produksi ke ibukota kabupaten, yaitu jalan ruas Tering – Ujoh Bilang – Long Bagun – Long Pahangai sepanjang 53 Km, dan

jembatan bailey sebanyak 11 unit di ruas Ujoh Bilang – Long Bagun – Long Pahangai.

- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Perbatasan Negara yaitu Long Pahangai dan Long Apari. Penanganan ruas jalan perbatasan ini akan menjadi fokus penanganan seluruh tingkatan pemerintahan baik pusat, provinsi, maupun kabupaten.
- b. Pembangunan infrastruktur layanan listrik ke desa melalui pembangunan PLTS terpusat *Off-Grid* di Desa Data Naha Kecamatan Long Pahangai.



Sumber : Bappeda Prov. Kalimantan Timur, 2020

Gambar 5.10.

Peningkatan Aksesibilitas Jalan di Kawasan Perbatasan Mahakam Ulu

Pembangunan Infrastruktur transportasi dan energi listrik ini diharapkan dapat membuka aksesibilitas pergerakan orang, barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong kegiatan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu.

BAB 6

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ini berisikan program dan kegiatan prioritas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur secara sinergis.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Strategi tahunan ini diterapkan dengan harapan agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan secara optimal, maksimal, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Tema yang diusung pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2021 adalah ***“Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”***

Guna merealisasikan fokus/tema pembangunan yang telah dicanangkan, rencana pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai ultimate job dari pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan ini merupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi gubernur, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, penyusunan program dan kegiatan pembangunan ini melibatkan stakeholder yang bersangkutan karena subyek pelaksana program dan kegiatan adalah unsur-unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kepentingan di dalamnya dengan tetap melibatkan masyarakat secara aktif.

Agar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat menunjukkan capaian kinerja masing-masing prioritas daerah maka dalam setiap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memberikan arahan dalam penentuan program dan kegiatan yang tepat. Apabila capaian kinerja suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan outcome yang positif, pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi serta kajian ulang atas perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 merujuk pada program prioritas dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sehingga alur dokumen RKPD mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan RPJMD. Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2021, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam OPD provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat

dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Provinsi Kalimantan Timur. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis OPD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 akan menyajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program (outcome), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/OPD penanggungjawab program dan kegiatan prioritas. Prioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial) dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan). Kemudian, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 urusan, yaitu Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

Mengacu pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) di atas berdasarkan bidang urusan yang menjadi kewenangan OPD. Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur beserta rancangan pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2021 terlampir pada tabel 6.1:

Tabel 6.1
Program dan Kegiatan Belanja Langsung Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				3.509.943.310.241
1,01	Pendidikan				1.774.443.604.000
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				1.774.443.604.000
1.01.01.001	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				1.764.063.966.740
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		86,3	198.000.000.000
1.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Laporan)	kk, smd	12	198.000.000.000
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		6	1.700.002.740
1.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada skpd dan unit kerja internal SKPD (Unit)	kk, smd	4	500.000.000
1.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada skpd dan unit kerja internal SKPD (Unit)	smd	4	1.200.002.740
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		93	250.000.000
1.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi (Kali)	smd	50	250.000.000
1.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		82	2.000.000.000
1.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	smd	5	500.000.000
1.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun (Laporan)	smd	12	500.000.000
1.01.10.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DAK)	Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1	1.000.000.000
1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)		75	722.273.609.069
1.01.19.04	Rehabilitasi Prasarana Belajar SLB	Jumlah koordinasi dan konsultasi (Kali)	bru	0	500.000.000
1.01.19.05	Pembangunan Prasarana Belajar SLB	Jumlah koordinasi dan konsultasi (Kali)	bru	0	500.000.000
1.01.19.19	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Luar Biasa Negeri	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri (Orang)	smd	1220	19.000.000.000
1.01.19.20	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1220	1.317.000.000
1.01.19.21	Rehabilitasi Prasarana Belajar SLB (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	9	200.591.742.202
1.01.19.22	Pembangunan Prasarana Belajar SLB (DAK)	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	95	200.022.909.333

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.19.23	Pengadaan Sarana Belajar SLB (DAK)	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	95	300.341.957.534
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)		98	250.000.000
1.01.20.03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih (Orang)	smd	500	250.000.000
1.01.23	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS yang berprestasi (Orang)		19500	50.000.000.000
1.01.23.01	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa	Jumlah Penerima Beasiswa (Orang)	smd	40000	50.000.000.000
1.01.38	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang tidak putus sekolah (Siswa)		2500	42.000.000.000
1.01.38.01	Pemberian beasiswa bagi siswa miskin (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA)	Jumlah Beasiswa bagi siswa Miskin (Orang)	smd	415	34.000.000.000
1.01.38.02	Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa miskin di Perguruan Tinggi	Jumlah Mahasiswa Miskin yang Mendapatkan Beasiswa (Orang)	smd	500	8.000.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA (%)		77	412.057.309.931
1.01.39.12	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah sekolah penerima Alat Praktik Peraga Siswa (sekolah)	smd	25	1.000.000.000
1.01.39.16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	62.711.000.000
1.01.39.17	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	15	9.000.000.000
1.01.39.24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	108.339.448.000
1.01.39.25	Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	15	100.000.000.000
1.01.39.26	Pembangunan Prasarana Belajar SMA (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	15	90.308.529.115
1.01.39.27	Pengadaan Sarana Belajar SMA (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	15	25.664.500.000
1.01.39.28	Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Asrama Siswa SMA (Afirmasi) (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	15	15.033.832.816
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni SMK, MAK (%)		77	327.033.045.000
1.01.40.02	Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd	30	31.509.644.000
1.01.40.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan (Paket)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd	100	25.000.000.000
1.01.40.10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	42998	47.245.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.40.18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	42998	84.493.314.000
1.01.40.19	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	15	51.412.769.000
1.01.40.20	Pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	15	65.059.424.000
1.01.40.21	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	15	6.944.588.000
1.01.40.22	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	15	306.706.000
1.01.40.23	Rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK)	Jumlah Rehabilitasi ruang disekolah kab/kota jenjang SMA (sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	15	7.151.600.000
1.01.40.24	Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya (DAK)	Jumlah Rehabilitasi ruang disekolah kab/kota jenjang SMA (sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	15	7.910.000.000
1.01.43	Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (persen)		95	8.500.000.000
1.01.43.01	Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk belajar mengajar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	500.000.000
1.01.43.02	Pembelajaran jarak jauh	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk belajar mengajar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	5	8.000.000.000
1.01.01.235	UPTD Taman Budaya				2.790.404.674
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		86,3	1.740.745.000
1.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	100	1.740.745.000
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		6	747.159.674
1.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada skpd dan unit kerja internal SKPD (Unit)	smd	100	397.159.674
1.01.08.03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (DAK)	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Laporan)	bru	0	350.000.000
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		93	302.500.000
1.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi (Kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	100	302.500.000
1.01.01.236	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan				4.078.307.586
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		86,3	1.345.150.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Laporan)	smd	0	1.345.150.000
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		6	932.500.000
1.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada skpd dan unit kerja internal SKPD (Unit)	smd	0	760.500.000
1.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun (Laporan)	smd	0	172.000.000
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		93	579.000.000
1.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi (Kali)	smd	0	579.000.000
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	jumlah aparatur yang dilatih (Orang) Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)		0 93	656.750.000
1.01.20.09	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah laporan yang menerapkan sistem dan informasi manajemen pendidikan (Laporan)	smd	0	656.750.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni SMK, MAK (%)		95	564.907.586
1.01.40.01	Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Menengah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebaran luasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	11	564.907.586
1.01.01.237	UPTD Museum Negeri Mulawarman				2.010.925.000
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		100	1.408.925.000
1.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Laporan)	kkp	12	1.408.925.000
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		100	602.000.000
1.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi (Kali)	kkp	80	602.000.000
1.01.01.241	Dinas Pendidikan Wilayah I				250.000.000
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		95	250.000.000
1.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Laporan)	ppu, bpn	12	250.000.000
1.01.01.242	Dinas Pendidikan Wilayah II				250.000.000
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		87	250.000.000
1.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Laporan)	ktm	0	250.000.000
1.01.01.243	Dinas Pendidikan Wilayah III				250.000.000
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		95	250.000.000
1.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Laporan)	smd	0	250.000.000
1.01.01.244	Dinas Pendidikan Wilayah IV				250.000.000
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		95	250.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Laporan)	kbr, mah	0	250.000.000
1.01.01.245	Dinas Pendidikan Wilayah V				250.000.000
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		87	250.000.000
1.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Laporan)	psr	0	250.000.000
1.01.01.246	Dinas Pendidikan Wilayah VI				250.000.000
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		87	250.000.000
1.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Laporan)	bru	0	250.000.000
1.02	Kesehatan				915.167.148.844
1.02.01	Dinas Kesehatan				114.652.516.000
1.02.01.001	Dinas Kesehatan				87.795.244.000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		87	2.943.087.939
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	2.943.087.939
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	2.500.746.000
1.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana (unit)	smd	5	1.491.669.698
1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (unit)	smd	5	1.009.076.302
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		60	2.282.750.000
1.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk tamu dan rapat) (Bulan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	12	1.388.715.804
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah pertahun (Kali)		80	
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pertahun (Kali)		90	
1.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/Bintek (Orang)	bpn, smd, luarPrv	35	894.034.196
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		69	433.812.645
1.02.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	smd	10	305.484.198
1.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja (dokumen)	smd	10	128.328.447
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan Vaksin esensial di puskesmas (%)		99,5	1.976.788.406
1.02.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan obat , vaksin dan perbekalan kesehatan (buffer stok) (%)	smd	100	1.707.839.406
1.02.15.02	Pemenuhan Sarana/Prasarana Instalasi Farmasi Provinsi (DAK)	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan (Jenis)	smd	150	268.949.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) (%)		70	7.897.747.360
1.02.16.05	Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah kab/kota yang dibina untuk perbaikan gizi (kab/kota)	kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	1.047.140.000
1.02.16.07	Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Jumlah fasyankes yang difasilitasi dan dilakukan kegiatan pemeliharaan alkes (RMC) (fasyankes)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	119	1.046.500.000
		Jumlah sarana produksi dan distribusi yg mendapatkan izin alat kesehatan (sarana)		19	
		Jumlah Fasyankes yang dibina untuk mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (fasyankes)		160	
		Jumlah sarana produksi dan distribusi yg mendapatkan izin Kefarmasian (sarana)		23	
1.02.16.09	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kab/kota yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring evaluasi dalam melaksanakan SPM (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	972.859.600
		Jumlah masyarakat yang diperiksa kebugarannya (orang)		3150	
1.02.16.14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Persentase pembinaan Kab/Kota memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	60	600.000.000
1.02.16.15	Pembinaan upaya kesehatan masyarakat sekunder dan primer (DAK)	Jumlah Kab/Kota yang dikonfirmasi kasus gizi buruk (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, ppu, bpn, btg, smd	10	538.672.000
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan AMP (kab/kota)		10	
1.02.16.16	Rakontek terpadu tingkat kabupaten dan kota (DAK)	Jumlah Kab/Kota yang dikonfirmasi kasus gizi buruk (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	549.954.760
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan AMP (kab/kota)		10	
1.02.16.17	Pengelolaan Satker (DAK)	Jumlah Kab/Kota yang dikonfirmasi kasus gizi buruk (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	152.558.000
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan AMP (kab/ko6ta)		10	
1.02.16.18	Penurunan Stunting (DAK)	Jumlah Kab/Kota yang didistribusikan PMT sesuai sasaran (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	2	2.990.063.000
		Jumlah Kab/Kota yang dikonfirmasi kasus gizi buruk (Kab/Kota)		10	
1.02.17	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan (%)		92	56.306.351.052
1.02.17.01	Kemitraan Bagi Pasien Kurang Mampu, Non BPJS	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan program JKN menuju UHC (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	56.306.351.052
		Jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang memperoleh jaminan pelayanan kesehatan (orang)		132000	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase Kab/Kota yang melaksanakan min. 5 tema kampanye GERMAS (%)		80	1.390.115.000
1.02.19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah kegiatan penguatan OPD/Lintas Sektor yang mengimplementasikan kebijakan publik berwawasan kesehatan (Kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	9	480.000.000
		Jumlah penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai saluran komunikasi pertahun (Kali)		5	
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan penilaian (posyandu dan PHBS) dalam setahun (Kab/Kota)		10	
		Jumlah Rumah Sakit di Kalimantan Timur yang dilakukan pembinaan PKRS (Rumah Sakit)		20	
1.02.19.03	Kampanye sosialisasi, advokasi perilaku hidup sehat di tingkat provinsi dan pemberdayaan masyarakat (DAK)	Jumlah kab/ kota yang melaksanakan min 5 tema kampanye GERMAS hidup sehat (Kab/kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	8	910.115.000
		Jumlah kegiatan penguatan OPD/Lintas Sektor yang mengimplementasikan kebijakan publik berwawasan kesehatan (Kali)		9	
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah Kab/Kota yang berhasil menurunkan kejadian penyakit menular (Kab/Kota)		7	3.535.000.000
1.02.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2TB untuk mencapai CDR>=70% dan SR=>90% (kab/kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	6	2.000.000.000
		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2HIV untuk mencapai presentase ODHA yang mendapatkan ARV => 55% (Kab/Kota)		4	
		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malaria untuk mencapai persentase pengobatan Malaria Positif sesuai standart =>95% (Kab/Kota)		8	
		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD (Kab/ Kota)		7	
1.02.22.09	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam pencapaian IDL (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	9	1.500.000.000
		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam pencapaian persentase respon kewaspadaan kejadian luar biasa (Kab/Kota)		10	
		Jumlah Kab/Kota yang melakukan sosialisasi dan membuat rencana kontijensi wabah/bencana (Kab/Kota)		2	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.02.22.10	Rujukan Spesimen (DAK)	Jumlah Kab/Kota yang memiliki desa/keurahan yang cakupan IDL tercapai target (desa UCI) (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	6	35.000.000
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi utama (%)		64	5.642.233.794
1.02.23.07	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi (puskesmas)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	119	1.936.498.794
1.02.23.08	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Kab/kota yang memiliki Fasyankes telah mempersiapkan pelayanan telemedicine (kab/kota)	bru, kbr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2	1.936.485.000
		Persentase kejadian bencana yang ditangani (%)		100	
		Persentase KLB yang ditangani (%)		100	
		Jumlah RSUD yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan akreditasi SNARS edisi I (RSUD)		11	
1.02.23.11	Peningkatan pelayanan kesehatan Pengembangan	Jumlah kab kota yang telah melakukan pembinaan penyehat tradisional (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	8	1.418.400.000
1.02.23.12	Penguatan program Indonesia sehat melalui pendekatan Keluarga (DAK)	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan AMP (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	350.850.000
		Jumlah Kab/Kota yang dikonfirmasi kasus gizi buruk (Kab/Kota)		10	
		Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program JKN menuju UHC (kab/kota)		10	
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya (Fasyankes)		80	1.570.581.793
1.02.56.01	Pendidikan teknis kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan (orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	690	243.521.553
1.02.56.03	Pengembangan/fasilitasi SDM, Prasarana dan teknologi kesehatan (DAK)	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	275	788.350.240
1.02.56.04	Standarisasi Tenaga Kesehatan di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas daerah DTPK/3T, sangat terencil dan terencil yang difasilitasi memiliki tenaga kesehatan sesuai standar (puskesmas)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	30	538.710.000
1.02.59	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah Kab/Kota yang berhasil menurunkan kejadian penyakit tidak menular (Kab/Kota)		7	1.316.030.011
1.02.59.01	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah PD provinsi yang dilakukan pembinaan deteksi dini faktor resiko PTM dan implementasi KTR (OPD)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	9	1.316.030.011
		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan implementasi KTR minimal di 50% sekolah (%)		70	
		Jumlah Kab/Kota yang mempunyai min 50% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu PTM (kasus Hipertensi & DM) (Kab/Kota)		5	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah Kab/Kota yang min 50% Puskesmasnya melaksanakan deteksi dini kanker payudara pada perempuan usia 30-50 tahun (Kab/Kota)		7	
1.02.01.002	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)				5.500.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase terpenuhinya layanan BLUD sesuai standar (%)		100	5.500.000.000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD (Bulan)	smd	12	5.500.000.000
1.02.01.003	UPTD Balai Latihan Kesehatan				3.192.875.000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		75	1.759.667.792
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	1.759.667.792
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	964.529.325
1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (unit)	smd	1	964.529.325
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah (%)		0	168.677.883
		Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		100	
1.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan kedalam daerah (Kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	25	168.677.883
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Kali)		15	
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk tamu dan rapat) (Bulan)		12	
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya (Fasyankes)		80	300.000.000
1.02.56.01	Pendidikan teknis kesehatan	Jumlah tenaga yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan (orang)	smd	300	300.000.000
1.02.01.004	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim				3.359.980.000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	2.359.980.000
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	2.359.980.000
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	500.000.000
1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (unit)	smd	1	500.000.000
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		75	500.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah unit yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (unit)	smd	1	500.000.000
1.02.01.005	UPTD Laboratorium Kesehatan				1.266.526.000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		75	1.053.231.879
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	1.053.231.879
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	187.462.121
1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (unit)	smd	1	187.462.121
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		75	25.832.000
1.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan kedalam daerah (Kali)	bpn, smd, luarPrv	5	25.832.000
1.02.01.006	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim (BLUD)				4.000.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (%)		100	4.000.000.000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD (Bulan)	bpn, smd, luarPrv	12	4.000.000.000
1.02.01.007	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI				6.537.891.000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		75	5.543.465.000
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kualitas layanan administrasi RS (%)	smd	100	5.543.465.000
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	365.393.000
1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Alat kesehatan, alat kantor dan gedung terpelihara (Tahun)	smd	1	365.393.000
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		85	629.033.000
1.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur (%)	smd	100	629.033.000
1.02.01.008	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI (BLUD)				3.000.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (%)		80	3.000.000.000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD (Bulan)	bpn, smd, luarPrv	12	3.000.000.000
1.02.02	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda				550.876.649.000
1.02.02.001	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda				876.649.000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		84	763.311.871
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kualitas layanan administrasi RS (%)	smd	84	763.311.871
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		71	113.337.129

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.02.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah laporan SAKIP (Laporan)	smd	1	113.337.129
1.02.02.002	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda (BLUD)				550.000.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jenis pelayanan sesuai standar rumah sakit kelas A (%)		100	550.000.000.000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah pelayanan dan pendukung pelayanan yang diadakan (Jenis belanja BLUD)	smd	3	550.000.000.000
1.02.03	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan				220.507.685.000
1.02.03.001	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan				507.685.000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		79,3	466.663.000
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	bpn	12	466.663.000
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		73	41.022.000
1.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan capaian kinerja (Laporan)	bpn	4	41.022.000
1.02.03.002	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)				220.000.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jenis Pelayanan Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas B (Instalasi / unit)		19	220.000.000.000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah Kunjungan Pasien (Orang)	bpn	187332	220.000.000.000
1.02.04	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam				29.130.298.844
1.02.04.001	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam				11.480.298.844
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (Nilai)		80	11.347.765.000
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran (Jenis)	smd	17	11.347.765.000
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		8	85.493.000
1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Yang Dipelihara (Unit)	smd	15	85.493.000
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		75	47.040.844
1.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Tim/Kegiatan)	smd	10	47.040.844
1.02.04.002	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)				17.650.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat (%)		95	17.650.000.000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (Jenis)	smd	0	17.650.000.000
		Jumlah Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (Bulan)		12	
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				725.995.101.397

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat				725.995.101.397
1.03.01.001	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat				592.873.123.004
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		87	15.660.913.630
1.03.04.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	15.660.913.630
		Meningkatnya Kinerja Aparatur (%)		100	
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		7	2.851.192.476
1.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	smd	14	1.851.192.476
1.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya Kinerja Aparatur (%)	smd	0	1.000.000.000
		Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)		12	
		Luas Bangunan yang di Rehabilitasi (m2)		100	
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		65	1.656.813.583
1.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	0	1.000.000.000
		Jumlah pelaksanaan koordinasi luar dan dalam daerah (Bulan)		12	
1.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv		656.813.583
		Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang)		40	
1.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		80	244.203.315
1.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	smd	4	177.018.400
1.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5	67.184.915
1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tingkat kematapan jalan provinsi (%)		63,46	350.000.000.000
1.03.15.01	Perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah Laporan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan (Dokumen)	smd	46	17.500.000.000
1.03.15.02	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (Km)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, smd	70,99	302.500.000.000
1.03.15.03	Pembangunan Jembatan, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah jembatan yang dibangun (Jembatan Bailey)	kk, ktm, mah	9	30.000.000.000
		Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang dibangun (Titik)		3	
		Panjang saluran drainase yang dibangun (Meter)		6000	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.03.16	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kapasitas Air Baku (L/detik)		8622	100.000.000.000
1.03.16.01	Pembangunan Prasarana Air Baku, Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai	Panjang Bangunan Pengaman Pantai (Kilometer)	kk, ktm, bpn, btg, smd	1,82	81.290.000.000
		Jumlah lokasi banjir yang ditangani (lokasi)		13	
		Jumlah sarana dan prasarana air baku yang dibangun (Unit)		2	
1.03.16.02	Pembangunan Jaringan Irigasi	Panjang jaringan irigasi yang dibangun (Kilometer)	kk	11,25	8.000.000.000
		Jumlah bendung yang dibangun (unit)			
1.03.16.03	Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah Prasarana SDA yang direncanakan (Unit)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	25	10.710.000.000
		Jumlah Peraturan Gubernur yang Ditetapkan (Pergub)		0	
		Jumlah Pembangunan Prasarana SDA yang Diawasi (Unit)		25	
1.03.17	Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan	Cakupan layanan Air Minum Perpipaan (%)		67,23	110.000.000.000
1.03.17.01	Pembangunan dan Rehabilitasi gedung	Jumlah Gedung yang dibangun/direhabilitasi (Bangunan Gedung)	bpn, smd, luarPrv	10	48.500.000.000
1.03.17.02	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	Jumlah SPAM (unit) (Unit)	ktm, bpn, btg, smd	4	50.000.000.000
		Jumlah IPAL yang dibangun (Unit) (Unit)		0	
		Jumlah IPLT yang dibangun (Unit) (Unit)		0	
		Jumlah TPA yang dibangun (Unit) (Unit)		1	
1.03.17.03	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan	Jumlah Dokumen perencanaan Gedung yang disusun (Dokumen)	ktm, bpn, btg, smd, luarPrv	5	11.500.000.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan SPAM, IPAL, IPLT dan TPA yang disusun (Dokumen)		4	
		Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Infrastruktur yang disusun (Dokumen)		5	
1.03.18	Program Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat (Orang)		27846	4.500.000.000
1.03.18.01	Penyelenggaraan Pengaturan Jasa Konstruksi	Jumlah Raperda Jasa Konstruksi (Dokumen)	smd	1	1.000.000.000
		Jumlah Peraturan/Pedoman Jasa Konstruksi (Dokumen)		1	
		Jumlah Peserta Sosialisasi dan Koordinasi Jasa Konstruksi (Orang)		850	
1.03.18.02	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd	1200	2.750.000.000
		Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi (Laporan)		1	
		Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Mengikuti Bimbingan Teknis (Orang)		600	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Mengikuti Seminar / Sosialisasi (Orang)		400	
		Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Mengikuti Kompetensi Manajemen Proyek (Orang)		30	
1.03.18.03	Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah Kegiatan Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Paket)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	65	750.000.000
		Jumlah Kegiatan Pengawasan tertib Usaha Jasa Konstruksi (Lokasi)		40	
		jumlah kegiatan pengawasan tertib pemanfaatan dan kinerja (%)		0	
1.03.70	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Proporsitas Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota (%)		77,19	7.960.000.000
1.03.70.01	Perencanaan Penataan Ruang	Proporsitas Jumlah RRTR KSP yang mendapat Persetujuan Substansi (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	13	5.260.000.000
1.03.70.02	Pemanfaatan Ruang & Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1	1.200.000.000
		Layanan Informasi SIMTARU (Website)		1	
1.03.70.03	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah lokasi pada Kabupaten/Kota yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang (Lokasi)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	150	1.500.000.000
		Operasionalisasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Kegiatan)		1	
1.03.01.002	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I				46.100.000.000
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		87	2.600.000.000
1.03.04.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	bpn	12	2.600.000.000
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	2.600.000.000
1.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	psr, ppu, bpn	1	1.000.000.000
1.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	psr, ppu, bpn	12	1.600.000.000
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		65	800.000.000
1.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Kegiatan)	psr, ppu, bpn	175	600.000.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah (Kegiatan)		70	
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu (Bulan)		12	
1.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan / Bimtek (Orang)	psr, ppu, bpn	18	200.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.03.19	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik di wilayah I (%)		63	40.100.000.000
1.03.19.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I	Terlaksananya Pemeliharaan Fungsional Jalan (KM)	psr, ppu, bpn	214	30.100.000.000
1.03.19.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana & prasarana SDA & CK Wilayah I	Daerah irigasi yang terpelihara (Ha)	psr, ppu, bpn	40	10.000.000.000
		Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terpelihara (Ha)		40	
1.03.01.003	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II				50.920.000.000
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		87	2.600.000.000
1.03.04.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	2.600.000.000
		Meningkatnya Kinerja Aparatur (%)		100	
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	2.600.000.000
1.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya Kinerja Aparatur (%)	kbr, kkr, mah, smd	100	1.000.000.000
		Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)		53	
1.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya Kinerja Aparatur (%)	kbr, kkr, mah, smd	100	1.600.000.000
		Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)		12	
		Luas Bangunan yang di Rehabilitasi (m2)		1245	
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		65	800.000.000
1.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Kegiatan)	kbr, kkr, mah, smd	30	600.000.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah (Kegiatan)		175	
		Jumlah porsi penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu (Porsi)		800	
1.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi dan kursus-kursus singkat (Orang)	kbr, kkr, mah, smd	60	200.000.000
1.03.20	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik di wilayah II (%)		63	44.920.000.000
1.03.20.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II	Terlaksananya Pemeliharaan Fungsional Jalan (KM)	kbr, kkr, mah, smd	10	34.920.000.000
		Jumlah Jembatan yang dipelihara efektif (Buah)		10	
1.03.20.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana & prasarana SDA & CK Wilayah II	Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terpelihara (Ha)	kbr, kkr, mah, smd	55	10.000.000.000
		Jumlah bangunan pengendali banjir yang dipelihara efektif (Lokasi)		10	
1.03.01.004	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III				34.590.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		87	2.600.000.000
1.03.04.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	ktm	12	2.600.000.000
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	2.600.000.000
1.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	bru, ktm, btg	10	1.000.000.000
1.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bru, ktm, btg	12	1.600.000.000
		Luas bangunan yang dipelihara (M2)		2339	
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		65	800.000.000
1.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Kegiatan)	bru, ktm, btg	25	600.000.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah (Kegiatan)		120	
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu (Bulan)		10	
1.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan / Bimtek (Orang)	bru, ktm, btg	10	200.000.000
1.03.21	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik di wilayah III (%)		63	28.590.000.000
1.03.21.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III	Panjang jalan yang dipelihara Fungsional UPTD Wilayah III (KM)	bru, ktm, btg	405	21.090.000.000
		Jumlah jembatan yang dipelihara efektif (Buah)		20	
1.03.21.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana & prasarana SDA & CK Wilayah III	Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terpelihara (Ha)	bru, ktm, btg	13597	7.500.000.000
1.03.01.005	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi				1.511.978.393
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		87	700.000.000
1.03.04.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	12	700.000.000
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	200.000.000
1.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	smd	3	100.000.000
1.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	100.000.000
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		65	150.000.000
1.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur (%)	smd	160000000	100.000.000
1.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur (%)	smd	400000000	50.000.000
1.03.22	Program Penyelenggaraan Laboratorium Konstruksi	Tingkat Pemenuhan Standarisasi Mutu Konstruksi (%)		100	461.978.393

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.03.22.01	Pelayanan Pengujian Mutu Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Konstruksi (Dokumen)	smd	5	311.978.393
		Jumlah Dokumen Monitoring Mutu Konstruksi (Dokumen)		4	
1.03.22.02	Penerapan Strandardisasi Konstruksi	Jumlah Dokumen Kaji Ulang Laboratorium (Dokumen)	smd	4	150.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Audit Laboratorium (Dokumen)		2	
1,04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				43.000.000.000
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat				43.000.000.000
1.03.01.001	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat				43.000.000.000
1.04.15	Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah rumah tidak layak huni (unit)		36722	43.000.000.000
1.04.15.01	Pembangunan Rumah Layak & Prasarana Sarana dan Utilitas	Jumlah perumahan yang mendapat bantuan PSU (unit) (Unit)	kk, pp, bpn, btg, smd	8	26.250.000.000
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (unit)		600	
1.04.15.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh	Luas kawasan kumuh yang ditangani (ha)	bpn, btg, smd	11	12.750.000.000
1.04.15.03	Perencanaan & pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan kumuh	Jumlah dokumen perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang disusun (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, pp, bpn, btg, smd	33	4.000.000.000
		Jumlah dokumen pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang disusun (Dokumen)		39	
1,05	Ketramtaman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				21.843.423.000
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja				8.068.192.000
1.05.01.001	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)				8.068.192.000
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	4.718.210.112
1.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	smd	12	4.718.210.112
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		4	828.022.623
1.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (bulan)	smd	12	561.682.551
1.05.08.03	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (unit)	smd	45	266.340.072
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	1.259.526.528
1.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, pp, bpn, btg, smd, luarPrv	28	687.496.528
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (kegiatan)		60	
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (bulan)		12	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (kegiatan)	bpn, smd, luarPrv	10	572.030.000
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		79	100.803.737
1.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (dokumen)	bpn, smd, luarPrv	4	72.754.565
1.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (dokumen)	bpn, smd, luarPrv	23	28.049.172
1.05.60	Program Penegakkan Produk Hukum Daerah	Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (%)			250.540.000
1.05.60.02	Pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan produk Hukum daerah	Koordinasi pelaksanaan dan kerjasama pembinaan Perda dan Perkada (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	5	122.800.000
		Koordinasi pelaksanaan dan kerjasama pengawasan Perda dan Perkada (dokumen)		5	
		Penyuluhan Pelanggaran Perda dan perkada (dokumen)		10	
1.05.60.04	Penyelenggaran Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Fasilitasi PPNS se Kaltim (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	5	127.740.000
		Rapat Koordinasi teknis PPNS (dokumen)		2	
		Deteksi Dini pelanggaran perda dan perkada se kaltim (dokumen)		10	
		Pendampingan dan pelaksanaan penegakan perda provinsi kabupaten Kota se Kaltim (dokumen)		10	
1.05.63	Program Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketertiban masyarakat	Persentase pengamanan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat serta Penyelenggaraan Penjagaan Pengawasan dan Patroli (%)		86	329.020.000
1.05.63.01	Peningkatan Pelaksanaan Operasional dan Pengendalian	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (kegiatan)	kk, smd	279	138.975.000
1.05.63.02	Peningkatan Pengamanan dan Pengawasan Protokol	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengamanan protokol (kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	93	190.045.000
1.05.64	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	kapasitas satlinmas daerah (persen)		86	377.609.000
1.05.64.01	Pelaksanaan Bina Potensi masyarakat	pendataan satlinmas Se Kaltim (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	184.540.000
		Bimtek Satlinmas Se Kaltim (dokumen)		2	
		FGD Kelembagaan Satlinmas (dokumen)		1	
1.05.64.02	Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat	FGD Kelembagaan Satlinmas (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	0	193.069.000
		Perbantuan penanganan bencana musibah di daerah (dokumen)		10	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Monitoring Operasional Satlinmas dalam rangka pilpres, pileg, dan pilkada serentak (dokumen)		0	
		Apel Siaga Satlinmas dalam rangka pilpres, pileg, dan pilkada serentak (dokumen)		0	
1.05.65	Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase masyarakat tanggap darurat bencana kebakaran (%)		80	204.460.000
1.05.65.01	Pencegahan dan Pengendalian Bidang Kebakaran	Kordinasi dan fasilitasi pencegahan kebakaran se Kaltim (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	101.100.000
		Pelaksanaan, pengendalian dan Pencegahan kebakaran (dokumen)		24	
		Pemetaan daerah rawan kebakaran dan pendataan sistem proteksi kebakaran se kaltim (dokumen)		10	
1.05.65.02	Pelatihan dan pembinaan bidang kebakaran	Pelatihan petugas pemadam kebakaran se kaltim (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2	103.360.000
		Pembinaan Petugas Pemadam Kebakaran dan masyarakat se kaltim (dokumen)		4	
1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				6.995.152.000
1.05.02.001	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				6.995.152.000
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		61	896.586.847
1.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Anggaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	896.586.847
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		5	450.957.577
1.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	100.657.577
1.05.08.03	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Peralatan dan Kelengkapan ASN Kesbangpol Prov. Kaltim (%)	smd	50	350.300.000
		Tersedianya Peralatan dan Kelengkapan ASN Kesbangpol Prov. Kaltim (Unit)		4	
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		60	640.102.628
1.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (Kali)	smd	35	640.102.628
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kali)		35	
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		60	303.588.017
1.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen Perencanaan Anggaran (Dokumen)	smd	4	162.564.233
1.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen Laporan (Dokumen)	smd	6	141.023.784
1.05.15	Program Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Lingkungan	Penurunan jumlah konflik sosial di Kalimantan Timur (Konflik)		102	835.769.431

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.05.15.01	Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya Penilaian dan Pemberian Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Kondusifitas Daerah (Orang)	smd	20	297.470.000
		Jumlah Rakor dan Peserta Rakor FKDM (Orang)		300	
1.05.15.05	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Peserta Revitalisasi (Orang)	smd		208.497.250
		Terlaksananya Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Rencana Aksi)		25	
1.05.15.29	Sosialisasi/Desiminasi/Publikasi Perundang-Undang Penanganan Konflik dan Peraturan Pelaksanaannya	Meningkatnya SDM Aparatur dalam upaya maksimalisasi keadilan, keterbukaan dan ketentraman (Orang)	smd	210	161.439.681
1.05.15.34	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Intelijen	Tenaga terlatih dan Profesional (Orang)	smd	60	168.362.500
1.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat Kalimantan Timur khususnya pelajar SLTA yang Memahami Wawasan dan Karakter Bangsa (%) (%)		5	613.700.000
1.05.17.07	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bela negara guna meredam konflik sosial (Orang)	smd	100	306.850.000
		Tersedianya data informasi perkembangan FPK di Daerah (Dokumen)		10	
		Terlatihnya peserta yang mengikuti Kegiatan Pembauran Kebangsaan (Orang)		100	
1.05.17.08	Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Terlatihnya peserta yang mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Orang)	smd	100	306.850.000
1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)		75,5	2.270.847.500
1.05.21.06	Pemantauan perkembangan politik di daerah	Meningkatnya Partisipasi Pemilih pada Pileg/Pilpres 2019 (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	77,5	281.475.000
1.05.21.22	Penyusunan IDI	Terselenggaranya Kegiatan IDI bagi Aparatur (Orang)	smd	100	1.654.217.500
1.05.21.23	Penyusunan data base partai politik	Terselenggaranya kegiatan dan tersusunnya data parpol (Orang)	smd	80	135.155.000
1.05.21.24	Verifikasi Berkas Administrasi Bantuan Partai Politik	Terselenggaranya kegiatan dan verifikasi berkas Administrasi Bantuan Keuangan Parpol (Parpol)	smd	10	200.000.000
1.05.62	Program Pembinaan dan Pengembangan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Penguatan Peran Ormas	Ormas yang berperan aktif dalam kegiatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Ormas)		120	983.600.000
1.05.62.01	Peningkatan Kapasitas Ormas	Terlatihnya peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangn tentang Organisasi Kemasyarakatan (Orang)	smd	150	300.000.000
1.05.62.02	Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Pendaftaran Ormas dan Pengelolaan SIORMAS (%)	smd	100	250.000.000
		Terbentuknya Tim Terpadu Pengawasan Ormas (Tim)		1	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.05.62.03	Pencegahan dan Penanganan Masalah Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Bahan Pokok ke 10 Kab/Kota (Kab/Kota)	smd	10	233.600.000
1.05.62.09	Forum Diskusi Aktual Agama dan Kepercayaan	Terlaksananya Kegiatan Forum Diskusi Aktual Agama dan Kepercayaan (Orang)	smd	100	200.000.000
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				6.780.079.000
1.05.03.001	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				6.780.079.000
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	2.515.033.230
1.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	2.515.033.230
		Jumlah tenaga pemeliharaan dan pengamanan alat peringatan dini (O/B)		120	
		Jumlah satuan tenaga penanggulangan bencana (O/B)		182	
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja PD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu (Unit)		4	391.502.143
1.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	293.352.143
1.05.08.03	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah barang peningkatan sarana dan prasarana peralatan kantor (unit)	smd, luarPrv	25	98.150.000
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		17,39	392.497.536
1.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah (Kegiatan)	bru, kbr, kcr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	15	359.197.536
		Jumlah Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah (Kegiatan)		40	
		Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman (Bulan)		12	
		Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana (Orang)		0	
		Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/bimtek (orang)		0	
1.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/bimtek (orang)	smd, luarPrv	44	33.300.000
		Jumlah Pakaian Batik Tradisional (Stel)		53	
		Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) (stel)		0	
		Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)		53	
		Jumlah Pakaian Seragam Tertentu (Stel)		0	
		Jumlah Pakaian Seragam Lengkap Satpam (Stel)		0	
		Jumlah Pakaian Kerja Lapangan (Stel)		0	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai)		70	112.496.653
1.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	smd	10	57.273.915
1.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	120	55.222.738
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)		5	
		Jumlah BPBD yang dilakukan Penilaian (Kabupaten/Kota)		10	
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Kabupaten/KOTA)		10	
1.05.49	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana (Persen)		85	1.649.009.438
1.05.49.13	Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanggulangan Bencana	Jumlah koordinasi penanggulangan bencana (kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	17	269.655.000
		Jumlah laporan monitoring evaluasi penanggulangan bencana (Laporan)		2	
		Jumlah operasi penangan kejadian bencana (kali)		20	
1.05.49.14	Pengembangan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan	Jumlah Peralatan Penanggulangan Bencana yang Tersedia (Unit)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	75	540.000.000
		Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pergudangan dan Peralatan Penanggulangan Bencana (Orang)		70	
		Jumlah peserta Simulasi Peralatan Penanggulangan Bencana (Orang)		120	
		Jumlah logistik penanggulangan bencana (barang)		100	
1.05.49.15	Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Peringatan Bulan PRB (Orang)	ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	326.265.000
		Jumlah peserta pelatihan SAR (Orang)		30	
		Jumlah peserta pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC) (Orang)		30	
1.05.49.16	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	Jumlah Pendataan, Kaji Cepat PB dan Penyebaran Informasi Kebencanaan (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	513.089.438
		Jumlah Laporan Kegiatan PUSDalops PB (Laporan)		12	
		Jumlah laporan pemantauan titik panas (Laporan)		12	
		Jumlah laporan pemantauan early warning system (Laporan)		12	
		Jumlah Laporan Kejadian Kebencanaan (Laporan)		12	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.05.51	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk dan memperoleh peringatan dini bencana (Desa / Kelurahan)		15	1.319.540.000
1.05.51.03	Penanggulangan bencana berbasis masyarakat	Jumlah peserta Bimtek Relawan Desa Tangguh Bencana (Destana) (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, big, smd, luarPrv	60	337.500.000
		Jumlah peserta Bimtek Relawan Penanggulangan Bencana (Orang)			
		Jumlah peserta Sosialisasi Desa Tangguh Bencana (Orang)		240	
		Jumlah peserta penyegaran Fasilitator Desa Tangguh Bencana (Orang)		30	
		Jumlah peserta Fasilitasi Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana dan Forum PRB Desa Tangguh Bencana (Orang)		180	
		Jumlah dokumen Kajian dan Pemetaan Risiko Bencana Desa Tangguh Bencana (Dokumen)		6	
				6	
		Jumlah dokumen Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Bencana (Dokumen)		8	
		Jumlah peserta Pembekalan Teknis Penanggulangan Bencana Relawan Desa Tangguh Bencana (Orang)		240	
		Jumlah Peserta Seminar Hasil Desa Tangguh Bencana (Orang)		210	
		Jumlah Peserta Simulasi Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Bencana (Orang)		120	
		Jumlah Peta Jalur evakuasi Destana (Peta)		6	
		Jumlah Rambu-rambu Destana (Buah)		90	
		Laporan perkembangan Desa Tangguh Bencana (Laporan)		1	
		Jumlah orang yang mengikuti Kompetensi Desa Tangguh Bencana tingkat Provinsi dan Nasional (Orang)		15	
1.05.51.04	Penyusunan Data Base dan Pemetaan Rawan Bencana	Jumlah Peta Rawan Bencana (Peta)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, big, smd, luarPrv	5	357.900.000
		Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana (Dokumen)		0	
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)/review (Dokumen)		0	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.05.51.05	Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana (kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	8	167.100.000
1.05.51.16	Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan	Jumlah Lokasi Monitoring Daerah Rawan Bencana (Kabupaten/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	207.040.000
		Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pekan Pengurangan Risiko Bencana (Orang)		0	
		Jumlah peserta yang mengikuti Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (Orang)			
		Jumlah dokumen Kajian Teknis Bencana (Dokumen)		0	
		Jumlah pemasangan peralatan Peringatan Dini (EWS) (Unit)		3	
		Jumlah pemantauan peralatan Peringatan Dini (EWS) (Unit)		12	
		Jumlah dokumen SOP peringatan dini/review (Dokumen)		0	
		Jumlah media penyebaran informasi kebencanaan (Media)		3	
		Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan (Aplikasi)		1	
1.05.51.17	Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan	Jumlah peserta Rapat Teknis Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	100	250.000.000
		Jumlah peserta Jambore Relawan Bencana (Orang)		500	
		Jumlah peserta Peringatan Hari Kesiapsiagaan Nasional (Orang)		250	
		Jumlah dokumen Rencana Kontijensi Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana (Dokumen)		1	
		Jumlah dokumen review Rencana Kontijensi Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana (Dokumen)		1	
		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Apel Siaga (Orang)		500	
		Jumlah lokasi pemasangan Peta dan Rambu Bencana (Kab/Kota)		1	
		Jumlah Kab/kota yang mendapat pelayanan informasi rawan bencana (Kab/Kota)		10	
		Jumlah Satuan Tugas (Satgas) Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) (Orang)		26	
		Jumlah dokumen Profil Kesiapsiagaan (Dokumen)		0	
1.05.55	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Persen)		60	400.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.05.55.01	Sosialisasi dan Rakornis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi (bimtek JITUPASNA) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (orang)	ktm, psr, bpn, btg, luarPrv	40	100.000.000
		Jumlah Peserta Rakornis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Orang)		40	
		Jumlah Laporan Sosialisasi (Bimtek JITUPASNA) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Laporan)		1	
		Jumlah Laporan Kegiatan Rakornis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Laporan)		1	
1.05.55.02	Penyusunan Rencana Aksi Pasca Bencana	Jumlah Peserta Rapat Pembentukan TIM JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (orang)	bru, psr, ppu, btg, luarPrv	30	100.000.000
		Jumlah Peserta Workshop JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (orang)		35	
		Jumlah Dokumen Rapat Pembentukan TIM JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (dokumen)		1	
		Jumlah Peserta Rakornis Penyusunan JITUPASNA dan Rencana Aksi (orang)		30	
		Jumlah Dokumen Workshop JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Dokumen)		1	
		Jumlah Dokumen Rakornis Penyusunan JITUPASNA dan Rencana Aksi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Dokumen)		1	
1.05.55.05	Pendampingan/Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Laporan Pendampingan, Monitoring Dan Evaluasi Serta Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	100.000.000
		Jumlah Kab/Kota Yang Dilaksanakan Pendampingan/Supervisi Kajian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Kab/Kota)		10	
		Jumlah Bantuan Bahan Bangunan Seng dan Paku Seng Kepada Masyarakat Pascabencana (Lembar)		1500	
1.05.55.06	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	100.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bidang dan Rekonstruksi EPBD Kabupaten/Kota (dokumen)		10	
1.06	Sosial				29.494.033.000
1.06.01	Dinas Sosial				29.494.033.000
1.06.01.001	Dinas Sosial				9.000.000.000
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayananinya administrasi perkantoran (bulan)		12	2.874.091.227
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		100	
1.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	2.874.091.227
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi dan terpeliharanya Sarana /Prasarana Aparatur Dinas Sosial (bulan)		0	1.157.402.758
		Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		12	
1.06.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor (100 Unit)	smd	21	300.500.000
		Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)		21	
1.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan kantor (Bulan)	smd	12	856.902.758
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (bulan)		0	1.164.634.242
		Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		12	
1.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi baik didalam dan keluar daerah (Bulan)	smd	12	1.043.784.242
1.06.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur (Orang)	bpn, smd, luarPrv	136	120.850.000
1.06.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Sikronisasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan (Dokumen)		0	203.734.607
		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		11	
1.06.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Yang Disusun (Dokumen)	bpn, smd	11	137.838.128
1.06.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dinas (Laporan)	bpn, smd	6	65.896.479
1.06.17	Program pembinaan anak terlantar	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (Orang)		1320	203.250.000
1.06.17.03	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti yang mendapatkan bantuan sosial (Orang)	smd	200	203.250.000
1.06.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Trauma yang mendapatkan Pembinaan (Orang)		454	541.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.06.18.03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan pelayanan (Orang)	bpn, smd	250	541.000.000
1.06.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial (Eks. Narapidana, ODHA, Korban NAPZA, Tuna Susila, Waria dan Gepeng) yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) (Orang)		135	167.500.000
1.06.20.04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah Eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan (Orang)	bpn, smd	38	167.500.000
1.06.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Menguatnya kelembagaan kesejahteraan sosial yang diberdayakan keberfungsian (Lembaga)		5	329.053.000
1.06.21.01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah lembaga sosial yang diberdayakan (Lembaga)	smd	4	179.000.000
1.06.21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dilaksanakan (Kegiatan)	smd	3	150.053.000
1.06.23	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Orang)		2325	1.537.284.166
1.06.23.01	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin dan PMKS Lainnya	Jumlah WRSE dan KUBE yang diberdayakan (Orang)	bru, mah, bpn, btg, smd	500	639.534.166
1.06.23.02	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat bantuan sosial (KPM)	smd	75	666.250.000
1.06.23.03	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah Lansia luar panti yang mendapat pelayanan (Orang)	kbr, smd	270	231.500.000
1.06.24	Program Penanganan dan Penanggulangan Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Orang)		2000	539.050.000
1.06.24.01	Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Pemulangan, Permukiman Orang Terlantar	Jumlah kegiatan penanganan Korban bencana dan orang terlantar yang mendapatkan bantuan sosial (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2000	539.050.000
1.06.25	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Tersedianya sarana dan prasana kebutuhan dasar bagi keluarga miskin (unit)		1	283.000.000
1.06.25.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagi Keluarga Miskin	Jumlah MCK bagi keluarga miskin KAT yang dibangun (unit)	bru	2	283.000.000
1.06.01.002	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri				6.029.145.000
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		100	1.159.539.836
1.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	1.159.539.836
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		90	397.160.698
1.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	smd	4	397.160.698
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		100	170.109.466

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah (%)		0	
1.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi baik didalam dan keluar daerah (Bulan)	mah, psr, ppu, bpn, btg	12	170.109.466
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terpenuhinya sarana dan prasarana serta pelayanan/pembinaan bagi panti asuhan/jompo (Panti)		1	4.302.335.000
1.06.19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti yang dilayani (Panti)	smd	1	4.302.335.000
1.06.01.003	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma				4.527.114.000
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		100	1.072.452.000
1.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	1.072.452.000
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		80	1.165.594.000
1.06.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	smd	5	721.950.000
1.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	smd	5	443.644.000
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		100	150.818.000
1.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi baik didalam dan keluar daerah (Bulan)	smd	12	150.818.000
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terpenuhinya sarana dan prasarana serta pelayanan/pembinaan bagi panti asuhan/jompo (Panti)		1	2.138.250.000
1.06.19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti yang dilayani (Panti)	smd	1	1.936.750.000
1.06.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah penghuni panti yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	smd	80	201.500.000
1.06.01.004	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan				4.527.791.000
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		100	1.060.209.446
1.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	1.060.209.446
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		80	580.798.792
1.06.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	smd	5	273.830.000
1.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	smd	5	306.968.792
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		100	153.449.000
		Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah (%)		0	
1.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi baik didalam dan keluar daerah (Bulan)	smd	12	153.449.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terpenuhinya sarana dan prasarana serta pelayanan /pembinaan bagi panti asuhan/jompo (Panti)		1	2.733.333.762
1.06.19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti yang dilayani (Panti)	smd	1	2.560.444.142
1.06.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah penghuni panti yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	smd	70	172.889.620
1.06.01.005	UPTD Panti Sosial Bina Remaja				4.032.820.000
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		100	1.090.223.000
1.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	1.090.223.000
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		80	1.009.057.000
1.06.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan kantor (Bulan)	smd	12	774.850.000
1.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	smd	5	234.207.000
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		100	151.224.000
		Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah (%)		0	
1.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi baik didalam dan keluar daerah (Bulan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, per, ppu, bpn, btg	12	151.224.000
1.06.17	Program pembinaan anak terlantar	Persentase Anak Terlantar dan Berhadapan dengan Hukum yang tertangani (%)		95	1.782.316.000
1.06.17.02	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar yang mendapatkan bantuan sosial (Orang)	smd	95	1.782.316.000
1.06.01.006	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia				1.377.163.000
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayananinya administrasi perkantoran (bulan)		12	1.000.000.000
1.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	1.000.000.000
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi dan terpeliharanya Sarana /Prasarana Aparatur Dinas Sosial (bulan)		12	52.163.000
1.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	smd	307550000	52.163.000
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (bulan)		12	75.000.000
1.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi baik didalam dan keluar daerah (Bulan)	smd	705371900	75.000.000
1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (Orang)		60	250.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.06.16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran terlanjar, KIDT & Korban Trafficking yang mendapatkan penanganan/pelayanan (Orang)	smd	60	250.000.000
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				228.275.270.000
2.01	Tenaga Kerja				20.419.040.000
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				20.419.040.000
2.01.01.001	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				13.140.000.000
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran (%)		91	3.680.000.000
2.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	3.680.000.000
2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		90	850.000.000
2.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Dan Kelengkapan Prasaran Kantor (Bulan)	smd	12	850.000.000
2.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (%)		85	945.000.000
2.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Kegiatan)	bpn, btg, smd	75	945.000.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah (Kegiatan)		150	
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu) (Bulan)		12	
2.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		72,15	125.000.000
2.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	smd	10	75.000.000
2.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)	smd	8	50.000.000
2.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang terserap dipasar kerja (%)		80	1.885.000.000
2.01.15.01	pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditingkatkan Keterampilannya (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	500	1.250.000.000
2.01.15.02	Pengadaan sarana dan prasarana pelatihan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Unit)	smd		250.000.000
2.01.15.03	peningkatan profesionalisme instruktur pelatihan	Jumlah Instruktur yang Dilatih (Orang)	smd	60	300.000.000
2.01.15.04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	smd	1	85.000.000
2.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Presentase Penempatan Tenaga Kerja (%)		31	1.090.000.000
2.01.16.01	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Informasi bursa Tenaga Kerja (Dokumen)	smd	3	250.000.000
2.01.16.05	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih Berwirausahaan (Orang)	smd	220	250.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.01.16.06	Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah Laporan pencari kerja yang memiliki keterampilan (Dokumen)	smd	20	90.000.000
2.01.16.09	Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Padat Karya	Jumlah pencari kerja yang mendapat pekerjaan sementara (Orang)	smd	204	500.000.000
2.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	UMP Sama Dengan KHL (%)		100	900.000.000
2.01.17.09	Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang Dibina (Perusahaan)	smd	100	100.000.000
2.01.17.14	Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan	SK Gubernur Tentang UMP (Dokumen)	smd	3	450.000.000
		Jumlah dokumen sesuai PP 78 Tahun 2015 (Dokumen)		3	
2.01.17.15	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur dan Perselisihan Hubungan Industrial	Mencegah Perselisihan Hubungan Industrial (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	50	350.000.000
2.01.24	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	Persentase Wirusaha Baru dan Pencari Kerja (%)		35	500.000.000
2.01.24.01	Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih Berwirusaha (Orang)	smd	160	500.000.000
2.01.27	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang Dibina dan Diawasi (Perusahaan)		475	1.615.000.000
2.01.27.01	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah Perusahaan yang Dibina (Perusahaan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	130	645.000.000
		Riksa Uji Objek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Objek K3)		130	
2.01.27.08	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja, Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Norma Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak	Jumlah Perusahaan yang Dibina dan Diawasi (Perusahaan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	120	325.000.000
2.01.27.09	Peningkatan Perlindungan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Dibina dan Diawasi (Perusahaan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	60	645.000.000
		Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan (Perusahaan)		60	
2.01.29	Program Peningkatan Produktivitas	Persentase Perusahaan yang Meningkatkan Produktivitasnya (%)		80	500.000.000
2.01.29.01	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah yang Dilatih Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Orang)	smd	100	500.000.000
2.01.30	Program Pelatihan Pencari Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan yang Ditempatkan (%)		85	1.050.000.000
2.01.30.04	Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan Kerja	Jumlah Kejuruan yang Dipersiapkan Sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) (Jurusan)	bpn	5	300.000.000
2.01.30.05	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih di Balai Latihan Kerja (Orang)	bpn, btg	320	750.000.000
2.01.01.002	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan				3.569.040.000
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran (%)		85	643.693.456
2.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bpn	12	643.693.456
2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		85	310.346.544
2.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (unit)	bpn	21	130.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Dan Kelengkapan Prasarana Kantor (Bulan)	bpn	12	180.346.544
2.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (%)		80	115.000.000
2.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	100.000.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah (Kegiatan)		60	
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu) (Bulan)		12	
2.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	bpn, smd	3	15.000.000
2.01.30	Program Pelatihan Pencari Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan yang Ditempatkan (%)		85	2.500.000.000
2.01.30.04	Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan Kerja	Jumlah Kejuruan yang Dipersiapkan Sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) (Jurusan)	bpn	10	2.000.000.000
2.01.30.05	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih di Balai Latihan Kerja (Orang)	bpn	160	500.000.000
2.01.01.003	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang				3.500.000.000
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran (%)		86	650.000.000
2.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	btg	12	650.000.000
2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		85	540.177.000
2.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan Dan Kelengkapan Kantor (unit)	btg	3	39.100.000
2.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Dan Kelengkapan Prasarana Kantor (Bulan)	btg	85	501.077.000
2.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (%)		81	148.000.000
2.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Kegiatan)	btg	5	128.000.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah (Kegiatan)		5	
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu) (Bulan)		12	
2.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	btg	5	20.000.000
2.01.30	Program Pelatihan Pencari Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan yang Ditempatkan (%)		86	2.161.823.000
2.01.30.04	Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan Kerja	Jumlah Kejuruan yang Dipersiapkan Sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) (Jurusan)	bpn	10	1.661.823.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.01.30.05	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih di Balai Latihan Kerja (Orang)	btg	160	500.000.000
2.01.01.004	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan				210.000.000
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran (%)		91	90.000.000
2.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	kbr, psr, smd	12	90.000.000
2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		85	50.000.000
2.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Dan Kelengkapan Prasarana Kantor (Bulan)	smd	12	50.000.000
2.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (%)		82	70.000.000
2.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Kegiatan)	smd	8	60.000.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah (Kegiatan)		15	
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu) (Bulan)		12	
2.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bintek (Orang)	smd	5	10.000.000
2,02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				8.130.778.000
2.02.01	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				8.130.778.000
2.02.01.001	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				8.130.778.000
2.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	2.137.648.540
2.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Tim/Kegiatan)	smd	10	2.137.648.540
2.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Proporsi perempuan yang berada pada posisi jabatan manajerial (%)		2	1.571.183.635
2.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah sarana dan prasarana kantor (Unit)	smd	55	1.571.183.635
2.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Unit kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (%)		60	989.167.624
2.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	presentase capaian target kinerja (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	90	789.167.624
2.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	diklat yang diikuti pegawai (diklat)	smd, luarPrv	7	200.000.000
2.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Unit kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (%)		69	454.075.375
2.02.10.01	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	laporan capaian kinerja (dokumen)	smd	5	53.975.375

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.02.10.02	Rakor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	jumlah kebijakan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak (rekomendasi)	mah	1	200.100.000
2.02.10.03	Forum RKP Bidang Kependudukan, PP dan PA	Persentase Kab/Kota menuju layak anak (%)	smd	1	100.000.000
2.02.10.04	Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang ekonomi (Orang)	smd	2	100.000.000
2.02.20	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif (UEP) (%)		76	249.325.201
2.02.20.01	Peningkatan Kewirausahaan Perempuan	jumlah peserta yang mendapatkan keterampilan berwirausaha (orang)	kbr, ppu	250	249.325.201
2.02.21	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Pemenuhan hak anak dan penanaman nilai-nilai luhur (%)		88	250.000.000
2.02.21.02	Pemenuhan kebutuhan salah satu cluster hak anak	pemetaan hak anak di bidang pendidikan (dokumen)	ppu, bpn	300	250.000.000
2.02.27	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan (%)		92	328.353.000
2.02.27.01	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah kebijakan tentang penurunan angka perkawinan anak (Kebijakan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, per, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	99,55	328.353.000
2.02.35	Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)		0,054	251.024.625
2.02.35.01	Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Jumlah usaha KK perempuan berbasis ICT (Usaha)	smd	70	251.024.625
2.02.36	Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		80	700.000.000
2.02.36.01	Tumbuh Kembang Anak	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tumbuh kembang anak (orang/peserta)	mah, smd	80	225.000.000
2.02.36.02	Perlindungan Anak	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Perlindungan anak (orang/peserta)	smd	350	225.000.000
2.02.36.03	Perlindungan Perempuan	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan perlindungan perempuan (orang/peserta)	bru, bpn, btg, smd	80	250.000.000
2.02.38	Program Kesetaraan Gender	jumlah kebijakan PUG dalam pembangunan (kebijakan)		3	700.000.000
2.02.38.01	Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum	meningkatnya ketersediaan kebijakan keterlibatan perempuan dalam politik (kebijakan)	smd	0	200.000.000
		jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang politik dan hukum (orang/peserta)		125	
2.02.38.02	Kesetaraan Gender Bidang Sosial dan Budaya	peserta yang mengikuti kegiatan Kesetaraan Gender bidang sosial budaya (orang)	smd	125	300.000.000
2.02.38.03	Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Kesetaraan Gender bidang ekonomi (Orang)	bru, ktm, mah, bpn, smd	125	200.000.000
2.02.39	Program Sistem Data Gender dan Anak	persentase data gender dan anak yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan (%)		80	500.000.000
2.02.39.01	Data dan Informasi Gender	persentase data gender (%)	smd	20	150.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah profil pembangunan berbasis gender (Profil)		20	
2.02.39.02	Data dan Informasi Anak	persentase data anak (%)	smd	40	150.000.000
2.02.39.03	Informasi dan Partisipasi	kebijakan terkait pengembangan SIGA (kebijakan)	smd	1	200.000.000
2.03	Pangan				29.250.000.000
2.03.01	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				29.250.000.000
2.03.01.001	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				13.120.000.000
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	3.977.000.000
2.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	smd	12	3.977.000.000
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	1.547.000.000
2.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Unit)	smd	20	750.000.000
2.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	797.000.000
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	1.546.000.000
2.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5	1.039.000.000
2.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	kk, smd, luarPrv	30	507.000.000
2.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		67	1.100.000.000
2.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	600.000.000
2.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	500.000.000
2.03.25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan yang ditangani (Desa)		414	2.900.000.000
2.03.25.01	Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Data ketersediaan dan kerawanan pangan (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	1.174.000.000
2.03.25.04	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah cadangan beras provinsi (Ton)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	350	1.137.000.000
2.03.25.07	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Informasi harga pangan yang tersedia (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	3	589.000.000
2.03.27	Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Skor)		89,1	2.050.000.000
2.03.27.01	Analisis Pola Pangan Harapan	Jumlah laporan analisis PPH Konsumsi (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	350.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.03.27.02	Pengembangan Pangan Lokal	Jumlah produk olahan pangan lokal yang dikembangkan (Jenis)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	11	850.000.000
2.03.27.03	Pengawasan Mutu Pangan Segar	Jumlah Sertifikat mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	9	850.000.000
2.03.01.002	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura				2.530.000.000
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	923.000.000
2.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	smd	12	923.000.000
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	1.268.000.000
2.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia (Unit)	smd	12	1.047.000.000
2.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	221.000.000
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	339.000.000
2.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	339.000.000
2.03.01.003	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura				2.736.000.000
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	1.500.000.000
2.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	smd	12	1.500.000.000
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	1.081.000.000
2.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Unit)	smd	1	816.000.000
2.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	265.000.000
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	155.000.000
2.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	155.000.000
2.03.01.004	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura				2.764.000.000
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	1.400.000.000
2.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	kkkr	12	1.400.000.000
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	1.179.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia (Unit)	kkp	1	957.000.000
2.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	kkp	12	222.000.000
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	185.000.000
2.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	185.000.000
2.03.01.005	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian				8.100.000.000
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	1.431.000.000
2.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	smd	12	1.431.000.000
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	319.000.000
2.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia (Unit)	smd	1	90.000.000
2.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia (Unit)	smd	12	229.000.000
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	200.000.000
2.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	200.000.000
2.03.15	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Jumlah Desa yang dibina (Desa)		726	6.150.000.000
2.03.15.02	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Penyuluh yang dibina (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	836	5.400.000.000
2.03.15.03	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang mengikuti pelatihan (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	160	750.000.000
2,05	Lingkungan Hidup				18.560.000.000
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup				18.560.000.000
2.05.01.001	Dinas Lingkungan Hidup				18.560.000.000
2.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	4.000.000.000
2.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	4.000.000.000
2.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	1.284.000.000
2.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	1.284.000.000
2.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	1.500.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	40	1.200.000.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kali)		45	
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)		12	
2.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang terlatih (orang)	bpn, smd, luarPrv	20	300.000.000
2.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai AKIP)		61	1.000.000.000
2.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran, Rapat Koordinasi, Hari Lingkungan Hidup (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	7	500.000.000
2.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, Profil LH Sekaltim, SPM (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	500.000.000
2.05.30	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran (Indeks Tercemar Sedang)		8	3.250.000.000
2.05.30.01	Pemantauan lingkungan	Frekuensi pemantauan kualitas lingkungan (Frekuensi)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	308	1.500.000.000
2.05.30.02	Pengendalian pencemaran lingkungan	Penurunan beban pencemaran (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	1.200.000.000
2.05.30.03	Pengendalian kerusakan lingkungan	Luas Kerusakan Lingkungan (Juta Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	7,24	550.000.000
2.05.58	Program Penataan, Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup (%)		100	2.340.000.000
2.05.58.01	Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	100	630.000.000
2.05.58.02	Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup	Persentase pengawasan terhadap penanggungjawab dan/atau usaha kegiatan yang diberi izin (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	100	560.000.000
2.05.58.03	Peningkatan kapasitas lingkungan hidup	Jumlah lembaga/orang yang memenuhi kriteria untuk diusulkan dalam penilaian lingkungan hidup (Lembaga)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	70	1.150.000.000
2.05.59	Program Tata Lingkungan	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (Kegiatan)		600	3.506.000.000
2.05.59.01	Penyusunan, evaluasi dan pelaporan dokumen lingkungan	Persentase dokumen lingkungan yang dintegrasikan kebijakan pembangunan daerah (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	100	1.316.000.000
2.05.59.02	Koordinasi penyusunan dan penilaian kajian dampak lingkungan	Persentase dokumen lingkungan yang dinilai/diperiksa (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	100	815.000.000
2.05.59.03	Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Persentase Jumlah Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di integrasikan dengan dokumen RAD GRK (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	89,13	1.375.000.000
2.05.60	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Persentase sampah dan limbah B3 yang dimanfaatkan (%)		13	1.680.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.05.60.01	Pengelolaan sampah	Persentase timbulan sampah yang dikelola (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	63	800.000.000
2.05.60.02	Pengelolaan limbah B3	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan (Ton)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	12000	400.000.000
2.05.60.03	Pengembangan fasilitas teknis dan penerapan teknologi ramah lingkungan	Jumlah Kab/Kota yang telah menerapkan teknologi pengelolaan sampah (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2	480.000.000
2,07	Pemberdayaan Masyarakat Desa				10.338.338.000
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				10.338.338.000
2.07.01.001	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				10.338.338.000
2.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		75	1.989.912.000
2.07.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	smd	12	1.989.912.000
2.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	750.000.000
2.07.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	750.000.000
2.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		45	900.000.000
2.07.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	75	900.000.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (kegiatan)		100	
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (bulan)		12	
2.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		68	190.000.000
2.07.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	8	150.000.000
2.07.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)	smd	5	40.000.000
2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Desa dan Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan Desa)		35	864.200.000
2.07.15.01	Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Pelaksanaan BBGRM yang dibina (Kabupaten/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	279.200.000
		Jumlah PKK yang dibina (Kabupaten/Kota)		10	
		Jumlah LPM yang dibina (Kota)		10	
		Jumlah Posyandu yang dibina (Posyandu)		6	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.07.15.03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Penyebaran informasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa secara optimal (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	70	65.000.000
2.07.15.08	Pengembangan Kapasitas Masyarakat	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Yang dibina (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	150	310.000.000
2.07.15.09	Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dibina (MHA)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	5	210.000.000
2.07.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah Bumdes Yang Aktif (Bumdes)		390	500.000.000
2.07.16.01	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Persentase BUMDesa Aktif (Unit)	smd	30	500.000.000
2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (%)		80	80.000.000
2.07.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Monev (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	80	80.000.000
2.07.21	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat (Dokumen)		1	300.000.000
2.07.21.01	Sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (Kali)	bru, bpn, smd	1	300.000.000
		Jumlah kabupaten/ Kota (Kabupaten/ Kota)		10	
2.07.22	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Masyarakat Desa Pengelola Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan TTG Yang Mempunyai Daya Saing Pasar (Unit)		18	600.000.000
2.07.22.01	Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna	jumlah posyantek yang aktif (unit)	ktm	30	300.000.000
2.07.22.02	Pengembangan Prasarana dan Sarana Sosial Dasar Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina (Pokmas)	smd	10	300.000.000
2.07.26	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	PKK yang berperan aktif dalam pemberdayaan/ pembinaan masyarakat dan keluarga desa/ kelurahan (PKK)		180	1.264.226.000
2.07.26.01	Pengembangan dan Monitoring ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotong-royongan	Jumlah TP.PKK yang dibina (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	130	800.000.000
2.07.26.02	Penguatan Kapasitas kesejahteraan keluarga	Kader PKK yang dilatih (Orang)	kk, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	150	160.000.000
2.07.26.03	Peningkatan usaha ekonomi keluarga	Jumlah Keluarga/Kader PKK yang dibina (Orang)	kk, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	160	160.000.000
2.07.26.04	Pengembangan dan Monitoring hidup sehat keluarga yang ramah lingkungan	Kader PKK dan Masyarakat yang dibina (Orang)	kk, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	300	144.226.000
2.07.27	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kelompok masyarakat pemanfaat TTG dalam rangka penanggulangan kemiskinan (Unit)		20	50.000.000
2.07.27.01	Peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna	Posyantek Percontohan yang Dibina (Posyantek)	ktm	20	50.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.07.28	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran (Desa)		393	950.000.000
2.07.28.01	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Data aparatur Desa/kelurahan dan badan Permusyawaratan Desa yang belum dilakukan peningkatan Kapasitas (Kabupaten/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	350.000.000
2.07.28.02	Monitoring Penyaluran Keuangan Desa	Data penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD dan pengelolaan keuangan Desa (Kabupaten)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu	7	250.000.000
2.07.28.03	Peningkatan Penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Desa Yang Meraih Juara Perlombaan Desa Tingkat Provinsi (Desa)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	3	350.000.000
		Kelurahan Yang Meraih Juara Perlombaan Kelurahan Tingkat Provinsi (Kelurahan)		3	
2.07.29	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Jumlah Desa berkembang (Desa)		359	900.000.000
2.07.29.01	Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Desa	Kabupaten yang dibina (Kabupaten)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd, luarPrv	7	400.000.000
		Pendamping Desa yang dibina (Orang)		100	
2.07.29.02	Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Antar Desa	Laporan Penguatan Pengembangan dan Pembangunan Antar Desa (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd, luarPrv	1	250.000.000
2.07.29.03	Penguatan Informasi Pembangunan	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1	250.000.000
2.07.30	Program Kampung Iklim +	Jumlah Kampung/Desa Iklim (Desa)		70	1.000.000.000
2.07.30.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Emisi Rendah Desa / Village Low Emission Development / VLED	Jumlah Kampung/Desa/Kelurahan iklim (Kampung/Desa/Kelurahan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	30	1.000.000.000
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				960.000.000
2.02.01	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				960.000.000
2.02.01.001	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				960.000.000
2.08.23	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Perangkat Daerah (SKM) (%)		80	460.000.000
2.08.23.01	Pengendalian Penduduk	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan perlindungan perempuan Kaltim (Orang)	ppu, smd, luarPrv	330	150.000.000
2.08.23.02	Kualitas Keluarga	Dokumen laporan capaian kinerja (Laporan)	kkp, smd, luarPrv	10	160.000.000
		Jumlah kebijakan PUG (Kebijakan)		200	
2.08.23.03	Keluarga Berencana	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang politik dan hukum (Orang)	ktm, bpn, btg	330	150.000.000
2.08.24	Program Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase kekerasan terhadap perempuan (%)		80	500.000.000
2.08.24.01	Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Jumlah pameran yang diikuti (Pameran)	ktm, smd	100	180.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.08.24.02	Bina Aparatur Pencatatan Sipil	Jumlah perangkat daerah FGD perlindungan anak dalam penanggulangan bencana (Perangkat Daerah)	ktm, smd	100	170.000.000
2.08.24.03	Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi	Persentase pelayanan perlindungan terpadu (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	100	150.000.000
2.09	Perhubungan				36.438.138.000
2.09.01	Dinas Perhubungan				36.438.138.000
2.09.01.001	Dinas Perhubungan				32.398.138.000
2.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		100	4.403.138.000
2.09.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	4.403.138.000
2.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		4	2.389.000.000
2.09.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang laik (%)	smd	90	1.389.000.000
2.09.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Kebersihan Gedung Kantor dan Taman, Pemeliharaan Gedung, Peralatan & Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Kendaraan Operasional & Jabatan (%)	smd	90	1.000.000.000
2.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		35	2.053.000.000
2.09.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Publikasi, Tersedianya Makan dan Minum Terkait Pelaksanaan Pekerjaan dan Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi (%)	smd	100	1.300.000.000
2.09.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Kualifikasi SDM Perhubungan (%)	smd	35	753.000.000
2.09.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		71,5	1.169.000.000
2.09.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Tersusunnya Renja, RKA, DPA (Dokumen)	smd	5	900.000.000
2.09.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian Evaluasi Kegiatan (Dokumen)	smd	20	269.000.000
2.09.15	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kasus)		512	13.846.000.000
2.09.15.01	Pengadaan Fasilitas Pengamanan Lalu Lintas Jalan	Panjang jalan yang dipasang fasilitas keselamatan jalan (km)	bru, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, smd	120	12.250.000.000
2.09.15.02	Pembinaan Pelayanan Angkutan Jalan	Jumlah badan usaha angkutan umum yang dibina (Badan Usaha)	smd, luarPrv	24	750.000.000
2.09.15.03	Pembinaan dan Pengendalian Keselamatan Sarana dan Prasarana Jalan	Persentase sarana angkutan darat yang laik uji dan prasarana yang laik fungsi (%)	bpn, smd, luarPrv	55	846.000.000
2.09.16	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP (Unit/%)		88	6.582.000.000
2.09.16.01	Pembinaan, Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan	Jumlah dan Progres Pelabuhan/Dermaga/Fasilitas yang dibangun ((Unit/%)	kbr, ktm, bpn	2	5.500.000.000
2.09.16.02	Pembinaan Penyelenggaraan SDP dan Pelayaran Rakyat	Persentase sarana dan prasarana angkutan perairan memenuhi standar kelaikan berlayar (%)	ktm, bpn	85	750.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.09.16.03	Pembinaan Badan Usaha dan Perizinan Angkutan Pelayaran	Jumlah badan usaha angkutan pelayaran yang dibina (Badan Usaha)	bpn, smd	100	332.000.000
2.09.17	Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah simpul transportasi yang terintegrasi dan terpadu (Simpul)		3	1.956.000.000
2.09.17.01	Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian	Jumlah lintasan/trase kereta api yang direncanakan (Lintasan)	smd	3	500.000.000
2.09.17.02	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah perencanaan kebijakan pengembangan bidang perhubungan (Perencanaan)	smd	2	1.000.000.000
2.09.17.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemadu Moda	Jumlah perencanaan angkutan pemadu moda (Perencanaan)	smd	2	456.000.000
2.09.01.002	UPTD Terminal				4.040.000.000
2.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		100	133.500.000
2.09.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	133.500.000
2.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	63.000.000
2.09.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang laik (%)	smd	90	20.000.000
2.09.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya pemeliharaan peralatan, perlengkapan kantor, kebersihan gedung dan halaman kantor dan terminal tipe B (%)	smd	90	43.000.000
2.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		65	19.500.000
2.09.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Publikasi, Tersedianya Makan dan Minum Terkait Pelaksanaan Pekerjaan dan Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi (%)	smd	100	19.500.000
2.09.18	Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B	Jumlah penumpang terminal yang terlayani (Penumpang)		750000	3.824.000.000
2.09.18.01	Pembangunan dan Peningkatan Terminal Type B Wilayah I	Jumlah Terminal Tipe B Wilayah I yang dibangun/ditingkatkan (Terminal)	ktm, btg, smd	3	2.500.000.000
2.09.18.02	Pembangunan dan Peningkatan Terminal Type B Wilayah II	Jumlah Terminal Tipe B Wilayah II yang dibangun/ditingkatkan (Terminal)	kkp, psr	2	1.324.000.000
2,10	Komunikasi dan Informatika				14.299.120.000
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika				14.299.120.000
2.10.01.001	Dinas Komunikasi dan Informatika				14.299.120.000
2.10.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		80	4.315.053.982
2.10.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	4.315.053.982
2.10.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		4	1.133.146.472
2.10.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	smd	60	793.946.472

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.10.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	339.200.000
2.10.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		85	1.108.759.785
2.10.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Paket)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd		911.159.785
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah (Paket)			
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah (Bulan)		12	
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman (Bulan)		12	
2.10.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (orang)	smd, luarPrv	20	197.600.000
		Jumlah Pakaian Dinas Aparatur (Stel)		121	
2.10.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		80	142.909.910
2.10.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	smd	8	10.000.000
2.10.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	smd	4	132.909.910
2.10.11	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase Siswa sekolah dan mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi dibidang TIK (Persen)		50	100.000.000
2.10.11.01	Peningkatan Sumber Daya TIK	1. Jumlah pelatihan untuk siswa (SD/SMP/SMA/Sederajat) 2. Jumlah Bimbingan teknis Pranata komputer (Sekolah, Kegiatan)	smd	32	100.000.000
2.10.12	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	Jumlah lembaga yang mengembangkan media center informasi publik (Lembaga)		2	295.400.000
2.10.12.01	Koordinasi Bidang Kominfo Antar Lintas SKPD, Lintas Vertikal di Daerah, BUMN dan Swasta Lokal Provinsi, Kab/Kota	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Bidang Kominfo (Laporan)	smd	1	62.900.000
2.10.12.02	Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah	Workshop, bimtek, sarana dan prasaran kegiatan jurnalistik dll (Orang)	bpn, smd	70	140.000.000
2.10.12.03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah Kerjasama Publikasi Informasi Pembangunan Daerah Melalui RRI, TVRI, Radio Swasta dan TV Swasta, Lokal dan Nasional serta melalui media cetak untuk penerbitan buletin advertorial (Kerjasama)	smd	2	92.500.000
2.10.13	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik (%)		86	1.252.241.651
2.10.13.01	Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho dll	Jumlah poster, leaflet, buletin, baliho yang menginformasikan kebijakan pemerintah daerah serta pembangunan dan perawatan baliho (Kegiatan)	bpn, smd	55	197.500.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.10.13.02	Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi	Jumlah dialog interkatif di radio dan televisi (Dialog)	bpn, smd	96	100.000.000
2.10.13.03	Pengolahan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah	jumlah laporan hasil inventarisasi data dan hasil survei IKM (Laporan)	smd	2	404.741.651
2.10.13.04	Dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah	Jumlah laporan dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1	350.000.000
2.10.13.05	Partisipasi pada pameran/expo/pekan kebudayaan daerah dan dituar daerah	Jumlah event keikutsertaan pada pameran/expo/peka kebudayaan daerah (Pameran)	smd, luarPrv	4	200.000.000
2.10.14	Program Pengembangan Informasi, dan Komunikasi Publik	Cakupan Masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi (Persen)		86	198.800.000
2.10.14.06	Pengembangan Sumber Informasi Publik	Jumlah PPID Pembantu di Badan Pemerintah Pemrov. Kaltim dan PPID Kab/kota yang dikoordiasikan dalam jejaring pengelolaan pelayanan dan informasi (PD)	ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	30	198.800.000
2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)		2,8	4.878.037.500
2.10.15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Penggunaan Cloud Computing (OPD)	smd	0	963.175.000
		Jumlah Penggunaan Aplikasi MOD (OPD)		0	
		Jumlah Penggunaan Secure Socket Layer Pada Website dan Aplikasi Resmi OPD (OPD)		0	
		Kapasitas Bandwidth Internet (Bandwidth (Mbps))		100	
2.10.15.03	Interkoneksi jaringan intra pemerintah	Jumlah OPD Terhubung dalam jaringan (Perangkat Daerah)	smd	30	237.062.500
2.10.15.04	Pengembangan Integrasi Sistem Informasi di Pemrov Kaltim dan Kab/Kota Kaltim (Interoperabilitas)	Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi yang terintegrasi (Aplikasi)	smd	4	529.600.000
2.10.15.09	Pembinaan dan Pengembangan Telecenter	Jumlah Jaringan terpasang di Desa Kab/Kota (Kab/Kota)	smd	10	448.200.000
2.10.15.10	Penguatan SPBE	Jumlah Dokumen Laporan peyelenggaraan SPBE (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1	2.700.000.000
2.10.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem pengamanan data elektronik (Persen)		80	874.770.700
2.10.16.04	Pengembangan dan penyelenggaraan DC dan DRC	Jumlah Hosting Aplikasi DC dan DRC (Aplikasi)	smd	20	144.775.700
2.10.16.07	Pelaksanaan audit TIK	Terstandarisasinya Audit TIK (Dokumen)	smd	1	118.495.000
2.10.16.08	Penangan Insiden Keamanan Informasi	Jumlah Penggunaan Secure Socket Layer Pada Website dan Aplikasi Resmi OPD (OPD)	smd	20	198.200.000
2.10.16.09	Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah	Tersedianya Sarana Pendukung Layanan (Perangkat)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	111.000.000
2.10.16.12	Pengawasan dan pengendalian pengamanan informasi, persandian, pos dan telekomunikasi	Tersedianya data dan informasi yang ter-enkripsi (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	100.000.000
2.10.16.13	Pengelolaan Aplikasi (Sistem Informasi Website) Perangkat Daerah di Prov. Kaltim	Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi yang terintegrasi (Aplikasi)	smd	5	202.300.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang dikelola (sub domain)		30	
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				36.450.000.000
2.11.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				36.450.000.000
2.11.01.001	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				28.850.000.000
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	3.950.000.000
2.11.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran (bulan)	smd	12	3.950.000.000
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	17.000.000.000
2.11.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (unit)	smd	30	15.000.000.000
2.11.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor (bulan)	smd	12	2.000.000.000
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		60	1.700.000.000
2.11.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah (kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	198	1.500.000.000
2.11.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (orang)	smd, luarPrv	20	200.000.000
		Jumlah Seragam Pegawai (orang)		189	
2.11.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai AKIP)		76	1.400.000.000
2.11.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	kbr, smd, luarPrv	6	800.000.000
2.11.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	600.000.000
2.11.20	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	Jumlah UKM Naik Kelas (UKM)		200	4.800.000.000
		Jumlah koperasi berkualitas (Koperasi)		100	
2.11.20.01	Pembinaan Lembaga Koperasi dan UKM	Jumlah Koperasi dan UKM yang Mendapatkan Pembinaan (KUKM)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	300	1.000.000.000
2.11.20.02	Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran	Jumlah Koperasi dan UKM yang difasilitasi pembiayaan dan Pemasaran (KUKM)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	525	1.000.000.000
2.11.20.03	Pengawasan Koperasi	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan (Koperasi)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	100	500.000.000
2.11.20.04	Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK)	Jumlah KUKM yang mendapatkan Pelatihan (KUKM)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1050	2.300.000.000
2.11.01.002	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang				3.100.000.000
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	1.500.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.11.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran (bulan)	smd	12	1.500.000.000
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	800.000.000
2.11.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (unit)	smd	39	300.000.000
2.11.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor (bulan)	smd	12	500.000.000
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	800.000.000
2.11.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah (kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	450.000.000
2.11.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (orang)	smd, luarPrv	20	350.000.000
2.11.01.003	UPTD Pelatihan Koperasi				4.500.000.000
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	1.500.000.000
2.11.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran (bulan)	smd	12	1.500.000.000
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	1.300.000.000
2.11.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (unit)	smd	8	500.000.000
2.11.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor (bulan)	smd	12	800.000.000
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	700.000.000
2.11.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah (kegiatan)	smd	20	500.000.000
2.11.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (orang)	smd	7	200.000.000
2.11.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah KUKM terlatih (Orang)		300	1.000.000.000
2.11.19.01	Pengkajian Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM	Jumlah Dokumen Kajian & Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	500.000.000
2.11.19.02	Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi dan UMKM	Jumlah Pelatihan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan (pelatihan)	smd	15	500.000.000
2,12	Penanaman Modal				16.000.000.000
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				16.000.000.000
2.12.01.001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				16.000.000.000
2.12.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		73	4.200.000.000
2.12.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	smd	12	4.200.000.000
2.12.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		6	2.200.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.12.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana di lingkungan DPMPPTSP Prov. Kaltim (paket)	smd	8	1.300.000.000
2.12.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (bulan)	smd	12	900.000.000
2.12.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		93	1.200.000.000
2.12.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman dan jumlah belanja publikasi (bulan)	bru, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, smd	12	1.200.000.000
2.12.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai AKIP)		65	1.000.000.000
2.12.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	smd	0	500.000.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Kinerja, dan Anggaran (Dokumen)		9	
2.12.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Laporan)	smd	4	500.000.000
2.12.18	Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perizinan	Jumlah izin berusaha yang diterbitkan (Izin/ Non Izin)		0	1.760.000.000
		Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (Hari)		12	
2.12.18.02	Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor primer	Jumlah izin investasi sektor primer yang diterbitkan (Izin/ Non Izin)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1150	380.000.000
2.12.18.03	Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor sekunder dan tersier	Jumlah izin investasi sekunder dan tersier yang diterbitkan (Izin/ Non Izin)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1550	300.000.000
2.12.18.04	Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah izin investasi sekunder dan tersier yang diterbitkan (Izin/ Non Izin)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	0	460.000.000
		Jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan (NIB)		200	
2.12.18.05	Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota	Jumlah PTSP Kab/Kota yang memperoleh predikat bintang (PTSP)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	0	620.000.000
		Jumlah PTSP Kab/Kota yang memperoleh kualifikasi bintang dari BKPM RI (PTSP)		4	
2.12.27	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri (perusahaan industri baru)		7	2.030.000.000
2.12.27.02	Pemantauan dan evaluasi Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan perusahaan PMA/ PMDN di Kaltim (Perusahaan)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd	0	785.000.000
		Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online) (LKPM)		6	
2.12.27.03	Penyusunan informasi penanaman modal	Jumlah laporan realisasi investasi dan kegiatan penanaman modal (Laporan)	smd	0	320.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah dokumen realisasi investasi Kalimantan Timur (Dokumen)		5	
2.12.27.04	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Investasi	Jumlah pembinaan dan pengawasan perusahaan PMA/ PMDN di Kaltim (Perusahaan)	bru, kbr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd	0	925.000.000
		Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi (Perusahaan)		6	
2.12.28	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal (Kebijakan)		2	1.690.000.000
2.12.28.01	Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	0	890.000.000
		Jumlah Pergub tentang Penanaman Modal yang disusun (dokumen)		2	
2.12.28.02	Penyusunan Kajian Pengembangan Potensi Daerah	Jumlah kajian potensi unggulan daerah (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	3	800.000.000
2.12.29	Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan	Tingkat kepuasan layanan advokasi dan informasi perizinan (%)		100	560.000.000
2.12.29.02	Pelayanan informasi perizinan	Jumlah layanan aplikasi perizinan yang dihasilkan (Aplikasi)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1	295.000.000
2.12.29.03	Pelayanan Advokasi Perizinan	persentase pengaduan yang diselesaikan (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	0	265.000.000
		Jumlah pengaduan yang diselesaikan (kasus)		15	
2.12.30	Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha	Jumlah perjanjian kerjasama penanaman modal (MoU)		3	1.360.000.000
2.12.30.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah event promosi (Event)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	1.145.000.000
2.12.30.02	Peningkatan Kerjasama Penanaman Modal	Jumlah pertemuan bisnis (Pertemuan Bisnis)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	5	215.000.000
2,13	Kepemudaan dan Olah Raga				21.829.447.000
2.13.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga				21.829.447.000
2.13.01.001	Dinas Pemuda dan Olah Raga				10.319.984.000
2.13.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		89,35	3.908.323.800
2.13.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	3.908.323.800
2.13.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	500.000.000
2.13.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	500.000.000
2.13.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		93	500.000.000
2.13.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	25	500.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.13.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		58,8	479.380.000
2.13.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	bru, bpn, smd, luarPrv	4	274.780.000
2.13.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	204.600.000
2.13.30	Program Pemberdayaan Kepemudaan	Persentase Pemuda Yang Difasilitasi Dalam Peningkatan Wawasan, Kapasitas Tenaga Sumberdaya Pemuda, Iptek dan Imtaq serta Kreativitas Pemuda (Persen)		0,35	896.260.000
2.13.30.09	Apresiasi Kreativitas Pemuda	Jumlah Kreatifitas Pemuda (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1333	233.700.000
2.13.30.10	Seleksi Jambore Pemuda Daerah	Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi Jambore Pemuda Daerah (Orang)	kkk	100	200.000.000
2.13.30.11	Pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia	Jumlah Pemuda yang dikirim mengikuti Jambore Pemuda Indonesia (Orang)	luarPrv	20	262.560.000
2.13.30.12	Sosialisasi dan Pelatihan Pemuda Anti Narkoba dan HIV/AIDS	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan pemuda anti narkoba dan HIV/AIDS (Orang)	smd	1000	100.000.000
2.13.30.16	Pelatihan Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda	Persentase jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan (%)	smd	20	100.000.000
2.13.31	Program Pengembangan Kepemudaan	Persentase Pemuda Kader Kepanduan, Kepeloporan, Keterlibatan dalam Pembinaan Sosial, Politik, Ekonomi, Kewirausahaan, Budaya dan Hukum (%)		0,08	550.000.000
2.13.31.04	Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah peserta, panitia, pelatih dan pembina yang terlibat dalam Paskibraka (orang)	smd, luarPrv	440	500.000.000
		Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dan pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional (Orang)		188	
2.13.31.06	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah pemuda yang terlibat dalam organisasi kepemudaan (Orang)	smd	500	50.000.000
2.13.32	Program Pembudayaan Keolahragaan	Persentase masyarakat yang berolahraga (%)		5,86	1.200.000.000
2.13.32.01	Pembinaan Olahragawan Berbakat	Jumlah atlet yang dibina (Orang)	smd	30	300.000.000
2.13.32.02	Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Jumlah pelajar mahasiswa dan masyarakat yang berpartisipasi (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	2800	400.000.000
2.13.32.03	Pemberian Penghargaan bagi Pelaku Olahraga Berdedikasi dan Berprestasi	Jumlah Olahragawan Penerima Penghargaan (Orang)	smd	677	500.000.000
2.13.33	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase Pelaku Olahraga Prestasi (%)		15,67	1.486.020.200
2.13.33.04	Partisipasi Event dan Multi Event olahraga	Jumlah kontingen kaltim dalam mengikuti event dan multi event olahraga (Orang)	luarPrv	1200	500.000.000
2.13.33.05	Peningkatan SDM Pelatih dan Wasit Olahraga	Jumlah SDM pelatih dan wasit olahraga yang berkompeten (Orang)	smd	140	313.420.200

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.13.33.06	Pelaksanaan Even dan Multi Even Olahraga	Jumlah peserta yang mengikuti event dan multi event olahraga (Orang)	smd	230	500.000.000
2.13.33.18	workshop Iptek Olahraga	Jumlah peserta yang mengikuti workshop (Orang)	smd	400	172.600.000
2.13.35	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Tercapainya pemuda Kaltim dalam berwirausaha (Persen)		1	800.000.000
2.13.35.01	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti peningkatan kompetensi berwirausaha (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	400	500.000.000
2.13.35.02	Pelatihan Kecakapan Hidup	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kecakapan hidup (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	100	300.000.000
2.13.01.002	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga				11.509.463.000
2.13.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPT (SKM) (%)		89,35	9.973.800.000
2.13.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	9.973.800.000
2.13.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		1	250.663.000
2.13.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	250.663.000
2.13.34	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah even olahraga yang memanfaatkan fasilitas olahraga di Stadion Utama dan Madya (Event)		35	1.285.000.000
2.13.34.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara (Gedung)	smd	3	1.285.000.000
2.14	Statistik				185.050.000
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika				185.050.000
2.10.01.001	Dinas Komunikasi dan Informatika				185.050.000
2.14.16	Program penguatan dan evaluasi data dan statistik	jumlah Kajian yang diselesaikan (Buku)		1	185.050.000
2.14.16.01	Pengumpulan data statistik daerah	Tersedianya data pembangunan daerah dan data pertumbuhan ekonomi yang akurat dan kredibel (buku)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	185.050.000
2.16	Kebudayaan				8.332.555.000
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				8.332.555.000
1.01.01.001	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				500.000.000
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sekolah mengembangkan budaya loka (Sekolah)		233	500.000.000
2.16.15.06	Pengembangan nilai budaya seni dan film	Terselenggaranya Pengembangan nilai budaya seni dan film (Kab / Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	500.000.000
1.01.01.235	UPTD Taman Budaya				4.159.355.000
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya Prov. Kaltim (Orang)		150	4.159.355.000
2.16.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terselenggaranya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	100	1.869.505.000
2.16.15.06	Pengembangan nilai budaya seni dan film	Terselenggaranya Pengembangan nilai budaya seni dan film (Kab / Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	100	889.850.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.16.15.09	Revitalisasi budaya daerah (DAK)	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada skpd dan unit kerja internal SKPD (Unit)	bru	35	1.400.000.000
1.01.01.237	UPTD Museum Negeri Mulawarman				3.673.200.000
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya Prov. Kaltim (Orang)		100	3.673.200.000
2.16.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terselenggaranya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Kab/Kota)	kkp	100	1.000.000.000
2.16.15.06	Pengembangan nilai budaya seni dan film	Terselenggaranya Pengembangan nilai budaya seni dan film (Kab / Kota)	kkp	100	1.000.000.000
2.16.15.10	Perekan Potensi Seni Budaya dan Sejarah Daerah (DAK)	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Laporan)	bru	0	1.673.200.000
2,17	Perpustakaan				6.155.254.000
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah				6.155.254.000
2.17.01.001	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah				6.155.254.000
2.17.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		86,3	2.400.000.000
2.17.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	smd	12	2.400.000.000
2.17.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		6	609.519.000
2.17.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur (%)	smd	100	125.000.000
2.17.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (bulan)	smd	12	484.519.000
2.17.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		93	700.000.000
2.17.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (bulan)	kbr, ktm, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	12	500.000.000
		Jumlah koordinasi dan konsultasi ke kelembagaan (kegiatan)		45	
2.17.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (ASN)	smd	40	200.000.000
2.17.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		96	172.732.000
2.17.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (dokumen)	smd	15	97.732.000
2.17.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (dokumen)	smd	7	75.000.000
2.17.23	Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	Jumlah masyarakat yang mendayagunakan perpustakaan (Pemustaka)		206600	1.475.000.000
2.17.23.01	Pengembangan Layanan Perpustakaan	Jumlah Pemustaka perpust. Konvensional (pemustaka)	smd	0	1.100.000.000
		Jumlah Pemustaka perpust. Digital (pemustaka)		0	
		Jumlah Kerjasama Perpustakaan (MoU)		0	
		Peningkatan Jumlah pemustaka Onsite (Pemustaka)		197800	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.17.23.02	Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan	Jumlah Kerjasama Perpustakaan (MoU)	smd	0	175.000.000
		Terbentuknya sistem otomasi perpustakaan dan kearsipan yang terintegrasi dan On-line (Anggota Jaringan)		0	
		.Peningkatan Jumlah pemustaka Online (Pemustaka)		8800	
2.17.23.03	Pengembangan Kerjasama Perpustakaan	Jumlah Kerjasama Perpustakaan (MoU)	smd	0	200.000.000
		Jumlah dokumen MoU dan PKS dibidang Perpustakaan dan Kearsipan (Mou/PKS)		10	
2.17.24	Program Depository, Pelestarian, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Jumlah pengembangan koleksi bahan perpustakaan (Judul)		4100	482.275.000
2.17.24.01	Pengelolaan Depository dan Alih Media Konten Lokal	Jumlah konten lokal yang berhasil dikumpulkan (Judul)	smd	0	132.275.000
		Jumlah konten lokal yang diolah (Judul)		0	
		Jumlah konten lokal yang dilestarikan (alihmedia) (Judul)		30	
2.17.24.02	Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Jumlah koleksi lokal yang berhasil dikumpulkan dan di alih medaikan (judul)	smd	0	250.000.000
		Jumlah Bahan Perpustakaan Yang dikembangkan dan dilestarikan (judul)		0	
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang diolah (judul)		0	
		Jumlah bahan perpustakaan yang dikembangkan (judul)		3500	
		Jumlah bahan pustaka yang dikonservasi (eksemplar)		56098	
2.17.24.03	Pengolahan dan Perawatan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang diolah (judul)	smd	450	100.000.000
		Jumlah perbaikan buku rusak (judul)		0	
		Jumlah penjilidan majalah (bundel)		0	
		Jumlah penjilidan surat kabar (bundel)		0	
2.17.26	Program Pegembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah Perpustakaan yang memenuhi standar (Perpustakaan)		20	315.728.000
2.17.26.01	Pembinaan, Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang dibina (perpustakaan)	smd	0	315.728.000
		jumlah Perpustakaan yang dikembangkan (perpustakaan)		0	
		Jumlah Tenaga Perpustakaan yang mengikuti Diklat (orang)		0	
		Jumlah Tenaga Fungsional Dan Tenaga Perpustakaan yg dibina dan dikembangkan (orang)		30	
		Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca (Kegiatan)		6	
		Jumlah Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan (Perpustakaan)		20	
2.18	Kearsipan				927.550.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah				927.550.000
2.17.01.001	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah				927.550.000
2.18.19	Program pengelolaan Arsip	Jumlah Arsip statis dan arsip hasil akuisisi yang terkelola dengan baik (berkas)		1100	327.550.000
2.18.19.01	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	Laporan hasil Akuisisi dan Pengelolaan Arsip (laporan)	smd	0	105.550.000
		Jumlah akuisisi arsip statis (berkas)		100	
		Jumlah Arsip Inaktif yang disusutkan (berkas)		1000	
2.18.19.02	Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip	Jumlah arsip yang dipelihara (lembar)	smd	700	100.000.000
2.18.19.03	Peningkatan Kualitas Layanan Kearsipan	Meningkatnya Jumlah Pengunjung Kearsipan (orang)	smd	60	122.000.000
2.18.25	Program Pembinaan Kearsipan	Jumlah lembaga instansi yang dibina (Lembaga/Instansi)		50	600.000.000
2.18.25.01	Pembinaan Internal dan Supervisi	Laporan pembinaan terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (laporan)	smd	0	200.000.000
		jumlah dokumen Peraturan/Kebijakan mengenai kearsipan (dokumen)		2	
		Jumlah pembinaan internal dan supervisi lembaga / instansi (Lembaga/Instansi)		40	
2.18.25.02	Pembinaan Eksternal dan Supervisi	Jumlah Pembinaan Eksternal, Supervisi dan Tata Kelola LKD Kab /Kota (LKD)	smd	10	200.000.000
2.18.25.03	Pembinaan, Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Kearsipan	Jumlah Tenaga Fungsional Dan Tenaga Kearsipan yg dibina dan dikembangkan (orang)	smd	20	200.000.000
3	Urusan Pilihan				464.455.394.000
3,01	Kelautan dan Perikanan				40.680.000.000
3.01.01	Dinas Kelautan Dan Perikanan				40.680.000.000
3.01.01.001	Dinas Kelautan Dan Perikanan				32.000.000.000
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		82	4.757.000.000
3.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	4.757.000.000
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	2.600.000.000
3.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Unit)	smd	40	1.000.000.000
3.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	1.600.000.000
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		20	2.215.000.000
3.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Maupun Dalam daerah (Kali)	smd	210	1.600.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek (Orang)	smd	35	615.000.000
		Jumlah Pakaian Dinas untuk PNS dan Non PNS (Stel)		225	
3.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)		0	900.000.000
		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai)		65	
3.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	bpn, smd	8	500.000.000
3.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)	bpn, smd	4	400.000.000
3.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		158938	8.600.000.000
3.01.21.08	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap yang Dibina (KUB)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd	60	3.500.000.000
		Indeks Kesejahteraan Nelayan (NTN)		100	
3.01.21.09	Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan	Jumlah Perizinan Kapal Ikan (Izin)	bpn, smd	200	1.100.000.000
3.01.21.10	Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan yang Operasional (Unit)	bru, ktm, ppu, bpn, btg, smd	6	4.000.000.000
3.01.25	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		161216	6.178.000.000
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita)		54	
3.01.25.01	Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah Unit Pembenihan yang bersertifikat CPiB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) (Unit)	bru, kkr, bpn, btg, smd	5	2.480.000.000
		Jumlah Unit Pembudidayaan Ikan yang bersertifikat CBiB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) skala kecil dan skala besar (Unit)		65	
		Jumlah Sampel Produk Perikanan Budidaya yang diuji minimal 96% bebas residu (Sampel)		60	
3.01.25.02	Kegiatan pengembangan usaha perikanan dan kelautan	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN))	bpn, smd	16	2.500.000.000
		Jumlah Bidang Lahan Budidaya yang disiapkan sertifikatnya (Bidang)		250	
		Indeks Kesejahteraan Pembudidaya Ikan (NTPi)		100	
3.01.25.03	Kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan produksi perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan dan Sertifikasi (UKM)	ktm, psr, ppu, smd	20	700.000.000
		Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran (Izin)		40	
3.01.25.04	Kegiatan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan (Promosi)	smd	4	498.000.000
		Volume Ekspor Perikanan (Ton)		2950	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.01.26	Program Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan yang di restorasi)		1	3.450.000.000
3.01.26.01	Kegiatan Pendayagunaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Lokasi Kawasan Laut & Wilayah Pesisir yang memiliki Rencana Zonasi dan Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Dokumen)	bru, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg	0	1.600.000.000
		Jumlah Wilayah Pesisir yang Memiliki Dokumen Perencanaan (Dokumen)		2	
		Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir yang Memiliki Rencana Pemanfaatan dan Pengelolaan yang Ditetapkan menjadi Pergub (Dokumen)		1	
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir yang Dibina/Difasilitasi (Kelompok Masyarakat)		3	
3.01.26.02	Kegiatan Reklamasi dan Jasa Kelautan	Jumlah Pelaku Investasi Jasa Kelautan yang difasilitasi (Pelaku Investasi)	kk, ktm, bpn, btg	3	900.000.000
3.01.26.03	Kegiatan Konservasi Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kawasan yang direhabilitasi (Hektare)	kk, psr, ppu	4	950.000.000
3.01.27	Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dai IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (Persen)		40,74	3.300.000.000
3.01.27.01	Kegiatan Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Penangkapan Ikan	Jumlah Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Penangkapan Ikan (Operasi)	bru, kkr, ktm, psr, bpn, btg, smd	10	1.700.000.000
3.01.27.02	Kegiatan Pengawasan, Pembudidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pengawasan Pembudidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Operasi)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	800.000.000
3.01.27.03	Kegiatan Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	Jumlah Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (Dokumen)	smd	2	800.000.000
3.01.01.002	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan				1.480.000.000
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (%)		82	647.000.000
3.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	647.000.000
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja UPTD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu (Unit)		3	314.000.000
3.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Unit)	smd	12	216.000.000
3.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	98.000.000
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		20	308.000.000
3.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Maupun Dalam daerah (Kali)	smd	19	220.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek (Orang)	smd	7	88.000.000
3.01.28	Program Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan (Sampel)		220	211.000.000
3.01.28.01	Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Sampel yang Dilakukan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (Sampel)	smd	220	150.000.000
3.01.28.02	Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Sampel yang Menerapkan Mutu Hasil Perikanan sesuai Standar (Sampel)	smd	220	61.000.000
3.01.01.003	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar				5.000.000.000
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (%)		82	795.000.000
3.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	bpn	12	795.000.000
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja UPTD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu (Unit)		3	208.000.000
3.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Unit)	bpn	12	100.000.000
3.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bpn	12	108.000.000
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		20	360.000.000
3.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah (Kali)	bpn	19	300.000.000
3.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek (Orang)	bpn	7	60.000.000
3.01.29	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Windu/Ikan Air Laut (Ekor)		2800000000	3.637.000.000
3.01.29.01	Peningkatan Kualitas Mutu Benih	Jumlah Komoditas benih udang windu/ ikan air laut yang berkualitas (komoditas)	bpn	5	300.000.000
3.01.29.02	Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau dan Laut serta Udang	Jumlah Unit Pembenuhan udang windu/ ikan air laut yang Operasional (Unit)	bpn	11	1.300.000.000
3.01.29.04	Rehab sarana dan prasarana perbenihan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di Rehab (Unit)	bpn	2	2.037.000.000
3.01.01.004	UPTD Sentra Pembenuhan Air Payau dan Air Laut Sebulu				2.200.000.000
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (%)		82	875.000.000
3.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	kkp	12	875.000.000
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja UPTD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu (Unit)		3	360.000.000
3.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Unit)	kkp	12	30.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	kkr	12	330.000.000
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		20	320.000.000
3.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah (Kali)	kkr	19	200.000.000
3.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek (Orang)	kkr	7	120.000.000
3.01.31	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau / Air Laut	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah / Ikan Air Laut (Ekor)		75000	645.000.000
3.01.31.01	Peningkatan Kualitas Mutu Benih	Jumlah Komoditas Spesifik Benih Udang Galah/ Ikan yang berkualitas (Komoditas)	kkr	2	600.000.000
3.01.31.02	Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau / Laut	Jumlah Unit Pembenihan Udang Galah dan Ikan Air Payau/Laut yang Operasional (Unit)	kkr	2	45.000.000
3,02	Pariwisata				19.000.000.000
3.02.01	Dinas Pariwisata				19.000.000.000
3.02.01.001	Dinas Pariwisata				19.000.000.000
3.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		100	2.900.000.000
3.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	2.900.000.000
3.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	1.500.000.000
3.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Item)	smd	20	800.000.000
3.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	700.000.000
3.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		60	1.200.000.000
3.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (Orang/Tahun)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	215	1.200.000.000
3.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (nilai AKIP)		80	1.200.000.000
3.02.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	bru, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	6	1.000.000.000
3.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	200.000.000
3.02.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (Kawasan)		2	4.100.000.000
3.02.16.01	Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah infrastruktur yang dibangun di destinasi pariwisata (Unit)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	5	2.600.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.02.16.02	Pengembangan destinasi unggulan alam dan buatan	Jumlah wisata alam dan buatan yang dikembangkan (Destinasi)	kk, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	500.000.000
3.02.16.04	Pengembangan destinasi unggulan bahari dan minat khusus	Jumlah wisata bahari dan khusus yang dikembangkan (Destinasi)	smd	3	1.000.000.000
3.02.17	Program Pengembangan Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata	Jumlah Destinasi Unggulan Provinsi yang dipromosikan (Destinasi)		10	2.800.000.000
3.02.17.01	Penguatan analisa pasar pariwisata	Jumlah laporan analisa pasar pariwisata (Laporan)	smd	2	400.000.000
3.02.17.02	Penguatan data dan informasi pariwisata	Jumlah data dan informasi pariwisata yang di umumkan (Jenis)	smd	10	400.000.000
3.02.17.03	Pengembangan promosi dan kerjasama pariwisata	Jumlah kerjasama dan promosi yang dilakukan (Kegiatan)	smd	9	2.000.000.000
3.02.18	Program Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata	Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dikembangkan (Orang)		660	1.800.000.000
3.02.18.01	Pemberdayaan masyarakat sadar wisata dan kampanye Sapta Pesona	Jumlah anggota kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang dilatih (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	250	500.000.000
3.02.18.02	Pengembangan pengendalian usaha sarana pariwisata	Jumlah pelaku usaha sarana pariwisata yang dibina (Orang)	bru, kbr, kkr, psr, smd	230	400.000.000
3.02.18.03	Peningkatan SDM dan profesionalisme usaha jasa pariwisata	Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dibina (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	180	900.000.000
3.02.19	Program Pengembangan Karya Seni Budaya dan Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif (orang)		350	3.500.000.000
3.02.19.01	Peningkatan kualitas dan kreatifitas seni budaya pertunjukan	Jumlah pelaku ekraf seni pertunjukan yang dilatih (Orang)	psr, bpn, smd	100	2.000.000.000
3.02.19.02	Pengembangan pengelolaan karya seni budaya	Jumlah pelaku seni budaya yang ditingkatkan karyanya (Orang)	smd	120	1.000.000.000
3.02.19.03	Pengembangan wisata budaya	Jumlah fasilitasi kegiatan dan peningkatan SDM bagi pelaku ekraf wisata budaya (Kegiatan)	smd	130	500.000.000
3.03	Pertanian				93.826.000.000
2.03.01	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				20.250.000.000
2.03.01.001	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				15.880.000.000
3.03.41	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)		247698	4.030.000.000
3.03.41.01	Peningkatan Produksi Hortikultura	Produktivitas tanaman hortikultura (Ton/Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2,17	2.550.000.000
3.03.41.02	Penanganan Pasca Panen dan Promosi Atas Hasil Pertanian Hortikultura	Jumlah produksi tanaman hortikultura yang disertifikasi (Unit)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	17	850.000.000
3.03.41.03	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Hortikultura	Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan (Kelompok Tani)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	150	630.000.000
3.03.51	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah produksi padi (Ton)		444000	11.850.000.000
3.03.51.03	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Luas tanam padi (Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	25000	9.000.000.000
3.03.51.04	Penanganan Pasca Panen dan Promosi Atas Hasil Pertanian Tanaman Pangan	Rata-rata percepatan penanganan pasca panen padi (Hari/Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	8	850.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.03.51.05	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	Peningkatan indeks pertanaman (IP)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1,6	2.000.000.000
2.03.01.002	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura				1.370.000.000
3.03.49	Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas Lahan yang Menggunakan Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat (Ha)		180	1.370.000.000
3.03.49.01	Sertifikasi Benih Unggul Pertanian	Jumlah sertifikat/label benih unggul (Label)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	6000	723.000.000
3.03.49.03	Monitoring dan Pengawasan Peredaran Benih	Jumlah rekomendasi produsen benih yang dikeluarkan (Rekomendasi)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	25	647.000.000
2.03.01.003	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura				1.264.000.000
3.03.48	Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas Serangan OPT (Ha)		6112	1.264.000.000
3.03.48.02	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Luas lahan yang dilaksanakan pengendalian OPT (Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	25000	910.000.000
3.03.48.03	Perbanyak Agens Hayati dan Petisida Ramah Lingkungan	Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan dan dilayani (Unit)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	72	354.000.000
2.03.01.004	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura				1.736.000.000
3.03.46	Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rata-rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Bersertifikat (%)		82	1.736.000.000
3.03.46.01	Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan	Jumlah produksi benih dasar dan pokok tanaman pangan yang bersertifikat (Ton)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	35	940.000.000
3.03.46.03	Peningkatan Produksi Benih Hortikultura	Jumlah Produksi Benih dasar dan pokok tanaman hortikultura yang bersertifikat (Batang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	6000	796.000.000
3.03.01	Dinas Perkebunan				37.276.000.000
3.03.01.001	Dinas Perkebunan				27.260.000.000
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		86	3.050.000.000
3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	kk, smd	12	3.050.000.000
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	1.302.000.000
3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan (Unit)	smd	21	202.000.000
3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	1.100.000.000
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		20	1.970.000.000
3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	smd	4	1.490.000.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)		4	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)		12	
3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	smd	50	480.000.000
		Jumlah pakaian dinas (Stel)		460	
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai)		70	1.085.000.000
3.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	smd	10	485.000.000
3.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	smd	4	600.000.000
3.03.58	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (karet) (Ton)		77763	15.600.000.000
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit) (ton)		17036402	
		Produksi Komoditi Perkebunan (kakao) (ton)		3771	
		Produksi Komoditi Perkebunan (Lada) (ton)		6434	
		Produksi Komoditi Perkebunan (Kelapa) (Ton)		12479	
		Produksi komoditas perkebunan (Ton)		17136849	
3.03.58.04	Kegiatan Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit) (Ton/Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, ppu, bpn, smd	20	5.000.000.000
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet) (Ton/Ha)		1,4	
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa) (Ton/Ha)		0,82	
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao) (Ton/Ha)		0,75	
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada) (Ton/Ha)		1,18	
3.03.58.05	Kegiatan Perluasan Komoditas Perkebunan	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit) (Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd	200	9.000.000.000
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada) (Ha)		100	
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa) (Ha)		20	
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao) (Ha)		100	
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet) (Ha)		200	
3.03.58.06	Pengembangan Kelembagaan Perkebunan	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk (unit)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, smd	24	1.600.000.000
3.03.76	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta ton CO ₂ eq)		4,07	977.000.000
3.03.76.04	Pengembangan EBT pada sektor Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi (PMS)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	3	345.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.03.76.05	Perlindungan Lahan Konservasi di Areal Perkebunan	Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi (Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	102000	287.000.000
3.03.76.06	Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan	Jumlah KTPA yang dibentuk dan dibina (KTPA)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	15	345.000.000
3.03.80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (Perusahaan)		35	1.026.000.000
3.03.80.04	Peningkatan Kemitraan Usaha Perkebunan	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan (koperasi)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	40	294.000.000
3.03.80.05	Penanganan Konflik Usaha Perkebunan	Jumlah konflik perkebunan yang terselesaikan (konflik)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	5	242.000.000
3.03.80.06	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Jumlah pelaku usaha yang dibina (perusahaan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	52	490.000.000
3.03.93	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah produk perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)		2	2.250.000.000
3.03.93.01	Pembinaan Pasca Panen Perkebunan	Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI (Kelompok Tani)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	4	852.000.000
3.03.93.02	Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan (Produk)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	3	763.000.000
3.03.93.03	Kegiatan Promosi Produksi Perkebunan	Jumlah promosi yang diikuti (event)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	635.000.000
3.03.01.002	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan				2.500.000.000
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		86	383.000.000
3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	383.000.000
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	849.000.000
3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan (Unit)	smd	21	436.000.000
3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	413.000.000
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		20	334.000.000
3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	kk, ktm, bpn, smd, luarPrv	4	170.000.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)		4	
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)		12	
3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	luarPrv	50	164.000.000
3.03.94	Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang beredar (Benih)		2945176	934.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.03.94.01	Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Benih	Persentase peredaran benih yang ilegal (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2,58	527.000.000
3.03.94.02	Pengujian dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang disertifikasi (Benih)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2000000	407.000.000
3.03.01.003	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan				2.800.000.000
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		86	590.000.000
3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	590.000.000
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	639.000.000
3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan (Unit)	smd	9	224.000.000
3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	415.000.000
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		20	352.000.000
3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	kk, ppu, bpn, smd, luarPrv	16	280.000.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)		28	
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)		12	
3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bintek (Orang)	luarPrv	7	72.000.000
3.03.95	Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rupiah)		1047138860	1.219.000.000
3.03.95.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Jumlah Lahan yang di Kendalikan (Ha)	bru, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, smd	220	598.000.000
3.03.95.02	Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH) dan Bio Pestisida (BP)	Jumlah APH yang Diperbanyak (Kg)	bru, kkr, ktm, bpn, smd	5000	621.000.000
		Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter)		500	
3.03.01.004	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan				4.716.000.000
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		86	460.000.000
3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	kk, smd	12	460.000.000
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	205.000.000
3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan (Unit)	kk, smd	3	29.000.000
3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	kk, smd	12	176.000.000
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		20	421.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	291.000.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)		4	
3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	50	130.000.000
3.03.88	Program penyediaan bahan tanaman	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)		90	3.630.000.000
3.03.88.03	Penyediaan Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (benih)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	132000	2.675.000.000
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit) (benih)		50000	
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (karet) (benih)		50000	
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa) (benih)		2000	
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao) (benih)		20000	
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren) (benih)		10000	
3.03.88.04	Penyediaan Benih Tanaman Semusim dan Rempah	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (benih)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	45000	955.000.000
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada) (benih)		25000	
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala) (benih)		10000	
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (sereh wangi) (benih)		10000	
3.03.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				36.300.000.000
3.03.02.001	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				26.000.000.000
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		82	3.000.000.000
3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang diproses (Surat)	smd	2700	3.000.000.000
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	1.970.000.000
3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan (Unit)	smd	135	470.000.000
3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki (Unit)	smd	80	1.500.000.000
		Luas gedung dan taman yang disediakan jasa kebersihannya (M2)		4427	
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		13	1.510.000.000
3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	164	1.200.000.000
3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (orang)	ppu, smd, luarPrv	18	310.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai)		79,36	1.100.000.000
3.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	smd, luarPrv	12	600.000.000
3.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	17	500.000.000
3.03.23	Program Hilirisasi Produk Peternakan	Peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (%)		12	1.300.000.000
3.03.23.02	Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan	Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan yang dilakukan pendampingan (Unit usaha)	kbr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2	300.000.000
3.03.23.03	Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan	Jumlah omset pemasaran produk peternakan dalam pameran/bazar (Rp)	bru, kbr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	175000000	650.000.000
3.03.23.04	Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak	Jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan dan pembinaan (Unit usaha)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	30	350.000.000
3.03.34	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP) (Konstanta)		118,5	8.170.000.000
		Jumlah Miniranch yang terregister (Unit)		40	
3.03.34.02	Pengembangan Kawasan Peternakan	Jumlah bibit hijauan Pakan Ternak (HPT) (Stek/Pols)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, btg, smd, luarPrv	100000	6.970.000.000
3.03.34.03	Pengembangan Informasi Peternakan	Jumlah Database, Statistik, NBM dan Data fungsi peternakan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	600.000.000
3.03.34.04	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah peternak debitur sektor peternakan (KTS, KUR, KKPE,dll) (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	55	600.000.000
3.03.89	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Jumlah kompartemen yang berstatus bebas penyakit jembrana (Unit)		40	2.450.000.000
3.03.89.01	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan	Jumlah hewan yang divaksinasi (ekor)	bru, kbr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10000	550.000.000
3.03.89.02	Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan	Jumlah Kab/kota yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	1.250.000.000
3.03.89.03	Penguatan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah hewan/ternak yang dilakukan pelayanan kesehatan hewan (ekor)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1450	650.000.000
3.03.90	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Angka Kelahiran Sapi (%)		20,5	6.500.000.000
		Calving Interval (Bulan)		17	
3.03.90.01	Pengembangan Perbibitan Ternak	Jumlah ternak sapi bibit yang memiliki SKLB (Sarat Keterangan Layak Bibit) (Ekor)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	120	5.000.000.000
		Service per Conception (Indeks)		1,7	
3.03.90.02	Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan (Kelompok)	bru, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2	1.000.000.000
3.03.90.03	Peningkatan Kelembagaan Peternak	Jumlah proposal permohonan bantuan yang diverifikasi (Proposal)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	16	500.000.000
3.03.02.002	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak				6.600.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		82	1.200.000.000
3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang diproses (Surat)	ppu	250	1.200.000.000
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	1.960.000.000
3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan (Unit)	ppu	20	260.000.000
3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki (Unit)	ppu	5	1.700.000.000
		Luas gedung dan taman yang disediakan jasa kebersihannya (M2)		1000	
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		13	540.000.000
3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	140	290.000.000
3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (orang)	ppu, smd, luarPrv	3	250.000.000
3.03.92	Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak	Peningkatan produksi bibit ternak (%)		10	2.900.000.000
		Persentase produksi bibit ternak berkualitas (%)		12	
3.03.92.03	Pembangunan/Perbaikan UPTD PIB Api-Api dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung (Unit)	ppu	1	1.000.000.000
3.03.92.04	Peningkatan Produksi Bibit dan Benih Ternak	Jumlah Kelahiran Sapi Bibit dan Rusa Bibit (Ekor)	kk, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	40	950.000.000
3.03.92.05	Peningkatan Produksi dan Bibit Hijauan Pakan Ternak	Produksi HPT (Ton)	ppu, smd, luarPrv	750	950.000.000
		Jumlah bibit HPT yang diproduksi (Stek/Pols)		5000	
3.03.02.003	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				3.700.000.000
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		82	900.000.000
3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang diproses (Surat)	smd	270	900.000.000
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	460.000.000
3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan (Unit)	smd	8	160.000.000
3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki (Unit)	smd	49	300.000.000
		Luas gedung dan taman yang disediakan jasa kebersihannya (M2)		686	
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		13	340.000.000
3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	47	260.000.000
3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	smd, luarPrv	7	80.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.03.91	Program Penyidikan dan Pengujian Kewan dan Kesmavet	Peningkatan pemeriksaan sampel penyidikan penyakit hewan dan produk asal hewan (%)		13	2.000.000.000
3.03.91.01	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan	Jumlah sampel penyakit hewan (sampel)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5224	800.000.000
3.03.91.02	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel produk asal hewan (sampel)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	851	1.100.000.000
3.03.91.03	Pembangunan/Perbaikan UPTD Laboratorium Kewan dan Kesmavet dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung (Unit)	smd	1	100.000.000
3.04	Kehutanan				237.499.394.000
3.04.01	Dinas Kehutanan				237.499.394.000
3.04.01.001	Dinas Kehutanan				70.888.994.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	3.375.000.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, smd	12	3.375.000.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	1.800.000.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	700.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	1.100.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	1.800.000.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, bpn, btg, smd, luarPrv	12	1.500.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	177	300.000.000
3.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai AKIP)		70	1.280.000.000
3.04.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	10	650.000.000
3.04.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5	630.000.000
3.04.16	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Realisasi Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan (Milyar Rupiah)		170	3.008.900.000
3.04.16.01	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan	Persentase realisasi produksi hasil hutan kayu (realisasi/target) (%)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	70	1.000.000.000
3.04.16.02	Pendampingan Penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA	Jumlah IUPHHK-HA yang menerapkan RIL / RIL C (IUPHHK-HA)	bru, kbr, ktm, mah, ppu, bpn, smd, luarPrv	2	700.000.000
3.04.16.03	Perencanaan dan Tata Hutan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Tata Hutan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, bpn, smd, luarPrv	9	800.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.16.05	Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Persentase penanganan tertib Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) pada Unit Manajemen (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	80	508.900.000
3.04.39	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Persentase tutupan lahan Meningkat (%)		13,98	1.194.000.000
3.04.39.05	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, bpn, smd, luarPrv	38500	220.000.000
3.04.39.15	Pengelolaan DAS	Jumlah DAS/SUB DAS yang dimonitoring (DAS/SUB DAS)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	4	660.000.000
3.04.39.16	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Laporan Peredaran dan Pengadaan Bibit (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd, luarPrv	10	314.000.000
3.04.41	Program Perlindungan dan KSDAE	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan (%)		1,5	782.100.000
3.04.41.24	Pengendalian dan Pengamanan Hutan	luas hutan yang dimanfaatkan tanpa izin yang semakin berkurang (Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1050	153.900.000
3.04.41.25	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Luas Areal Kebakaran Hutan yang Semakin Menurun (Ha)	bru, kbr, psr, bpn, smd, luarPrv	24000	108.900.000
3.04.41.26	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang Meningkat (Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5000	519.300.000
3.04.42	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat (Ha)		32000	1.820.000.000
3.04.42.36	Penyuluhan Kehutanan	Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, bpn, smd, luarPrv	5	700.000.000
3.04.42.37	Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Luas permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan (Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, smd, luarPrv	35000	700.000.000
		Unit Usaha Masyarakat Hutan (Unit)		10	
3.04.42.38	Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat	Luas pembinaan wilayah Hutan Adat/Hutan Hak (Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	48,85	420.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		5	1.581.250.000
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah kegiatan temu teknis KTH, Sekolah Lapangan, Pemberdayaan KTH, Lomba Wana Lestari (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	553.025.000
		Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan (Laporan)		4	
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah laporan monev kegiatan penyuluh (Laporan)	kbr, kkr, ktm, psr, ppu, smd	15	250.000.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (Peserta)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	773025000	528.225.000
		Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		5	
		Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		5	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.43.10	Penyusunan program (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen program identifikasi dan penyuluhan (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1	250.000.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		35	2.918.750.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, bpn, smd, luarPrv	4	1.750.750.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, bpn, smd, luarPrv	6	1.168.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	5.217.380.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhoustraining/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	3	468.500.000
3.04.45.08	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	15	594.000.000
3.04.45.12	Monitoring dan Evaluasi Operasional Pemadaman dan Penanganan Paska Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah money operasional pemadaman dan penanganan paska kebakaran hutan dan lahan (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	50	671.550.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	4	559.510.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Laporan)	mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	44	1.002.551.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	20	1.003.765.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pembinaan Perhutanan Sosial (Laporan)	bru	0	376.654.000
3.04.45.25	Perencanaan Strategi dan Ketatausahaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen perencanaan strategi dan ketatausahaan (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	3	540.850.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		39	1.782.620.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	13	532.620.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	36	1.250.000.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		200	7.498.572.500
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman (Hektar)	kkp, ppu, smd, luarPrv	200	809.100.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	kkp, ppu, smd, luarPrv	350	5.539.472.500
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Money RHL (Laporan)	kkp, ppu, smd, luarPrv	25	1.150.000.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih (SK/Sertifikat)		5	2.001.427.500
		Jumlah Bibit (Bibit)		15800	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	smd	15800	550.000.000
3.04.48.10	Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan (DBH DR)	Jumlah penyelenggaraan sertifikasi perbenihan (sertifikasi)	mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	5	201.427.500
3.04.48.11	Pembinaan perbenihan tanaman hutan (bimtek, monev, pelayanan perijinan dan peningkatan kualitas SDM) (DBH DR)	Jumlah Pembinaan perbenihan tanaman hutan (bimtek, monev, pelayanan perijinan dan peningkatan kualitas SDM) (Kegiatan)	mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	3	1.250.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		36	33.850.577.225
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,95	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1611386,43	33.850.577.225
3.04.52	Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Persentase Realisasi Keuangan DBH SDA DR meningkat (%)		27,5	978.416.775
3.04.52.01	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	3	978.416.775
3.04.01.002	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto				6.768.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	1.089.000.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	1.089.000.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	195.000.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	87.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	108.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	223.000.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	kkr, smd, luarPrv	12	115.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	bpn, smd, luarPrv	114	108.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		4	350.000.000
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan (Laporan)	kkr, smd, luarPrv	8	350.000.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		5	750.000.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi (Laporan)	kkr, ppu, smd, luarPrv	10	750.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	2.500.000.000
3.04.45.13	Investigasi Sebab-Sebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah investigasi sebab-sebab kebakaran hutan dan lahan (Laporan)	kkr, ppu, smd, luarPrv	8	150.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Unit)	kk, smd	6	250.000.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	kk, smd	50	250.000.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	kk, ppu, smd, luarPrv	50	150.000.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	kk, ppu, smd, luarPrv	5	250.000.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Laporan)	kk, ppu, smd, luarPrv	72	600.000.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	kk, ppu	70	550.000.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	kk, ppu	5	150.000.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)	kk, ppu	24	150.000.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		2	700.000.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	kk, ppu	8	200.000.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	kk, ppu, smd, luarPrv	25	500.000.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		86	700.000.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman (Hektar)	kk, ppu, smd, luarPrv	300	100.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	kk, ppu, smd, luarPrv	300	500.000.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL (Laporan)	kk, ppu, smd, luarPrv	7	100.000.000
3.04.50	Program Pengelolaan Tahura	Luas Kawasan Hutan Tahura yang dikelola (Hektar)		150	261.000.000
3.04.50.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas penataan kawasan hutan konservasi di tingkat tapak dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan secara lestari (Ha)	smd, luarPrv	150	163.000.000
3.04.50.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Penanganan degradasi dan deforestasi serta konflik tenurial (Hektar)	kk, ppu, smd, luarPrv	150	98.000.000
3.04.01.003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat				6.768.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	810.000.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru, smd, luarPrv	12	810.000.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	282.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bru	12	28.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bru	12	254.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	287.000.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	bru, bpn, smd, luarPrv	12	282.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	bru	42	5.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		5	200.000.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah kelompok tani hutan yang diberikan pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan (Kelompok Tani Hutan)	bru, smd, luarPrv	5	200.000.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		4	300.000.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi (Laporan)	bru, bpn, smd, luarPrv	6	150.000.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	bru, smd, luarPrv	10	150.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	1.525.000.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	bru, bpn, smd, luarPrv	305	225.000.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Tersusunnya Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan dan Investigasi Penyebab Kebakaran (Laporan)	bru, bpn, smd, luarPrv	10	100.000.000
		Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)		300	
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Tersusunnya laporan pelaksanaan sosialisasi/kampanye pencegahan (Laporan)	bru, bpn, smd	8	150.000.000
		Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)		8	
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Laporan)	bru, bpn, smd	30	400.000.000
		Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)		30	
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Terlaksananya Posko Siaga, dan Pemadaman (Laporan)	bru, bpn, smd	24	400.000.000
		Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)		24	
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	bru, bpn, smd, luarPrv	8	100.000.000
3.04.45.23	Deteksi Dini (DBH SDA DR)	Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)	bru, bpn, smd, luarPrv	1	50.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Darkarhutla (Kegiatan)	bru	8	100.000.000
		Terselenggaranya Kegiatan Penetapan Posko Darkarhutla (Kegiatan)		8	
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		5	600.000.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	bru, smd	12	100.000.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	bru, smd, luarPrv	12	100.000.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	bru, smd	24	400.000.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		200	675.000.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	bru, smd, luarPrv	200	100.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	bru, smd, luarPrv	200	500.000.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL (Laporan)	bru, smd, luarPrv	1	75.000.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih (SK/Sertifikat)		8	200.000.000
		Jumlah Bibit (Bibit)		25000	
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	bru, smd, luarPrv	16000	200.000.000
		Terselenggaranya Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)		16000	
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		8	1.889.000.000
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,9	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	bru, smd, luarPrv	20	200.000.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		8	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	bru, smd, luarPrv	100	189.000.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		4	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	bru, bpn, smd, luarPrv	786021	1.500.000.000
3.04.01.004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan				7.140.400.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	1.000.000.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bpn	12	1.000.000.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	321.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bpn	12	151.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bpn	12	170.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	247.000.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	bpn	12	200.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	bpn	45	47.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		2	500.000.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL (Laporan)	kbr, bpn, luarPrv	4	100.000.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) (Laporan)	kbr, psr, ppu, luarPrv	3	100.000.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)	kbr, psr, ppu	5	300.000.000
		Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		5	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		3	350.000.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi (Laporan)	kbr, bpn, luarPrv	5	350.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	1.550.000.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhoustraining/Pyegara n/B imbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ pyegaran/ bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	kbr, bpn, luarPrv	2	100.000.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	kbr	4	250.000.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	kbr	100	100.000.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	kbr, psr, ppu	15	100.000.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	kbr, psr, ppu	20	400.000.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	kbr, psr, ppu	5	400.000.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	kbr, psr, ppu	9	100.000.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)	kbr, psr, ppu	5	100.000.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		6	570.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	kbr, psr, ppu, bpn, smd	5	150.000.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	ppu, bpn	6	420.000.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (hektar)		100	680.000.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman (Hektar)	kbr, bpn, smd, luarPrv	300	80.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	kbr, bpn, smd, luarPrv	300	500.000.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)	kbr, bpn, luarPrv	9	100.000.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih (SK/Sertifikat)		1	150.000.000
		Jumlah Bibit (Bibit)		12000	
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	kbr, psr, ppu	38500	150.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		2	1.772.400.000
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,9	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	kbr, psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	75	150.000.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		8	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	ppu, bpn, smd, luarPrv	300	122.400.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		4	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	kbr, psr, ppu	350	1.500.000.000
3.04.01.005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus				21.868.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	1.000.000.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bpn, smd, luarPrv	12	1.000.000.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	318.000.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bpn	12	168.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bpn	12	150.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	250.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	bpn, smd, luarPrv	12	150.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	bpn, luarPrv	38	100.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		5	400.000.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL (Laporan)	kbr, kkr, ppu, bpn, luarPrv	5	200.000.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (Peserta)	bru	500	200.000.000
		Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		5	
		Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		5	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		2	400.000.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi (Laporan)	kbr, kkr, ppu, bpn, smd, luarPrv	8	200.000.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	kbr, kkr, ppu, smd, luarPrv	8	200.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	2.084.875.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhoustraining/Penyegaran n/B imbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ penyegaran/bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	kbr, kkr, ppu, bpn, luarPrv	2	250.000.000
3.04.45.09	Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Gerakan Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kegiatan)	kbr, kkr, ppu, smd, luarPrv	2	250.000.000
3.04.45.10	Penerapan Agroforestry, Agrosilvopastura, Silvopastura dan Kegiatan Sejenisnya (DBH SDA DR)	Luas Kegiatan Agroforestry, Agrosilvopastura, Sylvopastura (Hektar)	kkr, ppu	70	250.000.000
3.04.45.14	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Laporan)	kbr	20	684.875.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	kbr	5	350.000.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)	kbr	6	200.000.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kebutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		6	650.000.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	kbr, ppu, smd, luarPrv	10	150.000.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	kbr, kkr, ppu, bpn, luarPrv	36	500.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		100	1.050.000.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	kbr, kkr, ppu, smd, luarPrv	360	100.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	kbr, kkr, ppu, bpn, smd, luarPrv	360	850.000.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL (Laporan)	kbr, kkr, psr, ppu, bpn	7	100.000.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih (SK/Sertifikat)		1	200.000.000
		Jumlah Bibit (Bibit)		10000	
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	kbr	50000	200.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		2	15.515.125.000
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,9	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	kbr, kkr, psr, ppu, smd	200	150.000.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		5	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	kbr, kkr, ppu, smd	50	150.000.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		2	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	kbr	5032922000	15.215.125.000
3.04.01.006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo				6.958.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	990.000.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	psr	12	990.000.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	436.000.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	psr	12	130.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	psr	12	306.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	270.000.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	psr	12	200.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	psr	42	70.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		4	450.000.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	75.000.000
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	75.000.000
3.04.43.07	Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot (DBH DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	75.000.000
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan spras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	75.000.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) (Laporan)	psr	1	150.000.000
		Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (Peserta)		450	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		10	400.000.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan dan Fasilitasi Perhutanan Sosial (Laporan)	psr	5	200.000.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	psr	4	200.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	1.376.550.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhoustraining/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ penyegaran/ bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	psr	4	100.000.000
3.04.45.14	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.45.17	Pembuatan Sekat Kanal, Embung dan Kantong Air (DBH SDA DR)	Tersedianya Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan (Unit)	psr	2	100.000.000
		Jumlah sekat kanal, embung dan kantong air (Unit)		2	
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Terlaksananya sosialisasi, syvopastura, kampanye, dan patroli (Laporan)	psr	8	150.000.000
		Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)		8	
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan (laporan)	psr	30	400.000.000
		Terselenggaranya kegiatan gerakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kegiatan)		30	
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Terlaksananya Posko Siaga, dan Pemadaman (Laporan)	psr	10	300.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)		10	
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Terselenggaranya kegiatan pembentukan regu perbantuan DALKARHUTLA (Regu/MPA)	psr	4	100.000.000
		Jumlah pendampingan (Laporan)		4	
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Terselenggaranya Kegiatan Penetapan Posko Darkarhutla (Kegiatan)	psr	4	76.550.000
		Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)		4	
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		1	643.450.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	psr	6	100.000.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	psr	5	75.000.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	psr	41	468.450.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		100	580.000.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	psr	500	80.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	psr	500	400.000.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah money deforestasi dan degradasi hutan dalam Rangka Mitigasi Perubahan Iklim (Laporan)	psr	12	100.000.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit (Bibit)		25000	50.000.000
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha) Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		6 1,9	1.762.000.000
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	psr	20	128.000.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		2	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	psr	200	134.000.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		6	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Terkelolanya Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Hektar)	psr	300	1.500.000.000
		Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)		100	
3.04.01.007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan				6.768.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	776.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	776.000.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	251.000.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	81.000.000
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)		12	
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	170.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	276.000.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	bru, kkr, ktm, bpn	12	189.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	smd, luarPrv	45	87.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		3	525.000.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL (Laporan)	ktm, btg	3	50.000.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) (Laporan)	kk, ktm, btg, smd	4	50.000.000
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah Kegiatan Temu Teknis KTH, Sekolah Lapang, Pemberdayaan KTH, Lomba Wana Lestari (Laporan)	kk, ktm, btg	3	50.000.000
		Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan (Laporan)		3	
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) (Laporan)	kk, ktm, btg, smd	4	50.000.000
3.04.43.07	Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot (DBH DR)	Jumlah Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot (Unit/Demplot)	kk, ktm, btg	2	50.000.000
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan spras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah Pemenuhan kebutuhan spras penyuluhan kehutanan (Unit/Demplot)	kk, ktm, btg	2	75.000.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (Peserta)	kk, ktm, btg	30	150.000.000
		Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		3	
		Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		3	
3.04.43.10	Penyusunan program (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen program identifikasi dan penyuluhan (dokumen)	kk, ktm, btg	1	50.000.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		10	350.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi (Laporan)	kk, ktm, btg	7	100.000.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Sosial (Laporan)	kk, ktm, btg	12	250.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	1.550.000.000
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhoustraining/Pyegaran/B imbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ penyegaran/bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	kk, smd	3	50.000.000
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	smd, luarPrv	5	150.000.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	bru	50	100.000.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	bru	4	100.000.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	kk, ktm, btg, smd	24	500.000.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	bru, kk, ktm, btg, smd	20	400.000.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.45.23	Deteksi Dini (DBH SDA DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan (Unit)	bru	0	50.000.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		1	500.000.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	kk, ktm, btg, smd, luarPrv	4	100.000.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	kk, ktm, btg, smd, luarPrv	5	100.000.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	kk, smd	13	300.000.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		300	670.000.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	ktm, btg	300	70.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	kk, ktm, btg	300	500.000.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL (Laporan)	kk, ktm, btg	8	100.000.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit (Bibit)		10000	100.000.000
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	kk, btg, smd	10000	100.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Presentase Pengelolaan Kawasan Hutan (%)		1,9	1.770.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		1	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	kk, ktm, btg, smd	60	400.000.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		11	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	kk, smd	250	65.000.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		1	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	kk, ktm, btg, smd	1217304	1.305.000.000
3.04.01.008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan				6.983.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	1.200.000.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	kk	12	1.200.000.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	283.000.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	kk	12	133.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	kk	12	150.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	250.000.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	kk	12	150.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	kk	140	100.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		2	275.000.000
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan sapsr penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah Pemenuhan kebutuhan sapsr penyuluhan kehutanan (Unit/Demplot)	kk	9	75.000.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (Peserta)	kk	300	200.000.000
		Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		2	
		Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		2	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		5	370.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Pemenuhan kebutuhan sapsras penyuluhan kehutanan (Unit/Demplot)	kkr	9	200.000.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	kkr	11	170.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	1.800.000.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhoustraining/Pyegaran/B imbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ pyegaran/ bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	kkr	12	100.000.000
3.04.45.09	Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Gerakan Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kegiatan)	kkr	11	100.000.000
3.04.45.13	Investigasi Sebab-Sebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah investigasi sebab-sebab kebakaran hutan dan lahan (Laporan)	kkr	2	100.000.000
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Unit)	kkr	4	150.000.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	kkr	200	100.000.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	kkr	5	100.000.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	kkr	36	500.000.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	kkr	39	400.000.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	kkr	5	100.000.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)	kkr	10	100.000.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		5	500.000.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	kkr	10	100.000.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	kkr	40	400.000.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		340	680.000.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman (Hektar)	kkr	400	80.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	kkr	400	500.000.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL (Laporan)	kkr	4	100.000.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit (Bibit)		100000	100.000.000
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	kkr	100000	100.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		4	1.525.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,9	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	kkp	20	150.000.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		8	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	kkp	200	100.000.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		2	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	kkp	998119,49	1.275.000.000
3.04.01.009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon				21.759.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	790.000.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	ktm	12	790.000.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	440.000.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	ktm	12	125.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	ktm	12	315.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	249.000.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	ktm, smd, luarPrv	12	200.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya (Stell)	ktm	65	49.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		5	361.580.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	100.000.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) (Laporan)	ktm, smd, luarPrv	3	50.000.000
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah laporan monev kegiatan penyuluh (Laporan)	ktm, smd, luarPrv	2	68.000.000
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan spras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (Peserta)	ktm, smd, luarPrv	60	93.580.000
		Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		3	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		3	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		2	361.325.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi (Laporan)	ktm, smd, luarPrv	2	214.325.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	ktm, smd, luarPrv	2	147.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	1.750.000.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/ Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ penyegaran/ bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	ktm, smd, luarPrv	7	100.000.000
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Unit)	ktm, smd, luarPrv	10	100.000.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	ktm, smd, luarPrv	11	100.000.000
3.04.45.17	Pembuatan Sekat Kanal, Embung dan Kantong Air (DBH SDA DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	ktm, smd, luarPrv	300	100.000.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	ktm, smd, luarPrv	8	100.000.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	ktm, smd, luarPrv	12	500.000.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	ktm, smd, luarPrv	15	500.000.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	ktm, smd, luarPrv	4	100.000.000
3.04.45.23	Deteksi Dini (DBH SDA DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan Inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan (Laporan)	ktm, smd, luarPrv	0	50.000.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		4	650.000.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	ktm, smd, luarPrv	4	150.000.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	ktm, smd, luarPrv	4	500.000.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		600	1.227.095.000
3.04.47.01	Perencanaan	Jumlah laporan Inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan (Laporan)	ktm, smd	0	127.095.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	ktm, smd, luarPrv	600	1.000.000.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	jumlah kegiatan monev (laporan)	ktm, smd, luarPrv	5	100.000.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit (Bibit)		50000	150.000.000
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	Terselenggaranya Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	ktm, smd, luarPrv	23500	150.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		2	15.780.000.000
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,9	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	ktm, smd, luarPrv	100	170.000.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		10	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	ktm, smd, luarPrv	100	110.000.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		1	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	ktm, smd, luarPrv	50	15.500.000.000
3.04.01.010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau				6.768.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	700.000.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	kbr	12	700.000.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	350.000.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	kbr	12	150.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	kbr	12	200.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	318.000.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	bru, kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	12	218.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	bru, kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	24	100.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		5	718.630.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan kegiatan RHL (Laporan)	kbr, mah, smd	10	50.000.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Laporan Pendampingan, Pembentukan, Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (Laporan)	kbr, mah, smd	5	50.000.000
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah Kegiatan Temu Teknis KTH, Sekolah Lapang, Pemberdayaan KTH, Lomba Wana Lestari (Laporan)	bru, kbr, mah, ppu, bpn, smd, luarPrv	4	71.350.000
		Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan (Laporan)		20	
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah laporan monev kegiatan penyuluh (Laporan)	kbr, mah, smd	40	60.960.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.43.07	Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot (DBH DR)	Jumlah Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot (Unit/Demplot)	mah, smd, luarPrv	4	50.000.000
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan sapsras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	bru, mah, bpn, smd, luarPrv	6	336.320.000
		Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (Peserta)		150	
		Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		5	
		Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		5	
3.04.43.10	Penyusunan program (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen program identifikasi dan penyuluhan (dokumen)	mah, bpn, smd	6	50.000.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		5	400.000.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi (Laporan)	mah, bpn, smd, luarPrv	10	200.000.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	mah, bpn, smd, luarPrv	4	200.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	1.331.370.000
3.04.45.11	Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Dokumen Pembentukan & Pembinaan Brigade (Dokumen)	mah, smd	1	50.000.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	mah, bpn, smd, luarPrv	5	279.920.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	mah, bpn, smd, luarPrv	7	451.450.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	mah, bpn, smd, luarPrv	4	300.000.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)	mah, bpn, smd	4	100.000.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		10	700.000.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	mah, bpn, smd	5	100.000.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	klbr, mah, bpn, smd, luarPrv	5	100.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	mah, bpn, smd, luarPrv	60	500.000.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		64	650.000.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	100	100.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	kbr, smd	100	500.000.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL (Laporan)	mah, bpn, smd	10	50.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		9	1.600.000.000
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,9	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	mah, bpn, smd, luarPrv	200,895	200.000.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		3	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	kbr, mah, smd	10	200.000.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		4	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	bru, mah, bpn, smd, luarPrv	200000	1.200.000.000
3.04.01.011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara				6.768.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		85	720.000.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	12	720.000.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		1	262.000.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bru, smd, luarPrv	12	72.000.000
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)		12	
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bru	12	190.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		85	400.000.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	bru, smd, luarPrv	12	200.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	bru, smd, luarPrv	41	200.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		5	272.600.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) (Laporan)	bru	6	183.600.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan sapras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah Pemenuhan kebutuhan sapras penyuluhan kehutanan (Unit/Demplot)	bru	3	89.000.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		4	400.000.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi (Laporan)	bru	12	200.000.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Sosial (Laporan)	bru, smd, luarPrv	3	200.000.000
		Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)		3	
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	1.936.780.000
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan (Unit)	bru	30	100.000.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	bru	112	619.390.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	bru	2000	92.640.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	bru	12	200.000.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	bru	20	350.000.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	bru	20	400.000.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	bru	8	100.000.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)	bru	10	74.750.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		5	640.620.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Terselenggaranya Patroli Pengamanan Hutan (Laporan)	bru	10	100.000.000
		Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)		10	
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	bru, smd, luarPrv	20	100.000.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	bru	20	440.620.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		50	100.000.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	bru	200	100.000.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih (SK/Sertifikat)		8	150.000.000
		Jumlah Bibit (Bibit)		25000	
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	150.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan (%)		1,95	1.886.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		8	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	bru, bpn, smd, luarPrv	300	204.000.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		6	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	bru, smd, luarPrv	1000	182.000.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		1	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	bru	300000	1.500.000.000
3.04.01.012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah				6.768.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	741.000.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	5	741.000.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	378.000.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bru	8	270.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bru, smd, luarPrv	12	108.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	331.000.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	bru, bpn, smd, luarPrv	12	223.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya (Stell)	bru, bpn, smd, luarPrv	30	108.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		5	322.600.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan (Kelompok Tani Hutan (KTH))	bru	2	183.600.000
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan sapras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah Pemenuhan kebutuhan sapras penyuluhan kehutanan (Unit/Demplot)	bru	4	89.000.000
3.04.43.10	Penyusunan program (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen program identifikasi dan penyuluhan (dokumen)	bru	4	50.000.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		4	350.000.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi (Laporan)	bru	6	150.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	bru	2	200.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	1.857.400.000
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	bru	84	700.000.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	bru	100	87.400.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	bru	6	100.000.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	bru	8	350.000.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	bru	8	420.000.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	bru	8	100.000.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan Inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan (Laporan)	bru	0	50.000.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		5	600.000.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	bru, bpn, smd	6	100.000.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	bru, smd	10	100.000.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	bru	12	400.000.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		50	520.000.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	bru	50	85.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	bru	50	435.000.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih (SK/Sertifikat)		8	150.000.000
		Jumlah Bibit (Bibit)		250000	
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	bru	4000	150.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		8	1.518.000.000
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,95	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	bru, bpn, smd, luarPrv	25	166.000.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		2	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	bru, smd, luarPrv	25	152.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		1	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	bru	100	1.200.000.000
3.04.01.013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai				6.768.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		85	380.000.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	12	380.000.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	562.000.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bru	12	450.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bru	12	112.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		85	392.000.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	bru	12	200.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	bru	36	192.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		5	239.000.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan (Kelompok Tani Hutan (KTH))	bru	8	150.000.000
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan spras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Tersedianya kebutuhan spras penyuluhan kehutanan (Unit/Demplot)	bru	4	89.000.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		4	400.000.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi (Laporan)	bru	12	200.000.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	bru	15	200.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	1.836.250.000
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	bru	341	600.000.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	bru	100	91.640.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	bru	8	133.980.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	bru	20	360.630.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	bru	20	400.000.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	bru	8	150.000.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan Inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan (Laporan)	bru	0	50.000.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		5	600.000.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	bru	8	100.000.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	bru	12	100.000.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	bru	24	400.000.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		200	424.750.000
3.04.47.01	Perencanaan	Jumlah laporan Inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan (Laporan)	bru	0	50.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	bru	200	374.750.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih (SK/Sertifikat)		6	200.000.000
		Jumlah Bibit (Bibit)		4000	
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	bru	4000	200.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		2	1.734.000.000
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		0,25	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	bru, smd, luarPrv	20	234.000.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		8	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	bru	100	200.000.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		4	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	bru	14651553	1.300.000.000
3.04.01.014	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar				6.768.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	800.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	ktm	12	800.000.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	215.000.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	ktm	12	60.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	ktm	12	155.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	353.000.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, per, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	12	200.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	ktm, bpn, smd, luarPrv	22	153.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		5	267.495.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah kelompok tani yang diberikan pendampingan, pembentukan, peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan dan kelompok tani yang dilakukan pembinaan pengelolaan Usaha Perhutanan Sosial dan Kemitraan (Kelompok Tani Hutan)	ktm	4	50.200.000
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluh (Laporan)	kbr	5	63.850.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (Peserta)	bru	60	103.445.000
		Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		4	
		Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		4	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		2	376.985.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan dan Fasilitasi Perhutanan Sosial (Laporan)	ktm	10	235.835.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	ktm	5	141.150.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	1.709.365.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhoustraining/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	ktm, bpn, smd, luarPrv	2	126.402.500
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Unit)	ktm	2	50.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	ktm	714	450.000.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	ktm	50	100.000.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	bru	2	116.100.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	bru	20	500.000.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	ktm	30	334.562.500
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)	ktm	3	32.300.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		2	394.815.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi (Laporan)	ktm	2	94.815.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan (laporan)	ktm	12	300.000.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		100	601.340.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	ktm	100	31.040.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	ktm	100	500.000.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah move deforestasi dan degradasi hutan dalam Rangka Mitigasi Perubahan Iklim (Laporan)	ktm	3	70.300.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit (Bibit)		16300	150.000.000
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	ktm	23500	150.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		2	1.900.000.000
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	ktm	100	200.000.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		2	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	ktm	50	200.000.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		2	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	ktm	50	1.500.000.000
3.04.01.015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau				6.768.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		85	712.000.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	ktm, smd	12	712.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	326.000.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	ktm, smd	12	170.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	ktm, smd	12	156.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		85	330.000.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	ktm, smd	12	200.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	ktm, smd	40	130.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		3	350.000.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan (Laporan)	ktm	4	80.000.000
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah laporan movev kegiatan penyuluh (Laporan)	ktm	14	50.000.000
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan sapsras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah Pemenuhan kebutuhan sapsras penyuluhan kehutanan (Unit/Demplot)	ktm	5	70.000.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (Peserta)	ktm	225	100.000.000
		Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		3	
		Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		3	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		10	200.000.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi (Laporan)	ktm	10	100.000.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	ktm	5	100.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	1.900.000.000
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan (Unit)	ktm	5	50.000.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Penyegaran/B imbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ penyegaran/bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	ktm	5	100.000.000
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Unit)	ktm	40	100.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Unit)	ktm	1510	400.000.000
3.04.45.17	Pembuatan Sekat Kanal, Embung dan Kantong Air (DBH SDA DR)	Jumlah sekat kanal, embung dan kantong air (Unit)	ktm	1	50.000.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	ktm	50	100.000.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	ktm	12	100.000.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	ktm	24	400.000.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	ktm	20	300.000.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	ktm	10	100.000.000
3.04.45.23	Deteksi Dini (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)	ktm	1	100.000.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)	ktm	10	100.000.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		2	700.000.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	ktm	10	100.000.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	ktm	10	100.000.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	ktm	24	500.000.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		350	450.000.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	ktm	550	75.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	ktm	400	300.000.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah monev deforestasi dan degradasi hutan dalam Rangka Mitigasi Perubahan Iklim (Laporan)	ktm	15	75.000.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit (Bibit)		200000	150.000.000
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	ktm	35000	100.000.000
3.04.48.11	Pembinaan perbenihan tanaman hutan (bimtek, monev, pelayanan perijinan dan peningkatan kualitas SDM) (DBH DR)	Jumlah Pembinaan perbenihan tanaman hutan (bimtek, monev, pelayanan perijinan dan peningkatan kualitas SDM) (Kegiatan)	ktm	5	50.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		1	1.650.000.000
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,95	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	kbr, kkr, ktm, bpn, smd, luarPrv	60	200.000.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		11	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Terkelolanya Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Hektar)		60	
		Terlaksananya pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		11	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	kbr, ktm, bpn, smd, luarPrv	250	200.000.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		1	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	ktm	100	1.250.000.000
3.04.01.016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam				6.968.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		85	1.200.000.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	1.200.000.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	289.000.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	169.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	120.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		85	229.000.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	luarPrv	12	150.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	smd	70	79.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		2	250.000.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan (Kelompok Tani Hutan (KTH))	kkp	2	50.000.000
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan sapsras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) (Laporan)	kkp	2	150.000.000
		Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (Peserta)		2	
		Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		2	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		2	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		3	300.000.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi (Laporan)	kkp	6	200.000.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	kkp	3	100.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	1.720.000.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/ Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ penyegaran/bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	kkp	3	100.000.000
3.04.45.09	Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.45.13	Investigasi Sebab-Sebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Unit)	kkp	11	400.000.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	kkp	2	100.000.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	kkp	6	88.780.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Tersusunnya laporan hasil kegiatan sosialisasi (Laporan)	kkp	4	100.000.000
		Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)		4	
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Tersusunnya Laporan kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Laporan)	kkp	21	431.220.000
		Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)		21	
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	kkp	10	200.000.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	kkp	2	100.000.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Terselenggaranya Kegiatan Penetapan Posko Darkarhutla (Kegiatan)	kkp	3	100.000.000
		Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)		3	
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		2	450.000.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	kkp	6	100.000.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	kkp	12	350.000.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		100	680.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	kkr	50	80.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	kkr	100	550.000.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit (Bibit)		50000	100.000.000
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	kkr	50000	100.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Presentase Pengelolaan Kawasan Hutan (%) Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		20 2	1.750.000.000
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	kkr	100	150.000.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		2	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	kkr, bgt, smd, luarPrv	200	100.000.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		2	
		Tertanganinya kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Hektar)		200	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Tertanganinya pengawasan, pengendalian pengelolaan hutan, pemanfaatan (Laporan)	kkr	2	1.500.000.000
		Jumlah laporan inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perizinan (Laporan)		1	
		Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)		200	
3.04.01.017	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai				6.768.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	900.000.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	kbr, kkr, mah, smd, luarPrv	12	900.000.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	270.000.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	kbr, smd, luarPrv	12	120.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	kbr	12	150.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		85	298.000.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	kbr	12	200.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	kbr	32	98.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		5	469.040.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL (Laporan)	kbr, mah, smd	11	150.000.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan (Kelompok Tani Hutan (KTH))	kbr, mah, smd	10	100.000.000
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan (Laporan)	kbr, mah, smd, luarPrv	5	69.040.000
		Tersusnya laporan metode dan materi penyuluhan (Laporan)		5	
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan spras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		5	300.000.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan dan Fasilitasi Perhutanan Sosial (Laporan)	kbr, mah, smd, luarPrv	10	150.000.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	kbr, mah, smd, luarPrv	10	150.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	1.830.960.000
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan (Unit)	kbr, mah, psr, smd, luarPrv	204	50.000.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhoustraining/Pyegaran n/B imbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ penyegaran/ bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	kbr, kkr, mah, psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	5	50.000.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	600.000.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	kbr, mah	100	100.000.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	kbr, mah	10	100.000.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	kbr, mah	16	480.000.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	kbr, mah	10	350.960.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan Inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan (Laporan)	bru	0	50.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		10	700.000.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	kbr, mah, smd, luarPrv	15	100.000.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	kbr, mah, smd, luarPrv	10	100.000.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	kbr, mah, smd, luarPrv	15	500.000.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		250	500.000.000
3.04.47.01	Perencanaan	Jumlah laporan Inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan (Laporan)	bru	0	50.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	kbr, mah, smd, luarPrv	250	450.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		9	1.500.000.000
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,95	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	15	150.000.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		15	
		Terkelolanya Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Hektar)		15	
		Terlaksananya pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		15	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	kbr, mah, bpn, smd	10	150.000.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		4	
		Tertanganinya kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Hektar)		10	
		Tersedianya unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		4	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	181,037	1.200.000.000
		Tereselenggaranya pengelolaan kawasan hutan (Hektar)		181,037	
3.04.01.018	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatan				6.768.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	900.000.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	kbr	12	900.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	318.000.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	kbr, mah, smd	12	168.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	kbr	12	150.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	300.000.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	12	200.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	kbr, bpn, smd, luarPrv	32	100.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		10	350.000.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL (Laporan)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	10	150.000.000
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan sapras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		4	300.000.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi (Laporan)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	10	150.000.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	6	150.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	1.575.000.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhoustraining/Penyegara n/B imbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	1	50.000.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	kbr, ktm, mah, psr, smd, luarPrv	226	425.000.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	kbr, mah, smd, luarPrv	400	100.000.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	kbr, mah, psr, smd, luarPrv	10	100.000.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	15	400.000.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	10	300.000.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	kbr, mah, psr, smd, luarPrv	10	100.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	10	100.000.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		10	600.000.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	15	100.000.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	15	100.000.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	20	400.000.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		250	675.000.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	250	75.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	250	500.000.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	jumlah kegiatan monev (laporan)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	6	100.000.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit (Bibit)		10000	100.000.000
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	10000	100.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		9	1.650.000.000
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,95	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	15	150.000.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		15	
		Terkelolanya Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Hektar)		15	
		Terlaksananya pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		15	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	10	100.000.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		4	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	64,726	1.400.000.000
3.04.01.019	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake				6.768.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	900.000.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	psr, ppu	12	900.000.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		1	268.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	psr, ppu, smd, luarPrv	12	58.000.000
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)		12	
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	12	210.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	300.000.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	12	200.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	70	100.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		2	250.000.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL (Laporan)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	5	100.000.000
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah laporan monev kegiatan penyuluh (Laporan)	psr, ppu, luarPrv	10	50.000.000
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan sapsr penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah Pemenuhan kebutuhan sapsr penyuluhan kehutanan (Unit/Demplot)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	42	50.000.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (Peserta)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	150	50.000.000
		Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		2	
		Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		2	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		2	150.000.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi (Laporan)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	5	150.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	1.850.000.000
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan (Unit)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	1	50.000.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhoustraining/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	2	50.000.000
3.04.45.14	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Unit)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	0	100.000.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	25	600.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	100	50.000.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	psr, ppu, bpn, smd	8	100.000.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	20	500.000.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	10	300.000.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	8	50.000.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		2	600.000.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Terselenggaranya Patroli Pengamanan Hutan (Laporan)	psr, ppu, bpn, luarPrv	10	100.000.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	10	50.000.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	psr, ppu	12	450.000.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		100	650.000.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	100	100.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	psr, ppu, smd, luarPrv	100	500.000.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL (Laporan)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	10	50.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		4	1.800.000.000
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,9	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	psr, ppu, smd, luarPrv	50	150.000.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		5	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	100	150.000.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		2	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	mah, psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	294,694	1.500.000.000
3.04.01.020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan				6.950.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	1.200.000.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bpn	12	1.200.000.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	300.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bpn	12	150.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bpn, smd, luarPrv	12	150.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	250.000.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	12	150.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya (Stell)	bpn, smd, luarPrv	30	100.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		5	330.950.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL (Laporan)	bpn	5	130.950.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Laporan Pendampingan, Pembentukan, Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (Laporan)	bpn	4	100.000.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (Peserta)	bpn	5	100.000.000
		Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		4	
		Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		4	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		2	150.000.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi (Laporan)	bpn	5	150.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	1.933.047.500
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhoustraining/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	bpn	5	125.000.000
3.04.45.09	Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Gerakan Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kegiatan)	bpn	3	100.000.000
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Unit)	bpn	70	100.000.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	bpn	444	500.000.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	bpn	5	90.000.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi (Laporan)	bpn	10	100.000.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah kegiatan patroli kebakaran (Kegiatan)	bpn	40	547.040.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	bpn	50	171.007.500
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	bpn	8	100.000.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Darkarhutla (Kegiatan)	bpn	10	100.000.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		5	418.312.500
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	bpn	4	100.000.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	bpn	4	318.312.500
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		50	667.690.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman (Hektar)	bpn	50	96.940.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	bpn	50	500.000.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL (Laporan)	bpn	10	70.750.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih (SK/Sertifikat)		1	100.000.000
		Jumlah Bibit (Bibit)		50000	
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	bpn	34800	100.000.000
3.04.53	Program Pengelolaan KPH Lindung	Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung (Ha)		10000	1.600.000.000
3.04.53.11	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Penataan Kawasan Hutan Lindung di Tingkat Tapak dan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Secara Lestari (Ha)	bpn, smd, luarPrv	10000	100.000.000
3.04.53.12	Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung di Tingkat Tapak Secara Lestari (Ha)	bpn, smd, luarPrv	10000	100.000.000
3.04.53.13	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) (DBA SDA DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	kbr, bpn, smd, luarPrv	15	1.400.000.000
3.04.01.021	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook				6.768.000.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		85	699.000.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	kbr	12	699.000.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	449.000.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	kbr	12	294.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	kbr, smd, luarPrv	12	155.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		85	300.000.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	kbr, smd, luarPrv	12	200.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	kbr, bpn, smd, luarPrv	21	100.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		5	535.310.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL (Laporan)	mah	6	110.960.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan (Kelompok Tani Hutan (KTH))	mah	5	50.000.000
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan (Laporan)	mah	10	74.350.000
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.43.07	Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot (DBH DR)	Jumlah Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot (Unit/Demplot)	mah	1	50.000.000
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan spras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah Pemenuhan kebutuhan spras penyuluhan kehutanan (Unit/Demplot)	mah	4	150.000.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		6	300.000.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi (Laporan)	mah, smd, luarPrv	20	150.000.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Sosial (Laporan)	mah, smd, luarPrv	10	150.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	1.739.690.000
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan (Unit)	kbr, mah, smd, luarPrv	140	400.000.000
3.04.45.11	Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Dokumen Pembentukan & Pembinaan Brigade (Dokumen)	kbr, mah	3	134.540.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	0	50.000.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	mah	30	100.000.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	mah	10	100.000.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	mah	10	455.150.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	mah	10	300.000.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	mah	10	100.000.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)	mah	10	100.000.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		10	700.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	mah	10	100.000.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	mah, smd, luarPrv	10	100.000.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	mah, smd, luarPrv	20	500.000.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		30	525.000.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	mah	30	100.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	mah	30	350.000.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL (Laporan)	mah	6	75.000.000
3.04.53	Program Pengelolaan KPH Lindung	Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung (Ha)		15	1.520.000.000
3.04.53.11	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Penataan Kawasan Hutan Lindung di Tingkat Tapak dan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Secara Lestari (Ha)	mah, bpn, smd, luarPrv	15	200.000.000
3.04.53.12	Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung di Tingkat Tapak Secara Lestari (Ha)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	10	120.000.000
3.04.53.13	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) (DBA SDA DR)	Luas kawasan hutan lindung yang dikelola (Hektar)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	200	1.200.000.000
3.05	Energi dan Sumber Daya Mineral				60.000.000.000
3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				60.000.000.000
3.05.01.001	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				60.000.000.000
3.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran (%)		0	3.500.000.000
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	
3.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	3.500.000.000
3.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya disiplin aparatur (%)		0	820.000.000
		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		0	
		Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	
3.05.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	smd	5	400.000.000
3.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	420.000.000
		Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Unit)		100	
3.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah (%)		90	1.200.000.000
		Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	
3.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat konsultasi keluar daerah (Kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	28	1.000.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah kegiatan rapat/koordinasi/konsultasi ke dalam daerah (Kali)		12	
3.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	bpn, smd, luarPrv	35	200.000.000
3.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah (%)		0	1.000.000.000
		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai AKIP)		69	
3.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	8	500.000.000
3.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd, luarPrv	12	500.000.000
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Laporan)		12	
3.05.37	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah KK berlistrik (KK) Persentase Rasio Desa Berlistrik (RD) (%)		1018607 0	2.200.000.000
3.05.37.01	Pembangunan Ketenagalistrikan	Penambahan Desa/Kelurahan berlistrik (Desa)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	2	700.000.000
3.05.37.06	Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan	Jumlah perusahaan yang mendapat Rekomendasi teknis (Perusahaan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	50	750.000.000
3.05.37.07	Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan	Jumlah perusahaan yang menerapkan Keselamatan ketenagalistrikan (Perusahaan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	50	750.000.000
3.05.45	Program Pengembangan Sumberdaya Geologi dan Tata Lingkungan	Persentase perusahaan yang mengikuti kaidah perhitungan sumberdaya dan cadangan (%)		74	1.950.000.000
3.05.45.01	Pemetaan dan perhitungan Sumberdaya Geologi	Jumlah Inventarisasi dan verifikasi Sumberdaya dan Cadangan Batubara, Mineral yang CnC (Perusahaan)	bru, kkr, ktm, ppu, bpn	515	800.000.000
3.05.45.02	Pembinaan dan Pengawasan Air Tanah	Jumlah rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan air tanah (Rekomtek)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	100	400.000.000
		Jumlah sosialisasi (kali)		0	
		Jumlah sumur yang diawasi (Sumur)		100	
3.05.45.03	Pengawasan Mutu dan Muka Air Tanah	Jumlah peta konservasi air tanah CAT (Peta)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	0	750.000.000
		Data mutu/muka air tanah (Kab/Kota)		10	
		Sumur Pantau (Sumur)		2	
		Peta zona konservasi air tanah (CAT)		2	
3.05.46	Program Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar dalam pelaksanaan dokumen RKAB (Perusahaan)		50	2.300.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.05.46.01	Pembinaan dan Pengawasan Teknis Minerba	Ketaatan perusahaan dalam melaksanakan K3, pemantauan dan pengelolaan lingkungan dan Teknis Pertambangan (Perusahaan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd	0	900.000.000
		Jumlah perusahaan yang memenuhi standar K3 dan Lingkungan (Perusahaan)		70	
3.05.46.02	Pembinaan dan Pengawasan perusahaan minerba	Jumlah perusahaan CnC yang menerapkan efisiensi bahan bakar dan penggunaan biodiesel 20% (Perusahaan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd	40	500.000.000
3.05.46.03	Pembinaan dan Pengawasan Produksi Minerba	Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik (Perusahaan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd	0	900.000.000
		Jumlah perusahaan yang memenuhi kewajiban pembayaran Royalty (Perusahaan)		120	
3.05.47	Program Diversifikasi dan Konservasi Energi	% Pemanfaatan EBT (%)		6,08	47.030.000.000
3.05.47.01	Pengembangan dan pemanfaatan Bioenergi	Jumlah Rumah Tangga yang dibangun Instalasi biogas (Rumah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	30	1.050.000.000
3.05.47.02	Pengembangan dan Pemanfaatan Aneka Energi	Desa yang dialiri listrik Energi Terbarukan (Desa)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	3	45.500.000.000
3.05.47.03	Konservasi Energi dan Air	Jumlah penyalur BBM bersubsidi (penyalur)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	50	480.000.000
		Jumlah penyalur LPG bersubsidi (penyalur)		50	
		Jumlah instansi yang melakukan upaya efisiensi listrik dan air (Instansi)		26	
3.06	Perdagangan				6.950.000.000
2.11.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				6.950.000.000
2.11.01.001	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				5.550.000.000
3.06.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Barang Beredar SNI wajib Yang Diawasi. (%)		5	2.750.000.000
3.06.15.01	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	jumlah konsumen yang teredukasi (orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1000	1.000.000.000
3.06.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah Barang dan Jasa yang sesuai Ketentuan (Barang/Jasa)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	22	865.000.000
3.06.15.08	Koordinasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	jumlah pengaduan Konsumen yang dapat diselesaikan (pengaduan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	30	885.000.000
3.06.34	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Nilai ekspor produk non migas dan non batubara (milyar USdollar)		1,57	2.800.000.000
3.06.34.01	Perdagangan Dalam Negeri	Rata-rata Rentang Waktu Kecukupan Stok Barang dan Barang Penting (bulan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5	1.000.000.000
3.06.34.02	Perdagangan Luar Negeri	Jumlah Eksportir yang mendapatkan fasilitasi (Eksportir)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	70	1.000.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.06.34.03	Kerjasama Perdagangan	jumlah UKM yang menjalin Kerjasama Perdagangan (UKM)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	12	800.000.000
2.11.01.002	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang				1.400.000.000
3.06.33	Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	Presentasi peningkatan jumlah customer yang dilayani (%)		10	1.400.000.000
3.06.33.01	Penerapan dan Pengamanan Standarisasi Jaminan Mutu Barang	Peningkatan Kapasitas laboratorium Pengujian, Kalibrasi dan lembaga Sertifikasi (Komoditi dan Ruang lingkup)	smd	20	700.000.000
3.06.33.02	Pelayanan Jasa teknis pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	Peningkatan, Pelayanan jasa teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi (Sertifikat)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1968	700.000.000
3.07	Perindustrian				5.600.000.000
2.11.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				5.600.000.000
2.11.01.001	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				5.600.000.000
3.07.33	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Pertumbuhan industri olahan (%)		1	5.600.000.000
3.07.33.03	Perencanaan Pembangunan Industri	Jumlah perusahaan industri di kawasan peruntukan industri/ kawasan industri (Perusahaan)	bru, ktm, ppu, bpn, btg, smd	2	2.000.000.000
3.07.33.04	Pengembangan dan Pembinaan Industri	jumlah industri yg difasilitasi pengembangan (unit)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	32	3.000.000.000
3.07.33.05	Pengembangan Informasi Industri	Jumlah Data dan Informasi yang tersedia (data)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10500	600.000.000
3.08	Transmigrasi				900.000.000
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				900.000.000
2.01.01.001	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				900.000.000
3.08.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Kawasan Transmigrasi (Kimtrans)		4	900.000.000
3.08.15.02	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Kesepakatan Bersama dengan provinsi lain (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd	3	100.000.000
3.08.15.03	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang Disediakan Sarana dan Prasarana Sosial (Kimtrans)	kk, ktm, mah, psr, ppu	1	350.000.000
3.08.15.11	Sinkronisasi dan Integrasi Rencana Kawasan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	Terciptanya Perencanaan dan Dokumen Usulan Program Transmigrasi se Kalimantan Timur (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu	3	300.000.000
3.08.15.12	Koordinasi Ketransmigrasian	Terciptanya Perencanaan dan Dokumen Usulan Program Transmigrasi se Kalimantan Timur (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu	100	75.000.000
3.08.15.14	Evaluasi Penyediaan Tanah Transmigrasi	Tersedianya Lahan Transmigrasi (Dokumen)	mah, psr, smd, luarPrv	3	75.000.000
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				428.513.627.759
4.01	Sekretariat Daerah				235.441.346.000
4.01.03	Sekretariat Daerah				146.439.648.000
4.01.03.001	Biro Umum				90.306.479.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		80	19.890.183.872
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd		19.890.183.872
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	34.937.750.066
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	smd		10.505.800.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd		24.431.950.066
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		70	27.454.155.292
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah (Kegiatan)	smd		25.893.405.292
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi (Orang)	smd		1.560.750.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		74	90.939.381
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	smd		66.266.303
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran (Dokumen)	smd		24.673.078
4.01.30	Program Pelayanan Tata Usaha Umum	jumlah bulan pelaksanaan administrasi tata usaha umum (bulan)			3.133.450.389
4.01.30.01	Pelayanan Administrasi Biro	jumlah PNS (orang)	smd		800.000.000
4.01.30.02	Pengelolaan Arsip dan Dokumen Setda	jumlah arsip/dokumen inaktif yang telah ditata dengan baik (dokumen)	smd		600.000.000
4.01.30.03	Pelayanan Tata Usaha Pimpinan	Jumlah surat pimpinan yang terdistribusi tepat waktu (Dokumen)	smd		533.450.389
4.01.30.04	Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda	Jumlah Dokumen Rapergub dan Kepgub yang disusun (dokumen)	smd, luarPrv	2	800.000.000
		jumlah laporan rekonsiliasi belanja pegawai (dokumen)		12	
		jumlah laporan rekonsiliasi perjadi (dokumen)		12	
4.01.30.05	Pelayanan Verifikasi dan Pelaporan Keuangan Setda	jumlah laporan realisasi anggaran dan register SPM (dokumen)	smd, luarPrv	11	400.000.000
		jumlah ASN yang mengikuti di lingkup SETDA (orang)		45	
4.01.40	Program Pelayanan Sarana Prasarana Rumah Tangga Setda	jumlah sarana dan prasarana untuk pelayanan rumah tangga (buah)		220	4.800.000.000
4.01.40.01	Pengelolaan Barang Aset Setda	jumlah gedung yang terkelola dengan baik (buah)	smd		800.000.000
		Jumlah Gedung Aset Setda Yang Dikelola (Gedung)		8	
4.01.40.02	Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	jumlah kegiatan pimpinan yang terlaksana dengan baik (acara)	smd		4.000.000.000
4.01.03.002	Biro Hubungan Masyarakat				15.693.445.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		95	1.882.269.709

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	1.882.269.709
		Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)		1703317000	
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	359.064.996
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	smd	12	210.000.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	149.064.996
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	920.110.040
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah (Kegiatan)	smd	12	643.610.040
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kontribusi BIMTEK (Kegiatan)	smd	24	276.500.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		75	18.500.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	smd	2	10.000.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran (Dokumen)	smd	4	8.500.000
4.01.37	Program Peningkatan dan Pembinaan Kerjasama	Persentase Kerja Sama Yang Ditindaklanjuti (Persen)		90	1.372.155.550
4.01.37.01	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah	Laporan kerjasama dengan lembaga non perintah (Laporan)	smd	24	358.700.000
4.01.37.02	Peningkatan dan Pembinaan Administrasi Kerjasama	Jumlah Administrasi Kerjasama yang Terdokumentasi (Dokumen)	smd	24	435.622.730
4.01.37.03	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Laporan kerjasama antar perintah (laporan)	smd	24	577.832.820
4.01.88	Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan	Persentase Penurunan Berita Negatif (Persen)		5	8.251.407.680
4.01.88.02	Kerjasama media	Jumlah kerjasama media (Media Massa)	smd	24	531.560.000
4.01.88.03	Penyelenggaraan Peliputan dan Publikasi	Jumlah berita positif yang terpublikasi (Berita)	smd	1210	7.056.989.370
4.01.88.04	Penyediaan Data dan Informasi	Jumlah sistem penyedia data dan Informasi (2)	smd	27	662.858.310
4.01.90	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Persentase pelayanan Keprotokolan sesuai dengan SOP Keprotokolan (%)		95	2.889.937.025
4.01.90.03	Pelayanan Tamu dan Pimpinan Keprotokolan	Jumlah Tamu Pemda (Instansi)	smd	109	690.940.000
4.01.90.04	Penatacaraan kegiatan Pemda	Jumlah Kepenatacaraan kegiatan pemda yang terjadwalkan (Kegiatan)	smd	121	2.198.997.025
4.01.03.003	Biro Hukum				5.366.757.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		83	468.572.580
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	468.572.580
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	182.585.462
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Kendaraan, alat kantor (Unit)	smd		145.100.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)			
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	smd		37.485.462
		Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana (Bulan)			
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		70	373.549.034
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah (Kegiatan)	smd		348.549.034
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur (Jumlah)	smd		25.000.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		75	12.150.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	smd		6.500.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran (Dokumen)	smd		5.650.000
4.01.26	Program Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah	Peraturan Daerah yang mendorong peningkatan perekonomian daerah (Perda) (perda)		10	878.750.000
4.01.26.01	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Perda Provinsi	Terwujudnya Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Perda)	smd	10	878.750.000
4.01.28	Program Peningkatan Produk Hukum Daerah Provinsi	Peraturan Gubernur yang Diterapkan (Pergub) (pergub)		9	900.000.000
4.01.28.01	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur	Terwujudnya Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Produk Hukum Daerah (Produk Hukum)	smd	650	800.000.000
4.01.28.02	Evaluasi Peraturan Gubernur yang ditetapkan	Jumlah Peraturan Gubernur yang di Evaluasi (Pergub)	smd	5	100.000.000
4.01.29	Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase masyarakat yang memperoleh akses informasi hukum (%) (%)		70	300.000.000
4.01.29.01	Peningkatan Jaringan Informasi Hukum dan Publikasi Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Penyebar Luasan Publikasi Informasi Hukum (Jumlah)	smd	660	300.000.000
4.01.32	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum Kabupaten/Kota yang ditetapkan (peraturan)		260	751.149.924
4.01.32.01	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	Jumlah Fasilitasi, Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota (Jumlah)	smd	250	751.149.924
4.01.33	Program Pelayanan Bantuan Hukum	Persentase kasus hukum yang diselesaikan (%)		90	1.050.000.000
4.01.33.01	Peningkatan Palayanan Bantuan Hukum	Advice dan pertimbangan hukum Penyelesaian Sengketa yang diberikan kepada OPD/Masyarakat dengan cepat dan sesuai aturan yang berlaku (%)	smd		800.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.01.33.02	Peningkatan Penyelesaian Sengketa	Terpenuhinya Kepuasan masyarakat terhadap Kepastian Hukum, penyelesaian Perkara dengan cepat (%)	smd	76	250.000.000
4.01.36	Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	Persentase lembaga di Kabupaten/Kota Peduli HAM (%)		90	350.000.000
4.01.36.01	Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	Pembinaan Kab/Kota Peduli HAM dan Sadar akan Hukum dan HAM (%)	smd	84	350.000.000
4.01.45	Program Identifikasi dan Evaluasi Produk Hukum	Peraturan Daerah yang diterapkan (Perda) (perda)		20	100.000.000
4.01.45.01	Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan	Terwujudnya Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Daerah yang telah ditetapkan (Perda)	smd	10	100.000.000
4.01.03.004	Biro Organisasi				7.418.228.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		95	517.770.021
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Laporan Administrasi Perkantoran (Laporan)	smd	23	517.770.021
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	363.790.298
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	smd	3	329.500.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan / Kelengkapan Kantor yang dipelihara (Unit)	smd	3	34.290.298
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	2.092.667.633
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi yang telah dilakukan (Laporan)	smd, luarPrv	1	1.942.667.633
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang telah mengikuti bimbingan teknis/diklat (Orang)	smd, luarPrv	8	150.000.000
4.01.42	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase PD yang telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (%)		71	1.100.000.000
4.01.42.03	Penerapan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Survey (Laporan)	smd, luarPrv	1	400.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey yang direviu (Laporan)		1	
4.01.42.04	Peningkatan Tata Laksana Pelayanan Publik	Jumlah Nominasi (Nominasi)	smd, luarPrv	3	700.000.000
4.01.51	Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian Setda	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan sesuai aturan (%)		100	150.000.000
4.01.51.01	Penataan Administrasi Kepegawaian Setda	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Setda (Dokumen)	smd, luarPrv	1	150.000.000
4.01.53	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi (Skor)		71,5	1.150.000.000
4.01.53.01	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Laporan)	smd, luarPrv	1	1.000.000.000
		Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)		1	
4.01.53.02	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang difasilitasi pembentukan kelompok Budaya Kerja (PD)	smd, luarPrv	38	150.000.000
		Laporan hasil evaluasi dan penilaian penerapan budaya kerja (Laporan)		1	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Dokumen Hasil Evaluasi dan Penilaian Penerapan Budaya Kerja (Dokumen)		1	
4.01.60	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang memperoleh predikat minimal B (BAIK) (%)		77	797.315.881
4.01.60.01	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim (Laporan)	smd, luarPrv	1	797.315.881
		Laporan Kinerja Setda Prov. Kaltim (Laporan)		0	
		Laporan Fasilitasi Evaluasi AKIP (Laporan)		1	
		Pergub Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Pergub)		0	
		Pergub Penyusunan Petunjuk Teknis PK dan LKJIP (Pergub)		0	
		Laporan Capaian Kinerja berdasarkan PK (Laporan)		1	
		Jumlah PD yang terfasilitasi pelaksanaan SAKIP (PD)		38	
4.01.80	Program Penguatan Kelembagaan	Prosentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan NSPK (%)		92	946.684.167
4.01.80.05	Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi kelembagaan (PD)	smd, luarPrv	0	382.000.000
		Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi kelembagaan (PD)			
		Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi/evaluasi kelembagaan (PD)		38	
4.01.80.07	Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Kab/Kota yang dilakukan Fasilitasi kelembagaannya (Kab/Kota)	smd, luarPrv		300.000.000
		Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penguatan kelembagaan (Kab/Kota)		10	
4.01.80.08	Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Laporan Analisis Jabatan (Laporan)	smd, luarPrv	0	264.684.167
		Laporan Analisis Beban Kerja (Laporan)		0	
		Dokumen Analisis Jabatan yang disusun (Dokumen)		1	
		Dokumen Analisis Beban Kerja yang disusun (Dokumen)		1	
4.01.81	Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yg telah Menyusun SOP Sesuai Ketentuan / Aturan (%)		78,95	300.000.000
4.01.81.02	Peningkatan Tata Laksana Pemerintahan	Laporan SOP (Laporan)	smd, luarPrv		300.000.000
		Laporan Evaluasi (Laporan)			
		Jumlah SOP Perangkat Daerah yang diverifikasi (SOP)		2400	
4.01.03.005	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah				6.099.177.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		85	1.012.265.250
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	1.012.265.250

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki Kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	262.650.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Kendaraan, alat kantor (Unit)	smd	2	227.650.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Kendaraan, alat kantor (Unit)	smd	2	35.000.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		60	698.112.500
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi yang telah dilakukan (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	12	640.112.500
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang telah mengikuti bimbingan teknis/diklat (Orang)	bpn, smd, luarPrv	5	58.000.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		77	5.250.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	smd	2	4.200.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan (Dokumen)	smd	1	1.050.000
4.01.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase Pelayanan KDH Sesuai SOP (%)		100	506.047.500
4.01.16.16	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kedinasan Pej. Negara, PAW Anggota DPRD Prov. Dan Kab/Kota	Laporan kedinasan pejabat negara (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	506.047.500
4.01.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Tapal Batas Wilayah Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan (%)		100	1.166.999.250
4.01.27.04	Perencanaan Penataan Administrasi Pemerintahan Daerah	Terlaksananya proses pembentukan daerah persiapan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2	353.718.750
4.01.27.10	Pembakuan nama rupabumi	Terlaksananya Pembakuan nama Rupabumi di wilayah Kaltim (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2	407.346.500
4.01.27.11	Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Jumlah penegasan Batas Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota Se Kalimantan timur secara jelas dan pasti (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5	405.934.000
4.01.31	Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Ditindaklanjuti (%)		100	986.269.025
4.01.31.04	Penataan Masalah Pertanahan	Terwujudnya pelaksanaan Kebijakan Pertanahan, laporan Koordinasi Pertanahan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	469.833.789
4.01.31.05	Pembinaan Kamtibmas	Terlaksananya keamanan dan ketertiban di Provinsi Kalimantan Timur (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	516.435.236
4.01.34	Program Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan (%)		100	864.783.475
4.01.34.10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Laporan Koordinasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	864.783.475

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.01.35	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Yang Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sesuai Ketentuan (%) Persentase Kabupaten/Kota Yang Memiliki Predikat LPPD "ST" (%)		100 70	596.800.000
4.01.35.10	Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (Dokumen/Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	596.800.000
4.01.03.006	Biro Kesejahteraan Rakyat				7.154.058.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		80	914.451.439
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd, luarPrv	12	914.451.439
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	180.207.794
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	smd	20	90.155.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	90.052.794
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	671.959.526
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv		601.959.526
		Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Dokumen)			
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (Bulan)			
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur (Orang)	smd, luarPrv		70.000.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		75	47.594.501
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	smd	6	26.100.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	smd	14	21.494.501
4.01.17	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan dan Kesehatan	Prosentase Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Bidang Keagamaan dan Kesehatan yang ditindaklanjuti (Persen)		85	1.489.844.740
4.01.17.01	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang keagamaan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	14	1.000.000.000
4.01.17.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Kesehatan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	14	489.844.740

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.01.18	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Persen)		85	800.000.000
4.01.18.01	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	14	500.000.000
4.01.18.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	14	200.000.000
4.01.18.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipaan	Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Perpustakaan dan Kearsipaan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	14	100.000.000
4.01.19	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Persen)		85	850.000.000
4.01.19.01	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang kesejahteraan sosial (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	14	200.000.000
4.01.19.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang tenaga kerja dan transmigrasi (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	14	150.000.000
4.01.19.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	14	500.000.000
4.01.79	Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase hibah bansos yang tepat sasaran (%)		100	2.200.000.000
4.01.79.01	Pelayanan Administrasi Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah Dokumen Hibah dan Bantuan Sosial yang tersusun (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	4	2.000.000.000
4.01.79.02	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen hasil Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Dokumen)	smd	1	100.000.000
4.01.79.03	Penyusunan Perumusan Kebijakan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Dokumen)	smd	3	100.000.000
4.01.03.007	Biro Perekonomian				3.960.397.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		85	583.045.677
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	583.045.677
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	99.283.923
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	smd	12	71.400.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan / Kelengkapan Kantor yang dipelihara (Unit)	smd	1	27.883.923

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		60	842.217.225
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	50	842.217.225
		jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (kegiatan)		50	
		jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu) (bulan)		12	
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		75	7.250.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	7.250.000
4.01.48	Program Kebijakan Pengembangan Produksi Daerah	Persentase kebijakan pengembangan bidang produksi daerah yang ditindaklanjuti/terlaksana (%)		100	735.600.175
4.01.48.01	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Pertanian	Jumlah koordinasi pengembangan potensi ekonomi pertanian dalam arti luas (kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	3	252.600.175
4.01.48.02	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Jumlah koordinasi pengembangan potensi ekonomi kelautan dan perikanan (kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	111.000.000
4.01.48.03	Koordinasi Peningkatan Ekonomi Kehutanan dan Perkebunan	jumlah koordinasi pengembangan potensi kehutanan dan perkebunan (kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	234.000.000
4.01.48.04	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Jumlah koordinasi kebijakan peningkatan daya dukung lingkungan hidup (kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	138.000.000
4.01.49	Program Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah, Tata Kelola dan Kinerja BUMD	Persentase kebijakan peningkatan investasi daerah dan kinerja BUMD yang ditindaklanjuti/terlaksana (%)		100	900.000.000
4.01.49.01	Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal, Perijinan dan Non Perijinan Daerah	Dokumen Kebijakan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Daerah (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	300.000.000
4.01.49.03	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Tata Kelola dan Kinerja BUMD	Jumlah koordinasi perusda dan lembaga keuangan (kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	7	400.000.000
4.01.49.04	Koordinasi Promosi Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah	Bahan Promosi Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	200.000.000
4.01.50	Program Peningkatan Sinergitas Bidang Industri dan Jasa	Persentase Kebijakan Bidang Industri dan Jasa yang Ditindaklanjuti/Terlaksana (Persen)		100	793.000.000
4.01.50.01	Peningkatan Sinergi Kebijakan Perekonomian Daerah	Hasil Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	3	400.000.000
4.01.50.02	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Pariwisata dan Perhotelan	Koordinasi bidang pariwisata dan perhotelan (kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2	198.000.000
4.01.50.03	Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Bidang Koperasi dan UKM	jumlah koordinasi dan pembinaan koperasi (kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2	195.000.000
4.01.03.008	Biro Administrasi Pembangunan				7.100.531.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	1.316.438.186
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	1.316.438.186
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	359.699.089
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	smd	15	194.500.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Kendaraan, alat kantor (Unit)	smd	18	165.199.089
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		85	688.343.791
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Belanja makanan dan minuman, Publikasi, Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah, Bimtek (Bulan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	12	606.343.791
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kontribusi BIMTEK (Kegiatan)	luarPrv	20	82.000.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		75	12.550.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	bpn, smd, luarPrv	9	7.150.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	6	5.400.000
4.01.25	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Yang Tepat Waktu (Persen)		100	950.000.000
4.01.25.01	Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah pengadaan langsung yang dilayani (Pengadaan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	400	256.450.000
		Jumlah pengadaan yang dilayani (Pengadaan)		431	
		sangah lelang melalui LPSE (Jumlah)		20	
4.01.25.02	Evaluasi dan Pembinaan SDM Pengadaan	Jumlah SDM Pokja yang mengikuti pembinaan/peningkatan kapasitas aparatur (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5	265.000.000
4.01.25.03	Pengembangan dan Layanan Sistem Informasi Pengadaan	Jumlah pengadaan elektronik yang dilayani (paket)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	431	428.550.000
4.01.46	Program Koordinasi dan Pembinaan Monitoring serta Evaluasi Pembangunan	Persentase permasalahan program/kegiatan yang ditindaklanjuti (%)		80	1.200.000.000
4.01.46.01	Monitoring dan Evaluasi APBD	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	12	400.000.000
4.01.46.02	Monitoring dan Evaluasi Sektoral	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Sektoral (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	3	400.000.000
4.01.46.03	Administrasi dan Evaluasi Pembangunan	jumlah dokumen evaluasi pelaporan pembangunan (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	3	400.000.000
4.01.47	Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan serta Pengendalian Program	Persentase rencana kerja anggaran sesuai ketentuan (%)		100	2.573.499.934

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.01.47.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan	Dokumen Rakor Administrasi Pembangunan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	134.671.680
4.01.47.02	Perencanaan dan Pengendalian Program	Rencana Kerja Anggaran yang diasistensi dalam 1 tahun (RKA)	bru, bpn, smd, luarPrv	46	2.088.828.254
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran pergeseran yang difasilitasi (Dokumen)		1	
		Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Rencana Kerja Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Yang Disusun (Dokumen)		1	
4.01.47.03	Pengembangan Kebijakan Program Pembangunan	Dokumen Laporan Setda (Dokumen)	bpn, smd, luarPrv	2	350.000.000
4.01.03.009	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya				3.340.576.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		85	447.034.146
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	447.034.146
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	250.405.327
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	smd	1	237.000.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	13.405.327
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		70	880.136.729
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah (Kegiatan)	bru, kbr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	15	880.136.729
4.01.67	Program Koordinasi Infrastruktur Fisik dan Bangunan	Persentasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan yang ditindaklanjuti/terlaksana (%)		85	682.999.798
4.01.67.01	Koordinasi Pengembangan Bidang Perhubungan	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Perhubungan (Dokumen)	bru, kbr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	200.000.000
4.01.67.02	Koordinasi Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Pekerjaan umum (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	282.999.798
4.01.67.03	Koordinasi Pengembangan Bidang Perumahan dan Permukiman	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Permukiman (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	200.000.000
4.01.68	Program Koordinasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	Persentase Kebijakan Bidang Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan yang ditindaklanjuti/ terlaksana (%)		85	680.000.000
4.01.68.02	Koordinasi Kebijakan Kawasan Industri	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Kawasan Industri (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1	240.000.000
4.01.68.03	Koordinasi Pengembangan Kawasan	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan (Dokumen)	bru, kbr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	240.000.000
4.01.68.04	Koordinasi Kebijakan Perencanaan Daerah	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Perencanaan Daerah (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	200.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.01.69	Program Koordinasi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase kebijakan pengembangan energi dan sumber daya mineral yang ditindaklanjuti/terlaksana (%)		85	400.000.000
4.01.69.01	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Energi	Data Infrastruktur Energi Kalimantan Timur (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	200.000.000
		Dokumen hasil koordinasi kebijakan pengembangan energi (Dokumen)		1	
4.01.69.02	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Mineral	Data Pengembangan Sumber Daya Mineral (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	200.000.000
		Dokumen hasil koordinasi kebijakan Pengembangan Sumber Daya Mineral (Dokumen)		1	
4.01.04	Sekretariat DPRD				79.154.508.000
4.01.04.001	Sekretariat DPRD Provinsi				79.154.508.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		77	21.193.105.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	21.193.105.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		1	13.573.228.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan yang tersedia (Unit)	smd	334	226.000.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	10.603.728.000
4.01.08.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD (bulan)	smd	12	2.743.500.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		75	10.239.698.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah (bulan)	smd, luarPrv	12	7.044.198.000
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS dan Anggota DPRD yang mengikuti pelatihan (orang)	smd	100	3.195.500.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		75	1.580.478.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	smd	9	191.413.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (dokumen)	smd, luarPrv	21	122.065.000
4.01.12.03	Penyusunan dan verifikasi laporan pelaksanaan anggaran	jumlah verifikasi laporan (laporan)	smd	12	1.267.000.000
4.01.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase pelayanan terhadap kegiatan Anggota DPRD yang sesuai SOP (%)		78	32.567.999.000
4.01.15.02	Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Raperda yang telah dikoordinasi (kegiatan)	bpn, smd	10	778.600.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.01.15.05	Kegiatan Reses	Jumlah Reses Anggota DPRD (kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	3	10.780.000.000
4.01.15.09	Pengkajian Kasus-Kasus Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah kasus Hukum yang dikaji (Kasus)	bru, kbr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	499.500.000
4.01.15.10	Kemitraan Advokasi Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah kasus Hukum yang diadvokasi (kasus)	smd	1	335.000.000
4.01.15.15	Pelayanan Acara-acara Persidangan dan Kehumasan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim	Jumlah acara-acara persidangan dan Kehumasan Sekretariat DPRD yang terselenggara dengan baik (Kali)	smd, luarPrv	850	4.180.999.602
4.01.15.16	Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat Alat Kelengkapan Dewan (Kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	224	15.993.899.398
4.01.05	Badan Penghubung Provinsi				9.847.190.000
4.01.05.001	Badan Penghubung Provinsi				9.847.190.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		80	4.427.173.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	4.427.173.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	2.097.013.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Jenis)	smd	48	555.988.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	1.541.025.000
		Luas bangunan yang direhab (M2)		0	
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		55	1.424.208.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	smd	100	1.024.208.000
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)		12	
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek (Orang)	smd	25	400.000.000
		Jumlah pakaian dinas (Stel)		234	
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		75	93.733.700
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	smd	10	50.325.700
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Laporan)	smd	4	43.408.000
4.01.38	Program informasi pembangunan, potensi dan peluang investasi	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Kaltim di TMII (Orang)		25000	861.612.300
4.01.38.01	Promosi di Anjungan Kaltim dan TMII	Jumlah kegiatan promosi di Anjungan Kaltim dan TMII dalam setahun (Kegiatan)	smd		287.025.000
4.01.38.02	Promosi dalam daerah DKI Jakarta	Jumlah kegiatan promosi dalam daerah DKI Jakarta dalam setahun (Kegiatan)	smd	11	69.250.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.01.38.04	Propaganda penerangan	Jumlah laporan kegiatan propaganda penerangan (Laporan)	smd	1	505.337.300
4.01.39	Program Peningkatan Manajemen Kerja	Tingkat kepuasan pelayanan Badan Penghubung (%)		90	943.450.000
4.01.39.01	Keprotokolan dan fasilitasi pejabat daerah/ pusat	Jumlah kunjungan pejabat daerah/pusat yang difasilitasi (Kunjungan)	smd		389.100.000
4.01.39.02	Pelayanan mess	Jumlah laporan kegiatan pelayanan mess (Laporan)	smd	1	257.900.000
4.01.39.04	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang selesai tepat waktu (Dokumen)	smd		296.450.000
4.02	Pengawasan				16.470.874.000
4.02.01	Inspektorat				16.470.874.000
4.02.01.001	Inspektorat				16.470.874.000
4.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	1.737.905.000
4.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan administrasi perkantoran yang dilaksanakan (bulan)	bpn, smd, luarPrv	12	1.737.905.000
4.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	837.306.000
4.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana aparaturnya (unit)	smd	10	487.880.000
4.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara (unit)	smd	13	349.426.000
4.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	1.622.992.000
4.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan Pemda yang dilaksanakan (Kegiatan)	bpn, smd, luarPrv	60	753.392.000
4.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kapasitas Sumber Daya Aparatur (orang)	bpn, smd, luarPrv	108	869.600.000
4.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Skor)		80	75.302.000
4.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan (dokumen)	bpn, smd, luarPrv	9	75.302.000
4.02.97	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akuntabilitas kinerja baik (PD)		32	478.400.000
4.02.97.01	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Laporan)	bpn, smd, luarPrv	38	478.400.000
4.02.98	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (PD)		17	294.000.000
4.02.98.02	Reviu atas laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan pemprov dan perangkat daerah yang sesuai standar akuntansi pemerintah (laporan)	smd, luarPrv	17	294.000.000
4.02.99	Program pencegahan KKN	Hasil Penilaian Integritas (Nilai)		75	2.373.200.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.02.99.04	Pemeriksaan Khusus/Investigatif	Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus/investigasi yang diterbitkan (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	20	291.600.000
4.02.99.05	Pembangunan Zona Integritas	Jumlah perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (perangkat daerah)	bpn, smd, luarPrv	1	163.500.000
4.02.99.06	Aksi Pencegahan Korupsi	Jumlah kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan (kegiatan)	smd, luarPrv	4	97.950.000
4.02.99.07	Pengendalian Gratifikasi	Jumlah laporan gratifikasi yang ditangani (Laporan)	bpn, smd, luarPrv	30	93.400.000
4.02.99.08	Pengendalian Whistle Blower System (WBS) dan Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan WBS dan Benturan Kepentingan yang ditangani (Laporan)	bpn, smd, luarPrv	3	89.550.000
4.02.99.09	Monev LHKPN dan LHKASN	Persentase kepatuhan LHKPN dan LHKASN (Persentase)	bpn, smd, luarPrv	75	210.300.000
4.02.99.10	Koordinasi Tim Pengawasan dan Pngamanan Pemerintah (TP4D), APIP dan APH	Jumlah kegiatan koordinasi TP4D, APIP dan APH yang dilaksanakan (Kegiatan)	bpn, smd, luarPrv	4	165.800.000
4.02.99.11	Operasional SABERPUNGLI	Jumlah kegiatan operasional SabERPungli yang dilaksanakan (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	723.500.000
4.02.99.12	Survey Penilaian Integritas	Jumlah kegiatan survey penilaian integritas yang dilaksanakan (Kegiatan)	bpn, smd, luarPrv	1	290.500.000
4.02.99.13	Pembangunan Budaya Integritas	Jumlah kegiatan budaya integritas yang dilaksanakan (kegiatan)	bpn, smd, luarPrv	2	247.100.000
4.02.00	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Meningkatkan profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (orang) (Orang)		55	2.104.150.000
4.02.00.01	Pelatihan di Kantor Sendiri	Jumlah kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (Kegiatan)	bpn, smd	12	146.000.000
4.02.00.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan	Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang dilaksanakan (Kegiatan)	bpn, smd, luarPrv	6	1.021.450.000
4.02.00.03	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Jumlah kegiatan peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP (Kegiatan)	bpn, smd, luarPrv	4	936.700.000
4.02.01	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Terwujudnya Pengendalian Internal Pemerintah (Kegiatan)		7	5.580.916.560
4.02.01.01	Pemeriksaan Operasional OPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang diterbitkan (laporan)	bpn, smd, luarPrv	30	921.200.000
4.02.01.02	Pemeriksaan Kinerja OPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang diterbitkan (laporan)	bpn, smd	4	266.500.000
4.02.01.03	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang diterbitkan. (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	3	676.800.000
4.02.01.04	Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan	Jumlah laporan hasil reviu, monitoring dan evaluasi pengawasan yang diterbitkan (Laporan)	bpn, smd, luarPrv	8	2.865.541.560
4.02.01.05	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pengawasan yang dilaksanakan (kegiatan)	bpn, smd, luarPrv	4	284.750.000
4.02.01.06	Pemberian Advis dan Konsultasi	Jumlah advis dan konsultasi yang dilaksanakan. (Laporan)	bpn, smd, luarPrv	15	157.500.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.02.01.07	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah kegiatan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan (Kegiatan)	bpn, smd	2	408.625.000
4.02.02	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemda Kab/Kota (Kegiatan)		10	1.366.702.440
4.02.02.01	Evaluasi EKPPD Kab/kota	Jumlah laporan hasil evaluasi EKPPD Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	843.800.000
4.02.02.02	Evaluasi SAKIP Kab/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5	332.102.440
4.02.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemda Lab/Kota yang dilaksanakan (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	7	190.800.000
4.03	Perencanaan				30.866.908.759
4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				30.866.908.759
4.03.01.001	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				30.866.908.759
4.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		87	7.014.459.000
4.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Instansi/Lembaga Provinsi, Kabupaten/Kota, Veritikal yang Dilyani (Jumlah Instansi/Lembagai)	smd	71	7.014.459.000
4.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		4	2.549.363.759
4.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penambahan aset sarana dan prasarana aparatur (unit)	smd	192	250.000.000
4.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah aset sarana prasarana aparatur yang berfungsi baik (unit)	smd	130	2.299.363.759
4.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi perencanaan (%)		20	3.385.631.100
4.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi (Rapat)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	40	3.235.631.100
4.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	bpn, smd, luarPrv	50	150.000.000
4.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		79	3.265.006.100
4.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	145.669.500
4.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	59.336.600
4.03.10.03	Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5	3.060.000.000
4.03.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian (Persen)		75	2.580.000.000
4.03.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	875.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.03.30.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	4	802.500.000
		Dokumen RAD Pangan dan Gizi (RAD-PG) (Dokumen)		5	
4.03.30.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	902.500.000
4.03.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Hasil Pelaksanaan Pembangunan (%)		70	1.853.500.000
4.03.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPRRA dan LKPJ (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	3	950.000.000
4.03.42.03	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	6	903.500.000
		Dokumen Evaluasi RKPD (Dokumen)		1	
4.03.46	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya (Persen)		70	2.305.000.000
4.03.46.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	705.000.000
		Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur (Laporan)		1	
4.03.46.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	750.000.000
		Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) (Laporan)		1	
4.03.46.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	850.000.000
		Jumlah laporan anugerah Pangripta Nusantara (Laporan)		0	
		Jumlah laporan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) (Laporan)		0	
		Jumlah laporan RAD PPK (Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi) (Laporan)		0	
		Jumlah Laporan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) (Laporan)		1	
4.03.47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah (Persen)		75	2.400.000.000
4.03.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan (Laporan)	kk, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2	850.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.03.47.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	800.000.000
		Laporan Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Pusat - Pusat Pertumbuhan (Dokumen)		0	
		Profil Pembangunan Bidang Sumber Daya Air & Tata Ruang (Dokumen)		1	
4.03.47.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	750.000.000
		Profil Pembangunan Bidang Keciaptakarya, Bina Konstruksi, Perumahan dan Permukiman (Laporan)		1	
4.03.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran (%)		90	3.563.000.000
4.03.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah Dokumen Usulan Prog/Keg Forum Regional Kalimantan (Laporan)	bpn, smd, luarPrv	2	200.000.000
4.03.48.08	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD, P-RKPD) (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2	2.563.000.000
4.03.48.10	Penyusunan Rancangan Pendanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2	350.000.000
4.03.48.11	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kaltim dan Kabupaten/Kota (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	66	450.000.000
4.03.50	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	Presentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan (%)		81	1.950.948.800
4.03.50.01	Pengembangan Data dan Analisis Sektoral Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	14	950.948.800
4.03.50.02	Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah	Publikasi Jenis Data dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) (IGT)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	200	1.000.000.000
4.04	Keuangan				89.550.000.000
4.04.01	Badan Pendapatan Daerah				55.300.000.000
4.04.01.001	Badan Pendapatan Daerah				28.000.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	5.900.000.000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	5.900.000.000
		Jumlah Unit Kantor yang terlayani (unit)		1	
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	4.600.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan (Jenis)	smd	8	2.600.000.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara (Jenis)	smd	11	2.000.000.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		68	2.500.000.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi (Koordinasi / Konsultasi)	smd	45	2.000.000.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (PNS)	smd	20	500.000.000
		Jumlah Pengadaan Pakaian dinas (Stel)		325	
4.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (nilai AKIP)		70	900.000.000
4.04.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	smd	4	400.000.000
4.04.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen / Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen / Laporan)	smd	5	500.000.000
4.04.31	Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah (%)		100	6.500.000.000
4.04.31.01	Pendataan, administrasi dan keberatan pajak	Jumlah realisasi tunggakan pajak (Rupiah)	smd	60000000000	2.000.000.000
4.04.31.02	Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB	Jumlah realisasi penerimaan PKB (Rupiah)	smd	84872000000 0	2.500.000.000
		Jumlah realisasi penerimaan BBNKB (Rupiah)		90736000000 0	
4.04.31.03	Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya	Jumlah realisasi penerimaan PBBKB (Rupiah)	smd	31757600000 00	2.000.000.000
		Jumlah realisasi penerimaan Pajak AP (Rupiah)		144000000000	
		Jumlah realisasi penerimaan Pajak Rokok (Rupiah)		17173500000 0	
4.04.32	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak	Persentase tercapainya target penerimaan Bukan Pajak Daerah (%)		100	2.500.000.000
4.04.32.01	Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (Rupiah)	smd	22489341200	1.200.000.000
4.04.32.02	Koordinasi Penerimaan lain-lain	Jumlah realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Rupiah)	smd	34786989133 8	500.000.000
		Jumlah realisasi lain - lain pendapatan asli daerah yang sah (Rupiah)		79535027046 2	
		Jumlah realisasi lain - lain pendapatan daerah yang sah (Rupiah)		126070000000	
4.04.32.03	Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Jumlah realisasi bagi hasil pajak dan bukan pajak (Rupiah)	smd	30626000000 00	800.000.000
		Jumlah realisasi DAU (Rupiah)		81569364100 0	
4.04.33	Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Jumlah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pendapatan dan administrasi dari pengawas internal maupun eksternal (Dokumen)		18	900.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.04.33.02	Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah jenis pendapatan daerah yang dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap mekanisme pendapatan daerah serta administrasi keuangan (Jenis Pendapatan)	smd	3	500.000.000
4.04.33.03	Kajian Hukum dan Perundang-undangan	Jumlah regulasi yang berkaitan dengan pendapatan (Dokumen Peraturan)	smd	5	400.000.000
4.04.35	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Obyek/Sumber Pendapatan Baru (Obyek)		6	4.200.000.000
4.04.35.01	Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan	Jumlah realisasi sumber Pendapatan Baru (Sumber)	smd	6	1.800.000.000
4.04.35.02	Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah	Jumlah Kajian analisis pengembangan pelayanan pendapatan (Kajian)	smd	2	2.400.000.000
4.04.01.002	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda				4.300.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	2.800.000.000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	2.800.000.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	1.000.000.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan (Jenis)	smd	13	200.000.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara (Jenis)	smd	10	800.000.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	175.000.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi (Koordinasi / Konsultasi)	smd	5	85.000.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas (Stel)	smd	131	90.000.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Persentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Samarinda (%)		100	325.000.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB se - Kaltim (Rupiah)	smd	5000000000	150.000.000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Samarinda (Rupiah)	smd	42000000000 0	175.000.000
4.04.01.003	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara				4.100.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	2.500.000.000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	kkp	12	2.500.000.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	700.000.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan (Jenis)	kkp	21	200.000.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara (Jenis)	kkp	8	500.000.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	200.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi (Koordinasi / Konsultasi)	kkp	10	100.000.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas (Stel)	kkp	119	100.000.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kukar (%)		100	700.000.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kukar (Rupiah)	kkp	2000000000	500.000.000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kukar (Rupiah)	kkp	22100000000 0	200.000.000
4.04.01.004	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur				2.700.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	1.200.000.000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	ktm	12	1.200.000.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	690.000.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan (Jenis)	ktm	12	370.000.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara (Jenis)	ktm	8	320.000.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	240.000.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi (Koordinasi / Konsultasi)	ktm	5	200.000.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas (Stel)	ktm	44	40.000.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kutim (%)		100	570.000.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutim (Rupiah)	ktm	4000000000	240.000.000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutim (Rupiah)	ktm	10700000000 0	330.000.000
4.04.01.005	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat				2.400.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	1.500.000.000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	kbr	12	1.500.000.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	350.000.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan (Jenis)	kbr	10	100.000.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara (Jenis)	kbr	10	250.000.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	250.000.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi (Koordinasi / Konsultasi)	kbr	5	200.000.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas (Stel)	kbr	56	50.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Presentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kubar (%)		100	300.000.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kubar (Rupiah)	kbr	750000000	200.000.000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kubar (Rupiah)	kbr	47500000000	100.000.000
4.04.01.006	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan				4.000.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	2.479.000.000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bpn	12	2.479.000.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	635.000.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan (Jenis)	bpn	13	90.000.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara (Jenis)	bpn	11	545.000.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	336.000.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi (Koordinasi / Konsultasi)	bpn	10	265.000.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas (Stel)	bpn	93	71.000.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Presentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Balikpapan (%)		100	550.000.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Balikpapan (Rupiah)	bpn	5000000000	260.000.000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Balikpapan (Rupiah)	bpn	45000000000 0	290.000.000
4.04.01.007	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang				2.100.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	1.194.000.000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	btg	12	1.194.000.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	310.000.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan (Jenis)	btg	10	11.000.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara (Jenis)	btg	6	299.000.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	276.000.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi (Koordinasi / Konsultasi)	btg	10	243.000.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas (Stel)	btg	44	33.000.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Presentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Bontang (%)		100	320.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Bontang (Rupiah)	btg	4000000000	170.000.000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Bontang (Rupiah)	btg	7000000000	150.000.000
4.04.01.008	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara				2.300.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	950.000.000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	ppu	12	950.000.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	710.000.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan (Jenis)	ppu	10	230.000.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara (Jenis)	ppu	10	480.000.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	257.000.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi (Koordinasi / Konsultasi)	ppu	6	230.000.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas (Stel)	ppu	36	27.000.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Paiaik Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Penajam Paser Utara (%)		100	383.000.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Penajam Paser Utara (Rupiah)	ppu	500000000	250.000.000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Penajam Paser Utara (Rupiah)	ppu	4000000000	133.000.000
4.04.01.009	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser				2.900.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	1.100.000.000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	psr	12	1.100.000.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	870.000.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan (Jenis)	psr	10	450.000.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara (Jenis)	psr	10	420.000.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	420.000.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi (Koordinasi / Konsultasi)	psr	12	390.000.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas (Stel)	psr	39	30.000.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Paiaik Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Paser (%)		100	510.000.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Paser (Rupiah)	psr	1000000000	240.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Paser (Rupiah)	psr	70000000000	270.000.000
4.04.01.010	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau				2.500.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	1.470.000.000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	12	1.470.000.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	495.000.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan (Jenis)	bru	10	100.000.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara (Jenis)	bru	10	395.000.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	259.000.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi (Koordinasi / Konsultasi)	bru	13	230.000.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas (Stel)	bru	38	29.000.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Persentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Berau (%)		100	276.000.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau (Rupiah)	bru	1000000000	107.000.000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau (Rupiah)	bru	68000000000	169.000.000
4.04.02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				34.250.000.000
4.04.02.001	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				34.250.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		80	4.000.000.000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	0	4.000.000.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (%)		25	3.380.000.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd		2.800.000.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd		580.000.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		65	2.670.000.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah (kegiatan)	smd, luarPrv	0	1.800.000.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd		870.000.000
4.04.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase anggaran belanja Program/Kegiatan yang sesuai dengan dokumen rencana pembangunan daerah (%)		90	17.560.000.000
4.04.17.01	Penyusunan analisa standar belanja	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	620.000.000
		Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)		1	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.04.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	2.000.000.000
		Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)		2	
4.04.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	1.500.000.000
		Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)		2	
4.04.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	790.000.000
		Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)		6	
4.04.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	900.000.000
		Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)		6	
4.04.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	900.000.000
		Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)		3	
4.04.17.20	Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	720.000.000
		Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)		3	
4.04.17.24	Rekonsiliasi Keuangan Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	800.000.000
		Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)		12	
4.04.17.26	Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Penyertaan Modal	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	950.000.000
		Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)		500	
4.04.17.28	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	1.000.000.000
		Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)		12	
4.04.17.29	Pengelolaan, Pengadministrasian Usulan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	300.000.000
		Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)		282	
4.04.17.35	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd		1.000.000.000
4.04.17.37	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd		940.000.000
4.04.17.39	Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	1.000.000.000
		Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)		12	
4.04.17.42	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd		850.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.04.17.43	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd		1.500.000.000
4.04.17.44	Penyusunan Standarisasi dan Kebutuhan BMD	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd		500.000.000
4.04.17.46	Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd		590.000.000
4.04.17.47	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	Jumlah Dokumen Pendanaan Pembangunan Daerah (KUA-PPAS, KUPA-PPAS, Aplikasi SIPPD) (dokumen)	smd	2	700.000.000
4.04.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Persentase belanja program/kegiatan dalam Dokumen APBD Kab/Kota yang sejalan dengan APBD Provinsi (%)		90	1.940.000.000
4.04.18.01	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	420.000.000
		Jumlah rancangan peraturan daerah APBD (dokumen)		20	
4.04.18.02	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	370.000.000
		Jumlah rancangan peraturan daerah APBD (dokumen)		20	
4.04.18.07	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	150.000.000
		Jumlah rancangan peraturan daerah APBD (dokumen)		10	
4.04.18.08	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Kab/Kota	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	160.000.000
		Jumlah rancangan peraturan daerah APBD (dokumen)		10	
4.04.18.09	Pembinaan dan Fasilitasi APBD Kabupaten/ Kota	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	520.000.000
		Jumlah rancangan peraturan daerah APBD (dokumen)		10	
4.04.18.11	Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	320.000.000
		Jumlah rancangan peraturan daerah APBD (dokumen)		12	
4.04.22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	Persentase aset tetap (Tanah dan Bangunan) Daerah yang diamankan dan dimanfaatkan (%)		90	4.700.000.000
4.04.22.01	Persertifikatan dan Pengamanan Aset Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd		3.000.000.000
4.04.22.04	Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd		850.000.000
4.04.22.05	Penghapusan, Penilaian, Penjualan dan Peyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd		850.000.000
4,05	Kepegawaian				21.007.415.000
4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah				21.007.415.000
4.05.01.001	Badan Kepegawaian Daerah				18.007.415.000
4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%) Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		100 86	2.389.713.180
4.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	smd	12	2.389.713.180
		Jumlah Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun yang terselesaikan (Laporan)		2	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah GU/LS/TUP yang diselesaikan (Dokumen)		200	
4.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	1.371.063.730
4.05.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan sarana dan prasarana kantor (unit)	smd	0	250.000.000
		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor (Unit)		40	
4.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (bulan)	smd	0	1.121.063.730
		Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor (Bulan)		12	
4.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		12	1.526.000.000
4.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	60	657.000.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (kegiatan)		80	
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat, kegiatan/pelatihan dan tamu) (bulan)		12	
4.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis dilingkungan BKD Prov. Kaltim (PNS)	bpn, btg, smd, luarPrv	0	188.500.000
		Jumlah Pakaian Dinas (Stel)		0	
		Jumlah Sosialisasi Peraturan Kepegawaian (Laporan)		0	
		Jumlah PNS dilingkungan BKD yang mengikuti Bimtek/Diklat Teknis/Fungsional (PNS)		20	
		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas (Stel)		280	
4.05.09.03	Sinkronisasi dan Pematapan ASN	Jumlah Sosialisasi Peraturan Kepegawaian (Laporan)	kk, ktm, bpn, btg, smd, luarPrv	2	680.500.000
		Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Kepegawaian (Laporan)		1	
4.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai)		77	390.000.000
4.05.10.01	Penyusunan Dokumen dan Perencanaan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (dokumen)	smd		50.000.000
		Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan (Dokumen)		2	
		Jumlah Dokumen DPA dan DPA Perubahan (Dokumen)		2	
		Jumlah Dokumen Renstra dan Reviu Renstra (Dokumen)		2	
		Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan (Dokumen)		2	
		Jumlah Dokumen RKT dan Perjanjian Kinerja (Dokumen)		21	
4.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Renja (Laporan)	ktm, psr, bpn, btg, smd, luarPrv	4	340.000.000
		Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Bulanan (Laporan)		12	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (dokumen)			
		Predikat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKD Prov. Kaltim (Nilai)		82	
		Jumlah Dokumen LPPD (Dokumen)		1	
		Jumlah Dokumen Pengukuran Kinerja (Dokumen)		19	
4.05.15	Program Peningkatan Pelayanan Mutasi Kepegawaian	Persentase pegawai yang di mutasi sesuai dengan job description (%)		91	1.648.402.500
4.05.15.04	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase usulan PNS yang pindah antar Pemerintah Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terselesaikan (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	0	489.965.000
		Persentase usulan PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi Kaltim keluar Wilayah Prov. Kaltim yang terselesaikan (%)		0	
		Persentase usulan PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi/Kementerian diluar Prov. Kaltim ke Pemerintah Kab/Kota didalam Wilayah Prov. Kaltim yang terselesaikan (%)		0	
		Persentase usulan PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi/Kementerian diluar Prov. Kaltim ke Pemerintah Prov. Kaltim yang terselesaikan (%)		0	
		Persentase usulan PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota di Wilayah Prov. Kaltim ke Pemerintah Prov. Kaltim yang terselesaikan (%)		0	
		Persentase usulan PNS yang pindah antar unit kerja/perangkat daerah dilindungi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terselesaikan (%)		0	
4.05.15.05	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat (Reguler) yang diterbitkan (SK Kenpa)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	0	533.437.500
		Persentase usulan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Provinsi Gol. IV/b kebawah yang terselesaikan (%)		0	
		Persentase usulan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Provinsi Gol. IV/c keatas yang terselesaikan (%)		0	
		Persentase Usulan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Kab/Kota Gol. IV/b kebawah yang terselesaikan (%)		0	
		Persentase Usulan Kenaikan Pangkat bagi PNS Kab/Kota Gol. IV/c keatas yang terselesaikan (%)		0	
4.05.15.06	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Persentase ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	0	625.000.000
		Persentase ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) (%)		0	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Persentase ASN yang menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) (%)		0	
		Persentase ASN yang menduduki Jabatan Pengawas (Eselon IV) (%)		0	
4.05.16	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persentase SDM Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (%)		80	6.476.565.000
4.05.16.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase usulan PNS Tugas Belajar yang diproses (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	0	5.867.315.000
		Persentase usulan PNS Ijin Belajar yang diproses (%)		0	
		Jumlah PNS yang diusulkan untuk mengikuti Diklat Struktural (PNS)		0	
		Jumlah PNS yang diusulkan untuk mengikuti Diklat Fungsional (PNS)		0	
		Jumlah PNS yang diusulkan untuk mengikuti Diklat Teknis (PNS)		0	
		Jumlah PNS yang diusulkan untuk mengikuti Diklat Prajabatan (PNS)		0	
4.05.16.05	Pengelolaan Sertifikasi Jabatan ASN	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang tersertifikasi (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	0	236.250.000
		Persentase Jabatan Fungsional yang tersertifikasi (%)		0	
		Persentase Jabatan Pelaksana yang tersertifikasi (%)		0	
4.05.16.06	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional	Persentase usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama yang terselesaikan (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	0	373.000.000
		Persentase usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain yang terselesaikan (%)		0	
		Persentase usulan Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing yang terselesaikan (%)		0	
		Persentase usulan Pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui promosi yang terselesaikan (%)		0	
		Persentase usulan Pemberhentian PNS dari jabatan fungsional yang terselesaikan (%)		0	
		Persentase usulan Pengangkatan PNS kembali dalam jabatan fungsional yang terselesaikan (%)		0	
4.05.17	Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin Pegawai	Persentase PNS Berkinerja Baik (%)		84	2.205.670.590
4.05.17.03	Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN	Persentase PNS yang mencapai target kinerja diatas 80% (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	0	1.001.420.590
		Jumlah PNS yang mendapatkan KGB (PNS)		0	
		Jumlah PNS yang menerima SLKS (PNS)		0	
		Jumlah PNS Pra Pensiun yang mengikuti seminar dan konseling (PNS)		0	
		Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan terhadap capaian kinerja (PNS)		0	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.05.17.04	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Tingkat Kehadiran PNS (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	0	204.250.000
		Persentase Penanganan Kasus yang terselesaikan (%)		0	
		Persentase usulan Cuti PNS yang diproses (%)		0	
		Persentase usulan perceraian pegawai yang terselesaikan (%)		0	
4.05.17.05	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN	Jumlah fasilitasi kegiatan seni dan budaya (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	0	1.000.000.000
		Jumlah Kegiatan MTQ (Laporan)		0	
		Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan keolahragaan (Laporan)		0	
		Jumlah pendampingan bantuan hukum (Laporan)		0	
4.05.18	Program Pengembangan Data dan Informasi ASN	Persentase Data Kepegawaian yang digunakan dalam proses penempatan pegawai, mutasi dan promosi jabatan (%)		95	2.000.000.000
4.05.18.03	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah kegiatan pelaksanaan seleksi Calon ASN (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	0	1.000.000.000
		Jumlah kegiatan pelaksanaan sumpah janji ASN (Laporan)		0	
		Jumlah kegiatan Ujian Dinas yang dilaksanakan (Laporan)		0	
		Jumlah kegiatan Ujian Penyesuaian Ijazah yang dilaksanakan (Laporan)		0	
		Persentase usulan kartu TASPEN, KARPEG dan Karis/Karsu yang terselesaikan (%)		0	
4.05.18.04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Persentase usulan pemberhentian ASN yang terselesaikan (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	0	500.000.000
		Persentase usulan pensiun ASN yang terselesaikan (%)		0	
4.05.18.05	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Persentase pemutakhiran data kepegawaian (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	0	500.000.000
		Jumlah berita kepegawaian yang terupdate (Berita)		0	
		Jumlah pengembangan sistem aplikasi kepegawaian (Aplikasi)		0	
		Jumlah brosur layanan kepegawaian (Brosur)		0	
		Jumlah buku profil dan buku saku kepegawaian yang terselesaikan (Dokumen)		0	
4.05.01.002	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai				3.000.000.000
4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		75	800.000.000
4.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	smd	12	800.000.000
		Jumlah GU/LS/TUP yang diselesaikan (Dokumen)		30	
4.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		1	1.200.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.05.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor (Unit)	smd	10	1.000.000.000
4.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (bulan)	smd	12	200.000.000
4.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		30	1.000.000.000
4.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	20	500.000.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (kegiatan)		10	
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat, kegiatan/pelatihan dan tamu) (bulan)		12	
4.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS dilingkungan BKD yang mengikuti Bimtek/Diklat Teknis/Fungsional (PNS)	bpn, smd, luarPrv	12	100.000.000
		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas (Stel)		12	
4.05.09.04	Pengembangan Assessment Center	Jumlah PNS yang mengikuti pengukuran dan penilaian kompetensi pegawai (PNS)	bpn, smd, luarPrv	0	400.000.000
		Jumlah laporan pemetaan kompetensi (Dokumen)		0	
4.06	Pendidikan dan Pelatihan				27.421.750.000
4.06.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				27.421.750.000
4.06.01.001	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				27.421.750.000
4.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		86	4.814.982.500
4.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	smd	86	4.814.982.500
4.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		4	3.770.143.000
4.06.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)	smd	4	1.645.363.000
4.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)	smd	4	2.124.780.000
4.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		93	902.659.000
4.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan (Kegiatan)	smd	50	605.625.000
4.06.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	smd	93	297.034.000
4.06.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai)		82	443.120.000
4.06.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai)	smd	82	231.720.000
4.06.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai)	smd	82	211.400.000
4.06.15	Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Persentase ASN yang telah memiliki sertifikasi kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (%)		80	1.788.935.000
4.06.15.02	Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi	Persentase Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi (%)	smd	80	683.887.500

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.06.15.03	Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN yang telah memiliki Sertifikasi Kompetensi dan LSP PDN (%)	smd	80	686.850.000
4.06.15.04	Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama	Persentase Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama (%)	smd	80	418.197.500
4.06.16	Program Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memperoleh sertifikasi pengembangan kompetensi teknis dan sosio kultural (%)		20	5.576.845.000
4.06.16.01	Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi	Persentase ASN yang telah memiliki Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi (%)	smd	20	1.072.970.000
4.06.16.02	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi	Persentase ASN yang telah memiliki Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi (%)	smd	20	2.259.525.000
4.06.16.03	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang	Persentase ASN yang telah memiliki Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang (%)	smd	20	1.390.100.000
4.06.16.04	Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi (Kontribusi)	Persentase ASN yang telah memiliki Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi (%)	smd	20	252.200.000
4.06.16.05	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi (Kontribusi)	Persentase ASN yang telah memiliki Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi (%)	smd	20	497.940.000
4.06.16.06	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang (Kontribusi)	Persentase ASN yang telah memiliki Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang (%)	smd	20	104.110.000
4.06.17	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memperoleh sertifikasi pengembangan kompetensi manajerial dan pemerintahan serta bagi jabatan fungsional (%)		70	10.125.065.500
4.06.17.03	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	Persentase ASN yang telah Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan (%)	smd	70	4.193.170.000
4.06.17.04	Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi	Persentase Pejabat yang telah Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi (%)	smd	70	1.844.000.500
4.06.17.05	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Persentase ASN yang telah Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional (%)	smd	70	653.165.000
4.06.17.06	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan (Kontribusi)	Jumlah Peserta Diklat Pelatihan Dasar Gol. II dan III (orang)	smd	320	2.974.720.000
4.06.17.07	Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi (Kontribusi)	Jumlah peserta Pengembangan Kompetensi untuk Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi (orang)	smd	48	460.010.000
4.07	Penelitian dan Pengembangan				7.755.334.000
4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan				7.755.334.000
4.07.01.001	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah				7.755.334.000
4.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	1.300.000.000
4.07.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran (kegiatan)	smd	15	1.300.000.000
4.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		4	800.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.07.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana (kegiatan)	smd	8	800.000.000
4.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		82	950.550.000
4.07.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah ASN Yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi (orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	155	800.000.000
4.07.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur (orang)	smd, luarPrv	12	150.550.000
4.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (BB)		79	35.000.000
4.07.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	20.000.000
4.07.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan evaluasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd	23	15.000.000
4.07.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal (%)		80	720.950.000
4.07.23.02	Pengembangan teknologi informasi kelitbangan	Persentase terselenggaranya program pemanfaatan teknologi informasi kelitbangan (%)	smd	80	220.000.000
		Jumlah artikel Jurnal riset pembangunan dan buletin lembusuaana (artikel)		70	
4.07.23.03	Rakorda Kelitbangan	Persentase terselenggaranya kegiatan rakorda kelitbangan (%)	kbr, ktm, psr, ppu, luarPrv	100	500.950.000
4.07.41	Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan (%)		90	1.350.000.000
4.07.41.01	Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah laporan litbang sub bidang ekonomi yang dilaksanakan (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	1.000.000.000
		Jumlah laporan litbang sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan (Laporan)		1	
		Jumlah laporan sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana yang dilaksanakan (laporan)		1	
4.07.41.02	Penelitian mandiri bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan (laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5	350.000.000
4.07.47	Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi (%)		90	1.400.000.000
4.07.47.01	Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan litbang sub bidang inovasi dan pengembangan teknologi yang dilaksanakan (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	1.200.000.000
		Jumlah laporan litbang sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan (laporan)		1	
		Jumlah laporan litbang sub bidang diseminasi kelitbangan yang dilaksanakan (laporan)		1	
4.07.47.02	Penelitian mandiri bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan pelaksanaan penelitian mandiri bidang inovasi dan teknologi (Laporan)	bru, kkr, ktm, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	200.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.07.48	Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang sosial dan pemerintahan (%)		90	1.198.834.000
4.07.48.01	Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah laporan litbang sub bidang kependudukan, pemberdayaan dan masyarakat desa yang dilaksanakan (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	800.000.000
		Jumlah laporan litbang sub bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dilaksanakan (laporan)		1	
		Jumlah laporan litbang sub bidang sosial dan budaya yang dilaksanakan (Laporan)		1	
4.07.48.02	Penelitian mandiri bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang sosial dan pemerintahan yang dilaksanakan (laporan)	bru, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	6	398.834.000
	JUMLAH				4.631.187.602.000

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan yang tergambarkan dalam pencapaian indikator-indikator dari *impact* dan *outcome*. Indikator *impact* dan *outcome* ini dianggap mampu mewakili dan menggambarkan hasil capaian yang dilakukan melalui berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik *outcome* ataupun *output* pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan

indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun RKPD 2021. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	Target 2021
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,8
2.	Tingkat kemiskinan (%)	6,88
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2±1
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi non Migas dan Batubara (%)	6±1
5.	Indeks Gini	0,328-0,327
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75.95
7.	Indeks Persepsi Korupsi	6,65
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,34

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah di sajikan tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.2
Penetapan Target Indikator
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2021
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
a	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	
1.1	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	4,70
1.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,99
1.3	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	20
1.4	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,55
1.5	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,35
1.6	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	5,7
1.7	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,55
1.8	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,1
b	Fokus Kesejahteraan Sosial	
2.1	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,60
2.2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,34
2.3	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,76
c	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	
3.1	Persentase /Jumlah sekolah mengemb-kan budaya lokal (%)	233
3.2	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%)	40
B	ASPEK PELAYANAN UMUM	
a	Fokus : Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
1	Pendidikan	
1.1	Persentase /Jumlah sekolah yang mengemb-kan ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB) (unit)	233
1.2	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	70
1.3	Angka Partisipasi Murni SMA/MA, SMK, MAK, SMLB (%)	77
1.4	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)	99
1.5	Jumlah Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS (orang)	19.500
1.6	Jumlah Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa (Siswa)	2.500
1.7	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%)	95
1.8	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	75
2	Kesehatan	
2.1	Persentase puskesmas yang memiliki 9 (5 tenaga promotif dan preventif, 4 tenaga kuratif) tenaga kesehatan (%)	75
2.2	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal Rumah Sakit (%)	90
2.3	Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	68
2.4	Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%)	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3.1		
3.2	Kapasitas Air Baku (L/detik)	8.622
3.3	Cakupan layanan Air Minum Perpipaan (%)	67,23
3.4	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	36.722
3.5	Prosentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kab/Kota (%)	77,19
4	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	
4.1	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)	70
4.2	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana	15
4.3	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana (%)	85
5	Sosial	
5.1	jumlah PMKS yang tertangani (PMKS)	2500
b	Fokus : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	
1	Tenaga Kerja	
1.1	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	0,53
1.2	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%)	80

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2021
1.3	Persentase Wirausahaan Baru dari Pencari Kerja (%)	35
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	56,72
2.2	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	88
2.3	Persentase pelaku ekonomi perempuan (%)	76
2.4	Rasio KDRT	0,048
3	Lingkungan Hidup	
3.1	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi)	600
3.2	Indeks Pencemaran Lingkungan	sedang (8)
3.3	Persentase emisi yang diturunkan dari BAU sektor perkebunan (%)	40
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4.1	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)	448
4.2	Meningkatkan jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes)	30
4.3	Meningkatkan jumlah desa berkembang (Desa)	30
4.4	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	35
4.5	Jumlah kampung/desa Iklim +	25
5	Perhubungan	
5.1	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	11.536.200
5.2	Jumlah barang (ton)	355.200.000
5.3	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP (Unit/%)	11 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (88%)
5.4	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kasus)	512
6	Komunikasi dan Informatika	
6.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3
7	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
7.1	Jumlah UKM Naik Kelas (UKM)	200
8	Kepemudaan dan Olahraga	
8.1	Indeks Pembangunan Pemuda	57,82
9	Kebudayaan	233
10	Perpustakaan	
10.1	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (on line dan on site) (orang)	577,1
c	Fokus : Urusan Pelayanan Pilihan	
1	Pariwisata	
1.1	Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)	2.00
2	Pertanian	
2.1	Jumlah produksi padi (Ton)	511.048
2.2	Jumlah Miniranch yang beroperasi (unit)	40
2.3	Angka Kelahiran Sapi (%)	20,5
2.4	Jumlah produksi tanaman hortikultura (Ton)	247.698
2.5	Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	17.136.849
3	Kehutanan	
3.1	Realisasi penerimaan PNPB sektor kehutanan (Rp. Miliar)	170
3.2	Persentase kerusakan hutan di dalam kawasan hutan (%)	≤1,5
3.3	Persentase meningkatnya tutupan lahan (%)	13,98
3.4	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	32.000
4	Energi dan Sumber Daya Mineral	
4.1	Persentase pemanfaatan EBT (%)	4,13
4.2	Jumlah KK Berlistrik (KK)	1.018.607
5	Perdagangan	
5.1	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan)	35
5.2	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	2
6	Perindustrian	
6.1	Presentase Pertumbuhan Industri Olahan (%)	1
6.2	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	7

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2021
	(perusahaan)	
7	Kelautan dan Perikanan	
7.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	124.535
7.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	158.938
7.3	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih (ekor)	3 Milyar
7.4	Jumlah kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)	1
d	Fokus : Urusan Penunjang	
1	Perencanaan	
1.1	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota (%)	91
2	Keuangan	
2.1	Jumlah objek/sumber pendapatan baru	6
3	Pengawasan	
3.1	Hasil Penilaian Integritas	75
3.2	Level kapasitas APIP	3
4	Umum/Sekretariat	
4.1	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah yang memperoleh predikat minimal B (Baik) (%)	77
4.2	Persentase PD yang dibentuk sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (%)	92
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%)	71
6.4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)	78,95
C	ASPEK DAYA SAING	
a	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	
1.1	Tingkat kemantapan jalan provinsi (%)	63,46
1.2	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (Kawasan)	3
1.3	Cakupan layanan air minum (%)	77
1.4	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	15.558,5
1.5	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	505
1.6	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	459,59
1.7	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	75,09
1.8	Rasio elektrifikasi (%)	89,50
b	Fokus iklim berinvestasi	
1.1	Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)	34,73
1.2	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)	3,84
1.3	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari)	12
1.4	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	27,75
1.5	Indeks Resiko Bencana	135
1.6	Indeks Demokrasi Indonesia	75,5
c	Fokus Sumber Daya Manusia	
1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,50
1.2	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)	82
1.3	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3

BAB 8

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Tema Pembangunan RKPD tahun 2021 adalah "***Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial***". Tema ini mengandung substansi pokok pembangunan tahun 2021 yaitu menumbuhkan industri hilir yang berbasis potensi sumberdaya lokal melalui optimalisasi peran ekonomi kawasan dan ekonomi kerakyatan. Optimalisasi ekonomi Kawasan dan ekonomi kerakyatan difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah yang berdampak langsung kepada upaya percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial pasca Pandemi COVID-19.

Penyusunan RKPD tahun 2021, dilakukan melalui berbagai tahapan dan dibahas dalam forum koordinasi dan konsultasi, baik antar pemerintah kab/kota, Perangkat Daerah, lembaga pemerintah non kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, tergantung pada kemauan untuk berkerjasama semua pelaku pembangunan dalam mengawal dan mengendalikan pelaksanaan semua rencana program/kegiatan yang telah direncanakan.

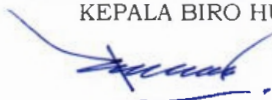
8.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD 2021 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. RKPD Tahun 2021 merupakan rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;
2. RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD tahun 2021;

3. RKPD tahun 2021 merupakan pedoman penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021;
4. Setiap PD/Dinas/Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan mengacu pada RKPD Tahun 2021 dengan tetap melakukan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renja K/L 2021 dan Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota tahun 2021;
5. Dalam pelaksanaan RKPD tahun 2021, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKPD tahun 2021 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat daerah dan bupati/walikota dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku
6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Gubernur, melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan RKPD berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menjadi bahan Perubahan RKPD tahun 2021;
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun pelaksanaan RKPD tahun 2021 yang selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022;
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2021. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. ROZANI ERAWADI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197101241997031007

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

LAMPIRAN II

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2020**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

**“MENUMBUHKAN INDUSTRI HILIR YANG MENDUKUNG
EKONOMI KERAKYATAN DAN EKONOMI KAWASAN
DALAM RANGKA MENDUKUNG PERCEPATAN
PEMULIHAN EKONOMI DAN
REFORMASI SOSIAL“**

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur**

HASIL PEMETAAN KEGIATAN MENURUT KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RKPD TAHUN 2021

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1.01.01 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
2	1.01	Pendidikan						
3	1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
4	1.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
5	11958	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6	11959	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7	11960	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
8	11961	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
9	11963	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
10	11964	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
11	11965	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
12	11966	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
13	11967	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
14	7316	Jumlah Surat yang di Administrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15	7317	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16	7318	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
17	7319	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
18	7320	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
19	7321	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
20	7322	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
21	7323	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
22	7324	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
23	7325	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
24	927	Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25	1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
26	1.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
27	7330	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
28	7331	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
29	7332	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
30	7333	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
31	7334	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
32	7335	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
33	7336	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
34	7337	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
35	927	Pelayanan Administrasi Perkantoran						
36	979	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada skpd dan unit kerja internal SKPD	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
37	1.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
38	1087	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun						
39	7338	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
40	7339	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
41	7340	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
42	7341	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
43	7342	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
44	7343	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
45	7344	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
46	7345	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
47	7346	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
48	7347	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
49	7348	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
50	7349	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
51	7350	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
52	7351	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
53	7352	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
54	979	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada skpd dan unit kerja internal SKPD	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
55	1.01.08.03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (DAK)						
56	927	Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
57	1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
58	1.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
59	1030	Jumlah koordinasi dan konsultasi						
60	1039	jumlah aparatur yang dilatih						
61	7353	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
62	927	Pelayanan Administrasi Perkantoran						
63	1.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
64	1.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
65	1071	Dokumen Perencanaan dan Anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
66	7357	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
67	1.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
68	1087	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
69	7358	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
70	7359	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
71	1.01.10.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DAK)						
72	1071	Dokumen Perencanaan dan Anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
73	1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa						
74	1.01.19.04	Rehabilitasi Prasarana Belajar SLB						
75	1030	Jumlah koordinasi dan konsultasi	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.22	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
76	9237	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang direhab	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
77	1.01.19.05	Pembangunan Prasarana Belajar SLB						
78	1030	Jumlah koordinasi dan konsultasi	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah
79	11828	Jumlah prasarana belajar SLB yang dibangun	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
80	9850	Jumlah Sarana dan prasarana sekolah direhab	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah
81	1.01.19.19	Pemberian Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Luar Biasa Negeri						
82	1104	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
83	1.01.19.20	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
84	1104	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
85	1.01.19.21	Rehabilitasi Prasarana Belajar SLB (DAK)						
86	1440	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
87	1.01.19.22	Pembangunan Prasarana Belajar SLB (DAK)						
88	1104	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
89	1.01.19.23	Pengadaan Sarana Belajar SLB (DAK)						
90	1104	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
91	1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
92	1.01.20.03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi						
93	1305	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih						
94	9637	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang dilatih	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
95	9638	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang dilatih	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
96	9639	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang dilatih	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus
97	1.01.20.09	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan						
98	10122	Jumlah program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMA yang ditingkatkan mutu dan kualitasnya	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
99	10124	Jumlah program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK yang ditingkatkan mutu dan kualitasnya	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
100	10126	Jumlah program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SLB yang ditingkatkan mutu dan kualitasnya	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus
101	1353	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan mutu dan kualitasnya						
102	993	Jumlah laporan yang menerapkan sistem dan informasi manajemen pendidikan						
103	1.01.23	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat						
104	1.01.23.01	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa						
105	10190	Jumlah Siswa Penerima Beasiswa SMA	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
106	10194	Jumlah Siswa Penerima Beasiswa SMK	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
107	10195	Jumlah Siswa Penerima Beasiswa SLB	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
108	1375	Jumlah Penerima Beasiswa	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
109	9648	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru
110	1.01.38	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan						
111	1.01.38.01	Pemberian beasiswa bagi siswa miskin (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMP/PLB, SMA/SMK/MA)						
112	10204	Jumlah penerima Beasiswa bagi siswa Miskin Jenjang SMA	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
113	10206	Jumlah penerima Beasiswa bagi siswa Miskin Jenjang SMK	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
114	10208	Jumlah penerima Beasiswa bagi siswa Miskin Jenjang SLB	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
115	1378	Jumlah Beasiswa bagi siswa Miskin						
116	1.01.38.02	Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa miskin di Perguruan Tinggi						
117	1385	Jumlah Mahasiswa Miskin yang Mendapatkan Beasiswa						
118	9650	Jumlah penerima Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin						
119	1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas						
120	1.01.39.12	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa						
121	1435	Jumlah sekolah penerima Alat Praktik Peraga Siswa	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
122	1.01.39.16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)						
123	1428	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
124	1.01.39.17	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah						
125	1440	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah						
126	9659	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
127	9660	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
128	1.01.39.24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri						
129	1428	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
130	1.01.39.25	Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA (DAK)						
131	1440	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
132	1.01.39.26	Pembangunan Prasarana Belajar SMA (DAK)						
133	1440	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
134	1.01.39.27	Pengadaan Sarana Belajar SMA (DAK)						
135	1440	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
136	1.01.39.28	Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Asrama Siswa SMA (Afirmasi) (DAK)						
137	1440	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
138	1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						
139	1.01.40.01	Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Menengah						
140	1438	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebar luasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah						
141	1.01.40.02	Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru
142	1440	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru
143	9659	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru
144	9660	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru
145	9665	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru
146	1.01.40.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan						
147	1442	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan						
148	9852	Jumlah alat praktik dan peraga	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.38	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa
149	1.01.40.10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)						
150	1446	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
151	1.01.40.18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri						
152	1446	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
153	1.01.40.19	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya (DAK)						
154	1440	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa
155	1.01.40.20	Pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi (DAK)						
156	1440	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.38	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa
157	1.01.40.21	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK)						
158	1440	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah
159	1.01.40.22	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya (DAK)						
160	1440	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
161	1.01.40.23	Rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK)						
162	3689	Jumlah Rehabilitasi ruang disekolah kab/kota jenjang SMA	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
163	1.01.40.24	Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya (DAK)						
164	3689	Jumlah Rehabilitasi ruang disekolah kab/kota jenjang SMA	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
165	1.01.43	Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
166	1.01.43.01	Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi						
167	10692	Jumlah Guru yang dilatih dengan teknologi informasi dan komunikasi						
168	10693	Jumlah Sekolah yang mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh						
169	6494	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk belajar mengajar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi						
170	1.01.43.02	Pembelajaran jarak jauh						
171	6494	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk belajar mengajar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi						
172	2.16	Kebudayaan						
173	2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya						
174	2.16.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah						
175	10377	Jumlah Data Sejarah yang bisa di akses						
176	1711	Terselenggaranya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah						
177	9676	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
178	9677	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga adat	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.22.02.1.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
179	2.16.15.06	Pengembangan nilai budaya seni dan film						
180	10387	Jumlah Sarana Cagar Budaya yang dibangun	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	2.22.05.1.02.04	Pendayagunaan Cagar Budaya
181	10695	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan						
182	1716	Terselenggaranya Pengembangan nilai budaya seni dan film						
183	9671	Jumlah Cagar Budaya yang terdaftar pada registrasi nasional	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	2.22.05.1.02.01	Register Cagar Budaya
184	9672	Jumlah sekolah yang memanfaatkan cagar budaya sebagai proses pendidikan	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	2.22.05.1.02.03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
185	9673	Jumlah Tenaga Cagar Budaya yang ditingkatkan kompetensinya	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	2.22.05.1.02.05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
186	9674	Jumlah Sekolah yang memanfaatkan museum	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	2.22.06.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum
187	2.16.15.09	Revitalisasi budaya daerah (DAK)						
188	979	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada skpd dan unit kerja internal SKPD						
189	2.16.15.10	Perekam Potensi Seni Budaya dan Sejarah Daerah (DAK)						
190	927	Pelayanan Administrasi Perkantoran						
191								
192	1.02.01	Dinas Kesehatan						

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
193	1.02	Kesehatan						
194	1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
195	1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
196	11968	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
197	11969	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
198	11970	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
199	11971	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
200	11973	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
201	11974	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
202	11975	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
203	11976	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
204	11977	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
205	6359	Kualitas layanan administrasi RS						
206	7361	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
207	7362	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
208	7363	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
209	7364	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
210	7365	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
211	7366	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
212	7367	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
213	7368	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
214	7369	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
215	7370	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
216	84	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
217	1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
218	1.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
219	7371	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
220	7372	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
221	7373	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
222	7374	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
223	7375	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
224	7376	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
225	7377	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
226	7378	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
227	87	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana						
228	1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
229	3871	Jumlah unit kantor yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana						
230	6354	Alat kesehatan, alat kantor dan gedung terpelihara						
231	7379	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
232	7380	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
233	7381	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
234	7382	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
235	7383	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
236	7384	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
237	7385	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
238	7386	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
239	7387	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
240	7388	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
241	7389	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
242	7390	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
243	7391	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
244	7392	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
245	7393	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
246	90	Jumlah unit yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana						
247	1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
248	1.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
249	3872	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah pertahun						
250	3874	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pertahun						
251	6356	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur						
252	90	Jumlah unit yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana						
253	93	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan kedalam daerah						
254	94	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
255	95	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk tamu dan rapat)						
256	1.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
257	2989	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya						
258	6356	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur						
259	7395	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal						
260	7396	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
261	7397	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
262	7398	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
263	7399	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
264	7400	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
265	7401	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
266	98	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/Bimtek	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
267	1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
268	1.02.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
269	102	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
270	7402	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah						
271	1.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
272	107	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
273	7404	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
274	1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan						
275	1.02.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan						
276	11209	Laporan Obat dan Vaksin yang didistribusikan	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1.02.04.1.01.02	Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
277	11219	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1.02.04.1.01.02	Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik
278	11495	Pembinaan, pengelolaan obat & vaksin, makanan dan minuman serta Fasilitas Kesehatan lainnya	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1.02.04.1.01.02	Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik
279	6116	Persentase pemenuhan kebutuhan obat , vaksin dan perbekalan kesehatan (buffer stok)	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak
280	1.02.15.02	Pemenuhan Sarana/Prasarana Instalasi Farmasi Provinsi (DAK)						
281	11580	Tersedianya sarana pada instalasi Farmasi Provinsi	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1.02.04.1.01.02	Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik
282	11585	Tersedianya Prasarana pada Instalasi Farmasi Provinsi	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1.02.04.1.01.02	Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik
283	1836	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1.02.04.1.01.02	Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik
284	1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat						
285	1.02.16.05	Perbaikan Gizi Masyarakat						
286	11334	Pengelolaan Data (pengumpulan data, pengolahan dan analisis, data) Gizi	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
287	11335	Fasilitasi perencanaan dan distribusi logistik gizi	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
288	11336	Pembinaan/koordinasi/pengawasan dan pengendalian gizi masyarakat	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
289	11337	Monitoring & evaluasi program gizi masyarakat	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
290	6092	Jumlah kab/kota yang dibina untuk perbaikan gizi	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
291	1.02.16.07	Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan						
292	11338	Pembinaan/ koordinasi/ Regional Maintenance Centre (RMC) ke Kab/ Kota	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
293	11340	Pemeliharaan Alat Kesehatan terkait RMC	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
294	11342	Advokasi/ fasilitasi pemeliharaan alat kesehatan terkait RMC	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center
295	11343	Pelayanan pemeliharaan Alkes pada faskes kab/kota	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
296	11344	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang dilakukan pembinaan & pengawasan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
297	11612	Pengadaan alat operasional Regional Maintenance Centre (RMC) ke Kab/Kota	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
298	6111	Jumlah fasyankes yang difasilitasi dan dilakukan kegiatan pemeliharaan alkes (RMC)	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
299	6112	Jumlah sarana produksi dan distribusi yg mendapatkan izin alat kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
300	6113	Jumlah Fasyankes yang dibina untuk mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
301	6114	Jumlah sarana produksi dan distribusi yg mendapatkan izin Kefarmasian	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
302	1.02.16.09	Peningkatan Kesehatan Masyarakat						
303	11347	Pembinaan/koordinasi/fasilitasi Penerapan SPM bidang kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
304	11348	Monitoring & evaluasi Penerapan SPM	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
305	11349	Konsultasi /koordinasi dengan pusat dalam penerapan SPM Bidang kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
306	6110	Jumlah Kab/kota yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring evaluasi dalam melaksanakan SPM	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
307	6646	Jumlah masyarakat yang diperiksa kebugarannya	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
308	1.02.16.14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan						
309	11628	Pembinaan terkait Stop Buang Air Besar Sembarang (SBS)	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
310	11631	Pembinaan Program Kesehatan Lingkungan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
311	11632	Pembinaan Kabupaten Kota Sehat (KKS)	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
312	6115	Persentase pembinaan Kab/Kota memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
313	1.02.16.15	Pembinaan upaya kesehatan masyarakat sekunder dan primer (DAK)						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
314	3709	Jumlah Kab/Kota yang dikonfirmasi kasus gizi buruk	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
315	5118	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan AMP	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
316	6092	Jumlah kab/kota yang dibina untuk perbaikan gizi	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
317	1.02.16.16	Rakontek terpadu tingkat kabupaten dan kota (DAK)						
318	3709	Jumlah Kab/Kota yang dikonfirmasi kasus gizi buruk	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
319	5118	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan AMP	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
320	6092	Jumlah kab/kota yang dibina untuk perbaikan gizi	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
321	1.02.16.17	Pengelolaan Satker (DAK)						
322	3709	Jumlah Kab/Kota yang dikonfirmasi kasus gizi buruk	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
323	4770	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan AMP	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
324	6092	Jumlah kab/kota yang dibina untuk perbaikan gizi	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
325	1.02.16.18	Penurunan Stunting (DAK)						
326	3710	Jumlah Kab/Kota yang didistribusikan PMT sesuai sasaran	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
327	4026	Jumlah Kab/Kota yang dikonfirmasi kasus gizi buruk	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
328	6092	Jumlah kab/kota yang dibina untuk perbaikan gizi	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
329	1.02.17	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan						
330	1.02.17.01	Kemitraan Bagi Pasien Kurang Mampu, Non BPJS						
331	3804	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan program JKN menuju UHC	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
332	5782	Jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang memperoleh jaminan pelayanan kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
333	1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat						
334	1.02.19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
335	11383	Penyebarluasan Infomrasi bidang kesehatan terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
336	11633	Pembinaan/pemberdayaan/penggalangan kemitraan PSM & lintas sektor tingkat daerah provinsi	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
337	11635	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian ke Kab/Kota	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
338	3850	Jumlah kegiatan penguatan OPD/Lintas Sektor yang mengimplementasikan kebijakan publik berwawasan kesehatan	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
339	3857	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan penilaian (posyandu dan PHBS) dalam setahun	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
340	3861	Jumlah Rumah Sakit di Kalimantan Timur yang dilakukan pembinaan PKRS	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
341	1.02.19.03	Kampanye sosialisasi, advokasi perilaku hidup sehat di tingkat provinsi dan pemberdayaan masyarakat (DAK)						
342	1972	Jumlah kab/kota yang melaksanakan min 5 tema kampanye Germas hidup sehat	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
343	3850	Jumlah kegiatan penguatan OPD/Lintas Sektor yang mengimplementasikan kebijakan publik berwawasan kesehatan	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
344	1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular						
345	1.02.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular						
346	11386	Jumlah Pengelolaan Data program P2PM (prioritas nasional maupun prioritas bidang), P2PTM dan program Imunisasi	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
347	11387	Jumlah Pembinaan/koordinasi/pengendalian pelayanan kesehatan P2PM, P2PTM dan program imunisasi	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
348	11388	Jumlah Advokasi/fasilitasi pelayanan kesehatan program P2PM, P2PTM dan program imunisasi	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
349	11390	Jumlah Monitoring & evaluasi pelayanan kesehatan P2PM, P2PTM dan program imunisasi	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
350	6117	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2TB untuk mencapai CDR=>70% dan SR=>90%	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
351	6118	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2HIV untuk mencapai presentase ODHA yang mendapatkan ARV => 55%	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
352	6119	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malaria untuk mencapai persentase pengobatan Malaria Positif sesuai standart =>95%	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
353	6120	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
354	1.02.22.09	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah						
355	11391	Jumlah pengelolaan Data KLB	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
356	11400	Jumlah Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
357	11414	Pengelolaan Data daerah terdampak bencana dan/atau berpotensi bencana	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
358	11643	Jumlah Pengelolaan Data SKDR	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
359	11644	Jumlah Pembinaan/Koordinasi dalam pelaksanaan SKDR	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
360	11645	Jumlah Advokasi/Fasilitasi pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan SKDR	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
361	11646	Jumlah monitoring & evaluasi pelaksanaan SKDR	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
362	11647	Jumlah pengiriman &/atau pengambilan spesimen ke lab rujukan nasional	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
363	11648	Jumlah penyediaan logistik BHP &/atau spesimen carier	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
364	11649	Jumlah Pelaksanaan PE dalam antisipasi KLB	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
365	6121	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam pencapaian IDL	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
366	6122	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam pencapaian persentase respon kewaspadaan kejadian luar biasa	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
367	6653	Jumlah Kab/Kota yang melakukan sosialisasi dan membuat rencana kontijensi wabah/bencana	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
368	1.02.22.10	Rujukan Spesimen (DAK)						
369	11647	Jumlah pengiriman &/atau pengambilan spesimen ke lab rujukan nasional	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
370	11648	Jumlah penyediaan logistik BHP &/atau spesimen carier	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
371	1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
372	1.02.23.07	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar						
373	11435	Pembinaan kepada tim pendamping FKTP	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
374	11445	Pembinaan pelaksanaan mutu akreditasi FKTP	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
375	11446	Visitasi dan Penilaian FKTP Berprestasi	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
376	11449	Pemantauan FKTP dalam pemenuhan SPA sesuai standar nasional	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
377	11450	Advokasi/Sosialisasi/ Koordinasi Fasyankes	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
378	11453	Pembinaan pengawasan dan pengendalian Faskes Lain (Labkes) yang menyelenggarakan mutu layanan (PMI, PME, uji banding, akreditasi dan evaluasi)	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
379	11454	Kab/kota yang dibina untuk peningkatan IKS setelah dilaksanakan intervensi lanjut	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
380	11455	Pembinaan Kab/kota yang melaksanakan program pelayanan dasar	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
381	11456	Advokasi/Sosialisasi/ Koordinasi/Workshop Penguatan manajemen Puskesmas	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
382	11457	Monev pelaksanaan upaya yankes	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
383	11458	Visitasi dan penilaian Puskesmas	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
384	11460	Rekomendasi registrasi yang diberikan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
385	11461	Jumlah DTPK yang telah mengembangkan pelayanan berbasis Telemedicine	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
386	6128	jumlah puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
387	1.02.23.08	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan						
388	11651	Kegiatan tertentu tingkat Provinsi yang diberikan pelayanan SPGDT	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
389	11652	Pembinaan, pengawasan dan perijinan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
390	2873	Jumlah RSUD yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Akreditasi RS (SNARS) edisi I	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit
391	5117	Jumlah Kab/kota yang memiliki Fasyankes telah mempersiapkan pelayanan telemedicine	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
392	6123	Persentase kejadian bencana yang ditangani	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
393	6124	Persentase KLB yang ditangani	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
394	6129	Jumlah RSUD yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan akreditasi SNARS edisi I	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit
395	1.02.23.11	Peningkatan pelayanan kesehatan Pengembangan						
396	11515	Pengelolaan Data	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
397	11517	Advokasi/Penguatan Program Yankestrad	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Pengalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
398	11522	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
399	11655	Pembinaan/koordinasi pelayanan kesehatan tradisional	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
400	11657	Monitoring & evaluasi pelayanan kesehatan tradisional	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
401	6130	Jumlah kab kota yang telah melakukan pembinaan penyehat tradisional	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
402	1.02.23.12	Penguatan program Indonesia sehat melalui pendekatan Keluarga (DAK)						
403	11454	Kab/kota yang dibina untuk peningkatan IKS setelah dilaksanakan intervensi lanjut	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
404	3714	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan AMP	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
405	4026	Jumlah Kab/Kota yang dikonfirmasi kasus gizi buruk	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
406	1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD						
407	1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
408	3866	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
409	1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan						
410	1.02.56.01	Pendidikan teknis kesehatan						
411	3813	Jumlah tenaga yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
412	6131	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
413	1.02.56.03	Pengembangan/fasilitasi SDM, Prasarana dan teknologi kesehatan (DAK)						
414	11658	Jabatan Fungsional kesehatan yang di uji kompetensinya	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01	Penemuan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
415	11659	Jumlah Pembinaan/koordinasi/pengendalian pelayanan kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan SDMK	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
416	11660	Pengawasan Tenaga Kesehatan Asing	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
417	2989	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
418	1.02.56.04	Standarisasi Tenaga Kesehatan di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan						
419	11519	Tersedianya data perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
420	11658	Jabatan Fungsional kesehatan yang di uji kompetensinya	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
421	11662	Advokasi Kab/Kota terkait distribusi dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
422	6132	Jumlah puskesmas daerah DTPK/3T, sangat terpencil dan terpencil yang difasilitasi tenaga kesehatan sesuai standar	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
423	1.02.59	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular						
424	1.02.59.01	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular						
425	11386	Jumlah Pengelolaan Data program P2PM (prioritas nasional maupun prioritas bidang), P2PTM dan program Imunisasi	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
426	11387	Jumlah Pembinaan/koordinasi/pengendalian pelayanan kesehatan P2PM, P2PTM dan program imunisasi	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
427	11388	Jumlah Advokasi/fasilitasi pelayanan kesehatan program P2PM, P2PTM dan program imunisasi	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
428	11390	Jumlah Monitoring & evaluasi pelayanan kesehatan P2PTM, P2PTM dan program imunisasi	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
429	11400	Jumlah Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
430	11535	Jumlah penderita KIPI Serius di rawat inap yang mendapat pembiayaan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
431	11537	Jumlah penyediaan logistik PTM pada event2 tertentu	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
432	11538	Jumlah Pembinaan OPD untuk pelaksanaan Perda KTR no 5 th 2017 dan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
433	11541	Jumlah Pengelolaan Data kesehatan jiwa	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
434	11542	Jumlah Pembinaan/koordinasi/pengendalian pelayanan kesehatan jiwa	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
435	11544	Jumlah Advokasi/fasilitasi pelayanan kesehatan jiwa	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
436	11545	Jumlah Monitoring & evaluasi pelayanan kesehatan jiwa	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
437	11546	Jumlah Pengelolaan Data Napza	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
438	11548	Jumlah Pembinaan/koordinasi/pengendalian pelayanan Napza	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
439	11549	Jumlah Advokasi/fasilitasi pelayanan Napza	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
440	11551	Jumlah Monitoring & evaluasi pelayanan Napza	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
441	6125	Jumlah PD provinsi yang dilakukan pembinaan deteksi dini faktor resiko PTM dan implementasi KTR	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
442	6650	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan implementasi KTR minimal di 50% sekolah	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
443	6651	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai min 50% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu PTM (kasus Hipertensi & DM)	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
444	6652	Jumlah Kab/Kota yang min 50% Puskesmasnya melaksanakan deteksi dini kanker payudara pada perempuan usia 30-50 tahun	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
445								
446	1.02.02 - RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda							

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
447	1.02	Kesehatan						
448	1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
449	1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
450	11978	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
451	11979	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
452	11980	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
453	11981	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
454	11983	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
455	11984	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
456	11985	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
457	11986	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
458	11987	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
459	6152	Kualitas layanan administrasi RS						
460	7406	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
461	7407	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
462	7408	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
463	7409	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
464	7410	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
465	7411	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
466	7412	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
467	7413	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
468	7414	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
469	7415	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
470	1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
471	1.02.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
472	4207	Jumlah laporan SAKIP						
473	8069	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
474	1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD						
475	1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
476	710	Jumlah pelayanan dan pendukung pelayanan yang diadakan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
477								
478	1.02.03 - RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan							
479	1.02	Kesehatan						
480	1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
481	1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
482	11882	Jumlah bulan pelaksanaan kebersihan lingkungan Rumah Sakit						
483	11988	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
484	11989	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
485	11990	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
486	11991	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
487	11993	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
488	11994	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
489	11995	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
490	11996	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
491	11997	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
492	5258	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
493	7490	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
494	7491	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
495	7492	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
496	7493	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
497	7494	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
498	7495	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
499	7496	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
500	7497	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
501	7498	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
502	7499	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
503	1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
504	1.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
505	2379	Jumlah laporan capaian kinerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
506	7531	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
507	9213	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun						
508	1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD						
509	1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan						
510	6523	Jumlah Kunjungan Pasien	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
511								
512	1.02.04 - Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam							
513	1.02	Kesehatan						
514	1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
515	1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
516	11998	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
517	11999	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
518	12000	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
519	12001	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
520	12003	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
521	12004	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
522	12005	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
523	12006	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
524	12007	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
525	357	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran						
526	7532	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
527	7533	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
528	7534	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
529	7535	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
530	7536	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
531	7537	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
532	7538	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
533	7539	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
534	7540	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
535	7541	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
536	1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
537	1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
538	4897	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Yang Dipelihara						
539	7550	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
540	7552	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
541	7557	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
542	7558	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
543	7560	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
544	7561	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
545	7562	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
546	7564	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
547	7565	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
548	7605	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
549	7606	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
550	7607	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
551	7608	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
552	7609	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
553	7611	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
554	1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
555	1.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
556	3925	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
557	7619	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
558	7621	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
559	1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
560	1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan						
561	1155	Jumlah Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
562	4914	Jumlah Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
563								
564	1.03.01 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat							
565	1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
566	1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
567	1.03.04.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
568	11246	Jumlah Bahan / Material						
569	11247	Jumlah Jasa Tenaga Teknis / Non Teknis						
570	11248	Jumlah Dokumentasi						
571	12008	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
572	12009	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
573	12010	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
574	12011	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
575	12013	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
576	12014	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
577	12015	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
578	12016	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
579	12017	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
580	33	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
581	36	Meningkatnya Kinerja Aparatur						
582	7622	Jumlah Surat yang di Administrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
583	7623	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
584	7624	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
585	7625	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
586	7626	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
587	7627	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
588	7628	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
589	7629	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
590	7630	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
591	7631	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
592	1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
593	1.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
594	11272	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor						
595	11274	Jumlah Pengadaan Peralatan Komputer						
596	11275	Jumlah Pengadaan Peralatan Dapur						
597	11277	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin						
598	11626	jumlah pengadaan Alat Berat/ besar						
599	36	Meningkatnya Kinerja Aparatur						
600	42	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor						
601	7624	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
602	7629	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
603	7632	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
604	7633	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
605	7634	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
606	7635	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
607	7636	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
608	7637	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
609	7638	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
610	7639	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
611	1.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
612	10376	Jumlah bangunan dan lingkungan yang dilakukan pemeliharaan						
613	11262	Jumlah Pemeliharaan Kantor dan Taman						
614	11264	Jumlah Pemeliharaan Alat Kantor						
615	11341	Jumlah bahan bakar minyak						
616	11630	Jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Besar / Berat						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
617	36	Meningkatnya Kinerja Aparatur						
618	3826	Luas bangunan yang dipelihara						
619	49	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
620	52	Luas Bangunan yang di Rehabilitasi						
621	7624	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
622	7639	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
623	7640	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
624	7641	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
625	7642	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
626	7643	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
627	7644	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
628	7645	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
629	7646	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
630	7647	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
631	7648	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
632	7649	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
633	7650	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
634	7651	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
635	7652	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
636	7653	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
637	7654	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
638	1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
639	1.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
640	36	Meningkatnya Kinerja Aparatur						
641	3827	Jumlah porsi penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu						
642	4458	Jumlah pelaksanaan koordinasi luar dan dalam daerah						
643	55	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
644	56	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
645	58	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu						
646	7631	Jumlah Makanan dan Minuman						
647	1.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
648	11623	jumlah pakaian olah raga dan kelengkapannya						
649	36	Meningkatnya Kinerja Aparatur						
650	3828	Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi dan kursus-kursus singkat						
651	4459	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan						
652	59	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan / Bimtek						
653	7627	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
654	7628	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
655	7656	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
656	7657	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
657	7658	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
658	7659	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
659	7660	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
660	7661	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
661	7662	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
662	9857	Jumlah Non PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi dan kursus-kursus singkat						
663	1.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
664	1.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
665	65	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
666	7663	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah						
667	1.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
668	67	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
669	7664	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah						
670	7665	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
671	1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan						
672	1.03.15.01	Perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan						
673	10197	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
674	10202	Jumlah Dokumen Identifikasi Penurunan Kinerja Geometrik Perkerasan dan Fasilitas Pelengkap Jalan	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
675	790	Jumlah Laporan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan
676	1.03.15.02	Pembangunan Jalan						
677	10215	Panjang Jalan Yang Di Rekonstruksi	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.08	Rekonstruksi Jalan
678	10221	Jumlah Ruas Lahan Yang Dibebaskan Untuk Penyelenggaraan Jalan	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
679	10225	Panjang Jalan Yang Dilebarkan Dengan Tambahan Lajur	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
680	3476	Panjang Jalan yang Dibangun	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan
681	1.03.15.03	Pembangunan Jembatan, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong						
682	10230	Jumlah Jembatan Yang Dibangun	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12	Pembangunan Jembatan
683	3611	Jumlah jembatan yang dibangun	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.12	Pembangunan Jembatan
684	3612	Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang dibangun	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan
685	3613	Panjang saluran drainase yang dibangun	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan
686	1.03.16	Program Pengelolaan Sumber Daya Air						
687	1.03.16.01	Pembangunan Prasarana Air Baku, Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai						
688	10621	Panjang bangunan pengaman pantai yang terbangun	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
689	10625	Panjang bangunan pengaman pantai yang ditingkatkan	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.43	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
690	10633	Jumlah Bendungan	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.05	Pembangunan Bendungan
691	10634	Jumlah Bendung	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.05	Pembangunan Bendungan
692	10635	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
693	10637	Kapasitas Unit Air Baku	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.08	Pembangunan Unit Air Baku
694	10638	Jumlah Unit Air yang di rehabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.23	Rehabilitasi Unit Air Baku
695	10640	jumlah Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air yang terbangun	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.47	Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air
696	10641	Panjang tanggul sungai terbangun	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
697	10644	Bangunan Perkuatan Tebing terbangun	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
698	10645	Kanal Banjir terbangun	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.12	Pembangunan Kanal Banjir
699	10647	Stasiun Pompa Banjir terbangun	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
700	10648	Polder/Kolam Retensi terbangun	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
701	10650	Bangunan Perkuatan Tebing yang di rehabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
702	10652	Panjang sungai yang di lakukan Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
703	10655	Panjang sistem Drainase perkotaan	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.04	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan
704	10656	Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya
705	11037	Jumlah Node Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.19	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)
706	1146	Panjang Bangunan Pengaman Pantai						
707	3457	Jumlah lokasi banjir yang ditangani						
708	3459	Jumlah sarana dan prasarana air baku yang dibangun						
709	1.03.16.02	Pembangunan Jaringan Irigasi						
710	10658	Jumlah Bendung Irigasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.03	Pembangunan Bendung Irigasi
711	10660	Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
712	10662	Jumlah Daerah Irigasi yang diawasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
713	1882	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
714	1883	Jumlah bendung yang dibangun						
715	1.03.16.03	Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Air						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
716	10627	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Penampung Air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
717	10629	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Baku	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
718	10631	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
719	10654	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
720	10669	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
721	10675	Jumlah Pos Hidrologi yang dikelola Provinsi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
722	10678	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibentuk di tingkat DAS	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
723	10679	Jumlah Izin Sumber Daya Air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
724	10682	Jumlah Sidang Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
725	3462	Jumlah Prasarana SDA yang direncanakan						
726	3463	Jumlah Peraturan Gubernur yang Ditetapkan						
727	3464	Jumlah Pembangunan Prasarana SDA yang Diawasi						
728	1.03.17	Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakarya						
729	1.03.17.01	Pembangunan dan Rehabilitasi gedung						
730	11737	Luas bangunan gedung yang dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
731	11738	Luas bangunan dan lingkungan di kawasan yang terdampak dilakukan penataan	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.1.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan
732	11740	Luasan terdampak pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Perumahan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perumahan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
733	11741	Luas pembangunan bangunan gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
734	3051	Jumlah Gedung yang dibangun/direhabilitasi						
735	1.03.17.02	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
736	10256	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Dibangun baru	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
737	10260	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Ditingkatkan	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan
738	10268	Jumlah IPALD yang dibangun	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.07	Penyediaan IPALD
739	10275	Jumlah Prasarana IPLT yang dibangun	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.06	Penyediaan Prasarana IPLT
740	10277	Jumlah TPA/TPST/SPA yang dibangun	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.1.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
741	11079	Jumlah sambungan rumah IPAL yang dibangun atau disambungkan	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.09	Penyediaan Prasarana Sambungan Rumah
742	11751	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Diperluas	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
743	11755	Jumlah TPA/TPST/SPA yang ditingkatkan	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.1.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
744	3578	Jumlah SPAM (unit)						
745	3580	Jumlah IPAL yang dibangun (Unit)						
746	3582	Jumlah IPLT yang dibangun (Unit)						
747	3584	Jumlah TPA yang dibangun (Unit)						
748	1.03.17.03	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan						
749	10263	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.13	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota
750	10281	Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang disusun	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
751	10284	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
752	10292	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
753	10313	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang disusun	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
754	10323	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA yang disusun	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
755	10325	Jumlah laporan supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM yang disusun	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
756	10327	Jumlah laporan supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang disusun	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.10	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
757	10335	Jumlah laporan supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan yang disusun	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.1.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
758	11094	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
759	11097	Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
760	11105	Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
761	11107	Dokumen hasil bantuan teknis pembangunan Bangunan Gedung Negara	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
762	11108	Jumlah Dokumen Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.05	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi
763	11109	Dokumen hasil bantuan teknis bagi pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya						
764	11120	Jumlah Bimtek Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.1.01.06	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota
765	11762	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA yang dilakukan supervisi	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.1.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
766	3586	Jumlah Dokumen perencanaan Gedung yang disusun						
767	3589	Jumlah Dokumen Perencanaan SPAM, IPAL, IPLT dan TPA yang disusun						
768	3606	Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Infrastruktur yang disusun						
769	1.03.18	Program Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi						
770	1.03.18.01	Penyelenggaraan Pengaturan Jasa Konstruksi						
771	10962	Jumlah dokumen SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
772	3593	Jumlah Raperda Jasa Konstruksi						
773	4225	Jumlah Peraturan/Pedoman Jasa Konstruksi						
774	4506	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Koordinasi Jasa Konstruksi						
775	1.03.18.02	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi						
776	10933	Jumlah Peserta Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
777	10955	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
778	10957	Jumlah Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dikelola	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
779	10961	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
780	10966	Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
781	11763	Jumlah instruktur/assessor/ penyelenggara pelatihan yang disiapkan	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan
782	3595	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi
783	7309	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi						
784	7310	Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Mengikuti Bimbingan Teknis						
785	7311	Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Mengikuti Seminar / Sosialisasi						
786	7312	Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Mengikuti Kompetensi Manajemen Proyek						
787	1.03.18.03	Pengawasan Jasa Konstruksi						
788	10967	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
789	6943	Jumlah Kegiatan Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi						
790	6944	Jumlah Kegiatan Pengawasan tertib Usaha Jasa Konstruksi						
791	7062	jumlah kegiatan pengawasan tertib pemanfaatan dan kinerja						
792	1.03.19	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I						
793	1.03.19.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I						
794	1015	Jumlah jembatan yang dipelihara efektif	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan
795	10510	Jumlah jembatan yang dipelihara	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan
796	11768	Panjang Jalan yang dipelihara berkala	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan
797	11769	Panjang Jalan yang dipelihara rutin	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan
798	11770	Panjang Jalan yang direhabilitasi	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan
799	11794	Panjang jalan dengan kondisi mantap di Wilayah I	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan
800	3502	Panjang Jalan yang Dipelihara di Wilayah I	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan
801	398	Terlaksananya Pemeliharaan Fungsional Jalan	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan
802	1.03.19.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana & prasarana SDA & CK Wilayah I						
803	10601	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi
804	10612	Jumlah bendung irigasi yang dipelihara	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
805	11772	Panjang Kanal Banjir yang di rehabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.27	Rehabilitasi Kanal Banjir

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
806	11773	Embung dan Penampungan air lainnya yang di rehabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
807	11774	Tanggul Sungai yang di rehabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai
808	11776	Bangunan Perkuatan Tebing yang direhabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
809	11777	Pintu air/Bendung pengendali banjir yang di rehabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
810	11778	Stasiun Pompa Banjir yang direhabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
811	11779	Polder/Kolam Retensi yang direhabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
812	11780	Panjang sungai yang di lakukan Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
813	11781	Embung dan Penampungan air lainnya yang di pelihara	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
814	11782	Tanggul dan Tebing Sungai yang di pelihara	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
815	11783	Kanal Banjir yang di pelihara	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
816	11784	Stasiun Pompa Banjir yang di pelihara	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
817	11785	Polder/Kolam Retensi yang di pelihara	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
818	11787	Panjang Jaringan DI yang direhabilitasi						
819	11789	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dipelihara	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
820	11791	Unit pengelola Irigasi yang beroperasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi
821	11792	Jumlah Sistem Drainase yang dipelihara	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
822	11793	Jumlah SDA & Bangunan Pengaman Pantai yang dikelola						
823	3618	Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terpelihara						
824	3797	Jumlah bangunan pengendali banjir yang dipelihara efektif						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
825	503	Daerah irigasi yang terpelihara						
826	1.03.20	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II						
827	1.03.20.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II						
828	10501	Panjang jalan yang dipelihara	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan
829	10510	Jumlah jembatan yang dipelihara	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan
830	11768	Panjang Jalan yang dipelihara berkala	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan
831	11769	Panjang Jalan yang dipelihara rutin	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan
832	11770	Panjang Jalan yang direhabilitasi	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan
833	11795	Panjang jalan dengan kondisi mantap di Wilayah II	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan
834	3619	Terlaksananya Pemeliharaan Fungsional Jalan	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan
835	3620	Jumlah Jembatan yang dipelihara efektif	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan
836	1.03.20.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana & prasarana SDA & CK Wilayah II						
837	10601	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi
838	10612	Jumlah bendung irigasi yang dipelihara	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
839	11772	Panjang Kanal Banjir yang di rehabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.27	Rehabilitasi Kanal Banjir
840	11773	Embung dan Penampungan air lainnya yang di rehabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
841	11774	Tanggul Sungai yang di rehabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai
842	11776	Bangunan Perkuatan Tebing yang direhabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
843	11777	Pintu air/Bendung pengendali banjir yang di rehabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
844	11778	Stasiun Pompa Banjir yang direhabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
845	11779	Polder/Kolam Retensi yang direhabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
846	11780	Panjang sungai yang di lakukan Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
847	11781	Embung dan Penampungan air lainnya yang di pelihara	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
848	11782	Tanggul dan Tebing Sungai yang di pelihara	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
849	11783	Kanal Banjir yang di pelihara	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
850	11784	Stasiun Pompa Banjir yang di pelihara	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
851	11785	Polder/Kolam Retensi yang di pelihara	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
852	11786	Jumlah D.I yang dikelola						
853	11787	Panjang Jaringan DI yang direhabilitasi						
854	11789	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dipelihara						
855	11791	Unit pengelola Irigasi yang beroperasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi
856	11792	Jumlah Sistem Drainase yang dipelihara	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
857	11793	Jumlah SDA & Bangunan Pengaman Pantai yang dikelola						
858	3618	Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terpelihara						
859	3797	Jumlah bangunan pengendali banjir yang dipelihara						
860	1.03.21	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III						
861	1.03.21.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III						
862	1015	Jumlah jembatan yang dipelihara efektif	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan
863	10510	Jumlah jembatan yang dipelihara	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan
864	11768	Panjang Jalan yang dipelihara berkala	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan
865	11769	Panjang Jalan yang dipelihara rutin	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan
866	11770	Panjang Jalan yang direhabilitasi	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan
867	11796	Panjang jalan dengan kondisi mantap di Wilayah III	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan
868	3504	Panjang Jalan yang Dipelihara di Wilayah III	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan
869	638	Panjang jalan yang dipelihara Fungsional UPTD Wilayah III	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan
870	1.03.21.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana & prasarana SDA & CK Wilayah III						
871	10582	Bangunan kekuatan tebing yang direhabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
872	10601	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi
873	10607	Jumlah DI yang dipelihara	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
874	10612	Jumlah bendung irigasi yang dipelihara	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
875	11772	Panjang Kanal Banjir yang di rehabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.27	Rehabilitasi Kanal Banjir
876	11773	Embung dan Penampungan air lainnya yang di rehabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
877	11774	Tanggul Sungai yang di rehabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai
878	11776	Bangunan Perkuatan Tebing yang direhabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
879	11777	Pintu air/Bendung pengendali banjir yang di rehabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.36	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
880	11778	Stasiun Pompa Banjir yang direhabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
881	11779	Polder/Kolam Retensi yang direhabilitasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
882	11780	Panjang sungai yang di lakukan Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.46	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
883	11781	Embung dan Penampungan air lainnya yang di pelihara	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
884	11782	Tanggul dan Tebing Sungai yang di pelihara	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
885	11783	Kanal Banjir yang di pelihara	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
886	11784	Stasiun Pompa Banjir yang di pelihara	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
887	11785	Polder/Kolam Retensi yang di pelihara	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
888	11786	Jumlah D.I yang dikelola						
889	11787	Panjang Jaringan DI yang direhabilitasi						
890	11789	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dipelihara						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
891	11791	Unit pengelola Irigasi yang beroprasional	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi
892	11792	Jumlah Sistem Drainase yang dipelihara	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
893	11793	Jumlah SDA & Bangunan Pengaman Pantai yang dikelola						
894	3618	Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terpelihara						
895	1.03.22	Program Penyelenggaraan Laboratorium Konstruksi						
896	1.03.22.01	Pelayanan Pengujian Mutu Konstruksi						
897	7209	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Konstruksi	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	5.05.02.1.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
898	7211	Jumlah Dokumen Monitoring Mutu Konstruksi	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	5.05.02.1.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
899	1.03.22.02	Penerapan Strandarisasi Konstruksi						
900	7210	Jumlah Dokumen Kaji Ulang Laboratorium	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	5.05.02.1.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
901	9620	Jumlah Dokumen Hasil Audit Internal Laboratorium	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	5.05.02.1.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
902	1.03.70	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang						
903	1.03.70.01	Perencanaan Penataan Ruang						
904	10132	Laporan Penetapan RTRW dan RRTR Provinsi						
905	10136	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang						
906	10299	Dokumen Persyaratan Pengajuan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	1.03.12.1.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
907	10300	Jumlah Dokumen Persyaratan Pengajuan Persetujuan Substansi RRTR Provinsi	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	1.03.12.1.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi
908	10302	Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang yang disosialisasikan	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	1.03.12.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang
909	10305	Jumlah Dokumen Teknis Penyusunan RTRW Provinsi	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.02	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.03.12.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi
910	10306	Jumlah Dokumen Teknis Penyusunan RRTR Provinsi	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.02	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.03.12.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi
911	10308	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota yang dievaluasi	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.02	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.03.12.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
912	10310	Laporan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.02	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.03.12.1.02.04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
913	3467	Prosentase Jumlah RRTR KSP yang mendapat Persetujuan Substansi						
914	1.03.70.02	Pemanfaatan Ruang & Pengembangan Infrastruktur Wilayah						
915	10137	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi						
916	10312	Jumlah Dokumen Teknis Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
917	10314	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Tematik	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang
918	7313	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang						
919	7314	Layanan Informasi SIMTARU						
920	1.03.70.03	Pengendalian Pemanfaatan Ruang						
921	10139	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi						
922	10315	Laporan Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi PPNS Bidang Penataan Ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
923	10318	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
924	3470	Jumlah lokasi pada Kabupaten/Kota yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang						
925	4495	Operasionalisasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah						
926	1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
927	1.04.15	Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
928	1.04.15.01	Pembangunan Rumah Layak & Prasarana Sarana dan Utilitas						
929	10114	Jumlah kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana						
930	10117	PSU yang dibangun	1.04.04	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.04.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.04.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
931	10118	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman						
932	11797	Jumlah kegiatan pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang dilakukan						
933	11798	Jumlah Rumah Yang direhabilitasi	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
934	3568	Jumlah perumahan yang mendapat bantuan PSU (unit)						
935	6673	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani						
936	9867	Jumlah Laporan Hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi						
937	9868	Jumlah Laporan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau terkena Relokasi Program Provinsi						
938	9869	Jumlah Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan						
939	9872	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang dibangun dan dikembangkan						

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
940	9873	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang dimanfaatkan dan dipelihara						
941	1.04.15.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh						
942	3570	Luas kawasan kumuh yang ditangani						
943	1.04.15.03	Perencanaan & pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan kumuh						
944	10114	Jumlah kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
945	10129	Jumlah Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang dibentuk dan mengikuti pelatihan	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
946	11766	Jumlah dokumen perencanaan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
947	11767	Jumlah dokumen hasil Perencanaan PSU Kawasan Permukiman	1.04.04	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.04.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.04.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
948	11950	Jumlah laporan kesepakatan penerima dan jenis pelayanan	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.02.06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan
949	11951	Jumlah laporan rencana penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	1.04.04	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.04.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.04.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
950	3572	Jumlah dokumen perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang disusun						
951	3574	Jumlah dokumen pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang disusun						
952	9867	Jumlah Laporan Hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
953	9868	Jumlah Laporan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
954								
955	1.05.01 - Satuan Polisi Pamong Praja							
956	1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
957	1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
958	1.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
959	12018	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
960	12019	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
961	12020	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
962	12021	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
963	12023	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
964	12024	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
965	12025	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
966	12026	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
967	12027	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
968	167	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
969	7667	Jumlah Surat yang di Administrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
970	7668	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
971	7669	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
972	7670	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
973	7671	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
974	7672	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
975	7673	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
976	7674	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
977	7675	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
978	7676	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
979	1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
980	1.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
981	171	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana						
982	7685	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
983	7686	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
984	7687	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
985	7688	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
986	7689	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
987	7690	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
988	7691	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
989	7692	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
990	7693	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
991	7822	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
992	7823	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
993	7824	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
994	7825	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
995	7826	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
996	7827	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
997	1.05.08.03	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
998	186	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor						
999	7677	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
1.000	7678	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.001	7679	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
1.002	7680	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.003	7681	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
1.004	7682	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.005	7683	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
1.006	7684	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.007	1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
1.008	1.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
1.009	176	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.010	177	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah						
1.011	2314	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman						
1.012	1.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
1.013	7051	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						
1.014	7829	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.015	7830	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.016	7831	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
1.017	7832	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
1.018	7833	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1.019	7834	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.020	7835	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
1.021	1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
1.022	1.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
1.023	2439	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
1.024	7836	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
1.025	1.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
1.026	2448	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan						
1.027	7837	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
1.028	7838	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.029	1.05.60	Program Penegakkan Produk Hukum Daerah						
1.030	1.05.60.02	Pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan produk Hukum daerah						
1.031	2409	Koordinasi pelaksanaan dan kerjasama pembinaan Perda dan Perkada						
1.032	2410	Koordinasi pelaksanaan dan kerjasama pengawasan Perda dan Perkada						
1.033	2411	Penyuluhan Pelanggaran Perda dan perkada						
1.034	9178	Jumlah warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mendapatkan Pengawasan atas kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1.035	9179	Jumlah Orang yang mengikuti Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						
1.036	9191	Jumlah warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mendapatkan sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1.037	9201	Jumlah Laporan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1.038	1.05.60.04	Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur						
1.039	2418	Fasilitasi PPNS se Kaltim						
1.040	2420	Rapat Koordinasi teknis PPNS						
1.041	2422	Deteksi Dini pelanggaran perda dan perkada se kaltim						
1.042	2424	Pendampingan dan pelaksanaan penegakan perda provinsi kabupaten Kota se Kaltim						
1.043	9179	Jumlah Orang yang mengikuti Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
1.044	1.05.63	Program Penyelenggaraan Ketertarikan Umum dan Ketertiban masyarakat						
1.045	1.05.63.01	Peningkatan Pelaksanaan Operasional dan Pengendalian						
1.046	7044	Jumlah kegiatan penyelenggaraan keterlibatan umum dan ketertarikan masyarakat						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.047	9180	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.048	9181	Jumlah Laporan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
1.049	9182	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi
1.050	1.05.63.02	Peningkatan Pengamanan dan Pengawasan Protokoler						
1.051	7046	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengamanan protokoler						
1.052	9183	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.06	Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamongpraaja
1.053	9184	Jumlah Laporan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.07	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
1.054	1.05.64	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan						
1.055	1.05.64.01	Pelaksanaan Bina Potensi masyarakat						
1.056	1930	pendataan satlinmas Se Kaltim						
1.057	1931	Bimtek Satlinmas Se Kaltim						
1.058	1932	FGD Kelembagaan Satlinmas						
1.059	9185	Jumlah Orang yang mengikuti Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.060	1.05.64.02	Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat						
1.061	1932	FGD Kelembagaan Satlinmas						
1.062	2265	Perbantuan penanganan bencana musibah di daerah						
1.063	2266	Monitoring Operasional Satlinmas dalam rangka pilpres, pileg, dan pilkada serentak						
1.064	2274	Apel Siaga Satlinmas dalam rangka pilpres, pileg, dan pilkada serentak						
1.065	9186	Jumlah Orang yang mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas dengan Nuansa HAM	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
1.066	1.05.65	Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran						
1.067	1.05.65.01	Pencegahan dan Pengendalian Bidang Kebakaran						
1.068	2395	Kordinasi dan fasilitasi pencegahan kebakaran se Kaltim						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.069	2396	Pelaksanaan, pengendalian dan Pencegahan kebakaran						
1.070	2516	Pemetaan daerah rawan kebakaran dan pendataan sistem proteksi kebakaran se kalim						
1.071	9187	Jumlah Laporan Tersedianya Informasi Mutakhir Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	1.05.04	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
1.072	9188	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	1.05.04	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.02	Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
1.073	1.05.65.02	Pelatihan dan pembinaan bidang kebakaran						
1.074	2401	Pelatihan petugas pemadam kebakaran se kalim						
1.075	2402	Pembinaan Petugas Pemadam Kebakaran dan masyarakat se kalim						
1.076	9189	Jumlah Orang yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kebakaran	1.05.04	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
1.077	9190	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Penanganan Kebakaran	1.05.04	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.04	Kejasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Penanganan Kebakaran
1.078								
1.079	1.05.02 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
1.080	1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
1.081	1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1.082	1.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
1.083	12028	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.084	12029	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.085	12030	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
1.086	12031	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
1.087	12033	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
1.088	12034	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1.089	12035	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
1.090	12036	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
1.091	12037	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.092	2723	Tersedianya Anggaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
1.093	7839	Jumlah Surat yang di Administrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.094	7840	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.095	7841	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.096	7842	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.097	7843	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.098	7844	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.099	7845	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.100	7846	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.101	7847	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.102	7848	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
1.103	1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1.104	1.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
1.105	3090	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana						
1.106	7857	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
1.107	9352	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
1.108	9353	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.109	9354	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
1.110	9356	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.111	9357	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
1.112	9358	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.113	9360	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
1.114	9361	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.115	9362	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
1.116	9363	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
1.117	9364	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
1.118	9366	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.119	9367	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
1.120	9368	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
1.121	1.05.08.03	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
1.122	3694	Tersedianya Peralatan dan Kelengkapan ASN Kesbangpol Prov. Kaltim						
1.123	4081	Tersedianya Peralatan dan Kelengkapan ASN Kesbangpol Prov. Kaltim						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.124	7849	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
1.125	7850	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.126	7851	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
1.127	7852	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.128	7853	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
1.129	7854	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.130	7855	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
1.131	7856	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.132	1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
1.133	1.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
1.134	3093	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah						
1.135	3094	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.136	1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
1.137	1.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
1.138	3097	Dokumen Perencanaan Anggaran						
1.139	9392	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
1.140	1.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
1.141	3099	Dokumen Laporan						
1.142	9418	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
1.143	9419	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.144	1.05.15	Program Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Lingkungan						
1.145	1.05.15.01	Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						
1.146	1986	Terlaksananya Penilaian dan Pemberian Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Kondusifitas Daerah	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.147	1988	Jumlah Rakor dan Peserta Rakor FKDM	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
1.148	1.05.15.05	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial						
1.149	1993	Jumlah Peserta Revitalisasi	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
1.150	4927	Terlaksananya Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
1.151	1.05.15.29	Sosialisasi/Desiminasi/Publikasi Perundang-Undangn Penanganan Konflik dan Peraturan Pelaksanaannya						
1.152	5426	Meningkatnya SDM Aparatur dalam upaya maksimalisasi keamanan, ketertiban dan ketentraman	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
1.153	1.05.15.34	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Intelijen						
1.154	5424	Tenaga terlatih dan Profesional	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
1.155	1.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan						
1.156	1.05.17.07	Peningkatan Kesadaran Bela Negara						
1.157	1997	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bela negara guna meredam konflik sosial						
1.158	1999	Tersedianya data informasi perkembangan FPK di Daerah	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
1.159	2687	Terlatihnya peserta yang mengikuti Kegiatan Pembauran Kebangsaan	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.160	1.05.17.08	Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)						
1.161	1994	Terlathinya peserta yang mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan						
1.162	9540	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8.01.02	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
1.163	1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat						
1.164	1.05.21.06	Pemantauan perkembangan politik di daerah						
1.165	2479	Meningkatnya Partisipasi Pemilih pada Pileg/Pilpres 2019	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
1.166	1.05.21.22	Penyusunan IDI						
1.167	2012	Terselenggaranya Kegiatan IDI bagi Aparatur	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
1.168	1.05.21.23	Penyusunan data base partai politik						
1.169	11891	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Polit	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
1.170	2038	Terselenggaranya kegiatan dan tersusunnya data dapol						
1.171	1.05.21.24	Verifikasi Berkas Administrasi Bantuan Partai Politik						
1.172	5253	Terselenggaranya kegiatan dan verifikasi berkas Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
1.173	1.05.62	Program Pembinaan dan Pengembangan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Penguatan Peran Ormas						
1.174	1.05.62.01	Peningkatan Kapasitas Ormas						
1.175	1969	Terlathinya peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah
1.176	1.05.62.02	Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.177	1961	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Pendaftaran Ormas dan Pengelolaan SIORMAS	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
1.178	1962	Terbentuknya Tim Terpadu Pengawasan Ormas	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah
1.179	1.05.62.03	Pencegahan dan Penanganan Masalah Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						
1.180	2407	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Bahan Pokok ke 10 Kab/Kota	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
1.181	1.05.62.09	Forum Diskusi Aktual Agama dan Kepercayaan						
1.182	5417	Terlaksananya Kegiatan Forum Diskusi Aktual Agama dan Kepercayaan	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
1.183								
1.184	1.05.03 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
1.185	1.05	Ketentraman dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
1.186	1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1.187	1.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
1.188	12038	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.189	12039	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.190	12040	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
1.191	12041	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
1.192	12043	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
1.193	12044	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1.194	12045	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
1.195	12046	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
1.196	12047	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.197	606	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
1.198	616	Jumlah tenaga pemeliharaan dan pengamanan alat peringatan dini						
1.199	623	Jumlah satuan tenaga penanggulangan bencana						

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.200	7903	Jumlah Surat yang di Administrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.201	7904	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.202	7905	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.203	7906	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.204	7907	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.205	7908	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.206	7909	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.207	7910	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.208	7911	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.209	999	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
1.210	1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1.211	1.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
1.212	7921	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
1.213	7922	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
1.214	7923	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.215	7924	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
1.216	7925	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.217	7926	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
1.218	7927	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.219	7928	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
1.220	7929	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.221	7930	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
1.222	7931	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
1.223	7932	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
1.224	7933	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.225	7934	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
1.226	7935	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
1.227	958	Jumlah Bulan Pemeliharaan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.228	1.05.08.03	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
1.229	4653	Jumlah barang peningkatan sarana dan prasarana peralatan kantor						
1.230	7913	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
1.231	7914	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.232	7915	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
1.233	7916	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.234	7917	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
1.235	7918	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.236	7919	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
1.237	7920	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.238	1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
1.239	1.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
1.240	1139	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana						
1.241	1197	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/bimtek						
1.242	996	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.243	998	Jumlah Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah						
1.244	999	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman						
1.245	1.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
1.246	1197	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/bimtek	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.247	4561	Jumlah Pakaian Batik Tradisional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
1.248	6555	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.249	6556	Jumlah Pakaian Olahraga						
1.250	6557	Jumlah Pakaian Seragam Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1.251	6558	Jumlah Pakaian Seragam Lengkap Satpam						
1.252	6561	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
1.253	7942	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
1.254	7943	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
1.255	1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
1.256	1.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.257	1159	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
1.258	1.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
1.259	1139	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana						
1.260	1184	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
1.261	1187	Jumlah BPBD yang dilakukan Penilaian						
1.262	4670	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.263	1.05.49	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana						
1.264	1.05.49.13	Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanggulangan Bencana						
1.265	6535	Jumlah koordinasi penanggulangan bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
1.266	6536	Jumlah laporan monitoring evaluasi penanggulangan bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
1.267	6537	Jumlah operasi penangan kejadian bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
1.268	1.05.49.14	Pengembangan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan						
1.269	10374	Jumlah Peralatan Penanggulangan Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1.270	4643	Jumlah Peralatan Penanggulangan Bencana yang Tersedia	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1.271	4646	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pergudangan dan Peralatan Penanggulangan Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1.272	4649	Jumlah peserta Simulasi Peralatan Penanggulangan Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1.273	6538	Jumlah logistik penanggulangan bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamat dan Evakuasi Korban Bencana
1.274	1.05.49.15	Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana						
1.275	12475	Jumlah dokumen Pendataan Kaji Cepat Penanggulangan Bencana, Informasi Kebencanaan, dan Peserta Sumberdaya Manusia SAR	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
1.276	4662	Jumlah Peserta Peringatan Bulan PRB	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
1.277	6543	Jumlah peserta pelatihan SAR	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
1.278	6544	Jumlah peserta pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
1.279	1.05.49.16	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)						
1.280	12476	Jumlah dokumen Pendataan, Kaji Cepat PB dan Penyebaran Informasi Kebencanaan (Kab/Kota)	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
1.281	4665	Jumlah Pendataan, Kaji Cepat PB dan Penyebaran Informasi Kebencanaan	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.282	4668	Jumlah Laporan Kegiatan Pusdalops PB	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
1.283	6539	Jumlah laporan pemantauan titik panas	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.03	Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana
1.284	6540	Jumlah laporan pemantauan early warning system	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.03	Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana
1.285	6541	Jumlah Laporan Kejadian Kebencanaan	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
1.286	1.05.51	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah						
1.287	1.05.51.03	Penanggulangan bencana berbasis masyarakat						
1.288	11195	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Penanggulangan Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1.289	2763	Jumlah peserta Bimtek Relawan Desa Tangguh Bencana (Destana)	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1.290	2764	Jumlah peserta Bimtek Relawan Penanggulangan Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1.291	4560	Jumlah peserta Sosialisasi Desa Tangguh Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1.292	4562	Jumlah peserta penyegaran Fasilitator Desa Tangguh Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1.293	4563	Jumlah peserta Fasilitasi Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana dan Forum PRB Desa Tangguh Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1.294	4564	Jumlah dokumen Kajian dan Pemetaan Risiko Bencana Desa Tangguh Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
1.295	4565							
1.296	4567	Jumlah dokumen Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
1.297	4569	Jumlah peserta Pembekalan Teknis Penanggulangan Bencana Relawan Desa Tangguh Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1.298	4571	Jumlah Peserta Seminar Hasil Desa Tangguh Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1.299	4572	Jumlah Peserta Simulasi Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1.300	4575	Jumlah Peta Jalur evakuasi Destana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1.301	4577	Jumlah Rambu-rambu Destana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1.302	4578	Laporan perkembangan Desa Tangguh Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
1.303	4583	Jumlah orang yang mengikuti Kompetensi Desa Tangguh Bencana tingkat Provinsi dan Nasional	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1.304	1.05.51.04	Penyusunan Data Base dan Pemetaan Rawan Bencana						
1.305	11200	Jumlah Peta Rawan Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi
1.306	4553	Jumlah Peta Rawan Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi
1.307	4554	Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi
1.308	4556	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)review	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.309	1.05.51.05	Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB)						
1.310	11203	Jumlah Relawan yang dilatih	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
1.311	7052	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
1.312	1.05.51.16	Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan						
1.313	2593	Jumlah Lokasi Monitoring Daerah Rawan Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.03	Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana
1.314	2594	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pekan Pengurangan Risiko Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
1.315	2754	Jumlah peserta yang mengikuti Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
1.316	4601	Jumlah dokumen Kajian Teknis Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi
1.317	4602	Jumlah pemasangan peralatan Peringatan Dini (EWS)	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.03	Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana
1.318	4603	Jumlah pemantauan peralatan Peringatan Dini (EWS)	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.03	Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana
1.319	4605	Jumlah dokumen SOP peringatan dini/review	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.03	Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana
1.320	4607	Jumlah media penyebaran informasi kebencanaan	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
1.321	4608	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.03	Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana
1.322	1.05.51.17	Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan						
1.323	11208	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
1.324	4609	Jumlah peserta Rapat Teknis Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1.325	4610	Jumlah peserta Jambore Relawan Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1.326	4613	Jumlah peserta Peringatan Hari Kesiapsiagaan Nasional	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1.327	4615	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
1.328	4616	Jumlah dokumen review Rencana Kontijensi Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
1.329	4619	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Apel Siaga	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1.330	4621	Jumlah lokasi pemasangan Peta dan Rambu Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1.331	4623	Jumlah Kab/kota yang mendapat pelayanan informasi rawan bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
1.332	4624	Jumlah Satuan Tugas (Satgas) Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)	1.05.04	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.333	4626	Jumlah dokumen Profil Kesiapsiagaan	1.05.04	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
1.334	1.05.55	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana						
1.335	1.05.55.01	Sosialisasi dan Rakornis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana						
1.336	10180	Jumlah Peserta Peningkatan SDM Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kab/Kota	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana
1.337	4557	Jumlah Peserta Sosialisasi (bimtek JITUPASNA) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana
1.338	6547	Jumlah Peserta Rakornis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana
1.339	6551	Jumlah Laporan Sosialisasi (Bimtek JITUPASNA) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana
1.340	6552	Jumlah Laporan Kegiatan Rakornis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana
1.341	1.05.55.02	Penyusunan Rencana Aksi Pasca Bencana						
1.342	11493	Jumlah Tim Jitupasna Kab/Kota yang Terbentuknya	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana
1.343	4559	Jumlah Peserta Rapat Pembentukan TIM JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana
1.344	4568	Jumlah Peserta Workshop JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana
1.345	4594	Jumlah Dokumen Rapat Pembentukan TIM JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana
1.346	4627	Jumlah Peserta Rakornis Penyusunan JITUPASNA dan Rencana Aksi	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana
1.347	6549	Jumlah Dokumen Workshop JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana
1.348	6550	Jumlah Dokumen Rakornis Penyusunan JITUPASNA dan Rencana Aksi/Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana
1.349	1.05.55.05	Pendampingan/Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi						
1.350	11320	Jumlah pendampingan ke Kab/Kota pengajuan hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana
1.351	2603	Laporan Pendampingan, Monitoring Dan Evaluasi Serta Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana
1.352	4598	Jumlah Kab/Kota Yang Dilaksanakan Pendampingan/Supervisi Kajian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana
1.353	6546	Jumlah Bantuan Bahan Bangunan Seng dan Paku Seng Kepada Masyarakat Pascabencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana
1.354	1.05.55.06	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi						
1.355	11324	Jumlah Monitoring ke Kab/Kota kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana
1.356	2808	Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bidan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana
1.357	4600	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bidang dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten/Kota	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.358								
1.359	1.06.01 - Dinas Sosial							
1.360	1.06	Sosial						
1.361	1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1.362	1.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
1.363	12048	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.364	12049	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.365	12050	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
1.366	12051	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
1.367	12053	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
1.368	12054	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1.369	12055	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
1.370	12056	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
1.371	12057	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.372	1830	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
1.373	2659	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
1.374	7948	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.375	7949	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.376	7950	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.377	7951	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.378	7952	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.379	7953	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.380	7954	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.381	7955	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.382	7956	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.383	7957	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
1.384	1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1.385	1.06.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
1.386	2664	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.387	2666	Jumlah bulan pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan kantor						
1.388	5197	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor						
1.389	7958	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
1.390	7959	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.391	7960	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
1.392	7961	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.393	7962	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
1.394	7963	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.395	7964	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
1.396	7965	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.397	1.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
1.398	2666	Jumlah bulan pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan kantor						
1.399	5197	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor						
1.400	7966	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
1.401	7967	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
1.402	7968	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.403	7969	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
1.404	7970	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.405	7971	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
1.406	7972	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.407	7973	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
1.408	7974	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.409	7975	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
1.410	7976	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
1.411	7977	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
1.412	7978	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.413	7979	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
1.414	7980	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.415	1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
1.416	1.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
1.417	2669	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi baik didalam dan keluar daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.418	7981	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.419	1.06.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
1.420	6559	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur						
1.421	7982	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.422	7983	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya
1.423	7984	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
1.424	7985	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
1.425	7986	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1.426	7987	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
1.427	7988	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
1.428	1.06.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
1.429	1.06.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
1.430	2689	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Yang Disusun						
1.431	7989	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
1.432	1.06.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
1.433	2691	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dinas						
1.434	7990	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
1.435	7991	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.436	1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial						
1.437	1.06.16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak						
1.438	11185	Jumlah Penyediaan Permakanan Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan
1.439	11186	Jumlah Penyediaan Sandang Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang
1.440	11187	Jumlah Asrama / Wisma / Kamar Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
1.441	11188	Jumlah Pelayanan Kesehatan dan Obat-obatan Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.442	11190	Jumlah Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup (Keterampilan dan Spiritual Keagamaan) Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1.443	11191	Jumlah Kegiatan Bimbingan Keterampilan Dasar Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1.444	11192	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Akta kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1.445	11193	Jumlah Pemberian Bimbingan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.09	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.446	11953	Jumlah pemberian bimbingan fisik mental spiritual dan sosial bagi penghuni/klien panti sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1.447	11954	Jumlah pemulangan penghuni panti/klien panti sosial diluar HIV/AIDS dan Napza ke daerah masing-masing	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal
1.448	3122	Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran terlarut, KDRT & Korban Trafficking yang mendapatkan penanganan/pelayanan	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1.449	1.06.17	Program pembinaan anak terlantar						
1.450	1.06.17.02	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar						
1.451	11185	Jumlah Penyediaan Permakanan Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan
1.452	11186	Jumlah Penyediaan Sandang Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang
1.453	11187	Jumlah Asrama / Wisma / Kamar Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
1.454	11188	Jumlah Pelayanan Kesehatan dan Obat-obatan Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1.455	11190	Jumlah Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup (Keterampilan dan Spiritual Keagamaan) Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1.456	11191	Jumlah Kegiatan Bimbingan Keterampilan Dasar Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1.457	11192	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Akta kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1.458	11193	Jumlah Pemberian Bimbingan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.09	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.459	11194	Jumlah Pelayanan Penelusuran Keluarga (Seleksi Bagi Calon Klien Penghuni Panti)	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal
1.460	11953	Jumlah pemberian bimbingan fisik mental spiritual dan sosial bagi penghuni/klien panti sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1.461	2701	Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1.462	1.06.17.03	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar						
1.463	11128	Jumlah Anak Terlantar, Jumlah Anak Jalanan dan Jumlah Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Luar Panti yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Bantuan Sosial (Orang)	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.464	3144	Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti yang mendapatkan bantuan sosial	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1.465	1.06.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma						
1.466	1.06.18.03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma						
1.467	11130	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Penyediaan Alat Bantu	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu
1.468	11131	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.469	2707	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan pelayanan	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu
1.470	1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo						
1.471	1.06.19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo						
1.472	11162	Jumlah Permakanan Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan
1.473	11163	Jumlah Penyediaan Sandang Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial Lanjut Usia Terlantar	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang
1.474	11164	Jumlah Asrama / Wisma Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1.475	11166	Jumlah Penyediaan Alat Bantu Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial Lanjut Usia Terlantar	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu
1.476	11168	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1.477	11169	Jumlah Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup (Keterampilan dan Spiritual Keagamaan) Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial Lanjut Usia Terlantar	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1.478	11170	Jumlah Pemberian Bimbingan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.479	11171	Jumlah Pelayanan Penelusuran Keluarga (Seleksi Bagi Calon Klien Penghuni Panti)	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1.480	11172	Jumlah Pelayanan Reunifikasi (Pertemuan Kembali) dengan Keluarga Klien	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.481	11173	Jumlah Proses Penanganan Pemulasaraan (Permandian Jenazah, Pengkafanan serta Penguburan) Bagi Klien Lanjut Usia Terlantar dalam Panti	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan
1.482	11174	Jumlah Kegiatan Pengasuhan Bagi Anak Terlantar dalam Panti	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
1.483	11937	Jumlah pelayanan kesehatan dan obat-obatan bagi penghuni/klien panti sosial bagi lanjut usia terlantar	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.03.09	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.484	2716	Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti yang dilayani	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.485	1.06.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo						
1.486	11162	Jumlah Permakanan Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan
1.487	11170	Jumlah Pemberian Bimbingan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.488	11171	Jumlah Pelayanan Penelusuran Keluarga (Seleksi Bagi Calon Klien Penghuni Panti)	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1.489	11172	Jumlah Pelayanan Reunifikasi (Pertemuan Kembali) dengan Keluarga Klien	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1.490	11174	Jumlah Kegiatan Pengasuhan Bagi Anak Terlantar dalam Panti	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
1.491	11175	Jumlah Penyediaan Permakanan Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial Anak Terlantar	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan
1.492	11177	Jumlah Penyediaan Sandang Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial Anak Terlantar	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang
1.493	11182	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Akta kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial Anak Terlantar	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.02.08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
1.494	11183	Jumlah Kegiatan Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial Anak Terlantar	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti
1.495	11941	Jumlah pemberian bimbingan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi penghuni/klien panti sosial	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.496	11946	Jumlah Asrama/Wisma/Kamar bagi penghuni/klien panti sosial anak terlantar	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1.497	11947	Jumlah Pelayanan kesehatan dan obat-obatan bagi penghuni/klien panti sosial anak terlantar	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.498	11948	Jumlah pemberian bimbingan fisik mental spiritual dan sosial bagi penghuni/klien panti sosial anak terlantar	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1.499	11949	Jumlah Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup (Keterampilan dan Spiritual Keagamaan) Bagi Penghuni / Klien Panti Sosial anak terlantar	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
1.500	6396	Jumlah penghuni panti yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.501	1.06.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)						
1.502	1.06.20.04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial						
1.503	11133	Jumlah Gelandangan dan Pengemis Mendapatkan bimbingan keterampilan	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	1.06.04.1.04.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1.504	11134	Jumlah Eks Narapidana, Orang dengan HIV dan Aids serta Penyalahgunaan Napza yang di berdayakan dan Mendapatkan Bantuan Sosial	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.505	2726	Jumlah Eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	1.06.04.1.05.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1.506	1.06.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial						
1.507	1.06.21.01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha						
1.508	11135	Jumlah Lembaga Sosial (CSR, Karang Taruna, PSM dan TSKS) yang diberdayakan	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
1.509	2729	Jumlah lembaga sosial yang diberdayakan	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
1.510	1.06.21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat						
1.511	11137	Jumlah Kegiatan (HKS, Restorasi Sosial, Ziarah Makam Pahlawan) yang dilaksanakan dalam Rangka Pelestarian Nilai Nilai Kepahlawanan	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.06.07.1.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1.512	2731	Jumlah kegiatan dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dilaksanakan	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1.513	1.06.23	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial						
1.514	1.06.23.01	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin dan PMKS Lainnya						
1.515	11138	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diberdayakan dan diberikan Bantuan Sosial	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.01	Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.516	2745	Jumlah WRSE dan KUBE yang diberdayakan	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.517	1.06.23.02	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan						
1.518	11141	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendapatkan Bantuan Sosial	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.519	11143	Jumlah Lanjut Usia Terlantar Luar Panti yang Mendapatkan Bantuan Sosial	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.01	Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.520	2976	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat bantuan sosial	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.01	Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.521	1.06.23.03	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS						
1.522	11142	Jumlah Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti yang Mendapatkan Bimbingan Mental, Spiritual serta Pelayanan Sosial	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1.523	11143	Jumlah Lanjut Usia Terlantar Luar Panti yang Mendapatkan Bantuan Sosial	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.03.04	Penyediaan Alat Bantu
1.524	2972	Jumlah Lansia luar panti yang mendapat pelayanan	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1.525	1.06.24	Program Penanganan dan Penanggulangan Korban Bencana						
1.526	1.06.24.01	Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Pemulangan, Perumahan Orang Terlantar						
1.527	11145	Jumlah Pemberian Logistik Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanaan
1.528	11149	Jumlah Pemberian Sandang Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.529	11150	Jumlah Pemberian Shelter (Tempat Penampungan Sementara) Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan
1.530	11151	Jumlah Penanganan Khusus Bagi (Anak-anak, Lansia, Ibu Hamil, Perempuan) yang mengalami Bencana Alam dan Sosial	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
1.531	11153	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Pemulihan Psikologis (Trauma Healing)	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial
1.532	11154	Jumlah Aparatur Kebencanaan / Petugas Perlindungan Sosial dan Masyarakat Rawan Bencana yang Mendapatkan Bimbingan dan Sosialisasi Tentang Kebencanaan	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial
1.533	11155	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
1.534	2733	Jumlah kegiatan penanganan Korban bencana dan Praduga yang mendapatkan bantuan sosial	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan
1.535	1.06.25	Program Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Sosial Terpenting (KAT) dan Pendayang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - minor						
1.536	1.06.25.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagi Keluarga Miskin						
1.537	11157	Jumlah Kegiatan Pemetaan Sosial dan Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) Bagi Keluarga Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
1.538	1565	Jumlah MCK bagi keluarga miskin KAT yang dibangun	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
1.539								
1.540	2.01.01 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi							
1.541	2.01	Tenaga Kerja						
1.542	2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1.543	2.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
1.544	12058	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.545	12059	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.546	12060	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
1.547	12061	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
1.548	12063	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
1.549	12064	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1.550	12065	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
1.551	12066	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
1.552	12067	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.553	403	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
1.554	7993	Jumlah Surat yang di Administrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.555	7994	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.556	7995	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.557	7996	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.558	7997	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.559	7998	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.560	7999	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.561	8000	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.562	8001	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.563	8002	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
1.564	2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1.565	2.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
1.566	608	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor						
1.567	8003	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
1.568	8004	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.569	8005	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
1.570	8006	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.571	8007	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
1.572	8008	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.573	8009	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
1.574	8010	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.575	2.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
1.576	407	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana Kantor						
1.577	8010	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						
1.578	8011	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
1.579	8012	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
1.580	8013	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.581	8014	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.582	8015	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.583	8016	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
1.584	8017	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.585	8018	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
1.586	8019	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.587	8020	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
1.588	8021	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
1.589	8022	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
1.590	8023	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.591	8024	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
1.592	8025	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
1.593	2.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
1.594	2.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
1.595	414	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.596	418	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah						
1.597	420	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)						
1.598	8026	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						
1.599	2.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
1.600	429	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek						
1.601	8027	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.602	8028	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya
1.603	8029	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
1.604	8030	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
1.605	8031	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1.606	8032	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
1.607	8033	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
1.608	2.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
1.609	2.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
1.610	433	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran						

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.611	8034	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
1.612	2.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
1.613	438	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
1.614	8035	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
1.615	8036	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.616	2.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja						
1.617	2.01.15.01	pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja						
1.618	9615	Jumlah pencari kerja yang ditingkatkan Keterampilannya.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
1.619	2.01.15.02	Pengadaan sarana dan prasarana pelatihan						
1.620	10670	Jumlah Instruktur yang ditingkatkan Kompetensinya.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
1.621	1121	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
1.622	2.01.15.03	peningkatan profesionalisme instruktur pelatihan						
1.623	1129	Jumlah Instruktur yang Dilatih	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	2.07.03.1.04.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.624	2.01.15.04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK						
1.625	10688	jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi dan sertifikasi	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	2.07.03.1.02.01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
1.626	442	Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	2.07.03.1.02.01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
1.627	9786	Jumlah Perusahaan yang meningkat Produktivitasnya	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	2.07.03.1.03.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
1.628	9788	Tersedianya data hasil pengukuran Produktivitas.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	2.07.03.1.04.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.629	2.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja						
1.630	2.01.16.01	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja						
1.631	10594	persentase terpenuhi layanan informasi	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
1.632	464	Jumlah Dokumen Informasi bursa Tenaga Kerja	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
1.633	9789	Jumlah pencari kerja yang terlatih	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
1.634	9790	Jumlah pencari kerja yang terdata	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
1.635	9791	Persentase terlaksananya penyuluhan & Bimbingan	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.636	9792	Persentase Jumlah Perusahaan ijin AKAD dan AKL	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal))
1.637	9793	Jumlah perusahaan yang memperoleh ijin LPTKS	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.02.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
1.638	9794	Jumlah LPTKS yang dapat dibina	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
1.639	9799	Persentase tersedianya layanan informasi	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
1.640	9801	Persentase pencarian kerja yang ditempatkan	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.03	Job Fair/Bursa Kerja
1.641	9804	Jumlah tenaga Kerja yang dapat berwirausaha	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.03	Job Fair/Bursa Kerja
1.642	9806	Persentase terlaksananya koordinasi & Sinkronisasi	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
1.643	9808	Persentase terlaksananya koordinasi & Sinkronisasi	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
1.644	2.01.16.05	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan						
1.645	10646	Persentase tenaga kerja yang mendapat bimbingan	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja
1.646	469	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih Berwirausahaan	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
1.647	9814	Jumlah Usaha mandiri yang tercipta dikabupaten/kota	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja
1.648	2.01.16.06	Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat						
1.649	476	Jumlah Laporan pencari kerja yang memiliki keterampilan	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
1.650	9790	Jumlah pencari kerja yang terdata	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
1.651	9819	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pengetahuan teknologi tepat guna	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
1.652	2.01.16.09	Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Padat Karya						
1.653	10646	Persentase tenaga kerja yang mendapat bimbingan	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja
1.654	486	Jumlah pencari kerja yang mendapat pekerjaan sementara	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
1.655	9791	Persentase terlaksananya penyuluhan & Bimbingan	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja
1.656	9792	Persentase Jumlah Perusahaan ijin AKAD dan AKL	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal))
1.657	9793	Jumlah perusahaan yang memperoleh ijin LPTKS	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.02.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
1.658	9794	Jumlah LPTKS yang dapat dibina	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
1.659	9795	Persentase terpenuhinya layanan informasi	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.660	9799	Presentase tersedianya layanan informasi	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
1.661	9801	Presentase pencarian kerja yang ditempatkan	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.03	Job Fair/Bursa Kerja
1.662	9804	Jumlah tenaga Kerja yang dapat berwirausaha	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	2.07.04.1.04.04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
1.663	9806	Persentase terlaksananya koordinasi & Sinkronisasi	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.07.04.1.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.664	9814	Jumlah Usaha mandiri yang tercipta dikabupaten/Kota	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
1.665	2.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan						
1.666	2.01.17.09	Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja						
1.667	494	Jumlah Perusahaan yang Dibina	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.07.05.1.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial
1.668	9825	Terlaksananya penurunan persentase perusahaan yang memiliki tingkat kerawanan Hubungan Industrial	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.07.05.1.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.669	9826	Terlaksananya Rekapitulasi Hasil Verifikasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi se-Kaltim	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.07.05.1.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi
1.670	9827	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.07.05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
1.671	2.01.17.14	Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan						
1.672	11955	Jumlah peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.07.05.1.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial
1.673	4850	Jumlah dokumen sesuai PP 78 Tahun 2015	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
1.674	501	SK Gubernur Tentang UMP	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
1.675	2.01.17.15	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur dan Perselisihan Hubungan Industrial						
1.676	10547	Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang disahkan	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.07.05.1.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.677	4265	Mencegah Perselisihan Hubungan Industrial	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.07.05.1.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.678	9822	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.07.05.1.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial
1.679	9823	Jumlah Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.07.05.1.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
1.680	9824	Terlaksananya penurunan persentase perusahaan yang memiliki tingkat kerawanan Hubungan Industrial	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.07.05.1.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.681	9826	Terlaksananya Rekapitulasi Hasil Verifikasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi se-Kaltim	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.07.05.1.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi
1.682	9827	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.07.05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
1.683	9828	Terlaksananya Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
1.684	9829	Terlaksananya Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2.07.05.1.03.02	Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)
1.685	9830	Terlaksananya Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2.07.05.1.03.03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
1.686	2.01.24	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif						
1.687	2.01.24.01	Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan						
1.688	510	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih Berwirausaha	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
1.689	2.01.27	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan						
1.690	2.01.27.01	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja						
1.691	4923	Risiko Uji Objek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.692	494	Jumlah Perusahaan yang Dibina	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
1.693	9832	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	2.07.06.1.01.02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
1.694	9833	Jumlah Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan di Perusahaan	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	2.07.06.1.01.02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
1.695	2.01.27.08	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja, Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Norma Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak						
1.696	517	Jumlah Perusahaan yang Dibina dan Diawasi	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
1.697	9832	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
1.698	9833	Jumlah Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan di Perusahaan	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	2.07.06.1.01.02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
1.699	2.01.27.09	Peningkatan Perlindungan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan						
1.700	4924	Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	2.07.06.1.01.02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
1.701	517	Jumlah Perusahaan yang Dibina dan Diawasi	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
1.702	9833	Jumlah Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan di Perusahaan	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	2.07.06.1.01.02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
1.703	9834	Jumlah Pembinaan dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
1.704	2.01.29	Program Peningkatan Produktivitas						
1.705	2.01.29.01	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja						
1.706	536	Jumlah yang Dilatih Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	2.07.03.1.04.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.707	2.01.30	Program Pelatihan Pencari Kerja						
1.708	2.01.30.04	Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan Kerja						
1.709	541	Jumlah Kejuruan yang Dipersiapkan Sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK)	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	2.07.03.1.02.01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
1.710	2.01.30.05	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja						
1.711	1089	Jumlah Pencari Kerja yang ditingkatkan Keterampilannya	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi
1.712	545	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih di Balai Latihan Kerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi
1.713	9615	Jumlah pencari kerja yang ditingkatkan Keterampilannya.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi
1.714	3.08	Transmigrasi						
1.715	3.08.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi						
1.716	3.08.15.02	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.717	449	Kesepakatan Bersama dengan provinsi lain	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	3.32.04.1.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman
1.718	3.08.15.03	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi						
1.719	455	Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang Disediakan Sarana dan Prasarana Sosial	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	3.32.04.1.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman
1.720	9835	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	3.32.02.1.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
1.721	3.08.15.11	Sinkronisasi dan Integrasi Rencana Kawasan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur						
1.722	4289	Terciptanya Perencanaan dan Dokumen Usulan Program Transmigrasi se Kalimantan Timur	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	3.32.04.1.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman
1.723	9836	Penyelesaian Permasalahan Transmigrasi	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	3.32.02.1.01.02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan
1.724	3.08.15.12	Koordinasi Ketransmigrasian						
1.725	4289	Terciptanya Perencanaan dan Dokumen Usulan Program Transmigrasi se Kalimantan Timur	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.32.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.726	9837	Lahan Permukiman, Lahan Usaha Transmigrasi	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	3.32.02.1.01.04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
1.727	3.08.15.14	Evaluasi Penyediaan Tanah Transmigrasi						
1.728	10491	pemerataan persebaran penduduk	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.32.03.1.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
1.729	4282	Tersedianya Lahan Transmigrasi	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	3.32.02.1.01.03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi
1.730	9837	Lahan Permukiman, Lahan Usaha Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.32.03.1.01.02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi Bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
1.731	9838	Pembangunan Permukiman Transmigrasi	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	3.32.02.1.01.03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi
1.732	9839	Perjanjian Kerjasama	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.32.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.733	9840	Pembangunan Permukiman, Sarana dan Prasarana Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.32.03.1.01.02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi Bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
1.734	9841	Rencana Teknis Satuan Permukiman	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.32.03.1.01.03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi
1.735	9846	Peningkatan Ilmu dan Ketrampilan	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.32.03.1.01.05	Penyuluhan Transmigrasi Lokal
1.736	9847	Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.32.03.1.01.06	Pelatihan Transmigrasi Lokal
1.737	9848	Peningkatan kemandirian dalam berusaha	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.32.03.1.01.07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.738								
1.739	2.02.01 - Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1.740	2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1.741	2.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1.742	2.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
1.743	12068	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.744	12069	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.745	12070	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
1.746	12071	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
1.747	12073	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
1.748	12074	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1.749	12075	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
1.750	12076	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
1.751	12077	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.752	3925	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
1.753	8073	Jumlah Surat yang di Administrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.754	8074	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.755	8075	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.756	8076	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.757	8077	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.758	8078	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.759	8079	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.760	8080	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.761	8081	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.762	8082	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
1.763	2.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1.764	2.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
1.765	1968	jumlah sarana dan prasarana kantor						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.766	8090	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						
1.767	8091	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
1.768	8092	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
1.769	8093	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.770	8094	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
1.771	8095	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.772	8096	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
1.773	8097	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.774	8098	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
1.775	8099	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.776	8100	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
1.777	8101	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
1.778	8102	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
1.779	8103	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.780	8104	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
1.781	8105	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
1.782	2.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
1.783	2.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
1.784	1976	presentase capaian target kinerja						
1.785	8106	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.786	2.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
1.787	1985	diklat yang diikuti pegawai						
1.788	8107	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.789	8108	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.790	8109	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
1.791	8110	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
1.792	8111	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1.793	8112	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.794	8113	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
1.795	2.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
1.796	2.02.10.01	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
1.797	2015	laporan capaian kinerja						
1.798	8114	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah						
1.799	8115	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
1.800	8116	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.801	2.02.10.02	Rakor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1.802	2031	jumlah kebijakan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.03.04	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah
1.803	2.02.10.03	Forum RKP Bidang Kependudukan, PP dan PA						
1.804	5058	Persentase Kab/Kota menuju layak anak	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.03.01	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
1.805	2.02.10.04	Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan						
1.806	5370	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang ekonomi	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
1.807	2.02.20	Program Pengunggulan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan						
1.808	2.02.20.01	Peningkatan Kewirausahaan Perempuan						
1.809	10853	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
1.810	10855	Jumlah peserta Organisasi kemasyarakatan yang mengikuti sosialisasi	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
1.811	2223	jumlah peserta yang mendapatkan keterampilan berwirausaha	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
1.812	2.02.21	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak						
1.813	2.02.21.02	Pemenuhan kebutuhan salah satu cluster hak anak						
1.814	2232	permintaan hak anak di bidang pendidikan	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	2.08.06.1.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
1.815	5191	Jumlah kebijakan tentang penurunan angka perkawinan anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
1.816	5195	Jumlah anak yang mendapatkan KIE tentang hak sipil anak	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	2.08.06.1.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.817	9481	Jumlah penurunan angka perkawinan anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
1.818	2.02.27	Program Penataan Administrasi Kependudukan						
1.819	2.02.27.01	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)						
1.820	10690	Jumlah OPD Prov yang sdh melakukan PKS terkait dengan pemanfaatan data kependudukan	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.01	Penataan Administrasi Kependudukan	2.12.04.1.01.02	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.821	10699	Jumlah SDM pengelola daftud, capil, PIAK yang terlatih	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.03.02	Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan, dan Pendayagunaan Data Kependudukan
1.822	10700	Persentase Data Kependudukan yang akurat	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.03.03	Supervisi Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan Provinsi
1.823	10701	Jumlah data Agregat, pribadi dan perseorangan Provinsi yang akurat	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	2.12.05.1.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi
1.824	11615	Jumlah peserta dari OPD Provinsi dan dukcapil kab/kota yang mengikuti sosialisasi	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.02	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
1.825	11616	Jumlah OPD Prov yang memanfaatkan data kependudukan	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
1.826	11856	Jumlah Dokumen Data kependudukan yang akurat	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.03.03	Supervisi Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan Provinsi
1.827	5191	Jumlah kebijakan tentang penurunan angka perkawinan anak	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.03.04	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
1.828	6785	Persentase penduduk yang mendapatkan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.04	Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
1.829	2.02.35	Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak						
1.830	2.02.35.01	Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan						
1.831	2057	penerimaan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.832	4939	Jumlah usaha KK perempuan berbasis ICT	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
1.833	9780	Jumlah kebijakan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
1.834	9781	Persentase jumlah kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.835	2.02.36	Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1.836	2.02.36.01	Tumbuh Kembang Anak						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.837	11857	Jumlah Kab/Kota Pengembang KLA	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	2.08.06.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
1.838	6029	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tumbuh kembang anak	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	2.08.06.1.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
1.839	9782	Persentase capaian KLA Kab/Kota	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	2.08.06.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
1.840	9783	Monitoring dan evaluasi kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di Kab/Kota	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	2.08.06.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
1.841	9785	Tersedianya layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak melalui forum anak, Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Masjid Ramah Anak, GRA, PKA di Kab/Kota	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	2.08.06.1.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
1.842	9787	Monitoring dan evaluasi peningkatan Kualitas Hidup Anak	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	2.08.06.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
1.843	9796	Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	2.08.06.1.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
1.844	9797	Jumlah lembaga/OPD Peningkatan Kualitas Hidup Anak di Provinsi, Kab/Kota	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	2.08.06.1.02.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.845	2.02.36.02	Perlindungan Anak						
1.846	6030	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Perlindungan anak	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	2.08.06.1.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
1.847	9798	Jumlah OPD/lembaga yang teradvokasi	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
1.848	9800	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	2.08.07.1.02.01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
1.849	9802	Jumlah OPD/lembaga yang mengikuti FGD perlindungan khusus anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
1.850	9803	Jumlah peserta yang mengikuti KIE	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	2.08.07.1.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
1.851	9805	Jumlah pelatihan perlindungan khusus anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	2.08.07.1.02.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
1.852	2.02.36.03	Perlindungan Perempuan						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.853	6031	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan perlindungan perempuan	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.854	9807	Monev pencegahan kekerasan terhadap perempuan	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
1.855	9810	Monev layanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
1.856	9811	Jumlah OPD yang teradvokasi	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
1.857	9812	Jumlah peserta lembaga layanan yang mengikuti pelatihan	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
1.858	9813	Penyediaan unit layanan pusat informasi dan konsultasi perempuan penyandang disabilitas	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
1.859	9858	Jumlah OPD/lembaga yang mengikuti kegiatan FGD	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.860	2.02.38	Program Kesetaraan Gender						
1.861	2.02.38.01	Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum						
1.862	10853	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
1.863	10856	Lembaga PUG pada Perangkat daerah	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
1.864	10858	Jumlah Perangkat daerah pada POKJA PUG / focal point Bidang Politik	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
1.865	10860	jumlah Lembaga PUG pada POKJA PUG Kaltim	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
1.866	10861	Jumlah Lembaga PUG Bidang Politik (POKJA PUG)	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
1.867	10862	Jumlah Peserta Sosialisasi PPRG Perangkat Daerah (POKJA PUG)	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
1.868	10864	Peserta sosialisasi dari organisasi kemasyarakatan Bidang Politik	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
1.869	10865	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Bidang politik yang diadvokasi	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.870	10870	Jumlah Perangkat Daerah bidang politik	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
1.871	10871	Jumlah peserta dari OPD bidang politik	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
1.872	10873	Modul/Juknis KIE Bidang Politik	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
1.873	11297	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang diadvokasi	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
1.874	11300	Jumlah peserta dari OPD	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
1.875	11301	Modul/Juknis KIE	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
1.876	2025	meningkatnya ketersediaan kebijakan keterlibatan perempuan dalam politik	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
1.877	6033	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang politik dan hukum	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
1.878	2.02.38.02	Kesetaraan Gender Bidang Sosial dan Budaya						
1.879	10875	Perangkat Daerah anggota Pokja PUG	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
1.880	10876	Jumlah lembaga PUG Perangkat daerah bidang sosial budaya (anggota Pokja PUG)	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
1.881	10883	Peserta sosialisasi Kebijakan PUG (PPRG)	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
1.882	10885	Peserta Sosialisasi PUG Bidang sosbud	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
1.883	10888	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pendampingan PUG bidang Sosial budaya	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
1.884	10891	Jumlah Perangkat daerah (Pokja PUG) yang mendapatkan pendampingan Kebijakan PUG bidang sosial budaya	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
1.885	10893	Lembaga layanan Pemberdayaan Perempuan (POKJA PUG) yang mendapatkan advokasi kebijakan	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
1.886	10897	Jumlah Peserta penyedia layanan pemberdayaan perempuan bidang sosial budaya dari organisasi masyarakat	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
1.887	10900	Modul/Juknis KIE PUG bidang sosial budaya	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.888	10970	jumlah Kebijakan PUG pada Lembaga Layanan PUG bidang Sosial budaya (Pokja PUG)	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01	Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
1.889	10971	Lembaga PUG pada Perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01	Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
1.890	6034	peserta yang mengikuti kegiatan Kesetaraan Gender bidang sosial budaya	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
1.891	2.02.38.03	Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi						
1.892	10907	lembaga PUG/ PPRG Prov Kaltim yang mendapatkan advokasi dan pendampingan	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01	Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
1.893	10910	Jumlah Perangkat daerah (Pokja PUG) yang mendapatkan pendampingan Kebijakan PUG bidang Ekonomi	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01	Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
1.894	10914	Jumlah lembaga PUG pada perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01	Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
1.895	10917	Jumlah Perangkat Daerah Yang mengikuti sosialisasi DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01	Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
1.896	10942	Organisasi Masyarakat yang aktif dlm bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
1.897	10943	jumlah peserta sosialisasi PUG berbasis organisasi masyarakat bidang Ekonomi	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
1.898	10944	Organisasi Masyarakat yang mendapat pendampingan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
1.899	10951	jumlah oganisasi masyarakat yang diadvokasi tentang partisipasi perempuan di bidang ekonomi	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
1.900	10952	Perangkat Daerah (POKJA PUG) yang mendapatkan pendampingan	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
1.901	10953	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan kebijakan	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
1.902	10956	Jumah Peserta Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
1.903	10958	Jumlah Peserta Perangkat daerah yang mendapatkan pendampinga pemberdayaan Perempuan bidang Ekonomi	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
1.904	10959	Modul / Juknis KIE Pemberdayaan Perempuan	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.905	10960	Modul/Juknis KIE pemberdayaan perempuan bidang ekonomi	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
1.906	6035	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Kesetaraan Gender bidang ekonomi	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
1.907	2.02.39	Program Sistem Data Gender dan Anak						
1.908	2.02.39.01	Data dan Informasi Gender						
1.909	5062	persentase data gender	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
1.910	6039	Jumlah profil pembangunan berbasis gender	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
1.911	9817	Jumlah dokumen data gender dan anak berdasarkan jenis kelamin	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
1.912	9982	Jumlah aplikasi data gender dan anak berdasarkan jenis kelamin kab/kota	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
1.913	2.02.39.02	Data dan Informasi Anak						
1.914	5061	persentase data anak	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
1.915	9817	Jumlah dokumen data gender dan anak berdasarkan jenis kelamin	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
1.916	9982	Jumlah aplikasi data gender dan anak berdasarkan jenis kelamin kab/kota	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
1.917	2.02.39.03	Informasi dan Partisipasi						
1.918	5176	Profil data gender dan anak	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
1.919	6040	kebijakan terkait pengembangan SIGA	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
1.920	6791	Kebijakan terkait pengembangan sistem informasi gender dan anak (SIGA)	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.921	9817	Jumlah dokumen data gender dan anak berdasarkan jenis kelamin	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
1.922	9982	Jumlah aplikasi data gender dan anak berdasarkan jenis kelamin kab/kota	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
1.923	2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1.924	2.08.23	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1.925	2.08.23.01	Pengendalian Penduduk						
1.926	10049	Jumlah grand design pembangunan kab/kota dalam 5 aspek	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
1.927	10054	Jumlah grand desain pembangunan kab/kota	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK
1.928	10062	Jumlah kajian dampak kependudukan	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.10	Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
1.929	10100	Jumlah pemetaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga kab/kota	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	2.14.02.1.02.03	Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
1.930	5063	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengendalian penduduk	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
1.931	6036	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan perlindungan perempuan Kaltim	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
1.932	2.08.23.02	Kualitas Keluarga						
1.933	10100	Jumlah pemetaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga kab/kota	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
1.934	10107	Jumlah peserta yang mengikuti pengendalian penduduk penurutan prosentase unmeet need	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
1.935	10109	Jumlah materi promosi dan konseling Kespro dan hak-hak reproduksi sesuai dengan kearifan lokal	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
1.936	10110	Jumlah anggota PIK-R yang mendapatkan pembinaan promosi dan konseling reproduksi	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
1.937	10150	Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.1.01.03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
1.938	10153	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan remaja tentang generasi berencana	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.1.01.04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
1.939	10947	Jumlah kelompok pusat informasi konseling (PIK-R) di kampung KB	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.1.01.08	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB
1.940	11850	Bertambahnya pengetahuan pengelola dan pelaksana PIK-R	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.941	5045	Dokumen laporan capaian kinerja	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.04	Koordinasi Berkala Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi
1.942	6038	Jumlah kebijakan PUG	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
1.943	6779	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kualitas keluarga	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
1.944	2.08.23.03	Keluarga Berencana						
1.945	10107	Jumlah peserta yang mengikuti pengendalian penduduk penurunan prosentase unmeet need	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.1.01.05	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
1.946	10109	Jumlah materi promosi dan konseling Kespro dan hak-hak reproduksi sesuai dengan kearifan lokal	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.1.01.08	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
1.947	10110	Jumlah anggota PIK-R yang mendapatkan pembinaan promosi dan konseling reproduksi	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.1.01.09	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
1.948	10145	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang ikut dalam pelayanan dan pembinaan kesetaraan be KB	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	2.14.03.1.02.02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB
1.949	10148	Jumlah design program pembangunan keluarga	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeki kependudukan serta Kebutuhan yang lain
1.950	10150	Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
1.951	10153	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan remaja tentang generasi berencana	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
1.952	10155	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan PIK-R	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
1.953	10947	Jumlah kelompok pusat informasi konseling (PIK-R) di kampung KB	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
1.954	6037	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang politik dan hukum	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
1.955	6782	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan keluarga berencana	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
1.956	2.08.24	Program Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan						
1.957	2.08.24.01	Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk						
1.958	10714	Jumlah surat edaran , Perda, Pergub tentang Kebijakan terkait pelayanan daftuk untuk kab/kota yang telah diterbitkan oleh Prov kalim	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional
1.959	10716	Jumlah Data penduduk non permanen dan rentan adminstrasi kependudukan kab/kota se Kalim	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.01.02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.960	10717	Jumlah Peraturan Gubernur tentang tata kelola pelaksanaan dafduk kab/kota se Kaltim	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.01.03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
1.961	10720	Jumlah Data penduduk pindah dan datang kab/kota se Kaltim	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.01.04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan
1.962	6042	Jumlah pameran yang diikuti	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.03.01	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pendokumentasian Urusan Administrasi Kependudukan
1.963	6802	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bina aparatur pendaftaran penduduk	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.03.02	Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan, dan Pendayagunaan Data Kependudukan
1.964	2.08.24.02	Bina Aparatur Pencatatan Sipil						
1.965	10725	Jumlah Kebijakan terkait pelayanan capil sipil kab/kota se Kaltim	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil
1.966	10728	Jumlah Peraturan Gubernur tentang tata kelola pelaksanaan pencapil kab/kota se Kaltim yang diterbitkan	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi
1.967	10730	Jumlah Data peristiwa kelahiran dan kematian	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting
1.968	10733	Persentase Pelayanan Kepada bidang Pencapil Kab/Kota	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
1.969	11957	Jumlah pelayanan kepada bidang Pencapil Kab/Kota	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
1.970	6043	Jumlah perangkat daerah FGD perlindungan anak dalam penanggulangan bencana	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting
1.971	6783	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bina aparatur pencatatan sipil	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi
1.972	2.08.24.03	Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi						
1.973	10690	Jumlah OPD Prov yang sdh melakukan PKS terkait dengan pemanfaatan data kependudukan	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
1.974	10699	Jumlah SDM pengelola dafduk, capil, PIAK yang terlatih	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.03.02	Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan, dan Pendayagunaan Data Kependudukan
1.975	10736	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan tumbuh kembang anak	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
1.976	10743	Jumlah peserta sosialisasi tentang kebijakan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.02	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
1.977	11614	Profil data Perkembangan dan Proyeksi data Kependudukan	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
1.978	11856	Jumlah Dokumen Data kependudukan yang akurat	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.03.03	Supervisi Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan Provinsi
1.979	11858	Jumlah Laporan Pelaksanaan kebijakan terkait pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP - el Prov/Kab/Kota se Kaltim	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.01	Penataan Administrasi Kependudukan	2.12.04.1.01.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan Di Provinsi
1.980	6044	Persentase pelayanan perlindungan terpadu	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
1.981	6784	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
1.982	6785	Persentase penduduk yang mendapatkan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.03.01	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pendokumentasian Urusan Administrasi Kependudukan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.983								
1.984	2.03.01 - Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura							
1.985	2.03	Pangan						
1.986	2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1.987	2.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
1.988	12078	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.989	12079	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.990	12080	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
1.991	12081	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
1.992	12083	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
1.993	12084	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1.994	12085	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
1.995	12086	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
1.996	12087	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.997	163	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
1.998	8118	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.999	8119	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.000	8120	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
2.001	8121	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.002	8122	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.003	8123	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.004	8124	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.005	8125	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.006	8126	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.007	8127	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
2.008	2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
2.009	2.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
2.010	4831	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia						

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.011	4929	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
2.012	8128	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
2.013	8129	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.014	8130	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
2.015	8131	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2.016	8132	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
2.017	8133	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.018	8134	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
2.019	2.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
2.020	181	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana						
2.021	4831	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia						
2.022	8135	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
2.023	8136	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
2.024	8137	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
2.025	8138	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.026	8139	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
2.027	8140	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.028	8141	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
2.029	8142	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2.030	8143	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
2.031	8144	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.032	8145	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
2.033	8146	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
2.034	8147	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
2.035	8148	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
2.036	8149	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
2.037	8150	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
2.038	2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.039	2.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
2.040	4930	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.041	2.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
2.042	196	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek						
2.043	8152	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.044	8153	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2.045	8154	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
2.046	8155	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
2.047	8156	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
2.048	8157	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
2.049	8158	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
2.050	2.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
2.051	2.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
2.052	199	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran						
2.053	8159	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
2.054	2.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
2.055	202	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan						
2.056	8160	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
2.057	8161	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.058	2.03.15	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian						
2.059	2.03.15.02	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis						
2.060	12378	Jumlah Pembinaan SILUHTAN dan SIMLUHTAN yang dilaksanakan	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
2.061	12380	Jumlah petani yang dibina	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
2.062	12381	Jumlah Sekolah Lapang Kelempok Tani yang dilakukan	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani
2.063	3601	Jumlah Penyuluh yang dibina	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
2.064	2.03.15.03	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis						
2.065	4034	Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang dilatih	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
2.066	2.03.25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan						
2.067	2.03.25.01	Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan						

NO BARI	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.068	11685	Jumlah laporan rapat penanganan kerawanan pangan yang dilakukan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
2.069	3623	Data ketersediaan dan kerawanan pangan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
2.070	2.03.25.04	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah						
2.071	12413	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
2.072	12414	Jumlah pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
2.073	12415	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan provinsi	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	2.09.03.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
2.074	12418	Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi yang diperlihara	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	2.09.03.1.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
2.075	12419	Jumlah CPP yang disalurkan ke kabupaten/kota	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.076	233	Jumlah cadangan beras provinsi	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
2.077	2.03.25.07	Pengembangan Sistem Informasi Pasar						
2.078	12413	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
2.079	12420	Jumlah laporan neraca bahan makanan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
2.080	235	Informasi harga pangan yang tersedia	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
2.081	2.03.27	Program Penganekeagaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan						
2.082	2.03.27.01	Analisis Pola Pangan Harapan						
2.083	243	Jumlah laporan analisis PPH Konsumsi	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
2.084	2.03.27.02	Pengembangan Pangan Lokal						
2.085	12421	Jumlah promosi penganekeagaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekeagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2.086	12422	Jumlah pertemuan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.087	4038	Jumlah produk olahan pangan lokal yang dikembangkan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2.088	2.03.27.03	Pengawasan Mutu Pangan Segar						
2.089	11700	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.090	12423	Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan/bimtek dan sertifikasi profesi	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
2.091	12424	Jumlah registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.092	12425	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
2.093	3626	Jumlah Sertifikasi mutu pangan segar asal tumbuhan	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.094	3.03	Pertanian						
2.095	3.03.41	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura						
2.096	3.03.41.01	Peningkatan Produksi Hortikultura						
2.097	11702	Luas pengembangan kawasan pertanian hortikultura	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
2.098	11733	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi sarana pertanian hortikultura	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
2.099	12426	Jumlah benih diadakan	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
2.100	12427	Jumlah hormon yang diadakan	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
2.101	12428	Jumlah herbisida yang diadakan	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
2.102	317	Produktivitas tanaman hortikultura						
2.103	3.03.41.02	Penanganan Pasca Panen dan Promosi Atas Hasil Pertanian Hortikultura						
2.104	11713	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi prasarana sarana pertanian hortikultura	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
2.105	11734	Jumlah promosi hasil pertanian hortikultura	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
2.106	12429	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
2.107	4200	Jumlah produksi tanaman hortikultura yang disertifikasi						
2.108	3.03.41.03	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Hortikultura						
2.109	11706	Panjang jalan usaha tani hortikultura yang dikelola	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.110	11707	Luas lahan yang terlayani jaringan irigasi hortikultura di tingkat usaha tani	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
2.111	11733	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi sarana pertanian hortikultura	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
2.112	12431	Jumlah sarana pertanian hortikultura yang diawasi pengadaannya	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
2.113	3628	Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan						
2.114	3.03.46	Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura						
2.115	3.03.46.01	Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan						
2.116	2820	Jumlah produksi benih dasar dan pokok tanaman pangan yang bersertifikat	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
2.117	3.03.46.03	Peningkatan Produksi Benih Hortikultura						
2.118	3638	Jumlah Produksi Benih dasar dan pokok tanaman hortikultura yang bersertifikat	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
2.119	3.03.48	Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura						
2.120	3.03.48.02	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)						
2.121	12410	Jumlah pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian yang dilakukan	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
2.122	12411	Gerakan pengendalian OPT yang dilakukan	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
2.123	12412	Gerakan penanganan dampak perubahan iklim	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
2.124	3600	Luas lahan yang dilaksanakan pengendalian OPT						
2.125	3.03.48.03	Perbanyak Agens Hayati dan Petisida Ramah Lingkungan						
2.126	12416	Jumlah luasan laboratorium pengamatan hama dan penyakit (LPHP) yang dibangun dan dipelihara	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian
2.127	3648	Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan dan dilayani	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
2.128	3.03.49	Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura						
2.129	3.03.49.01	Sertifikasi Benih Unggul Pertanian						
2.130	12437	Uji kebenaran/keunggulan varietas yang dilakukan	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.03.02	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
2.131	4790	Jumlah sertifikat/label benih unggul	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
2.132	3.03.49.03	Monitoring dan Pengawasan Peredaran Benih						
2.133	11718	Jumlah produsen/pedagang benih tanaman pangan yang terawasi/terlegalisasi	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
2.134	11719	Jumlah produsen/pedagang benih hortikultura yang terawasi/terlegalisasi	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
2.135	4791	Jumlah rekomendasi produsen benih yang dikeluarkan						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.136	3.03.51	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan						
2.137	3.03.51.03	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan						
2.138	11710	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi sarana pertanian tanaman pangan	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
2.139	12432	Jumlah benih padi yang disediakan	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
2.140	12433	Jumlah pupuk yang disediakan	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
2.141	4792	Luas tanam padi	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
2.142	3.03.51.04	Penanganan Pasca Panen dan Promosi Atas Hasil Pertanian Tanaman Pangan						
2.143	11712	Jumlah promosi hasil pertanian tanaman pangan	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
2.144	11735	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi prasarana sarana pertanian tanaman pangan	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
2.145	12452	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
2.146	4793	Rata-rata percepatan penanganan pasca panen padi	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
2.147	3.03.51.05	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan						
2.148	11710	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi sarana pertanian tanaman pangan	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
2.149	11714	Panjang jalan usaha tani tanaman pangan yang dikelola	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
2.150	11715	Luas lahan yang terlayani jaringan irigasi tanaman pangan di tingkat usaha tani	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
2.151	12435	Jumlah sarana pertanian tanaman pangan yang diawasi pengadaannya	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
2.152	4794	Peningkatan indeks pertanaman						
2.153								
2.154	2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup						
2.155	2.05	Lingkungan Hidup						
2.156	2.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
2.157	2.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
2.158	12088	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.159	12089	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.160	12090	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.161	12091	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
2.162	12093	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2.163	12094	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2.164	12095	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
2.165	12096	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
2.166	12097	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.167	2542	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
2.168	696	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
2.169	8163	Jumlah Surat yang di Administrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.170	8164	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.171	8165	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
2.172	8166	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.173	8167	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.174	8168	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.175	8169	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.176	8170	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.177	8171	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.178	2.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
2.179	2.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
2.180	2536	Jumlah Bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana						
2.181	8180	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
2.182	8181	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
2.183	8182	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
2.184	8183	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.185	8184	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
2.186	8185	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.187	8186	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
2.188	8187	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.189	8188	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
2.190	8189	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.191	8190	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
2.192	8191	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
2.193	8192	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
2.194	8193	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
2.195	8194	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
2.196	8195	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
2.197	2.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
2.198	2.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
2.199	2540	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.200	2541	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.201	2542	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
2.202	2.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
2.203	2550	Jumlah aparatur yang terlatih						
2.204	8197	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.205	8198	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2.206	8199	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
2.207	8200	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
2.208	8201	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
2.209	8202	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
2.210	8203	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
2.211	2.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
2.212	2.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
2.213	557	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran, Rapat Koordinasi, Hari Lingkungan Hidup						
2.214	8204	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
2.215	2.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
2.216	8205	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.217	8206	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.218	987	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, Profil LH Sekalim, SPM						
2.219	2.05.30	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup						
2.220	2.05.30.01	Pemantauan lingkungan						
2.221	11506	Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dana atau kerusakan lingkungan						
2.222	11514	Jumlah Pemantauan kualitas lingkungan (air sungai, air laut dan udara)						
2.223	11527	Jumlah pemantauan kerusakan lingkungan (gambut, mangrove, terumbu karang, padang lamun, hutan dan lahan terbakar)						
2.224	4989	Frekuensi pemantauan kualitas lingkungan	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
2.225	2.05.30.02	Pengendalian pencemaran lingkungan						
2.226	11550	Jumlah Kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.02.02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.227	11555	Jumlah Sumber Pencemaran	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.02.02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.228	11562	Jumlah Rekomendasi teknis izin PPLH	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.02.02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.229	11564	Jumlah draft Pergub	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.02.02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.230	11568	Jumlah kegiatan penghentian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.231	4990	Penurunan beban pencemaran						
2.232	2.05.30.03	Pengendalian kerusakan lingkungan						
2.233	11573	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penghentian Sumber Pencemaran	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
2.234	11576	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemaran (9 Sungai Se-Kalim)	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
2.235	11578	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Remediasi	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
2.236	11581	Luas Lahan Reklamasi, Revegetasi, Lahan Terbuka dan Kerusakan Lahan yang Diinventarisasi	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
2.237	11583	Jumlah Danau yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
2.238	4992	Luas Kerusakan Lingkungan						
2.239	2.05.58	Program Penataan, Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup						

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.240	2.05.58.01	Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup						
2.241	10454	Jumlah dokumen penyelesaian masyarakat di bidang PPLH						
2.242	10469	Jumlah tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
2.243	10477	Jumlah fasilitasi sengketa lingkungan hidup	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	2.11.10.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan
2.244	10488	Jumlah dokumen hasil penerapan sanksi administrasi lingkungan hidup atas tindak lanjut pengaduan	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	2.11.10.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan
2.245	4994	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti						
2.246	2.05.58.02	Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup						
2.247	10115	Jumlah Laporan Kegiatan Usaha dan atau Kegiatan yang telah dilakukan Pengawasan dan Pembinaan						
2.248	10146	Jumlah Kegiatan Pembinaan Usaha dan atau Kegiatan yang dibina	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
2.249	10184	Jumlah Laporan hasil Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pengawasan	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.11.06.1.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
2.250	10188	Jumlah Berita Acara Hasil Pengawasan	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.11.06.1.01.03	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2.251	10222	Jumlah Berita Acara Pengawasan Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup Hasil Pengawasan	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.11.06.1.01.04	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
2.252	12504	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
2.253	4995	Persentase pengawasan terhadap penanggungjawab dan/atau usaha kegiatan yang diberi izin						
2.254	2.05.58.03	Peningkatan kapasitas lingkungan hidup						
2.255	10189	Jumlah dokumen laporan identifikasi dan inventarisasi MHA di kab/kota						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.256	10207	Jumlah kelompok MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	2.11.07.1.01.01	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
2.257	10217	Jumlah sosialisasi kampung iklim pada MHA	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	2.11.07.1.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
2.258	10240	Jumlah lembaga pendidikan yang dibina untuk kegiatan adiwiyata	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan
2.259	10261	Jumlah DLH kab/kota yang dibina untuk kegiatan adipura	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan
2.260	10266	Jumlah DLH kab/kota yang dibina untuk kegiatan kalpataru	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan
2.261	10276	Jumlah kampung iklim yang dibina	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan
2.262	10291	Jumlah pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan
2.263	10301	Jumlah DLH kab/kota yang didampingi untuk kegiatan adipura	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2.264	10311	Jumlah DLH kab/kota yang didampingi untuk kegiatan kalpataru	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2.265	10321	Jumlah penghargaan yang diberikan	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.266	12532	jumlah pendampingan kampung iklim	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2.267	12542	Jumlah Lembaga Pendidikan yang didampingi untuk Kegiatan Adiwiyata Nasional dan Mandiri	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2.268	4996	Jumlah lembaga/orang yang memenuhi kriteria untuk diusulkan dalam penilaian lingkungan hidup	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.269	2.05.59	Program Tata Lingkungan						

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.270	2.05.59.01	Penyusunan, evaluasi dan pelaporan dokumen lingkungan						
2.271	10518	Jumlah kajian lingkungan hidup (KLHS) provinsi						
2.272	11367	Jumlah Kab/Kota yang dibina Penyusunan Dokumen RPPLHnya	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
2.273	11376	Jumlah Laporan Pencapaian IKLH dalam RPPLH Provinsi	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	2.11.02.1.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
2.274	11381	Jumlah Dokumen RPPLH Kab/Kota yang dilakukan Verifikasi	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	2.11.02.1.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
2.275	11430	Jumlah Dokumen KLHS RTRW Kab/Kota Beserta Rencana Rincinya yang dilakukan validasi	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
2.276	11444	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD RTRW Kab/Kota yang validasi	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2.277	11462	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan sosialisasi dan Pembinaan Hasil KLHS RZWP3K	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	2.11.02.1.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
2.278	11464	Jumlah Bimtek/diklat pengembangan kapasitas SDM dalam penyelenggaraan KLHS KRP	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	2.11.02.1.02.04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan dampak/Resiko Lingkungan Hidup
2.279	4981	Persentase dokumen lingkungan yang diintegrasikan kebijakan pembangunan daerah						
2.280	9377	Jumlah Dokumen RPPLH Provinsi	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
2.281	9431	Jumlah Dokumen KLHS RTRW Provinsi Beserta Rencana Rincinya	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
2.282	9443	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Provinsi	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2.283	9455	Jumlah Dokumen KLHS RZWP3K Provinsi	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	2.11.02.1.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
2.284	2.05.59.02	Koordinasi penyusunan dan penilaian kajian dampak lingkungan						
2.285	11478	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)						
2.286	11481	Jumlah Dokumen Lingkungan yang diterbitkan Rekomendasi Izin Lingkungan						
2.287	11483	Jumlah KPA (Komisi Penilai Amdal) Kab/Kota yang diterbitkan rekomendasi lisensinya						
2.288	11488	Jumlah pelaku usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pembinaan izin lingkungan						
2.289	11491	Jumlah Komisi Penilai Amdal Kab/Kota yang dibina dan diawasi						
2.290	4982	Persentase dokumen lingkungan yang dinilai/diperiksa	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
2.291	2.05.59.03	Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim						
2.292	11494	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim						
2.293	11503	Jumlah sistem informasi dan infrastruktur MRV yang terbang dan beroperasi						
2.294	11504	Jumlah Bimtek/Diklat pengembangan kapasitas dan SDM dalam penyelenggaraan Sistem MRV						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.295	11593	Jumlah Kegiatan Tata Kelola Keaneekaragaman hayati daerah Provinsi meliputi data dan rencana Induknya Secara Transparan, Akuntabel dan Termanfaatkan untuk Pengukuran Kinerja dan Pengambilan Kebijakan						
2.296	11599	Jumlah Sistem Informasi dan Pengelolaan Database Kehati Provinsi yang Terbangun dan Beroperasi	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati
2.297	11601	Jumlah Kebun Raya yang dilakukan pembinaan dan Pemantauan	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.03	Pengelolaan Kebun Raya
2.298	11603	Jumlah Taman Kehati dan atau Kawasan Bernilai Penting yang dilakukan Pembinaan dan Pemantauan	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya
2.299	11605	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilakukan Pembinaan dan Pemantauan	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2.300	11607	Jumlah Kegiatan Bimtek/Diklat Pengembangan Kapasitas dalam Pengelolaan Kehati	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati
2.301	4983	Persentase Jumlah Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di integrasikan dengan dokumen RAD GRK	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
2.302	9487	Jumlah Dokumen Profil Kehati Provinsi	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati
2.303	9984	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan KEHATI Provinsi	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati
2.304	2.05.60	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3						
2.305	2.05.60.01	Pengelolaan sampah						
2.306	10499	Jumlah TPA/TPST regional yang beroperasi						
2.307	10512	Dokumen penyelesaian konflik	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
2.308	10516	Jumlah kerjasama penanganan sampah lintas kab/kota						
2.309	11624	Jumlah Kajian Penanganan Sampah Lintas Kab/Kota						
2.310	12534	jumlah lembaga yang melaksanakan kerjasama penanganan sampah lintas kab/kota	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2.311	4985	Persentase timbulan sampah yang dikelola	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
2.312	2.05.60.02	Pengelolaan limbah B3						
2.313	10026	Jumlah Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Sesuai Peraturan Oleh Pelaku Usaha						
2.314	10036	Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen pengumpulan limbah B3 skala Provinsi	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.11.05.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.315	10047	Jumlah kegiatan inventarisasi pengelolaan limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.11.05.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.316	10056	Jumlah dokumen program kedaruratan pengelolaan limbah B3	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.11.05.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.317	10074	Jumlah pembinaan penyusunan dokumen program kedaruratan pengelolaan limbah B3 yang telah disusun oleh pelaku usaha dan kegiatan	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.11.05.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.318	10083	Jumlah sosialisasi pengurangan dan/atau penghapusan merkuri	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.11.05.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.319	10091	Jumlah rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional
2.320	4986	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan						
2.321	2.05.60.03	Pengembangan fasilitas teknis dan penerapan teknologi ramah lingkungan						
2.322	4987	Jumlah Kab/Kota yang telah menerapkan teknologi pengelolaan sampah	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional
2.323								
2.324	2.07.01 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa							
2.325	2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa						
2.326	2.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
2.327	2.07.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
2.328	12098	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.329	12099	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.330	12100	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
2.331	12101	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
2.332	12103	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2.333	12104	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2.334	12105	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
2.335	12106	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
2.336	12107	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.337	575	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
2.338	8208	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.339	8209	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.340	8210	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
2.341	8211	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.342	8212	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.343	8213	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.344	8214	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.345	8215	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.346	8216	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.347	8217	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
2.348	2.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
2.349	2.07.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
2.350	156	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana						
2.351	8225	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
2.352	8226	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
2.353	8227	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
2.354	8228	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.355	8229	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
2.356	8230	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.357	8231	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
2.358	8232	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2.359	8233	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
2.360	8234	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.361	8235	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
2.362	8236	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
2.363	8237	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
2.364	8238	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
2.365	8239	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
2.366	8240	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
2.367	2.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
2.368	2.07.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
2.369	159	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.370	161	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.371	162	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.372	2.07.10	Program Penusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
2.373	2.07.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
2.374	238	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
2.375	8249	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
2.376	2.07.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
2.377	229	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
2.378	8250	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
2.379	8251	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.380	2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan						
2.381	2.07.15.01	Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta Organisasi Masyarakat Perdesaan						
2.382	10562	Jumlah PKK yang dibina	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
2.383	10580	Jumlah LPM yang dibina	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
2.384	565	Jumlah Pelaksanaan BBGRM yang dibina	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
2.385	610	Jumlah PKK yang dibina	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
2.386	615	Jumlah LPM yang dibina	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.387	695	Jumlah Posyandu yang dibina	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
2.388	9895	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang meningkat kapasitasnya	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
2.389	2.07.15.03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa						
2.390	221	Penyebaran informasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa secara optimal	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
2.391	9880	Laporan Penyebaran Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
2.392	2.07.15.08	Pengembangan Kapasitas Masyarakat						
2.393	678	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Yang dibina	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
2.394	9257	Jumlah Kelompok Masyarakat yg dibina	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
2.395	9881	Jumlah LKD, MHA, dan KPM yang dibina, Jumlah Bumdes dan pasar Desa yang mendukung meningkatnya ekonomi masyarakat, jumlah sarana air minum dan sanitasi masyarakat yang berkualitas, jumlah posyantek yang memiliki TTG unggulan, jumlah desa/kelurahan yang be	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.396	9895	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang meningkat kapasitasnya	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
2.397	2.07.15.09	Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat						
2.398	691	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dibina	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat	2.13.02.1.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
2.399	9331	Identifikasi dan Inventarisasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
2.400	9881	Jumlah LKD, MHA, dan KPM yang dibina, Jumlah Bumdes dan pasar Desa yang mendukung meningkatnya ekonomi masyarakat, jumlah sarana air minum dan sanitasi masyarakat yang berkualitas, jumlah posyantek yang memiliki TTG unggulan, jumlah desa/kelurahan yang be	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan
2.401	9895	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang meningkat kapasitasnya	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat	2.13.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
2.402	2.07.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan						
2.403	2.07.16.01	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat						
2.404	5911	Persentase BUMDesa Aktif	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
2.405	2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa						
2.406	2.07.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan						
2.407	184	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Movev	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota
2.408	9879	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota
2.409	2.07.21	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat						
2.410	2.07.21.01	Sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat						
2.411	147	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota
2.412	148	Jumlah kabupaten/ Kota	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.413	2.07.22	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna						
2.414	2.07.22.01	Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna						
2.415	3170	jumlah posyantek yang aktif	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
2.416	2.07.22.02	Pengembangan Prasarana dan Sarana Sosial Dasar Masyarakat						
2.417	882	Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan
2.418	9892	Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina dan atau dilatih	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota
2.419	2.07.26	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya						
2.420	2.07.26.01	Pengembangan dan Monitoring ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotong-royongan						
2.421	735	Jumlah TP.PKK yang dibina	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
2.422	9881	Jumlah LKD, MHA, dan KPM yang dibina, Jumlah Bumdes dan pasar Desa yang mendukung meningkatnya ekonomi masyarakat, jumlah sarana air minum dan sanitasi masyarakat yang berkualitas, jumlah posyantek yang memiliki TTG unggulan, jumlah desa/kelurahan yang be	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
2.423	2.07.26.02	Penguatan Kapasitas kesejahteraan keluarga						
2.424	741	Kader PKK yang dilatih	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
2.425	9881	Jumlah LKD, MHA, dan KPM yang dibina, Jumlah Bumdes dan pasar Desa yang mendukung meningkatnya ekonomi masyarakat, jumlah sarana air minum dan sanitasi masyarakat yang berkualitas, jumlah posyantek yang memiliki TTG unggulan, jumlah desa/kelurahan yang be	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
2.426	2.07.26.03	Peningkatan usaha ekonomi keluarga						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.427	750	Jumlah Keluarga/Kader PKK yang dibina	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
2.428	9881	Jumlah LKD, MHA, dan KPM yang dibina, Jumlah Bumdes dan pasar Desa yang mendukung meningkatnya ekonomi masyarakat, jumlah sarana air minum dan sanitasi masyarakat yang berkualitas, jumlah posyantek yang memiliki TTG unggulan, jumlah desa/kelurahan yang be	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
2.429	2.07.26.04	Pengembangan dan Monitoring hidup sehat keluarga yang ramah lingkungan						
2.430	753	Kader PKK dan Masyarakat yang dibina	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
2.431	9881	Jumlah LKD, MHA, dan KPM yang dibina, Jumlah Bumdes dan pasar Desa yang mendukung meningkatnya ekonomi masyarakat, jumlah sarana air minum dan sanitasi masyarakat yang berkualitas, jumlah posyantek yang memiliki TTG unggulan, jumlah desa/kelurahan yang be	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
2.432	2.07.27	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat						
2.433	2.07.27.01	Peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna						
2.434	976	Posyantek Percontohan yang Dibina	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
2.435	2.07.28	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan						
2.436	2.07.28.01	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan						
2.437	5618	Jumlah Anggota BPD yang berhasil dilatih	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat	2.13.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
2.438	902	Data aparatut Desa/kelurahan dan badan Permusyawarahan Desa yang belum dilakukan peningkatan Kapasitas	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat	2.13.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
2.439	9908	Jumlah PTPD yang berhasil dilatih	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat	2.13.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.440	9912	Jumlah Laporan	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat	2.13.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
2.441	9918	Jumlah Aparatur Desa yang berhasil dilatih	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat	2.13.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
2.442	2.07.28.02	Monitoring Penyaluran Keuangan Desa						
2.443	803	Data penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD dan pengelolaan keuangan Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat	2.13.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
2.444	2.07.28.03	Peningkatan Penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa						
2.445	1066	Desa Yang Meraih Juara Perlombaan Desa Tingkat Provinsi	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat	2.13.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
2.446	5610	Kelurahan Yang Meraih Juara Perlombaan Kelurahan Tingkat Provinsi	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat	2.13.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
2.447	9912	Jumlah Laporan	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat	2.13.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
2.448	9914	Jumlah Desa/Kampung dan Kelurahan berprestasi	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat	2.13.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
2.449	9915	Jumlah Kabupaten yang dibina terkait Penataan, Administrasi Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat	2.13.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
2.450	2.07.29	Program Pembangunan Desa dan Kawasan						
2.451	2.07.29.01	Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Desa						
2.452	826	Kabupaten yang dibina	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota
2.453	829	Pendamping Desa yang dibina	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota
2.454	2.07.29.02	Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Antar Desa						
2.455	10113	Laporan Pengembangan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga (Perguruan Tinggi/ BUMN/ BUMD/ Swasta/ Pihak Lainnya).	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2.13.03.1.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
2.456	625	Laporan Penguatan Pengembangan dan Pembangunan Antar Desa	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota
2.457	2.07.29.03	Penguatan Informasi Pembangunan						
2.458	628	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota
2.459	2.07.30	Program Kampung Iklim +						

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.460	2.07.30.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Emisi Rendah Desa / Village Low Emission Development / VLED						
2.461	5808	Jumlah Kampung/Desa/Kelurahan iklim	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
2.462								
2.463	2.09.01 - Dinas Perhubungan							
2.464	2.09	Perhubungan						
2.465	2.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
2.466	2.09.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
2.467	12108	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.468	12109	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.469	12110	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
2.470	12111	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
2.471	12113	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2.472	12114	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2.473	12115	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
2.474	12116	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
2.475	12117	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.476	132	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
2.477	8253	Jumlah Surat yang di Administrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.478	8254	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.479	8255	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
2.480	8256	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan						
2.481	8257	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.482	8258	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.483	8259	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.484	8260	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.485	8261	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.486	8262	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
2.487	2.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
2.488	2.09.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
2.489	6008	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang laik						
2.490	8263	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
2.491	8264	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.492	8265	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
2.493	8266	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2.494	8267	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
2.495	8268	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.496	8269	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
2.497	2.09.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
2.498	4805	Terlaksananya Kebersihan Gedung Kantor dan Taman, Pemeliharaan Gedung, Peralatan & Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Kendaraan Operasional & Jabatan						
2.499	5451	Terlaksananya pemeliharaan peralatan, perlengkapan kantor, kebersihan gedung dan halaman kantor dan terminal tipe B						
2.500	8270	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
2.501	8271	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
2.502	8272	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
2.503	8273	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.504	8274	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
2.505	8275	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.506	8276	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
2.507	8277	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2.508	8278	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
2.509	8279	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.510	8280	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
2.511	8281	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.512	8282	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
2.513	8283	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
2.514	8284	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
2.515	8285	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
2.516	2.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
2.517	2.09.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
2.518	6664	Terlaksananya Kegiatan Publikasi, Tersedianya Makan dan Minum Terkait Pelaksanaan Pekerjaan dan Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi						
2.519	8286	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.520	2.09.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
2.521	1612	Terpenuhinya Kualifikasi SDM Perhubungan						
2.522	8287	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.523	8288	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2.524	8289	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
2.525	8290	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
2.526	8291	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
2.527	8292	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
2.528	8293	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
2.529	2.09.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah						
2.530	2.09.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
2.531	1610	Tersusunnya Renja, RKA, DPA						
2.532	8294	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
2.533	2.09.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
2.534	1797	Jumlah Laporan Pengendalian Evaluasi Kegiatan						
2.535	8295	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
2.536	8296	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.537	2.09.15	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan						
2.538	2.09.15.01	Pengadaan Fasilitas Pengamanan Lalu Lintas Jalan						
2.539	10019	Jumlah Prasarana Jalan yang dibangun	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.15.02.1.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.540	10025	Panjang Jalan yang dipasang perlengkapan jalan	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
2.541	10027	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Direhabilitasi & Dipelihara	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2.542	10086	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan						
2.543	3474	Panjang jalan yang dipasang fasilitas keselamatan jalan						
2.544	2.09.15.02	Pembinaan Pelayanan Angkutan Jalan						
2.545	10030	Jumlah Izin Trayek Angkutan Orang yang Diproses Tepat Waktu	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.02.1.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.546	10090	Jumlah Izin Angkutan Orang yang Dikeluarkan						
2.547	11824	Jumlah Izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan						
2.548	11825	Jumlah Izin Trayek Angkutan Taksi yang Diproses Tepat Waktu	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.02.1.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.549	11826	Jumlah Badan Usaha Angkutan Taksi yang Dibina	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.02.1.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi
2.550	3496	Jumlah badan usaha angkutan umum yang dibina	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
2.551	2.09.15.03	Pembinaan dan Pengendalian Keselamatan Sarana dan Prasarana Jalan						
2.552	10033	Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terakreditasi	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.15.02.1.07.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
2.553	10034	Jumlah Prasarana dan Sarana Terminal yang Memenuhi Standar	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.15.02.1.07.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
2.554	10035	Jumlah Pengemudi Angkutan Umum yang Memiliki Kompetensi	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.15.02.1.07.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
2.555	11811	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.15.02.1.07.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
2.556	3498	Persentase sarana angkutan darat yang laik uji dan prasarana yang laik fungsi						
2.557	2.09.16	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP						
2.558	2.09.16.01	Pembinaan, Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan						
2.559	10044	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Dilakukan Pengawasan	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.560	11800	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Direncanakan/Ditingkatkan	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
2.561	11801	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi/Dipelihara	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
2.562	11802	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Direncanakan/Dibangun	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.03.1.10.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2.563	11804	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi/Dipelihara	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.03.1.10.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2.564	11812	Peningkatan Fasilitas/Fasilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional						
2.565	11813	Jumlah Izin/Rekomendasi Pelabuhan yang Diproses Tepat Waktu	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
2.566	11815	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun						
2.567	4065	Jumlah dan Progres Pelabuhan/Dermaga/Fasilitas yang dibangun						
2.568	2.09.16.02	Pembinaan Penyelenggaraan SDP dan Pelayaran Rakyat						
2.569	10050	Jumlah Izin Trayek ASDP yang Diproses Tepat Waktu	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	2.15.03.1.03.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.570	10097	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP						
2.571	11818	Jumlah Badan Usaha/Perorangan ASDP yang Dibina	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	2.15.03.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi
2.572	3532	Persentase sarana dan prasarana angkutan perairan memenuhi standar kelainan berlayar						
2.573	2.09.16.03	Pembinaan Badan Usaha dan Perizinan Angkutan Pelayaran						
2.574	10055	Jumlah Izin Usaha Jasa Pelayaran yang Diproses Tepat Waktu	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2.15.03.1.06.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.575	10058	Jumlah Badan Usaha Jasa Pelayaran yang Dibina	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2.15.03.1.06.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.576	10098	Jumlah Izin Usaha Jasa Pelayaran						
2.577	3534	Jumlah badan usaha angkutan pelayaran yang dibina						
2.578	2.09.17	Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan						
2.579	2.09.17.01	Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian						
2.580	11819	Jumlah Penetapan Lintasan/Trase Kereta Api						
2.581	11820	Jumlah Rencana Lintasan/Trase Kereta Api	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	2.15.05.1.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Melebihi Wilayah 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.05.1.03.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Kewenangan Provinsi
2.582	11821	Jumlah Rencana yang di Sosialisasikan	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	2.15.05.1.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Melebihi Wilayah 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.05.1.03.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Kewenangan Provinsi
2.583	3545	Jumlah lintasan/trase kereta api yang direncanakan						
2.584	2.09.17.02	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan						
2.585	10065	Jumlah Dokumen Rencana yang disusun	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	2.15.02.1.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
2.586	10101	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal						
2.587	3549	Jumlah perencanaan kebijakan pengembangan bidang perhubungan						
2.588	2.09.17.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemadam Moda						
2.589	11822	Jumlah Penetapan Kawasan						
2.590	11823	Jumlah Kebijakan	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.02.1.09.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
2.591	3551	Jumlah perencanaan angkutan pemadam moda						
2.592	2.09.18	Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B						
2.593	2.09.18.01	Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B Wilayah I						
2.594	10072	Jumlah Gedung Terminal Tipe B yang dibangun	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	2.15.02.1.03.02	Pembangunan Gedung Terminal
2.595	10073	Jumlah Sarpras Terminal Tipe B yang dikembangkan	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	2.15.02.1.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
2.596	10075	Jumlah Fasilitas Terminal Tipe B yang direhabilitasi	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	2.15.02.1.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
2.597	3012	Jumlah Terminal Tipe B Wilayah I yang dibangun/ditingkatkan						
2.598	2.09.18.02	Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B Wilayah II						
2.599	10072	Jumlah Gedung Terminal Tipe B yang dibangun	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	2.15.02.1.03.02	Pembangunan Gedung Terminal
2.600	10073	Jumlah Sarpras Terminal Tipe B yang dikembangkan	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	2.15.02.1.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
2.601	10075	Jumlah Fasilitas Terminal Tipe B yang direhabilitasi	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	2.15.02.1.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.602	3014	Jumlah Terminal Tipe B Wilayah II yang dibangun/ditingkatkan						
2.603								
2.604	2.10.01 - Dinas Komunikasi dan Informatika							
2.605	2.10	Komunikasi dan Informatika						
2.606	2.10.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
2.607	2.10.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
2.608	12118	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.609	12119	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.610	12120	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
2.611	12121	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
2.612	12123	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2.613	12124	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2.614	12125	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
2.615	12126	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
2.616	12127	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.617	452	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
2.618	8298	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.619	8299	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.620	8300	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
2.621	8301	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.622	8302	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.623	8303	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.624	8304	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.625	8305	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.626	8306	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.627	8307	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
2.628	2.10.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
2.629	2.10.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.630	461	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor						
2.631	8308	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
2.632	8309	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.633	8310	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
2.634	8311	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2.635	8312	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
2.636	8313	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.637	8314	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
2.638	2.10.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
2.639	475	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
2.640	8315	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
2.641	8316	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
2.642	8317	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
2.643	8318	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.644	8319	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
2.645	8320	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.646	8321	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
2.647	8322	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2.648	8323	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
2.649	8324	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.650	8325	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
2.651	8326	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
2.652	8327	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
2.653	8328	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
2.654	8329	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
2.655	8330	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
2.656	2.10.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
2.657	2.10.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.658	504	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah						
2.659	5200	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.660	5201	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
2.661	558	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah						
2.662	2.10.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
2.663	3698	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek						
2.664	3700	Jumlah Pakaian Dinas Aparatur						
2.665	8334	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
2.666	8335	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
2.667	8336	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
2.668	8337	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
2.669	8338	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
2.670	2.10.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
2.671	2.10.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
2.672	3718	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
2.673	2.10.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
2.674	3724	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
2.675	8341	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
2.676	2.10.11	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi						
2.677	2.10.11.01	Peningkatan Sumber Daya TIK						
2.678	11883	Jumlah Pelatihan dan Pembinaan Sumber Daya TIK	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2.679	3747	1. Jumlah pelatihan untuk siswa (SD/SMP/SMA/Sederajat) 2. Jumlah Bimbingan teknis Pranata komputer						
2.680	2.10.12	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah						
2.681	2.10.12.01	Koordinasi Bidang Kominfo Antar Lintas SKPD, Lintas Vertikal di Daerah, BUMN dan Swasta Lokal Provinsi, Kab/Kota						
2.682	5207	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Bidang Kominfo	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik
2.683	2.10.12.02	Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah						
2.684	11885	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Media Center	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.685	3758	Workshop, bimtek, sarana dan prasarana kegiatan jurnalistik dll						
2.686	2.10.12.03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah						
2.687	3760	Jumlah Kerjasama Publikasi Informasi Pembangunan Daerah Melalui RRI, TVRI, Radio Swasta dan TV Swasta, Lokal dan Nasional serta melalui media cetak untuk penerbitan buletin advertorial						
2.688	3774	Jumlah PPID Pembantu di Badan Pemerintah Pemprov. Kaltim dan PPID Kab/kota yang dikoordinasikan dalam jejaring pengelolaan pelayanan dan informasi	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik
2.689	2.10.13	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika						
2.690	2.10.13.01	Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, balho dll						
2.691	3762	Jumlah poster, leaflet, buletin, balho yang menginformasikan kebijakan pemerintah daerah serta pembangunan dan perawatan balho	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
2.692	2.10.13.02	Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi						
2.693	11886	Jumlah dialog interaktif di radio dan televisi, serta media online	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2.694	3763	Jumlah dialog interaktif di radio dan televisi						
2.695	2.10.13.03	Pengolahan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah						
2.696	11887	Jumlah Sengketa Informasi yang Selesai Ditangani	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
2.697	3764	jumlah laporan hasil inventarisasi data dan hasil survei IKM						
2.698	2.10.13.04	Dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah						
2.699	11888	Jumlah Penyelenggaraan Media Komunikasi Publik	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media
2.700	3765	Jumlah laporan dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah						
2.701	2.10.13.05	Partisipasi pada pameran/expo/pekan kebudayaan daerah dan diluar daerah						
2.702	11890	Jumlah kegiatan yang menginformasikan kebijakan kebudayaan pemerintah daerah melalui pameran expo dan kaltim fair	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
2.703	3766	Jumlah event keikutsertaan pada pameran/expo/peka kebudayaan daerah						
2.704	2.10.14	Program Pengembangan Informasi, dan Komunikasi Publik						
2.705	2.10.14.06	Pengembangan Sumber Informasi Publik						
2.706	11893	Jumlah Opini dan Aspirasi Publik yang telah ditangani	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2.707	11894	Jumlah informasi pembangunan daerah yang diterima oleh masyarakat	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
2.708	11895	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pranata Humas	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.709	3774	Jumlah PPID Pembantu di Badan Pemerintah Pemrov. Kaltim dan PPID Kab/kota yang dikoordinasikan dalam jejaring pengelolaan pelayanan dan informasi	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik
2.710	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa						
2.711	2.10.15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi						
2.712	11898	Jumlah layanan pemerintahan yang terhubung dalam sistem elektronik	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
2.713	519	Jumlah Penggunaan Cloud Computing						
2.714	5250	Kapasitas Bandwidth Internet						
2.715	555	Jumlah Penggunaan Aplikasi MOD						
2.716	556	Jumlah Penggunaan Secure Socket Layer Pada Website dan Aplikasi Resmi OPD						
2.717	2.10.15.03	Interkoneksi jaringan intra pemerintah						
2.718	3728	Jumlah OPD Terhubung dalam jaringan	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2.719	2.10.15.04	Pengembangan Integrasi Sistem Informasi di Pemprov Kaltim dan Kab/Kota Kaltim (Interoperabilitas)						
2.720	11899	Jumlah Data dan Informasi elektronik yang tersinkronisasi	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
2.721	3729	Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi yang terintegrasi						
2.722	2.10.15.09	Pembinaan dan Pengembangan Telecenter						
2.723	11898	Jumlah layanan pemerintahan yang terhubung dalam sistem elektronik	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
2.724	3745	Jumlah Jaringan terpasang di Desa Kab/Kota						
2.725	2.10.15.10	Penguatan SPBE						
2.726	11901	Tingkat kematangan penerapan SPBE berdasarkan 35 indikator SPBE	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
2.727	11902	Tingkat penerapan perencanaan dan penyerapan anggaran SPBE berdasarkan rencana induk	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.728	11903	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan proses bisnis SPBE	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.729	5950	Jumlah Dokumen Laporan peyelenggaraan SPBE						
2.730	2.10.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo						
2.731	2.10.16.04	Pengembangan dan penyelenggaraan DC dan DRC						
2.732	11914	Jumlah Hosting/ colocation pada Data Center	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
2.733	5308	Jumlah Hosting Aplikasi DC dan DRC						
2.734	2.10.16.07	Pelaksanaan audit TIK						
2.735	11916	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan Informasi	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.736	5315	Terstandarisasinya Audit TIK						
2.737	2.10.16.08	Penangan Insiden Keamanan Informasi						
2.738	11916	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
2.739	556	Jumlah Penggunaan Secure Socket Layer Pada Website dan Aplikasi Resmi OPD						
2.740	2.10.16.09	Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah						
2.741	11898	Jumlah layanan pemerintahan yang terhubung dalam sistem elektronik	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
2.742	5324	Tersedianya Sarana Pendukung Layanan						
2.743	2.10.16.12	Pengawasan dan pengendalian pengamanan informasi, persandian, pos dan telekomunikasi						
2.744	3780	Tersedianya data dan informasi yang ter-enkripsi						
2.745	2.10.16.13	Pengelolaan Aplikasi (Sistem Informasi Website) Perangkat Daerah di Prov. Kaltim						
2.746	3729	Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi yang terintegrasi						
2.747	5251	Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang dikelola	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
2.748	2.14	Statistik						
2.749	2.14.16	Program penguatan dan evaluasi data dan statistik						
2.750	2.14.16.01	Pengumpulan data statistik daerah						
2.751	11918	Jumlah Data Pembangunan Daerah dan Pertumbuhan ekonomi yang akurat dan kredibel	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2.752	11920	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	2.20.02.1.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
2.753	11922	Jumlah Dokumen Perencanaan Aplikasi Statistik	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral
2.754	11923	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
2.755	11924	Jumlah Kegiatan Urusan Statistik	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	2.20.02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
2.756	11926	Jumlah Aplikasi Statistik Sektoral	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	2.20.02.1.01.05	Pengembangan Infrastruktur
2.757	3783	Tersedianya data pembangunan daerah dan data pertumbuhan ekonomi yang akurat dan kredibel						
2.758								
2.759	2.11.01 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah							
2.760	2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
2.761	2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
2.762	2.11.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.763	12128	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.764	12129	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.765	12130	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
2.766	12131	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
2.767	12133	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
2.768	12134	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2.769	12135	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
2.770	12136	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
2.771	12137	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.772	7	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran						
2.773	8343	Jumlah Surat yang di Administrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.774	8344	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.775	8345	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
2.776	8346	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.777	8347	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.778	8348	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.779	8349	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.780	8350	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.781	8351	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.782	8352	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
2.783	2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
2.784	2.11.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
2.785	13	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor						
2.786	8353	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
2.787	8354	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.788	8355	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
2.789	8356	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2.790	8357	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.791	8358	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.792	8359	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
2.793	2.11.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
2.794	15	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor						
2.795	8356	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						
2.796	8360	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
2.797	8361	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
2.798	8362	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
2.799	8363	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.800	8364	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
2.801	8365	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.802	8366	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
2.803	8367	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2.804	8368	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
2.805	8369	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.806	8370	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
2.807	8371	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
2.808	8372	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
2.809	8373	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
2.810	8374	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
2.811	8375	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
2.812	2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
2.813	2.11.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
2.814	19	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.815	2.11.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
2.816	21	Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.817	2649	Jumlah Seragam Pegawai	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2.818	8379	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.819	8380	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
2.820	8381	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
2.821	8382	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
2.822	8383	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
2.823	2.11.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
2.824	2.11.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
2.825	2	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
2.826	2.11.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
2.827	4	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
2.828	8386	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.829	2.11.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah						
2.830	2.11.19.01	Pengkajian Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM						
2.831	24	Jumlah Dokumen Kajian & Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
2.832	2.11.19.02	Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi dan UMKM						
2.833	28	Jumlah Pelatihan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
2.834	2.11.20	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM						
2.835	2.11.20.01	Pembinaan Lembaga Koperasi dan UKM						
2.836	5656	Jumlah Koperasi dan UKM yang Mendapatkan Pembinaan	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
2.837	2.11.20.02	Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran						
2.838	7056	Jumlah Koperasi dan UKM yang difasilitasi pembiayaan dan Pemasaran	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengerantasan Kemiskinan
2.839	2.11.20.03	Pengawasan Koperasi						
2.840	38	Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.04.1.01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
2.841	2.11.20.04	Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK)						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.842	5655	Jumlah KUKM yang mendapatkan Pelatihan	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
2.843	3.06	Perdagangan						
2.844	3.06.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan						
2.845	3.06.15.01	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen						
2.846	4264	jumlah konsumen yang tereduksi	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
2.847	3.06.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa						
2.848	7058	Jumlah Barang dan Jasa yang sesuai Ketentuan	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
2.849	3.06.15.08	Koordinasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen						
2.850	4259	jumlah pengaduan Konsumen yang dapat diselesaikan	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
2.851	3.06.33	Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang						
2.852	3.06.33.01	Penerapan dan Pengamanan Standarisasi Mutu Barang						
2.853	7060	Peningkatan Kapasitas laboratorium Pengujian, Kalibrasi dan lembaga Sertifikasi						
2.854	7061	Peningkatan, Pelayanan jasa teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian
2.855	3.06.33.02	Pelayanan Jasa teknis pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi						
2.856	7060	Peningkatan Kapasitas laboratorium Pengujian, Kalibrasi dan lembaga Sertifikasi	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.02.01	Verifikasi Mutu Produk
2.857	7061	Peningkatan, Pelayanan jasa teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi						
2.858	3.06.34	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan						
2.859	3.06.34.01	Perdagangan Dalam Negeri						
2.860	5642	Rata-rata Rentang Waktu Kecukupan Stok Barang dan Barang Penting	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	3.30.04.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
2.861	3.06.34.02	Perdagangan Luar Negeri						
2.862	5645	Jumlah Eksportir yang mendapatkan fasilitasi	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
2.863	3.06.34.03	Kerjasama Perdagangan						
2.864	5646	jumlah UKM yang menjalin Kerjasama Perdagangan	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.02.01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi
2.865	3.07	Perindustrian						
2.866	3.07.33	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri						
2.867	3.07.33.03	Perencanaan Pembangunan Industri						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.868	4248	Jumlah perusahaan industri di kawasan peruntukan industri/ kawasan industri	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri
2.869	3.07.33.04	Pengembangan dan Pembinaan Industri						
2.870	4336	jumlah industri yg difasilitasi pengembangan	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	3.31.03.1.01.01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Pelayaran Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.871	3.07.33.05	Pengembangan Informasi Industri						
2.872	5633	Jumlah Data dan Informasi yang tersedia	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	3.31.04.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
2.873								
2.874	2.12.01 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
2.875	2.12	Penanaman Modal						
2.876	2.12.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
2.877	2.12.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
2.878	12138	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.879	12139	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.880	12140	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
2.881	12141	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
2.882	12143	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2.883	12144	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2.884	12145	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
2.885	12146	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
2.886	12147	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.887	345	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
2.888	8388	Jumlah Surat yang di Administrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.889	8389	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.890	8390	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
2.891	8391	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.892	8392	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.893	8393	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.894	8394	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
2.895	8395	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.896	8396	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.897	8397	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
2.898	2.12.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
2.899	2.12.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
2.900	348	Jumlah sarana dan prasarana di lingkungan DPMPSTP Prov. Kalimantan						
2.901	8398	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
2.902	8399	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.903	8400	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
2.904	8401	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2.905	8402	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
2.906	8403	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.907	8404	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
2.908	2.12.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
2.909	351	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
2.910	8405	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
2.911	8406	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
2.912	8407	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
2.913	8408	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.914	8409	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
2.915	8410	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.916	8411	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
2.917	8412	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2.918	8413	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
2.919	8414	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.920	8415	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
2.921	8416	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.922	8417	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
2.923	8418	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
2.924	8419	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
2.925	8420	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
2.926	2.12.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
2.927	2.12.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
2.928	725	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman dan jumlah belanja publikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.929	2.12.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
2.930	2.12.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
2.931	5649	Jumlah Dokumen Perencanaan, Kinerja, dan Anggaran						
2.932	763	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
2.933	2.12.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
2.934	1164	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
2.935	8431	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.936	2.12.18	Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan						
2.937	2.12.18.02	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor primer						
2.938	1177	Jumlah izin investasi sektor primer yang diterbitkan	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.04.1.02.04	SKoordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
2.939	2.12.18.03	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor sekunder dan tersier						
2.940	1189	Jumlah izin investasi sekunder dan tersier yang diterbitkan	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.941	2.12.18.04	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal						
2.942	1189	Jumlah izin investasi sekunder dan tersier yang diterbitkan						
2.943	1913	Jumlah PTSP Kab/Kota yang memperoleh predikat bintang						
2.944	5650	Jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
2.945	2.12.18.05	Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota						
2.946	1913	Jumlah PTSP Kab/Kota yang memperoleh predikat bintang						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.947	5651	Jumlah PTSP Kab/Kota yang memperoleh kualifikasi bintang dari BKPM RI	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.18.04.1.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
2.948	9090	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB)						
2.949	2.12.27	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi						
2.950	2.12.27.02	Pemantauan dan evaluasi Penanaman Modal						
2.951	3564	Jumlah Pemantauan perusahaan PMA/ PMDN di Kaltim						
2.952	4147	Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
2.953	2.12.27.03	Penyusunan informasi penanaman modal						
2.954	1198	Jumlah laporan realisasi investasi dan kegiatan penanaman modal						
2.955	4149	Jumlah dokumen realisasi investasi Kalimantan Timur	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2.956	2.12.27.04	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Investasi						
2.957	3566	Jumlah pembinaan dan pengawasan perusahaan PMA/ PMDN di Kaltim						
2.958	4144	Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi						
2.959	9094	Jumlah perusahaan yang dibina	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
2.960	9095	Jumlah perusahaan yang diawasi	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
2.961	2.12.28	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal						
2.962	2.12.28.01	Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal						
2.963	1895	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal						
2.964	4199	Jumlah Pergub tentang Penanaman Modal yang disusun	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2.965	2.12.28.02	Penyusunan Kajian Pengembangan Potensi Daerah						
2.966	1901	Jumlah kajian potensi unggulan daerah						
2.967	9081	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kalimantan Timur	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
2.968	9675	Jumlah kajian peta potensi investasi	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
2.969	2.12.29	Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan						
2.970	2.12.29.02	Pelayanan informasi perizinan						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.971	4275	Jumlah layanan aplikasi perizinan yang dihasilkan	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2.972	2.12.29.03	Pelayanan Advokasi Perizinan						
2.973	2829	persentase pengaduan yang diselesaikan						
2.974	4156	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
2.975	2.12.30	Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha						
2.976	2.12.30.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal						
2.977	1918	Jumlah event promosi						
2.978	9084	Jumlah keikutsertaan pada kegiatan pameran investasi	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
2.979	2.12.30.02	Peningkatan Kerjasama Penanaman Modal						
2.980	4164	Jumlah pertemuan bisnis						
2.981	9083	Jumlah pertemuan promosi penanaman modal	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
2.982								
2.983	2.13.01 - Dinas Pemuda dan Olah Raga							
2.984	2.13	Kepemudaan dan Olah Raga						
2.985	2.13.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
2.986	2.13.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
2.987	12148	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.988	12149	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.989	12150	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
2.990	12151	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
2.991	12153	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2.992	12154	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2.993	12155	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
2.994	12156	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
2.995	12157	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.996	595	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
2.997	8433	Jumlah Surat yang di Administrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.998	8434	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.999	8435	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3.000	8436	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.001	8437	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.002	8438	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.003	8439	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.004	8440	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.005	8441	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.006	8442	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
3.007	2.13.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
3.008	2.13.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
3.009	643	Jumlah Bulan Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana						
3.010	8451	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
3.011	8452	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
3.012	8453	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.013	8454	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
3.014	8455	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3.015	8456	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
3.016	8457	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3.017	8458	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
3.018	8459	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3.019	8460	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
3.020	8461	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
3.021	8462	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
3.022	8463	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
3.023	8464	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
3.024	8465	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
3.025	2.13.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.026	2.13.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
3.027	5205	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
3.028	2.13.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
3.029	2.13.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran						
3.030	690	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
3.031	2.13.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
3.032	683	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
3.033	8476	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.034	2.13.30	Program Pemberdayaan Kepemudaan						
3.035	2.13.30.09	Apresiasi Kreativitas Pemuda						
3.036	10705	Jumlah Pemuda Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Daya Saing kreativitas Pemuda Se-Kaltim	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	2.19.02.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
3.037	3918	Jumlah Kreatifitas Pemuda						
3.038	2.13.30.10	Seleksi Jambore Pemuda Daerah						
3.039	10707	Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Seleksi JPD Se-Kaltim						
3.040	10718	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Kepramukaan Se-Kaltim	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.1.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi
3.041	4419	Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi Jambore Pemuda Daerah						
3.042	2.13.30.11	Pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia						
3.043	10708	Jumlah Pemuda Yang Terselksi untuk mengikuti JPI Se-Kaltim						
3.044	4420	Jumlah Pemuda yang dikirim mengikuti Jambore Pemuda Indonesia						
3.045	9521	Jumlah Partisipan dalam Kegiatan Kepramukaan Se-Kaltim	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.1.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
3.046	2.13.30.12	Sosialisasi dan Pelatihan Pemuda Anti Narkoba dan HIV/AIDS						
3.047	10705	Jumlah Pemuda Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Daya Saing kreativitas Pemuda Se-Kaltim	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	2.19.02.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
3.048	10796	Jumlah pemuda yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan pemuda anti narkoba dan HIV/AIDS Se-Kaltim						
3.049	4421	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan pemuda anti narkoba dan HIV/AIDS						
3.050	2.13.30.16	Pelatihan Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda						
3.051	10705	Jumlah Pemuda Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Daya Saing kreativitas Pemuda Se-Kaltim	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	2.19.02.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
3.052	10810	Jumlah pemuda yang mendapatkan Pelatihan Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda Se-Kaltim						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.053	5849	Persentase jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan						
3.054	2.13.31	Program Pengembangan Kepemudaan						
3.055	2.13.31.04	Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional						
3.056	2676	Jumlah peserta, panitia, pelatih dan pembina yang terlibat dalam Paskibraka						
3.057	4411	Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dan pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional						
3.058	9511	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Se-Kaltim	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	2.19.02.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
3.059	2.13.31.06	Pembinaan Organisasi Kepemudaan						
3.060	4410	Jumlah pemuda yang terlibat dalam organisasi kepemudaan						
3.061	9513	Jumlah Pemuda Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Se-Kaltim	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	2.19.02.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
3.062	2.13.32	Program Pembudayaan Keolahragaan						
3.063	2.13.32.01	Pembinaan Olahragawan Berbakat						
3.064	717	Jumlah atlet yang dibina						
3.065	9518	Jumlah Atlet Yang Berprestasi Se-Kaltim	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	2.19.03.1.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
3.066	2.13.32.02	Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat						
3.067	10722	Jumlah pelajar, mahasiswa dan Masyarakat yang memanfaatkan Sarana dan Prasarana Olahraga Se-Kaltim	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.19.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
3.068	4437	Jumlah pelajar mahasiswa dan masyarakat yang berpartisipasi						
3.069	2.13.32.03	Pemberian Penghargaan bagi Pelaku Olahraga Berdedikasi dan Berprestasi						
3.070	3942	Jumlah Olahragawan Penerima Penghargaan						
3.071	9519	Jumlah Penerima Penghargaan Olahraga Se-Kaltim	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	2.19.03.1.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi
3.072	2.13.33	Program Peningkatan Prestasi Olahraga						
3.073	2.13.33.04	Partisipasi Event dan Multi Event olahraga						
3.074	4444	Jumlah kontingen kaltim dalam mengikuti event dan multi event olahraga						
3.075	9515	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Se-Kaltim	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
3.076	2.13.33.05	Peningkatan SDM Pelatih dan Wasit Olahraga						
3.077	4439	Jumlah SDM pelatih dan wasit olahraga yang berkompeten						
3.078	9517	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pemusatan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Se-Kaltim	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	2.19.03.1.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
3.079	2.13.33.06	Pelaksanaan Even dan Multi Even Olahraga						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.080	4438	Jumlah peserta yang mengikuti event dan multi event olahraga						
3.081	9516	Jumlah Peserta Yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Se-Kaltim	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
3.082	2.13.33.18	workshop Iptek Olahraga						
3.083	10735	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pemusatan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Se-Kaltim	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	2.19.03.1.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
3.084	4446	Jumlah peserta yang mengikuti workshop						
3.085	2.13.34	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga						
3.086	2.13.34.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga						
3.087	4447	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara						
3.088	9517	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pemusatan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Se-Kaltim	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	2.19.03.1.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
3.089	2.13.35	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda						
3.090	2.13.35.01	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda						
3.091	10713	Jumlah Pemuda Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Se-Kaltim	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
3.092	5976	Jumlah pemuda yang mengikuti peningkatan kompetensi berwirausaha						
3.093	2.13.35.02	Pelatihan Kecakapan Hidup						
3.094	10713	Jumlah Pemuda Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Se-Kaltim	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
3.095	10835	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kecakapan hidup se-Kaltim						
3.096	6502	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kecakapan hidup						
3.097								
3.098	2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah						
3.099	2.17	Perpustakaan						
3.100	2.17.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
3.101	2.17.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
3.102	12158	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.103	12159	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.104	12160	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
3.105	12161	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
3.106	12163	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.107	12164	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
3.108	12165	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
3.109	12166	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
3.110	12167	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.111	1507	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
3.112	8478	Jumlah Surat yang di Administrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.113	8479	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.114	8480	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3.115	8481	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.116	8482	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.117	8483	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.118	8484	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.119	8485	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.120	8486	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.121	8487	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
3.122	2.17.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
3.123	2.17.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
3.124	1511	Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur						
3.125	8488	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
3.126	8489	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3.127	8490	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
3.128	8491	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3.129	8492	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
3.130	8493	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3.131	8494	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
3.132	8495	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
3.133	2.17.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
3.134	1510	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.135	8496	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
3.136	8497	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
3.137	8498	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.138	8499	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
3.139	8500	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3.140	8501	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Rumah Jabatan/Dinas
3.141	8502	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor
3.142	8503	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
3.143	8504	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3.144	8505	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
3.145	8506	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
3.146	8507	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
3.147	8508	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
3.148	8509	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
3.149	8510	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
3.150	2.17.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
3.151	2.17.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
3.152	1514	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman						
3.153	1515	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke kelembagaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
3.154	2.17.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
3.155	1517	Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
3.156	8513	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya
3.157	8514	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
3.158	8515	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
3.159	8516	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
3.160	8517	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
3.161	8518	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
3.162	2.17.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.163	2.17.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
3.164	1519	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
3.165	2.17.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
3.166	1522	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
3.167	8521	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.168	2.17.23	Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan						
3.169	2.17.23.01	Pengembangan Layanan Perpustakaan						
3.170	1524	Jumlah Pemustaka perpust. Konvensional						
3.171	1525	Jumlah Pemustaka perpust. Digital						
3.172	1526	Jumlah Kerjasama Perpustakaan						
3.173	5756	.Peningkatan Jumlah pemustaka Onsite						
3.174	9153	Peningkatan Jumlah pemustaka onsite.						
3.175	2.17.23.02	Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan						
3.176	1526	Jumlah Kerjasama Perpustakaan						
3.177	5056	Terbentuknya sistem otomasi perpustakaan dan kearsipan yang terintegrasi dan On-line						
3.178	5763	.Peningkatan Jumlah pemustaka Online						
3.179	9154	Peningkatan Jumlah pemustaka online .						
3.180	2.17.23.03	Pengembangan Kerjasama Perpustakaan						
3.181	1526	Jumlah Kerjasama Perpustakaan						
3.182	5057	Jumlah dokumen MoU dan PKS dibidang Perpustakaan dan Kearsipan						
3.183	9155	Jumlah dokumen MoU dan PKS dibidang Perpustakaan dan Kearsipan .						
3.184	2.17.24	Program Depository, Pelestarian, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan						
3.185	2.17.24.01	Pengelolaan Depository dan Alih Media Konten Lokal						
3.186	5033	Jumlah konten lokal yang berhasil dikumpulkan						
3.187	5766	Jumlah konten lokal yang diolah						
3.188	5767	.Jumlah konten lokal yang dilestarikan (alihmedia)						
3.189	9156	Jumlah konten lokal yang dilestarikan (alihmedia) .	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	2.23.02.1.01.08	Pengembangan Perpustakaan Deposit
3.190	2.17.24.02	Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Perpustakaan						
3.191	1530	Jumlah koleksi lokal yang berhasil dikumpulkan dan di alih medaikan						
3.192	1533	Jumlah Bahan Perpustakaan Yang dikembangkan dan dilestarikan						
3.193	1535	Jumlah Bahan Perpustakaan yang diolah						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.194	5036	Jumlah bahan perpustakaan yang dikembangkan						
3.195	5037	Jumlah bahan pustaka yang dikonservasi						
3.196	9157	Jumlah bahan perpustakaan yang dikembangkan, diolah dan dikonservasi .	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
3.197	2.17.24.03	Pengolahan dan Perawatan Bahan Perpustakaan						
3.198	1535	Jumlah Bahan Perpustakaan yang diolah						
3.199	5040	Jumlah perbaikan buku rusak						
3.200	5044	Jumlah penjiilidan majalah						
3.201	5074	Jumlah penjiilidan surat kabar						
3.202	9157	Jumlah bahan perpustakaan yang dikembangkan, diolah dan dikonservasi .	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
3.203	2.17.26	Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca						
3.204	2.17.26.01	Pembinaan, Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Perpustakaan						
3.205	1540	Jumlah Perpustakaan yang dibina						
3.206	1541	jumlah Perpustakaan yang dikembangkan						
3.207	1542	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang mengikuti Diklat						
3.208	5046	Jumlah Tenaga Fungsional Dan Tenaga Perpustakaan yg dibina dan dikembangkan						
3.209	5047	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca						
3.210	5772	Jumlah Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan						
3.211	9158	Jumlah Perpustakaan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Yang Terkelola sesuai standar Nasional Perpustakaan .						
3.212	9159	Kegiatan pembudayaan kegemaran membaca yan dilaksanakan .						
3.213	9160	Jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan yang di didik dan dibina .	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	2.23.02.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tinakat Daerah Provinsi
3.214	2.18	Kearsipan						
3.215	2.18.19	Program pengelolaan Arsip						
3.216	2.18.19.01	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip						
3.217	1543	Laporan hasil Akuisisi dan Pengelolaan Arsip						
3.218	5127	Jumlah akuisisi arsip statis						
3.219	5128	Jumlah Arsip Inaktif yang disusutkan						
3.220	9161	Jumlah arsip statis yang di akuisisi dan di olah .	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	2.24.02.1.02.02	Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis
3.221	2.18.19.02	Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip						
3.222	5776	Jumlah arsip yang dipelihara						
3.223	9161	Jumlah arsip statis yang di akuisisi dan di olah .	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	2.24.02.1.02.02	Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.224	2.18.19.03	Peningkatan Kualitas Layanan Kearsipan						
3.225	5777	.Meningkatnya Jumlah Pengunjung Kearsipan						
3.226	9162	jumlah orang yang mendayagunakan layanan dan memanfaatkan arsip .	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	2.24.02.1.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
3.227	2.18.25	Program Pembinaan Kearsipan						
3.228	2.18.25.01	Pembinaan Internal dan Supervisi						
3.229	1536	Laporan pembinaan terhadap SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur						
3.230	5051	jumlah dokumen Peraturan/Kebijakan mengenai kearsipan						
3.231	5779	.Jumlah pembinaan internal dan supervisi lembaga / instansi						
3.232	9163	Jumlah pembinaan internal dan supervisi lembaga / instansi .						
3.233	2.18.25.02	Pembinaan Eksternal dan Supervisi						
3.234	5780	.Jumlah Pembinaan Eksternal, Supervisi dan Tata Kelola LKD Kab /Kota						
3.235	9164	Jumlah Pembinaan Eksternal, Supervisi dan Tata Kelola LKD Kab /Kota .						
3.236	2.18.25.03	Pembinaan, Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Kearsipan						
3.237	5781	.Jumlah Tenaga Fungsional Dan Tenaga Kearsipan yg dibina dan dikembangkan						
3.238	9165	Jumlah Tenaga Fungsional Dan Tenaga Kearsipan yg dibina dan dikembangkan .	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	2.24.02.1.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
3.239								
3.240	3.01.01 - Dinas Kelautan Dan Perikanan							
3.241	3.01	Kelautan dan Perikanan						
3.242	3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
3.243	3.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
3.244	1136	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
3.245	12168	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.246	12169	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.247	12170	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
3.248	12171	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
3.249	12173	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
3.250	12174	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
3.251	12175	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.252	12176	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
3.253	12177	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.254	8523	Jumlah Surat yang di Administrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.255	8524	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.256	8525	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3.257	8526	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.258	8527	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.259	8528	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.260	8529	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.261	8530	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.262	8531	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.263	8532	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
3.264	3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
3.265	3.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
3.266	1270	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
3.267	5064	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
3.268	8533	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
3.269	8534	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3.270	8535	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
3.271	8536	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3.272	8537	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
3.273	8538	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3.274	8539	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
3.275	8540	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
3.276	3.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
3.277	1272	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
3.278	8541	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
3.279	8542	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.280	8543	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.281	8544	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
3.282	8545	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3.283	8546	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
3.284	8547	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3.285	8548	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
3.286	8549	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3.287	8550	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
3.288	8551	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
3.289	8552	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
3.290	8553	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
3.291	8554	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
3.292	8555	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
3.293	3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
3.294	3.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
3.295	1278	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Maupun Dalam daerah						
3.296	5122	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
3.297	8556	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
3.298	3.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
3.299	1286	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek						
3.300	1287	Jumlah Pakaian Dinas untuk PNS dan Non PNS						
3.301	8557	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
3.302	8558	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
3.303	8559	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
3.304	8560	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
3.305	8561	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
3.306	8562	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
3.307	8563	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.308	3.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
3.309	3.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
3.310	1149	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
3.311	8564	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
3.312	3.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
3.313	1290	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
3.314	8565	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
3.315	8566	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.316	3.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap						
3.317	3.01.21.08	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenyelanaan						
3.318	10972	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Laut	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
3.319	10974	Jumlah pertemuan pengembangan usaha nelayan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3.320	10975	Jumlah Pertemuan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
3.321	11641	Jumlah Bantuan Prasarana Perairan Laut yang diserahkan kepada masyarakat	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	3.25.03.1.03.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3.322	11642	Jumlah Bantuan Prasarana Perairan Umum Daratan yang diserahkan kepada masyarakat	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.03.1.02.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3.323	1176	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap yang Dibina	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
3.324	6369	Indeks Kesejahteraan Nelayan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	3.25.03.1.09.02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3.325	3.01.21.09	Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan						
3.326	10022	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan untuk Kapal Perikanan Tangkap Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.04.1.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
3.327	10045	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.328	1300	Jumlah Perizinan Kapal Ikan	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.329	3.01.21.10	Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan						
3.330	1181	Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan yang Operasional	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.331	12439	Jumlah Sarana dan Prasarana berupa Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang di Pangkalan Pendaratan Ikan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
3.332	3.01.25	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saling Produk Perikanan						
3.333	3.01.25.01	Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar						
3.334	10521	Jumlah Pertemuan Validasi Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.04.1.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
3.335	10522	Jumlah Pertemuan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.336	12441	Jumlah Pertemuan Sosialisasi Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.337	12445	Jumlah Prasarana operasional Balai Percontohan Budidaya Perikanan	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
3.338	12446	Jumlah sarana operasional Balai Percontohan Budidaya Perikanan	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
3.339	4907	Jumlah Unit Pembenihan yang bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
3.340	4908	Jumlah Unit Pembudidayaan Ikan yang bersertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) skala kecil dan skala besar	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
3.341	4909	Jumlah Sampel Produk Perikanan Budidaya yang diuji minimal 96% bebas residu	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.342	3.01.25.02	Kegiatan pengembangan usaha perikanan dan kelautan						
3.343	10519	Jumlah Pertemuan Sosialisasi Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.03	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasi, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	3.25.04.1.03.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT
3.344	12447	Jumlah Data dan informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.04.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
3.345	12449	Jumlah Peningkatan Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau dan dan Air Tawar	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.346	12451	Jumlah Peningkatan Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.347	12472	Jumlah Peningkatan Prasarana Perikanan Budidaya	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
3.348	12473	Jumlah Peningkatan Sarana Perikanan Budidaya	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.349	4910	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya						
3.350	4912	Jumlah Bidang Lahan Budidaya yang disiapkan sertifikatnya						
3.351	6374	Indeks Kesejahteraan Pembudidaya Ikan						
3.352	3.01.25.03	Kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan produksi perikanan						
3.353	10800	Jumlah Pertemuan Pembekalan SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan)	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
3.354	10803	Jumlah Penyediaan data Sistem Manajemen Logistik (Dokumen)	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.06.1.03.03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3.355	12454	Jumlah Pendampingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing
3.356	1342	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan dan Sertifikasi						
3.357	4913	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.06.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
3.358	3.01.25.04	Kegiatan Pemasaran Produksi Perikanan						
3.359	1344	Jumlah Fasilitasi (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3.360	6387	Volume Ekspor Perikanan	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3.361	3.01.26	Program Pengelolaan Ruang Laut						
3.362	3.01.26.01	Kegiatan Pendayagunaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						
3.363	10990	Jumlah Dokumen dan Peta Zonasi RZWP-3K Prov. Kaltim	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3.364	10991	Jumlah Dokumen Pencatatan dan Administrasi Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.02.05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut
3.365	12462	Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3.366	12463	Jumlah pendampingan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3.367	6380	Jumlah Wilayah Pesisir yang Memiliki Dokumen Perencanaan	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	3.25.02.1.03.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.368	6381	Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir yang Memiliki Rencana Pemanfaatan dan Pengelolaan yang Ditetapkan menjadi Pergub						
3.369	6392	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir yang Dibina/Difasilitasi	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	3.25.02.1.03.03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3.370	3.01.26.02	Kegiatan Reklamasi dan Jasa Kelautan						
3.371	12464	Jumlah Pertemuan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan dan Pelatihan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 Mil
3.372	12465	Jumlah Pertemuan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.02.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3.373	12467	Jumlah Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
3.374	12469	Jumlah Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.02.04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir
3.375	6385	Jumlah Pelaku Investasi Jasa Kelautan yang difasilitasi						
3.376	3.01.26.03	Kegiatan Konservasi Kelautan dan Perikanan						
3.377	10822	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
3.378	10823	Jumlah wilayah perairan, pesisir dan Pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3.379	10825	Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan perubahan iklim.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3.380	10838	Jumlah Fasilitas akses kemiripan masyarakat dalam pengawasan KKP menuju Pengelolaan dan pemanfaatan KKP yang berkelanjutan	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	3.25.02.1.03.03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3.381	4915	Jumlah Kawasan yang direhabilitasi						
3.382	3.01.27	Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan						
3.383	3.01.27.01	Kegiatan Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Penangkapan Ikan						
3.384	11673	Jumlah Hari Operasi Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan di Perairan Laut	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil
3.385	11674	Jumlah Hari Operasi Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan di Perairan Umum Daratan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.05.1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
3.386	1464	Jumlah Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Penangkapan Ikan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 Mil
3.387	3.01.27.02	Kegiatan Pengawasan, Pembudidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RPKD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.388	11675	Jumlah Hari Operasi Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Perairan Laut	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 Mil
3.389	11676	Jumlah Hari Operasi Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Perairan Umum Daratan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.05.1.02.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
3.390	11677	Jumlah Hari Operasi Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3.391	1466	Jumlah Pengawasan Pembudidayaan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil
3.392	3.01.27.03	Kegiatan Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan						
3.393	1469	Jumlah Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil
3.394	3.01.28	Program Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
3.395	3.01.28.01	Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan						
3.396	1473	Jumlah Sampel yang Dilakukan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing
3.397	3.01.28.02	Penerapan Mutu Hasil Perikanan						
3.398	1477	Jumlah Sampel yang Menerapkan Mutu Hasil Perikanan sesuai Standar	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing
3.399	3.01.29	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan						
3.400	3.01.29.01	Peningkatan Kualitas Mutu Benih						
3.401	12457	Jumlah Sarana Operasional Kegiatan Pembudidayaan Air Payau Dan Laut yang disediakan	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.402	6581	Jumlah Komoditas benih udang windu/ ikan air laut yang berkualitas	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.403	3.01.29.02	Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau dan Laut serta Udang						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.404	12457	Jumlah Sarana Operasional Kegiatan Pembudidayaan Air Payau Dan Laut yang disediakan	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.405	6575	Jumlah Unit Pembenihan udang windu/ ikan air laut yang Operasional	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.406	3.01.29.04	Rehab sarana dan prasarana perbenihan						
3.407	12466	Jumlah Prasarana yang di Rehab	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.408	5123	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di Rehab	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.409	3.01.31	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau / Air Laut						
3.410	3.01.31.01	Peningkatan Kualitas Mutu Benih						
3.411	12453	Jumlah Sarana Operasional Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang disediakan	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.412	6585	Jumlah Komoditas Spesifik Benih Udang Galah/ Ikan yang berkualitas						
3.413	3.01.31.02	Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau / Laut						
3.414	12453	Jumlah Sarana Operasional Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang disediakan	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.415	12455	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan Air Payau dan Tawar yang disediakan	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.416	6584	Jumlah Unit Pembenihan Udang Galah dan Ikan Air Payau/Laut yang Operasional						
3.417								
3.418	3.02.01 - Dinas Pariwisata							

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.419	3.02	Pariwisata						
3.420	3.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
3.421	3.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
3.422	12178	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.423	12179	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.424	12180	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
3.425	12181	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
3.426	12183	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
3.427	12184	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
3.428	12185	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
3.429	12186	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
3.430	12187	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.431	652	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
3.432	8568	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.433	8569	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.434	8570	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3.435	8571	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.436	8572	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.437	8573	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.438	8574	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.439	8575	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.440	8576	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.441	8577	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
3.442	3.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
3.443	3.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
3.444	653	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
3.445	8578	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
3.446	8579	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.447	8580	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
3.448	8581	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3.449	8582	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
3.450	8583	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3.451	8584	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
3.452	8585	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
3.453	3.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
3.454	654	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
3.455	8586	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
3.456	8587	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
3.457	8588	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.458	8589	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
3.459	8590	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3.460	8591	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
3.461	8592	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3.462	8593	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
3.463	8594	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3.464	8595	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
3.465	8596	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
3.466	8597	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
3.467	8598	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
3.468	8599	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
3.469	8600	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
3.470	3.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
3.471	3.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
3.472	4493	Jumlah kegiatan rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah						
3.473	8601	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
3.474	3.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.475	3.02.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
3.476	658	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
3.477	8609	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
3.478	3.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
3.479	659	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
3.480	8610	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
3.481	8611	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.482	3.02.16	Program pengembangan destinasi pariwisata						
3.483	3.02.16.01	Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan sarana dan prasarana pariwisata						
3.484	12543	Jumlah sarpras penunjang kepariwisataan di destinasi pariwisata	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.03.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3.485	4326	Jumlah infrastruktur yang dibangun di destinasi pariwisata						
3.486	3.02.16.02	Pengembangan destinasi unggulan alam dan buatan						
3.487	599	Jumlah wisata alam dan buatan yang dikembangkan	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
3.488	3.02.16.04	Pengembangan destinasi unggulan bahari dan minat khusus						
3.489	600	Jumlah wisata bahari dan khusus yang dikembangkan	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3.490	3.02.17	Program Pengembangan Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata						
3.491	3.02.17.01	Penguatan analisa pasar pariwisata						
3.492	4489	Jumlah laporan analisa pasar pariwisata	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.02	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi
3.493	3.02.17.02	Penguatan data dan informasi pariwisata						
3.494	12518	Jumlah data dan informasi pariwisata (Dokumen)	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri
3.495	4490	Jumlah data dan informasi pariwisata yang di umumkan						
3.496	3.02.17.03	Pengembangan promosi dan kerjasama pariwisata						
3.497	12519	Jumlah kerjasama dan promosi Pariwisata (Media Promos)	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
3.498	4491	Jumlah kerjasama dan promosi yang dilakukan						
3.499	3.02.18	Program Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata						
3.500	3.02.18.01	Pemberdayaan masyarakat sadar wisata dan kampanye Sapta Pesona						
3.501	12520	Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina (pokdarwis)	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.502	4327	Jumlah anggota kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang dilatih						
3.503	3.02.18.02	Pengembangan pengendalian usaha sarana pariwisata						
3.504	4328	Jumlah pelaku usaha sarana pariwisata yang dibina	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	3.26.05.1.01.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
3.505	3.02.18.03	Peningkatan SDM dan profesionalisme usaha jasa pariwisata						
3.506	4329	Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dibina	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	3.26.05.1.01.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan
3.507	3.02.19	Program Pengembangan Karya Seni Budaya dan Pelaku Ekonomi Kreatif						
3.508	3.02.19.01	Peningkatan kualitas dan kreatifitas seni budaya pertunjukan						
3.509	4330	Jumlah pelaku ekraf seni pertunjukan yang dilatih	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	3.26.05.1.01.08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
3.510	3.02.19.02	Pengembangan pengelolaan karya seni budaya						
3.511	4332	Jumlah pelaku seni budaya yang ditingkatkan karyanya	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	3.26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
3.512	3.02.19.03	Pengembangan wisata budaya						
3.513	609	Jumlah fasilitasi kegiatan dan peningkatan SDM bagi pelaku ekraf wisata budaya	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	3.26.05.1.01.09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
3.514								
3.515	3.03.01 - Dinas Perkebunan							
3.516	3.03	Pertanian						
3.517	3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
3.518	3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
3.519	12188	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.520	12189	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.521	12190	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
3.522	12191	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
3.523	12193	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
3.524	12194	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
3.525	12195	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
3.526	12196	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
3.527	12197	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.528	8613	Jumlah Surat yang di Administrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.529	8614	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.530	8615	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3.531	8616	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.532	8617	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.533	8618	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.534	8619	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.535	8620	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.536	8621	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.537	8622	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
3.538	905	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
3.539	3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
3.540	3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana						
3.541	8623	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
3.542	8624	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3.543	8625	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
3.544	8626	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3.545	8627	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
3.546	8628	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3.547	8629	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
3.548	8630	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
3.549	923	Jumlah peralatan dan kelengkapan						
3.550	3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
3.551	8631	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
3.552	8632	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
3.553	8633	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.554	8634	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
3.555	8635	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.556	8636	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Rumah Jabatan/Dinas
3.557	8637	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor
3.558	8638	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
3.559	8639	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3.560	8640	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
3.561	8641	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
3.562	8642	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
3.563	8643	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
3.564	8644	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
3.565	8645	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
3.566	938	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana						
3.567	3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
3.568	3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
3.569	1022	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						
3.570	1024	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah						
3.571	1026	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman						
3.572	8646	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
3.573	3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
3.574	1043	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek						
3.575	1045	Jumlah pakaian dinas						
3.576	8647	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
3.577	8648	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya
3.578	8649	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
3.579	8650	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
3.580	8651	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
3.581	8652	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
3.582	8653	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
3.583	3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.584	3.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
3.585	1072	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran						
3.586	8654	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
3.587	3.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
3.588	1074	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan						
3.589	8655	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
3.590	8656	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.591	3.03.58	Program Peningkatan Produksi Perkebunan						
3.592	3.03.58.04	Kegiatan Peningkatan Produktivitas Perkebunan						
3.593	1078	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
3.594	1093	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
3.595	1094	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
3.596	1095	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
3.597	1096	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
3.598	3.03.58.05	Kegiatan Perluasan Komoditas Perkebunan						
3.599	1093	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)						
3.600	1094	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)						
3.601	1095	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)						
3.602	1096	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)						
3.603	11929	Dokumen penagawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
3.604	2977	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
3.605	2980	Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
3.606	2986	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
3.607	2987	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
3.608	2988	Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
3.609	4213	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa Sawit)						
3.610	5889	Jumlah luas kebun						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.611	3.03.58.06	Pengembangan Kelembagaan Perkebunan						
3.612	11919	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
3.613	11921	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
3.614	11925	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani
3.615	5666	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
3.616	3.03.76	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan						
3.617	3.03.76.04	Pengembangan EBT pada sektor Perkebunan						
3.618	10233	Jumlah pengembangan EBT pada sektor perkebunan						
3.619	5668	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3.620	3.03.76.05	Perlindungan Lahan Konservasi di Areal Perkebunan						
3.621	5670	Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3.622	3.03.76.06	Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan						
3.623	10239	Jumlah KTPA (Kelompok Tani Peduli Api) yang dibentuk dan dibina						
3.624	5672	Jumlah KTPA yang dibentuk dan dibina	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3.625	3.03.80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan						
3.626	3.03.80.04	Peningkatan Kemitraan Usaha Perkebunan						
3.627	5683	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
3.628	3.03.80.05	Penanganan Konflik Usaha Perkebunan						
3.629	5685	jumlah konflik perkebunan yang terselesaikan	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3.630	3.03.80.06	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan						
3.631	11930	Jumlah Perusahaan Perkebunan yang Dibina	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
3.632	5687	Jumlah pelaku usaha yang dibina						
3.633	3.03.88	Program penyediaan bahan tanaman						
3.634	3.03.88.03	Penyediaan Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar						
3.635	10262	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar yang diproduksi						
3.636	5694	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
3.637	5695	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.638	5696	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (karet)	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
3.639	5697	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
3.640	5698	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
3.641	5699	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren)	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
3.642	3.03.88.04	Penyediaan Benih Tanaman Semusim dan Rempah						
3.643	10265	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah yang diproduksi						
3.644	5700	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
3.645	5701	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
3.646	5702	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
3.647	5703	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (serah wang)	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
3.648	3.03.93	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan						
3.649	3.03.93.01	Pembinaan Pasca Panen Perkebunan						
3.650	10250	Jumlah unit pengolahan dan pemasaran bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani
3.651	11940	Jumlah Pengujian Sampel Produk Hasil Perkebunan untuk SNI	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.03	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi petani
3.652	5676	Jumlah kelompok tani yang produknnya memenuhi SNI						
3.653	3.03.93.02	Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan						
3.654	1247	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
3.655	5678	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan						
3.656	3.03.93.03	Kegiatan Promosi Produksi Perkebunan						
3.657	10250	Jumlah unit pengolahan dan pemasaran bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani
3.658	5680	Jumlah promosi yang diikuti	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
3.659	3.03.94	Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih						
3.660	3.03.94.01	Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Benih						
3.661	5707	Persentase peredaran benih yang illegitim	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
3.662	3.03.94.02	Pengujian dan Sertifikasi Benih						
3.663	5708	Jumlah benih yang disertifikasi	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
3.664	3.03.95	Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan						
3.665	3.03.95.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)						
3.666	10267	Jumlah kelembagaan OPT yang dibina	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.667	10270	Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3.668	5718	Jumlah Lahan yang di Kendalikan						
3.669	3.03.95.02	Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH) dan Bio Pestisida (BP)						
3.670	11952	Jenis APH yang Dikembangkan	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3.671	5716	Jumlah APH yang Diperbanyak	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3.672	5717	Jumlah APH yang Diperbanyak	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3.673								
3.674	3.03.02 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan							
3.675	3.03	Pertanian						
3.676	3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
3.677	3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
3.678	12198	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.679	12199	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.680	12200	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
3.681	12201	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
3.682	12203	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
3.683	12204	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
3.684	12205	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
3.685	12206	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
3.686	12207	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.687	3398	Jumlah surat yang diproses						
3.688	8658	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.689	8659	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.690	8660	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3.691	8661	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.692	8662	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.693	8663	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.694	8664	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.695	8665	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.696	8666	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.697	8667	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
3.698	3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
3.699	3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana						
3.700	3402	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan						
3.701	8668	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
3.702	8669	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3.703	8670	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
3.704	8671	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3.705	8672	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
3.706	8673	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3.707	8674	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
3.708	8675	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
3.709	3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
3.710	3400	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki						
3.711	4308	Luas gedung dan taman yang disediakan jasa kebersihannya						
3.712	8676	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
3.713	8677	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
3.714	8678	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.715	8679	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
3.716	8680	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3.717	8681	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
3.718	8682	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3.719	8683	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
3.720	8684	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.721	8685	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
3.722	8686	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
3.723	8687	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
3.724	8688	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
3.725	8689	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
3.726	8690	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
3.727	3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
3.728	3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
3.729	6518	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi						
3.730	8691	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
3.731	3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
3.732	2656	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek						
3.733	4197	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek						
3.734	8692	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
3.735	8693	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
3.736	8694	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
3.737	8695	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
3.738	8696	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
3.739	8697	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
3.740	8698	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
3.741	3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
3.742	3.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
3.743	781	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran						
3.744	8699	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
3.745	3.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
3.746	783	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan						
3.747	8700	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
3.748	8701	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.749	3.03.23	Program Hilirisasi Produk Peternakan						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.750	3.03.23.02	Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan						
3.751	11904	Jumlah peternak/pelaku usaha yang dilatih	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
3.752	840	Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan yang dilakukan pendampingan						
3.753	3.03.23.03	Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan						
3.754	11905	Jumlah pameran/bazaar yang diikuti	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.	3.27.07.1.03.02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani
3.755	3418	Jumlah omset pemasaran produk peternakan dalam pameran/bazar						
3.756	3.03.23.04	Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak						
3.757	5870	Jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
3.758	847	Jumlah sertifikat NKV yang diterbitkan	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	3.27.04.1.05.01	Pengelolaan Penerbitan sertifikat kesejahteraan hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
3.759	9267	Jumlah analisa resiko produk asal hewan	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
3.760	9268	Jumlah pertimbangan teknis pemasukan dan pengeluaran produk asal hewan	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi
3.761	9271	Jumlah unit usaha yang dilakukan sertifikasi NKV	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.1.04.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan
3.762	9273	Jumlah auditor NKV yang memperoleh pelatihan/ bimtek	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.1.04.02	Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis
3.763	9276	Jumlah ternak sapi/kerbau betina produktif yang dikendalikan pemotongannya	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	3.27.04.1.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya
3.764	3.03.34	Program Pengembangan Usaha Peternakan						
3.765	3.03.34.02	Pengembangan Kawasan Peternakan						
3.766	11908	Jumlah Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Peternakan	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
3.767	11917	Luas Penambahan Lahan HPT	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3.768	11945	Jumlah Prasarana Kawasan Mini Ranch Sapi Potong	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
3.769	3375	Jumlah bibit hijauan Pakan Ternak (HPT)	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	3.27.02.1.07.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3.770	9279	Jumlah petugas/wastukan yang mendapatkan pelatihan/bimtek	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.04.03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.771	9281	Luas lahan/kebun bibit HPT	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
3.772	9282	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan ternak	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
3.773	9285	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
3.774	3.03.34.03	Pengembangan Informasi Peternakan						
3.775	11909	Jumlah pengumpulan data yang dilakukan	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
3.776	858	Jumlah Database, Statistik, NBM dan Data fungsi peternakan						
3.777	3.03.34.04	Pengembangan Agribisnis Peternakan						
3.778	4809	Jumlah peternak debitur sektor peternakan (KTS, KUR, KKPE, dll)	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani
3.779	9289	Jumlah izin usaha peternakan dan kesehatan hewan yang dilakukan penilaian dan pertimbangan teknis	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.06.1.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota
3.780	9291	Jumlah laporan pengawasan izin usaha peternakan dan kesehatan hewan	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
3.781	3.03.89	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan						
3.782	3.03.89.01	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan						
3.783	4349	Jumlah kejadian penyakit jembrana	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
3.784	4352	Jumlah hewan yang divaksinasi	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.27.04.1.01.01	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
3.785	9299	Wilayah bebas : Penyakit Jembrana, Penyakit Rabies, Penyakit Avian Influenza (AI)	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.27.04.1.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3.786	9300	Jumlah kompartemen yang dilakukan sertifikasi	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
3.787	9302	Jumlah kejadian penyakit AI	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.788	9303	Jumlah kejadian penyakit rabies	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
3.789	3.03.89.02	Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan						
3.790	3417	Jumlah Kab/kota yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan						
3.791	9305	Jumlah checkpoint yang dibangun dan dipelihara	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.06	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan
3.792	9306	Jumlah analisa resiko penyakit hewan	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
3.793	9307	Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	3.27.04.1.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
3.794	9308	Jumlah pertimbangan teknis pemasukan dan pengeluaran hewan	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi
3.795	3.03.89.03	Penguatan Pelayanan Kesehatan Hewan						
3.796	11931	Jumlah izin usaha distributor yang diawasi	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.1.03	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	3.27.06.1.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan
3.797	7067	Jumlah hewan/ternak yang dilakukan pelayanan kesehatan hewan						
3.798	9310	Jumlah sampel obat hewan	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
3.799	9311	Jumlah distributor obat hewan yang melakukan penyimpangan	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	3.27.02.1.06.02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
3.800	9312	Jumlah klinik hewan yang difasilitasi dan dipelihara	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.05	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan
3.801	3.03.90	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan						
3.802	3.03.90.01	Pengembangan Perbibitan Ternak						
3.803	1016	Jumlah ternak sapi bibit yang memiliki SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)						
3.804	11910	Jumlah penangkar benih/bibit yang di bina	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
3.805	7068	Service per Conception	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3.806	9260	Jumlah petugas/ wasbitnak yang mendapatkan pelatihan/bimtek	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.04.03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3.807	9265	Jumlah ternak sapi yang diidentifikasi untuk sertifikasi	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.808	9269	Jumlah pengadaan ternak	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3.809	3.03.90.02	Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna						
3.810	3383	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3.811	3.03.90.03	Peningkatan Kelembagaan Peternak						
3.812	3384	Jumlah proposal permohonan bantuan yang diverifikasi	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
3.813	3.03.91	Program Penyidikan dan Pengujian Kewan dan Kesmavet						
3.814	3.03.91.01	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan						
3.815	11913	Jumlah Prasarana Pendukung Lab Kewan yang dibangun/dipelihara	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
3.816	4841	Jumlah sampel penyakit hewan						
3.817	9339	Jumlah analisis pengujian penyakit hewan	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner
3.818	3.03.91.02	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner						
3.819	11915	Jumlah Prasarana Pendukung Lab Kesmavet yang dibangun/dipelihara	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
3.820	4843	Jumlah sampel produk asal hewan						
3.821	9341	Jumlah analisis pengujian produk asal hewan	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner
3.822	3.03.91.03	Pembangunan/Perbaikan UPTD Laboratorium Kewan dan Kesmavet dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)						
3.823	4195	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung						
3.824	3.03.92	Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak						
3.825	3.03.92.03	Pembangunan/Perbaikan UPTD PIB Api-Api dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)						
3.826	4195	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung						
3.827	3.03.92.04	Peningkatan Produksi Bibit dan Benih Ternak						
3.828	11912	Jumlah Prasarana Pendukung UPTD PTHPT yang dibangun/dipelihara	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
3.829	3405	Jumlah Kelahiran rusa bibit	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
3.830	6509	Jumlah Kelahiran Sapi Bibit dan Rusa Bibit						
3.831	9316	Jumlah ayam nunukan yang menetas	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.832	9317	Jumlah Kelahiran Sapi Bibit	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
3.833	3.03.92.05	Peningkatan Produksi dan Bibit Hijauan Pakan Ternak						
3.834	1050	Produksi HPT						
3.835	11912	Jumlah Prasarana Pendukung UPTD PTHPT yang dibangun/dipelihara	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
3.836	3407	Jumlah bibit HPT yang diproduksi	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
3.837								
3.838	3.04.01 - Dinas Kehutanan							
3.839	3.04	Kehutanan						
3.840	3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
3.841	3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
3.842	12208	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.843	12209	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.844	12210	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
3.845	12211	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
3.846	12213	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
3.847	12214	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
3.848	12215	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
3.849	12216	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
3.850	12217	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.851	812	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
3.852	8703	Jumlah Surat yang di Administrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.853	8704	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.854	8705	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3.855	8706	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.856	8707	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.857	8708	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor

NO BARI	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.858	8709	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.859	8710	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.860	8711	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.861	8712	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
3.862	3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
3.863	3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
3.864	5738	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
3.865	8703	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan						
3.866	8704	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
3.867	8705	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						
3.868	8706	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan						
3.869	8707	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor						
3.870	8708	Jumlah Alat Tulis Kantor						
3.871	8709	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan						
3.872	8710	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
3.873	8711	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
3.874	8712	Jumlah Makanan dan Minuman						
3.875	8713	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
3.876	8714	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3.877	8715	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
3.878	8716	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3.879	8717	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
3.880	8718	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3.881	8719	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
3.882	8720	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
3.883	983	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
3.884	3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
3.885	821	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
3.886	8721	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.887	8722	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
3.888	8723	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.889	8724	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
3.890	8725	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3.891	8726	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
3.892	8727	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3.893	8728	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
3.894	8729	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3.895	8730	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
3.896	8731	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
3.897	8732	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
3.898	8733	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
3.899	8734	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
3.900	8735	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
3.901	3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
3.902	3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
3.903	821	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
3.904	825	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah						
3.905	8736	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
3.906	3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
3.907	1058	Terpeenuhnya Pakaian dinas beserta perlengkapannya						
3.908	1061	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya						
3.909	8737	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
3.910	8738	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
3.911	8739	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
3.912	8740	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
3.913	8741	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
3.914	8742	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.915	8743	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
3.916	3.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
3.917	3.04.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
3.918	8744	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
3.919	937	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
3.920	3.04.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
3.921	8745	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
3.922	8746	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.923	941	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
3.924	3.04.16	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan						
3.925	3.04.16.01	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan						
3.926	4680	Persentase realisasi produksi hasil hutan kayu (realisasitarget)						
3.927	8984	Jumlah Unit Usaha yang Dilayani Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi Kecuali Pada Wilayah Perum Perhutani	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi Kecuali Pada Wilayah Perum Perhutani
3.928	8985	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
3.929	8986	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung
3.930	3.04.16.02	Pendampingan Penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA						
3.931	4682	Jumlah IUPHHK-HA yang menerapkan RIL / RIL C	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi
3.932	9001	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
3.933	9002	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
3.934	3.04.16.03	Perencanaan dan Tata Hutan						
3.935	4696	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Tata Hutan						
3.936	8976	Jumlah Dokumen Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
3.937	8977	Luas Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan
3.938	8979	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.02	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
3.939	8982	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.940	8983	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung
3.941	8987	Jumlah Dokumen Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi
3.942	8988	Jumlah Dokumen Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung
3.943	3.04.16.05	Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak						
3.944	12328	Jumlah Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun yang difasilitasi	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	3.28.03.1.07.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3.945	4688	Persentase penanganan tertib Penatausahaan Hasil Hutan (PUH-H) pada Unit Manajemen						
3.946	9006	Jumlah Produksi Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati
3.947	9007	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (UIPHHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (UIPHHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3.948	9008	Jumlah Unit Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
3.949	9009	Jumlah Unit Manajemen Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu yang diawasi perijinannya	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu
3.950	9012	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Hutan Kayu	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	3.28.03.1.07.01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun
3.951	9013	Jumlah Unit Manajemen Industri yang dilakukan Pembinaan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
3.952	3.04.39	Program Pengelolaan DAS dan RHL						
3.953	3.04.39.05	Rehabilitasi Hutan dan Lahan						
3.954	4701	Luas lahan kritis yang direhabilitasi						
3.955	8990	Jumlah Dokumen RTnRL yang disusun	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
3.956	8991	Luas Hutan Rakyat yang ditanam	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
3.957	8992	Luas Hutan Kota yang ditanam	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.03	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara
3.958	8993	Luas Penghijauan Lingkungan Yang ditanam	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
3.959	8994	Jumlah Bangunan Konservasi Tanah yang dibuat	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan
3.960	8997	Luas Hutan dan Lahan yang direhabilitasi	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.07	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3.961	8999	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
3.962	3.04.39.15	Pengelolaan DAS						
3.963	12329	Jumlah bangunan yang menerapkan teknik konservasi tanah dan air	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.964	4700	Jumlah DAS/SUB DAS yang dimonitoring	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
3.965	9064	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
3.966	9065	Jumlah DAS yang dikelola						
3.967	9067	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
3.968	9068	Jumlah laporan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS
3.969	9069	Jumlah Laporan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS
3.970	3.04.39.16	Perbenihan Tanaman Hutan						
3.971	4702	Jumlah Laporan Peredaran dan Pengadaan Bibit	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
3.972	8996	Jumlah Bibit untuk Rehabilitasi Lahan Yang dibuat	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
3.973	9029	Jumlah pengada pengedar benih/bibit terdaftar yang diterbitkan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	3.28.03.1.09.01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
3.974	9030	Jumlah sertifikasi sumber benih yang diterbitkan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	3.28.03.1.09.02	Sertifikasi Sumber Benih
3.975	9031	Jumlah sertifikasi mutu benih yang diterbitkan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	3.28.03.1.09.03	Sertifikasi Mutu Benih
3.976	9032	Jumlah sertifikasi mutu bibit yang diterbitkan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	3.28.03.1.09.04	Sertifikasi Mutu Bibit
3.977	9033	Jumlah laporan pengawasan peredaran benih dan bibit						
3.978	3.04.41	Program Perlindungan dan KSDAE						
3.979	3.04.41.24	Pengendalian dan Pengamanan Hutan						
3.980	5345	luas hutan yang dimanfaatkan tanpa izin yang semakin berkurang	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
3.981	9001	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
3.982	9002	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
3.983	9003	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan
3.984	9004	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
3.985	3.04.41.25	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan						
3.986	4705	Luas Areal Kebakaran Hutan yang Semakin Menurun	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
3.987	3.04.41.26	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya						
3.988	12331	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang dikelola						
3.989	4706	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang Meningkat	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.990	9049	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi	3.28.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
3.991	9051	Jumlah Laporan Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.01	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst
3.992	9052	Jumlah Dokumen Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.02	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst
3.993	9053	Jumlah Laporan Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah
3.994	9054	Jumlah Dokumen Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
3.995	9055	Jumlah Laporan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di KBEP	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
3.996	9056	Luas daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi						
3.997	3.04.42	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial						
3.998	3.04.42.36	Penyuluhan Kehutanan						
3.999	12332	Jumlah Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan yang dilakukan						
4.000	12333	Jumlah Penyuluh Yang Mengikuti pelatihan dan pembinaan						
4.001	4709	Jumlah KTH/KUPS terregistrasi	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
4.002	9059	Jumlah Penyuluh Yang Mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
4.003	9060	Jumlah Kelompok Tani Hutan Yang Mengikuti Proses Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
4.004	3.04.42.37	Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial						
4.005	4710	Luas permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan kehutanan	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
4.006	4712	Unit Usaha Masyarakat Hutan	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
4.007	9061	Jumlah Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
4.008	3.04.42.38	Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat						
4.009	4713	Luas pembinaan wilayah Hutan Adat/Hutan Hak						
4.010	9026	Jumlah Ijin Penetapan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.08	Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK Untuk Kepentingan Religi	3.28.03.1.08.01	Penetapan Rencana Pengelolaan Tempat Ibadah dan Wisata Rohani di Kawasan Hutan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.011	9027	Jumlah laporan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.08	Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK Untuk Kepentingan Religi	3.28.03.1.08.02	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani
4.012	3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)						
4.013	3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL						
4.014	2494	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL						
4.015	2495	Jumlah Pendampingan kegiatan RHL						
4.016	2778	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL						
4.017	812	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
4.018	3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)						
4.019	1945	Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan						
4.020	2010	Jumlah Laporan Pendampingan, Pembentukan, Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan						
4.021	2141	Jumlah kelompok tani yang diberikan pendampingan, pembentukan, peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan dan kelompok tani yang dilakukan pembinaan pengelolaan Usaha Perhutanan Sosial dan Kemitraan						
4.022	2349	Jumlah kelompok tani hutan yang diberikan pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan						
4.023	2498	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)						
4.024	3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan						
4.025	2465	Jumlah kegiatan temu teknis KTH, Sekolah Lapangan, Pemberdayaan KTH, Lomba Wana Lestari						
4.026	2467	Jumlah Kegiatan Temu Teknis KTH, Sekolah Lapang, Pemberdayaan KTH, Lomba Wana Lestari						
4.027	4715	Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan						
4.028	5823	Tersusunnya laporan metode dan materi penyuluhan						
4.029	812	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
4.030	3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh						
4.031	2472	Jumlah laporan movev kegiatan penyuluh						
4.032	2498	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)						
4.033	6907	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluh						
4.034	812	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
4.035	3.04.43.07	Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot (DBH DR)						
4.036	7137	Jumlah Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot						
4.037	812	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.038	3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan sapras penyuluhan kehutanan (DBH DR)						
4.039	7139	Jumlah Pemenuhan kebutuhan sapras penyuluhan kehutanan						
4.040	7140	Tersedianya kebutuhan sapras penyuluhan kehutanan						
4.041	812	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
4.042	3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)						
4.043	2501	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)						
4.044	4709	Jumlah KTH/KUPS terregistrasi						
4.045	7184	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha						
4.046	7214	Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial						
4.047	7215	Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial						
4.048	812	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
4.049	3.04.43.10	Penyusunan program (DBH SDA DR)						
4.050	7199	Jumlah dokumen program identifikasi dan penyuluhan						
4.051	3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)						
4.052	3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial						
4.053	2046	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan dan Fasilitasi Perhutanan Sosial						
4.054	2359	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi						
4.055	4725	Jumlah kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi						
4.056	7139	Jumlah Pemenuhan kebutuhan sapras penyuluhan kehutanan						
4.057	3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial						
4.058	2048	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Sosial						
4.059	4719	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial						
4.060	3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)						
4.061	3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)						
4.062	2136	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan						
4.063	5739	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan						
4.064	812	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
4.065	3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhoustraining/Penyegaran/Bimbing an Teknis PKHL (DBH SDA DR)						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.066	5723	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL						
4.067	3.04.45.08	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)						
4.068	3605	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar						
4.069	3.04.45.09	Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)						
4.070	3677	Jumlah Gerakan Pencegahan kebakaran hutan dan lahan						
4.071	812	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
4.072	3.04.45.10	Penerapan Agroforestry, Agrosilvopastura, Silvopastura dan Kegiatan Sejenisnya (DBH SDA DR)						
4.073	5735	Luas Kegiatan Agroforestry, Agrosilvopastura, Silvopastura						
4.074	3.04.45.11	Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL (DBH SDA DR)						
4.075	7203	Jumlah Dokumen Pembentukan & Pembinaan Brigade						
4.076	3.04.45.12	Monitoring dan Evaluasi Operasional Pemadaman dan Penanganan Paska Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)						
4.077	7185	Jumlah movev operasional pemadaman dan penanganan paska kebakaran hutan dan lahan						
4.078	3.04.45.13	Investigasi Sebab-Sebab Kebakaran (DBH SDA DR)						
4.079	7186	Jumlah investigasi sebab-sebab kebakaran hutan dan lahan						
4.080	812	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
4.081	3.04.45.14	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)						
4.082	812	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
4.083	3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)						
4.084	7187	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan						
4.085	812	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
4.086	3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)						
4.087	7187	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan						
4.088	7188	Jumlah Sarpras Penanggulangan						
4.089	812	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
4.090	3.04.45.17	Pembuatan Sekat Kanal, Embung dan Kantong Air (DBH SDA DR)						
4.091	5827	Tersedianya Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan						
4.092	7189	Jumlah sekat kanal, embung dan kantong air						
4.093	812	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
4.094	3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)						

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.095	5830	Tersusunnya Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan dan Investigasi Penyebab Kebakaran						
4.096	7190	Jumlah luas penaksiran kebakaran						
4.097	812	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
4.098	3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)						
4.099	2078	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi						
4.100	2452	Terlaksananya sosialisasi, sylvopastura, kampanye, dan patroli						
4.101	5831	Tersusunnya laporan pelaksanaan sosialisasi/kampanye pencegahan						
4.102	5835	Tersusunnya laporan hasil kegiatan sosialisasi						
4.103	7191	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan						
4.104	3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)						
4.105	2271	Jumlah kegiatan Patroli Pengamanan Hutan						
4.106	3604	Jumlah kegiatan patroli kebakaran						
4.107	3676	Terselenggaranya kegiatan gerakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan						
4.108	4723	Jumlah laporan kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan						
4.109	5832	Tersusunnya Laporan kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan						
4.110	7201	Jumlah patroli pencegahan PKHL						
4.111	3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)						
4.112	2146	Terlaksananya Posko Siaga, dan Pemadaman						
4.113	7193	Jumlah Pemadaman Langsung						
4.114	7201	Jumlah patroli pencegahan PKHL						
4.115	3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)						
4.116	3681	Terselenggaranya kegiatan pembentukan regu perbantuan DALKARHUTLA						
4.117	7196	Jumlah pendampingan						
4.118	812	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
4.119	3.04.45.23	Deteksi Dini (DBH SDA DR)						
4.120	2097	Jumlah Dokumen Perencanaan						
4.121	7194	Jumlah dokumen perencanaan						
4.122	812	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
4.123	3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)						
4.124	1939	Jumlah laporan Inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.125	2052	Jumlah Kegiatan Pembinaan Perhutanan Sosial						
4.126	2136	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan						
4.127	5724	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Darkarhuta						
4.128	5829	Terselenggaranya Kegiatan Penetapan Posko Darkarhuta						
4.129	7195	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan						
4.130	3.04.45.25	Perencanaan Strategi dan Ketatausahaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)						
4.131	7197	Jumlah dokumen perencanaan strategi dan ketatausahaan						
4.132	3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)						
4.133	3.04.46.01	Sosialisasi						
4.134	2078	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi						
4.135	2267	Terselenggaranya Patroli Pengamanan Hutan						
4.136	5754	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi						
4.137	3.04.46.02	Koordinasi						
4.138	5726	Jumlah Laporan Koordinasi						
4.139	3.04.46.04	Patroli Pengamanan						
4.140	2271	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan						
4.141	4727	Jumlah Laporan patroli						
4.142	3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)						
4.143	3.04.47.01	Perencanaan						
4.144	1939	Jumlah laporan Inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan						
4.145	2303	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman						
4.146	2797	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman						
4.147	3.04.47.02	Pelaksanaan						
4.148	2798	Luas Penanaman						
4.149	3680	Luas Penanaman						
4.150	3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi						
4.151	2332	Jumlah monev deforestasi dan degradasi hutan dalam Rangka Mitigasi Perubahan Iklim						
4.152	2860	jumlah kegiatan monev						
4.153	6337	Jumlah Monev RHL						
4.154	812	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
4.155	941	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.156	3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)						
4.157	3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)						
4.158	7131	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit						
4.159	7132	Terselenggaranya Pembuatan/pengadaan bibit						
4.160	812	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
4.161	3.04.48.10	Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan (DBH DR)						
4.162	7133	Jumlah penyelenggaraan sertifikasi perbenihan						
4.163	3.04.48.11	Pembinaan perbenihan tanaman hutan (bimtek, monev, pelayanan perijinan dan peningkatan kualitas SDM) (DBH DR)						
4.164	7135	Jumlah Pembinaan perbenihan tanaman hutan (bimtek, monev, pelayanan perijinan dan peningkatan kualitas SDM)						
4.165	3.04.50	Program Pengelolaan Tahura						
4.166	3.04.50.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan						
4.167	4732	Luas penataan kawasan hutan konservasi di tingkat tapak dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan secara lestari	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
4.168	9036	Jumlah laporan pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan kawasan TAHURA	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
4.169	9038	Jumlah Laporan Unit Pengawetan Tumbuhan, Satwa, Serta Habitat Tahura	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
4.170	9039	Jumlah Luasan Pengawetan Koridor Hidupan Liar	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.04	Pengawetan Koridor Hidupan Liar
4.171	9043	Jumlah Luasan Pemulihan Fungsi Ekosistem/Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan Tahura	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
4.172	9044	Jumlah Dokumen Pemanfaatan JASLING (Jasa Lingkungan)	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.06	Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Provinsi
4.173	9045	Jumlah Laporan PKS (Perjanjian Kerjasama)	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.07	Keja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi
4.174	9046	Jumlah Laporan Kemitraan Konservasi Masyarakat Di Sekitar Kawasan TAHURA	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi
4.175	9047	Jumlah Laporan Pengelolaan Daerah Penyangga Tahura	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi
4.176	3.04.50.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat						
4.177	5732	Luas Penanganan degradasi dan deforestasi serta konflik tenulial	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
4.178	9036	Jumlah laporan pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan kawasan TAHURA	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
4.179	9037	Jumlah laporan tindak pengamanan kawasan TAHURA	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
4.180	9038	Jumlah Laporan Unit Pengawetan Tumbuhan, Satwa, Serta Habitat Tahura	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
4.181	9043	Jumlah Luasan Pemulihan Fungsi Ekosistem/Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan Tahura	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
4.182	9046	Jumlah Laporan Kemitraan Konservasi Masyarakat Di Sekitar Kawasan TAHURA	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3.28.04.1.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.183	3.04.51	Program Pengelolaan KPHP						
4.184	3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan						
4.185	4736	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan
4.186	4737	Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP						
4.187	5842	Terkelolanya Wilayah Tertentu (WT) di KPHP						
4.188	5843	Terlaksananya pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP						
4.189	8977	Luas Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan
4.190	8979	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.02	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
4.191	8984	Jumlah Unit Usaha yang Dilayani Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi Kecuali Pada Wilayah Perum Perhutani	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi Kecuali Pada Wilayah Perum Perhutani
4.192	8985	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
4.193	8986	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung						
4.194	8987	Jumlah Dokumen Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi
4.195	8988	Jumlah Dokumen Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung						
4.196	9006	Jumlah Produksi Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati
4.197	9008	Jumlah Unit Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
4.198	9009	Jumlah Unit Manajemen Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu yang diawasi perijinannya	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu
4.199	9013	Jumlah Unit Manajemen Industri yang dilakukan Pembinaan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
4.200	9564	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						
4.201	9565	Jumlah Unit Usaha yang Dilayani Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi Kecuali Pada Wilayah Perum Perhutani						
4.202	9566	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi						
4.203	3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat						
4.204	10997	Luas Hutan dan Lahan yang direhabilitasi						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.205	11031	Jumlah Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial						
4.206	4738	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
4.207	4739	jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak						
4.208	5844	Tertanganinya kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak						
4.209	5845	Tersedianya unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak						
4.210	8990	Jumlah Dokumen RTnRL yang disusun	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
4.211	8991	Luas Hutan Rakyat yang ditanam	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
4.212	8992	Luas Hutan Kota yang ditanam	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.03	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara
4.213	8994	Jumlah Bangunan Konservasi Tanah yang dibuat	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan
4.214	8996	Jumlah Bibit untuk Rehabilitasi Lahan Yang dibuat	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
4.215	8997	Luas Hutan dan Lahan yang direhabilitasi	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.07	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
4.216	8998	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
4.217	8999	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
4.218	9001	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
4.219	9002	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
4.220	9003	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan
4.221	9004	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
4.222	9013	Jumlah Unit Manajemen Industri yang dilakukan						
4.223	9020	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan						
4.224	9021	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan						
4.225	9022	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan						
4.226	9023	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan						
4.227	9027	Jumlah laporan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.08	Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK Untuk Kepentingan Religi	3.28.03.1.08.02	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani
4.228	9033	Jumlah laporan pengawasan peredaran benih dan bibit	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
4.229	9051	Jumlah Laporan Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.01	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst
4.230	9052	Jumlah Dokumen Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.02	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.231	9053	Jumlah Laporan Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah
4.232	9054	Jumlah Dokumen Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
4.233	9055	Jumlah Laporan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di KBEP	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
4.234	9056	Luas daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
4.235	9059	Jumlah Penyuluh Yang Mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
4.236	9060	Jumlah Kelompok Tani Hutan Yang Mengikuti Proses Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
4.237	9061	Jumlah Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
4.238	9065	Jumlah DAS yang dikelola	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
4.239	9066	Jumlah bangunan	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS
4.240	9067	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
4.241	9068	Jumlah laporan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS
4.242	9069	Jumlah Laporan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS
4.243	9567	Luas Penghijauan Lingkungan Yang ditanam	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
4.244	9568	Jumlah bangunan						
4.245	9569	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS						
4.246	9570	Jumlah laporan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS						
4.247	9571	Jumlah Laporan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS						
4.248	3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)						
4.249	2133	Terlaksananya pengawasan, pengendalian pengelolaan hutan, pemanfaatan						
4.250	2321	Jumlah laporan inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perizinan						
4.251	5842	Terkekolnya Wilayah Tertentu (WT) di KPHP						
4.252	7123	Luas Kawasan Hutan yang di kelola						

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.253	7124	Tereselenggaranya pengelolaan kawasan hutan						
4.254	3.04.52	Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)						
4.255	3.04.52.01	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)						
4.256	3675	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian						
4.257	3.04.53	Program Pengelolaan KPH Lindung						
4.258	3.04.53.11	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan						
4.259	5791	Luas Penataan Kawasan Hutan Lindung di Tingkat Tapak dan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Secara Lestari						
4.260	8977	Luas Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan
4.261	8979	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.02	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
4.262	8986	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung
4.263	8987	Jumlah Dokumen Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi						
4.264	8988	Jumlah Dokumen Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung
4.265	9006	Jumlah Produksi Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati
4.266	9008	Jumlah Unit Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
4.267	9009	Jumlah Unit Manajemen Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu yang diawasi perijinannya	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu
4.268	9013	Jumlah Unit Manajemen Industri yang dilakukan Pembinaan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
4.269	9565	Jumlah Unit Usaha yang Dilayani Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi Kecuali Pada Wilayah Perum Perhutani	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi Kecuali Pada Wilayah Perum Perhutani
4.270	9566	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi						
4.271	3.04.53.12	Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat						
4.272	10997	Luas Hutan dan Lahan yang direhabilitasi						
4.273	11031	Jumlah Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
4.274	5793	Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung di Tingkat Tapak Secara Lestari	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
4.275	8990	Jumlah Dokumen RTRRL yang disusun	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTRRL)
4.276	8991	Luas Hutan Rakyat yang ditanam	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.277	8992	Luas Hutan Kota yang ditanam	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.03	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara
4.278	8994	Jumlah Bangunan Konservasi Tanah yang dibuat	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan
4.279	8996	Jumlah Bibit untuk Rehabilitasi Lahan Yang dibuat	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
4.280	8997	Luas Hutan dan Lahan yang direhabilitasi	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.07	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
4.281	8998	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
4.282	8999	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
4.283	9001	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
4.284	9002	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
4.285	9003	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan
4.286	9004	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
4.287	9020	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan						
4.288	9027	Jumlah laporan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.08	Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK Untuk Kepentingan Religi	3.28.03.1.08.02	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani
4.289	9033	Jumlah laporan pengawasan peredaran benih dan bibit	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
4.290	9051	Jumlah Laporan Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.01	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst
4.291	9052	Jumlah Dokumen Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.02	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst
4.292	9053	Jumlah Laporan Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah
4.293	9054	Jumlah Dokumen Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
4.294	9055	Jumlah Laporan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di KBEP	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
4.295	9056	Luas daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
4.296	9059	Jumlah Penyuluh Yang Mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
4.297	9060	Jumlah Kelompok Tani Hutan Yang Mengikuti Proses Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
4.298	9065	Jumlah DAS yang dikelola	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.299	9066	Jumlah bangunan	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS
4.300	9067	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
4.301	9069	Jumlah Laporan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS						
4.302	9567	Luas Penghijauan Lingkungan Yang ditanam	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
4.303	9570	Jumlah laporan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS
4.304	9571	Jumlah Laporan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS
4.305	3.04.53.13	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) (DBA SDA DR)						
4.306	7123	Luas Kawasan Hutan yang di kelola						
4.307	7200	Luas kawasan hutan lindung yang dikelola						
4.308								
4.309	3.05.01 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral							
4.310	3.05	Energi dan Sumber Daya Mineral						
4.311	3.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
4.312	3.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
4.313	12218	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.314	12219	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.315	12220	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
4.316	12221	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
4.317	12223	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
4.318	12224	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
4.319	12225	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
4.320	12226	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
4.321	12227	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4.322	369	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
4.323	8748	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.324	8749	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.325	8750	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.326	8751	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.327	8752	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.328	8753	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.329	8754	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4.330	8755	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.331	8756	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.332	8757	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
4.333	3.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
4.334	3.05.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana						
4.335	375	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor						
4.336	8758	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
4.337	8759	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
4.338	8760	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
4.339	8761	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4.340	8762	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
4.341	8763	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4.342	8764	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
4.343	8765	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
4.344	3.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
4.345	2108	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana						
4.346	5736	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana						
4.347	8766	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
4.348	8767	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
4.349	8768	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.350	8769	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
4.351	8770	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4.352	8771	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
4.353	8772	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.354	8773	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
4.355	8774	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
4.356	8775	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
4.357	8776	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
4.358	8777	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
4.359	8778	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
4.360	8779	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
4.361	8780	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
4.362	3.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
4.363	3.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
4.364	394	Jumlah kegiatan rapat konsultasi keluar daerah						
4.365	397	Jumlah kegiatan rapat/koordinasi/konsultasi ke dalam daerah						
4.366	8781	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
4.367	3.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
4.368	385	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek						
4.369	8782	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.370	8783	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4.371	8784	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
4.372	8785	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
4.373	8786	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4.374	8787	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
4.375	8788	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
4.376	3.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
4.377	3.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
4.378	401	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
4.379	8789	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
4.380	3.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
4.381	405	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.382	5734	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
4.383	8790	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
4.384	8791	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.385	3.05.37	Program Pengembangan Ketenagalistrikan						
4.386	3.05.37.01	Pembangunan Ketenagalistrikan						
4.387	10438	Data warga yang belum berlistrik disekitar jaringan listrik PLN	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
4.388	10444	Jumlah Lokasi yang dilakukan sosialisasi keselamatan Listrik	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.03	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
4.389	10448	Data Penyediaan Tenaga Listrik Perdesaan	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
4.390	10452	Laporan Koordinasi/Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
4.391	10457	Panjang Jaringan Distribusi Listrik Perdesaan Yang Terbangun	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
4.392	4879	Penambahan Desa/Kelurahan berlistrik	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
4.393	3.05.37.06	Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan						
4.394	10392	Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	3.29.06.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
4.395	10397	Jumlah badan usaha/instansi pemerintah yang mengajukan permohonan Izin Operasi (IO)	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	3.29.06.1.02.01	Penetapan Prosedur dan Pesaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
4.396	10402	Jumlah badan usaha/ instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	3.29.06.1.02.01	Penetapan Prosedur dan Pesaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
4.397	10406	Jumlah badan usaha/ instansi pemerintah pemegang Izin Operasi						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.398	10411	Jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan tarif tenaga listrik	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.03	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	3.29.06.1.03.02	Penentuan dan Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen
4.399	10417	Laporan pengawasan						
4.400	10421	Jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan penjualan kelebihan tenaga listrik	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.04	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	3.29.06.1.04.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi
4.401	10424	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis penjualan kelebihan tenaga listrik	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.04	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	3.29.06.1.04.02	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi
4.402	10427	Jumlah perusahaan pemegang izin						
4.403	10430	Jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan IUJPTL	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	3.29.06.1.05.01	Penetapan Prosedur dan Pesaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri
4.404	10431	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis IUJPTL	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	3.29.06.1.05.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri
4.405	10467	Jumlah Pendampingan (Witness)						
4.406	4880	Jumlah perusahaan yang mendapat Rekomendasi teknis	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
4.407	3.05.37.07	Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan						
4.408	10438	Data warga yang belum berlistrik disekitar jaringan listrik PLN						
4.409	10444	Jumlah Lokasi yang dilakukan sosialisasi keselamatan Listrik	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.03	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
4.410	11736	Jumlah badan usaha berizin yang menerapkan keselamatan ketenagalistrikan	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	3.29.06.1.05.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri
4.411	4881	Jumlah perusahaan yang menerapkan Keselamatan ketenagalistrikan	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
4.412	3.05.45	Program Pengembangan Sumberdaya Geologi dan Tata Lingkungan						
4.413	3.05.45.01	Pemetaan dan perhitungan Sumberdaya Geologi						

NO BARRIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.414	10920	Potensi dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batuan						
4.415	10922	Jumlah kawasan Bentang Alam karst dan Warisan Geologi						
4.416	10926	Jumlah lokasi bahaya geologi						
4.417	12497	Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota						
4.418	4869	Jumlah inventarisasi dan verifikasi Sumberdaya dan Cadangan Batubara, Mineral yang CnC						
4.419	3.05.45.02	Pembinaan dan Pengawasan Air Tanah						
4.420	10896	Jumlah SOP Perizinan Air Tanah	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.02.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
4.421	10899	Jumlah Rekomendasi Teknis Perizinan Air Tanah	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
4.422	10902	Jumlah Pelaksanaan Perizinan Air Tanah yang dikendalikan dan diawasi	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah
4.423	10904	Jumlah data dan Informasi NPA Kabupaten/Kota yang terkumpul dan diolah	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.03.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah
4.424	10908	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Kabupaten/Kota	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.03.02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
4.425	10911	Jumlah perusahaan Pemakaian air Tanah yang dikendalikan dan diawasi	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
4.426	487	Jumlah rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan air tanah						
4.427	4871	Jumlah sosialisasi						
4.428	4872	Jumlah sumur yang diawasi						
4.429	3.05.45.03	Pengawasan Mutu dan Muka Air Tanah						
4.430	10886	Jumlah titik pengambilan data	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
4.431	10887	Jumlah zonasi dalam cekungan air tanah	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
4.432	10949	Jumlah sumur produksi/pantau/resapan yang diawasi						
4.433	482	Jumlah peta konservasi air tanah CAT						
4.434	4873	Data mutu/muka air tanah	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
4.435	4874	Sumur Pantau	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
4.436	4875	Peta zona konservasi air tanah	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
4.437	3.05.46	Program Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.438	3.05.46.01	Pembinaan dan Pengawasan Teknis Minerba						
4.439	10609	Jumlah Perusahaan yang dikendalikan dan diawasi	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
4.440	10632	Jumlah Pengawasan Perusahaan yang mengikuti Kaidah Pertambangan Yang Baik	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.02	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	3.29.03.1.02.04	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah
4.441	10642	Jumlah Perusahaan yang diawasi	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.11	Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan Oleh Gubernur pada Saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan	3.29.03.1.11.01	Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan
4.442	10673	Jumlah perusahaan yang melakukan Perubahan Saham, Direksi, dan Komisaris	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.10	Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan Oleh Gubernur Sesuai Dengan Kewenangannya	3.29.03.1.10.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
4.443	10784	Jumlah Perusahaan yang mendapat persetujuan RKAB						
4.444	12511	Jumlah pemegang ijin pertambangan rakyat yang diawasi yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	3.29.03.1.04.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
4.445	2646	Luas lahan yang direklamasi dan direvegetasi	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	3.29.03.1.04.05	Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang bersama pemegang Izin Pertambangan rakyat (IPR)
4.446	2647	Ketaatan perusahaan dalam melaksanakan K3, pemantauan dan pengelolaan lingkungan dan Teknis Pertambangan						
4.447	4876	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar K3 dan Lingkungan	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.02	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	3.29.03.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah
4.448	3.05.46.02	Pembinaan dan Pengawasan perusahaan minerba						
4.449	10585	Data dan Informasi WIUP yang tersedia	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3.29.03.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.450	10587	Data dan Informasi Penetapan WIUP	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3.29.03.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
4.451	10590	Data dan Informasi Pemanfaatan WIUP	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
4.452	10606	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.02	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	3.29.03.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah
4.453	10618	Jumlah Data dan Informasi Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	3.29.03.1.03.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut
4.454	10620	Data Penetapan Wilayah Pertambangan dan WIUP	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	3.29.03.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat
4.455	10623	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut
4.456	10636	Jumlah Data dan Informasi Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian yang tersedia	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sama	3.29.03.1.05.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sama
4.457	10639	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sama	3.29.03.1.05.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sama
4.458	12526	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan usulan WPR dalam penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah pusat	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	3.29.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.459	12527	Jumlah Tata Cara Persyaratan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Batubara dan Batuan yang tersedia	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	3.29.03.1.04.03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
4.460	12528	Jumlah Acuan Permohonan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat yang tersedia	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	3.29.03.1.04.01	Penetapan Prosedur dan Pesaryaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
4.461	4877	Jumlah perusahaan CnC yang menerapkan efisiensi bahan bakar dan penggunaan biodiesel 20%	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.02	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	3.29.03.1.02.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah
4.462	3.05.46.03	Pembinaan dan Pengawasan Produksi Minerba						
4.463	10649	Jumlah Kab/Kota yang Tersedia Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.29.03.1.07.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.464	10653	SK Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.29.03.1.07.02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.465	10657	Jumlah Perusahaan yang menerapkan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.466	4878	Jumlah perusahaan yang memenuhi kewajiban pembayaran Royalti	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.467	564	Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.468	3.05.47	Program Diversifikasi dan Konservasi Energi						
4.469	3.05.47.01	Pengembangan dan pemanfaatan Bioenergi						
4.470	10837	Jumlah Penetapan Prosedur dan Pesaryaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Dengan Kapasitas 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	3.29.05.1.03.01	Penetapan Prosedur dan Pesaryaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun
4.471	10839	Jumlah rekomendasi Teknis Perizinan Bahan Bakar Nabati Kapasitas 10.000 Ton Per Tahun	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	3.29.05.1.03.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun
4.472	10841	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Perizinan Bahan Bakar Nabati Kapasitas 10.000 Ton Per Tahun	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	3.29.05.1.03.03	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.473	10843	Jumlah Pelaksanaan Perizinan Bahan Bakar Nabati Kapasitas 10.000 Ton Pertahun yang dikendalikan dan diawasi	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	3.29.05.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun
4.474	10845	Jumlah Rumah Tangga yang memanfaatkan Biogas sebagai pengganti LPG						
4.475	4882	Jumlah Rumah Tangga yang dibangun Instalasi biogas	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	3.29.05.1.03.03	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun
4.476	3.05.47.02	Pengembangan dan Pemanfaatan Aneka Energi						
4.477	10815	Jumlah Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.29.05.1.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	3.29.05.1.01.01	Penetapan Prosedur dan Pesaryaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan
4.478	10816	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.29.05.1.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	3.29.05.1.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan
4.479	10818	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.29.05.1.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	3.29.05.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan
4.480	10819	Desa terpencil yang terlektifikasi						
4.481	10828	Jumlah Penetapan Prosedur dan Pesaryaratan SKT IUJP Dalam Daerah Provinsi	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.29.05.1.02	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.29.05.1.02.01	Penetapan Prosedur dan Pesaryaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
4.482	10832	Jumlah rekomendasi Teknis	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.29.05.1.02	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.29.05.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
4.483	10833	Jumlah SKT IUJP Dalam Daerah Provinsi yang dikendalikan dan diawasi	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.29.05.1.02	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.29.05.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
4.484	4883	Desa yang dialiri listrik Energi Terbarukan	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
4.485	3.05.47.03	Konservasi Energi dan Air						

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.486	10847	SOP pelaksanaan konservasi energi	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
4.487	10849	Sosialisasi Penghematan Energi dan Air pada Usia dini	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	3.29.05.1.04.02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi
4.488	10851	Sosialisasi penghematan energi pada pengelola gedung Pemerintah	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	3.29.05.1.04.03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
4.489	10852	Standarisasi Pelaksanaan Konservasi Energi Pada Perangkat Daerah Provinsi						
4.490	10854	Jumlah Peserta Pengelolaan Pelaksanaan Konservasi Energi	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	3.29.05.1.04.06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi
4.491	1982	Jumlah penyalur BBM bersubsidi	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi
4.492	1983	Jumlah penyalur LPG bersubsidi	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi
4.493	4882	Jumlah Rumah Tangga yang dibangun Instalasi biogas	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
4.494	4884	Jumlah instansi yang melakukan upaya efisiensi listrik dan air	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi
4.495								
4.496	4.01.03 - Sekretariat Daerah							
4.497	4.01	Sekretariat Daerah						
4.498	4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
4.499	4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
4.500	12228	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.501	12229	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.502	12230	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
4.503	12231	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
4.504	12233	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
4.505	12234	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
4.506	12235	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
4.507	12236	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
4.508	12237	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
4.509	1800	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
4.510	2610	Laporan Administrasi Perkantoran						
4.511	802	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
4.512	8793	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.513	8794	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.514	8795	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4.515	8796	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.516	8797	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.517	8798	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.518	8799	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4.519	8800	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.520	8801	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.521	8802	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
4.522	4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
4.523	4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
4.524	535	Kendaraan, alat kantor						
4.525	817	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor						
4.526	8803	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
4.527	8804	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
4.528	8805	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
4.529	8806	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4.530	8807	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
4.531	8808	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4.532	8809	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
4.533	8810	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
4.534	4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
4.535	2615	Jumlah Peralatan / Kelengkapan Kantor yang dipelihara						
4.536	535	Kendaraan, alat kantor						
4.537	817	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor						
4.538	818	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana						
4.539	8811	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
4.540	8812	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
4.541	8813	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.542	8814	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
4.543	8815	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4.544	8816	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
4.545	8817	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4.546	8818	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
4.547	8819	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
4.548	8820	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
4.549	8821	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
4.550	8822	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
4.551	8823	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
4.552	8824	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
4.553	8825	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
4.554	4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
4.555	4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
4.556	1572	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						
4.557	1573	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah						
4.558	1574	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)						
4.559	2531	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						
4.560	2532	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah						
4.561	2533	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman						
4.562	551	Belanja makanan dan minuman, Publikasi, Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah, Bimtek						
4.563	6931	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi yang telah dilakukan						
4.564	8826	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
4.565	892	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah						
4.566	4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
4.567	1080	Kontribusi BIMTEK						
4.568	2457	Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur						
4.569	2563	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur						

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.570	6932	Jumlah ASN yang telah mengikuti bimbingan teknis/diklat						
4.571	8827	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.572	8828	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya
4.573	8829	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
4.574	8830	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
4.575	8831	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4.576	8832	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
4.577	8833	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
4.578	893	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi						
4.579	4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
4.580	4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
4.581	553	Dokumen perencanaan dan anggaran						
4.582	895	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
4.583	4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
4.584	1809	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan						
4.585	566	Dokumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan						
4.586	896	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran						
4.587	4.01.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah						
4.588	4.01.16.16	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kedinasan Pej. Negara, PAW Anggota DPRD Prov. Dan Kab/Kota						
4.589	572	Laporan kedinasan pejabat negara	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.03	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
4.590	4.01.17	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan dan Kesehatan						
4.591	4.01.17.01	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan						
4.592	12483	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.1.02.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
4.593	6911	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang keagamaan	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.1.02.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
4.594	4.01.17.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan						
4.595	12484	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.1.02.05	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan
4.596	6913	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Kesehatan	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
4.597	4.01.18	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga						
4.598	4.01.18.01	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.599	6915	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Pendidikan dan Kebudayaan	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.1.02.07	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan
4.600	4.01.18.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga						
4.601	12487	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar						
4.602	12496	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.1.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
4.603	6916	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Kepemudaan dan Olahraga						
4.604	4.01.18.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipaan						
4.605	12487	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
4.606	6917	Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Perpustakaan dan Kearsipaan						
4.607	4.01.19	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Strategis Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan						
4.608	4.01.19.01	Budidaya Anak dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial						
4.609	12487	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
4.610	6920	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang kesejahteraan sosial	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.1.02.06	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial
4.611	4.01.19.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
4.612	12487	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar						
4.613	6921	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang tenaga kerja dan transmigrasi	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.1.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
4.614	4.01.19.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
4.615	6922	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.1.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
4.616	4.01.25	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah						
4.617	4.01.25.01	Layanan Pengadaan Barang/Jasa						
4.618	11405	Jumlah Pengelolaan strategis pengadaan yang barang dan jasa yang dilaksanakan	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.02	Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.1.02.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
4.619	5966	Jumlah pengadaan langsung yang dilayani	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.02	Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
4.620	5972	Jumlah pengadaan yang dilayani	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.02	Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
4.621	7315	sangah lelang melalui LPSE	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.02	Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.1.02.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
4.622	4.01.25.02	Evaluasi dan Pembinaan SDM Pengadaan						
4.623	5973	Jumlah SDM Pokja yang mengikuti pembinaan/peningkatan kapasitas aparatur	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.02	Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.1.02.04	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
4.624	4.01.25.03	Pengembangan dan Layanan Sistem Informasi Pengadaan						
4.625	12531	jumlah sistem laporan pelaksanaan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa (3 Sistem)	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.02	Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.1.02.05	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.626	2565	Jumlah pengadaan elektronik yang dilayani	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.02	Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.1.02.06	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
4.627	4.01.26	Program Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah						
4.628	4.01.26.01	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Perda Provinsi						
4.629	11470	Jumlah Rancangan Perda yang disuskan	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
4.630	1291	Terwujudnya Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
4.631	1295	Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
4.632	4.01.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru						
4.633	4.01.27.04	Perencanaan Penataan Administrasi Pemerintahan Daerah						
4.634	577	Terlaksananya proses pembentukan daerah persiapan	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah
4.635	4.01.27.10	Pembakuan nama rupabumi						
4.636	587	Terlaksananya Pembakuan nama Rupabumi di wilayah Kalimantan	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.04	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
4.637	4.01.27.11	Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah						
4.638	634	Jumlah penegasan Batas Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota Se Kalimantan timur secara jelas dan pasti	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah
4.639	4.01.28	Program Peningkatan Produk Hukum Daerah Provinsi						
4.640	4.01.28.01	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur						
4.641	11475	Jumlah Keputusan Gubernur dan Peraturan Gubernur yang ditetapkan	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
4.642	1297	Terwujudnya Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Produk Hukum Daerah	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
4.643	1298	Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
4.644	4.01.28.02	Evaluasi Peraturan Gubernur yang ditetapkan						
4.645	2590	Jumlah Peraturan Gubernur yang di Evaluasi	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.03	Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
4.646	4.01.29	Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum						
4.647	4.01.29.01	Peningkatan Jaringan Informasi Hukum dan Publikasi Produk Hukum Daerah						
4.648	11477	Jumlah Produk Hukum dan Informasi Hukum yang disebarluaskan	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.02	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
4.649	1301	Terlaksananya Penyebar Luasan Publikasi Informasi Hukum	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.02	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
4.650	1304	Jumlah Produk Hukum Daerah yang di Publikasikan	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
4.651	4.01.30	Program Pelayanan Tata Usaha Umum						
4.652	4.01.30.01	Pelayanan Administrasi Biro						
4.653	3537	jumlah PNS	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.03	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	4.01.04.1.03.02	Pengelolaan Kepegawaian

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.654	9580	Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.03	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	4.01.04.1.03.02	Pengelolaan Kepegawaian
4.655	4.01.30.02	Pengelolaan Arsip dan Dokumen Setda						
4.656	3538	jumlah arsip/dokumen inaktif yang telah ditata dengan baik	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.02	Pelaksanaan Administrasi Umum	4.01.04.1.02.09	Pengelolaan Persuratan dan Arsip
4.657	9583	Dokumen Daftar Pencarian Arsip	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.02	Pelaksanaan Administrasi Umum	4.01.04.1.02.09	Pengelolaan Persuratan dan Arsip
4.658	4.01.30.03	Pelayanan Tata Usaha Pimpinan						
4.659	2769	Jumlah surat pimpinan yang terdistribusi tepat waktu	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.02	Pelaksanaan Administrasi Umum	4.01.04.1.02.09	Pengelolaan Persuratan dan Arsip
4.660	9586	Surat Pimpinan yang terdistribusi tepat waktu	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.02	Pelaksanaan Administrasi Umum	4.01.04.1.02.09	Pengelolaan Persuratan dan Arsip
4.661	4.01.30.04	Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda						
4.662	5227	Jumlah Dokumen Rapergub dan Kepgub yang disusun	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.03	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	4.01.04.1.03.05	Dokumentasi Pimpinan
4.663	7039	jumlah laporan rekonsiliasi belanja pegawai	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.02	Pelaksanaan Administrasi Umum	4.01.04.1.02.03	Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah
4.664	7043	jumlah laporan rekonsiliasi perjadi	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.02	Pelaksanaan Administrasi Umum	4.01.04.1.02.03	Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah
4.665	9613	Dokumen Hasil Rekonsiliasi Belanja Pegawai dan Perjalanan Dinas	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.03	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	4.01.04.1.03.02	Pengelolaan Kepegawaian
4.666	4.01.30.05	Pelayanan Verifikasi dan Pelaporan Keuangan Setda						
4.667	7041	jumlah laporan realisasi anggaran dan register SPM	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.02	Pelaksanaan Administrasi Umum	4.01.04.1.02.04	Pengelolaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah
4.668	7042	jumlah ASN yang mengikuti di lingkup SETDA	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.02	Pelaksanaan Administrasi Umum	4.01.04.1.02.04	Pengelolaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah
4.669	9614	Dokumen Verifikasi dan Pelaporan Keuangan Setda	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.02	Pelaksanaan Administrasi Umum	4.01.04.1.02.04	Pengelolaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah
4.670	4.01.31	Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan						
4.671	4.01.31.04	Penataan Masalah Pertanahan						
4.672	676	Terwujudnya pelaksanaan Kebijakan Pertanahan, laporan Koordinasi Pertanahan	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah
4.673	4.01.31.05	Pembinaan Kamtibmas						
4.674	682	Terlaksananya keamanan dan ketertiban di Provinsi Kalimantan Timur	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02	Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum
4.675	4.01.32	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah						
4.676	4.01.32.01	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota						
4.677	11479	Jumlah Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.03	Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
4.678	6850	Jumlah Fasilitas, Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.03	Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
4.679	4.01.33	Program Pelayanan Bantuan Hukum						
4.680	4.01.33.01	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum						
4.681	1317	Advice dan pertimbangan hukum Penyelesaian Sengketa yang diberikan kepada OPD/Masyarakat dengan cepat dan sesuai aturan yang berlaku	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.04	Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.682	5233	Jumlah PD yang mendapat bantuan hukum	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.04	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
4.683	4.01.33.02	Peningkatan Penyelesaian Sengketa						
4.684	11487	Jumlah Laporan dan Pengaduan Kab/Kota	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.05	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
4.685	11490	Pembinaan Kab/Kota Peduli HAM dan Kadarkum serta RANHAM	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.05	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
4.686	1322	Terpenuhinya Kepuasan masyarakat terhadap Kepastian Hukum, penyelesaian Perkara dengan cepat	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.05	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
4.687	1323	Persentase kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.04	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
4.688	4.01.34	Program Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah						
4.689	4.01.34.10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan						
4.690	11860	Laporan Kerjasama Antar Pemerintah	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.06	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah
4.691	11861	Laporan Kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintah	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.07	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
4.692	6865	Jumlah Administrasi Kerjasama yang Terdokumentasi	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.08	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
4.693	700	Laporan Koordinasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
4.694	4.01.35	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah						
4.695	4.01.35.10	Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						
4.696	700	Laporan Koordinasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.04	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
4.697	712	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.05	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
4.698	4.01.36	Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM						
4.699	4.01.36.01	Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM						
4.700	1328	Pembinaan Kab/Kota Peduli HAM dan Sadar akan Hukum dan HAM						
4.701	1331	Persentase Kab/Kota yang Sadar Hukum dan HAM						
4.702	4.01.37	Program Peningkatan dan Pembinaan Kerjasama						
4.703	4.01.37.01	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah						
4.704	10453	Jumlah Letter of Intent, MoU, dan PKS yang terbit antara Pemprov Kaltim dengan Perseorangan, Badan Usaha maupun Ormas (Pihak Ketiga) dan Lembaga non Pemerintah	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.07	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
4.705	1458	Laporan kerjasama dengan lembaga non perintah	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.07	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
4.706	4.01.37.02	Peningkatan dan Pembinaan Adminstrasi Kerjasama						
4.707	11878	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pemrov. Kaltim dengan Pihak Swasta dan Pemprov dengan Daerah	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.08	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
4.708	6865	Jumlah Administrasi Kerjasama yang Terdokumentasi	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.08	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.709	4.01.37.03	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah						
4.710	10527	<i>Jumlah LOI, MoU, PKS dan Nota Kesepakatan yang terbit antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah/Instansi/Lembaga Pemerintah/Departemen/Non Departemen</i>	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.06	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah
4.711	1457	<i>Laporan kerjasama antar perintah</i>	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.01	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.02.1.01.06	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah
4.712	4.01.40	Program Pelayanan Sarana Prasarana Rumah Tangga Setda						
4.713	4.01.40.01	Pengelolaan Barang Aset Setda						
4.714	3539	<i>jumlah gedung yang dikelola dengan baik</i>						
4.715	6843	<i>Jumlah Gedung Aset Setda Yang Dikelola</i>						
4.716	9616	<i>Jumlah Gedung dan Aset Setda yang terpelihara dengan baik</i>						
4.717	4.01.40.02	Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan						
4.718	12538	<i>jumlah PNS dan Non PNS</i>						
4.719	2766	<i>jumlah arsip in aktif yang dikelola dengan baik</i>						
4.720	2769	<i>Jumlah surat pimpinan yang terdistribusi tepat waktu</i>						
4.721	3542	<i>jumlah kegiatan pimpinan yang terlaksana dengan baik</i>						
4.722	6843	<i>Jumlah Gedung Aset Setda Yang Dikelola</i>						
4.723	7041	<i>jumlah laporan realisasi anggaran dan register SPM</i>						
4.724	9613	<i>Dokumen Hasil Rekonsiliasi Belnaja Pegawai dan Perjalanan Dinas</i>						
4.725	9617	<i>Kegiatan Pimpinan dan Acara Pemprov yang terlaksana dengan baik</i>						
4.726	4.01.42	Program Peningkatan Pelayanan Publik						
4.727	4.01.42.03	Penerapan Survey Kepuasan Masyarakat						
4.728	2620	<i>Jumlah Laporan Hasil Survey</i>	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.08	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
4.729	4231	<i>Jumlah Laporan Hasil Survey yang direviu</i>	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.08	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
4.730	4.01.42.04	Peningkatan Tata Laksana Pelayanan Publik						
4.731	10503	<i>Laporan fasilitasi penyusunan standar pelayanan terhadap Perangkat Daerah</i>	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.08	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
4.732	10505	<i>Laporan Fasilitasi Penyusunan SKM terhadap Perangkat Daerah</i>	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.08	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
4.733	10508	<i>Laporan Fasilitasi dalam rangka Inovasi Pelayanan Publik terhadap Perangkat Daerah</i>	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.08	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
4.734	10509	<i>Laporan Monitoring Pelayanan Publik Kab/Kota</i>	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.08	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
4.735	2638	<i>Jumlah Nominasi</i>	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.08	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
4.736	4.01.45	Program Identifikasi dan Evaluasi Produk Hukum						
4.737	4.01.45.01	Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan						

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.738	2588	Terwujudnya Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Daerah yang telah ditetapkan	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
4.739	2589	Jumlah Peraturan Daerah yang telah diidentifikasi dan Evaluasi	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
4.740	4.01.46	Program Koordinasi dan Pembinaan Monitoring serta Evaluasi Pembangunan						
4.741	4.01.46.01	Monitoring dan Evaluasi APBD						
4.742	2576	jumlah dokumen evaluasi pelaporan pembangunan	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.03	Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
4.743	5978	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.03	Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
4.744	4.01.46.02	Monitoring dan Evaluasi Sektoral						
4.745	1578	jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.02	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
4.746	6863	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Sektoral	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.02	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
4.747	4.01.46.03	Administrasi dan Evaluasi Pembangunan						
4.748	2576	jumlah dokumen evaluasi pelaporan pembangunan	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	4.01.02.1.03.03	Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
4.749	4.01.47	Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan serta Pengendalian Program						
4.750	4.01.47.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan						
4.751	12536	Jumlah Dokumen Rakor Administrasi Pembangunan (Dokumen)	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.03	Evaluasi Administrasi Pembangunan	4.01.03.1.03.05	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4.752	5967	Dokumen Rakor Administrasi Pembangunan	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.03	Evaluasi Administrasi Pembangunan	4.01.03.1.03.05	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4.753	4.01.47.02	Perencanaan dan Pengendalian Program						
4.754	12540	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran yang diasistansi dalam 1 tahun (RKA)	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.03	Evaluasi Administrasi Pembangunan	4.01.03.1.03.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
4.755	5992	Rencana Kerja Anggaran yang diasistansi dalam 1 tahun	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.03	Evaluasi Administrasi Pembangunan	4.01.03.1.03.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
4.756	5993	Dokumen Pelaksanaan Anggaran pergeseran yang difasilitasi	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.03	Evaluasi Administrasi Pembangunan	4.01.03.1.03.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
4.757	6860	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Rencana Kerja Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Yang Disusun	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.03	Evaluasi Administrasi Pembangunan	4.01.03.1.03.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
4.758	4.01.47.03	Pengembangan Kebijakan Program Pembangunan						
4.759	12541	Jumlah Dokumen Laporan Setda (Dokumen)	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.03	Evaluasi Administrasi Pembangunan	4.01.03.1.03.05	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4.760	6862	Dokumen Laporan Setda	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.03	Evaluasi Administrasi Pembangunan	4.01.03.1.03.05	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4.761	4.01.48	Program Kebijakan Pengembangan Produksi Daerah						
4.762	4.01.48.01	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Pertanian						
4.763	11547	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
4.764	2883	Jumlah koordinasi pengembangan potensi ekonomi pertanian dalam arti luas	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
4.765	4.01.48.02	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kelautan dan Perikanan						

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.766	11547	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
4.767	2884	Jumlah koordinasi pengembangan potensi ekonomi kelautan dan perikanan	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
4.768	4.01.48.03	Koordinasi Peningkatan Ekonomi Kehutanan dan Perkebunan						
4.769	1593	jumlah koordinasi pengembangan potensi kehutanan dan perkebunan	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
4.770	9216	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
4.771	4.01.48.04	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berkelanjutan						
4.772	2887	Jumlah koordinasi kebijakan peningkatan daya dukung lingkungan hidup	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
4.773	5319	Jumlah dokumen hasil koordinasi kebijakan peningkatan daya dukung lingkungan hidup	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
4.774	4.01.49	Program Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah, Tata Kelola dan Kinerja BUMD						
4.775	4.01.49.01	Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal, Perijinan dan Non Perijinan Daerah						
4.776	11556	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
4.777	2881	Dokumen Kebijakan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Daerah						
4.778	4.01.49.03	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Tata Kelola dan Kinerja BUMD						
4.779	11557	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.06	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
4.780	1570	Jumlah koordinasi perusaha dan lembaga keuangan						
4.781	4.01.49.04	Koordinasi Promosi Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah						
4.782	11558	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
4.783	11559	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.07	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
4.784	11561	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
4.785	2816	Bahan Promosi Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah						
4.786	4.01.50	Program Peningkatan Sinegritas Bidang Industri dan Jasa						
4.787	4.01.50.01	Peningkatan Sinergi Kebijakan Perekonomian Daerah						
4.788	11556	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
4.789	2821	Hasil Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.790	4.01.50.02	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Pariwisata dan Perhotelan						
4.791	11558	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
4.792	1618	Koordinasi bidang pariwisata dan perhotelan						
4.793	4.01.50.03	Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Bidang Koperasi dan UKM						
4.794	11558	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
4.795	1613	jumlah koordinasi dan pembinaan koperasi	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
4.796	4.01.51	Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian Setda						
4.797	4.01.51.01	Penataan Administrasi Kepegawaian Setda						
4.798	6857	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Setda						
4.799	4.01.53	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi						
4.800	4.01.53.01	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi						
4.801	2685	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.04	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4.802	5342	Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.04	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4.803	9776	Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.04	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4.804	9777	Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.04	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4.805	9778	Laporan Fasilitasi Reformasi Birokrasi PD Prov. Kaltim	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.04	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4.806	4.01.53.02	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah						
4.807	10345	Jumlah Perangkat Daerah yang membentuk kelompok Budaya Kerja	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.06	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
4.808	3083	Jumlah PD yang difasilitasi pembentukan kelompok Budaya Kerja	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.08	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
4.809	3084	Laporan hasil evaluasi dan penilaian penerapan budaya kerja	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.06	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
4.810	5343	Dokumen Hasil Evaluasi dan Penilaian Penerapan Budaya Kerja	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.06	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
4.811	9854	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan penerapan Budaya Kerja	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.06	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
4.812	4.01.60	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja						
4.813	4.01.60.01	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah						
4.814	10378	Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.05	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
4.815	10381	Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.05	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
4.816	10385	Laporan Fasilitasi Evaluasi AKIP	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.05	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
4.817	10389	Laporan asistensi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.05	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
4.818	10393	Laporan asistensi penyusunan Indikator Kinerja Utama	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.05	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.819	10398	Laporan Perangkat Daerah yang menyampaikan Rencana Aksi	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.05	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
4.820	10401	Laporan capaian Kinerja Perangkat daerah berdasarkan PK	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.05	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
4.821	10405	Jumlah Kab/Kota yang menyampaikan laporan Kinerja sesuai ketentuan	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.05	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
4.822	2709	Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.05	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
4.823	2711	Laporan Kinerja Setda Prov. Kaltim	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.05	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
4.824	2712	Laporan Fasilitas Evaluasi AKIP	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.05	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
4.825	2713	Pergub Penyusunan Indikator Kinerja Utama	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.05	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
4.826	2718	Pergub Penyusunan Petunjuk Teknis PK dan LKJIP	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.05	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
4.827	2719	Laporan Capaian Kinerja berdasarkan PK	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.05	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
4.828	5344	Jumlah PD yang terfasilitasi pelaksanaan SAKIP	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.05	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
4.829	4.01.67	Program Koordinasi Infrastruktur Fisik dan Bangunan						
4.830	4.01.67.01	Koordinasi Pengembangan Bidang Perhubungan						
4.831	5234	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Perhubungan	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.03	Evaluasi Administrasi Pembangunan	4.01.03.1.03.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
4.832	4.01.67.02	Koordinasi Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum						
4.833	5235	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Pekerjaan umum	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.03	Evaluasi Administrasi Pembangunan	4.01.03.1.03.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
4.834	4.01.67.03	Koordinasi Pengembangan Bidang Perumahan dan Permukiman						
4.835	5236	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Permukiman	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.03	Evaluasi Administrasi Pembangunan	4.01.03.1.03.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
4.836	4.01.68	Program Koordinasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan						
4.837	4.01.68.02	Koordinasi Kebijakan Kawasan Industri						
4.838	5243	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Kawasan Industri	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.02	Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
4.839	4.01.68.03	Koordinasi Pengembangan Kawasan						
4.840	5244	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.02	Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
4.841	4.01.68.04	Koordinasi Kebijakan Perencanaan Daerah						
4.842	5247	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Perencanaan Daerah	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.02	Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
4.843	4.01.69	Program Koordinasi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral						
4.844	4.01.69.01	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Energi						
4.845	10252	Data Infrastruktur Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan Kalimantan Timur	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
4.846	1840	Data Infrastruktur Energi Kalimantan Timur	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
4.847	5246	Dokumen hasil koordinasi kebijakan pengembangan energi	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.848	4.01.69.02	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Mineral						
4.849	10254	Data Infrastruktur Sumber Daya Mineral/Pertambangan dan Lingkungan Hidup di Kalimantan Timur	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
4.850	1841	Data Pengembangan Sumber Daya Mineral	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
4.851	5248	Dokumen hasil koordinasi kebijakan Pengembangan Sumber Daya Mineral	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.1.01	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
4.852	4.01.79	Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat						
4.853	4.01.79.01	Pelayanan Administrasi Hibah dan Bantuan Sosial						
4.854	4302	Jumlah Dokumen Hibah dan Bantuan Sosial	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.1.02.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
4.855	6923	Jumlah Dokumen Hibah dan Bantuan Sosial yang tersusun	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
4.856	4.01.79.02	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat						
4.857	12487	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
4.858	6924	Jumlah Dokumen hasil Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.1.02.06	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial
4.859	4.01.79.03	Penyusunan Perumusan Kebijakan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat						
4.860	12487	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
4.861	2585	Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.1.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
4.862	4.01.80	Program Penguatan Kelembagaan						
4.863	4.01.80.05	Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi						
4.864	10442	Jumlah pembinaan, pengendalian dan penataan terhadap Perangkat Daerah	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
4.865	2628	Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi kelembagaan	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
4.866	2629	Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi kelembagaan	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
4.867	4251	Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi/evaluasi kelembagaan	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
4.868	4.01.80.07	Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota						
4.869	10456	Laporan fasilitasi usulan penataan kelembagaan kab/kota	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
4.870	10459	Laporan monitoring penataan kelembagaan kab/kota	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
4.871	2631	Kab/Kota yang dilakukan Fasilitasi kelembagaannya	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
4.872	5347	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penguatan kelembagaan	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
4.873	4.01.80.08	Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja						
4.874	10462	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Analisa jabatan dan ABK perangkat daerah	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.875	10466	Laporan evaluasi jabatan	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan
4.876	10468	Jumlah PD Provinsi yang dilakukan fasilitasi dan monev pelaksanaan ABK	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan
4.877	10471	Jumlah PD Provinsi yang dilakukan fasilitasi dan monev pelaksanaan Informasi Pegawai	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan
4.878	10474	Jumlah PD Provinsi yang dilakukan fasilitasi dan monev pelaksanaan Peta Jabatan	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan
4.879	10478	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan fasilitasi dan monev pelaksanaan ABK	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan
4.880	10479	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan fasilitasi dan monev pelaksanaan Informasi Pegawai	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan
4.881	10481	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan fasilitasi dan monev pelaksanaan Peta Jabatan	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan
4.882	10485	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan fasilitasi dan monev pelaksanaan Standar Kompetensi Jabatan	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan
4.883	10495	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan penyusunan formasi pegawai berdasarkan anjab dan ABK	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan
4.884	2623	Laporan Analisis Jabatan	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan
4.885	2624	Laporan Analisis Beban Kerja	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan
4.886	5348	Dokumen Analisis Jabatan yang disusun	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan
4.887	5349	Dokumen Analisis Beban Kerja yang disusun	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan
4.888	4.01.81	Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan						
4.889	4.01.81.02	Peningkatan Tata Laksana Pemerintahan						
4.890	10498	Laporan Fasilitasi Evaluasi SOP terhadap Perangkat Daerah	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
4.891	10500	Dokumen Peta Proses Bisnis	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
4.892	10502	Laporan Fasilitasi Tata Naskah Dinas	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
4.893	2635	Laporan SOP	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
4.894	2636	Laporan Evaluasi	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
4.895	5350	Jumlah SOP Perangkat Daerah yang diverifikasi	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.01	Penataan Organisasi	4.01.04.1.01.07	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
4.896	4.01.88	Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan						
4.897	4.01.88.02	Kerjasama media						
4.898	10342	Jumlah Pengumpulan dan Penyediaan data yang terdokumentasi	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.03	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	4.01.04.1.03.05	Dokumentasi Pimpinan
4.899	1471	Jumlah kerjasama media	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.03	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	4.01.04.1.03.05	Dokumentasi Pimpinan
4.900	4.01.88.03	Penyelenggaraan Peliputan dan Publikasi						
4.901	10346	Jumlah Kerjasama Media dan Informasi yang Tersampaikan	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.03	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	4.01.04.1.03.04	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
4.902	1468	Jumlah berita positif yang terpublikasi	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.03	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	4.01.04.1.03.04	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.903	4.01.88.04	Penyediaan Data dan Informasi						
4.904	10367	Jumlah Berita Yang Terpublikasi	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.03	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	4.01.04.1.03.03	Penyiapan Materi Pimpinan
4.905	2001	Jumlah sistem penyedia data dan Informasi	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.03	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	4.01.04.1.03.03	Penyiapan Materi Pimpinan
4.906	4.01.90	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan						
4.907	4.01.90.03	Pelayanan Tamu dan Pimpinan Keprotokolan						
4.908	10371	Jumlah Administrasi Keprotokolan yang Terdokumentasi	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.03	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	4.01.04.1.03.08	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
4.909	1474	Jumlah Tamu Pemda	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.03	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	4.01.04.1.03.08	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
4.910	4.01.90.04	Penatacaraan kegiatan Pemda						
4.911	10383	Jumlah Acara Kegiatan Pemda yang Terjadwalkan	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.03	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	4.01.04.1.03.06	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
4.912	10408	Jumlah Tamu Yang Terlayani	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4.01.04.1.03	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	4.01.04.1.03.07	Fasilitasi Tamu
4.913	1476	Jumlah Kepenatacaraan kegiatan pemda yang terjadwalkan						
4.914								
4.915	4.01.04 - Sekretariat DPRD							
4.916	4.01	Sekretariat Daerah						
4.917	4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
4.918	4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
4.919	10356	Jumlah dokumen administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian DPRD yang dilaksanakan						
4.920	12238	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.921	12239	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.922	12240	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
4.923	12241	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
4.924	12243	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
4.925	12244	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
4.926	12245	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
4.927	12246	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
4.928	12247	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4.929	752	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
4.930	8838	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.931	8839	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.932	8840	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4.933	8841	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.934	8842	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.935	8843	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.936	8844	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4.937	8845	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.938	8846	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.939	8847	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
4.940	4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
4.941	4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
4.942	776	Jumlah peralatan dan kelengkapan yang tersedia						
4.943	8848	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
4.944	8849	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
4.945	8850	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
4.946	8851	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4.947	8852	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
4.948	8853	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4.949	8854	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
4.950	8855	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
4.951	4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
4.952	1057	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana						
4.953	8856	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
4.954	8857	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
4.955	8858	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.956	8859	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
4.957	8860	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4.958	8861	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
4.959	8862	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.960	8863	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
4.961	8864	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
4.962	8865	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
4.963	8866	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
4.964	8867	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
4.965	8868	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
4.966	8869	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
4.967	8870	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
4.968	4.01.08.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD						
4.969	10435	Jumlah sarana dan prasarana yang difasilitasi untuk rapat fraksi DPRD	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.03.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD
4.970	4046	Jumlah rapat Alat Kelengkapan Dewan	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.03.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD
4.971	6529	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.08	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.02.03.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
4.972	4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
4.973	4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
4.974	6530	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah						
4.975	8871	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
4.976	4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
4.977	10651	Jumlah pakaian dinas dan atribut yang disediakan						
4.978	10659	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan fasilitas medical check up						
4.979	10804	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti orientasi DPRD						
4.980	10807	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis						
4.981	6531	Jumlah PNS dan Anggota DPRD yang mengikuti pelatihan						
4.982	8872	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.983	8873	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4.984	8874	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
4.985	8875	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
4.986	8876	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4.987	8877	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.988	8878	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
4.989	4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
4.990	4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
4.991	932	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	4.02.02	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	4.02.02.1.01	Layanan Administrasi DPRD	4.02.02.1.01.01	Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD
4.992	4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
4.993	948	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4.02.02	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	4.02.02.1.02	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	4.02.02.1.02.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
4.994	4.01.12.03	Penyusunan dan verifikasi laporan pelaksanaan anggaran						
4.995	6562	jumlah verifikasi laporan	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	4.02.03.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
4.996	4.01.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah						
4.997	4.01.15.02	Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						
4.998	10476	Jumlah peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah Daerah	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	4.02.03.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
4.999	10643	Jumlah dokumen administrasi keuangan DPRD	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	4.02.03.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD
5.000	10663	Jumlah dokumen program pembentukan peraturan daerah	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	4.02.03.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
5.001	10668	Jumlah dokumen pembahasan rancangan Perda	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	4.02.03.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda
5.002	10681	Jumlah kajian/harmonisasi Raperda	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	4.02.03.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda
5.003	10685	Jumlah dokumen naskah akademik	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	4.02.03.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
5.004	10686	Jumlah dokumen tata tertib DPRD	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	4.02.03.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD
5.005	959	Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Raperda yang telah dikordinasi	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	4.02.03.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
5.006	4.01.15.05	Kegiatan Reses						
5.007	10834	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.02.03.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah
5.008	10836	Jumlah pokok-pokok pikiran DPRD yang tersusun	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.02.03.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
5.009	10842	Jumlah reses yang dilaksanakan	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.02.03.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
5.010	965	Jumlah Reses Anggota DPRD	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.02.03.1.05.03	Pelaksanaan Reses
5.011	4.01.15.09	Pengkajian Kasus-Kasus Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur						
5.012	969	Jumlah kasus Hukum yang dikaji	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.03.1.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
5.013	4.01.15.10	Kemitraan Advokasi Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur						
5.014	10848	Jumlah persetujuan kerjasama daerah (MoU)	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	4.02.03.1.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan kerjasama daerah
5.015	971	Jumlah kasus Hukum yang diadvokasi	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	4.02.03.1.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan kerjasama daerah

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.016	4.01.15.15	Pelayanan Acara-acara Persidangan dan Kehumasan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim						
5.017	10808	Jumlah dokumentasi kegiatan dewan yang dipublikasikan	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.03.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
5.018	10811	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang disediakan	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.03.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
5.019	10826	Jumlah kegiatan layanan hubungan masyarakat	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.03.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
5.020	10859	Jumlah dokumen komunikasi dan publikasi yang tersusun	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.03.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
5.021	10869	Jumlah rapat-rapat DPRD yang dilaksanakan	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.03.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
5.022	11862	Jumlah Tenaga Ahli yang disediakan	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.03.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
5.023	6853	Jumlah acara-acara persidangan dan Kehumasan Sekretariat DPRD yang terselenggara dengan baik	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.03.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
5.024	4.01.15.16	Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan						
5.025	10762	Jumlah dokumen hasil rapat dengar pendapat (RDP)/Rekomendasi bidang pemerintahan dan hukum	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.03.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
5.026	10771	Jumlah dokumen hasil rapat dengar pendapat (RDP)/rekomendasi bidang Infrastruktur	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.03.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
5.027	10776	Jumlah dokumen hasil rapat dengar pendapat (RDP)/rekomendasi bidang kesejahteraan rakyat	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.03.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
5.028	10780	Jumlah dokumen hasil rapat dengar pendapat (RDP)/rekomendasi bidang perekonomian	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.03.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
5.029	10783	Jumlah dokumen hasil rapat dengar pendapat (RDP)/rekomendasi bidang sumber daya alam	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.03.1.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
5.030	10797	Jumlah dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.03.1.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
5.031	10831	Jumlah dokumen program kerja DPRD	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.03.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD
5.032	10863	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan DPRD	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.08	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.02.03.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
5.033	10866	Jumlah laporan kinerja Pimpinan DPRD	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.03.1.08	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.02.03.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD
5.034	4046	Jumlah rapat Alat Kelengkapan Dewan	4.02.02	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	4.02.02.1.01	Layanan Administrasi DPRD	4.02.02.1.01.02	Fasilitasi Rapat DPRD
5.035								
5.036	4.01.05 - Badan Penghubung Provinsi							
5.037	4.01	Sekretariat Daerah						
5.038	4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
5.039	4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
5.040	12248	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.041	12249	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.042	12250	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
5.043	12251	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.044	12253	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5.045	12254	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5.046	12255	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
5.047	12256	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
5.048	12257	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.049	1814	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
5.050	8883	Jumlah Surat yang di Administrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.051	8884	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.052	8885	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.053	8886	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.054	8887	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5.055	8888	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.056	8889	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.057	8890	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.058	8891	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.059	8892	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.060	4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
5.061	4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
5.062	1817	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor						
5.063	8893	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
5.064	8894	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
5.065	8895	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.066	8896	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5.067	8897	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.068	8898	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.069	8899	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
5.070	8900	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.071	4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.072	2250	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana						
5.073	2251	Luas bangunan yang direhab						
5.074	8901	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
5.075	8902	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.076	8903	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5.077	8904	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.078	8905	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5.079	8906	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.080	8907	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5.081	8908	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.082	8909	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5.083	8910	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
5.084	8911	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
5.085	8912	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
5.086	8913	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
5.087	8914	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
5.088	8915	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
5.089	4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
5.090	4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
5.091	2254	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						
5.092	2256	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.093	8916	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5.094	4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
5.095	2262	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek						
5.096	2263	Jumlah pakaian dinas						
5.097	8917	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.098	8918	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
5.099	8919	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.100	8920	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
5.101	8921	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
5.102	8922	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
5.103	8923	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
5.104	4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
5.105	4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
5.106	2277	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran						
5.107	4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
5.108	2279	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan						
5.109	4.01.38	Program informasi pembangunan, potensi dan peluang investasi						
5.110	4.01.38.01	Promosi di Anjungan Kaltim dan TMII						
5.111	11590	Jumlah pengunjung dalam kegiatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya						
5.112	2282	Jumlah kegiatan promosi di Anjungan Kaltim dan TMII dalam setahun						
5.113	9275	Tingkat Kepuasan Pengunjung dalam Kegiatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	5.06.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.06.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.06.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
5.114	9296	Tingkat Kepuasan Aparatur dan Masyarakat yang dilayani						
5.115	4.01.38.02	Promosi dalam daerah DKI Jakarta						
5.116	11590	Jumlah pengunjung dalam kegiatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya						
5.117	2284	Jumlah kegiatan promosi dalam daerah DKI Jakarta dalam setahun						
5.118	9275	Tingkat Kepuasan Pengunjung dalam Kegiatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	5.06.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.06.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.06.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
5.119	4.01.38.04	Propaganda penerangan						
5.120	11591	Jumlah Kegiatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya						
5.121	2291	Jumlah laporan kegiatan propaganda penerangan						
5.122	9278	Jumlah Kegiatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	5.06.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.06.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.06.02.1.01.04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
5.123	4.01.39	Program Peningkatan Manajemen Kerja						
5.124	4.01.39.01	Keprotokolan dan fasilitas pejabat daerah/pusat						
5.125	11584	Jumlah Aparatur Daerah/Pusat dan Masyarakat Kaltim yang dilayani						
5.126	2298	Jumlah kunjungan pejabat daerah/pusat yang difasilitasi						
5.127	9296	Tingkat Kepuasan Aparatur dan Masyarakat yang dilayani	5.06.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.06.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.06.02.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.128	4.01.39.02	Pelayanan mess						
5.129	11589	Jumlah tamu yang menginap di mess						
5.130	2307	Jumlah laporan kegiatan pelayanan mess						
5.131	9297	Tingkat Kepuasan Tamu Mess	5.06.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.06.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.06.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat
5.132	4.01.39.04	Pengelolaan administrasi keuangan						
5.133	2317	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	5.06.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.06.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.06.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
5.134								
5.135	4.02.01 - Inspektorat							
5.136	4.02	Pengawasan						
5.137	4.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
5.138	4.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
5.139	12258	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.140	12259	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.141	12260	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
5.142	12261	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
5.143	12263	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5.144	12264	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5.145	12265	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
5.146	12266	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
5.147	12267	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.148	5473	Jumlah kegiatan administrasi perkantoran yang dilaksanakan						
5.149	8928	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.150	8929	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.151	8930	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.152	8931	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.153	8932	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5.154	8933	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.155	8934	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.156	8935	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.157	8936	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.158	8937	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.159	4.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
5.160	4.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
5.161	214	Jumlah sarana dan prasarana aparatur						
5.162	8938	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
5.163	8939	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
5.164	8940	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.165	8941	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5.166	8942	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.167	8943	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.168	8944	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
5.169	8945	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.170	4.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
5.171	5475	Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara						
5.172	8946	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
5.173	8947	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.174	8948	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5.175	8949	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.176	8950	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5.177	8951	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.178	8952	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5.179	8953	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.180	8954	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5.181	8955	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
5.182	8956	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
5.183	8957	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
5.184	8958	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.185	8959	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
5.186	8960	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
5.187	4.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
5.188	4.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
5.189	5477	Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan Pemda yang dilaksanakan						
5.190	8961	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5.191	4.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
5.192	336	Jumlah kapasitas Sumber Daya Aparatur						
5.193	8962	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.194	8963	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
5.195	8964	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
5.196	8965	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
5.197	8966	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
5.198	8967	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
5.199	8968	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
5.200	4.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
5.201	4.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
5.202	249	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
5.203	8970	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
5.204	8971	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.205	4.02.100	Program Peningkatan Kapabilitas APIP						
5.206	4.02.100.01	Pelatihan di Kantor Sendiri						
5.207	5542	Jumlah kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan
5.208	4.02.100.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan						
5.209	5544	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang dilaksanakan	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan
5.210	9402	Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Mengikuti Bimtek/Diklat/Sosialisasi/Workshop	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan
5.211	4.02.100.03	Peningkatan Level Kapabilitas APIP						
5.212	5546	Jumlah kegiatan peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.01	Audit Kinerja dan Keuangan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.213	9403	Level Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.01	Audit Kinerja dan Keuangan
5.214	4.02.101	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal						
5.215	4.02.101.01	Pemeriksaan Operasional OPD						
5.216	342	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang diterbitkan						
5.217	9405	Jumlah Laporan Operasional Perangkat Daerah	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.01	Audit Kinerja dan Keuangan
5.218	4.02.101.02	Pemeriksaan Kinerja OPD						
5.219	342	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang diterbitkan						
5.220	9406	Jumlah Laporan Audit Kinerja Perangkat Daerah	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.01	Audit Kinerja dan Keuangan
5.221	4.02.101.03	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu						
5.222	12481	Level Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP Pemda						
5.223	5501	Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang diterbitkan.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.1.02.01	Audit Kinerja dan Keuangan
5.224	4.02.101.04	Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan						
5.225	5503	Jumlah laporan hasil reviu, monitoring dan evaluasi pengawasan yang diterbitkan						
5.226	9408	Jumlah Laporan Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.1.02.02	Review Kinerja dan Keuangan
5.227	4.02.101.05	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan						
5.228	5505	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pengawasan yang dilaksanakan						
5.229	9409	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.1.02.03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan
5.230	4.02.101.06	Pemberian Advis dan Konsultasi						
5.231	12482	Jumlah Laporan Advis, Konsultasi dan Pendampingan	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.02	Asistensi dan Pendampingan	6.01.03.1.02.02	Asistensi dan Pendampingan
5.232	5507	Jumlah advis dan konsultasi yang dilaksanakan.						
5.233	4.02.101.07	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi						
5.234	5509	Jumlah kegiatan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan						
5.235	9411	Jumlah Laporan Monev Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.1.02.01	Audit Kinerja dan Keuangan
5.236	4.02.102	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota						
5.237	4.02.102.01	Evaluasi EKPPD Kab/kota						
5.238	5533	Jumlah laporan hasil evaluasi EKPPD Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan						
5.239	9412	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi KPPD Kab/Kota	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.1.02.04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan
5.240	4.02.102.02	Evaluasi SAKIP Kab/Kota						
5.241	5535	Jumlah laporan hasil evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.1.02.04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.242	4.02.102.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah						
5.243	5537	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemda Lab/Kota yang dilaksanakan						
5.244	9416	Jumlah Pemda Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.1.02.04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan
5.245	4.02.97	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja						
5.246	4.02.97.01	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi						
5.247	12477	Jumlah Laporan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan
5.248	5481	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah						
5.249	4.02.98	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan						
5.250	4.02.98.02	Reviu atas laporan keuangan						
5.251	279	Jumlah laporan keuangan pemprov dan perangkat daerah yang sesuai standar akuntansi pemerintah	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.02	Review Kinerja dan Keuangan
5.252	4.02.99	Program pencegahan KKN						
5.253	4.02.99.04	Pemeriksaan Khusus/Investigatif						
5.254	12478	Jumlah Laporan Reviu Keuangan Perangkat Daerah dan Pemda						
5.255	5512	Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus/investigasi yang diterbitkan	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.02	Asistensi dan Pendampingan	6.01.03.1.02.01	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
5.256	4.02.99.05	Pembangunan Zona Integritas						
5.257	256	Jumlah perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM						
5.258	9379	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.02	Asistensi dan Pendampingan	6.01.03.1.02.02	Asistensi dan Pendampingan
5.259	4.02.99.06	Aksi Pencegahan Korupsi						
5.260	5576	Jumlah kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan						
5.261	9380	Persentase Capaian Aksi Pencegahan KKN	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.02	Asistensi dan Pendampingan	6.01.03.1.02.02	Asistensi dan Pendampingan
5.262	4.02.99.07	Pengendalian Gratifikasi						
5.263	5519	Jumlah laporan gratifikasi yang ditangani	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.02	Asistensi dan Pendampingan	6.01.03.1.02.02	Asistensi dan Pendampingan
5.264	4.02.99.08	Pengendalian Whistle Blower System (WBS) dan Benturan Kepentingan						
5.265	5522	Jumlah Laporan WBS dan Benturan Kepentingan yang ditangani						
5.266	9386	Jumlah Laporan WBS dan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.02	Asistensi dan Pendampingan	6.01.03.1.02.02	Asistensi dan Pendampingan
5.267	4.02.99.09	Monev LHKPN dan LHKASN						
5.268	5524	Persentase kepatuhan LHKPN dan LHKASN	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.02	Asistensi dan Pendampingan	6.01.03.1.02.02	Asistensi dan Pendampingan
5.269	4.02.99.10	Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah (TP4D), APIP dan APH						
5.270	5526	Jumlah kegiatan koordinasi TP4D, APIP dan APH yang dilaksanakan	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.02	Asistensi dan Pendampingan	6.01.03.1.02.02	Asistensi dan Pendampingan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.271	4.02.99.11	Operasional SABERPUNGLI						
5.272	5528	Jumlah kegiatan operasional Saberpungli yang dilaksanakan	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.02	Asistensi dan Pendampingan	6.01.03.1.02.02	Asistensi dan Pendampingan
5.273	4.02.99.12	Survey Penilaian Integritas						
5.274	5530	Jumlah kegiatan survey penilaian integritas yang dilaksanakan						
5.275	9397	Jumlah Laporan Hasil Survey Penilaian Integritas	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.02	Asistensi dan Pendampingan	6.01.03.1.02.02	Asistensi dan Pendampingan
5.276	4.02.99.13	Pembangunan Budaya Integritas						
5.277	5548	Jumlah kegiatan budaya integritas yang dilaksanakan	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.02	Asistensi dan Pendampingan	6.01.03.1.02.02	Asistensi dan Pendampingan
5.278								
5.279	4.03.01 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							
5.280	4.03	Perencanaan						
5.281	4.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
5.282	4.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
5.283	11867	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.284	11868	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.285	11869	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
5.286	11870	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
5.287	11871	Jumlah sub kegiatan yang pertanggung jawabannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
5.288	11872	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5.289	11873	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5.290	11874	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
5.291	11875	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
5.292	11876	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.293	6504	Jumlah Instansi/Lembaga Provinsi, Kabupaten/Kota, Vertikal yang Dilayani						
5.294	7858	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.295	7859	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.296	7860	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.297	7861	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.298	7862	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.299	7863	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.300	7864	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.301	7865	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.302	7866	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.303	7867	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.304	4.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
5.305	4.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
5.306	6507	Jumlah penambahan aset sarana dan prasarana aparatur						
5.307	7868	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
5.308	7869	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
5.309	7870	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.310	7871	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5.311	7872	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.312	7873	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.313	7874	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
5.314	7875	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.315	4.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
5.316	6506	Jumlah aset sarana prasarana aparatur yang berfungsi baik						
5.317	7876	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
5.318	7877	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.319	7878	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5.320	7879	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.321	7880	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5.322	7881	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.323	7882	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5.324	7883	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.325	7884	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5.326	7885	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.327	7886	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
5.328	7887	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
5.329	7888	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
5.330	7889	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
5.331	7890	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
5.332	4.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
5.333	4.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
5.334	6512	Jumlah Rapat Koordinasi						
5.335	7891	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5.336	4.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
5.337	1629	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek						
5.338	7892	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.339	7893	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
5.340	7894	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
5.341	7895	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
5.342	7896	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
5.343	7897	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
5.344	7898	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
5.345	4.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
5.346	4.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
5.347	1632	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
5.348	7899	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
5.349	4.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
5.350	1633	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
5.351	7900	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
5.352	7901	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.353	4.03.10.03	Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah						
5.354	6508	Laporan Hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.355	4.03.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi						
5.356	4.03.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup						
5.357	12336	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah bidang sumber daya alam						
5.358	12337	Jumlah laporan hasil pengendalian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah bidang sumber daya alam	5.01.04	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.03	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	5.01.04.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
5.359	12338	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang sumber daya alam	5.01.04	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.03	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	5.01.04.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
5.360	1653	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH	5.01.04	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.03	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	5.01.04.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
5.361	4.03.30.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan						
5.362	12339	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah bidang perikanan	5.01.04	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.01	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perikanan	5.01.04.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perikanan
5.363	12340	Jumlah laporan hasil pengendalian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah bidang perikanan	5.01.04	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.01	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perikanan	5.01.04.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perikanan
5.364	12341	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang perikanan	5.01.04	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.01	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perikanan	5.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perikanan
5.365	1658	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan						
5.366	3656	Dokumen RAD Pangan dan Gizi (RAD-PG)	5.01.04	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.01	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perikanan	5.01.04.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perikanan
5.367	4.03.30.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata						
5.368	12342	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah bidang ekonomi kreatif	5.01.04	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.02	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	5.01.04.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
5.369	12343	Jumlah laporan hasil pengendalian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah bidang ekonomi kreatif	5.01.04	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.02	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	5.01.04.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
5.370	12344	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang ekonomi kreatif	5.01.04	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5.01.04.1.02	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	5.01.04.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
5.371	1663	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata						
5.372	4.03.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah						
5.373	4.03.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan						
5.374	12366	Laporan hasil monitoring program kegiatan perangkat daerah APBD/APBN, TEPR	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.03.01	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.375	1667	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPR dan LKPJ						
5.376	4.03.42.03	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD						
5.377	12358	Laporan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah (Dokumen Evaluasi RPJPD dan Evaluasi Tahunan RPJMD)	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.03.04	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah
5.378	12367	Laporan hasil evaluasi kinerja capaian program/kegiatan terkait SPM	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.03.02	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM
5.379	12368	Laporan triwulanan hasil evaluasi capaian program/kegiatan perangkat daerah (Dokumen evaluasi renja perangkat daerah)						
5.380	1670	Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.03.03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
5.381	1671	Dokumen Evaluasi RKPD	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.03.04	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah
5.382	4.03.46	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya						
5.383	4.03.46.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
5.384	12354	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	5.01.03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	5.01.03.1.02	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
5.385	12355	Jumlah laporan hasil pengendalian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	5.01.03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	5.01.03.1.02	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
5.386	12356	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang pembangunan manusia	5.01.03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	5.01.03.1.02	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
5.387	1675	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia						
5.388	1676	Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur	5.01.03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	5.01.03.1.02	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
5.389	9938	Laporan hasil capaian pembangunan daerah (Evaluasi RPJPD dan RPJMD)						
5.390	4.03.46.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial						
5.391	12360	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah bidang kesejahteraan masyarakat	5.01.03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	5.01.03.1.03	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
5.392	12361	Jumlah laporan hasil pengendalian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah bidang kesejahteraan masyarakat	5.01.03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	5.01.03.1.03	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.393	12362	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat	5.01.03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	5.01.03.1.03	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
5.394	1681	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial						
5.395	5608	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	5.01.03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	5.01.03.1.03	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
5.396	4.03.46.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan						
5.397	12363	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan	5.01.03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	5.01.03.1.01	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
5.398	12364	Jumlah laporan hasil pengendalian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan	5.01.03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	5.01.03.1.01	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
5.399	12365	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang pemerintahan	5.01.03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	5.01.03.1.01	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
5.400	1688	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	5.01.03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	5.01.03.1.01	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
5.401	1689	Jumlah laporan anugerah Pangripta Nusantara						
5.402	1691	Jumlah laporan IPK (Indeks Persepsi Korupsi)						
5.403	1692	Jumlah laporan RAD PPK (Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi)						
5.404	5609	Jumlah Laporan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	5.01.03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	5.01.03.1.01	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
5.405	4.03.47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah						
5.406	4.03.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan						
5.407	12345	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah bidang kebinamargaan dan perhubungan	5.01.05	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	5.01.05.1.02	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	5.01.05.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
5.408	12346	Jumlah laporan hasil pengendalian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah bidang kebinamargaan dan perhubungan	5.01.05	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	5.01.05.1.02	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	5.01.05.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
5.409	12347	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang kebinamargaan dan perhubungan	5.01.05	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	5.01.05.1.02	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	5.01.05.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
5.410	1694	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan						
5.411	4.03.47.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.412	12348	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah bidang sumber daya air dan lingkungan hidup	5.01.05	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	5.01.05.1.01	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	5.01.05.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
5.413	12349	Jumlah laporan hasil pengendalian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah bidang sumber daya air dan lingkungan hidup	5.01.05	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	5.01.05.1.01	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	5.01.05.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
5.414	12350	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup	5.01.05	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	5.01.05.1.01	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	5.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
5.415	1700	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang						
5.416	4821	Laporan Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Pusat - Pusat Pertumbuhan						
5.417	4830	Profil Pembangunan Bidang Sumber Daya Air & Tata Ruang						
5.418	4.03.47.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman						
5.419	12351	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	5.01.05	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	5.01.05.1.03	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	5.01.05.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan
5.420	12352	Jumlah laporan hasil pengendalian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	5.01.05	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	5.01.05.1.03	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	5.01.05.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan
5.421	12353	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	5.01.05	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	5.01.05.1.03	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	5.01.05.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilayahan
5.422	1705	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman						
5.423	4837	Profil Pembangunan Bidang Keciptakaryaan, Bina Konstruksi, Perumahan dan Pemukiman						
5.424	4.03.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						
5.425	4.03.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah						
5.426	12372	Dokumen usulan Program/Kegiatan Forum Regional Kalimantan	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.05	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya
5.427	6520	Jumlah Dokumen Usulan Prog/Keg Forum Regional Kalimantan	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi
5.428	4.03.48.08	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah						
5.429	12369	Rencana Pembangunan Daerah Provinsi yang disusun	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi
5.430	12370	Kesepakatan Musrenbang Provinsi	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.431	6519	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD, P-RKPD)	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi
5.432	4.03.48.10	Penyusunan Rancangan Pendanaan Pembangunan						
5.433	12373	Laporan kerangka pendanaan pembangunan daerah	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.02	Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah
5.434	6521	Jumlah Dokumen Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.02	Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah
5.435	4.03.48.11	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah						
5.436	12371	Laporan pengendalian dokumen perencanaan Kabupaten/Kota	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota
5.437	6522	Jumlah Laporan Pengendalian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kalimantan dan Kabupaten/Kota	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota
5.438	4.03.50	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah						
5.439	4.03.50.01	Pengembangan Data dan Analisis Sektor Pembangunan Daerah						
5.440	12374	Dokumen data statistik	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
5.441	1645	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
5.442	4.03.50.02	Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah						
5.443	12375	Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang dipublikasi	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
5.444	1650	Publikasi Jenis Data dan Informasi Geospasial Tematik (IGT)	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.01.07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
5.445								
5.446	4.04.01 - Badan Pendapatan Daerah							
5.447	4.04	Keuangan						
5.448	4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
5.449	4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
5.450	12268	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.451	12269	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.452	12270	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
5.453	12271	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
5.454	12273	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.455	12274	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5.456	12275	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
5.457	12276	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
5.458	12277	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.459	542	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
5.460	543	Jumlah Unit Kantor yang terlayani						
5.461	7778	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.462	7779	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.463	7780	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.464	7781	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.465	7782	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5.466	7783	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.467	7784	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.468	7785	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.469	7786	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.470	7787	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.471	4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
5.472	4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
5.473	2924	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan						
5.474	7788	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
5.475	7789	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
5.476	7790	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.477	7791	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5.478	7792	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.479	7793	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.480	7794	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
5.481	7795	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.482	4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.483	758	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara						
5.484	7796	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
5.485	7797	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.486	7798	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5.487	7799	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.488	7800	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5.489	7801	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.490	7802	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5.491	7803	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.492	7804	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5.493	7805	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
5.494	7806	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
5.495	7807	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
5.496	7808	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
5.497	7809	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
5.498	7810	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
5.499	4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
5.500	4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
5.501	2898	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi						
5.502	7811	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5.503	4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
5.504	2900	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek						
5.505	4460	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas						
5.506	7812	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.507	7813	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
5.508	7814	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
5.509	7815	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
5.510	7816	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.511	7817	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
5.512	7818	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
5.513	4.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
5.514	4.04.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
5.515	2901	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
5.516	7819	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
5.517	4.04.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
5.518	2902	Jumlah Dokumen / Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
5.519	7820	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
5.520	7821	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.521	4.04.31	Program Koordinasi Pajak Daerah						
5.522	4.04.31.01	Pendataan, administrasi dan keberatan pajak						
5.523	10216	Jumlah Aduan tentang Pajak dan Retribusi Daerah tertangani	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.07	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi
5.524	2905	Jumlah realisasi tunggakan pajak						
5.525	4.04.31.02	Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB						
5.526	10218	Jumlah strategi / Kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak PKB dan BBNKB	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.527	10219	Jumlah Basis Data Pajak PKB dan BBNKB yang dimutakhirkan	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.528	2906	Jumlah realisasi penerimaan PKB						
5.529	2907	Jumlah realisasi penerimaan BBNKB						
5.530	4.04.31.03	Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya						
5.531	10220	Jumlah strategi / Kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak PBBKB, AP dan Pajak Rokok	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.532	10223	Jumlah Basis Data Pajak PBBKB, AP dan Pajak Rokok yang dimutakhirkan	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.533	2908	Jumlah realisasi penerimaan PBBKB						
5.534	2909	Jumlah realisasi penerimaan Pajak AP						
5.535	2910	Jumlah realisasi penerimaan Pajak Rokok						
5.536	4.04.32	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak						
5.537	4.04.32.01	Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah						
5.538	10332	Jumlah strategi dan Kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan Retribusi Daerah	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.539	10338	Jumlah Basis Data Retribusi Daerah yang dimutakhirkan	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.540	2911	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah						

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.541	4.04.32.02	Koordinasi Penerimaan lain-lain						
5.542	10340	Jumlah strategi dan Kebijakan dalam rangka peningkatan Penerimaan Lain - Lain	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.543	10343	Jumlah Basis Data Penerimaan Lain - lain yang dimutakhirkan	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.544	2912	Jumlah realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan						
5.545	2913	Jumlah realisasi lain - lain pendapatan asli daerah yang sah						
5.546	2914	Jumlah realisasi lain - lain pendapatan daerah yang sah						
5.547	4.04.32.03	Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak						
5.548	10347	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
5.549	2915	Jumlah realisasi bagi hasil pajak dan bukan pajak						
5.550	2916	Jumlah realisasi DAU						
5.551	4.04.33	Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan						
5.552	4.04.33.02	Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah						
5.553	10349	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan yang sudah dilaksanakan	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.554	10350	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penerimaan Pendapatan Daerah	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.555	2918	Jumlah jenis pendapatan daerah yang dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap mekanisme pendapatan daerah serta administrasi keuangan						
5.556	4.04.33.03	Kajian Hukum dan Perundang-undangan						
5.557	10355	Jumlah SOP tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikeluarkan	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.03	Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.558	10361	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi Pendapatan kepada masyarakat	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.05	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat
5.559	2949	Jumlah regulasi yang berkaitan dengan pendapatan						
5.560	4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain						
5.561	4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak						
5.562	10366	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UPTD PPRD Wil. Samarinda	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.563	10370	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UPTD PPRD Wil. Kukar	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.564	10375	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UPTD PPRD Wil. Kutim	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.565	10382	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UPTD PPRD Wil. Kubar	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.566	10388	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UPTD PPRD Wil. Balikpapan	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.567	10395	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UPTD PPRD Wil. Bontang	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.568	10403	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UPTD PPRD Wil. PPU	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.569	10407	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UPTD PPRD Wil. Paser	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.570	10412	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UPTD PPRD Wil. Berau	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.571	2919	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB se - Kaltim						
5.572	4462	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kukar						
5.573	4463	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutim						
5.574	4464	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kubar						
5.575	4465	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Balikpapan						
5.576	4466	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Bontang						
5.577	4467	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Penajam Paser Utara						
5.578	4468	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Paser						
5.579	4469	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau						
5.580	4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL						
5.581	10368	Jumlah Laporan Pemeriksaan Pajak dan atau Razia yang dilaksanakan UPTD PPRD Wil. Samarinda	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.10	Pemeriksaan Pajak Daerah
5.582	10373	Jumlah Laporan Pemeriksaan Pajak dan atau Razia yang dilaksanakan UPTD PPRD Wil. Kukar	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.10	Pemeriksaan Pajak Daerah
5.583	10379	Jumlah Laporan Pemeriksaan Pajak dan atau Razia yang dilaksanakan UPTD PPRD Wil. Kutim	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.10	Pemeriksaan Pajak Daerah
5.584	10384	Jumlah Laporan Pemeriksaan Pajak dan atau Razia yang dilaksanakan UPTD PPRD Wil. Kubar	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.10	Pemeriksaan Pajak Daerah
5.585	10391	Jumlah Laporan Pemeriksaan Pajak dan atau Razia yang dilaksanakan UPTD PPRD Wil. Balikpapan	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.10	Pemeriksaan Pajak Daerah
5.586	10399	Jumlah Laporan Pemeriksaan Pajak dan atau Razia yang dilaksanakan UPTD PPRD Wil. Bontang	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.10	Pemeriksaan Pajak Daerah
5.587	10404	Jumlah Laporan Pemeriksaan Pajak dan atau Razia yang dilaksanakan UPTD PPRD Wil. PPU	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.10	Pemeriksaan Pajak Daerah
5.588	10410	Jumlah Laporan Pemeriksaan Pajak dan atau Razia yang dilaksanakan UPTD PPRD Wil. Paser	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.10	Pemeriksaan Pajak Daerah
5.589	10414	Jumlah Laporan Pemeriksaan Pajak dan atau Razia yang dilaksanakan UPTD PPRD Wil. Berau	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.10	Pemeriksaan Pajak Daerah
5.590	4464	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kubar						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.591	4479	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Samarinda						
5.592	4480	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kukar						
5.593	4481	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutim						
5.594	4483	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Balikpapan						
5.595	4484	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Bontang						
5.596	4485	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Penajam Paser Utara						
5.597	4486	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Paser						
5.598	4487	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau						
5.599	4.04.35	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah						
5.600	4.04.35.01	Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan						
5.601	10209	Jumlah dokumen pengembangan potensi Pendapatan dan pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.06	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi
5.602	10568	Jumlah Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yg ditangani	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.603	6074	Jumlah realisasi sumber Pendapatan Baru						
5.604	4.04.35.02	Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah						
5.605	10214	Jumlah Analisis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
5.606	2938	Jumlah Kajian analisis pengembangan pelayanan pendapatan						
5.607								
5.608	4.04.02 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							
5.609	4.04	Keuangan						
5.610	4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
5.611	4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
5.612	12278	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.613	12279	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.614	12280	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
5.615	12281	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
5.616	12283	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Laporan Keuangan
5.617	12284	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5.618	12285	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.619	12286	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
5.620	12287	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.621	7737	Jumlah Surat yang di Administrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.622	7738	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.623	7739	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.624	7740	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.625	7741	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5.626	7742	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.627	7743	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.628	7744	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.629	7745	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.630	7746	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.631	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.632	4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
5.633	4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
5.634	7747	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
5.635	7748	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
5.636	7749	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.637	7750	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5.638	7751	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.639	7752	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.640	7753	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
5.641	7754	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.642	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.643	4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
5.644	7755	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
5.645	7756	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.646	7757	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.647	7758	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.648	7759	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5.649	7760	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.650	7762	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.651	7763	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5.652	7764	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
5.653	7765	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
5.654	7766	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
5.655	7767	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
5.656	7768	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
5.657	7769	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
5.658	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.659	4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
5.660	4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
5.661	7122	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah						
5.662	7770	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5.663	4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
5.664	7771	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.665	7772	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya
5.666	7773	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
5.667	7774	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
5.668	7775	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
5.669	7776	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
5.670	7777	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
5.671	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.672	4.04.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah						
5.673	4.04.17.01	Penyusunan analisa standar belanja						
5.674	6668	Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku						

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.675	6984	Jumlah Penyusunan Analisa Standar Belanja	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
5.676	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.677	4.04.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD						
5.678	6668	Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku						
5.679	6669	Jumlah rancangan peraturan daerah APBD	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.07	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD
5.680	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.681	4.04.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD						
5.682	12383	Jumlah peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
5.683	6668	Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku						
5.684	7019	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
5.685	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.686	4.04.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD						
5.687	12384	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.688	6668	Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku						
5.689	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.690	4.04.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD						
5.691	6668	Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku						
5.692	7020	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran
5.693	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.694	4.04.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah						
5.695	12386	Jumlah Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan
5.696	6668	Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku						
5.697	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.698	4.04.17.20	Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur						
5.699	12387	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.700	6668	Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku						
5.701	7023	Jumlah sistem informasi manajemen keuangan daerah						
5.702	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.703	4.04.17.24	Rekonsiliasi Keuangan Daerah						
5.704	12388	Jumlah Rekonsiliasi Keuangan Daerah						
5.705	6668	Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku						
5.706	9327	Jumlah Rekonsiliasi Keuangan Daerah	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.07	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
5.707	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.708	4.04.17.26	Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Penyertaan Modal						
5.709	12389	Jumlah Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Penyertaan Modal	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.11	Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial
5.710	6668	Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku						
5.711	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.712	4.04.17.28	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah						
5.713	12390	jumlah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
5.714	6668	Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku						
5.715	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.716	4.04.17.29	Pengelolaan, Pengadministrasian Usulan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah						
5.717	12391	Jumlah Usulan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran
5.718	6668	Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku						
5.719	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.720	4.04.17.35	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah						
5.721	4128	Jumlah pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
5.722	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.723	4.04.17.37	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan						
5.724	4137	Jumlah Pengelolaan Perbendaharaan	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah
5.725	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.726	4.04.17.39	Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota						
5.727	6668	Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.728	7028	Jumlah bantuan keuangan kepada kabupaten/kota	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.01.05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
5.729	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.730	4.04.17.42	Peningkatan manajemen aset/barang daerah						
5.731	4179	Jumlah aset yang dilakukan pemanfaatan BMD dan penilaian pemanfaatan BMD	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah
5.732	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.733	4.04.17.43	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						
5.734	12396	Jumlah pelayanan publik terlayani melalui sistem informasi teknologi	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5.735	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.736	4.04.17.44	Penyusunan Standarisasi dan Kebutuhan BMD						
5.737	12397	Jumlah Buku Standarisasi dan Kebutuhan BMD						
5.738	7010	Jumlah buku standarisasi harga dan kebutuhan BMD	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
5.739	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.740	4.04.17.46	Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD						
5.741	7015	Jumlah laporan BUMD dan BLUD	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.05	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
5.742	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.743	4.04.17.47	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD						
5.744	12399	Dokumen Rancangan KUAPPAS, KUA-PPAS, Rancangan Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.01	Penyusunan KUA dan PPAS
5.745	7208	Jumlah Dokumen Pendanaan Pembangunan Daerah (KUA-PPAS, KUPA-PPAS, Aplikasi SIPPD)						
5.746	4.04.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota						
5.747	4.04.18.01	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota						
5.748	12400	Jumlah Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kab/Kota	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.02	Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
5.749	6669	Jumlah rancangan peraturan daerah APBD						
5.750	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.751	4.04.18.02	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota						
5.752	12401	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.02	Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
5.753	6669	Jumlah rancangan peraturan daerah APBD						
5.754	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.755	4.04.18.07	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota						

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.756	12402	Jumlah Terevaluasinya Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.04	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5.757	6669	Jumlah rancangan peraturan daerah APBD						
5.758	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.759	4.04.18.08	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Kab/Kota						
5.760	6669	Jumlah rancangan peraturan daerah APBD						
5.761	7032	Jumlah terevaluasinya rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan penjabaran APBD Kabupaten/Kota	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.04	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5.762	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.763	4.04.18.09	Pembinaan dan Fasilitasi APBD Kabupaten/ Kota						
5.764	12404	Jumlah Terbinanya fasilitas APBD Kab/Kota	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
5.765	6669	Jumlah rancangan peraturan daerah APBD						
5.766	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.767	4.04.18.11	Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi						
5.768	6669	Jumlah rancangan peraturan daerah APBD						
5.769	7034	Jumlah dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak provinsi	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
5.770	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.771	4.04.22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah						
5.772	4.04.22.01	Persertifikatan dan Pengamanan Aset Daerah						
5.773	12357	Jumlah Pengamanan dan Pensertifikatan Barang Milik Daerah						
5.774	4188	Jumlah Pengamanan dan Pensertifikatan Barang Milik Daerah	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
5.775	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.776	4.04.22.04	Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan						
5.777	12407	Jumlah Prasarana Fisik Pemerintah Yang direhab/diperbaiki/dipelihara	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
5.778	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.779	4.04.22.05	Penghapusan, Penilaian, Penjualan dan Peyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Daerah						
5.780	12408	Jumlah Aset Yang telah dihapuskan, dinilai dan Pergub tentang aset	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5.781	974	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas						
5.782								

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.783	4.05.01	- Badan Kepegawaian Daerah						
5.784	4.05	Kepegawaian						
5.785	4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
5.786	4.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
5.787	12288	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.788	12289	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.789	12290	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
5.790	12291	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
5.791	12293	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5.792	12294	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5.793	12295	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
5.794	12296	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
5.795	12297	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.796	4363	Jumlah Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun yang terselesaikan						
5.797	4364	Jumlah GUILS/TUP yang diselesaikan						
5.798	7694	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.799	7695	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.800	7696	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.801	7697	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.802	7698	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5.803	7699	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.804	7700	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.805	7701	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.806	7702	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.807	7703	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.808	912	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran						
5.809	4.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
5.810	4.05.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.811	4365	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor						
5.812	7704	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
5.813	7705	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
5.814	7706	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.815	7707	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5.816	7708	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.817	7709	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.818	7710	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
5.819	7711	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.820	949	Jumlah peralatan sarana dan prasarana kantor						
5.821	4.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
5.822	4366	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor						
5.823	7712	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
5.824	7713	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.825	7714	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5.826	7715	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.827	7716	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5.828	7717	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.829	7718	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5.830	7719	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.831	7720	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5.832	7721	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
5.833	7722	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
5.834	7723	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
5.835	7724	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
5.836	7725	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
5.837	7726	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
5.838	954	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.839	4.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
5.840	4.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
5.841	7727	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5.842	963	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						
5.843	964	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah						
5.844	966	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat, kegiatan/pelatihan dan tamu)						
5.845	4.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
5.846	2520	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis dilingkungan BKD Prov. Kalimantan						
5.847	2521	Jumlah Pakaian Dinas						
5.848	2526	Jumlah Sosialisasi Peraturan Kepegawaian						
5.849	4367	Jumlah PNS dilingkungan BKD yang mengikuti Bimtek/Diklat Teknis/Fungsional						
5.850	4368	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas						
5.851	7728	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.852	7729	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
5.853	7730	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
5.854	7731	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
5.855	7732	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
5.856	7733	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
5.857	7734	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
5.858	4.05.09.03	Sinkronisasi dan Pemantapan ASN						
5.859	2526	Jumlah Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5.860	4369	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Kepegawaian						
5.861	4.05.09.04	Pengembangan Assessment Center						
5.862	7288	Jumlah PNS yang mengikuti pengukuran dan penilaian kompetensi pegawai	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03	Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.03	Pengembangan Assessment Center
5.863	7290	Jumlah laporan pemetaan kompetensi	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03	Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.03	Pengembangan Assessment Center
5.864	4.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
5.865	4.05.10.01	Penyusunan Dokumen dan Perencanaan Anggaran						
5.866	1012	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran						
5.867	2523	Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan						
5.868	2524	Jumlah Dokumen DPA dan DPA Perubahan						

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.869	2527	Jumlah Dokumen Renstra dan Reviu Renstra						
5.870	2528	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan						
5.871	4022	Jumlah Dokumen RKT dan Perjanjian Kinerja						
5.872	7735	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
5.873	4.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
5.874	1019	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Renja						
5.875	1056	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Bulanan						
5.876	12544	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.877	2428	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
5.878	2525	Predikat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKD Prov. Kaltim						
5.879	3119	Jumlah Dokumen LPPD						
5.880	3136	Jumlah Dokumen Pengukuran Kinerja						
5.881	7736	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
5.882	4.05.15	Program Peningkatan Pelayanan Mutasi Kepegawaian						
5.883	4.05.15.04	Pengelolaan Mutasi ASN						
5.884	10348	Jumlah usulan pindah PNS antar Pemerintah Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terselesaikan	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02	Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.07	Pengelolaan Mutasi ASN
5.885	10351	Jumlah usulan pindah PNS dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi Kaltim keluar Wilayah Prov. Kaltim yang terselesaikan	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02	Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.07	Pengelolaan Mutasi ASN
5.886	10353	Persentase usulan pindah PNS dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi/ Kementerian diluar Prov. Kaltim ke Pemerintah Kab/Kota didalam Wilayah Prov. Kaltim yang terselesaikan	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02	Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.07	Pengelolaan Mutasi ASN
5.887	10358	Persentase usulan pindah PNS dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi/ Kementerian diluar Prov. Kaltim ke Pemerintah Prov. Kaltim yang terselesaikan	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02	Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.07	Pengelolaan Mutasi ASN
5.888	10360	Persentase usulan pindah PNS dari Pemerintah Kab/Kota di Wilayah Prov. Kaltim ke Pemerintah Prov. Kaltim yang terselesaikan	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02	Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.07	Pengelolaan Mutasi ASN
5.889	10362	Persentase usulan pindah PNS antar unit kerja/perangkat daerah di lingkungan pemprov. kaltim	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02	Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.07	Pengelolaan Mutasi ASN
5.890	7238	Persentase usulan PNS yang pindah antar Pemerintah Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terselesaikan						
5.891	7239	Persentase usulan PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi Kaltim keluar Wilayah Prov. Kaltim yang terselesaikan						
5.892	7240	Persentase usulan PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi/Kementerian diluar Prov. Kaltim ke Pemerintah Kab/Kota didalam Wilayah Prov. Kaltim yang terselesaikan						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.893	7242	Persentase usulan PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi/Kementerian diluar Prov. Kaltim ke Pemerintah Prov. Kaltim yang terselesaikan						
5.894	7243	Persentase usulan PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota di Wilayah Prov. Kaltim ke Pemerintah Prov. Kaltim yang terselesaikan						
5.895	7244	Persentase usulan PNS yang pindah antar unit kerja/perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terselesaikan						
5.896	4.05.15.05	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						
5.897	11217	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan kenaikan pangkat	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02	Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
5.898	7246	Jumlah SK Kenaikan Pangkat (Reguler) yang diterbitkan	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02	Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
5.899	7247	Persentase usulan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Provinsi Gol. IV/b kebawah yang terselesaikan	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02	Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
5.900	7248	Persentase usulan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Provinsi Gol. IV/c keatas yang terselesaikan	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02	Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
5.901	7250	Persentase Usulan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Kab/Kota Gol. IV/b kebawah yang terselesaikan	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02	Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
5.902	7251	Persentase Usulan Kenaikan Pangkat bagi PNS Kab/Kota Gol. IV/c keatas yang terselesaikan	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02	Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
5.903	4.05.15.06	Pengembangan Karir dan Promosi ASN						
5.904	10247	Jumlah PNS yang direkomendasi untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Kab/Kota	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04	Pengembangan Karir ASN	5.03.02.1.04.01	Pengembangan Karir dan Promosi ASN
5.905	10251	Jumlah PNS Kab/Kota yang direkomendasi untuk menduduki Jabatan Struktural yang menangani Administrasi Kependudukan	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04	Pengembangan Karir ASN	5.03.02.1.04.01	Pengembangan Karir dan Promosi ASN
5.906	4392	Jumlah PNS yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04	Pengembangan Karir ASN	5.03.02.1.04.01	Pengembangan Karir dan Promosi ASN
5.907	4526	Jumlah PNS yang diangkat dalam Jabatan Administrator	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04	Pengembangan Karir ASN	5.03.02.1.04.01	Pengembangan Karir dan Promosi ASN
5.908	4527	Jumlah PNS yang diangkat dalam Jabatan Pengawas	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04	Pengembangan Karir ASN	5.03.02.1.04.01	Pengembangan Karir dan Promosi ASN
5.909	7252	Persentase ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)						
5.910	7253	Persentase ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)						
5.911	7254	Persentase ASN yang menduduki Jabatan Administrator (Eselon III)						
5.912	7255	Persentase ASN yang menduduki Jabatan Pengawas (Eselon IV)						
5.913	4.05.16	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur						
5.914	4.05.16.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						
5.915	4390	Jumlah PNS yang melaksanakan Tugas Belajar	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03	Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.07	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
5.916	4391	Jumlah PNS yang diusulkan melaksanakan Diklat Struktural, Diklat Prajabatan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis lainnya	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03	Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.07	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
5.917	4523	Jumlah PNS yang melaksanakan Ijin Belajar	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03	Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.07	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
5.918	7256	Persentase usulan PNS Tugas Belajar yang diproses						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.919	7257	Persentase usulan PNS Ijin Belajar yang diproses						
5.920	7259	Jumlah PNS yang diusulkan untuk mengikuti Diklat Struktural						
5.921	7260	Jumlah PNS yang diusulkan untuk mengikuti Diklat Fungsional						
5.922	7261	Jumlah PNS yang diusulkan untuk mengikuti Diklat Teknis						
5.923	7262	Jumlah PNS yang diusulkan untuk mengikuti Diklat Prajabatan						
5.924	4.05.16.05	Pengelolaan Sertifikasi Jabatan ASN						
5.925	11253	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan manajemen ASN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03	Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.06	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
5.926	11257	Jumlah sertifikat telah mengikuti pelatihan manajemen ASN yang diterbitkan	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03	Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.06	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
5.927	11259	Jumlah sertifikat kompeten bagi yang lulus uji kompetensi sesuai dengan kualifikasi/jenjang jabatannya	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03	Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.06	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
5.928	7263	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang tersertifikasi						
5.929	7264	Persentase Jabatan Fungsional yang tersertifikasi						
5.930	7265	Persentase Jabatan Pelaksana yang tersertifikasi						
5.931	4.05.16.06	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional						
5.932	11225	Persentase data jabatan fungsional yang terupdate	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03	Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.09	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional
5.933	11227	Persentase pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, dan promosi yang terselesaikan	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03	Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.09	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional
5.934	11228	Persentase pemberhentian dari jabatan fungsional yang terselesaikan	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03	Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.09	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional
5.935	11229	Persentase pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional yang terselesaikan	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03	Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.09	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional
5.936	7266	Persentase usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama yang terselesaikan						
5.937	7267	Persentase usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain yang terselesaikan						
5.938	7268	Persentase usulan Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing yang terselesaikan						
5.939	7269	Persentase usulan Pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui promosi yang terselesaikan						
5.940	7271	Persentase usulan Pemberhentian PNS dari jabatan fungsional yang terselesaikan						
5.941	7272	Persentase usulan Pengangkatan PNS kembali dalam jabatan fungsional yang terselesaikan						
5.942	4.05.17	Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin Pegawai						
5.943	4.05.17.03	Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN						
5.944	11268	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03	Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.945	4397	Persentase PNS yang mencapai target kinerja diatas 80%	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03	Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN
5.946	4398	Jumlah PNS yang mendapatkan KGB	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03	Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN
5.947	4399	Jumlah PNS yang menerima SLKS	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03	Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN
5.948	4400	Jumlah PNS Pra Pensiun yang mengikuti seminar dan konseling	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03	Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN
5.949	7278	Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan terhadap capaian kinerja						
5.950	4.05.17.04	Pembinaan Disiplin ASN						
5.951	1112	Persentase Tingkat Kehadiran PNS						
5.952	11280	Persentase penanganan kasus ASN yang terselesaikan	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.05	Pembinaan ASN	5.03.02.1.05.01	Pembinaan Disiplin ASN
5.953	11281	Jumlah surat cuti ASN yang diterbitkan	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.05	Pembinaan ASN	5.03.02.1.05.01	Pembinaan Disiplin ASN
5.954	11283	Jumlah laporan tingkat kehadiran PNS	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.05	Pembinaan ASN	5.03.02.1.05.01	Pembinaan Disiplin ASN
5.955	7280	Persentase Penanganan Kasus yang terselesaikan						
5.956	7281	Persentase usulan Cuti PNS yang diproses						
5.957	7283	Persentase usulan perceraian pegawai yang terselesaikan						
5.958	4.05.17.05	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN						
5.959	7284	Jumlah fasilitasi kegiatan seni dan budaya	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03	Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)
5.960	7285	Jumlah Kegiatan MTQ	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03	Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)
5.961	7286	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan keolahragaan	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03	Peningkatan Kapasitas ASN	5.03.02.1.03.04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)
5.962	7287	Jumlah pendampingan bantuan hukum						
5.963	4.05.18	Program Pengembangan Data dan Informasi ASN						
5.964	4.05.18.03	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN						
5.965	11288	Jumlah laporan seleksi penerimaan CPNSD	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02	Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN
5.966	11289	Jumlah laporan pelaksanaan pengambilan sumpah janji PNS	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02	Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN
5.967	11291	Jumlah SK PNS yang diterbitkan	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02	Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN
5.968	4381	Jumlah PNS yang Melaksanakan Ujian Dinas	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02	Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN
5.969	4382	Jumlah PNS yang melaksanakan Ujian Penyesuaian Ijazah	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02	Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN
5.970	7225	Jumlah kegiatan pelaksanaan seleksi Calon ASN						
5.971	7226	Jumlah kegiatan pelaksanaan sumpah janji ASN						
5.972	7227	Jumlah kegiatan Ujian Dinas yang dilaksanakan						
5.973	7228	Jumlah kegiatan Ujian Penyesuaian Ijazah yang dilaksanakan						
5.974	7229	Persentase usulan kartu TASPEN, KARPEG dan Karis/Karsu yang terselesaikan	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02	Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.975	4.05.18.04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun						
5.976	11295	Jumlah SK Pensiun ASN yang diterbitkan	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02	Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun
5.977	7231	Persentase usulan pemberhentian ASN yang terselesaikan	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02	Administrasi Kepegawaian	5.03.02.1.02.01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN
5.978	7232	Persentase usulan pesiun ASN yang terselesaikan						
5.979	4.05.18.05	Pengelolaan Data dan Informasi ASN						
5.980	11303	Persentase data dan informasi ASN yang terupdate	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.01	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	5.03.02.1.01.04	Pengelolaan Data Kepegawaian
5.981	11304	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengembangan sistem informasi kepegawaian	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.01	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	5.03.02.1.01.04	Pengelolaan Data Kepegawaian
5.982	11305	Jumlah laporan informasi kegiatan kepegawaian yang dipublikasikan	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.01	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	5.03.02.1.01.04	Pengelolaan Data Kepegawaian
5.983	7233	Persentase pemutakhiran data kepegawaian						
5.984	7234	Jumlah berita kepegawaian yang terupdate						
5.985	7235	Jumlah pengembangan sistem aplikasi kepegawaian						
5.986	7236	Jumlah buku profil layanan kepegawaian						
5.987	7237	Jumlah buku profil dan buku saku kepegawaian yang terselesaikan						
5.988								
5.989	4.06.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia							
5.990	4.06	Pendidikan dan Pelatihan						
5.991	4.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
5.992	4.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
5.993	12308	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.994	12309	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.995	12310	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
5.996	12311	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
5.997	12313	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5.998	12314	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5.999	12315	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
6.000	12316	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
6.001	12317	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6.002	6325	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)						
6.003	7553	Jumlah Surat yang di Administrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
6.004	7554	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.005	7555	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
6.006	7556	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6.007	7559	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6.008	7563	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.009	7566	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6.010	7568	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.011	7569	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.012	7570	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
6.013	4.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
6.014	4.06.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
6.015	6602	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu						
6.016	7571	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.20	Pengadaan Mobil Jabatan
6.017	7572	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
6.018	7573	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
6.019	7574	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
6.020	7575	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
6.021	7576	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
6.022	7577	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur
6.023	7578	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6.024	4.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
6.025	6602	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu						
6.026	7579	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
6.027	7580	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
6.028	7581	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6.029	7582	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
6.030	7583	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6.031	7584	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
6.032	7585	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
6.033	7586	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
6.034	7587	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
6.035	7588	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
6.036	7589	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
6.037	7590	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
6.038	7591	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
6.039	7592	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
6.040	7593	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
6.041	4.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
6.042	4.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
6.043	2768	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan						
6.044	7594	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
6.045	4.06.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
6.046	6605	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi						
6.047	7595	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
6.048	7596	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
6.049	7597	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
6.050	7598	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
6.051	7599	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
6.052	7600	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
6.053	7601	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Pelaksanaan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
6.054	4.06.10	Program Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah						
6.055	4.06.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
6.056	6607	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD						
6.057	7602	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
6.058	4.06.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
6.059	6607	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD						
6.060	7603	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
6.061	7604	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.062	4.06.15	Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan						
6.063	4.06.15.02	Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi						
6.064	11085	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Bagi Bangkom Manajerial dan FUNgsional yang diterbitkan	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
6.065	6621	Persentase Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi						
6.066	4.06.15.03	Sertifikasi Kompetensi						
6.067	11088	Jumlah Sertifikasi Kompetensi yang diterbitkan bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
6.068	6624	Persentase ASN yang telah memiliki Sertifikasi Kompetensi dan LSP PDN						
6.069	4.06.15.04	Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama						
6.070	11089	Pelaksanaan Pengelolaan KElembagaan, TENaga Pengembang KOMPetensi dan Sumber Belajar	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
6.071	6627	Persentase Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama						
6.072	4.06.16	Program Pengembangan Kompetensi Teknis						
6.073	4.06.16.01	Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi						
6.074	11090	Jumlah ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
6.075	11092	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana bagi Pengembangan KOMPetensi Teknis yang diterbitkan						
6.076	11093	Pelaksanaan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan PELaporan bagi Pengembangan Kompetensi Teknis						
6.077	6632	Persentase ASN yang telah memiliki Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi						
6.078	4.06.16.02	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi						
6.079	11090	Jumlah ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi						
6.080	11092	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana bagi Pengembangan KOMPetensi Teknis yang diterbitkan						
6.081	11093	Pelaksanaan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan PELaporan bagi Pengembangan Kompetensi Teknis						

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
6.082	6633	Persentase ASN yang telah memiliki Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
6.083	4.06.16.03	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang						
6.084	11090	Jumlah ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi						
6.085	11092	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana bagi Pengembangan KOMPETENSI Teknis yang diterbitkan						
6.086	11093	Pelaksanaan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan PELaporan bagi Pengembangan Kompetensi Teknis						
6.087	6635	Persentase ASN yang telah memiliki Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
6.088	4.06.16.04	Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi (Kontribusi)						
6.089	6632	Persentase ASN yang telah memiliki Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
6.090	4.06.16.05	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi (Kontribusi)						
6.091	6633	Persentase ASN yang telah memiliki Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
6.092	4.06.16.06	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang (Kontribusi)						
6.093	6635	Persentase ASN yang telah memiliki Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
6.094	4.06.17	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						
6.095	4.06.17.03	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan						
6.096	11085	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Bagi Bangkom Manajerial dan Fungsional yang diterbitkan						
6.097	11088	Jumlah Sertifikasi Kompetensi yang diterbitkan bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota						
6.098	11089	Pelaksanaan Pengelolaan KElembagaan, TEtnaga Pengembang KOMPETENSI dan Sumber Belajar						

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
6.099	11095	Jumlah ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
6.100	11096	Jumlah Laporan Cetak Biru (Blue Print) LSP-PDN	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
6.101	11098	Jumlah Kerjasama dengan Lembaga/Organisasi dan Instansi	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
6.102	11099	Pelaksanaan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan bagi Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
6.103	6638	Persentase ASN yang telah Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan						
6.104	4.06.17.04	Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi						
6.105	11085	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Bagi Bangkom Manajerial dan Fungsional yang diterbitkan						
6.106	11088	Jumlah Sertifikasi Kompetensi yang diterbitkan bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota						
6.107	11089	Pelaksanaan Pengelolaan KElembagaan, TENaga Pengembang KOMPetensi dan Sumber Belajar						
6.108	11095	Jumlah ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
6.109	11098	Jumlah Kerjasama dengan Lembaga/Organisasi dan Instansi						
6.110	11099	Pelaksanaan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan bagi Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						
6.111	6640	Persentase Pejabat yang telah Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
6.112	4.06.17.05	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional						
6.113	11085	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Bagi Bangkom Manajerial dan Fungsional yang diterbitkan						
6.114	11088	Jumlah Sertifikasi Kompetensi yang diterbitkan bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota						
6.115	11089	Pelaksanaan Pengelolaan KElembagaan, TENaga Pengembang KOMPetensi dan Sumber Belajar						
6.116	11095	Jumlah ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
6.117	11098	Jumlah Kerjasama dengan Lembaga/Organisasi dan Instansi						

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
6.118	11099	Pelaksanaan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan bagi Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						
6.119	6642	Persentase ASN yang telah Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
6.120	4.06.17.06	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan (Kontribusi)						
6.121	6710	Jumlah Peserta Diklat Pelatihan Dasar Gol. II dan III	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
6.122	4.06.17.07	Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi (Kontribusi)						
6.123	6712	Jumlah peserta Pengembangan Kompetensi untuk Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
6.124								
6.125	4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan						
6.126	4.07	Penelitian dan Pengembangan						
6.127	4.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
6.128	4.07.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
6.129	12318	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.130	12319	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.131	12320	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
6.132	12321	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang di verifikasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
6.133	12323	Jumlah laporan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
6.134	12324	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6.135	12325	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
6.136	12326	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
6.137	12327	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan	X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6.138	6569	Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.139	7416	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.140	7417	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.141	7418	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
6.142	7419	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

NO BARS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
6.143	7420	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6.144	7421	Jumlah Alat Tulis Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.145	7422	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6.146	7423	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.147	7424	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.148	7425	Jumlah Makanan dan Minuman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
6.149	4.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
6.150	4.07.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						
6.151	6563	Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana						
6.152	7434	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
6.153	7435	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
6.154	7436	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6.155	7437	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
6.156	7438	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6.157	7439	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
6.158	7440	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
6.159	7441	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
6.160	7442	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
6.161	7443	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
6.162	7444	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
6.163	7445	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
6.164	7446	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
6.165	7447	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
6.166	7448	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
6.167	4.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
6.168	4.07.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						
6.169	6909	Jumlah ASN Yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
6.170	7449	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.03	Administrasi Umum	X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
6.171	4.07.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
6.172	6565	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
6.173	7450	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
6.174	7452	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya
6.175	7454	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
6.176	7455	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
6.177	7456	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
6.178	7458	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
6.179	7461	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	X.XX.01.1.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
6.180	4.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
6.181	4.07.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
6.182	1485	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
6.183	7468	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
6.184	4.07.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
6.185	1496	Jumlah laporan evaluasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan						
6.186	7474	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
6.187	7551	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.188	4.07.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi						
6.189	4.07.23.02	Pengembangan teknologi informasi kelurahan						
6.190	1595	Persentase terselenggaranya program pemanfaatan teknologi informasi kelurahan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
6.191	1596	Jumlah artikel Jurnal riset pembangunan dan buletin lembusuaana						
6.192	4.07.23.03	Rakorda Kelurahan						
6.193	1737	Persentase terselenggaranya kegiatan rakorda kelurahan						
6.194	4.07.41	Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan						
6.195	4.07.41.01	Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan						
6.196	10715	Persentase Hasil Kelitbang bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Pemprov Kaltim, Pemkab/kota se- Kaltim	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	5.05.02.1.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6.197	10719	Jumlah Hasil Kelitbang bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang diseminarkan/dipublikasikan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	5.05.02.1.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
6.198	10724	Jumlah Dokumen Data Lapangan Penelitian, Pengembangan perakyasaan, penerapan dan pengoperasian bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang diolah	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	5.05.02.1.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6.199	1191	Jumlah laporan litbang sub bidang ekonomi yang dilaksanakan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	5.05.02.1.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6.200	1937	Jumlah laporan litbang sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
6.201	1938	Jumlah laporan sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana yang dilaksanakan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	5.05.02.1.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
6.202	4.07.41.02	Penelitian mandiri bidang Ekonomi dan Pembangunan						
6.203	1192	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan						
6.204	4.07.47	Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi						
6.205	4.07.47.01	Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi						
6.206	10719	Jumlah Hasil Kelitbangan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang diseminarkan/dipublikasikan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
6.207	10738	Jumlah Hasil Kelitbangan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang diseminarkan/dipublikasikan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
6.208	10746	Jumlah Hasil Kelitbangan bidang Badan Usaha Milik Daerah yang diseminarkan/ dipublikasikan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
6.209	10756	Jumlah Hasil Kelitbangan bidang Kelautan dan Perikanan yang diseminarkan/dipublikasikan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
6.210	10760	Jumlah Hasil Kelitbangan bidang Energi dan Sumberdaya Mineral yang diseminarkan/dipublikasikan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
6.211	10764	Jumlah Hasil Kelitbangan bidang Lingkungan Hidup yang diseminarkan/dipublikasikan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
6.212	10770	Jumlah Hasil Kelitbangan bidang Pekerjaan Umum yang diseminarkan/dipublikasikan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
6.213	10774	Jumlah Hasil Kelitbangan bidang Perhubungan yang diseminarkan/ dipublikasikan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
6.214	10778	Jumlah Hasil Kelitbangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diseminarkan/dipublikasikan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
6.215	10782	Presentase Hasil Kelitbangan bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Pemprov Kaltim,	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
6.216	1849	Jumlah laporan litbang sub bidang inovasi dan pengembangan teknologi yang dilaksanakan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
6.217	1949	Jumlah laporan litbang sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
6.218	1953	Jumlah laporan litbang sub bidang diseminasi kelitbangan yang dilaksanakan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
6.219	4.07.47.02	Penelitian mandiri bidang Inovasi dan Teknologi						
6.220	1867	jumlah laporan pelaksanaan penelitian mandiri bidang inovasi dan teknologi						
6.221	4.07.48	Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan						

NO BARSIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
6.222	4.07.48.01	Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan						
6.223	10889	Jumlah Laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.01	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
6.224	10892	Jumlah Laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.02	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
6.225	10894	Jumlah Laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.03	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
6.226	10895	Jumlah Laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.04	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
6.227	10898	Jumlah Laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.05	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
6.228	10901	Jumlah Laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.06	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
6.229	10903	Jumlah Laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.07	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
6.230	10905	Jumlah Laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.08	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
6.231	10906	Jumlah Laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.09	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
6.232	10909	Jumlah Laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.10	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa
6.233	10913	Jumlah Laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.11	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
6.234	10915	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
6.235	10916	Jumlah Laporan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
6.236	10919	Jumlah Laporan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.14	Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
6.237	10921	Jumlah Laporan Fasilitas Pemberian Rekomendasi Penelitian Bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian Oleh Instansi yang Berwenang	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.15	Fasilitas Pemberian Rekomendasi Penelitian Bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian Oleh Instansi yang Berwenang
6.238	10923	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
6.239	10924	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.1.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPD 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
			1	2	3	4	5	6
6.240	10925	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.1.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
6.241	10927	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.1.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
6.242	10928	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.1.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
6.243	10930	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.1.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
6.244	10932	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.1.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6.245	10934	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.1.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.246	10935	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.1.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
6.247	10936	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.1.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
6.248	10937	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.1.02.11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi
6.249	1848	Jumlah laporan litbang sub bidang kebudayaan, pemberdayaan dan masyarakat desa yang dilaksanakan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.1.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.250	1941	Jumlah laporan litbang sub bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dilaksanakan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.1.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
6.251	1943	Jumlah laporan litbang sub bidang sosial dan budaya yang dilaksanakan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
6.252	4.07.48.02	Penelitian mandiri bidang Sosial dan Pemerintahan						
6.253	1860	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang sosial dan pemerintahan yang dilaksanakan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
6.254								





BAPPEDA
Provinsi Kalimantan Timur

Alamat Kantor : Jl. Kesuma Bangsa No. 02
Samarinda 75123, Telp : 0541 - 741044